

## Kecemasan dalam Penggunaan *Software* Akuntansi dari Perspektif Gender dan Pengaruhnya terhadap Keahlian Pemakai dengan *Locus Of Control* sebagai Variabel Moderasi

**MADANI HATTA \***

**FENNY MARIETZA**

*Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu*

**Abstract:** *This study aims to examine the effect of anxiety on the expertise of computing the user in using software or accounting programs with locus of control as a moderating variable. The study also examined whether there are differences in anxiety levels of computing between male and female employees.*

*The data used in this study is the primary data. Primary data obtained from questionnaires (questionnaires) are distributed to the employees of the accounting and cashier at a trading company in the city of Bengkulu. The number of questionnaires which were distributed 90 questionnaires, but only 57 questionnaires that can be processed. Tools of analysis in this study is a simple regression, moderated regression analysis (MRA) and independent sample t-test with SPSS version 16.0.*

*The results of this study indicate that anxiety negatively affect the computing skills of computer users. Locus of control proved to be a moderating variable that affects the relationship between anxiety computing and user expertise. The results also indicate that there is no difference in anxiety levels of computing between male and female employees.*

**Keywords:** *Computer anxiety, computer self efficacy, locus of control and gender*

---

\* Corresponding author: madani.unib2006@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi komputer merupakan komponen penting dari sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi tepat waktu. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengolahan data. Oleh karena itu teknologi dapat memberikan nilai tambah untuk organisasi.

Praktik akuntansi dalam dunia bisnis telah bergeser secara radikal sebagai akibat kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk dari perubahan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam pemrosesan data transaksi dari media kertas ke media elektronik seperti sistem akuntansi terkomputerisasi.

Dengan perubahan ini muncul berbagai macam perangkat lunak (*software*) akuntansi yang dapat membantu mempermudah pengolahan data transaksi keuangan suatu perusahaan tersebut. Berbagai macam perangkat lunak (*software*) akuntansi yang sudah dikenal saat ini antara lain *DacEasy Accounting*, *M.Y.O.B Accounting Plus*, *Zahir Small Business*, *Accurate Accounting* dan berbagai *software* akuntansi lainnya. Penggunaan *software* akuntansi akan mempersingkat waktu pengolahan data dan memiliki tingkat keakuratan yang jauh lebih baik.

Kecanggihan teknologi informasi akan sangat tidak berarti, jika pengguna teknologi tersebut tidak meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut (Wijaya dan Johan, 2005). Oleh karena itu dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk menanggapi perubahan teknologi, yaitu berupa keahlian pemakai dalam menggunakan komputer.

Kemampuan menggunakan komputer sangat tergantung pada karakteristik individual seperti sikap (*attitude*), kecemasan (*anxiety*), maupun cara berpikir (*cognitive style*). Setiap individu akan bersikap positif (*attitude*) terhadap kehadiran teknologi komputer, jika mereka merasakan manfaat teknologi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.

Manfaat yang dirasakan oleh pemakai komputer disebabkan oleh kemampuan setiap individu mengoperasikan komputer (*computer self-efficacy*) dan karena adanya dukungan organisasional. Sikap positif seseorang untuk menerima keberhasilan teknologi komputer karena dilandasi oleh keyakinan bahwa komputer dapat membantu pekerjaannya sehingga timbul rasa suka pada komputer. Ketidaksukaan seseorang terhadap komputer dapat disebabkan oleh ketakutan dan kekhawatiran yang bersangkutan terhadap teknologi komputer (Igbaria dan Pasuraman, 1986).

Setiap individu yang mengalami kecemasan terhadap komputer (*computer anxiety*) akan merasakan manfaat komputer yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kegelisahan terhadap kehadiran komputer. Kegelisahan dan ketakutan seseorang terhadap kehadiran teknologi baru umumnya akan mendorong sikap negatif untuk menolak penggunaan teknologi informasi (Benbasat, 1992 dalam Sudaryono, 2004). Menurut Rifa dan Gudono (1999) kecemasan berkomputer mempunyai hubungan yang negatif terhadap keahlian seseorang dalam menggunakan komputer.

Ketakutan dan kekhawatiran individu muncul akibat konsep cara pandang individu terhadap keadaan saat ini. Indriantoro (1993) menyebutkan faktor penguasaan dan cara pandang individu sebagai faktor *locus of control*. Individu yang memiliki *locus of control* internal berpandangan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang dimilikinya. Individu dengan tipe tersebut menyikapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat perencanaan. *Locus of control* eksternal menyebabkan individu merasa tidak mampu menguasai keadaan sehingga timbul kecemasan yang akan menurunkan keahlian/kinerja individu. Menurut Bralove (1983) dalam Wijaya (2005), apabila *internal locus of control* berperan dalam diri individu, kecemasan yang dialami dapat diminimalisasi namun apabila yang berperan adalah *eksternal locus of control* maka kecemasan akan meningkat.

Beberapa temuan menunjukkan adanya pengaruh jenis kelamin terhadap kecemasan berkomputer. Menurut Rustiana (2004), pendekatan sosialisasi gender (*gender socialization approach*) menyatakan bahwa pria dan wanita membawa perbedaan nilai dan perlakuan dalam pekerjaannya. Pria akan melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan, termasuk untuk bertindak secara kreatif dan inovatif, sedangkan wanita dalam melakukan tugas-tugasnya lebih mementingkan aspek harmonisasi dengan relasi pekerjaannya dan kurang menunjukkan aspek kreatif dan inovatif. Rifa dan Gudono (1999) dan Rustiana (2004) menemukan bahwa karyawan pria memiliki keahlian dalam EUC yang lebih tinggi dibandingkan karyawan wanita.

Penelitian-penelitian mengenai kecemasan berkomputer selama ini masih difokuskan pada kecemasan dalam menggunakan komputer. Hal ini menjadi kurang relevan jika dikaitkan dengan situasi saat ini karena para pengguna sudah sangat terbiasa untuk menggunakan komputer dalam aktivitas mereka sehari-hari. Namun demikian, penelitian mengenai kecemasan berkomputer yang dikaitkan dengan pemakaian program aplikasi komputer khusus dan *software* masih sedikit yang dilakukan.

Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang memiliki transaksi keuangan yang cukup banyak seperti yang terkait dengan pembelian, pencatatan persediaan, penjualan dan penerimaan kas. Beberapa perusahaan dagang yang ada di Kota Bengkulu telah mengembangkan atau membeli *software* atau program akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi-transaksi menjadi informasi akuntansi.

Pengembangan dan penggunaan *software* akuntansi ini tentu saja dapat menimbulkan masalah keprilakuan terutama yang terkait dengan sikap dari pemakai *software* tersebut, salah satunya adalah masalah kecemasan berkomputer. Banyaknya fitur-fitur dan aplikasi serta bahasa program yang terkadang menggunakan bahasa inggris menjadikan para pemakai merasa cemas dan khawatir dalam menggunakannya.



Hasil penelitian-penelitian yang dikemukakan di atas masih saling kontradiksi. Beberapa temuan menunjukkan adanya pengaruh jenis kelamin terhadap kecemasan berkomputer. Hal inilah yang memotivasi dilakukannya penelitian ini, agar dapat diperoleh bukti tambahan mengenai bagaimana pengaruh kecemasan berkomputer terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* dan program akuntansi dengan memasukkan variabel moderasi *locus of control* pada karyawan bagian akuntansi di perusahaan dagang di Kota Bengkulu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah kecemasan berkomputer berpengaruh negatif terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* akuntansi?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kecemasan berkomputer antara pengguna pria dan wanita dalam menggunakan *software* akuntansi ?
3. Apakah *locus of control* memoderasi pengaruh kecemasan berkomputer terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* akuntansi ?

## II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Perilaku Interpersonal

Menurut Triandis (1971), penggunaan komputer oleh seseorang karyawan dalam situasi optional (bukan keharusan) akan dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) dalam menggunakan komputer, norma social (*sosial norm*) di tempat kerja yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan kebiasaan (*habits*) dalam menggunakan komputer. Sikap seseorang terdiri atas komponen kognisi, afeksi, dan komponen-komponen perilaku (*behavioral components*). Kognisi berkaitan dengan pengenalan seseorang terhadap lingkungannya sehingga

menimbulkan suatu keyakinan (*beliefs*). Dalam konteks penerapan komputer kemungkinan seseorang mempunyai keyakinan bahwa penggunaan komputer akan memberikan manfaat bagi dirinya dan pekerjaannya. Keyakinan tersebut diperoleh berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya.

Keinginan merupakan komponen perilaku yang mempengaruhi sikap seseorang. Keinginan kuat untuk mempelajari komputer mempengaruhi sikap positif seseorang terhadap teknologi komputer. Keinginan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan akan konsekuensi masa yang akan datang, sehingga menimbulkan afeksi seseorang yang dinyatakan dengan sikap suka atau tidak suka terhadap teknologi komputer.

## 2.2 Kecemasan Berkomputer

Kecemasan berkomputer merupakan suatu fenomena kecemasan yang terbentuk oleh perkembangan teknologi informasi. Indikasi kecemasan berkomputer menurut Gantz (1986) dalam Wijaya (2005) berupa takut membuat kesalahan, suka atau tidak suka mempelajari komputer, merasa bodoh, merasa diperhatikan orang lain saat membuat kesalahan, merasa merugikan kerja, serta merasa bingung secara total.

Kecemasan berkomputer berhubungan dengan kemampuan diri. Tingkat kecemasan berkomputer yang rendah menyebabkan individu mempunyai keyakinan kuat bahwa komputer bermanfaat baginya sehingga timbul rasa senang bekerja dengan komputer. Sikap kecemasan berkomputer yang tinggi dikarenakan menurut keyakinan teknologi komputer mendominasi atau mengendalikan kehidupan manusia (Indriantoro, 2000).

## 2.3 Keahlian Pemakai Komputer

Keahlian pemakai komputer yang dimaksud adalah kemampuan pemakai dalam hal aplikasi komputer, sistem operasi komputer, penanganan *files* dan perangkat keras, *software*, penyimpanan data dan penggunaan tombol *keyboard* (Indriantoro, 2000). Menurut Compeau dan Higgins (1995) keahlian didefinisikan sebagai *judgement* kapabilitas seseorang untuk

menggunakan komputer/ sistem informasi teknologi informasi. Didasarkan pada teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Bandura (1986), keahlian dapat didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu. Bandura (1986) menyatakan bahwa individu yang mempunyai perasaan *anxiety* yang tinggi menunjukkan kurangnya kemampuan diri. Jadi jika individu merasa cemas/*anxiety* dalam menggunakan komputer, maka orang tersebut memiliki keahlian yang rendah.

## 2.4 Teori Locus of Control

*Locus of control* merupakan keyakinan individu bahwa individu bisa mempengaruhi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupannya. Menurut Rotter (1966) *locus of control* terdiri dari dua bagian yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*. *Internal locus of control* adalah individu yang meyakini bahwa apa yang terjadi selalu berada dalam kontrolnya, dan selalu mengambil peran serta tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan *external locus of control* adalah individu yang meyakini bahwa kejadian dalam hidupnya berada di luar kontrolnya, yang melihat bahwa apa yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar, seperti misalnya kemujuran dan peluang (Rotter, 1966).

Menurut Bandura (1997) kecemasan terbentuk dari respon individu terhadap suatu masalah atau penguasaan individu terhadap masalah yang dihadapi. Bralove (1983) dalam Wijaya (2005) menjelaskan gejala yang muncul pada kecemasan berkomputer disebabkan oleh persepsi individu yang kurang baik. Persepsi individu yang kurang baik tersebut akan membentuk individu untuk melakukan pertahanan yang berlebihan sehingga termanifestasi dalam perilaku *computer anxiety*. Apabila *internal locus of control* berperan dalam diri individu, kecemasan yang dialami dapat diminimalisasi namun apabila yang berperan adalah *external locus of control* maka kecemasan akan meningkat.

## 2.5 Gender

Mosse dalam Wijaya (2005) mendefinisikan gender sebagai seperangkat peran yang dimainkan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang tersebut feminim atau maskulin. Penampilan, sikap, kepribadian, tanggung jawab keluarga adalah perilaku yang akan membentuk peran gender.

Menurut Matindas (1996) dalam Trisanti (1999), wanita cenderung lebih cemas dalam bekerja karena takut akan penilaian orang lain. Kecenderungan wanita untuk menjadi cemas dengan terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh Horner (1974) dalam Trisanti (1999) disebut dengan istilah *fear of success*. Harrison dan Rainer (1992) menemukan bahwa personil *End User Computing* pria mempunyai keahlian komputer yang lebih tinggi dari pada wanita.

## 2.6 Perangkat Lunak (*Software*) Akuntansi

Perangkat lunak (*software*) akuntansi merupakan perangkat lunak (*software*) yang dibuat untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan konsep modularitas atas serangkaian aktivitas yang serupa ke dalam modul-modul spesifik seperti pembelian (*Account Payable*), penjualan (*Account Receivable*), penggajian, buku besar, dan lain-lain. Perangkat lunak ini bisa merupakan perangkat lunak yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan, atau dibeli dari pihak ketiga yang menyediakannya, atau dapat pula merupakan kombinasi dari keduanya. Karena hal tersebut, kompleksitas dan kapabilitas perangkat lunak akuntansi menjadi sangat beragam bergantung pada kondisi lingkungan perusahaan yang akan menggunakannya.

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi terutama dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut harus diimbangi

oleh keahlian sumber daya penggunanya (*user*), termasuk akuntan dan asisten akuntan sebagai tenaga profesional.

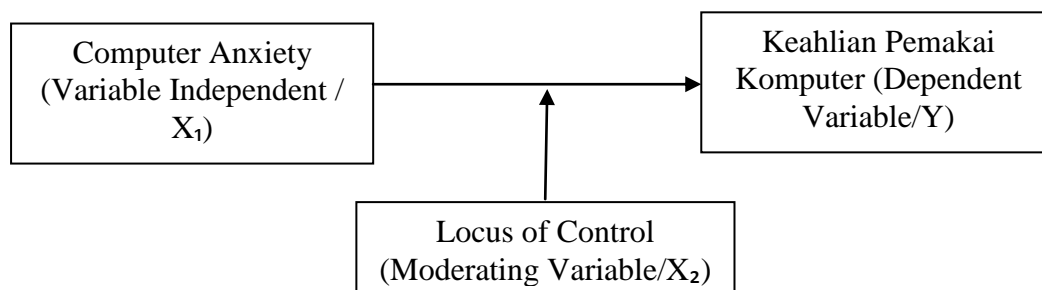
Salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keahlian adalah aspek perilaku. Keahlian seseorang dalam penggunaan komputer mempengaruhi kesuksesan penerapan teknologi dalam suatu organisasi. Kemampuan menggunakan komputer sangat tergantung pada karakteristik individual seperti sikap (*attitude*), kecemasan (*anxiety*), maupun cara berpikir (*cognitive style*). Todd dan Benbasat (1992) menemukan bahwa kecemasan dan ketakutan seseorang terhadap kehadiran teknologi baru umumnya akan mendorong sikap negatif untuk menolak teknologi tersebut.

Beberapa temuan menunjukkan adanya pengaruh jenis kelamin terhadap *computer anxiety*. Karyawan pria memiliki keahlian dalam EUC yang lebih tinggi dibandingkan karyawan wanita. Hal ini disebabkan karakteristik personaliti yang berbeda antara pria dan wanita. Harrison dan Rainer (1992) menemukan bahwa personil *End User Computing* pria mempunyai keahlian komputer yang lebih tinggi dari pada wanita. Gutek dan Bikson (1985) dalam Wijaya (2003) juga menemukan bahwa pria cenderung memiliki keahlian komputer yang lebih baik daripada wanita dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Rifa dan Gudono (1999), serta Indriantoro (2000) keahlian komputer berasosiasi negatif dengan sikap individu (*computer anxiety*) sehingga ada kemungkinan kecemasan berkomputer pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Colley *et al.* (1994) dalam Havelka (2003) menemukan kecemasan berkomputer pada pria lebih rendah dibandingkan wanita.

Ketakutan dan kekhawatiran individu muncul akibat konsep cara pandang individu terhadap keadaan saat ini. Indriantoro (1993) menyebutkan faktor penguasaan dan cara pandang individu sebagai faktor *locus of control*. *Eksternal locus of control* menyebabkan individu merasa tidak mampu menguasai keadaan sehingga timbul kecemasan (*anxiety*) yang akan menurunkan keahlian/kinerja individu. *Internal locus of control* akan menimbulkan

sikap positif seseorang terhadap komputer yang berakibat pada tingginya keahlian dalam menggunakan komputer. Sedangkan *eksternal locus of control* akan menimbulkan sikap negatif seseorang terhadap komputer yang berakibat pada rendahnya keahlian dalam menggunakan komputer. Berdasarkan uraian di atas, maka secara ringkas dapat digambarkan diagram model penelitian untuk hipotesis pertama dan ketiga sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** *Computer anxiety* berpengaruh secara negatif terhadap keahlian pemakai komputer.

**H2:** Terdapat perbedaan *computer anxiety* pemakai komputer pria dan wanita.

**H3:** *Locus of control* memoderasi pengaruh *computer anxiety* terhadap keahlian pemakai komputer.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan dagang di Bengkulu, dengan alasan bahwa karyawan yang bekerja pada perusahaan dagang tersebut dituntut memiliki keahlian menggunakan komputer sebagai sarana alat bantu mereka di dunia

kerja. Penentuan sampel ini dilakukan dengan melihat kesamaan karakteristik sampel yang akan diteliti, yaitu sama-sama karyawan perusahaan dagang.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *metode non probability* dengan *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang ditentukan, memilih kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Indrianto dan Soepomo, 2002).

### 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *computer anxiety*, keahlian pemakai komputer, *locus of control*, dan *gender*. Adapun yang dimaksud *computer anxiety* adalah kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir, cemas, atau ketakutan mengenai penggunaan komputer di masa sekarang dan di masa mendatang (Igbaria dan Parasuraman, 1989). Pengukuran *Computer anxiety* menggunakan CARS (*Computer Anxiety Rating Scale*) yang dikembangkan oleh Heinssen (1987) dalam Mas'ud (2004) yang terdiri dari 4 item.

Keahlian pemakai komputer didefinisikan sebagai keahlian pemakai (*user*) dalam hal aplikasi komputer, sistem operasi komputer, penanganan *file* dan perangkat keras, penyimpanan data dan penggunaan tombol *keyboard* (Indriantoro, 2000). Keahlian pemakai komputer diukur dengan CSE (*Computer Self-Efficacy Scale*) yang dikembangkan oleh Compeau dan Higgins (1991) dalam Mas'ud (2004) yang terdiri dari 10 item.

*Locus of Control* adalah ukuran keyakinan individu atas kejadian yang menimpa dirinya (Indriantoro, 2000). *Internal locus of control* berpandangan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang dimilikinya. Sedangkan *external locus of control* adalah individu yang meyakini bahwa kejadian dalam hidupnya berada di luar kontrolnya (Rotter, 1966). *Locus of control* eksternal menyebabkan individu merasa tidak mampu menguasai keadaan sehingga timbul kecemasan (*anxiety*) yang akan menurunkan keahlian/kinerja individu. Pertanyaan tentang *locus of control* diukur dengan Skala Rotter yang dikembangkan oleh Spector (1988) dalam Donnelly *et al* (2003)

yang terdiri dari 16 item. Item pertanyaan 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14 dan 15 diukur dengan skor 5 (= sangat tidak setuju), 4 (= tidak setuju), 3 (= netral), 2 (= setuju) dan 1 (= sangat setuju). Sedangkan item 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, dan 16 diberi skor terbalik yaitu yakni sangat tidak setuju (=1), tidak setuju (=2), netral (=3), setuju (=4) dan sangat setuju (=5).

### 3.3 Metode Analisis Data

Di dalam analisis data penelitian digunakan metode statistika. Seluruh perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik SPSS versi 16. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 (5%). Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 3 adalah regresi, sedangkan untuk menguji hipotesis 2 adalah uji beda t-test (*Independent Samples T-Test*). Untuk menguji pengaruh *Computer Anxiety* terhadap keahlian Pegawai Bagian Akuntansi dalam menggunakan komputer dengan variabel moderasi *Locus of Control* digunakan model persamaan sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + e_i \quad (1)$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 * X_2) + e_i \quad (2)$$

#### Keterangan:

$Y_i$  = Keahlian Pemakai Komputer (*dependent variable*)

$X_1$  = *Computer Anxiety* (*independent variable*)

$X_2$  = *Locus of Control* (*moderating variable*)

$\alpha_0$  = Konstanta persamaan pertama.

$\beta_0$  = Konstanta persamaan kedua.

$\alpha_1$  = Koefisien regresi variabel independen *computer anxiety* persamaan pertama.

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel independen *computer anxiety* persamaan kedua.

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel *locus of control* persamaan kedua.

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel moderasi persamaan kedua.

$e_i$  = *disturbance errors* (variabel pengganggu) perusahaan i.

Sharma (1981) menyatakan bahwa penentuan sebuah variabel moderator dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu *subgroup analysis* dan MRA. *Subgroup analysis* adalah metode yang pada pelaksanaannya menggunakan pendekatan dengan membagi sample kedalam subgroup berdasarkan pada variabel ketiga yaitu moderator yang



sedang dihipotesa. MRA adalah suatu pendekatan analisis yang memelihara integritas dari sampel yang tersedia sebagai dasar mengontrol efek dari variabel moderator. Sharma (1981) juga menyatakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka sebaiknya kedua metode ini digunakan berpasangan dengan menggunakan *framework* untuk identifikasi variabel moderator. Dalam *framework* terdapat beberapa istilah yaitu, Prediktor merupakan variabel independen, kreteria merupakan variabel dependen dan z merupakan variabel moderator.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Data Penelitian

Rincian pengiriman dan penerimaan kuesioner yang dapat dilihat pada Tabel 1 di BAGIAN lampiran. Jumlah kuesioner yang dikirimkan sebanyak 90 kuesioner, dengan jumlah kuesioner yang kembali adalah 65 kuesioner. Dari jumlah kuesioner yang kembali terdapat 8 kuesioner yang tidak dapat digunakan karena pengisiannya yang tidak lengkap dan tidak benar. Jadi jumlah kuesioner yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 57 kuesioner, dengan tingkat pengembalian (*response rate*) 72,2% dan tingkat pengembalian yang digunakan (*usable response rate*) 63,3%.

#### 4.1.2 Deskripsi Responden

Adapun profil 57 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 di bagian lampiran. Tabel tersebut menginformasikan bahwa responden pria berjumlah 28 orang (49,12%) dan wanita berjumlah 29 orang (50,88%). Sebagian besar responden berumur 21-25 tahun sebanyak 38 orang (66,66%) dan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (38,59%). Sebagian besar responden memiliki pengalaman bekerja di perusahaan dagang selama 1-5 tahun sebanyak 26 orang (45,61%).

### 4.1.3 Statistik Deskriptif

Rangkuman hasil statistik deksriptif ditunjukkan pada Tabel 3 di bagian lampiran. Nilai rata-rata jawaban variabel kecemasan berkomputer untuk kisaran sesungguhnya di bawah nilai rata-rata kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa para karyawan akuntansi dan kasir pada perusahaan dagang sebagian besar tidak mengalami kecemasan atau rasa khawatir dalam menggunakan *software* akuntansi. Nilai rata-rata jawaban variabel keahlian pemakai untuk kisaran sesungguhnya hampir sama dengan nilai rata-rata kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa sebagian para karyawan akuntansi dan kasir pada perusahaan dagang mempunyai keahlian dalam menggunakan *software* atau program akuntansi dan sebagian yang lain dalam kategori yang belum memiliki keahlian dalam menggunakan *software* atau program akuntansi. Dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa responden yang total skornya di bawah 30 sebanyak 25 responden yang berarti memiliki *locus of control internal*. Responden yang total skornya di atas 30 sebanyak 28 responden yang bearti *locus of control* eksternal, sedangkan 4 responden lagi mempunyai total skor jawaban pada nilai median yaitu 30.

### 4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data

Hasil uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan realibilitas data ditunjukkan pada Tabel 4 dan 5 di bagian lampiran. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor variabel menunjukkan hasil yang signifikan (pada level 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan pada variabel konstruk penelitian adalah valid. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah > 0,60 yang mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument pertanyaan tersebut adalah reliabel.

#### 4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a) Hasil Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data dengan Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yaitu lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki pola distribusi data yang normal.

##### b) Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang dipergunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya nilai *tolerance* di antara dua variabel independen yang lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 7 pada bagian lampiran.

##### c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil grafik dari data yang diuji menunjukkan tidak terdapat pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (lihat pada lampiran).

#### 4.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis

##### a) Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi untuk hipotesis 1 disajikan dalam Tabel 8 pada bagian lampiran. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kecemasan berkomputer berpengaruh negatif terhadap keahlian pemakan dalam menggunakan *software* atau program akuntansi dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,503. Hasil regresi tersebut memiliki nilai *t test* sebesar -4,315 dengan tingkat signifikansi hasil pengujian sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05 (5%). Dengan demikian variabel kecemasan dalam penggunaan *software* akuntansi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau

program akuntansi. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 23,9% mengindikasikan bahwa perubahan dari variabel kecemasan berkomputer dapat menjelaskan perubahan terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi sebesar 23,9%, sedangkan sisanya sebesar 76,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

#### b) Hasil Uji Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan uji beda *t-test* (*Independent Samples T-Test*). Hasil uji *t-test* hipotesis 2 disajikan dalam Tabel 9 pada bagian lampiran. Berdasarkan uji beda *t test* di atas, nilai *t test* adalah sebesar 0,247 dengan tingkat signifikansi hasil pengujian 0,621. Hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa terdapat tidak terdapat perbedaan kecemasan berkomputer antara pemakai komputer pria dan wanita, karena *p-value* hasil pengujian sebesar 0,621 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05 (5%). Jika dilihat dari nilai *mean* antara kecemasan berkomputer pemakai pria sebesar 8,25 dan kecemasan berkomputer pemakai wanita 9,62, menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki kecemasan berkomputer yang lebih besar dibandingkan pria, namun perbedaan tersebut tidak signifikan.

#### c) Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis Moderated Regression Analysis (MRA) yang hasilnya disajikan pada Tabel 10. Dalam pengujian hipotesis ketiga ini menggunakan 2 model persamaan regresi, yaitu sebelum ada interaksi antara kecemasan berkomputer dan *locus of control* (X1 dan X2) dan sesudah ada interaksi antara kecemasan berkomputer dan *locus of control* (X1\*X2).

Uji ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 13,060 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara kecemasan berkomputer dan keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau

program akuntansi dipengaruhi oleh *locus of control*. Hasil ini juga menunjukkan bahwa linearitas regresi dan model regresi adalah signifikan. Hasil analisis MRA persamaan didapat nilai *adjusted R square* sebesar 0,392 hal ini berarti 39,2% variasi keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi kecemasan berkomputer dan interaksi antara kecemasan berkomputer dan *locus of control* ( $X_1 \times X_2$ ), sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Dari hasil uji statistik dapat juga diketahui nilai *p value* sebesar 0,000 pada tingkat *alpha* 0,05. Nilai *p value* < nilai  $\alpha$ , menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara kecemasan berkomputer dan *locus of control* dalam model regresi. Hal ini berarti hubungan antara kecemasan berkomputer dan keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi dipengaruhi atau dimoderasi oleh variabel *locus of control*.

Untuk menyimpulkan bahwa variabel *locus of control* sebagai variabel moderating, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan framework sebagai panduan. Dari Tabel 11 terlihat untuk langkah pertama penentuan variabel moderator regresi antara *locus of control* dan kecemasan berkomputer memiliki nilai yang signifikan (0,000), sedangkan untuk langkah kedua yaitu regresi antara *locus of control* dan keahlian pemakai menghasilkan nilai yang tidak signifikan (0,287). Berdasarkan hasil langkah pertama dan kedua pada *framework* dapat disimpulkan, variabel *locus of control* merupakan variabel moderator dengan kriteria *pure moderator*.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Kecemasan Berkomputer terhadap Keahlian Pemakai dalam Menggunakan Software Akuntansi

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kecemasan berkomputer mempunyai pengaruh negatif terhadap keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi secara empiris terbukti didukung. Hal ini berarti ketika para karyawan bagian akuntansi merasa cemas dan khawatir dalam menggunakan *software* akuntansi akan mengurangi keahlian mereka dalam menggunakan *software* atau program akuntansi tersebut.

Kecemasan berkomputer berpengaruh secara negatif terhadap keahlian karyawan akuntansi dalam menggunakan *software* atau program akuntansi. Oleh karena itu semakin tinggi kecemasan berkomputer karyawan akuntansi mengakibatkan rendahnya tingkat keahlian dalam penggunaan *software* atau program akuntansi dan sebaliknya semakin rendah kecemasan berkomputer karyawan mengakibatkan tingginya tingkat keahlian mereka dalam penggunaan *software* atau program akuntansi. Karyawan bagian akuntansi yang mempunyai perasaan cemas yang tinggi menunjukkan kurangnya kemampuan diri, sehingga mereka memiliki keahlian dalam menggunakan *software* atau program akuntansi yang rendah.

Dasar pemikiran yang mendukung temuan penelitian ini karena sikap pemakai komputer terdiri atas tiga komponen yaitu kognisi, afeksi dan keinginan. Pemakai yang mempunyai kognisi atau keyakinan bahwa teknologi komputer akan memberikan manfaat bagi dirinya akan menimbulkan afeksi yang mempunyai konotasi suka untuk menerima kehadiran teknologi komputer. Keyakinan dan afeksi tersebut menunjukkan sikap optimistik bahwa komputer dapat membantu mengatasi masalah dalam pekerjaannya, sehingga seseorang merasa senang bekerja dengan komputer. Seseorang yang mempunyai sikap demikian tidak merasa terintimidasi, khawatir, susah, atau ketakutan oleh kehadiran teknologi komputer atau mempunyai *computer anxiety* yang rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rifa dan Gudono (1999), Indriantoro (2000), Wijaya dan Johan (2005) dan Tjandra (2007), yang semuanya menyatakan bahwa kecemasan berkomputer berpengaruh negatif pada keahlian pemakai dalam menggunakan komputer.

#### 4.2.2 Pengaruh Gender dalam Kecemasan Berkomputer

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan komputer antara karyawan akuntansi pria dan karyawan akuntansi wanita secara empiris tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

karyawan pria dan wanita jika ditinjau dari tingkat kecemasan mereka dalam menggunakan *software* atau program akuntansi.

Hasil perhitungan rata-rata tingkat kecemasan berkomputer pada karyawan pria memang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kecemasan berkomputer karyawan wanita, namun perbedaan ini tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Colley *et al.* (1999) dan Tjandra (2007) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan kecemasan berkomputer antara pria dan wanita.

Jika dikaji dengan perkembangan yang terjadi saat ini, hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya perbedaan kecemasan berkomputer antara pria dan wanita disebabkan karena akses terhadap penggunaan komputer saat ini begitu luas dan para karyawan di suatu perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan penggunaan *software* atau program akuntansi. Penggunaan komputer dan *software* atau program akuntansi saat ini sudah lazim digunakan oleh karyawan baik pria dan wanita. Para wanita yang berinteraksi dengan komputer juga semakin banyak yang ditandai dengan semakin tingginya minat wanita untuk kuliah pada jurusan-jurusan yang terkait dengan komputer dan informatika.

#### **4.2.3 Pengaruh Kecemasan Berkomputer terhadap Keahlian Pemakai dalam Menggunakan *Software* Akuntansi dengan *Locus of Control* sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa *locus of control* memoderasi hubungan antara kecemasan berkomputer dan keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi secara statistic terbukti didukung. Hasil pengujian variabel *locus of control* sebagai variabel moderasi juga membuktikan bahwa *locus of control* merupakan *pure moderator*, karena ketika variabel ini diinterkasikan dengan variabel keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

*Locus of control* merupakan keyakinan individu bahwa individu bisa mempengaruhi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupannya. Persepsi individu yang terganggu tersebut akan membentuk individu untuk melakukan pertahanan yang berlebihan sehingga termanifestasi dalam perilaku *computer anxiety*. Apabila *locus of control* internal berperan dalam diri individu, kecemasan yang dialami dapat diminimalisasi namun apabila yang berperan adalah *locus of control* eksternal maka kecemasan akan meningkat.

Berdasarkan data jawaban responden menunjukkan bahwa responden yang tergolong memiliki *locus of control* eksternal lebih banyak dibandingkan responden yang memiliki *locus of control* internal. Hal ini dapat dilihat dari skor total jawaban responden untuk variabel *locus of control* lebih banyak yang nilainya di atas nilai mediannya yaitu 30. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki *locus of control* eksternal.

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Kecemasan berkomputer pada karyawan bagian akuntansi perusahaan dagang di Kota Bengkulu berpengaruh negatif terhadap keahlian karyawan tersebut dalam menggunakan *software* atau program akuntansi. Koefisien regresi yang bertanda negatif tersebut sesuai dengan teori yang mendasari penelitian ini yaitu bahwa semakin tinggi kecemasan berkomputer, maka semakin rendah tingkat keahlian pemakai.
- 2) Tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan berkomputer antara karyawan pria dan wanita, namun hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa karyawan wanita memiliki tingkat kecemasan berkomputer yang lebih tinggi dibandingkan karyawan pria.



- 3) *Locus of control* merupakan variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara kecemasan berkomputer dengan keahlian pemakai dalam menggunakan software atau program akuntansi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang akuntansi keprilakuan, yaitu variabel *computer anxiety* merupakan variabel prediktor yang mempengaruhi secara negatif keahlian pemakai dalam menggunakan *software* atau program akuntansi yang dimoderasi oleh variabel *locus of control*. Hal ini merupakan bukti empiris baru karena penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan memasukkan variabel *locus of control* sebagai variabel moderasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A., 1986, *Social Foundation of thought and action*, Prentice Hall, Englewood Clift, NJ.
- Donnelly, *et al.*, 2003, Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics. *Behavioral Research in Accounting*, Vol 15.
- Fazli, S. 1999, Dampak Kompleksitas Teknologi Informasi Bagi Strategi dan Kelangsungan Bisnis, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Volume 3, No. 1, Juni.
- Ghozali Imam, 2005, "*Analisis Multivariate dengan Program SPSS*", Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, Edisi 3.
- Harrison, A.W., and Rainer, K.R., 1992, The Influence of Individual Differences On Skill in End- User Computing, *Journal of Management Information Systems*, Vol. 9, No. 1, Summer.
- Havelka, Douglas, 2003, "Predicting Software Self Efficacy among Business Students : A Preliminary Assesment," *Journal of Information Systems Education*, Vol. 14, No. 2.
- Igbaria, M and Parasuraman, S., 1989, A Path Analytic Study of Individual Characteristics Computer Anxiety, and Attitudes Toward Microcomputers, *Jurnal of Management*, Vol. 15 No. 3.
- Indriantoro, Nur, 1993, "*The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimension as Moderating Variable*", University of Kentucky Dissertation.
- Indriantoro, Nur, 1996, Sistem Informasi Strategik: Dampak Teknologi Informasi Terhadap Organisasi dan Keunggulan Kompetitif, *Jurnal KOMPAK*, No. 9, Februari.
- Indriantoro, Nur, 2000, "Pengaruh *Computer Anxiety* Terhadap Keahlian Dosen Dalam Penggunaan Komputer", *JAAI*, Volume 4, Desember.
- Mas'ud Fuad, 2004, "*Survai Diagnosis Organisasional: Konsep dan Aplikasi*" Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nelson, R.R., 1990, Individual Adjustment to Information Driven Technologies: A Critical Review, *MIS Quarterly*, Vol. 9 No. 1, March.
- Organ, W. Dennies, 1987, *The Applied Psychology of Work Behavior: A Book of Readings*, Third Edition, Business Publications, Inc.
- Pavri, F.N., 1991, An Empirical Investigation of Factor Contributing to Microcomputer Usage dalam Thompson, Ronald L., Cristopher Higgins, dan Jane M. Howell,

- Personal Computing: *Toward a Conceptual Model of Utilization*, *MIS Quarterly*, Maret.
- Pratolo, Suryo, 2003, “Pengaruh Struktur Organisasi dan *Locus of Control* Pada Hubungan Antara Partisipasi Pembuatan Anggaran dan kinerja Manajerial”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 11 No. 2, Juni, hal. 14-25.
- Raghunathan, B. dan Raghunathan T.S., 1988, Impact of Top Management Support on IS Planning, *Jurnal of Information System*, Vol. II/No. 2, Spring.
- Rifa, D dan Gudono, 1999, Pengaruh Faktor Demografi dan Personality Terhadap Keahlian Dalam End- User Computing, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Robbin, Stephen P., 1993, Organizational Behavior: Concepts, *Controversies, and Applications*, Sixth Edition, Prentice Hall International, Inc..
- Rotter, J.B., 1966, “Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement”, *Psychological Monographs*, 80 (1, Whole N0. 609).
- Rustiana, 2004, Computer Self Efficacy (CSE) Mahasiswa Akuntansi Dalam Penggunaan Teknologi Informasi: Tinjauan Perspektif Gender, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol 17, No. 1, Maret.
- Rustiana, 2005, Studi Computer Self Efficacy Dalam Era Digitalisasi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 2, Juni.
- Todd, Peter dan Benbasat, Izak, 1992, The Use of Information in Decision Making: An Experimental Investigation of the Impact of Computer-Based decision Aids, *MIS Quarterly*, September.
- Triandis, H.C., Attitude and Attitude Change ,1971, Values Attitudes, and Interpersonal Behavior (1980), dalam Thompson, Ronald L., Christopher A. Higgins, dan Jane M. Howell, Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization, *MIS Quarterly*, Maret, 1991.
- Trisanti, Wulandari Harya, 1999, “Konsep Diri dan Ketakutan Akan Sukses pada Wanita Karier”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
- Wijaya T. dan Johan, Maret 2005, Pengaruh *Computer Anxiety* Terhadap Keahlian Penggunaan Komputer, *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Vol. 6, No. 1.

## LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebar	90	100
Kuesioner yang kembali	65	72,2
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	25	27,7
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	8	8,8
Kuesioner yang dapat digunakan	57	63,3

Sumber: data primer diolah 2011

**Tabel 2**  
**Profil Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
• <b>Pria</b>	28	49,12%
• <b>Wanita</b>	29	50,88%
Umur Responden		
• <b>≤ 20 tahun</b>	6	10,52%
• <b>21 – 25 tahun</b>	38	66,66%
• <b>&gt;26 tahun</b>	13	22,82%
Tingkat Pendidikan		
• <b>SMA</b>	16	28,07%
• <b>Diploma</b>	19	33,33%
• <b>S1</b>	22	38,59%
Pengalaman Berkerja		
• <b>≤ 1 Tahun</b>	22	38,59%
• <b>1 – 5 Tahun</b>	26	45,61%
• <b>≥ 5 Tahun</b>	9	15,78%

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		
	Kisaran	Rata-rata	Kisaran	Rata-rata	SD
Kecemasan Berkomputer	4 – 20	12	4 - 15	8,95	3,613
Keahlian Pemakai	10 - 50	30	13 - 43	29,67	7,795
<i>Locus of Control</i>	16 - 80	48	17 - 61	33,88	10,332

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pearson Corelation	Keterangan
Kecemasan Berkomputer	0,790** - 0,832**	Valid
<i>Locus of control</i>	0,552** - 0,883**	Valid
Keahlian Pemakai Komputer	0,395** - 0,826**	Valid

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 5**  
**Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kecemasan Berkomputer	0,831	Reliabel
<i>Locus of control</i>	0,869	Reliabel
Keahlian Pemakai Komputer	0,910	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kecemasan Berkomputer	0,104	Normal
<i>Locus of Control</i>	0,058	Normal
Keahlian Pemakai Komputer	0,958	Normal

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Persamaan 1 : Kecemasan Berkomputer (X1)	1,000	1,000	Bebas Multikolinearitas
Persamaan 2 : Kecemasan Berkomputer (X1) <i>Locus of control</i> (X2)	0,860 0,860	1,163 1,163	Bebas Multikolinearitas
Persamaan 3 : Kecemasan Berkomputer (X1) <i>Locus of control</i> (X2) Moderasi (X1*X2)	0,620 0,620 0,240	1,619 1,609 4,217	Bebas Multikolinearitas

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis 1**

Variabel	Koefisien	Nilai Koefisien	<i>t value</i>	<i>p value</i>
Kecemasan berkomputer	$\beta_1$	-0,503	-4,315	0,000
Adj R <sup>2</sup> = 23,9%				

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Independent Sample T-test Hipotesis 2**

Variabel	Pria n = 28		Wanita n = 29		Levene's test for equality of variances	
	Mean	SD	Mean	SD	F	p
Kecemasan Berkomputer	8,25	3,648	9,62	3,509	0,247	0,621

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 10**  
**Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) Hipotesis 3**

Persamaan Regresi	Nilai F	<i>p</i>	Adj R <sup>2</sup>
$Y = 0 - 0,647X_1 + 0,385X_2 + e_1$ (2)	16,589	0,000	0,358
$Y = 0 - 1,465X_1 - 0,430X_2 + 1,369(X_1 * X_2) + e_1$ (3)	13,060	0,000	0,392

Sumber : data primer diolah, 2012

**Tabel 11**  
**Rangkuman Hasil *Framework Locus of Control***

Langkah		Hasil	Keterangan
Pertama	Regresikan antara Variabel <i>locus of control</i> (Z) dengan kecemasan berkomputer (prediktor)	Sig (0,004)	Lanjut ke langkah 2 (dua)
Kedua	Regresikan antara Variabel <i>locus of control</i> (Z) dengan Keahlian pemakai (kriteria)	Sig (0,287)	<i>Locus of control</i> adalah <i>pure moderator</i>

Sumber : data primer diolah, 2012

## Evaluasi Software Akuntansi Bagi Usaha Kecil Menengah Memanfaatkan Metode Multi Factor Evaluation Process dan Analytic Hierarchy Process

**ERNA LOVITA \***  
*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*

**Abstract:** *Paper ini membahas bagaimana pelaku UKM dapat melakukan pemilihan software akuntansi yang akan digunakannya dengan memanfaatkan metode Analytic Hierarchy Proses (AHP). Diharapkan dengan memanfaatkan alat bantu analisis seperti MFEP dan AHP, pelaku UKM dapat menyadari, mempertimbangkan dan memilih software akuntansi sesuai dengan kebutuhan UKM. Sehingga akuntansi yang transparan dan akurat akan mudah diterapkan oleh UKM dengan bantuan software akuntansi yang sesuai. Perhitungan kuantitatif dalam MFEP dan AHP dilakukan dengan memanfaatkan software aplikasi umum spreadsheet Microsoft Excel.*

**Keyword:** *Pengambilan Keputusan, AHP, Software Akuntansi, UKM, Teknologi Informasi Manajemen*

---

\* Author can be contacted at: [erna\\_lovita@yahoo.com](mailto:erna_lovita@yahoo.com)

## I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Data tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah UKM di Indonesia mencapai lebih dari 53.207 juta unit atau 99,99% dari jumlah total unit bisnis yang ada (BPS, 2010). Kementerian Koperasi dan UKM memberikan data bahwa UKM menjadi penyedia kesempatan kerja bagi 91,8 juta orang atau 97,20% dan memberikan kontribusi sebesar 57,9% dalam pembentukan PDB (Kementerian operasi dan UKM, 2013). Hal yang sama dinyatakan pula dalam studi empirik tentang UKM bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu, membuat usaha kecil menengah menjadi wahana yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif karena proses produksi dalam industri-industri berskala kecil dan menengah pada umumnya bersifat padat karya (Wulan, Nindita, 2007). Dengan kata lain sektor ini juga terbukti lebih tahan terhadap guncangan krisis, serta mampu berperan sebagai bantalan dalam penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi di kala krisis menghantam sektor usaha besar (korporasi), (Alamsyah, 2013).

Usaha kecil menengah atau biasa disingkat UKM telah teruji mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda perekonomian global. Terlihat dari data mengenai penyerapan tenaga kerja di UKM. Penyerapan tenaga kerja di UKM meningkat sebesar 2,33% dari tahun 2008. Pada tahun yang sama, usaha besar justru mengalami penurunan penggunaan tenaga kerja sebesar 2,96%. Dari data yang dimiliki Departemen Perdagangan, berkat UKM perekonomian nasional masih tumbuh secara positif. Di saat kondisi ekonomi tak terkendali, perekonomian Indonesia tetap tumbuh walau hanya sebesar 3 - 4% karena 90% kegiatan usaha di Indonesia ditopang oleh UKM (Wulan, Nindita, 2009)

Karena itu pertumbuhan UKM saat ini mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku bisnis UKM antara lain, pemasaran



produk, teknologi, pengelolaan keuangan, permodalan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah yang sering diabaikan oleh para pelaku UKM adalah pengelolaan keuangan. Sebagaimana diketahui dan diakui khalayak bahwa akuntansi adalah kunci bagi keberhasilan usaha. Melalui laporan keuangan atau catatan-catatan akuntansi maka dapat dihasilkan keputusan-keputusan yang dapat mendukung pengelolaan bisnis suatu UKM. Informasi yang dihasilkan akuntansi dapat mengarahkan pengambil keputusan untuk dapat mengidentifikasi area-area permasalahan yang ada serta solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Berdasarkan hasil penelitian Dharma T, Ediraras tentang Akuntansi Dan Kinerja UKM pada 110 responden UKM dapat disimpulkan bahwa ; Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pada umumnya berguna bagi UKM dalam pengambilan keputusan terkait; 1)dasar pertimbangan dalam melakukan pembelian bahan baku serta alat produksi yang digunakan, 2)keputusan mengenai harga, 3)pengajuan tambahan modal ke perbankan, 4)pengembangan usaha dan 5) penambahan sumber daya manusia maupun penambahan asset.

Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan mestinya juga menjadi suatu keharusan bagi sebuah UKM. Karena pelaku UKM juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi keuangan yang akurat pada para stakeholder UKM, yakni; kreditur, pemasok, karyawan dan manajemen. Bisnis UKM yang pengelolaan keuangannya diinformasikan secara transparan dan akurat akan sangat mendukung perkembangan UKM itu sendiri.

Pada perkembangan IT saat ini pada dasarnya bukan suatu hal yang sulit bagi para pelaku UKM untuk menerapkan akuntansi yang transparan dan akurat. Berbagai software aplikasi akuntansi yang ada menawarkan untuk dapat melakukan proses akuntansi dengan cepat dan akurat. Sehingga dengan sebuah software aplikasi akuntansi yang dipilih, sebuah UKM dapat menghasilkan laporan keuangan standar yang diperlukan, sehingga kesulitan

ataupun kendala yang selama ini dihadapi oleh sebuah UKM terkait dengan laporan keuangan dapat teratasi. Permasalahan berikutnya yang muncul bagi para pelaku UKM adalah software aplikasi akuntansi yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan pertimbangan begitu banyaknya software aplikasi akuntansi yang tersedia di pasaran.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas perbandingan antara dua metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan terhadap beberapa alternatif software akuntansi. Metode kuantitatif yang pertama adalah Multi Factor Evaluation Process (MFEP) yang menggunakan *weighting system* dan metode kuantitatif yang kedua adalah Analytic Hierarchy Process (AHP) yang menggunakan *pairwise comparison*.

## II. KERANGKA TEORI

Definisi software akuntansi dalam kamus bisnis adalah :

“suatu program yang digunakan untuk memelihara pembukuan di komputer, seperti pencatatan transaksi, mempertahankan saldo rekening, dan menyiapkan laporan keuangan”.

Pada umumnya sebuah software aplikasi akuntansi terdiri dari modul-modul aplikasi mulai dari aplikasi pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas, serta pengendalian atas persediaan.

Penilaian sebuah software diukur atas dasar “user requirement” yakni sejauh mana software tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sehingga software yang baik adalah bila secara utuh dan sempurna dapat memenuhi kriteria spesifik dari perusahaan yang membutuhkan. Kualitas software dapat didefinisikan sebagai (Indrajit, 2010) : “Konfirmasi terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit, standar perkembangan yang didokumentasikan secara eksplisit, dan karakteristik implisit yang diharapkan bagi semua perangkat lunak yang dikembangkan secara professional”.

Pada tahun 1977, McCall (Indrajit, 2010) telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas software. McCall pada dasarnya menitikberatkan faktor-faktor tersebut menjadi tiga aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan; 1) sifat-sifat operasional dari software (Product Operations), 2) Kemampuan software dalam menjalani perubahan (Product Revision), 3) Daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru (Product Transition).

Demikian pula pendapat dari Karl Wieggers yang menetapkan atribut dari kualitas software terdiri dari 12 atribut dengan tambahan satu atribut yang berkaitan dengan user serta satu atribut yang berkaitan dengan sistem itu sendiri, sehingga ada 14 atribut penilaian kualitas software yaitu:

1. Reliability, sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang benar.
2. Usability, sejauh mana kemampuan software dapat dengan mudah digunakan oleh user, termasuk penggunaan dokumen.
3. Integrity, sejauh mana suatu software memungkinkan dilakukannya integrasi informasi dari beberapa departemen.
4. Efficiency, sejauh mana efisien suatu software dalam pemrosesan data.
5. Portability, sejauh mana suatu software dapat berpindah dari satu lingkungan operasi pada lingkungan operasi lainnya.
6. Reusability, sejauh mana suatu software dapat mengkonversi untuk digunakan dalam aplikasi lainnya.
7. Interoperability, menunjukkan seberapa mudahnya suatu software dapat bertukar data atau layanan dengan software lainnya.
8. Maintainability, menunjukkan bagaimana perawatan yang diperlukan suatu software.

9. Flexibility, sejauh mana suatu software dapat dengan mudah di-update untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari para pengguna dengan perubahan kondisi yang ada.
10. Testability, menunjukkan seberapa mudah suatu software dalam menunjukkan suatu kesalahan.
11. Robustness, menunjukan bagaimana suatu software dalam menanggapi suatu kondisi yang tidak terduga.
12. Installability, sejauh mana suatu software dapat dikembangkan kembali suatu waktu.
13. Safety, menunjukkan bagaimana suatu software memiliki kontrol sebagai bentuk pengamanan dalam pemrosesan data.
14. Availability, menunjukan ukuran waktu yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan hingga software tersebut siap dan dapat digunakan untuk beroperasi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dan pertimbangan peranan masing-masing atribut suatu software akuntansi yang diperlukan bagi sebuah UKM, maka penulis akan menggunakan enam atribut kualitas software, yaitu :

1. Reliability
2. Usability
3. Efficiency
4. Flexibility
5. Testability
6. Safety

### III. METODE KUANTITATIF PEMILIHAN ALTERNATIF SOFTWARE

#### APLIKASI AKUNTANSI

Dalam melakukan pemilihan software akuntansi kita dapat menggunakan metode pemilihan alternatif multi criteria (Taylor, 2004) yang selama ini banyak digunakan diantaranya Metode Multi Factor Evaluation Process dan Metode Analytic Hierarchy Process.

### III.1. METODE MULTI FACTOR EVALUATION PROCESS (MFEP)

Dalam Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide dari Project Management Institute, proses seleksi alternative dalam hal ini alternatif software aplikasi akuntansi yang akan digunakan oleh organisasi dapat menggunakan teknik “weighting system” (PMBOK, 2000), metode tersebut dikenal sebagai metode “Multi Factor Evaluation Process” (MFEP). MFEP dianjurkan sebagai pendekatan kuantitatif untuk keputusan yang berpengaruh secara strategis (Render, 2000). Dalam seleksi MFEP, pengambil keputusan secara subyektif dan intuitif menimbang berbagai factor atau kriteria yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihannya. Langkah pertama dalam MFEP, menetapkan kriteria yang menjadi pertimbangan, dalam tulisan ini menggunakan atribut kualitas software yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya seluruh kriteria yang menjadi factor penting dalam melakukan pertimbangan tersebut diberi bobot (weighting) yang sesuai kondisi dari permasalahan. Langkah selanjutnya, hal yang sama juga dilakukan terhadap alternatif-alternatif yang akan dipilih, yang kemudian dapat dievaluasi berkaitan dengan kriteria atau faktor–faktor pertimbangan tersebut.

Sebagai contoh dalam tulisan ini, MFEP akan digunakan dalam memilih sebuah software aplikasi akuntansi bagi UKM. Dalam penerapan MFEP yang harus dilakukan pertama kali adalah penetapan kriteria atau faktor-faktor yang dianggap penting dalam pemilihan software akuntansi yang diperlukan oleh UKM. Dalam contoh ini berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditetapkan bahwa kriteria-kriteria

tersebut adalah reliability, usability, efficiency, flexibility, testability dan safety. Langkah selanjutnya adalah membandingkan kriteria-kriteria tersebut untuk mendapatkan kriteria mana yang paling penting, kedua terpenting, dan seterusnya dengan memberikan bobot pada kriteria-kriteria tersebut dimana total pembobotan harus sama dengan 1 ( $\sum \text{bobot} = 1$ ).

Dalam tulisan ini misal nilai bobot kriteria-kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut, reliability 0.25, usability 0.20, efficiency 0.20, flexibility 0.10, testability 0.10, safety 0.10 (Lihat Tabel 1). Penentuan bobot ditetapkan penulis berdasarkan pertimbangan tingkat kepentingan sebuah software akuntansi bagi suatu UKM.

Tabel 1. Nilai Bobot Untuk Kriteria Seleksi Software Akuntansi

Kriteria	Nilai Bobot
Reliability	0.25
Usability	0.20
Efficiency	0.20
Flexibility	0.10
Testability	0.10
Safety	0.15

Setelah menetapkan bobot dari kriteria-kriteria seleksi, berikutnya ditetapkan alternatif software akuntansi yang akan diseleksi, misalnya ditetapkan ada 3 software akuntansi yang akan diseleksi yaitu AccSoft 1, AccSoft 2 dan AccSoft 3 (nama software adalah inisial), selanjutnya diberi nilai pada setiap kriteria-kriteria seleksi untuk setiap software akuntansi yang diseleksi seperti yang terlihat pada Table 2 dibawah ini :

Kriteria	Nilai Bobot	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
Reliability	0.25	8	7	6
Usability	0.20	8	6	8
Efficiency	0.20	7	7	7
Flexibility	0.10	6	5	6
Testability	0.10	8	6	6
Safety	0.15	7	7	6

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut diatas dapat dihitung total nilai evaluasi untuk setiap software akuntansi yang diseleksi.

Setiap software akuntansi mempunyai sebuah nilai evaluasi untuk kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangannya, dan kemudian nilai factor tersebut dikalikan dengan factor evaluasi dan dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai evaluasi untuk setiap software akuntansi. Seperti terlihat pada Tabel 3, dimana Accsoft 1 memiliki nilai evaluasi total 7.45, AccSoft 2 memiliki nilai evaluasi total 6.5, dan AccSoft 3 memiliki nilai evaluasi total 6.6.

Tabel 3. Evaluasi Software Akuntansi Dengan MFEP

Kriteria	Nilai Bobot (1)	AccSoft 1		AccSoft 2		AccSoft 3	
		Nilai (2)	Nilai Evaluasi (3) = (1)X(2)	Nilai (4)	Nilai Evaluasi (5) = (1)X(4)	Nilai (6)	Nilai Evaluasi (7) = (1)X(6)
Reliability	0.25	8	2	7	1.75	6	1.5
Usability	0.20	8	1.6	6	1.2	8	1.6
Efficiency	0.20	7	1.4	7	1.4	7	1.4
Flexibility	0.10	6	0.6	5	0.5	6	0.6
Testability	0.10	8	0.8	6	0.6	6	0.6
Safety	0.15	7	1.05	7	1.05	6	0.9
Total Nilai Evaluasi			7.45		6.5		6.6

Metode MFEP menentukan bahwa alternative dengan nilai tertinggi adalah solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dalam contoh perhitungan yang ada hasilnya adalah software AccSoft 1 adalah yang terbaik dengan nilai evaluasi tertinggi yaitu 7.45.

### III.2. METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

Metode MFEP dapat bekerja dengan baik pada situasi dimana kita dapat dengan mudah menentukan evaluasi dan penilaian terhadap berbagai kriteria keputusan. Pada kasus yang lebih kompleks, para pengambil keputusan kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara akurat berbagai nilai kriteria dan evaluasi. Untuk masalah yang lebih kompleks, metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan. AHP

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dan dipublikasikan pertama kali dalam bukunya tahun 1980, *The Analytic Hierarchy Process* (Prabantoro, 2008).

### III.2.1. PENERAPAN PERBANDINGAN BERPASANGAN DALAM AHP

AHP dilakukan dengan menggunakan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pengambil keputusan memulai dengan membuat layout dari keseluruhan hirarki keputusannya. Hirarki tersebut menunjukkan kriteria–kriteria yang dipertimbangkan serta berbagai alternatif yang ada. Kemudian, sejumlah perbandingan berpasangan dilakukan, untuk mendapatkan penetapan nilai factor dan evaluasinya. Perbandingan berpasangan adalah aspek terpenting dalam menggunakan AHP. Pengambil keputusan membandingkan dua atau lebih alternative yang berbeda dengan menggunakan sebuah skala yang bervariasi dari ‘equally preferred’ sampai dengan ‘extremely preferred’. Adapun perbandingan berpasangan tersebut terdiri dari seperti berikut ini:

- 1 – Equally preferred
- 2 – Equally to moderately preferred
- 3 – Moderately preferred
- 4 – Moderately to strongly preferred
- 5 – Strongly preferred
- 6 – Strongly to very strongly preferred
- 7 – Very strongly preferred
- 8 – Very to extremely strongly preferred
- 9 – Extremely preferred

Sebelum penetapan, terlebih dahulu ditentukan kelayakan hasil nilai kriteria yang didapat dengan mengukur tingkat konsistensinya. Pada akhirnya alternative dengan jumlah nilai tertinggi dipilih sebagai alternative terbaik.

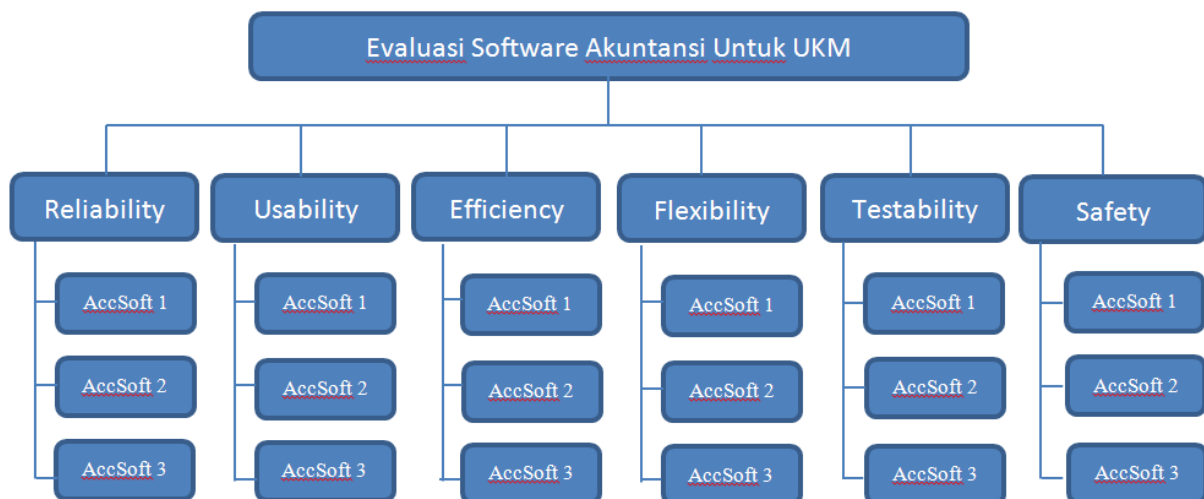


### III.2.2. KEPUTUSAN MEMILIH SOFTWARE AKUNTANSI UNTUK UKM

Untuk menjelaskan penerapan metode AHP ini ada baiknya kita ikuti proses perhitungan memilih software akuntansi untuk UKM menggunakan metode AHP.

Berdasarkan pada penuluruhan lapangan yang dilakukan, maka ditetapkan 3 software akuntansi yang dapat dipertimbangkan untuk dapat digunakan oleh UKM yang ada. Yaitu AccSoft 1, AccSoft 2 dan AccSoft 3. Kriteria-kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan adalah: reliability, usability, efficiency, flexibility, testability dan safety. Seluruh faktor dan alternatif yang ada dijelaskan dalam gambar 1.

Gambar 1. Hirarki Keputusan Memilih Software Akuntansi Untuk UKM



Hirarki keputusan untuk mengevaluasi software akuntansi untuk UKM memiliki tiga level berbeda, level teratas menjelaskan keseluruhan keputusan yaitu mengevaluasi dan memilih software akuntansi untuk UKM yang terbaik. Level menengah dalam hirarki tersebut menjelaskan kriteria atau faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan: reliability, usability, efficiency, flexibility, testability, dan safety. Level terendah dari hirarki keputusan menunjukkan alternatif-alternatif software akuntansi yang akan dipilih yaitu AccSoft 1, AccSoft 2, dan AccSoft 3.

### III.2. 3. PAIRWISE COMPARISON UNTUK KRITERIA RELIABILITY SOFTWARE AKUNTANSI

Faktor reliability software akuntansi akan digunakan sebagai contoh penerapan AHP. Disini kita mulai dengan melihat pada factor reliability software akuntansi dan melakukan perbandingan berpasangan antara software-software akuntansi yang dipilih yaitu AccSoft 1, AccSoft 2 dan AccSoft 3, dengan menggunakan skala yang ada. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan bahwa software akuntansi AccSoft 1 jika dibandingkan dengan AccSoft 2 maka AccSoft 1 adalah “moderately preferred” daripada AccSoft 2, maka digunakan angka 3 sebagai representasinya. Kemudian kita bandingkan AccSoft 2 dengan AccSoft 3 terkait dengan faktor reliability software akuntansi adalah ‘strongly preferred’ sehingga diberi angka 5 sebagai representasinya, dan perbandingan dari segi faktor reliability antara AccSoft 1 dengan AccSoft 3 adalah bahwa AccSoft 1 ‘very strongly preferred’ daripada AccSoft 3 dan mendapat nilai representasi sebesar 7. Semua data perbandingan berpasangan untuk faktor kapabilitas perusahaan tersebut ditunjukkan dalam table berikut ini:

Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan Untuk Reliability Software Akuntansi

Kriteria Reliability	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
AccSoft 1		4	7
AccSoft 2			3
AccSoft 3			

### III.2.4. PENYELESAIAN MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN AHP

Untuk matriks perbandingan berpasangan apa saja, kita dapat menempatkan angka 1 secara diagonal pada pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah yang memiliki arti bahwa perbandingan terhadap dua hal yang sama adalah 1 atau “equally preferred”. Dan untuk menyelesaikan tabel ini, dapat diartikan bahwa jika software akuntansi AccSoft 1

adalah empat kali lipat AccSoft 2, dapat juga disimpulkan bahwa AccSoft 2 lebih dipilih hanya seperempat dari pada AccSoft 1. Begitupun dengan perbandingan yang lainnya sehingga didapat tabel matriks perbandingan berpasangan yang baru seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Perbandingan Berpasangan Untuk Reliability Software Akuntansi Yang Baru

Kriteria Reliability	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
AccSoft 1	1	4	7
AccSoft 2	1/4	1	3
AccSoft 3	1/7	1/3	1

Pada matriks perbandingan berpasangan yang baru tersebut, dapat dilihat bahwa disana terdapat angka 1 secara diagonal dari sisi pojok kiri atas sampai dengan pada sisi pojok kanan bawah. Kemudian pada sisi pojok kiri bawah tabel tersebut, pada baris kedua dan kolom pertama tabel, dapat dilihat bahwa software akuntansi AccSoft 2 mendapat nilai 1/4 dibandingkan AccSoft 1, ini dikarenakan AccSoft 1 mendapat nilai 4 melampaui AccSoft 2 dari penilaian awal. Hal yang sama juga dilakukan pada baris ketiga saat AccSoft 3 dibandingkan dengan AccSoft 1, pada baris 3 kolom 1 tabel diatas, dan mendapatkan nilai 1/7. Ini dikarenakan AccSoft 1 dibanding AccSoft 3 mendapat nilai 7 pada awal perbandingan berpasangan. Cara yang sama juga berlaku untuk perbandingan antara AccSoft 3 dengan AccSoft 2 dan sebaliknya.

### III.2.5. MELAKUKAN EVALUASI UNTUK KRITERIA RELIABILITY SOFTWARE AKUNTANSI

Setelah matriks perbandingan berpasangan dilengkapi, langkah berikutnya adalah mulai menghitung evaluasi untuk kriteria reliability software akuntansi. Kalkulasi angka-angka dalam matriks perbandingan berpasangan tersebut kita ubah dalam bentuk decimal untuk mempermudah perhitungan dan kemudian kita jumlahkan setiap kolomnya sehingga didapat matriks seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Evaluasi Untuk Kriteria Reliability Software Akuntansi

Kriteria Reliability	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
AccSoft 1	1.00	4.00	7.00
AccSoft 2	0.25	1.00	3.00
AccSoft 3	0.14	0.33	1.00
Total Kolom	1.39	5.33	11.00

Setelah jumlah kolomnya ditentukan, angka–angka dalam tabel matriks tersebut dibagi dengan jumlah kolomnya masing–masing sehingga menghasilkan Tabel 7.

Tabel 7. Matriks Hasil Penjumlahan Masing-masing Kolom

Kriteria Reliability	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
AccSoft 1	0.72	0.75	0.64
AccSoft 2	0.18	0.19	0.27
AccSoft 3	0.10	0.06	0.09

Penentuan skala prioritas pilihan berdasarkan kriteria reliability software untuk ketiga software akuntansi tersebut didapatkan dari nilai rata–rata baris matriks perbandingan berpasangan seperti perhitungan berikut ini:

<i>Rata-rata Baris</i>	<i>Perhitungan</i>
0.70	= $(0.72+0.75+0.64)/3$
0.21	= $(0.18+0.19+0.27)/3$
0.09	= $(0.10+0.06+0.09)/3$

Hasilnya ditampilkan pada Tabel 8. Dapat dilihat bahwa faktor evaluasi untuk software akuntansi AccSoft 1 adalah 0.70, AccSoft 2 adalah 0.21 dan AccSoft 3 adalah 0.09.

Prosedur yang sama digunakan untuk mendapatkan nilai evaluasi seluruh kriteria lainnya yaitu Usability, efficiency, flexibility, testability dan safety. Tetapi sebelum kita menetapkan nilai evaluasi kriteria tersebut sebagai dasar penilaian kita nantinya, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah perbandingan berpasangan yang telah dilakukan sudah cukup konsisten atau tidak dengan cara menentukan *Consistency Ratio (CR)* -nya.

Tabel 8. Matriks hasil perbandingan berpasangan untuk faktor kapabilitas perusahaan

Kriteria	AccSoft 1	AccSoft 2	AccSoft 3
Reliability	0.70	0.21	0.09

### III.2.6. MENENTUKAN RASIO KONSISTENSI UNTUK KRITERIA RELIABILITY SOFTWARE AKUNTANSI

Penentuan rasio konsistensi diawali dengan menentukan *Weighted Sum Vector*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai evaluasi kriteria reliability untuk software akuntansi alternatif pertama atau AccSoft 1 dengan kolom pertama dari matriks perbandingan berpasangan awal. Kemudian mengalikan nilai evaluasi kriteria software akuntansi alternative kedua atau AccSoft 2 dengan kolom kedua matriks perbandingan berpasangan awal, dan nilai evaluasi kriteria software akuntansi alternatif ketiga atau AccSoft 3 dengan kolom ketiga dari matriks perbandingan berpasangan awal. Kemudian kita menjumlahkan nilai-nilai atau angka–angka baris per baris.

Weighted Sum Vector	Perhitungan
2.15	= $(0.70 \times 1.00) + (0.21 \times 4.00) + (0.09 \times 7.00)$
0.64	= $(0.70 \times 0.25) + (0.21 \times 1.00) + (0.09 \times 3.00)$
0.26	= $(0.70 \times 0.14) + (0.21 \times 0.33) + (0.09 \times 1.00)$

Langkah selanjutnya adalah menentukan *Consistency Vector*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membagi nilai *weighted sum vector* dengan nilai evaluasi kriteria yang telah didapatkan sebelumnya.

Consistency Vector	Perhitungan
3.07	= $2.15/0.70$
3.02	= $0.64/0.21$
3.01	= $0.26/0.09$

Setelah kita menemukan *consistency vector*-nya, selanjutnya kita menghitung nilai dua hal lainnya, yaitu *lambda* ( $\lambda$ ) dan *Consistency Index* (CI), sebelum menghitung rasio konsistensi. Nilai *lambda* biasanya merupakan nilai rata-rata *consistency vector*.

$$\text{Consistency Index} = \text{CI} = \frac{\lambda - n}{n - 1}$$

Dimana  $n$  merupakan jumlah alternatif item yang sedang diperbandingkan. Dalam kasus ini,  $n = 3$ , untuk tiga alternatif software akuntansi yang berbeda yang sedang diperbandingkan. Hasil kalkulasinya adalah sebagai berikut:

$$\lambda = (3.07 + 3.02 + 3.01) / 3 = 3.03$$

sehingga didapat

$$\text{CI} = \frac{3.03 - 3}{3 - 1} = 0.016$$

Akhir dari perhitungan metode AHP adalah penghitungan *Consistency Ratio*. *Consistency Ratio* (CR) adalah sama dengan *Consistency Index* dibagi dengan *Random Index* (RI), dimana RI ditentukan berdasarkan pada tabel RI. *Random Index* adalah sebuah fungsi langsung dari jumlah alternatif atau sistem yang sedang dipertimbangkan. Tabelnya disajikan dibawah ini dan diikuti dengan kalkulasi akhir *consistency ratio*.

n		RI	n		RI
n →	2	0.00	6	1.24	
	3	0.58	7	1.32	
	4	0.90	8	1.41	
	5	1.12			

Secara umum,

$$\text{Consistency Ratio} = \text{CR} = \frac{\text{CI}}{\text{RI}} \longrightarrow \text{CR} = \frac{0.016}{0.58} = 0.028$$

*Consistency ratio* tersebut mengindikasikan tingkat konsistensi pengambil keputusan dalam melakukan perbandingan berpasangan yang pada akhirnya mengindikasikan kualitas keputusan atau pilihan kita. Nilai CR yang besar menunjukkan kurang konsistennya perbandingan kita, sementara nilai CR yang semakin rendah mengindikasikan semakin konsistennya perbandingan yang kita lakukan. Umumnya, jika CR nya adalah 0.10 atau kurang, maka perbandingan yang dilakukan pengambil keputusan termasuk nilai dari hasil perbandingan untuk dasar pengambilan keputusan secara relatif bisa dikatakan konsisten. Untuk nilai CR yang lebih besar dari 0.10, menunjukkan bahwa si pengambil keputusan harus secara serius mempertimbangkan untuk mengevaluasi ulang respon-responnya selama dilakukan perbandingan berpasangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan matriks awal dari perbandingan berpasangan.

Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan dimana nilai CR untuk perbandingan kriteria reliability software akuntansi menunjukkan nilai yang lebih kecil dibanding 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang dilakukan oleh pengambil keputusan dalam hal ini pelaku UKM adalah konsisten sehingga hasil nilai evaluasi terhadap kriteria reliability software akuntansi untuk setiap alternatif software akuntansi dapat diterima.

Perhitungan yang sama dilakukan untuk menetapkan nilai evaluasi setiap alternatif software akuntansi untuk setiap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan memilih software akuntansi yang terbaik untuk UKM.

Dan berdasarkan pada perbandingan berpasangan yang dilakukan oleh pengambil keputusan pelaksana UKM dalam memilih software akuntansi didapat hasil akhir seperti yang terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Akhir Analisa Hirarki Proses Memilih Software Akuntansi Untuk UKM

Kriteria	Nilai Bobot (1)	AccSoft 1		AccSoft 2		AccSoft 3	
		Nilai (2)	Nilai Evaluasi (3) = (1)X(2)	Nilai (4)	Nilai Evaluasi (5) = (1)X(4)	Nilai (6)	Nilai Evaluasi (7) = (1)X(6)
Reliability	0.38	0.70	0.26	0.21	0.08	0.09	0.03
Usability	0.19	0.64	0.12	0.28	0.05	0.07	0.01
Efficiency	0.19	0.63	0.12	0.29	0.05	0.08	0.02
Flexibility	0.07	0.74	0.05	0.18	0.01	0.09	0.01
Testability	0.07	0.70	0.05	0.21	0.02	0.09	0.01
Safety	0.10	0.70	0.07	0.21	0.02	0.09	0.01
Total Nilai Evaluasi			0.68		0.24		0.08

Dimana total nilai evaluasi dikali bobot menunjukkan nilai 0.68 untuk software akuntansi AccSoft 1, nilai 0.24 untuk AccSoft 2, dan 0.08 untuk AccSoft 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa software akuntansi AccSoft 1 yang dinyatakan sebagai software akuntansi pilihan untuk digunakan UKM berdasarkan kriteria realibility, usability, efficiency, flexibility, testability, dan safety.

#### IV. KESIMPULAN

Dengan diterapkannya software aplikasi akuntansi yang sederhana dan sesuai kebutuhan sebuah UKM, maka diharapkan sebuah UKM dapat mencapai transparansi dan akurat dalam laporan keuangannya. Sehingga hal ini akan menjadi pemicu mulai meningkatnya pertumbuhan UKM di Indonesia. Walaupun tentunya harus disadari bahwa akuntansi bukanlah satu-satunya factor penentu keberhasilan pertumbuhan UKM.



AHP sebagai sebuah alat untuk menetapkan pilihan dapat dijadikan dasar dalam memilih secara lebih rasional, terutama dalam upaya memilih atau melakukan seleksi software aplikasi akuntansi.

Namun demikian AHP tetap saja memiliki kelemahan-kelemahan dan juga syarat agar hasil analisisnya ataupun proses analisisnya dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat mutlak yang harus di penuhi adalah bahwa dalam AHP si pengambil keputusan haruslah yang melakukan perhitungan ataupun perbandingannya sendiri dan si pengambil keputusan harus benar-benar mendapatkan kecukupan informasi berkaitan dengan deskripsi permasalahan dan faktor-faktor berpengaruhnya dengan baik. Begitu pula kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh analisa AHP adalah bahwa bagaimanapun subjektifitas pengambil keputusan dalam melakukan perbandingan berpasangan patut di pertanyakan, meskipun nantinya CR yang akan melakukan klarifikasi tingkat konsistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barry Render & Ralph M. Stair, Jr., 2000. Quantitative Analysis For Management, 7<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, p. 520 – 521.
- Dharma T, Ediraras, 2010, Akuntansi dan Kinerja UKM, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2, Volume 15, Agustus 2010.
- "Decision making with the analytic hierarchy process", 1995, International Journal of Information Technology, Vol.1, No. 1, pp. 33–52.
- elib.unikom.ac.id/download.php?id=90458, Kualitas Software Akuntansi, hal 17
- Gatot Prabantoro, 2008, Modul Pelatihan Terapan - Pengambilan Keputusan Bisnis Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), MATOH Technologies, Jakarta
- Halim Alamsyah, 2013, Kesiapan UMKM DKI Jakarta Dalam Menghadapi MEA 2015, Seminar Nasional ISEI, Jakarta, 27 Juni 2013.
- Junianti . 2010. Tantangan Pertumbuhan UMKM. hal 43.
- Kementerian Koperasi dan UKM, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2011-2-12.
- Project Management Body of Knowledge Guide, 2000 Edition, 2000, Project Management Institute, p. 155
- Richardus Eko Indrajit, 2011, Kriteria Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak, dosen.narotama.ac.id/.../KRITERIA-PENJAMINAN-KUALITAS-PERA...
- Taylor III, Bernard, 2004, Introduction to Management Science, 8<sup>th</sup> Edition, , Prentice Hall, New Jersey, p. 322-324.
- Wulan, Nindita, 2009, "Studi Empiris Penerapan Akuntansi UKM Depok", hal. 35-37

## Multiple Large Shareholders dan Asosiasinya dengan Kualitas Laba Perusahaan

**ANIES LASTIATI\***  
*Universitas Indonesia*

**Abstract:** *This study examines whether multiple large shareholders is (the second, and the third and fourth all together shareholders after the controlling shareholders) associated with the earning quality, which is proxied by the level of discretionary accruals reported. From the sample taken from biggest companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) between 2009 – 2011 it is deduced that the multiple large shareholders positively and significantly associated with the discretionary accruals reported in the financial reports. Other than that, this research also confirms the negative significant association between foreign ownership with the level of discretionary accruals.*

---

\* Author can be contacted at: [lastiati@yahoo.com.au](mailto:lastiati@yahoo.com.au)

## 1. Pendahuluan

Kualitas laba yang dilaporkan perusahaan selalu menjadi perhatian dari semua pemangku kepentingan perusahaan. Pelaporan laba yang berkualitas meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan atas kualitas laporan, dan atas kualitas kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah kualitas dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan berasosiasi dengan adanya dan besarnya kepemilikan besar yang kedua, ketiga, dan keempat (multiple-large shareholder, selanjutnya disingkat sebagai MLS) dalam struktur kepemilikan perusahaan. Berbagai penelitian telah melihat bahwa adanya hak-hak pemegang saham minoritas terancam oleh keberadaan pemegang saham yang besar-besar lewat ekspropriasi yang dilakukan oleh para pemegang saham besar tersebut (Thomsen, Pedersen, & Kvist, 2006) dan (Kim, Kitsabunnarat-Chatjuthamard, & Nofsinger, 2007). Meski demikian, Attig, Guedhami, & Mishra (2008) menunjukkan bahwa keberadaan MLS pada perusahaan ternyata memiliki fungsi untuk mengatasi *agency cost* dan asimetri informasi, yang dalam penelitian mereka terwujud dalam bentuk biaya modal lewat peran mereka menjalankan fungsi monitoring.

Dalam penelitian ini, saya berusaha menemukan peranan pemegang saham terbesar kedua (dan ketiga dan keempat) atau MLS dalam proses perusahaan menentukan kualitas laba yang dilaporkan. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ada tidaknya asosiasi antara struktur kepemilikan saham perusahaan, utamanya pemegang saham yang besar-besar setelah pemegang saham pengendali, dengan kualitas laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* (Klein, 2002) dan (Velury & Jenkins, 2006).

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, dengan memfokuskan pada perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di tahun 2011. Struktur kepemilikan pada penelitian ini diartikan sebagai jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham tertentu, dan dikelompokkan sebagai pemegang saham pengendali, atau kedua (atau ketiga dan keempat) berdasarkan pada presentase jumlah saham yang dipegang oleh pemodal tersebut dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham terbesar kedua, ketiga, dan keempat setelah pemegang saham pengendali, dan rasio jumlah saham yang dipegang pemegang saham MLS tersebut dibandingkan dengan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali berasosiasi positif dengan besarnya *discretionary accrual* perusahaan. Lebih jauh dari hasil pengujian yang dilakukan di penelitian ini ternyata semakin banyak jumlah pemegang saham asing yang berada di perusahaan akan semakin tinggi kualitas laba yang dilaporkan (semakin rendah tingkat *discretionary accruals*). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Chung, Ho, & Kim, 2004).

Kontribusi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi wawasan tentang peranan pemegang saham besar selain pemegang saham pengendali terhadap kualitas pelaporan keuangan, secara khusus atas pelaporan laba. Meski demikian, disadari bahwa penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, yakni jika peran MLS ini dapat ditelusuri hingga pada identifikasi identitas para MLS, sehingga dapat dipahami peran apa yang sesungguhnya dilakukannya, apakah menjalankan fungsi monitoring terhadap pemegang saham pengendali (Attig, Guedhami, & Mishra, 2008), atau justru menjadi sekutu dari pemegang saham pengendali dan mengancam kepentingan pemegang saham minoritas lewat potensi tindakan

ekspropriasi (Thomsen, Pedersen, & Kvist, 2006) dan (Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002).

Tulisan ini disusun dalam lima bagian. Bagian pertama yang berupa pendahuluan dan latar belakang ini akan diikuti dengan bagian kedua yang menjabarkan tentang kajian literatur yang mendasari penelitian ini diikuti dengan proses pengembangan hipotesa. Bagian ketiga akan menrinci tentang proses pengumpulan sampel, data dan pengembangan metodologi penelitian. Di bagian empat akan dibahas tentang hasil-hasil pengujian lengkap dengan analisisnya, dan ditutup oleh bagian lima yang berisi simpulan dan keterbatasan serta potensi pengembangan penelitian ini lebih lanjut.

## **2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesa**

### *2.1. Discretionary accruals (DA)*

Penelitian tentang *accruals*, terutama *discretionary accruals* telah banyak dilakukan dalam riset-riset akuntansi. Hal ini tidak mengherankan mengingat betapa pentingnya peranan *accruals* dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Laba *accruals* dianggap memiliki keunggulan dibandingkan cash flow sebagai alat ukur kinerja perusahaan karena dapat memitigasi perbedaan waktu dan masalah tidak *matchnya* antara pengakuan dan perolehan yang terkandung di balik angka cash flow (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995). Selain itu, fleksibilitas yang dibolehkan oleh aturan (seperti GAAP) bagi manajer untuk menentukan besarnya *accruals* juga memungkinkan manajer untuk dapat menggambarkan informasi yang memiliki *value relevance*, yang sejatinya tidak dapat tergambarkan pada komponen non-discretionary (Subramanyam, 1996).

Karena sarat dengan diskresi manajemen, *accruals* dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan *informativeness* laba, lewat pengkomunikasian informasi yang bersifat

privat (Watts & Zimmerman, 1986 dan Healy & Palepu, 1993). Pada pasar yang bersifat efisien, pasar modal cenderung memberi penilaian dan merefleksikan *discretionary accrual* pada harga saham. Selain itu *discretionary accrual* juga dapat memrediksi profitabilitas di masa yang akan datang, dan juga memperkirakan pergerakan dividen (Subramanyam, 1996).

Watts & Zimmerman (1986) dan Healy & Palepu (1993) lebih lanjut menyatakan bahwa *accruals* dapat menjadi alat yang dimanfaatkan oleh manajemen dengan motivasi oportunistik, yang karenanya menyebabkan distorsi terhadap kualitas laba yang dilaporkan. Sifat oportunistik ini berlandaskan pada masalah-masalah keagenan yang muncul pada kondisi saat tersedia insentif dan peluang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan pribadi seseorang. Masalah keagenan ini bisa terjadi baik antara perusahaan dengan pemegang saham, maupun dengan pemberi pinjaman. Contohnya, perusahaan dapat saja menggembungkan labanya di tahun-tahun sebelum perusahaan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kontrak pinjam-meminjamnya (*covenant*) dengan pemberi pinjamannya (DeFond & Jiambalvo, 1994).

Di lain pihak, Subramanyam (1996) menyatakan bahwa *discretionary accruals* merupakan indikator yang baik untuk memprediksi perilaku manajemen yang efisien, pada saat angka ini dapat memrediksi profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Di Indonesia, Siregar dan Utama (2008) mendapatkan bahwa tipe *discretionary accruals* yang ditemukan pada perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung bermotifkan efisiensi manajemen alih-alih dilandasi perilaku oportunistik.

## 2.2. Hubungan *Discretionary accruals* (DA) dengan Struktur Kepemilikan yang Memiliki Banyak Pemegang Saham Besar (*Multiple Large Shareholders (MLS)*) setelah Pemegang Saham Pengendali

Berbagai penelitian di masa lalu telah memusatkan perhatian pada peranan Good Corporate Governance (CG) untuk mengatasi masalah keagenan terutama dalam pelaporan keuangan. Penelitian-penelitian itu mencoba mengaitkan berbagai aspek CG dalam memengaruhi kualitas laba yang berhubungan dengan *discretionary accrual*. Ditemukan bahwa abnormal *accruals* tidak saja berhubungan secara negatif dengan keberadaan komite audit dan independensi *Board* (Klein, 2002), namun berhubungan negatif juga dengan keberadaan pemegang saham institusional (Velury & Jenkins, 2006). Dalam hal Corporate governance dari penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada keberadaan pemegang saham terbesar kedua, ketiga, dan keempat sebagai alternatif monitoring atas pemilik pengendali atas pengelolaan keuangannya.

Attig, Guedhami, & Mishra (2008) menyatakan bahwa pemegang saham minoritas kemungkinan besar dapat menjadi korban akibat motivasi oportunistik yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, saat kelompok pemegang saham ini memiliki akses yang besar dalam memengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan melalui manajemennya. Dengan demikian, adanya pemegang saham terbesar kedua, ketiga, dan keempat akan lebih merepresentasikan aspirasi pemegang saham lainnya selain pemegang saham pengendali dalam hal keterlibatan mereka dalam aktifitas monitoring terhadap manajemen perusahaan. Dalam studinya, Attig, Guedhami, & Mishra (2008) lebih lanjut menemukan bahwa keberadaan pemegang saham terbesar kedua, ketiga dan keempat akan meningkatkan aktifitas monitoring dan akhirnya mengurangi terjadinya asimetri informasi pada para pemegang saham. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman atas kualitas pelaporan keuangan sehingga bunga modal pada akhirnya dapat ditekan akibat berkurangnya akibat asimetri informasi.

Jiambalvo, Rajgopal, & Venkatachalam, (2002) juga mendukung argumen ini dengan menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi



cenderung memiliki harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan labanya, dan perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan asing dan didanai lewat obligasi cenderung memiliki valuasi atas *discretionary accrual* yang tinggi (Chung, Ho, & Kim, 2004). Hal ini karena market akan mengapresiasi adanya pemegang saham lainnya yang membantu melakukan aktifitas monitoring sehingga kualitas pelaporan akan menjadi lebih baik.

Pemegang saham terbesar kedua, ketiga, dan keempat (selanjutnya disebut MLS) pada penelitian ini secara khusus menyorot pada jumlah saham kepemilikan yang dimiliki para pemegang saham MLS tersebut. Berbeda dari penelitian (Attig, Guedhami, & Mishra, 2008) yang melakukan studinya berdasarkan hak suara (*voting rights*) dari pemegang saham MLS, fokus penelitian ini adalah pada peranan pemegang saham MLS berdasarkan pada jumlah lembar sahamnya yang dipegang MLS dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Banyak studi yang menyatakan bahwa hak suara (*voting rights*) bagi para pemegang saham sulit teridentifikasi (Claessens & Lang, 2000) dan (Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002). Karena data atas *voting rights* yang kurang tersedia di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan jumlah lembar saham sebagai dasar penetapan MLS.

Hubungan antara kepemilikan pemegang saham yang besar sudah banyak juga diteliti. Kepemilikan yang besar ini dipandang memiliki dampak positif maupun negatif bagi tata kelola perusahaan, terutama bagi pemegang saham minoritas. Pemegang saham yang besar memiliki keuntungan karena memiliki kekuasaan memonitor operasi dan manajemen perusahaan secara efektif (Kim, Kitsabunnarat-Chatjuthamard, & Nofsinger, 2007), yang terkadang dimanfaatkan oleh para pemegang saham minoritas. Pada kondisi seperti ini, maka MLS yang memegang fungsi monitoring diharapkan dapat menekan terjadinya *discretionary accruals*, terutama yang dilandasi oleh motivasi oportunistik, yang ditunjukkan dengan asosiasi yang negatif antara MLS dengan besarnya *discretionary accruals*.

Meski demikian, keuntungan peran monitoring yang dipegang MLS ini bisa saja menjadi merugikan bagi pemegang saham minoritas manakala kepentingan MLS ini berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas (Kim, Kitsabunnarat-Chatjuthamard, & Nofsinger, 2007) atau saat MLS memiliki tujuan lain selain meningkatkan *shareholder value* (Thomsen, Pedersen, & Kvist, 2006). Pada keadaan seperti ini keberadaan MLS justru akan dapat mendorong terbentuknya *discretionary accruals*, terutama saat kepentingan MLS sejalan dengan kepentingan manajemen dan saat MLS memiliki akses terhadap informasi privat perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Velury & Jenkins, 2006). Dengan kata lain, keberadaan dan besarnya MLS akan memiliki asosiasi yang positif dengan tingkat *discretionary accrual* yang dimiliki perusahaan.

Penelitian ini mempelajari apakah pemegang saham yang kedua terbesar (dan pemegang saham besar lain) setelah pemegang saham pengendali memegang peran monitor terhadap pemegang saham pengendali dalam hal mengendalikan tingkat *discretionary accruals*. Mengikuti pola model yang digunakan oleh (Attig, Guedhami, & Mishra, 2008), dan berdasarkan diskusi di atas, maka disusun hipotesa pertama, yang terbagi dalam enam sub-hipotesis sebagai berikut:

- H1a:** *Keberadaan pemegang saham besar kedua akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan*
- H1b:** *Besarnya jumlah saham yang dipegang pemegang saham besar kedua akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan*
- H1c:** *Rasio besarnya jumlah saham yang dipegang pemegang saham besar kedua dengan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan.*

Dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa terjadi koalisi antara pemegang saham terbesar kedua, ketiga dan keempat kemudian secara bersama-sama memegang peran monitoring terhadap pemegang saham pengendali, disusun sub-sub hipotesa berikut ini:

- H1d:** *Besarnya jumlah saham yang dipegang pemegang saham besar kedua, ketiga, dan keempat secara total akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan.*
- H1e:** *Rasio besarnya jumlah saham yang dipegang pemegang saham besar kedua, ketiga, dan keempat secara total dibanding dengan jumlah saham yang dipegang pemegang saham pengendali akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan.*

Yang terakhir, diuji variabel yang merepresentasikan dispersi pengendalian dari pemegang saham di antara keempat pemegang saham terbesar di suatu perusahaan dengan cara menjumlahkan kuadrat selisih jumlah saham yang dimiliki di antara pemegang saham pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semakin besar dispersi ini maka akan semakin tinggi jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham yang lebih banyak memiliki saham dibanding yang sesudahnya, sehingga semakin rendah kekuasaan pemegang saham yang lebih sedikit kepemilikannya untuk memonitor atau memengaruhi pemegang saham yang lebih tinggi jumlahnya, dengan hipotesa sebagai berikut:

- H1f:** *Dispersi pengendalian dari pemegang saham di antara keempat pemegang saham terbesar di suatu perusahaan akan berasosiasi dengan tingkat discretionary accruals perusahaan.*

Karena alasan yang telah disebutkan di atas, maka arah asosiasi dari keenam sub-hipotesa dari hipotesa pertama ini belum dapat ditentukan.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga akan diuji struktur kepemilikan perusahaan yang dikuasai (dimiliki sebagian) oleh pemegang saham asing atau yang berasal dari luar negara Indonesia. Chung, Ho, & Kim (2004) menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh pemodal asing akan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan laporan dengan kualitas yang lebih baik dan memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah. Sebagai konsekuensinya, asosiasi antara jumlah investor asing dalam perusahaan dengan *discretionary accruals* yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut akan memiliki hubungan yang negatif, yaitu semakin besar proporsi jumlah pemegang saham asing, semakin rendah tingkat *discretionary accruals*.

**H2:** *Keberadaan pemegang saham asing akan berhubungan secara negatif dengan tingkat discretionary accruals perusahaan.*

### 3. Data dan Desain Penelitian

#### 3.1. Pemilihan Sampel dan Data Kepemilikan

Untuk mempelajari dampak *multiple large shareholder* (MLS) terhadap *discretionary accruals* yang dicatatkan perusahaan, dipilih sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), secara khusus adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 tahun 2011. Indeks ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan harian Kompas, yang menampilkan 100 perusahaan yang dianggap paling likuid, memiliki nilai kapitalisasi pasar yang terbesar, dan menunjukkan kinerja yang baik di pasar. Saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 diperkirakan merepresentasikan 70 hingga 80% saham yang

diperdagangkan di pasar modal, karena itu dapat disimpulkan bahwa kelompok perusahaan yang dipilih merupakan representasi yang memadai untuk mewakili pasar di Indonesia.

Sebagai sampel awal, ke 100 perusahaan yang terdapat pada indeks tersebut dipilih sebagai sampel awal. Kemudian 27 perusahaan yang berasal dari industri perbankan dan keuangan dikeluarkan dari sampel, karena adanya perbedaan karakteristik dalam hal kinerja keuangan dan aspek regulatori yang membawahi industri ini. Alasan lain yang mendasari dikeluarkannya kelompok perusahaan ini adalah kesulitan yang dihadapi dalam memisahkan antara *discretionary accrual* dengan *non-discretionary accrual* pada perusahaan-perusahaan di industri ini (Klein, 2002).

Selanjutnya dikeluarkan dari sampel perusahaan-perusahaan dengan data yang kurang lengkap, baik data harga saham, maupun data keuangan lain yang dibutuhkan untuk mengestimasi *discretionary accrual* model Modified Jones (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995), dan variabel-variabel independen lain. Sampel diambil untuk 3 tahun, yaitu 2009, 2010, dan 2011. Detail pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Data diperoleh dari Thomson Reuters Data Stream untuk data keuangan, dan laporan tahunan perusahaan untuk data kepemilikan perusahaan dan data-data lain yang tidak dapat diperoleh dari Thomson Reuters Data Stream.

### *Pengukuran Variabel*

Penelitian ini menyajikan bukti empiris tentang pengaruh dari keberadaan pemegang saham besar terbesar kedua dan selanjutnya setelah pemegang saham pengendali terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan menggunakan nilai absolut dari *discretionary accruals* (Jiang, Lee, & Anandarajan, 2008) dan (Velury & Jenkins, 2006). Di bagian lain tulisan ini akan

dijabarkan bagaimana cara yang digunakan untuk menentukan besarnya *discretionary accrual*.

#### Data Kepemilikan (*ownership*)

MLS diproksikan dengan mengikuti proksi MLS yang digunakan oleh Attig, Guedhami, & Mishra, (2008). Perbedaan utama dari proksi pada penelitian ini dengan yang digunakan oleh Attig, Guedhami, & Mishra, (2008) adalah pada penelitian ini yang dihitung adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham kedua, ketiga, dan seterusnya, alih-alih hak suara (*voting rights*). Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- PRESENCE: merupakan variabel dummy, yang bernilai 1 jika perusahaan memiliki paling tidak dua pemegang saham besar, dengan jumlah nilai saham yang dipegangnya (cash-flow rights) lebih dari 5% dari total saham yang dikeluarkan, dan 0 jika sebaliknya.
- SHAR2: presentase nilai saham yang dimiliki pemegang saham kedua berbanding dengan total saham yang dikeluarkan perusahaan, yang totalnya lebih dari 5%.
- SHAR2\_1: presentase nilai saham yang dimiliki pemegang saham kedua dibandingkan dengan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.
- SHAR234: jumlah presentase nilai saham yang dimiliki pemegang saham kedua, ketiga, dan keempat (yang lebih besar dari 5%) berbanding dengan total saham yang dikeluarkan perusahaan.
- SHAR234\_1: rasio jumlah presentase nilai saham yang dimiliki pemegang saham kedua, ketiga, dan keempat dibandingkan dengan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.
- HI\_DIFF: mengukur dispersi jumlah lembar saham yang dipegang oleh keempat pemegang saham terbesar pada perusahaan. Proksi ini dihitung dengan cara

menjumlahkan kuadrat dari selisih antara presentase pemegang saham di antara kelima pemegang saham terbesar, atau dengan rumus sebagai berikut:  $[(SHAR1 - SHAR2)^2 + (SHAR2 - SHAR3)^2 + (SHAR3 - SHAR4)^2]$ . ASING: Proksi ini mengacu pada kepemilikan saham oleh investor asing. Dihitung dengan menggunakan proporsi pemegang saham asing terhadap seluruh saham yang beredar. Perusahaan yang dimiliki investor asing akan cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan tingkat asimetri informasi yang rendah (Chung, Ho, & Kim, 2004). Karenanya, asosiasi antara jumlah investor asing dalam perusahaan dengan *discretionary accruals* yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut diduga memiliki hubungan yang negatif.

#### Mengukur *Discretionary accruals*

Nilai akrual diskresioner (DA) dihitung dengan menggunakan model *modified Jones* (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995) yang dideflasi dengan menggunakan total aset perusahaan tahun sebelumnya (Chung, Ho, & Kim, 2004).

$$DA_{it}/A_{i,t-1} = TA_{i,t} - \{\alpha + \beta_0 1/A_{i,t-1} + \beta_1 [\Delta \text{Revenue} - \Delta \text{Account Receivable}] / A_{i,t-1} + \beta_2 PPE / A_{i,t-1}\}$$

dimana:

$TA_{i,t}$ :	Total <i>Accrual</i> perusahaan i di tahun t, yang diperoleh dengan rumus berikut: Net Income Before Extraordinary Items (NIBE) – Cash Flow from Operation (CFO)
$\Delta \text{Revenue}$ :	$\text{Revenue}_{i,t} - \text{Revenue}_{i,t-1}$
$\Delta \text{Account Receivable}$ :	$\text{Account Receivable}_{i,t} - \text{Account Receivables}_{i,t-1}$
$PPE_{i,t}$ :	Nilai Property, Plant dan Equipment perusahaan i pada tahun t
$A_{i,t-1}$ :	Nilai Total Asset perusahaan i pada tahun t-1

Atas hasil perhitungan nilai *discretionary accrual* tersebut kemudian dihitung nilai absolutnya untuk menjadi proksi dari manajemen laba (Klein, 2002) dan (Velury & Jenkins, 2006).

### Variabel Kontrol

Terdapat tiga variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian ini mengikuti (Klein, 2002), sebagai berikut:

- **PRESDIR**: prosentase kepemilikan saham presiden direktur dibandingkan dengan total jumlah ekuitas perusahaan secara keseluruhan. Kepemilikan saham perusahaan dapat memiliki dampak yang bervariasi terhadap kualitas pelaporan laba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dimilikinya saham oleh Presiden Direktur dapat meningkatkan disiplin penyajian laporan keuangan, yang berarti asosiasi antara jumlah kepemilikan saham Presiden Direktur dengan nilai *discretionary accrual* akan bersifat negatif. Di sisi lain, asosiasi ini dapat bersifat positif, jika Presiden Direktur memiliki insentif untuk dapat meningkatkan nilai total kompensasinya (Klein, 2002).
- **ADNI (Absolute Δ Net Income)**: dihitung dari log nilai absolut selisih nilai net income perusahaan pada tahun t dengan tahun t-1.
- **LNTA**: natural log dari nilai buku aset.

### 3.2. Model Empiris

Model penelitian menggunakan tujuh model di bawah ini:

Untuk membuktikan hipotesa 1a digunakan Model 1:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 PRESENCE_{i,t} + \beta_2 PRESDIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 1b digunakan Model 2:



$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 SHAR2_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 1c digunakan Model 3:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 SHAR2\_1_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 1d digunakan Model 4:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 SHAR234_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 1e digunakan Model 5:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 SHAR234\_1_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 1f digunakan Model 6:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 HI\_DIFF_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

Untuk membuktikan hipotesa 2 digunakan Model 7:

$$DA_{i,t} = \alpha + \beta_1 ASING_{i,t} + \beta_2 PRES DIR_{i,t} + \beta_3 ADNI_{i,t} + \beta_4 LNTA_{i,t} + \varepsilon$$

## 4. Hasil dan Analisis Penelitian

### 4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang dipergunakan dalam model regresi empiris dalam penelitian ini. Lebih dari separuh dari jumlah sampel memiliki pemegang saham terbesar kedua (pemegang saham kedua terbesar dengan kepemilikan lebih dari 5% dari total ekuitas perusahaan) setelah pemegang saham pengendali, yaitu sebesar 56,28% dari

keseluruhan sampel. Rata-rata kepemilikan saham terbesar kedua tersebut besarnya adalah 8,41% dari total ekuitas perusahaan, sementara total kepemilikan saham kedua, ketiga, dan keempat adalah 13,59% dari keseluruhan total modal ekuitas perusahaan.

Jika kepemilikan saham kedua dan total kedua, ketiga, dan keempat tersebut dibandingkan dengan total saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali, maka rasio untuk

masing-masing adalah 28,64% dan 50,31%. Sementara saham yang dipegang oleh investor asing secara rata-rata jumlahnya adalah 22.11% dari seluruh total ekuitas perusahaan.

#### 4.2. Analisis Spearman

Tabel 3 di atas menunjukkan korelasi Spearman antar variabel yang diuji dalam penelitian ini. Secara umum koefisien korelasi antar variabel kontrol dan terutama dengan variabel yang diuji dalam penelitian ini dan variabel dependen *discretionary accruals* menunjukkan korelasi yang lemah. Hal ini mengindikasikan rendahnya kemungkinan terjadinya multikolinearitas yang bisa mengganggu hasil regresi yang akan dilakukan.

#### 4.3. Hasil dan Analisa Regresi

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi *multivariate* dengan menggunakan model 1 hingga 7 seperti yang dijabarkan di bagian 3.2 sebelumnya. Hasil pada regresi Model 1 tidak menunjukkan nilai yang signifikan di antara keberadaan pemegang saham kedua terbesar kedua setelah pemegang saham pengendali dengan tingkat *discretionary accruals*. Ini menunjukkan bahwa hipotesa 1a yang menduga adanya asosiasi antara keberadaan pemegang saham kedua terbesar terhadap *discretionary accruals* tidak terbukti. Yang berarti bahwa, tingkat *discretionary accruals* di perusahaan sampel tidak bergantung pada ada atau tidaknya pemegang saham kedua setelah pemegang saham pengendali.

Hasil regresi model 2 hingga 5 menunjukkan adanya asosiasi antara besarnya pemegang saham kedua (dan ketiga dan keempat) dan rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar tersebut dengan jumlah saham pemegang saham pengendali dengan tingkat *discretionary accruals*. Model 2 (3) secara khusus menguji adanya hubungan antara besarnya (rasio) jumlah saham yang dimiliki pemegang saham terbesar kedua dengan *discretionary*

*accrual* menunjukkan adanya asosiasi yang cukup (sangat) signifikan positif di antara kedua variabel. Hasil positif ini menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham kedua (dan besarnya rasio jumlah saham yang dipegangnya dibanding dengan pemegang saham pengendali) ternyata justru menaikkan tingkat *discretionary accruals* perusahaan.

Hal yang serupa juga ditemukan pada model 4 (5). Kedua model yang menguji besarnya (rasio) jumlah saham pemegang saham kedua, ketiga dan keempat secara bersama-sama (dan dibandingkan dengan jumlah saham pemegang saham pengendali) juga menunjukkan hubungan yang sangat (cukup) signifikan positif terhadap tingkat *discretionary accruals*. Inferensi yang serupa juga dapat ditarik bahwa semakin besar jumlah saham (rasio) yang dimiliki ketiga kelompok pemegang saham ini secara bersama-sama (dan dibandingkan dengan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali) maka akan semakin besar tingkat *discretionary accruals* perusahaan.

Terdapat beberapa kemungkinan penjelasan atas inferensi ini. Yang pertama, pemegang saham kedua (dan ketiga dan keempat) di perusahaan-perusahaan sampel memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan manajemen, yang mungkin berbeda dengan kepentingan umum pemegang saham minoritas (Kim, Kitsabunnarat-Chatjuthamard, & Nofsinger, 2007) atau MLS memiliki agenda lain tersendiri selain dari tujuan untuk meningkatkan *shareholder value* (Thomsen, Pedersen, & Kvist, 2006).

Alasan kedua untuk menjelaskan hubungan positif signifikan di atas adalah fakta bahwa banyak di antara pemegang saham yang termasuk dalam MLS di dalam sampel yang termasuk dalam penelitian ini merupakan afiliasi atau perusahaan dengan kepemilikan yang serupa dengan pemegang saham pengendali, atau merupakan anggota keluarga dari, atau termasuk dalam kelompok bisnis yang sama dengan pemegang saham pengendali (Claessens & Lang, 2000). Contohnya: salah satu sampel perusahaan PT BW Plantation yang dimiliki

39% sahamnya oleh BW Investindo, dan pemegang saham keduanya adalah Fendalton Investments sebesar 23%. Meskipun jumlah maupun rasio pemegang saham kedua terhadap saham pertama cukup besar, namun kepentingan yang diusung oleh pemegang saham kedua belum tentu tidak beraliansi dengan kepentingan pemegang saham pengendali. Dibutuhkan analisa lebih mendalam mengenai identitas dan hubungan afiliasi/keluarga di antara para pemegang saham suatu perusahaan untuk mengkonfirmasi penjelasan ini.

Di luar alasan pertama dan kedua di atas, terdapat kemungkinan ketiga yang sedikit berbeda dengan kedua penjelasan di atas. Hubungan yang positif antara struktur kepemilikan MLS dengan *discretionary accruals* dapat saja disebabkan oleh sifat dasar atau jenis *discretionary accruals* yang dikeluarkan perusahaan. *Discretionary accruals* yang dibuat dengan tujuan efisiensi, untuk menjamin profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, alih-alih bermotifkan oportunistik dan menguntungkan kepentingan manajemen, tentu akan mendapat dukungan dari para pemegang saham, baik pemegang saham pengendali maupun pemegang saham dalam kelompok MLS. Kemungkinan ini tidak dapat diabaikan mengingat jenis *discretionary accruals* yang banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia bersifat efisien (Siregar & Utama, 2008). Tentu saja argumen ini masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas keakurasiannya.

Hasil regresi model 6 menunjukkan nilai yang positif dan cukup signifikan. Tingginya dispersi jumlah saham antara satu pemegang saham dengan pemegang saham berikutnya (antara yang pertama dengan yang kedua, ketiga, dan keempat), menyebabkan pemegang saham pertama memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Attig, Guedhami, & Mishra, 2008).

Secara umum hipotesa pertama terbukti dalam penelitian ini. Perkecualian ditemukan pada sub- hipotesa 1a, yang menyebutkan bahwa keberadaan pemegang saham kedua akan berasosiasi dengan tingkat *discretionary accruals* yang tidak terbukti.

Konsisten dengan Chung, Ho, & Kim (2004), model 7 membuktikan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor asing memiliki kualitas pelaporan yang lebih baik, ditunjukkan dengan hubungan yang negatif antara jumlah pemegang saham asing dengan tingkat *discretionary accruals*. Hal ini sekaligus membuktikan hipotesa kedua.

Untuk variabel kontrol, hanya variabel PRESDIR yang mewakili dimilikinya saham perusahaan oleh Presiden Direktur perusahaan tersebut yang menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap tingkat *discretionary accruals* secara konsisten. Asosiasi positif ini menunjukkan bahwa Presiden Direktur di perusahaan sampel memiliki insentif untuk memengaruhi kualitas laba perusahaan saat nilai kompensasinya terpengaruh oleh besarnya laba perusahaan (Klein, 2002).

Meski tidak terlalu konsisten, namun nilai absolut delta laba bersih perusahaan juga menunjukkan angka yang signifikan negatif (yang sesuai dengan prediksi) kecuali pada model-model 3 dan 5. Sementara natural log total aset perusahaan tidak memiliki asosiasi dengan tingkat *discretionary accruals* perusahaan.

## 5. Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

### 5.1. Kesimpulan

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemegang saham terbesar kedua (dan ketiga dan keempat) atau MLS yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama pada periode 2009 hingga 2011

memiliki asosiasi positif dengan tingkat laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Keluaran ini konsisten dengan teori kepemilikan besar perusahaan di luar kepemilikan pemegang saham pengendali (*blockholders*) yang beraliansi dengan pemegang saham pengendali, alih-alih menjadi sistem monitor terhadap pemegang saham pengendali. Kedudukan pemegang saham MLS yang secara positif berasosiasi dengan *discretionary accruals*, yang artinya melemahkan kualitas laba perusahaan ini, memperburuk masalah keagenan yang mungkin muncul di antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Konsekuensi lanjutan dari hubungan ini adalah semakin mudahnya pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap kepentingan dan hak pemegang saham minoritas, hingga pada tindakan *tunneling* kesejahteraan pemegang saham minoritas demi kepentingan pemegang saham pengendali.

Di lain pihak, kepemilikan asing ternyata menyediakan sistem monitoring yang cukup efektif untuk mencegah berkembangnya sifat oportunistik manajemen. Hal ini terlihat dari hasil pengujian terhadap kepemilikan asing yang berasosiasi secara negatif terhadap tingkat *discretionary accruals* perusahaan.

Penelitian ini memberi kontribusi dengan menyediakan bukti tentang peranan pemegang saham terbesar kedua (dan ketiga dan keempat) di luar pemegang saham pengendali dalam menentukan kualitas laba perusahaan, dalam hal ini adalah tingkat *discretionary accruals* perusahaan.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Pengembangan

Penelitian ini mengandung beberapa kelemahan utama. Yang pertama adalah digunakannya jumlah lembar saham (*cash-flow rights*) pemegang saham sebagai proksi untuk menentukan peranan pemegang saham kedua (dan ketiga dan keempat), alih-alih menggunakan *voting*

*rights* mereka. Penggunaan *voting rights* tentu akan memberikan hasil yang berbeda dengan hasil yang telah ada saat ini.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap identitas dari pemegang saham MLS. Identifikasi atas identitas ini akan dapat menjelaskan tentang hasil arah asosiasi antara MLS dengan tingkat *discretionary accruals* lebih lanjut.

Kelemahan ketiga yang terdapat pada penelitian ini adalah pemilihan sampel yang berlandaskan hanya pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya termasuk dalam Indeks Kompas 100, tahun 2011. Meski di satu sisi pengambilan sampel ini telah mampu mewakili 70 hingga 80% saham yang beredar di Indonesia, namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sampel hanya perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan besar. Satu kelompok perusahaan, yaitu perusahaan-perusahaan kecil belum terwakili dalam sampel ini.

**Daftar Pustaka**

- Attig, N., Guedhami, O., & Mishra, D. (2008). Multiple large shareholders, control contests, and implied cost of equity. *Journal of Corporate Finance*.
- Chung, R., Ho, S., & Kim, J.-B. (2004). Ownership Structure and the Pricing of Discretionary Accruals in Japan. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* 13, 1-20.
- Claessens, S., & Lang, L. H. (2000). The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics* 58, 81-112.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P., & Lang, L. H. (2002). Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. *The Journal of Finance*, vol LVII, No. 6, 2741 - 2771.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, Vol. 70, No. 2, 193 - 225.
- DeFond, M. L., & Jambalvo, J. (1994). Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, vo 17, iss. 1-2, 145-176.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (1993). The Effect of Firms' Financial Disclosure Policies on Stock Prices. *Accounting Horizons*, 7, 1-11.
- Jambalvo, J., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2002). Institutional Ownership and the Extent to which Stock Prices Reflect Future Earnings. *Contemporary Accounting Research* 19(1), 117 - 145.
- Jiang, W., Lee, P., & Anandarajan, A. (2008). The Association between Corporate Governance and Earnings Quality: Further Evidence Using GOV Score. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 24, 191-201.
- Kim, K. A., Kitsabunnarat-Chatjuthamard, P., & Nofsinger, J. R. (2007). Large Shareholder, Board Independence, and Minority Shareholders Rights: Evidence from Europe. *Journal of Corporate Finance* 13, 859-880.
- Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 375 - 400.
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of Earnings Management and The Effect of Firm Size, and Corporate Governance Practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting* 43, 1-27.
- Subramanyam, K. R. (1996). The Pricing of Discretionary Accruals. *Journal of Accounting and Economics* 22, 249-281.
- Thomsen, S., Pedersen, T., & Kvist, H. K. (2006). Blockholder Ownership: Effects on Firm Value in Market and Control Based Governance Systems. *Journal of Corporate Finance*, 12, 246 - 269.
- Velury, U., & Jenkins, D. S. (2006). Institutional Ownership and Quality of Earnings. *Journal of Business Research* 59, 1043-1051.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.



## LAMPIRAN

Sampel	Firms	Firm-Year
Kompas 100 Index	100	300
Banking and Financial Industry	-27	-81
Incomplete data	-12	-36
Final sample	61	183

Tabel 1: Data Sampel

Tabel 2: Analisis Deskriptif

Catatan: semua variabel telah dijelaskan di bagian 3.1.

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Obs.
DA	5270000000	649000000	205000000000	4404336	22100000000	183
PRESENCE	0.562842	1.000.000	1.000.000	0	0.497396	183
SHAR2	0.084074	0.0629	0.3715	0	0.096574	183
SHAR2_1	0.286404	0.153891	0.995649	0	0.346888	183
SHAR2345	0.135971	0.08056	0.6201	0	0.162286	183
SHAR2345_1	0.513088	0.1994	3.716.814	0	0.751994	183
HI_DIFF	0.220374	0.178084	0.914892	0.000382	0.208622	183
PRES DIR	0.000423	0	0.016	0	0.002115	183
ASING	0.221143	0.0808	0.9258	0	0.27364	183
ADNI	1.922.473	1.932.283	2.342.990	1.196.276	1.819.071	183
LNTA	9.882.366	9.940.651	1.118.617	6.817.614	0.658087	183

Tabel 3: Korelasi Spearman

Variabel:	DA	PRESENCE	SHAR2	SHAR2_1	SHAR2345	SHAR2345_1	HI_DIFF	PRES DIR	ASING	ADNI	LNTA
DA	1										
	-----										
PRESENCE	-0.092067	1									
	0.2151	-----									
SHAR2	-0.11186	0.7693***	1								
	0.1317	0.000	-----								
SHAR2_1	-0.056783	0.7296***	0.8411***	1							
	0.4452	0.000	0.000	-----							
SHAR2345	-0.12893*	0.7247***	0.8864***	0.8552***	1						
	0.0819	0.000	0.000	0.000	-----						
SHAR2345_1	-0.082362	0.5921***	0.6049***	0.8605***	0.8276***	1					
	0.2677	0.000	0.000	0.000	0.000	-----					
HI_DIFF	-0.044722	-0.5391***	-0.4825***	-0.6246***	-0.5273***	-0.5585***	1				
	0.5477	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-----				
PRES DIR	-0.030172	0.037677	-0.002155	-0.076373	0.004742	-0.066881	0.1329*	1			
	0.6851	0.6126	0.9769	0.3042	0.9492	0.3684	0.0729	-----			
ASING	-0.09497	-0.034432	-0.034771	-0.097737	-0.063283	-0.110673	0.2057***	0.2484***	1		
	0.201	0.6436	0.6403	0.1881	0.3947	0.1358	0.0052	0.0007	-----		
ADNI	-0.036623	-0.2091***	-0.2993***	-0.3038***	-0.3372***	-0.2602***	0.2181***	0.078179	0.1266*	1	
	0.6226	0.0045	0.000	0.000	0.000	0.0004	0.003	0.2928	0.0877	-----	
LNTA	0.104235	-0.2777***	-0.2832***	-0.3768***	-0.3194***	-0.3528***	0.1950***	0.047157	-0.093979	0.1601*	1
	0.1602	0.0001	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.0082	0.5261	0.2057	0.0304	-----

Catatan: tanda asterisk menunjukkan tingkat signifikansi p kurang dari: 0.1 (\*), 0.05 (\*), and 0.01(\*\*\*). Semua variabel telah dijelaskan di bagian 3.1. tulisan ini.

Tabel 4: Hasil Regresi terhadap *Discretionary accruals*

	Tanda	1	2	3	4	5	6	7
<b>intercept</b>		0.3151***	0.2788***	0.2877	0.3972*	0.2139***	0.3343**	0.3229***
		0.0011	0.0043	0.2173	0.0957	0.000	0.0137	0.0023
<b>PRESENCE</b>	?	0.0000						
		0.1918						
<b>SHAR2</b>	?		0.0533*					
			0.0545					
<b>SHAR2_1</b>	?			0.5868***				
				0.0056				
<b>SHAR234</b>	?				0.1297***			
					0.000			
<b>SHAR234_1</b>	?					0.301*		
						0.0792		
<b>HI_DIFF</b>	?						0.062**	
							0.0151	
<b>ASING</b>	-							-0.0910***
								0.000
<b>PRES DIR</b>	?	14.337***	13.76***	16.487***	15.836***	18.479***	16.526***	13.408***
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>ADNI</b>	-	-0.0046***	-0.003***	-0.001	-0.0029**	-0.002	-0.0039***	-0.0039***
		0.000	0.0036	0.7374	0.0233	0.3419	0.000	0.000
<b>LNTA</b>	?	-0.0011	-0.0035	-0.0103	-0.0164	-0.0002	-0.008	-0.0013
		0.9060	0.7729	0.6856	0.5019	0.974	0.5919	0.8983
<b>Adj R<sup>2</sup> (in%)</b>		93.38	93.59	94.08	93.72	93.85	93.61	93.44

Catatan: tanda asterisk menunjukkan tingkat signifikansi p kurang dari: 0.1 (\*), 0.05 (\*), and 0.01(\*\*\*). Semua variabel telah dijelaskan di bagian 3.1. tulisan

## **Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Arus Kas Dari Aktivitas Operasional, dan Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Kredit**

**MONITA FRANSISKA**  
**ANCELLA ANITAWATI HERMAWAN**  
*Universitas Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009), berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, jumlah anggota, serta kompetensi. Penetapan kelayakan kredit menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Majalah Infobank edisi April 2011. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik dengan sampel 215 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa probabilita perusahaan dinyatakan layak memperoleh kredit bank semakin meningkat apabila efektivitas dewan komisaris dan komite audit semakin tinggi, arus kas dari aktivitas operasional semakin besar, dan peluang pertumbuhan yang semakin tinggi.

**Kata kunci:** corporate governance, efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, kelayakan kredit

## Pendahuluan

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan membutuhkan modal atau pendanaan dengan jumlah yang besar. Sumber pendanaan yang bisa diperoleh perusahaan adalah pendanaan internal (*internal financing*) dan pendanaan eksternal (*external financing*). Pendanaan internal adalah sumber pendanaan yang berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan yang digunakan untuk membangun dan menjalankan perusahaan tersebut. Pendanaan eksternal adalah pendanaan yang berasal diluar dana pribadi pemilik, seperti saham, obligasi, atau kredit bank. Salah satu sumber pendanaan eksternal yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah kredit atau pinjaman kepada perbankan.

Perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dari kredit bank harus dapat memenuhi syarat kelayakan dari bank tersebut karena pemberian kredit yang dilakukan perbankan dapat memunculkan risiko yang cukup tinggi bagi perbankan tersebut, seperti kredit yang macet, perusahaan tidak mampu membayar pokok pinjaman ataupun bunganya, atau likuidasi. Oleh sebab itu, perbankan akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Perbankan akan memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan yang baik. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik, akurat, dan dapat diandalkan, perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*. Kualitas *corporate governance* sebaiknya juga menjadi fokus bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit (Firth *et al.*, 2009). Hal ini disebabkan karena *corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Ball *et al.* (2008) bahwa laporan keuangan yang dikelola dengan baik karena adanya penerapan *good corporate governance* akan mengurangi adanya asimetri informasi diantara kreditur dan laporan keuangan tersebut dapat menyediakan *signal* yang lebih informatif tentang kualitas kredit di masa depan.

Selain itu, *corporate governance* dapat membantu mengoptimalkan risiko kredit dengan memitigasi *agency problem* antara pemegang saham dan manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency problem* muncul ketika manajemen (*agent*) tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, *bondholders*, atau kreditur (*principal*). Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, memberikan keyakinan bagi perbankan, sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan tersebut dapat digunakan secara efisien oleh perusahaan dan dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Beberapa studi seperti Piot *et al.* (2007), Blom *et al.* (2006), Uzun *et al.* (2004), Anderson *et al.* (2004), dan Bhojraj dan Sengupta (2003) telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara *corporate governance* dengan biaya hutang.

Struktur *corporate governance* yang membantu menghasilkan laporan keuangan yang baik, akurat, berkualitas, dan dapat diandalkan, serta mengurangi *agency problem* adalah dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif dapat melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen sehingga dan mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholders*, baik kreditur ataupun pemegang saham sehingga manajemen dapat menghasilkan kinerja yang baik. Menurut Monks dan Minow (1995), *monitoring* dari *board* dapat meningkatkan kualitas manajemen dalam membuat keputusan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sementara itu, komite audit di dalam perusahaan berperan dalam mewujudkan *good corporate governance* (Muhammad, 2007). Menurut Pincus *et al.* (1989), komite audit merupakan mekanisme *monitoring* yang berbiaya mahal dan perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi akan bersedia menerima biaya yang mahal tersebut. Peran komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen melalui penilaian atas informasi keuangan perusahaan. Dewan komisaris dan komite audit diharapkan berperan penting pada akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan (Hermawan, 2009).

Dewan komisaris dan komite audit harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif agar fungsi pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dapat dilakukan dengan sebaiknya dan semestinya. Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh empat karakteristik dari dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Sementara efektivitas komite audit dipengaruhi oleh tiga kategori yang mencerminkan karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit akan diukur melalui skor yang diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan (*checklist*) yang berasal dari penelitian Hermawan (2009). Dewan komisaris yang independen dapat melakukan tugas *monitoring* dengan baik dan berada pada posisi yang tidak memihak siapapun sehingga laporan keuangan perusahaan terkelola dengan baik dan memberikan laporan yang lebih *credible*. *Board of directors* yang independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang (Anderson *et al.*, 2004). Menurut Chen *et al.* (2006), Bhajraj dan Sengupta (2003) menyatakan bahwa *board of directors* yang independen dapat mengurangi *agency problem* dengan kreditur. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima tingkat bunga yang rendah ketika *board of directors* independen dalam perusahaan semakin banyak.

Dewan komisaris melakukan berbagai aktivitas, seperti menghadiri *meeting*, *review* laporan keuangan, menilai kinerja tahunan dan prospek bisnis yang disiapkan oleh dewan direksi dan aktivitas yang dilakukan oleh komite audit yang berkaitan dengan tugasnya, seperti mengevaluasi pengendalian internal, mengawasi laporan keuangan, menghadiri rapat, dan mengevaluasi auditor eksternal. Dengan adanya aktivitas yang jelas dan berkaitan dengan fungsinya sebagai *monitoring* kinerja manajemen, maka fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik. Menurut Xie *et al.* (2003), *board of directors* dan komite audit yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas laba. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris,

diharapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan semakin efektif. Dengan perusahaan yang memiliki komite audit dalam jumlah banyak, perlindungan dan pengendalian atas pelaporan keuangan akan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan dampak transparansi yang tinggi dan biaya hutang yang rendah. Jumlah anggota *board* mempengaruhi tugas komite audit dan *monitoring* (Klein, 1998 dan 2002a). Menurut Adams dan Mehran (2002), ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas dalam *monitoring*. Menurut Anderson *et al.* (2004), perusahaan dengan jumlah komite audit yang besar melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dengan lebih baik.

Dewan komisaris dan komite audit yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis perusahaan, akuntansi, maupun keuangan, akan sangat membantu dalam proses pengawasan kinerja keuangan perusahaan. Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi akrual diskresionari (Xie *et al.*, 2003). Menurut Agrawal dan Chadcha (2005), frekuensi *earning restatement* lebih rendah pada perusahaan yang memiliki *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite auditnya. Dengan kinerja yang baik, perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

Arus kas merupakan arus perjalanan kas masuk dan keluar dari perusahaan baik dari aktivitas operasional, investasi, maupun pembiayaan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasional merupakan salah satu sumber selain *good corporate governance* yang dapat memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dari perbankan atau tidak. Menurut Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional



merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Selain itu, menurut pandangan investor, arus kas dari aktivitas operasional dapat digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan dari investasi perusahaan di masa kini dan masa depan.

Selain itu, perbankan juga memperhatikan peluang pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myer, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh peluang pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan. Perbankan akan cenderung memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Akan tetapi, menurut Psillaki *et al.* (2010), peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV yang tinggi. Untuk investasi ini, biasanya perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, tidak jarang perusahaan yang mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit yang besar ini akan menimbulkan risiko yang besar bagi bank, diantaranya adalah perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunga yang cukup besar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris di Indonesia mengenai apakah dewan komisaris dan komite audit yang efektif dapat menciptakan *good corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah kemungkinan memperoleh kelayakan kredit juga dipengaruhi oleh besarnya arus kas dari aktivitas operasional an peluang pertumbuhan perusahaan.

## 1. Tinjauan Literatur

### 2.1 Penerapan Corporate Governance di Indonesia

Dalam UU No. 1/ 1995 mengenai Perseroan Terbatas, sistem *corporate governance* yang ada di Indonesia menganut *two tier system*, dimana terdapat dewan komisaris dan dewan direksi dalam perusahaan. Peraturan Pencatatan Efek Indonesia telah mengeluarkan peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (lampiran II Kep-30/BEJ/07-2004) mengenai keharusan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris perusahaan, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Dewan komisaris bertugas sebagai pengawas dan dewan direksi bertugas sebagai pengurus perusahaan. Fungsi dewan komisaris dalam perusahaan sebagai wakil dari pemegang saham perusahaan yang tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan. Sementara, dewan direksi berfungsi sebagai pengelola perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam membantu tugas pengawasan mereka, antara lain komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, dan komite manajemen risiko. Setiap komite melaporkan segala kegiatan atau apapun yang berkaitan dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

### 2.2 Karakteristik Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam perusahaan, yaitu mengawasi kinerja manajemen. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila perusahaan dapat mengoptimalkan efektivitas dewan komisaris dalam perusahaan tersebut. Dewan komisaris yang menjalankan tugasnya dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang baik, perusahaan akan mudah mendapatkan modal, pinjaman, ataupun kredit bank. Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh empat

karakteristik dari dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

- **Independensi Dewan Komisaris**

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan sehingga tidak bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri atau beberapa pihak saja, tetapi sesuai dengan kepentingan seluruh pihak dalam perusahaan dan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Akan tetapi, dalam perusahaan masih terdapat dewan komisaris yang bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham mayoritas saja, bahkan ada beberapa komisaris yang merupakan perwakilan atau salah satu pemegang saham mayoritas. Dewan komisaris tersebut berusaha mengintervensi manajemen atau direksi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas saja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya independensi dewan komisaris untuk memastikan bahwa dewan komisaris bertindak tanpa adanya pengaruh kepentingan siapapun dan berusaha untuk melakukan fungsinya dengan baik dalam perusahaan. Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dengan baik dan tidak bias dalam memberikan keputusan agar dapat memuaskan semua pihak sehingga manajemen perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan akurat. Jumlah komisaris independen pada perusahaan minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris.

Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Terdapat penelitian yang mendukung bahwa *corporate governance* yang efektif dan kinerja perusahaan meningkat dengan adanya independensi dewan komisaris (Weisbach, 1988; Brickley *et al.*, 1994; Byrd and Hickman, 1992). Terdapat beberapa penelitian mengenai independensi dewan komisaris antara lain penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris yang independen dapat mengurangi *agency problem* antara manajemen dan pemegang saham dalam proses penyajian laporan keuangan yang baik (Petra, 2007 dan Beasley 1996). Klein (2002b) menyatakan pengaruh positif antara independensi *board of director* dan komite audit terhadap kualitas laba.

- **Aktivitas Dewan Komisaris**

Aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah melaporkan evaluasinya terhadap kinerja tahunan perusahaan, laporan keuangan, dan prospek bisnis perusahaan yang telah disiapkan oleh dewan direksi. Dengan membuat laporan tersebut, maka dewan komisaris telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Dewan komisaris juga melakukan pertemuan atau rapat antar dewan komisaris atau dengan dewan direksi untuk membiicarakan dan menyelesaikan masalah yang ada dalam perusahaan secara bersama-sama. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris, maka masalah dalam perusahaan akan lebih mudah diselesaikan dan perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Anderson *et al.* (2003) dan Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa aktivitas *board of director* dan komite audit yang diukur melalui jumlah rapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan.

- **Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Tidak ada ketentuan untuk jumlah anggota dewan komisaris. Setiap perusahaan yang berada pada industri yang berbeda-beda memiliki kebutuhan akan dewan komisaris yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan setiap industri memiliki risiko yang berbeda-beda dan

membutuhkan tingkat penanganan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, jumlah dewan komisaris yang dibutuhkan berbeda-beda. Jumlah dewan komisaris yang banyak akan membantu dalam fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen dan laporan keuangan bisa dikelola dengan baik. Akan tetapi, jumlah anggota dewan komisaris juga harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan proses diskusi dan negosiasi untuk mencari kesepakatan dan dalam pembuatan keputusan akan menghabiskan waktu yang lama karena adanya perbedaan pendapat dari setiap anggota. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang terlalu banyak akan menimbulkan adanya *free rider* (Hermawan, 2009). Dengan jumlah anggota yang cukup, maka dewan komisaris dapat menjalankan setiap tugasnya dengan efektif dalam perusahaan. Perusahaan yang terdiri dari lima anggota *board of director* dipandang lebih informatif oleh pelaku pasar, sehingga laporan keuangannya memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi (Vafeas, 2000).

- **Kompetensi Dewan Komisaris**

Untuk menjalankan setiap tugasnya dalam perusahaan dengan efektif, dewan komisaris yang ada dalam perusahaan harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi komite audit dapat dilihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota-anggota dewan komisaris tersebut. Beberapa anggota dewan komisaris, minimal 1 (satu) anggota harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Hal ini penting karena salah satu tugas dewan komisaris dalam perusahaan adalah melakukan pengawasan atas kinerja manajemen yang menyusun laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Dewan komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan mengenai bisnis perusahaan tersebut serta memiliki pengalaman sebagai dewan komisaris di perusahaan lain. Dengan adanya kompetensi yang baik, dewan komisaris dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat memaksimalkan

fungsinya dalam perusahaan. Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki *board of director* yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of director* dan komite audit dapat mengurangi akrual diskresionari (Xie *et al.*, 2003). Menurut Agrawal dan Chadcha (2005), frekuensi *earning restatement* lebih rendah pada perusahaan yang memiliki *financial expertise* pada anggota *board of director* dan komite auditnya. Dengan kinerja yang baik, perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

### 2.3 Karakteristik Komite Audit

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja perusahaan. Komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan untuk membantunya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perusahaan adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanyalah komite audit. Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut Arens *et al.* (2009), komite audit adalah sekelompok anggota dari dewan direksi perusahaan yang memiliki tanggung jawab membantu auditor mempertahankan independensi dari manajemen. Beberapa komite audit yang terbentuk terdiri dari tiga sampai lima, bahkan terkadang tujuh

anggota yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen, dewan komisaris membentuk komite audit dalam perusahaan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas komite audit dalam perusahaan tersebut. Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris. Komite audit yang menjalankan tugasnya dengan baik dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen yang nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang baik, perusahaan akan mudah mendapatkan modal, pinjaman, ataupun kredit bank. Menurut Hermawan (2009), efektivitas komite audit dipengaruhi oleh tiga karakteristik dari dewan komisaris, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

- **Aktivitas Komite Audit**

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

- **Jumlah Anggota Komite Audit**

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Ketua

komite audit adalah komisaris independen dalam perusahaan tersebut. Anggota lainnya dari komite audit berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksud adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- **Kompetensi Komite Audit**

Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen. Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004).

Komite audit yang ada dalam perusahaan harus kompeten agar dapat efektif dalam menjalankan setiap tugasnya dalam perusahaan. Kompetensi komite audit dapat dilihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota-anggota komite audit tersebut. Salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Selain itu, setiap anggota komite audit harus memiliki kemampuan dalam membaca dan memahami laporan keuangan. Hal ini penting karena salah satu tugas komite audit dalam perusahaan adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. *New York Stock Exchange* dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang



akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan saja, kompetensi komite audit dilihat dari pengalaman setiap anggota komite audit dalam perusahaan lain yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan mengenai bisnis serta mampu berkomunikasi dengan baik.

#### **2.4 Corporate Governance dan Laporan Keuangan**

Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan suatu keputusan, baik bagi investor maupun kreditur. Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, perusahaan dapat menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Sesuai dengan penelitian Cohen *et al* (2004), bahwa *corporate governance* bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah adanya manipulasi laba. Penerapan *corporate governance* juga mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan (Eng dan Mak, 2003). Salah satu atribut *corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan adalah dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris dalam perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja manajemen dalam perusahaan agar bertindak tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan melakukan tugasnya dengan baik, dewan komisaris dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Begitu pula dengan komite audit, komite audit dibentuk oleh dewan

komisaris untuk membantunya melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaporan keuangan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan yang baik akan membuat investor maupun kreditur bersedia untuk menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Dengan kualitas yang baik, bank akan bersedia memberikan pinjaman atau kredit terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan dianggap layak untuk mendapatkan kredit dari bank karena kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan.

### 2.5 Arus Kas Operasional (*Operating Cash Flow*)

Arus kas operasional adalah arus penerimaan dan peneluaran kas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. *Operational Cash In Flow* (OCIF) meliputi penerimaan hasil penjualan tunai, hasil pengumpulan piutang, dan penerimaan laba perusahaan. *Operational Cash Out Flow* (OCOF) meliputi biaya-biaya produksi dan biaya-biaya operasi perusahaan. Biaya produksi terdiri atas pembelian bahan baku dan bahan penolong, biaya upah pekerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik (biaya produksi tak langsung), termasuk pembayaran hutang kepada pemasok bahan. Biaya operasi meliputi biaya administrasi dan umum, seperti biaya gaji pimpinan dan karyawan, biaya rekening listrik, telepon, air (PAM), biaya pemasaran, serta biaya pajak. Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi.

### 2.6 Peluang Pertumbuhan

Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myer, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh

peluang pertumbuhan yang tinggi dan *asset-in-place* yang rendah pada perusahaan. Gul dan Tsui (1998) menggunakan *market value* untuk menangkap nilai dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur peluang pertumbuhan perusahaan tersebut, penelitian ini menggunakan *factor analysis* yang berasal dari Gul dan Tsui (1998), yaitu *market to book value of equity*, *market to book value of asset*, dan *gross property, plant and equipment ratio*. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi akan cenderung membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan atau investasinya tersebut pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, perusahaan akan mempertahankan labanya untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan dan pada waktu bersamaan perusahaan diharapkan akan tetap mengandalkan pendanaan melalui utang yang lebih besar (Baskin, 1989). Selain itu, untuk memenuhi dana guna meneruskan proyek yang ada, perusahaan cenderung mengambil hutang. Akan tetapi, menurut Psillaki *et al.* (2010), peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit yang besar.

## 2.7 Penyaluran Kredit Bank

Kredit perbankan adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu pihak, misalnya masyarakat atau perusahaan dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit ini memiliki tujuan baik bagi bank (kreditur) maupun peminjam (debitur). Bagi kreditur sendiri, tujuan kredit adalah sebagai instrumen untuk

menjaga rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kredit ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk bank dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bank untuk menjaga kelangsungan hidup bank tersebut. Sementara, tujuan kredit bagi debitur adalah untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kredit perbankan juga memiliki risiko, baik bagi bank yang memberikan kredit maupun bagi perusahaan yang mengajukan kredit. Risiko kredit ini terjadi ketika adanya ketidakmampuan dari perusahaan yang melakukan pinjaman untuk membayar kembali pinjaman yang telah diajukan ataupun bunga pinjamannya. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya tidak mampu untuk membangun usaha yang baik atau tidak mampu mengolah pinjaman tersebut dengan baik sehingga tidak mendapatkan pengembalian yang baik dari usahanya. Kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut berdampak tidak mampunya perusahaan menghasilkan keuntungan atau pengembalian untuk membayar bunga atau pinjaman pokoknya. Risiko ini juga dialami oleh bank yang memberikan kredit tersebut, atau disebut kredit macet. Untuk menghindari risiko ini, bank harus terlebih dahulu menganalisis kondisi keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, bank juga harus menganalisis bunga yang akan dibebankan kepada perusahaan yang melakukan pinjaman berdasarkan risiko kredit. Jika risiko kredit besar, bank akan membebankan bunga pinjaman dan jaminan yang tinggi pada perusahaan, dan sebaliknya.

Pada tahun 2006, Bank Indonesia melakukan pembentukan Biro Informasi Kredit dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit, yang berfungsi sebagai intermediasi antara perbankan dengan badan usaha atau perorangan yang ingin mengajukan kredit. Tugas utama Biro Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana atau pembiayaan. Data tersebut akan didistribusikan

sebagai informasi kredit, yang disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. IDI Historis dimanfaatkan untuk mengetahui kredibilitas calon debitur, yaitu perusahaan yang ingin mengajukan pinjaman atau kredit. Menurut Bank Indonesia, informasi pada IDI Historis tersebut akan membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit atau pembiayaan sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko, antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan. Selain bagi perusahaan, IDI Historis juga berfungsi bagi masyarakat untuk memberikan edukasi positif agar masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya dan membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.

## 2. Pengembangan Hipotesis

*Corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan dianggap dapat mempengaruhi probabilitas kelayakan pemberian kredit dari perbankan. *Corporate governance* dapat membantu perusahaan mengelola laporan keuangan dengan baik. *Corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Ball *et al.* (2008), laporan keuangan tersebut akan mengurangi adanya asimetri informasi diantara kreditur dan menemukan bahwa laporan keuangan dapat menyediakan *signal* yang lebih informatif tentang kualitas kredit di masa depan. Dengan laporan keuangan yang baik, suatu bank akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Perusahaan dengan laporan keuangan yang berkualitas tersebut akan dianggap layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Menurut Firth *et al.* (2009), suatu

bank akan lebih percaya memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat dan *corporate governance* yang baik. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit yang merupakan atribut dari *corporate governance* dianggap dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dalam perusahaan. Menurut Klein (2002a), *board of directors* selalu bertemu dengan staf akuntansi dan auditor eksternal dalam fungsinya sebagai pengawas pelaporan keuangan. Selain itu, keberadaan dewan komisaris dapat mengurangi *agency problem* antara manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham dan kreditur. Dengan keberadaan dewan komisaris, maka diharapkan kinerja manajemen dapat lebih baik dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan diandalkan dalam proses pengambilan keputusan kreditur, dalam penelitian ini adalah bank, dimana keputusan tersebut berkaitan dengan apakah suatu perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dan bank tersebut bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, keberadaan dewan komisaris akan diukur melalui efektivitas dewan komisaris. Mengikuti penelitian Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris dapat diukur melalui skor yang diukur mengukur efektivitas melalui empat karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Menurut Hermawan (2009), keempat karakteristik tersebut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Peran pengawasan *outside director* sangat besar di dalam dewan komisaris (Hermalin dan Weisbach, 1988). Keberadaan *board of director* yang independen dapat mengurangi *agency problem* dengan kreditur (Chen *et al.*, 2006; Bhajraj dan Sengupta, 2003). Dengan *agency problem* yang berkurang dan kualitas laporan keuangan yang baik, suatu bank akan

bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian Anderson *et al.* (2004), yang menyatakan bahwa *board of director* yang independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dapat menerima tingkat bunga yang rendah ketika *board of director* independen dalam perusahaan semakin banyak. Selain itu, aktivitas dari dewan komisaris juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Tidak hanya independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi anggota dewan komisaris juga mempengaruhi efektivitas dewan komisaris tersebut. Menurut Anderson *et al.* (2003) dan Xie *et al.* (2003), aktivitas *board of director* yang diukur melalui jumlah rapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas dalam *monitoring* (Adams dan Mehran, 2002). Bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaanya sekarang (Firth *et al.*, 2009). Dengan keberadaan dewan komisaris yang efektif, maka perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat diandalkan. Dengan laporan keuangan yang baik, bank akan menilai bahwa perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit dari bank. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

**H1a:** skor efektivitas dewan komisaris dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank.

Selain itu, keberadaan komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya komite audit pada perusahaan, diharapkan kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat baik sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk

pengambilan keputusan investasi atau pemberian kredit. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh kreditur atau bank untuk mengambil keputusan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. Keberadaan komite audit yang efektif akan meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap kualitas laporan keuangan yang ingin memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Serupa dengan dewan komisaris, pada penelitian ini komite audit juga diukur melalui efektivitasnya. Efektivitas komite audit diukur melalui skor tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi (Hermawan, 2009).

Menurut Anderson *et al.* (2003 dan 2004), aktivitas komite audit yang diukur melalui jumlah rapat dan jumlah komite audit yang besar berhubungan dengan proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Menurut Xie *et al.* (2003), aktivitas komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi akrual diskresionari. Menurut Agrawal dan Chadcha (2005), frekuensi *earning restatement* lebih rendah pada perusahaan yang memiliki *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite auditnya. Dengan kinerja yang baik, perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

**H2a:** skor efektivitas komite audit dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank.

Salah satu hal yang diperhatikan oleh bank adalah arus kas perusahaan karena dapat digunakan sebagai prediksi apakah suatu perusahaan akan mampu membayar kewajibannya di masa depan. Perusahaan yang mengajukan kredit kepada bank harus memiliki kas yang mencukupi untuk membayar pinjaman berikut bunganya setiap bulan. Menurut Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan



arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Selain itu, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan setiap hari untuk membuat perusahaannya terus bertahan hidup, bersaing dengan perusahaan lain, dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Apabila arus kas yang berasal dari kegiatan operasional ini tidak mencukupi atau *minus*, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang mampu mengelola kas dari kegiatan operasional, mungkin perusahaan memberikan piutang kepada pelanggan dengan limit yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi, misalnya risiko piutang dihapuskan karena pelanggan tidak sanggup membayar. Hal ini akan berdampak besar bagi perusahaan, yaitu kerugian atau bahkan kebangkrutan yang juga akan menimbulkan kerugian bagi bank yang bersedia memberikan kredit. Dengan risiko ini, perbankan dapat menyimpulkan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan kredit berdasarkan arus kas dari kegiatan operasionalnya. Semakin baik arus kas dari aktivitas operasional, maka perusahaan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank, dan sebaliknya. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H3a:**  *arus kas dari aktivitas operasional perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank.*

Perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV yang tinggi. Untuk investasi ini, biasanya perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, tidak jarang perusahaan yang mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Jensen (1986) menyatakan bahwa perusahaan dengan *investment opportunity* yang tinggi biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi (*high growth*), aktif melakukan investasi, memiliki *free cash flow* yang rendah dan *asset in place* yang kecil. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan

untuk mendanai proyeknya menggunakan hutang. Perusahaan tersebut memiliki peluang investasi yang besar. Dengan investasi tersebut, perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Perusahaan yang mendapatkan pengembalian yang tinggi, akan mampu membayar pinjaman dan bunganya kepada bank. Perbankan akan bersedia untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut karena pengembalian perusahaan yang tinggi tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myer, 1977). Nilai perusahaan yang tinggi dapat diwakili oleh peluang pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan. Akan tetapi, menurut Psillaki *et al.* (2010), peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV yang tinggi. Untuk investasi ini, biasanya perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, tidak jarang perusahaan yang mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit yang besar ini akan menimbulkan risiko yang besar bagi bank, diantaranya adalah perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunga yang cukup besar tersebut. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini membentuk hipotesis keempat, yaitu:

**H4a:** *peluang pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan dinilai layak mendapatkan kredit dari bank.*

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilitas kelayakan pemberian kredit bank akan diuji menggunakan persamaan regresi berikut ini:

$$\text{PROBCREDIT} = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDSCORE}_i + \beta_2 \text{AUDCOMMSCORE}_i + \beta_3 \text{CFFO}_i + \beta_4 \text{GROWTHOPP}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \beta_6 \text{AGE}_i$$

#### Keterangan

- PROBCREDIT** : Probabilita pemberian kredit oleh bank, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 untuk layak diberikan kredit oleh bank dan 0 untuk yang tidak layak diberikan kredit oleh bank.
- BOARDSCORE** : Skor efektivitas dewan komisaris yang dibagi dengan skor maksimum dewan komisaris, yaitu 51.
- AUDCOMMSCORE** : Skor efektivitas komite audit yang dibagi dengan skor maksimum komite audit, yaitu 33.
- CFFO** : Arus kas dari aktivitas operasional dibagi dengan *market value of the beginning of the year*.
- GROWTHOPP** : Peluang pertumbuhan yang diukur melalui *market to book value of equity*.
- SIZE** : Ukuran perusahaan.
- AGE** : Umur perusahaan.

### 3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah probabilita kelayakan pemberian kredit bank. Variabel dependen ini merupakan variabel dikotomi atau *dummy*, dimana perusahaan yang layak diberikan kredit oleh bank akan diberikan nilai 1 dan 0 bagi perusahaan yang dianggap tidak layak mendapatkan kredit. Penentuan suatu perusahaan dianggap layak atau tidak mendapatkan kredit dari bank dilihat dari majalah Infobank bulan April 2011. Majalah

Infobank menganalisis perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang layak mendapatkan kredit berdasarkan perhitungan *debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE) perusahaan tersebut pada periode 2010. Menurut majalah Infobank, perusahaan yang layak mendapatkan kredit adalah perusahaan yang memiliki DER dibawah 2,35 kali, yakni perbandingan dari 70% utang (kewajiban) dan 30% modal. Makin kecil rasio ini, makin dilihat baik. Hal ini mencerminkan bahwa emiten memiliki kemampuan dalam mengelola pinjamannya, khususnya dalam pengembalian pinjaman. Modal dan laba dua tahun berturut-turut yang positif juga penting sebagai penentu kelayakan diberikan kredit bank. Selain itu, ROA dan ROE harus positif untuk melihat kemampuan perusahaan mencapai laba. ROA yang positif menjadikan perusahaan dapat dipercaya, terlebih jika diatas 20%. Selain itu, mungkin terdapat perusahaan yang memiliki DER diatas 2,35 kali tetapi masih dianggap layak mendapatkan kredit disebabkan beberapa alasan, antara lain sektor usaha yang bagus dan risiko kredit yang dinilai oleh bank masih tergolong rendah.

### 3.2.2 Variabel Independen

#### 4.2.2.1 Skor Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Variabel independen dalam penelitian ini adalah skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit. Skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit ini diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan (*checklist*) yang berasal dari penelitian Hermawan (2009). Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan karakteristik yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris dan komite audit, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota (*size*), dan kompetensi. Tidak semua sampel mengungkapkan seluruh data yang berkaitan dengan daftar pertanyaan (*checklist*), tetapi seluruh sampel dihitung skornya. *Checklist* pada penelitian ini menghitung skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit pada tahun 2010

yang diperoleh dari sambutan dewan komisaris, laporan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan laporan komite audit pada laporan tahunan perusahaan tahun 2010. Seluruh pertanyaan memiliki 2-3 penilaian, yaitu *good* dan *poor* atau *good*, *fair*, dan *poor*. Skor dari dewan komisaris dan komite audit akan dibagi dengan skor maksimum dari dewan komisaris dan komite audit, yaitu 51 dan 33. Untuk menguji keandalan dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam *checklist* skor dewan komisaris dan komite audit, dilakukan pengujian *Cronbach Alpha* atas hasil *checklist* yang telah diperoleh.

#### 4.2.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Variabel independen lain yang digunakan pada penelitian ini adalah arus kas dari aktivitas operasional. Cheng *et al.* (1997), arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning*. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasional tidak dipengaruhi oleh akun-akun akrual dan yang ditangguhkan serta dapat mengeliminasi sumber-sumber manipulasi akuntansi. Pada penelitian ini, arus kas yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasional tahun 2010 dan delta arus kas dari aktivitas operasional tahun 2010 dengan tahun sebelumnya, yaitu 2009. Pada penelitian ini arus kas dari aktivitas operasional yang akan dibagi dengan *market value of equity at the beginning of the year*. *Market value of equity at beggining at the year* menggunakan harga saham pada akhir tahun 2009. Harga saham akhir tahun 2009 digunakan sebagai pengukur harga saham awal tahun 2010.

#### 4.2.2.3 Peluang Pertumbuhan

Sejalan dengan penelitian Myer (1997), nilai perusahaan yang tinggi dapat dilihat dari peluang pertumbuhan yang tinggi pula. Gul dan Tsui (1998), Gover dan Gover (1993), Skinner (1993) menggunakan *market value* untuk menangkap nilai dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur peluang pertumbuhan perusahaan tersebut, penelitian ini menggunakan *factor analysis* yang berasal dari Gul dan Tsui (1998), yaitu *market to book value of equity*.

$$\text{MBV of Equity} = \frac{\text{Shares Outstanding} \times \text{Share Closing Price}}{\text{Total Equity}}$$

#### 4.2.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan tidak hanya menunjukkan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan, tetapi juga kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba bagi perusahaannya. Penggunaan total aset pada penghitungan ukuran perusahaan karena total aset yang ada pada perusahaan merupakan suatu modal bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan mendanai investasi atau proyek yang menguntungkan. Perusahaan yang besar juga cenderung memberikan informasi lebih lanjut karena adanya permintaan investor akan informasi, biaya rata-rata yang lebih rendah untuk dalam pengumpulan dan penyebaran informasi (Hossan *et al.*, 1995 dalam Anggarini, 2010). Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan *logarithm natural* dari total aset tahun 2010 mengikuti penelitian Firth *et al.* (2009). Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Storey, 1994).

$$\text{SIZE} = \text{LN}(\text{Total Asset})$$

#### 4.2.2.5 Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan menjalankan perusahaannya, bersaing dengan perusahaan lain, bertahan hidup, dan dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Umur perusahaan diukur sejak *initial public offering* (IPO) yang dilakukan perusahaan hingga tahun 2010. Penelitian ini menggunakan tanggal IPO karena tanggal tersebut merupakan tanggal perusahaan berubah menjadi perusahaan *go public* yang

berusaha mendapatkan pendanaan eksternal melalui penerbitan dan penjualan saham dan wajib menerbitkan laporan keuangan untuk investor yang ada di pasar modal.

#### 4. Data dan Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran apakah efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas, dan peluang pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap probabilita kelayakan pemberian kredit perbankan pada perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar atau *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan data *cross sectional*, yaitu mengamati banyak variabel dari banyak perusahaan dalam satu tahun. Sementara itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 215 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi sampel-sampel dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010.
- Perusahaan yang *listing* di BEI atau IPO sebelum tahun 2010.
- Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor kecuali sektor keuangan karena sektor keuangan memiliki regulasi dan pelaporan keuangan yang berbeda dengan sektor non-keuangan.
- Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan 2010 dengan periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Data mengenai dewan komisaris, komite audit, dan arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, dan informasi-informasi keuangan lainnya diperoleh dari data sekunder, yaitu:

1. Data mengenai dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan 2010 perusahaan yang tersedia di website perusahaan tersebut, *google*, website BEI, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI.
2. Data mengenai arus kas dari aktivitas operasional, total aset, total ekuitas, dan jumlah saham yang beredar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 2010 yang juga tersedia di website perusahaan tersebut, *google*, website BEI, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI.
3. Data harga saham untuk setiap tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 yang juga digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui *website yahoo finance*, yaitu [www.yahoofinance.com](http://www.yahoofinance.com).

Pada tabel 1 disajikan proses penetapan sampel penelitian sehingga penelitian ini menggunakan 215 perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan berbagai hambatan atau batasan yang terjadi selama pemilihan sampel penelitian.

**Tabel 1 Proses Penetapan Sampel Penelitian**

Deskripsi Sampel Penelitian	Jumlah
Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010	425
Perusahaan keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010	(70)
Perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010	351
Perusahaan yang <i>delisting</i> tahun 2010	(1)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan tahun 2010	(104)
Perusahaan yang baru tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan tahun 2010	(18)
Perusahaan yang harga saham akhir tahun 2009 dan 2010 tidak tersedia pada <i>yahoo finance</i>	(13)
<b>Total sampel perusahaan non-keuangan pada penelitian ini</b>	<b>215</b>



Pada tabel 2 dapat dilihat distribusi sampel berdasarkan probabilita pemberian kredit menurut majalah InfoBank (2011). Dari total 215 observasi atau perusahaan, terdapat 137 sampel yang dianggap layak mendapatkan kredit atau 63,72%. Sementara itu, sampel yang dianggap kurang layak mendapatkan kredit bank berjumlah 78 observasi atau 36,28% dari keseluruhan sampel.

**Tabel 2 Distribusi Sampel Berdasarkan Probabilita Pemberian Kredit Bank**

Deskripsi	Jumlah Observasi	Persentase
Perusahaan yang dianggap layak mendapatkan kredit bank berdasarkan majalah InfoBank (2011)	137	63,72%
Perusahaan yang dianggap kurang layak mendapatkan kredit bank	78	36,28%
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>215</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Hasil Pengujian Penelitian

### 6.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3 menjelaskan analisis deksriptif masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk melihat kewajaran dan karakteristik dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif**

Variables	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PROB CREDIT	0	1	0,64	0,482
BOARD SCORE	21	44	34,58	4,640
AUDCOMM SCORE	11	31	21,60	4,861
CFFO (Rp)	(2.208.637.400.758)	34.335.836 JUTA	627.920.854.050,112	2.680.429.996.008,560
GROWTHOPP	-17,944363	20,340981474	2,11939226427	3,742481339614
SIZE (Rp)	3.062.204.781	112.857 MILIAR	6.153.529.178.146,34	13.577.105.281.381,900
AGE	1	31	12,33	7,051

Jumlah sampel 215,

PROBCREDIT: Probabilita pemberian kredit oleh bank, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 untuk layak diberikan kredit oleh bank dan 0 untuk yang tidak layak diberikan kredit oleh bank; BOARDSCORE : Skor efektivitas dewan komisaris yang dibagi dengan skor maksimum dewan komisaris, yaitu 51; AUDCOMMScore : Skor efektivitas komite audit yang dibagi dengan skor maksimum komite audit, yaitu 33; CFFO: Arus kas dari aktivitas operasional dibagi dengan *market value of the beginning of the year*; GROWTHOPP: Peluang pertumbuhan yang diukur melalui *market to book value of equity*; SIZE: Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan; AGE: Umur perusahaan yang diukur sejak perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Pada tabel 4 akan dijelaskan jumlah pertanyaan untuk setiap kategori skor dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggot, dan kompetensi, serta statistik deskriptif untuk setiap hasil skor masing-masing kategori pada skor dewan komisaris.

**Tabel 4 Statistik Deskriptif Skor Dewan Komisaris**

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Minimum	Maksimum	Mean	Std. deviation
Independensi	6	6	16	10,18	2,157
Aktivitas	6	6	18	14,02	2,493
Jumlah Anggota	1	1	3	1,88	,993
Kompetensi	4	4	12	8,50	1,691
Total Skor	17	21	44	34,58	4,640

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori independensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (18 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (18 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 4 (4 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 12 (4 pertanyaan dikalikan nilai 3).

Selain dari skor dewan komisaris, penelitian ini juga menggunakan skor komite audit.

Tabel 5 akan menjelaskan statistik deskriptif dari ketiga kategori skor komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

**Tabel 5 Statistik Deskriptif Skor Komite Audit**

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Aktivitas	8	8	23	15,88	4,346
Jumlah Anggota	1	1	3	2,08	,385
Kompetensi	2	2	6	3,64	1,380
Total Skor	11	11	31	21,60	4,861

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 8 (8 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 24 (8 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 2 (2 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 6 (2 pertanyaan dikalikan nilai 3).

## 6.2 Analisis Korelasi Pearson

Untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank, skor dewan komisaris, skor komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan memiliki hubungan atau korelasi antara satu sama dengan yang lain, dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6 Pearson Correlation Matrix**

Variabel	PROB CREDIT	BOARD SCORE	AUDCOMM SCORE	CFFO	GROWTH OPP	SIZE	AGE
PROB CREDIT	1	,322** (,000)	,290** (,000)	,123 (,073)	,234** (,001)	,295** (,000)	-,028 (,680)
BOARD SCORE	,322** (,000)	1	,520** (,000)	-,053 (,436)	,168* (,014)	,399** (,000)	,007 (,923)
AUDCOMM SCORE	,290** (,000)	,520** (,000)	1	-,016 (,815)	,098 (,150)	,355** (,000)	,145* (,034)
CFFO	,123 (,073)	-,053 (,436)	-,016 (,815)	1	-,026 (,707)	-,022 (,751)	-,025 (,712)
GROWTH OPP	,234** (,001)	,168* (,014)	,098 (,150)	-,026 (,707)	1	,360** (,000)	,042 (,540)
SIZE	,295** (,000)	,399** (,000)	,355** (,000)	-,022 (,751)	,360** (,000)	1	,065 (,343)
AGE	-,028 (,680)	,007 (,923)	,145* (,034)	-,025 (,712)	,042 (,540)	,065 (,343)	1

\*. Signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed).

\*\* Signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (2-tailed).  
Angka di dalam kurung menunjukkan *p-value*

Jumlah sampel 215,

PROBCREDIT: Probabilitas pemberian kredit oleh bank, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 untuk layak diberikan kredit oleh bank dan 0 untuk yang tidak layak diberikan kredit oleh bank; BOARDSCORE : Skor efektivitas dewan komisaris yang dibagi dengan skor maksimum dewan komisaris, yaitu 51; AUDCOMMScore : Skor efektivitas komite audit yang dibagi dengan skor maksimum komite audit, yaitu 33; CFFO: Arus kas dari aktivitas operasional dibagi dengan *market value of the beginning of the year*; GROWTHOPP: Peluang pertumbuhan yang diukur melalui *market to book value of equity*; SIZE: Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan; AGE: Umur perusahaan yang diukur sejak perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Jika dilihat dari tabel 6, BOARDSCORE berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi skor efektivitas dewan komisaris pada suatu perusahaan, maka semakin layak perusahaan tersebut mendapatkan kredit dari bank. Selain itu, AUDCOMMScore juga berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada signifikansi 1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila skor efektivitas komite audit meningkat atau berubah, maka perusahaan tersebut semakin layak mendapatkan kredit dari bank. Untuk kedua variabel independen yang lain, yaitu CFFO dan GROWTHOPP, CFFO tidak berkorelasi terhadap PROBCREDIT. Lain halnya dengan GROWTHOPP, variabel ini berkorelasi positif terhadap PROBCREDIT pada tingkat signifikansi 1%. Serupa dengan variabel independen lainnya, dimana apabila peluang pertumbuhan meningkat, maka perusahaan tersebut akan dianggap semakin layak menerima kredit dari bank. Untuk variabel kontrol pada penelitian ini, hanya SIZE yang berkorelasi positif signifikan terhadap PROBCREDIT pada tingkat signifikansi 1%. Sementara untuk AGE, variabel kontrol tersebut berkorelasi terhadap PROBCREDIT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dianggap semakin bagus dan layak mendapatkan kredit. Sementara untuk AGE, berapapun umur perusahaan, tidak akan mempengaruhi persepsi atau kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.

Sementara itu, BOARDSCORE berkorelasi positif secara signifikan terhadap AUDCOMMScore. Korelasi tersebut signifikan pada 1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila total skor dewan komisaris berubah, maka akan terjadi perubahan pula pada total skor komite audit. Selain dengan AUDCOMMScore, BOARDSCORE juga berkorelasi positif secara signifikan dengan GROWTHOPP pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila total skor dewan komisaris berubah, maka peluang pertumbuhan akan berubah. Misalnya, total skor dewan komisaris meningkat, maka peluang pertumbuhan pada suatu perusahaan juga ikut meningkat. Pada tabel korelasi *Pearson*, terlihat bahwa AUDCOMMScore berkorelasi positif terhadap SIZE. Korelasi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila total skor komite audit berubah, maka ukuran perusahaan ikut berubah. Sama halnya dengan SIZE, AUDCOMMScore juga berkorelasi positif secara signifikan dengan AGE pada tingkat signifikansi 5%.

Untuk CFFO, variabel ini tidak memiliki korelasi dengan variabel dependen, independen, dan kontrol pada penelitian ini, baik dengan tingkat signifikansi 1% atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai dari CFFO berubah, maka tidak ada satupun variabel pada penelitian ini yang akan ikut berubah. Untuk variabel independen terakhir, yaitu GROWTHOPP, variabel ini berkorelasi signifikan terhadap SIZE pada tingkat signifikansi 1%.

### 6.3 Analisis Regresi Logistik

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan regresi logistik disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Regresi Logistik**

Variables	Exp Sign	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Constant		-9,240	2,881	10,288	1	0,001***	0,000
BOARDSCORE	+	5,112	2,178	5,511	1	0,009***	166,052
AUDCOMMScore	+	2,172	1,269	2,928	1	0,044**	8,777
CFFO	+	0,848	0,399	4,508	1	0,017**	2,334
GROWTHOPP	+	0,132	0,064	4,281	1	0,019**	1,141
SIZE	+	0,173	0,106	2,671	1	0,051*	1,189
AGE	+	-0,023	0,023	0,956	1	0,164	0,978

\*\*\*. Signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (1-tailed).

\*\* Signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (1-tailed).

\* Signifikan pada level  $\alpha = 10\%$  (1-tailed).

Jumlah sampel 215,

PROBCREDIT: Probabilita pemberian kredit oleh bank, yang merupakan variabel dikotomi atau *dummy* dengan nilai 1 untuk layak diberikan kredit oleh bank dan 0 untuk yang tidak layak diberikan kredit oleh bank; BOARDSCORE : Skor efektivitas dewan komisaris yang dibagi dengan skor maksimum dewan komisaris, yaitu 51; AUDCOMMScore : Skor efektivitas komite audit yang dibagi dengan skor maksimum komite audit, yaitu 33; CFFO: Arus kas dari aktivitas operasional dibagi dengan *market value of the beginning of the year*; GROWTHOPP: Peluang pertumbuhan yang diukur melalui *market to book value of equity*; SIZE: Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan; AGE: Umur perusahaan yang diukur sejak perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

### 6.3.1 Pengaruh Skor Dewan Komisaris terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Pada tabel 7 dapat dilihat signifikansi dari masing-masing variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen, yaitu kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. Pada variabel independen pertama, yaitu skor dewan komisaris (BOARDSCORE), signifikansi dari variabel tersebut adalah 0,009 dimana nilai tersebut dibawah *p-value* 0,05. Nilai beta korelasi dari skor dewan komisaris (BOARDSCORE) adalah 5,112. Hal ini menunjukkan bahwa skor dewan komisaris (BOARDSCORE) berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank (PROBCREDIT). Bank akan lebih percaya memberikan kredit kepada perusahaan yang sehat secara finansial dan memiliki *corporate governance* yang baik (Firth *et al.*, 2009). Kualitas *corporate governance* suatu perusahaan menjadi fokus suatu bank dalam membuat keputusan apakah akan memberikan

kredit atau tidak karena kualitas *corporate governance* dapat membantu mengurangi risiko kredit dengan memitigasi *agency problem* antara pemegang saham dan manajer dan juga dengan meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan (Shleifer and Vishny, 1997). Sejalan dengan Ashbaugh-Skaife *et al.* (2006), bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang kuat akan meningkatkan investment-grade credit rating perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Efektivitas dari dewan komisaris, yang diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan diandalkan. *Board of director* merupakan fungsi dari mekanisme *corporate governance* yang dapat meningkatkan *corporate monitoring* (Prevost, 2002). Dewan komisaris berfungsi mengawasi kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan laporan keuangan yang baik, bank akan menganggap bahwa perusahaan tersebut layak mendapatkan kredit. Selain itu, keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan akan meningkatkan kepercayaan suatu bank kepada perusahaan tersebut, terutama dewan komisaris yang independen, memiliki aktivitas yang berfungsi meningkatkan kinerja perusahaan, jumlah anggota yang efektif, dan kompeten. *Board* yang independen dan aktif berpengaruh terhadap biaya utang yang rendah pada perusahaan (Anderson *et al.*, 2004). Menurut Wagner (2011), independensi dan kompetensi merupakan aspek dari efektivitas *board* karena *board* yang independen dan kompeten memiliki informasi yang dapat diandalkan mengenai perusahaannya. Menurut Firth *et al.* (2009), bank akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman di posisi top suatu perusahaan atau di bisnis yang serupa dengan perusahaannya sekarang. Ukuran *board* yang semakin besar dan menyediakan anggota *board of directors* yang memiliki pendidikan baik lebih banyak akan meningkatkan efektivitas



dalam *monitoring* (Adams dan Mehran, 2002). *Board* yang independen juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi *agency problem* (Lefort, 2008). Dengan nilai perusahaan yang meningkat dan *agency problem* yang berkurang, maka bank akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Menurut Prevost (2002), proporsi *outside directors* tidak berpengaruh terhadap utang (*debt*).

### **6.3.2 Pengaruh Skor Komite Audit terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank**

Begitu pula dengan skor komite audit (AUDCOMMSCORE), dimana nilai signifikansinya dibawah 0,05. Nilai signifikansi dan nilai beta korelasi dari skor komite audit (AUDCOMMSCORE) adalah 0,044 dan 2,172. Hal ini menunjukkan bahwa skor komite audit (AUDCOMMSCORE) juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank (PROBCREDIT). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini tidak ditolak. Serupa dengan dewan komisaris, komite audit juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang nantinya digunakan bank untuk memberikan keputusan apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan kredit. Apabila suatu perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif, maka bank akan lebih percaya dan *image* perusahaan akan lebih baik sehingga bank bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.

Skor komite audit pada penelitian ini diukur melalui tiga karakteristik, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dan skor ini berpengaruh signifikan terhadap probabilita kemungkinan dianggap layak mendapatkan kredit. Hal ini membuktikan bahwa ketiga karakteristik dari efektivitas komite audit berpengaruh positif secara signifikan dengan



probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit. Sesuai dengan penelitian Anderson *et al.* (2003 dan 2004), aktivitas komite audit yang diukur melalui jumlah rapat dan jumlah komite audit yang besar berhubungan dengan proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Aktivitas komite audit tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dengan adanya *financial expertise* pada anggota *board of directors* dan komite audit dapat mengurangi akrual diskresionari (Xie *et al.*, 2003). Menurut Rainsbury *et al.* (2009), kualitas komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas komite audit dapat meningkatkan kepercayaan suatu bank kepada perusahaan sehingga perusahaan tersebut dianggap layak mendapatkan kredit dan bank tersebut akan bersedia memberikan kredit kepada perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut mengajukan. Hal ini disebabkan karena bank percaya keberadaan komite audit tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan mampu membayarkan kreditnya di masa depan.

### **6.3.3 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasional terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank**

Untuk variabel independen ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasional (CFFO), variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Nilai signifikansi dari CFFO adalah 0,017. Nilai tersebut signifikan terhadap *p-value* 0,05. Nilai beta dari CFFO 0,848. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita kemungkinan perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank tetapi pengaruh tersebut. Arus kas dari aktivitas operasional dapat dijadikan bank untuk mengukur apakah suatu perusahaan layak mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena arus kas dari aktivitas operasional dapat dijadikan sebagai prediksi apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan kas di masa depan dari kegiatan operasionalnya sehingga dapat

membayarkan pinjaman atau kreditnya di masa depan. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasional juga merupakan indikator yang lebih *reliable* sebagai pengukur kinerja perusahaan dibandingkan *reported earning* (Cheng *et al.*, 1997). Dengan arus kas dari aktivitas operasional yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga layak mendapatkan kredit dari bank.

#### 6.3.4 Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Sementara itu, variabel independen terakhir pada penelitian ini GROWTHOPP. Variabel ini juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini, yaitu probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai beta sebesar 0,019 dan 0,132. Nilai 0,019 tersebut signifikan terhadap *p-value* 0,05. Jadi, hipotesis keempat pada penelitian ini, yaitu peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap probabilita kemungkinan suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank diterima. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki NPV yang tinggi (Jensen, 1986). Perusahaan biasanya mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Dengan investasi tersebut, perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Perusahaan yang mendapatkan pengembalian yang tinggi, akan mampu membayar pinjaman dan bunganya kepada bank. Perbankan akan bersedia untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut karena pengembalian perusahaan yang tinggi tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan perusahaan tersebut (Myer, 1977). Akan tetapi, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Psillaki *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit yang besar, diantaranya adalah perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunga yang cukup besar tersebut.

### 6.3.5 Pengaruh Ukuran dan Umur Perusahaan terhadap Probabilita Kelayakan Pemberian Kredit Bank

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) dan umur perusahaan (AGE). Untuk SIZE, variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap probabilita kemungkinan perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank. Pengaruh positif tersebut dapat dilihat dari beta korelasi dari SIZE sebesar 0,173. Pengaruh signifikan dapat dilihat dari angka signifikansi sebesar 0,051 dimana nilai tersebut dibawah atau sama dengan *p-value* 0,1. Hal ini sejalan dengan penelitian Firth *et al.* (2009), bahwa *size* perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap akses ke *bank finance*. Menurut penelitian Firth *et al.* (2009) tersebut, 33% perusahaan yang berukuran besar mendapatkan akses terhadap *bank finance* dan hanya 10,8% perusahaan yang berukuran kecil yang mendapatkan akses terhadap *bank finance*. Selain itu, pada penelitian tersebut, ukuran perusahaan juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap ukuran *bank finance* yang diterima perusahaan.

Pengaruh positif yang signifikan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka bank akan lebih percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sehingga perusahaannya tersebut semakin lama semakin besar dan juga cenderung memberikan informasi lebih lanjut karena adanya permintaan investor akan informasi, biaya rata-rata yang lebih rendah untuk dalam pengumpulan dan penyebaran informasi (Hossan *et al.*, 1995 dalam Anggarini, 2010). Menurut Storey (2004), semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Variabel kontrol yang lain juga berpengaruh tidak signifikan, yaitu AGE. Akan tetapi, pengaruh AGE terhadap variabel dependen bersifat negatif, yang ditunjukkan dari nilai beta sebesar -0,023. Pengaruh negatif AGE yang tidak signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansinya, yaitu 0,164. Nilai tersebut diatas *p-value* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa AGE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilita kemungkinan perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini serupa dengan penelitian Firth *et al.* (2009), bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap akses ke *bank finance*. Pengaruh yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak mempengaruhi keputusan suatu bank untuk bersedia memberikan kredit atau tidak. Bank tidak terlalu memperdulikan kapan suatu perusahaan menjadi perusahaan publik. Umur perusahaan sejak IPO tidak menjamin suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dan memiliki kemampuan untuk membayar kredit di masa depan.

## 7. Kesimpulan dan Saran

Sesuai pembahasan hasil yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris yang diprosikan oleh empat kategori atau karakteristik dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap probabilita suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa efektivitas dewan komisaris dapat membuat suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit bank. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan dewan komisaris yang efektif akan meningkatkan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen sehingga manajemen dapat menghasilkan laporan keuangan yang *reliable* dan berkualitas. Dengan laporan keuangan tersebut, bank akan menganalisa

- laporan tersebut dan dapat memberikan keputusan bahwa suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas komite audit yang diproksikan oleh tiga kategori atau karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap probabilitas suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Serupa dengan dewan komisaris, keberadaan komite audit dalam perusahaan juga penting, terutama dalam menelaah laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan *reliable*. Dengan laporan keuangan tersebut, perusahaan tersebut akan dianggap layak mendapatkan kredit bank.
  3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas dari aktivitas operasional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap probabilitas suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit dari perbankan. Bank dapat menganalisa kinerja keuangan perusahaan melalui arus kas dari aktivitas operasional perusahaan selain dari kinerja keuangan, seperti rasio-rasio keuangan untuk memastikan apakah perusahaan layak atau tidak mendapatkan kredit. Dari arus kas aktivitas operasional, bank dapat menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas terutama dari kegiatan operasionalnya sehari-hari. Semakin tinggi arus kas aktivitas operasional perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas tinggi dan akan mampu membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Sebaliknya, semakin rendah arus kas aktivitas operasional perusahaan bahkan minus menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu menghasilkan kas dan berisiko untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut.
  4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peluang pertumbuhan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap probabilitas suatu perusahaan dianggap layak mendapatkan kredit

dari perbankan. Dengan peluang pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang investasi yang tinggi pula. Perusahaan akan mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang tinggi apabila melakukan investatis yang memiliki NPV tinggi. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi, perusahaan dianggap mampu untuk membayar kewajibannya nanti di masa akan datang sehingga dianggap layak mendapatkan kredit dari bank.

Penelitian ini memberikan saran bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut lebih mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai dewan komisaris dan komite audit karena beberapa perusahaan tidak menyediakan laporan mengenai dewan komisaris dan komite audit dengan lengkap, terutama mengenai komite audit. Hal tersebut sangat membatasi penelitian ini sehingga banyak perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tetapi menerima skor efektivitas komite audit yang rendah. Selain itu, terdapat saran lain bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia agar mempublikasikan laporan perusahaan mereka, baik laporan keuangan maupun laporan tahunan karena terdapat beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tetapi tidak mempublikasikan laporan keuangan maupun laporan tahunannya, baik di website perusahaan tersebut, di website BEI, maupun di *google*.

Selain itu, perusahaan-perusahaan mendapatkan informasi bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap layak atau kurang layaknya perusahaan tersebut mendapatkan kredit, diluat dari analisis kinerja keuangan. Oleh sebab itu, saran bagi perusahaan adalah agar lebih meningkatkan lagi penerapan *good corporate governance* dalam perusahaannya, mengangkat anggota dewan komisaris dan komite audit yang berkualitas dan profesional. Selain itu, perusahaan juga lebih meningkatkan lagi independensi dari dewan komisaris, dengan memilih anggota dewan komisaris yang independen dan berkualitas, aktif dalam

perusahaan, memiliki jumlah anggota yang efisien, dan kompeten di bidangnya dan posisinya sebagai anggota dewan komisaris. Begitu pula dengan komite audit, perusahaan disarankan untuk memilih anggota komite audit yang aktif, memiliki jumlah anggota yang efisien, serta kompeten dalam menjalankan tugasnya di perusahaan.

Adapun saran bagi perbankan yang ada di Indonesia adalah ketika terdapat perusahaan yang mengajukan kredit kepada bank, bank sebaiknya tidak hanya menganalisa kinerja keuangan mereka saja, tetapi juga bagaimana keberadaan dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan tersebut. Perbankan dapat menganalisa perusahaan melalui efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan, yang diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi karena keberadaan dewan komisaris dan komite audit, terutama yang bekerja secara efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Bank juga dapat menganalisis arus kas dari aktivitas operasional perusahaan tersebut karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah bahkan minus, hal tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dalam menghasilkan kas sehingga akan sangat berisiko bagi perbankan yang akan memberikan kredit bagi perusahaan tersebut. Selain itu, perbankan juga dapat menganalisis peluang pertumbuhan karena nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan dan *asset-in-place* pada perusahaan tersebut (Myer, 1977).

Penelitian ini menyarankan bagi BEI untuk membuat peraturan yang lebih ketat lagi terhadap perusahaan yang tercatat di BEI mengenai publikasi laporan keuangan maupun laporan tahunan karena penelitian ini mengalami beberapa kesulitan dalam menemukan laporan keuangan atau laporan tahunan beberapa perusahaan sehingga karena kesulitan tersebut, perusahaan tersebut harus tidak dapat dijadikan sampel pada penelitian ini. Saran bagi Bapepam-LK adalah Bapepam-LK dapat menambah, menyesuaikan, atau memperketat peraturan mengenai *good corporate governance*, terutama mengenai komite audit dalam

perusahaan karena banyak perusahaan yang kurang memberikan informasi mengenai komite audit dalam laporan tahunan perusahaannya. Selain itu, Bapepam-LK lebih memperketat lagi aturan mengenai *good corporate governance* dalam perusahaan agar tercapai lingkungan bisnis yang sehat dan kinerja yang baik di dalam perusahaan tersebut.

Saran bagi Bank Indonesia adalah memberikan kebijakan bagi perbankan di Indonesia ketika mempertimbangkan pemberian kredit kepada suatu perusahaan untuk tidak hanya melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan saja, seperti rasio keuangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap *corporate governance* perusahaan melalui keberadaan dewan komisaris dan komite audit. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis terhadap arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan perusahaan. Bank Indonesia dapat membantu perbankan dalam menambah kebijakan atau peraturan mengenai analisis terhadap perusahaan ketika ada pengajuan kredit dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat membantu akademisi berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan non-keuangan sebagai sampel pada penelitian ini, perusahaan keuangan dan perbankan tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia karena harga saham di pasar yang digunakan untuk mengukur peluang pertumbuhan dan standarisasi arus kas dari aktivitas operasional hanya dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga perusahaan bukan publik dikeluarkan dari populasi penelitian.



3. Masih ada beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan mereka, baik laporan keuangan dan laporan tahunan dengan lengkap sehingga hal tersebut membatasi jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini. Dengan keterbatasan data perusahaan tersebut, maka jumlah sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah hanya 215 perusahaan non-keuangan dari 425 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
4. Banyak sampel pada penelitian ini tidak menyediakan informasi yang lengkap, terutama mengenai komite audit sehingga hal tersebut menyebabkan banyak sampel yang mendapatkan skor rendah pada saat mengukur efektifitas komite audit.
5. Hanya menggunakan 2 (dua) variabel kontrol dari 4 (empat) variabel utama yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel kontrol yang lain sehingga hasil analisis dapat menjadi lebih baik.
6. Penelitian ini menggunakan hasil perhitungan total skor dewan komisaris dan komite audit untuk mengukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermawan (2009), dimana skor tersebut diukur melalui karakteristik-karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Sistem penelitian ini mengadopsi *checklist* yang dikembangkan oleh IICD. Walaupun *checklist* dapat dipercaya karena diuji melalui *Cronbach's Alpha*, akan tetapi *scoring* tersebut cenderung subjektif dan selalu ada kesempatan untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut di masa yang akan datang.
7. Kriteria skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit menggunakan nilai *good*, *fair*, dan *poor*. Hasil tersebut dapat menimbulkan kebiasaan karena muncul ketidakakuratan penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini atau dikarenakan ada perusahaan yang tidak memberikan informasi sehingga mendapatkan nilai *poor* padahal ada kemungkinan perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris atau komite audit yang efektif.

8. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan perdagangan saham atau "saham tidur" sehingga tidak tersedia harga saham pada tanggal 30 Desember 2009 dan 2010. Akibatnya, apabila harga saham tidak tersedia, harganya mengikuti harga saham tanggal sebelumnya yang paling dekat, minimal pada bulan yang sama.

#### DAFTAR REFERENSI

- Adams, R., and Mehran, H. (2002). Board structure and banking firm performance. *Working Paper*, Federal Reserve Bank of New York.
- Agrawal, A., and Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. *Journal of Law and Economics* 48, 371–406.
- Anderson, Kirsten L., Deli, Daniel N., and Gillian, Stuart L. (2003). Board of directors, audit committee, and the information content of earnings. *Working Paper Series*, University of Delaware.
- Anderson, Ronald C., Mansi, Sattar A., and Reeb, David M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics* 37, 315–342.
- Anggarini. (2010). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., and LaFond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms' credit ratings. *Journal of Accounting and Economics* 42, 203–243.
- Ball, R.T., Bushman, R.M., and Vasvari, F.P. (2008). The debt-contracting value of accounting information and loan syndicate structure. *Journal of Accounting Research* 46, 247–287.
- Bank Indonesia. *Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK)*. Desember 12, 2011. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/00A32509-E25E-4E28-A29499EEC0B12554/15876/KreditSIPMK1.pdf>
- Baskin, J. (1989). Dividend policy and the volatility of common stock. *Journal of Portfolio Management*, 15(3), 19–25.
- Beasley, Mark S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, vol 71 no. 4, p. 443–465.
- Bhojraj, Sanjeev and Sengupta, Partha. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: the role of institutional investors and outside directors. *Journal of Business* 76 (Juli), 455–475.
- Blom, Jasper and Schauten, Marc B. J. (2006). Corporate governance and the cost of debt. Erasmus University Rotterdam.
- Brickley, J., Coles, J., and Terry, R. (1994). Outside directors and the adoption of poison pills. *Journal of Financial Economics* 35, 371–390.
- Brigham, Eugene F., and Daves, Philip R. (2003). *Intermediate financial management* (8th edition). USA: Thompson South Western.
- Byrd, J., and Hickman, K. (1992). Do outside directors monitor managers? Evidence from tender offer bids. *Journal of Financial Economics* 32, 195–222.
- Cheng, C.S. Agnes, Liu, Chao-Shin, and Schaefer, Thomas F. (1997). The value relevance of SFAS No. 95 cash flow from operations as assessed by security market effects. *Accounting Horizons*, Vol. 11 No. 3, 1–15.
- Chen, Yu-Mei and Jian, Jiu-Young (2006). The impact of information disclosure and transparency system (IDTRs) and corporate governance structure on cost of debt.
- National Yunlin University of Science and Technology. Cohen, J., Wright, A., and Khrisnamoorthy, G. (2004). The corporate governance mosaic and financial reporting quality. *Journal of Accounting Literature*, 87–152.
- Eng, L.L., and Mak, Y.T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325–345.
- Fama, E.F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy* 88, 288–307.
- Fama, E. and M., Jensen. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics* 26, 301–326.
- Firth, Michael., Lin, Chen and L., Wong Sonia M. (2009). Inside the black box: bank credit allocation in China's private sector. *Journal of Banking and Finance* 33, 1144–1155.
- Forum Corporate Governance Indonesia. (2001). *Tata kelola perusahaan (corporate governance): peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Diambil dari [http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI\\_Booklet\\_II.pdf](http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI_Booklet_II.pdf).

- Gaver, J., Gaver, K. (1993). Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. *Journal of Accounting and Economics* 16, 125–160.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Grossman, S., and Hart, O.D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy* 44, 691–719.
- Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics* (fourth ed). Singapore: McGraw-Hill.
- Gul, F. A., Tsui, J.S. (1998). A test of free cash flow and debt monitoring hypothesis: evidence from audit pricing. *Journal of Accounting and Economics* 24, 219–237.
- Jensen, Michael C. (1896). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review* vol 76 (May), 323–329.
- Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Hermawan, Ancella A. (2009). Pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga, dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. *Disertasi Universitas Indonesia*.
- Hutajulu, Margaret F. (2011). Pengaruh efektivitas dewan komisaris pada keputusan investasi barang modal terhadap nilai perusahaan. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* No. 02. (Revisi 2009): Laporan arus kas. Salemba Empat, Jakarta
- Infobank. (2011, April). *Kredit ke emiten: emiten properti dan real estate mendominasi*. Jakarta, 77–83.
- Klein, A. (1998). Firm performance and board committee structures. *Journal of Law and Economics* 41, 275–303.
- Klein, A., (2002a). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal Accounting and Economics* 33, 375–400.
- Klein, A. (2002b). Economic determinants of audit committee independence. *Accounting Review* 77, 435–452.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.knkg-indonesia.com>
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan Sastra P. (2007). Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 9, 88–98.
- Lefort, Fernando, and Urzúa, Francisco. (2008). Board independence, firm performance and ownership concentration: evidence from chile. *Journal of Business Research* 61 (2008) 615–622.
- Maher, Maria and Andersson, Thomas. (2000). Corporate governance: effects on firm performance and economic growth. Organisation for Economic Co-operation Development, Oxford University Press.
- Monks, R., Minow, N. (1995). *Corporate governance*. Blackwell Publishing, New York, NY.
- Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. *Journal of Financial Economics* 5, 147–175.
- Nachowi, Djajal Nachrowi dan Usman, Hardius. (2005). *Penggunaan teknik ekonometri: pendekatan populer dan praktis dilengkapi teknik analisis dan pengolahan data dengan menggunakan paket program SPSS*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealers. (1999). *Report and recommendations of the blue ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit committees*. Diambil dari <http://www.kpmg.com/aci/docs/blueribbon.pdf>.
- Organization for Economic Cooperation and Development (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. <http://www.oecd.org>.
- Indonesian Institute of Corporate Governance. *Pengertian dan Konsep Corporate Governance*. September 2011. <http://www.iicg.org>
- Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001) tentang “Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa”
- Peraturan Pencatatan Efek No. I-A (Lampiran II Kep-30/BEJ/07-2004) tentang “Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa”.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 29/PM/2004) tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”.
- Petra, S. (2007). The effects of corporate governance on the informativeness of earnings. *Economics and Governance* 8, 129–152.
- Pincus, K., Rusbarsky, M., and Wong, J. (1989). Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms. *Journal of Accounting and Public Policy* 8, 239–265.
- Piot, Charles and Missonier-Piera, Franck (2007). Corporate Governance, Audit Quality, and the Cost of Debt Financing of French Listed Companies. *Associate Professor, GSCM - Montpellier Business School, France*

- Psillaki, Maria, Tsolas, Ioannis E., and Margaritis, Dimitris. (2010). Evaluation of credit risk based on firm performance. *European Journal of Operational Research* 201 (2010) 873–881.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2010). *Research method for business: a skill building approach (fifth ed)*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Shleifer, A., and Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance* 52, 737-783.
- Skinner, D. (1993). The investment opportunity set and accounting procedure choice. *Journal of Accounting and Economics* 16, 407–445.
- Storey, D. (1994). Understanding the small business sector. London: Routledge. Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal “Keanggotaan Komite Audit”.
- Turnbull, S. (1997). Corporate governance: it’s scope, concerns, and theories. *Corporate Governance: An International Review* 5, 180-205.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan”.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”
- Uzun, H., Szewczyk, Samuel H., and Varma, Raj. (2004). Board composition and corporate fraud. *Financial Analysts Journal*, 33-43.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal Finance Economics* 53, 113–142.
- Wagner, Alexander F. (2011). Board independence and competence. *Journal Finance Intermediation* 20 (2011) 71–93.
- Weisbach, M. S. (1988). Outside directors and CEO turnover. *Journal of Financial Economics*, 20(1), 431-460.
- White, Gerald I., Sondhi, Ashwinpaul C., Fried Dov. (1993). *The Analysis and Use of Financial Statement* (special edition for CFA Candidates). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- www.bi.go.id Download tanggal 12 Desember 2011
- www.idx.co.id Diakses mulai Tanggal 1 Agustus 2011
- www.yahoofinance.com Diakses mulai Tanggal 1 November 2011
- Xie, B., Davidson III, W.N., and DaDalt, P.J. (2003). Earnings management and corporate governance: the roles of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9, 295–316.
- Yu, Fan. (2004). Accounting transparency and the term structure of credit spreads. *Journal of Financial Economics* 75, 53-84

## Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan

**BAMBANG LISTYO PURNO**  
**MUHAMMAD KHAFFID**  
*Universitas Negeri Semarang*

**Abstract:** *The study aimed to analyze the influence of Good Corporate Governance's mechanism that consist of institutional ownership, managerial ownership, board of commissioners, board of independent, board of directors, audit committee to Banking Performance in the period 2009-2011 either simultaneously or partially. The population in this study is the Banks listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling was done by purposive sampling method that gotten 24 Banks in each period. This study uses secondary data that are 24 annual reports of the Banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2011. The testing of hypothesis in this study uses descriptive analysis, classical assumptions, regression analysis with  $\alpha 0,05$ , t test, F test, and coefficient of determination. The result of this study showed that the mechanism variable of Good Corporate Governance simultaneously consist as institutional ownership, managerial ownership, board of commissioners, board of independent, board of directors, audit committee, effect significantly to banking performance). But in partial, showed that only institutional ownership and board of directors which influence significantly to banking performance while managerial ownership, board size, board of independent and audit committee does not affect the banking performance.*

**Keywords :** *Return on asset, Good corporate governance, Institutional ownership, Managerial ownership, Board of commissioners, Board of independent, Board of directors, Audit committee*

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam berbagai bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian global yang terjadi di berbagai negara juga memiliki dampak bagi negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap sektor perekonomian di Indonesia

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* ternyata memiliki banyak definisi. Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan mengenai pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Sejalan dengan itu menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-



sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati dkk, 2004).

Menurut Bank Indonesia keadaan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Bank Indonesia menilai kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia karena lemahnya penerapan GCG di bank tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan internal bank dan pengawasan dari manajemen tertinggi (*top management*) bank (media indonesia.com). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.

Selain itu, dalam seminar "*Good Corporate Governance* di Perbankan," di Ballroom Hotel Nikko sebagaimana yang termuat di dalam media indonesia.com, Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan bahwa kasus operasional yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemeriksaan BI yaitu karena lemahnya top management dalam melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan SOP dan pengendalian internal. Kurang optimalnya pengawasan tersebut dibarengi dengan lemahnya implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta Sumber Daya Manusia yang kurang menjalankan prinsip *Know Your Employee*. Menyangkut pengendalian internal, meskipun sistem aktif sudah berjalan tapi pelaksanaan hal-hal mendasar belum dilakukan secara reguler. Apalagi banyak bank yang menganggap GCG lebih sebagai biaya dan menghambat ekspansi usahanya.

Diakui ataupun tidak, penerapan GCG di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan-

perusahaan Indonesia yang harus menghadapi arus globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Penerapan GCG diduga dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka memberikan pencitraan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan GCG di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan GCG ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan munculnya masalah *agency* dikarenakan pengelolaan suatu perusahaan yang terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemilik modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada manager. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya berada di tangan dewan direksi. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan.

Berkaitan dengan masalah *agency*, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory*, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor,



dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997, dalam Darmawati dkk, 2004)

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *GCG* yaitu Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit. Kepemilikan institusional yang besar akan mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Selain itu kepemilikan mayoritas bisa saja mengabaikan kepentingan pemilik saham minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul. Kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini karena manusia pada umumnya memiliki sifat self interest sehingga manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan stakeholders agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Hal ini karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dalam hal pengawasan. Sedangkan jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ketika komite audit

menjalankan tugasnya dengan baik maka tugas pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perbankan meningkat.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Tobin's Q*. Sejalan dengan itu Darmawati, dkk (2004) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Nuswandari (2009) menemukan bukti bahwa *corporate governace* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Amyulianthy (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q*. Sementara itu, Sayidah (2007) menemukan bukti bahwa bahwa kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Hal senada diungkap Puspitasari dan Ernawati (2010) yang membuktikan bahwa *Corporate governance* yang terdiri dari (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ROA, ROE, PER dan Tobins'Q*

Dari berbagai penelitian terdahulu masih terdapat kontra pendapat antara beberapa peneliti. Penelitian yang menyatakan bahwa *GCG* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yaitu Klapper dan Love (2002), Darmawati, dkk (2004), Belkhir (2005), Nuswandari (2009), Dewayanto (2010), Amyulianthy (2012) sedangkan penelitian yang menyatakan *GCG* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dilakukan oleh Sayidah (2007), Puspitasari dan Ernawati (2010). *GCG* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menjembatani konflik keagenan yang selama ini terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan”

## II. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### a. Teori keagenan (*Agency theory*)

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan semakin dipisahkan dari kepemilikan. Hal ini sejalan dengan *Teori Agency* yang menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen perusahaan dengan pemilik. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan mempekerjakan agen profesional dalam mengelola perusahaan. (FCGI).

Kenyataannya ada masalah dalam pemisahan manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Manajer mungkin berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan dan dalam keseimbangan yang tepat dari kepentingan, misalnya, pemegang saham dan manajer dan pengendalian dan pemegang saham minoritas.

Konflik kepentingan menurut Jensen dan Meckling (1976) dikarenakan adanya kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal memicu terjadinya biaya keagenan. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring yang dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Che Haat, et al (2008) juga berpendapat bahwa untuk mengatasi konflik keagenan, dibutuhkan pedoman yang lebih baik yaitu dengan adanya *good corporate governance* sehingga konflik keagenan yang selama ini terjadi bisa berkurang.

#### **b. *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan**

*Corporate governance* menurut Nuswandari (2009) merupakan mekanisme pengendali (*diciplinary forces*) yang efektif menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Setiap keputusan manajemen yang diambil didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan *resources* yang ada digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan. Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Tindakan tersebut akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Dengan demikian penerapan *good corporate governance* di perusahaan mempengaruhi secara positif kinerja operasional perusahaan.

Di dalam mekanisme *GCG* menurut Belkhir (2005) prinsipal bekerja sama untuk memberikan insentif kepada para manajer sehingga mampu mengurangi masalah keagenan yang muncul antara pemegang saham dan manajer yang dihasilkan dari pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan. Johnson, dkk (2000) dalam Dermawati, (2004) memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas *corporate governance* dalam suatu negara berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan pada masa krisis di Asia.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju..

### c. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Menurut Siregar dan Utama (2006), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

Kepemilikan institusional yang semakin besar akan mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Selain itu kepemilikan institusional yang merupakan pemilik saham mayoritas bisa saja mengabaikan kepentingan pemilik saham minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul. Semakin besar kontrol eksternal akan menyebabkan kebijakan yang diambil akan cenderung mengikuti kebijakan dari institusi eksternal. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan harga saham perusahaan dipasar modal sehingga dengan kepemilikan institusional dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Daniri (2005) dalam Amyulianthy (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusi menurunkan kinerja perusahaan. Faisal (2005) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional gagal menjadi mekanisme meningkatkan kinerja perusahaan.

#### **d. Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan**

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajemen menurut Welvin dan Herawaty (2010) adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Hasil penelitian Hermalin dan Weisbach (2003) menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki sifat *self interest* sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya sehingga dari asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004, dalam Sama'ni 2008). Sehingga dari sifat *opportunistic* ini manajer cenderung akan melakukan *earning management* dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

#### e. Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governance menyatakan bahwa Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Menurut Chtourou *et al* (2001), jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewan untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Mayangsari (2003) dalam Rafriny (2012) menyatakan bahwa tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan

#### f. Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan

Komisaris independen menurut Susiana dan Herawaty (2007) merupakan sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Mayangsari (2003) dalam Rafriny (2012) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1979, dalam Lastanti, 2004).

#### **g. Ukuran Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan**

Faisal (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pfeffer (1973) dan Pearce & Zahra (1992) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Semakin besar ukuran dan komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan jika komposisi dewan direksi lebih banyak didominasi oleh dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan dan kinerja serta nilai perusahaan akan rendah jika ukuran dan komposisi dewan direksi berasal dari dalam perusahaan. Apabila struktur dewan direksi suatu perusahaan lebih banyak berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) maka akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Argumentasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa *outside director* dapat melakukan fungsi monitoring dengan lebih baik,



pengambilan keputusan dan juga fungsi perbaikan atas kesalahan maupun kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga akan berdampak pada laba (*earnings*) yang akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan.

#### **h. Ukuran Komite Audit dan Kinerja keuangan**

Komite audit menurut Pedoman Umum *GCG* Indonesia bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Utama (2012) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan *survey* atas komite audit perusahaan yang *listing* di BEI. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan lamanya komite audit menjabat.

Atas dasar paparan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** *Mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.*

**H2:** *Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.*

**H3:** *Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan*

**H4:** *Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan*

**H5:** *Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.*

**H6:** Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

**H7:** Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

<<< Insert Gambar 1>>>

### III. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah kombinasi antara *time series* dan *cross section data*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2009 - 2011 dapat dilihat pada situs resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan website Bank Indonesia..

#### b. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai dengan tahun 2011. Adapun sampel penelitian ini diambil setelah memenuhi beberapa kriteria yang berlaku bagi penerapan definisi operasional variabel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditarik dengan menggunakan pertimbangan. Berdasarkan data dari BEI pada tahun 2009-2011 populasi perusahaan perbankan sebanyak 32 perusahaan perbankan, tapi berdasarkan kriteria sampel diatas maka dalam penelitian ini hanya digunakan sampel sebanyak 24 perusahaan.

#### c. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari enam variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris

independen, dan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA.

## 1. Variabel dependen

*Return on Asset* (ROA) adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. ROA mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Suatu indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Dihitung dengan membagi penghasilan tahunan perusahaan dari total aset, ROA ditampilkan sebagai persentase (Brigham and Houston, 2006).

$$\frac{\text{Rata – rata laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}}$$

## 2. Variabel Independen

### a) Kepemilikan Institusional

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Sejalan dengan itu Siregar dan Utama (2006) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

INST= (jumlah saham yang dimiliki investor institusi)/(Total modal saham perusahaan yang beredar)

## b) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty 2007). Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$\text{MANJ} = (\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}) / (\text{Total modal saham perusahaan yang beredar})$$

## c) Ukuran Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG, jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan seluruh jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

## d) Ukuran Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

e) Ukuran Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG, jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

f) Komite Audit

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit

yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit (Isnanta, 2008, dalam Sari, 2010).

$$\text{AUDT} = (\text{Jumlah anggota komite audit luar}) / (\text{Jumlah seluruh anggota komite audit})$$

#### d. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model regresi. Model regresi untuk kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

$$Y_a = a + \beta_1 \text{ INST} + \beta_2 \text{ MANJ} + \beta_3 \text{ KOMS} + \beta_4 \text{ INDP} + \beta_5 \text{ DIRK} + \beta_6 \text{ AUDT} + e$$

Keterangan :

$Y_a$  = *Return On Assets*

$a$  = konstanta

$e$  = error

$\beta$  = koefisien regresi

INST = Kepemilikan Institusional

MANJ = Kepemilikan Manajerial

KOM S= Ukuran Dewan Komisaris

INDP= Komisaris Independen

DIRK = Ukuran Dewan Direksi

AUDT = Komite Audit

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mencari nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel yang diuji dalam penelitian.

<<< Insert tabel 1>>>

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyaknya sampel (N) adalah 72. Jumlah tersebut merupakan total sampel perusahaan perbankan selama 3 tahun pengamatan pada penelitian dari tahun 2009 sampai 2011 dimana setiap tahunnya terdapat 24 perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian.

Variabel ROA mempunyai rentang sebesar 6,15 dengan standar deviasi 1,16. Nilai minimum -1,70 nilai maksimum 4,45 Rata-rata ROA adalah sebesar 1.7992. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai 2011 kinerja perbankan nasional tergolong cukup baik berkisar yaitu berkisar 1,8%

Variabel kepemilikan institusional mempunyai rentang 88,56 dengan standar deviasi 22,09. Nilai minimum 10,40 dan nilai maksimum 98,96. Rata-rata kepemilikan saham dalam perusahaan perbankan tergolong banyak yaitu berkisar 78,36%.

Variabel kepemilikan manajerial mempunyai rentang 21,70 dengan standar deviasi 4,158. Nilai minimum 00,00 dan nilai maksimumnya adalah 21,70. Rata-rata kepemilikan manajerial perbankan nasional tergolong kecil karena kisaran angka dibawah 5% yaitu sebesar 1,53%.

Variabel ukuran dewan komisaris mempunyai rentang 7,00 dengan rata-rata sebesar 5,0972. Nilai minimumnya adalah 2,00 dan nilai maksimumnya adalah 9,00. Hal ini menunjukkan rata rata anggota dewan komisaris dalam perusahaan perbankan tergolong cukup banyak yaitu sebanyak 5 orang.

Variabel Komisaris independen mempunyai rentang 66,70 dan standar deviasi 1,91 dengan rata-rata sebesar 55,4556. Nilai minimum 33,30 dan nilai maksimumnya adalah 100,0. Komisaris independen menunjukkan rata-rata proporsi anggota dewan komisaris independen tergolong banyak karena melebihi 50%.

Variabel dewan direksi mempunyai rentang 9 dan standar deviasi 2,868, nilai minimum 3 dan nilai maksimum 12 dengan rata-rata sebesar 7,0972. Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota dewan tergolong banyak yaitu rata-rata sebanyak 7 orang.

Variabel komite audit mempunyai rentang antara 33,30 sampai 100,00 dengan rata-rata sebesar 59,2542. Nilai minimal 33,30% dan nilai maksimal 100%. Hasil temuan menunjukkan jumlah komite audit tergolong banyak.

## b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penelitian menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian data dalam penelitian ini lolos dari uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Secara lengkap hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<<< Insert Tabel 2 >>>

<<< Insert Tabel 3 >>>

<<< Insert Tabel 4 >>>

<<< Insert Tabel 5 >>>

## c. Analisis Regresi Berganda

### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari Tabel 6 berikut ini :

<<< Insert tabel 6 >>>

Tabel 6 menunjukkan bahwa secara statistik mekanisme *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris,



komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Nilai F-hitung sebesar 3,921 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini berarti tingkat nilai signifikan berada di bawah signifikansi 5% atau lebih kecil dari 0,05. F-hitung sebesar  $3,921 > F\text{-tabel}$  sebesar 2,24 yang artinya  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme GCG secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA.

## 2. Uji Signifikansi parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji parsial data dilihat pada tabel 7 berikut ini :

<<< Insert tabel 7 >>>

### a) Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perbankan

**Hipotesis 2 diterima** kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan (ROA). Tabel 7 menunjukkan t hitung (2,241) lebih besar dari t tabel (1,99656) nilai signifikansi (0,028) lebih kecil dari 0,05 dan koefisien kepemilikan institusional (-0,013). Nilai rata-rata kepemilikan institusional di dalam perusahaan tergolong banyak. Pemilik mayoritas memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kepemilikan yang semakin besar juga mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Semakin besar kontrol eksternal akan menyebabkan kebijakan yang diambil akan cenderung mengikuti kebijakan dari institusi eksternal.

### b) Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perbankan

Hipotesis 3 ditolak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Tabel 7 menunjukkan t hitung (-0,068) lebih kecil dari t tabel (1,99656)

signifikansi (0,946) lebih besar dari 0,05 dan koefisien kepemilikan manajerial sebesar – (0,002). Rata-rata kepemilikan manajerial di dalam perusahaan tergolong kecil. Kepemilikan minoritas menyebabkan para manajer tunduk kepada pemegang saham mayoritas. Hal ini mengakibatkan ketika dalam pengambilan keputusan para pemegang saham minoritas mungkin saja akan diabaikan diabaikan oleh pemegang saham mayoritas sehingga kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

#### c) Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perbankan

**Hipotesis 4 ditolak.** Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan Hasil SPSS menunjukkan t hitung (0,597) lebih kecil dari nilai t tabel (1.99656) signifikansi (0,552) lebih besar dari 0,05 dan koefisien ukuran dewan komisaris sebesar (-0,092). Rata-rata ukuran dewan komisaris cukup banyak. Namun tersebut masih dibawah jumlah dewan direksi sehingga membuat tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan lebih sulit yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan..

#### d) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perbankan

**Hipotesis 5 ditolak.** Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Tabel 7 menunjukkan nilai t hitung (0,706) lebih kecil dari nilai t tabel (1.99656) signifikansi (0,483) lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien komisaris independen sebesar (-0,092). Rata-rata komisaris independen cukup banyak tetapi tugas komisaris independen sama dengan dewan komisaris lainnya. Pengangkatan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG dalam perusahaan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

#### e) Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perbankan

**Hipotesis 6 diterima.** Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Hasil SPSS menunjukkan nilai  $t$  hitung (3,310) lebih besar dari  $t$  tabel (1.99656) signifikansi (0,002) lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien ukuran dewan komisaris sebesar (0,224). Rata-rata jumlah direksi dalam perusahaan banyak sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan cepat. Sebagian besar direksi tidak memiliki saham yang besar di dalam perusahaan sehingga dewan direksi akan lebih independen dalam menjalankan perusahaan sehingga meningkatkan kinerja perbankan.

#### f) Komite Audit terhadap Kinerja Perbankan

Hipotesis 7 ditolak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Tabel 7 menunjukkan nilai  $t$  hitung (0,826) lebih kecil dari nilai  $t$  tabel (1.99656) nilai signifikansi sebesar (0,412) lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien komite audit sebesar (0,009). Rata-rata hanya satu komite audit yang memiliki kemampuan bidang akuntansi dan keuangan. Padahal, ukuran perusahaan yang besar akan memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi sehingga kerja komite audit menjadi kurang efektif. Sehingga diperlukan auditor eksternal.

## V. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit terhadap kinerja perbankan baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA) Namun secara parsial, hanya kepemilikan institusi dan ukuran dewan direksi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu proporsi anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus proporsional yaitu minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel kontrol, misalnya ukuran perusahaan selain itu juga bisa menggunakan alat ukur lain dalam mengukur kinerja perusahaan semisal ROI, ROE, dan sebaiknya menggunakan periode penelitian yang berbeda karena telah disahkan peraturan baru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8 /PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dengan proporsi 4:3:2

## Daftar Referensi

- Amindoni, Ayomi. Kejahatan Perbankan Terjadi karena GCG Lemah. Media Indonesia.com. Diakses Rabu, 22 Juni 2011 14:09 WIB
- Amyulianthy, Rafriny. 2012. "Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia". *Jurnal Liquidity Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012*, hlm. 91-98. Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila
- Arbaina, Endang Siti. 2012. "Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Unesa Vol 1, No 1*. Universitas Negeri Surabaya
- Belkhir, Mohamed. 2005. "Board structure, Ownership structure, and Firm performance: Evidence from Banking". Laboratoire d'Economie d'Orléans, University of Orléans – France
- Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Che Haat, Mohd. H., R. Rahman, and S. Mahenthiran. 2008. "Transparency and Performance of Malaysian Companies. Management". *Auditing Journal*, Vol. 23(8), pp. 744-778. *Butler University*, [smsmahenth@butler.edu](mailto:smsmahenth@butler.edu)
- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard, 2001. "Corporate Governance and Earning Management". Available online at [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Darmawati, dkk. 2004. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". Sna VII Denpasar-Bali, 2-3 Desember 2004
- Dewayanto, Totok. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)". *Fokus Ekonomi*, vol. 5 No. 2 desember 2010 : 104-123
- Faisal. 2005. "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.2, Hal. 175-190.
- Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 12, No. 1, April 2010, Hlm. 53-68
- Hermalin, Benjamin E. and Michael S. Weisbach. 2003. *Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature FRBNY Economic Policy Review* / April 2003
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. Q North-Holland Publishing Company
- Kaihatu, Thomas S.. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol.8, no. 1, maret 2006: 1-9. Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.
- Klapper, Leora F. and Inessa Love. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". *World Bank Policy Research Working Paper* 2818, April 2002
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta
- Lastanti, Hexana Sri. 2004. "Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar," Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. "Pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2009, Hal. 70 - 84 Vol. 16, No.2 ISSN: 1412-3126. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha". *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Tahun 3, No. 2, Agustus 2010. Universitas Surabaya
- Sari, Irmala. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sama'ni. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004 – 2007". Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sayidah, Nur. 2007. "Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar Cgpi Tahun 2003, 2004, 2005)". *JAAI Volume 11 NO. 1, JUNI 2007*: 1 – 19. Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Siregar, S. V., dan S. Utama. 2006. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, September, 2006, hal: 307- 326.

Susiana dan arleen herawaty. 2007. "Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

Utama, I made Karya dan Komang Ayu Maha Dewi. 2012. "Analisis Camels: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No.2. Juli 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Wahidahwati, 2002. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah Perspektif *Theory Agency*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 5 no. 1.

[www.fcgi.org](http://www.fcgi.org) diakses Jumat 23 November 2012

[www.iicg.org](http://www.iicg.org) diakses Jumat 23 November 2012

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses Selasa, 3 Mei 2011

# LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	72	6.15	-1.70	4.45	1.8096	1.15898
INST	72	88.56	10.40	98.96	78.3621	22.09354
MANJ	72	21.70	.00	21.70	1.5264	4.15826
KOMS	72	7.00	2.00	9.00	5.0972	1.91480
INDP	72	66.67	33.33	100.00	55.4544	11.26092
DIRK	72	9.00	3.00	12.00	7.0972	2.86877
AUDT	72	66.67	33.33	100.00	59.2439	12.43767
Valid N (listwise)	72					

**Tabel 2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99311312
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.624
Asymp. Sig. (2-tailed)		.831

a. Test distribution is Normal.

**Tabel 3**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.570	.667		-.854	.396
	INST	.003	.004	.105	.837	.406
	MANJ	-.030	.019	-.202	-1.595	.116
	KOMS	.054	.062	.165	.874	.385
	INDP	.011	.007	.203	1.673	.099
	DIRK	-.039	.040	-.181	-.977	.332
	AUDT	.009	.006	.177	1.446	.153

a. Dependent Variable: abresid

**Tabel 4**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.516 <sup>a</sup>	.266	.198	1.03794	1.889

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

b. Dependent Variable: ROA

**Tabel 5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INST	.867	1.154
	MANJ	.853	1.172
	KOMS	.387	2.585
	INDP	.930	1.075
	DIRK	.401	2.495
	AUDT	.918	1.090

a. Dependent Variable: ROA

**Tabel 6**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.343	6	4.224	3.921	.002 <sup>a</sup>
	Residual	70.025	65	1.077		
	Total	95.369	71			

a. Predictors: (Constant), AUDT, INDP, INST, MANJ, DIRK, KOMS

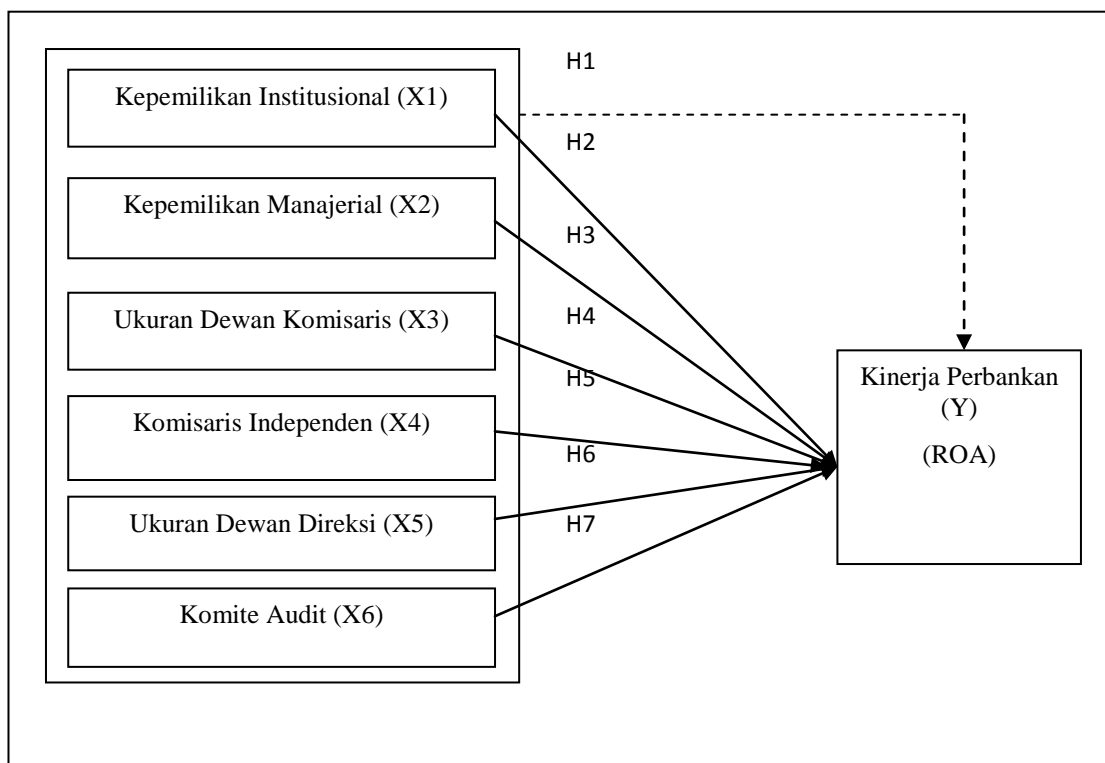
b. Dependent Variable: ROA



Tabel 7

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.536	1.121		2.262	.027
	INST	-.013	.006	-.256	-2.241	.028
	MANJ	-.002	.032	-.008	-.068	.946
	KOMS	-.062	.103	-.102	-.597	.552
	INDP	-.008	.011	-.078	-.706	.483
	DIRK	.224	.068	.556	3.310	.002
	AUDT	-.009	.010	-.092	-.826	.412

a. Dependent Variable: ROA



## Pengaruh *Gender Diversity* dan Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Wayan Teg Teg  
Wiwik Utami\*

Universitas Mercu Buana

**Abstract:** Board gender diversity and remuneration are corporate governance issues that are now being concerned in some public as well as business institutions. Board gender diversity and remuneration are predicted have some positive effect to company performance. In this study gender diversity is measured by Blau Index, remuneration is measured by ratio between remuneration and NBT. In the other hand, firm market performance is measured by Tobin Q and internal performance is measured by ROE. The samples of this study are 279 companies of all industries listed in BEI in 2009, 2010, 2011. The result of this study is that gender diversity has positive effect to both firm's market and internal performance. Meanwhile board remuneration has positive effect only to firm's market performance.

**Keywords:** gender diversity, remuneration, company performance

---

\* Corresponding author: [wiwikutami@gmail.com](mailto:wiwikutami@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengontrol manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tatakelola perusahaan terdiri atas sistem, struktur dan proses. Struktur tatakelola perusahaan merupakan distribusi hak dan kewajiban di antara elemen yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan, yang menjelaskan aturan dan prosedur dalam membuat keputusan di tingkat direksi. Elemen-elemen tersebut meliputi dewan direksi, manajer, pemegang saham dan masyarakat. Dewan direksi memiliki tanggungjawab untuk menentukan tujuan-tujuan strategis perusahaan dan mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari melalui para manajer. (Carrington, W. *at all*. 2008).

Isu perempuan menduduki peran penting dalam dunia bisnis merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Futurolog, John Naisbitt dan Patricia Aburdene, baik dalam bukunya *Megatrends 2000* maupun *Megatrends for Women* mengungkapkan bahwa tahun 1990-an adalah dekade kepemimpinan perempuan dan abad-21 adalah abadnya kaum perempuan. Tidak dijelaskan dengan pasti alasan mengapa dikatakan abadnya kaum perempuan, tetapi hanya diungkapkan bahwa perempuan-perempuan di Amerika dan beberapa negara di Asia serta Eropa telah banyak memenangkan kompetisi dengan lawan jenisnya (pria) dalam mengisi posisi-posisi manajemen puncak di beberapa perusahaan terkemuka. Kecenderungan yang sama sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Sepuluh tahun terakhir beberapa majalah di Indonesia memuat topik perempuan manajer (eksekutif) sebagai laporan utamanya.

Laki-laki dan perempuan memiliki gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda. Menurut Alvares dan McCafery (2000), ada hubungan yang signifikan antara gap perempuan dan laki-laki terhadap kebijakan masalah pajak. Hal ini memicu perdebatan apakah ada pengaruh signifikan *gender* dalam dewan direksi terhadap keputusan yang dibuat yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Carter et al. (2003) melakukan penelitian tentang keterkaitan antara keragaman dalam anggota dewan (*board diversity*), nilai perusahaan, dengan *corporate governance*. Persebaran anggota direksi dilihat dari persentase perempuan dalam anggota dewan direksi, ras minoritas (*African Americans, Asians dan Hispanics*), dan proporsi

*outside directors*. Dengan mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Fortune di Amerika Serikat, hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara fraksi perempuan dan minoritas dalam jajaran direksi dengan kinerja perusahaan. Keberadaan perempuan di sebuah perusahaan/institusi memberikan pengaruh terhadap interaksi bisnis perusahaan. Hal yang menjadi menarik adalah dengan banyaknya pemimpin perempuan di dunia bisnis, apakah kehadirannya memberikan nilai tambah tersendiri, terutama dalam mengeliminir praktik-praktik bisnis yang tidak sehat.

Fenomena lain yang menjadi perhatian disamping isu gender adalah mengenai remunerasi yang diterima oleh direksi perusahaan. Pengungkapan remunerasi yang diterima oleh direksi merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan remunerasi yang diterima direksi mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian Brick et. al (2005) disimpulkan adanya pengaruh signifikan positif antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. Masih memakai penelitian dengan variabel yang sama, Stapledon (2008) menemukan bahwa ada pengaruh kuat positif remunerasi CEO di Amerika Serikat terhadap kinerja perusahaan.

Sepanjang pengetahuan penulis, di Indonesia masih relatif sedikit penelitian mengenai pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan. Perdebatan seputar remunerasi sangat mungkin masih terasa tabu di Indonesia. Di negara-negara maju perdebatan dan penelitian mengenai remunerasi terkait kinerja keuangan sudah banyak dilakukan. Hal ini dipengaruhi adanya penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (*good governance*) telah dilaksanakan lebih awal di negara-negara maju. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang: (1) pengaruh keragaman gender direksi dan remunerasi terhadap kinerja pasar perusahaan, dan (2) pengaruh keragaman gender direksi dan remunerasi terhadap kinerja internal perusahaan.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Gender diversity*

Menurut kamus Oxford (2000) *diversity* adalah *a range of many people or things that are very different from each other* atau dapat diartikan sebagai beberapa orang atau benda yang berbeda satu sama lainnya. Definisi *diversity* kemudian melebar di luar dari pandangan tradisional. Menurut Nancy R. Lockwood, SPHR, GPHR *Workplace Diversity – Leveraging the power of differences for competitiveness advantage* (June 2005):

*”a broad definition of diversity ranges from personality and work style to all of the visible dimensions such as race, age, ethnicity or gender, to secondary influences such as religion, socioeconomics and education, to work diversities such as management and union, functional level and classification or proximity / distance to headquarter. (Tri Marlianawati, Tugas Akhir Magister Psikologi Terapan Universitas Indonesia, 2006).*

*Gender diversity* dapat memberikan dampak positif bukan karena perbedaan perspektif tetapi atas kemampuan relasional *gender* (Christian Dezo & David Gaddis Ross, 2008). Perempuan memberikan perhatian lebih besar dalam pengelolaan perusahaan. Direksi perempuan lebih banyak hadir dalam rapat-rapat direksi serta lebih terlibat antusias dalam mengikuti jalannya rapat maupun memimpin rapat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michela Bar, et al. (2007) *diversity* dengan kategori tertentu antara lain keragaman latar belakang pendidikan dan informasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, *diversity* dalam kategori *social diversity* tidak berimplikasi kuat terhadap kinerja. *Social category* salah satu faktornya dipengaruhi oleh *gender*. *Information diversity* memberikan dampak positif terhadap kinerja. *Social diversity category*, yang mana biasanya di-drive oleh *gender diversity*, *age diversity*, tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja perusahaan.

Sehubungan hal-hal positif yang diperoleh dari keberadaan perempuan dalam organisasi, beberapa beberapa isu dapat ditemukan dalam literatur-literatur maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- a) *Gender diversity* dipercaya memberikan hal positif terhadap organisasi karena alasannya bahwa perempuan dianggap memiliki “perasaan” kognitif (Krishnan dan Park, 2005). Perasaan kognitif ini memberikan pengaruh terhadap nilai dan keharmonisan organisasi yang dapat mendorong *sharing* informasi dan sumber daya, memfasilitasi konflik dan memberikan kepemimpinan demokratik yang lebih baik.
- b) Kehadiran perempuan dalam tim manajemen puncak dianggap melalui persaingan relatif ketat dengan laki-laki, oleh karenanya perempuan telah melalui tantangan terhadap hirarki yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Pencapaian ini memberikan keunggulan-keunggulan secara psikologis, meningkatkan interaksi antar rekan, dan posisi yang dihormati dalam lingkungan perusahaan. Peningkatan kreatifitas dan inovasi seperti terjadi ketika *gender diversity* ada atau lebih tinggi di tim manajemen puncak (Cox. Jr., 1991).

Keberagaman gender dalam manajemen puncak menarik banyak peneliti dari berbagai disiplin. Para peneliti berusaha mencari keterkaitan antara *diversity* dengan beberapa aspek yang berbeda dalam perusahaan, antara lain *corporeate strategic change* (Goodstein et al. 1994; Wiersema dan Bantel, 1992), *organizational innovation* (Bantel dan Jackson, 1989), *organizational governance* (Adams dan Ferreira, 2009), dan *corporate social responsibility* (Copey dan Wang, 1998; Williams, 2003). Beberapa penelitian yang menginvestigasi hubungan antara komposisi dewan direksi dengan kinerja keuangan dalam konteks negara-negara maju, antara lain di Amerika Serikat (Carter et al. 2003; Krishnan dan Park, 2005), Canada (Francouer et al., 2008), Spain (Cambell dan Minguez-Vera, 2008), Belanda (Marinova, 2010), dan negara-negara Scandinavia (Oxelheim dan Randoy, 2003).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan literatur akuntansi menemukan kaitan antara *gender diversity* dalam tim manajemen senior dan aspek-aspek akuntansi perusahaan. Krishan dan Parson (2008) menemukan bahwa *gender diversity* dalam tim manajemen puncak berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelaporan akuntansi. Dengan menggunakan sample perusahaan nirlaba, Sisciliano (1995), mengemukakan bahwa *gender diversity* dalam dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap kinerja sosial.

Dalam penelitian Dimoski dan Brooks (2005), memperoleh kesimpulan bahwa sangat sedikit anggota direksi berjenis kelamin perempuan pada perusahaan sektor properti, industri, maupun pertambangan di Australia. Namun, dari tahun 1994 sampai 1999 perusahaan properti tersebut semakin lebih banyak memperkerjakan kaum perempuan khususnya yang menduduki jabatan direksi.

Kusumastuti (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh persebaran *gender* direksi terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2005. Persebaran anggota direksi dalam penelitian Kusumastuti (2007) melihat lima aspek yaitu keberadaan direksi perempuan, keberadaan etnis Tionghoa, proporsi *outsider directors*, usia anggota direksi, dan latar belakang pendidikan anggota direksi. Penelitian Kusumastuti (2007) menggunakan variabel kontrol ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan yang merupakan salah satu mekanisme *corporate governance*. Kusumastuti menyimpulkan bahwa keberadaan perempuan, keberadaan etnis Tionghoa, usia anggota dewan, serta latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, secara statistik ditemukan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Senada dengan penelitian Kusumastuti (2007), penelitian Marimutu dan Kolandaisamy (2009), *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa persebaran dewan (*board diversity*) yang diukur dengan perbedaan etnik (*demographic*) dalam anggota direksi, berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Masih sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, dalam penelitian Adams dan Ferreira (2004), memperoleh kesimpulan bahwa perubahan *return* saham, struktur kompensasi direksi, dan *gender diversity* di jajaran direksi adalah berkorelasi. Penelitian yang dilakukan atas 1024 perusahaan publik pada tahun pajak 1998 di Eropa menghasilkan kesimpulan bahwa (1) perusahaan-perusahaan yang memiliki perubahan *positive return* saham mempunyai lebih banyak direksi perempuan, (2) perusahaan-perusahaan dengan persebaran anggota dewan direksi lebih banyak memberikan insentif, (3) perusahaan dengan persebaran direksi lebih banyak melakukan rapat-rapat

direksi. Hasil penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa direksi dengan jenis kelamin perempuan hadir lebih banyak dalam rapat-rapat direksi dibandingkan direksi laki-laki.

*Gender diversity* dalam manajemen puncak memberikan pengaruh yang mungkin berbeda pada tipe perusahaan manufaktur (*industry type company*) dan perusahaan jasa (*services type company*). Perusahaan jasa memiliki karakter yang memiliki lebih besar keterlibatan *customer*/klien dalam proses produksi dan *delivery*, serta keterkaitan yang lebih erat hubungan produksi-konsumsi dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Perbedaan antara kedua tipe perusahaan tersebut mengakibatkan beberapa aspek dalam organisasi seperti praktek-praktek pengelolaan sumberdaya manusia. Karena perbedaan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa, faktor-faktor dinamis yang berkaitan dengan *gender diversity* di dalam organisasi mungkin berbeda di antara dua tipe perusahaan tersebut.

Dari masa ke masa semakin banyak perempuan menduduki manajemen puncak, Dimoski dan Brooks (2005), Catalyst, (2007). Perempuan memiliki cara pandang maupun psikologi berbeda dalam mengambil keputusan dibanding laki-laki. Perempuan juga lebih sering menghadiri rapat direksi dan lebih antusias dalam mengikuti maupun memimpin rapat (Christian Dezo & David Gaddis Ross, 2008, dan Adams dan Ferreira (2004). Keberadaan perempuan sebagai direksi menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan, karena perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bahwa direksi memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan.

### **Keagenan, Remunerasi dan Tatakelola perusahaan**

Teori keagenan (*agency theory*) mengacu pada penelitian Eisenhardt (1989), menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) berdasarkan pada tiga sifat dasar manusia, yaitu:

- a) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- b) Manusia memiliki daya pikir terbatas tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*)
- c) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)



Dalam prakteknya, pemilik modal menstimulus para manager sehingga dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*). Rangsangan yang diberikan dapat berupa motivasi yang antara lain berupa imbalan-imbalan (remunerasi). Dengan bekurangnya *agency cost* dalam arti yang luas maka akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

*Corporate governance* merupakan konsep yang berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan menerima return yang besar atas dana yang telah diinvestasikan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Adanya *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik antara manajemen perusahaan dengan para investor, sehingga dapat mengurangi timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) sebagai akibat dari adanya konflik. Implementasi dari *good corporate governance* dalam manajemen perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep ini. Ada empat prinsip dari implementasi *corporate governance*:

a. Kewajaran (*Fairness*)

Menjamin hak-hak para pemegang saham mayoritas, minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

b. Transparansi (*Transparency*)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas serta dapat dibandingkan tentang berbagai hal, misalnya: kondisi keuangan perusahaan, pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan dan sebagainya.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Memastikan peraturan dan ketentuan yang berlaku telah dipatuhi sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

*Gender diversity* termasuk dalam cakupan prinsip *fairness*, yaitu perusahaan menjamin semua kepentingan saham mayoritas dan minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan

pelaporan remunerasi direksi terkait dengan prinsip transparansi yaitu pelaporan secara terbuka besaran remunerasi yang diterima oleh pengurus pada laporan keuangan.

Dalam penelitian Brick et. al (2005) ditemukan adanya pengaruh signifikan positif antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. Masih memakai penelitian dengan variable yang sama, penelitian Stapledon (2008) menemukan hal senada, bahwa ada pengaruh kuat positif antara remunerasi CEO di Amerika Serikat terhadap kinerja perusahaan. Di Indonesia, masih relatif sedikit penelitian mengenai efektifitas remunerasi direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### Kinerja perusahaan

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi kinerja pasar dan kinerja internal. kinerja pasar adalah sebuah totalitas dari saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di BEI. kinerja pasar itu merujuk pada saham A maka ia berarti menunjuk prestasi saham A di pasar. Kinerja saham A dikatakan tumbuh jika harga saham A di pasar naik. Sebaliknya kinerja saham A disebut merosot atau turun jika harga saham A di pasar turun atau terkoreksi.

Kinerja internal atau sering disebut kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

### Hipotesis

Berdasarkan pada tujuan penelitian dan kajian pustaka maka hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- H1 =** *Keragaman gender anggota direksi berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan,*
- H2 =** *Keragaman gender anggota direksi berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan,*
- H3 =** *Remunerasi yang diterima direksi berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan,*

**H4=** *Remunerasi yang diterima direksi berpengaruh positif terhadap kinerja internal perusahaan.*

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *hypotheses testing* untuk menguji apakah terdapat pengaruh gender dalam anggota jajaran dewan direksi, remunerasi yang diterima oleh anggota dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>). Data yang dimaksud adalah laporan tahunan (annual report) *audited* dari semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 yang memuat secara lengkap informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara melakukan pemilihan-pemilihan data yang memiliki tingkat kesesuaian dengan kebutuhan penelitian yaitu memiliki direksi perempuan dan melakukan pengungkapan remunerasi. Berdasarkan data yang diunduh dari situs BEI, diperoleh sebanyak 394 perusahaan tahun 2009, 424 perusahaan tahun 2010, dan 444 perusahaan tahun 2011. Perusahaan-perusahaan yang memiliki perempuan yang duduk di jajaran dewan direksi pada tahun buku 2010 sebanyak 158 perusahaan dan pada tahun buku 2011 sebanyak 160 perusahaan.

Berdasarkan kriteria persyaratan sebagai objek penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas diperoleh sampel sebanyak 93 perusahaan masing-masing tahun 2010 dan 2011. Sampel perusahaan yang terpilih sebagai objek penelitian tersebut telah menyajikan/memiliki sekaligus direksi perempuan, data remunerasi direksi secara konsisten pada tahun buku 2010 dan tahun 2011.

### Definisi dan Pengukuran Variabel

#### 1) Keragaman gender (*gender diversity*)

Beberapa penelitian *gender diversity* diukur dengan *Blau's Index* (Blau, 1977) antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali (Australia, 2008), Salim Darmadi (Indonesia, 2010), dan Aida Sijamic Wahid (USA, 2010).

Dalam penelitian ini juga menggunakan model pengukuran Blau dengan rumus sebagai berikut:

$$B_i = 1 - \sum p_i^2$$

dimana :  $B_i$  = Blau index

$p_i$  = fraksi dari populasi dalam tiap kelompok

Perhitungan Blau menjumlahkan hasil kuadrat dari nilai fraksi pria dan wanita. Semakin tinggi fraksi salah satu gender sampai pada tingkat 50 persen maka keadaan mencapai kondisi yang semakin beragam (heterogen) sementara jika salah satu fraksi pria atau wanita maka kondisi berbalik menjadi semakin tidak beragam (homogen). Formula Blau didesain semata untuk mengukur tingkat keberagaman suatu populasi. Sebagai contoh jika sebuah populasi dihuni oleh sejumlah yang sama dari fraksi-fraksi yang berbeda maka kondisi tersebut menunjukkan keadaan yang heterogen. Sebaliknya, apabila jika salah satu fraksi memiliki jumlah di atas 50 persen maka dikatakan dalam kondisi menuju homogen.

Blau index berdasarkan atas rasio atau *continous scale*, sehingga index akan meningkat linear terhadap peningkatan representasi perempuan dan pria mencapai jumlah yang sama. Untuk *gender diversity*, index berkisar antara 0 yang berarti *homogeneity* (0/100 proporsi *gender*) sampai 0,5 yang berarti tingkat maksimum *gender diversity* (50/50 proporsi *gender*). Penelitian-penelitian yang memakai pengukuran Blau adalah Salim Darmadi (2010), Ararat et al. (2010), Richard et al. (2004), Adams dan Ferreira (2004), Smith et al. (1994). Model pengukuran Blau, relatif lebih sering dipakai dalam mengukur *gender diversity* (Salim Darmadi, 2010).

## 2) Remunerasi

Pendekatan yang dipakai untuk mengukur remunerasi menggunakan pendekatan laporan laba (rugi). Dalam penelitian ini remunerasi yang diterima oleh direksi diukur dengan ukuran rasio perbandingan jumlah remunerasi yang tertera pada laporan keuangan dengan jumlah laba sebelum pajak penghasilan badan (NIBT; *net income before tax*). Setelah melalui observasi terhadap laporan keuangan seluruh perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI), sebagian perusahaan menampilkan jumlah remunerasi yang diterima masing-masing oleh dewan komisaris, dewan direktur, dan tim audit. Dalam hal demikian, yang dipakai sebagai *sample* dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang menyajikan secara terpisah antara remunerasi dewan komisaris, dewan direksi dan tim audit.

### 3) Kinerja perusahaan

Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan sebagai variabel terikat. Kinerja perusahaan dapat menjadi patokan dari berhasil atau tidaknya pengimplementasian dari *good corporate governance*. Kinerja Perusahaan dibedakan menjadi kinerja pasar dan kinerja internal. Kinerja pasar diukur dengan rasio Tobin's Q. Rasio ini diukur dengan perbandingan jumlah harga pasar lembar saham yang beredar dan jumlah hutang dengan jumlah keseluruhan asset.

$$\text{TOBIN} = (\text{MVE} + \text{DEBT})/\text{TA}$$

Kinerja internal dalam penelitian ini diukur dengan Return on Equity (ROE). Formula untuk mengukur ROE sebuah perusahaan yaitu Laba bersi dibagi dengan Nilai Rata-rata Ekuitas. ROE adalah suatu ukuran untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan investasi (*return*) kepada para pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average of Equity}}$$

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel control yaitu (1) ukuran perusahaan yang diukur dengan ukuran total aset, (2) variabel ukuran direksi diukur dengan jumlah direksi dan (3) proporsi komisaris independen yang diukur dengan jumlah seluruh komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan komisaris independen dan direksi. Ikhtisar pengukuran variabel disajikan pada Tabel 1

Tabel 1: Iktisar Pengukuran Variabel

No	Variabel	Metode Pengukuran
1	Keragaman gender	Blau's index
2	Rasio Remunerasi	Rasio remunerasi direksi terhadap Laba sebelum pajak penghasilan badan
3	Kinerja pasar	TOBIN Q
4	Kinerja internal	<i>Return on Equity</i>
5	Ukuran perusahaan	Jumlah asset
6	Ukuran dewan	Jumlah direksi
7	Porsi Komisaris independen	Jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dewan direksi dan komisaris

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah gender anggota dewan direksi, dan remunerasi yang diterima oleh dewan direksi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat signifikansi 5%.

## PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

### Analisis Desdkriptif

Terdapat 57 perusahaan tahun 2009, 44 perusahaan tahun 2010, dan 32 perusahaan pada tahun 2011 yang memiliki Tobin Q dibawah nilai rata-ratanya sebaliknya sebanyak 36 perusahaan tahun 2009, sebanyak 49 perusahaan tahun 2010, dan sebanyak 61 perusahaan memiliki Tobin Q di atas nilai rata-rata. Hal ini berarti rata-rata sebesar 44persen perusahaan sampel memiliki nilai pasar yang lebih kecil dari nilai tercatat dalam aktiva perusahaan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih rendah (*undervalued*).

*Gender diversity* diukur dengan Blau Index memiliki nilai terendah sebesar -0.4, namun pada taraf nyata nilai terendah adalah 0.0 yang artinya perusahaan sampel yang diteliti paling rendah minimal memiliki 0 orang direksi berjenis kelamin perempuan atau homogen jika dilihat dari fraksi jenis kelamin laki-laki, sedangkan nilai tertinggi adalah 4. Nilai tengah (*median*) dari variabel ini adalah sebesar 0.44 serta memiliki nilai *mode* sebesar 0.44. Secara implisit hal ini menunjukan bahwa angka rasio fraksi direksi yang berjenis kelamin perempuan terhadap jumlah direksi sangat rendah.

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan puncak terlihat pada rasio perusahaan yang memiliki pengurus perempuan yaitu sekitar 23 persen dari total jumlah perusahaan. Rata-rata pengurus yang berjenis kelamin perempuan sebesar sekitar 38,3 persen.

Remunerasi direksi diukur dengan rasio jumlah remunerasi dengan NBT, menunjukkan nilai tertinggi yaitu 18,81 persen sedangkan nilai terendah sebesar – 13,17 persen. Angka minus disini menunjukkan bahwa dalam didalam perhitungan rasio remunerasi terhadap EBIT ada perusahaan sampel yang laporan keuangannya selama periode penelitian memiliki NBT negatif (rugi) sehingga hasil rasio menunjukkan angka negatif. Nilai rata-ratanya (*mean*) berkisar sebesar 0,31 persen, sedangkan nilai tengahnya berkisar sebesar 0,44 persen. Rata-rata nilai rasio tertinggi remunerasi terhadap EBIT yang diterima oleh dewan direksi perusahaan sampel yaitu sebesar skitar 18,81 pesen menunjukkan bahwa nilai tertinggi remunerasi yang dibayarkan oleh perusahaan sampel sebesar 18,18 persen dari total EBIT. Nilai sebesar itu menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel membayarkan sebanyak hampir 18,18 persen dari laba sebelum pajak untuk pengeluaran berupa gaji, tunjangan-tunjangan, fasilitas-fasilitas dan *benefit* lainnya untuk keperluan dewan direksi perusahaan.

### Uji hipotesis

Variasi variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap variasi variabel terikat kinerja pasar sebesar 83,7 persen (*adjusted R<sup>2</sup>*), sedangkan sisanya sebesar 16,3 persen dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model dengan tingkat standar *error* sebesar 0,34% .

Variasi variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap variasi variabel terikat kinerja internal sebesar 83,8 persen (*adjusted R<sup>2</sup>*), sedangkan sisanya sebesar 16,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model dengan tingkat standar *error* sebesar 0,29%.

## Uji - F

Nilai F hitung sebesar 286.092 dengan probabilitas 0.000 . Karena angka probabilitas lebih kecil dari 0.05 ( $\alpha < 0.05$ ), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pasar (Tobin Q). *gender diversity*, remunerasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan, dan porsi komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tobin Q.

Nilai F hitung sebesar 289.010 dengan probabilitas 0.000 . Karena angka probabilitas lebih kecil dari 0.05 ( $\alpha < 0.05$ ), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ROE. *Gender diversity*, Remunerasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan, dan porsi komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE.

*Gender diversity*, remunerasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, dan porsi komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terlihat dari tingkat uji signifikansi uji F kurang dari 0.05 yaitu nilai  $\text{sig} = 0.000 < 0.05$ .

## Uji koefisien regresi parsial (uji – t)

Uji-t dimaksudkan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 2 dibawah ini merupakan iktisar output uji hipotesis F maupun uji-t :

**Tabel 2 : Iktisar hasil uji hipotesis**

No	Variable	Uji – F terhadap kinerja pasar		Uji – F terhadap kinerja internal		Uji t – terhadap kinerja pasar				Uji t – terhadap kinerja internal			
		F	Sig.	F	Sig.	Unstd. B	Std. Beta	Sig.	VIF	Unstd. B	Std. Beta	Sig.	VIF
	Goodness of Fit	286.092	.000 <sup>a</sup>	289.010	.000 <sup>a</sup>								
1	Keragaman gender					.260	.646	.000	1.013	.833	-.259	.000	1.013
2	Rasio remunerasi					-.071	-.480	.000	1.380	-.036	-.028	.310	1.308
3	Ukuran perusahaan					.037	.005	.230	.000	-.439	-.317	.000	1.522
4	Ukuran dewan					.014	.003	.000	1.842	.594	.776	.000	1.842
5	Porsi komisaris independen					-.042	-.106	.000	1.071	1.781	.517	.000	1.071



## Pembahasan

### 1) Keragaman gender

Berdasarkan pada Tabel 2 secara parsial ditemukan bahwa *gender diversity*, remunerasi, ukuran perusahaan, ukuran direksi dan porsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja pasar dan kinerja internal perusahaan. Dari lima variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variasi semua variabel independen tersebut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Probabilitas signifikansi seluruh variabel independen masing-masing sebesar 0.000 lebih kecil dari Alpha 0.05. Dapat disimpulkan pada tingkat signifikansi 0.05 variasi variabel-variabel independen mempengaruhi Tobin Q dan ROE.

*Gender diversity* memiliki signifikansi 0.000 yang berarti bahwa variabel terikat *gender diversity* secara parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja perusahaan. Hal ini bermakna bahwa semakin besar keragaman gender suatu perusahaan maka semakin mempengaruhi kinerja perusahaan. Hipotesa H1 (ada pengaruh positif *gender diversity* dewan direksi terhadap kinerja perusahaan) diterima. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Carter et al. (2003), yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan *gender diversity* terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya, temuan ini berbeda dengan hasil beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2007), Marimutu dan Kolandaisamy (2007) dan Salim Darmadi (2010).

Dengan menggunakan Tobin Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan, Carter et al (2003) memberikan hasil perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dengan proporsi perempuan lebih besar dalam dewan direksi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja perusahaan. Variabel remunerasi juga berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Nilai sig variabel *gender diversity* =  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa variabel *gender diversity* secara parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja internal perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin besar keberagaman gender suatu perusahaan maka semakin baik kinerja internal perusahaan. Hipotesa H2 (ada pengaruh positif *gender diversity* dewan direksi terhadap kinerja internal perusahaan) diterima.

Temuan ini mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengukuran ROA sebagai pengukuran kinerja keuangan/ akuntansi, pengaruh positif diperoleh melalui penelitian oleh Shrader et al (1997), Krishnan dan Park (2005). Dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan di Canada, Francœur et al (2008) berpendapat bahwa persentase wanita lebih tinggi memberikan hasil yang abnormal positif. Di Eropa, bukti-bukti empiris yang menunjukkan pengaruh positif *gender diversity* terhadap kinerja keuangan diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Denmark (Smith et al., 2005) dan di Spanyol yaitu penelitian yang dilakukan oleh Campbell dan Minguez-Vera, 2008).

Penelitian serupa yang dilakukan di negara-negara berkembang yang memperoleh hasil pengaruh positif dilakukan oleh Ararat et al., (2010) di Turki. Dalam penelitian Kusumastuti (Indonesia) menggunakan sampel 33 persen yaitu emiten yang bergerak di bidang manufaktur, penelitian Marimutu dan Kolandaisamy (Malaysia) menggunakan 30 persen sampel perusahaan non-bursa, dan Salim Darmadi (Indonesia) menggunakan 11,2 persen perusahaan sebagai sampel dalam penelitiannya.

Penelitian lainnya dengan menggunakan model variabel sejenis pernah dilakukan di beberapa negara asia tenggara, antara lain di Bangladesh yaitu oleh Duta et al. menggunakan sampel 15 banks yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) dan Chitagong Stock Exchange (CSE) belum dapat menyimpulkan korelasi yang jelas antara *gender diversity* terhadap kinerja perusahaan.

Sebagai bahan perbandingan, untuk menaikkan partisipasi perempuan dalam manajemen puncak tidak terlepas dari kebijakan pemerintah bersangkutan seiring pelaksanaan *Code of Corporate Governance (CCG)*. Dalam penelitian makalah ACCA Pakistan (2010) disebutkan bahwa Norwegia telah memperkenalkan suatu sistem kuota yang mensyaratkan dewan direksi sebuah perusahaan publik memiliki paling sedikit 40 persen dari total anggota dewan. Prancis telah memperkenalkan aturan di parlemen yaitu mensyaratkan 50 persen direksi perempuan di setiap perusahaan publik. Spanyol juga memperkenalkan persyaratan regulasi yang mengatur bahwa setiap perusahaan swasta yang memperoleh kontrak publik harus memiliki dewan direksi yang didalamnya

dijabat paling sedikit 40 persen perempuan. Di Australia, *the Australian Capital Territory (ACT)*, and *South Australian Governments* telah menetapkan dirinya mengenai target pencapaian dan mempertahankan 50 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan dan komite. Sedangkan di Amerika Serikat, *the United States Securities and Exchange Commision* menyaratkan pengungkapan apakah komite nominasi mempertimbangkan *diversity* dalam mengidentifikasi calon-calon dewan.

Menurut hasil sensus yang dilakukan oleh *Australia's Equal Opportunity for Women in Workplace Agency – IOWA* (2008), persentase direksi perempuan di Australia sebesar 10,7 persen, di Amerika Serikat 15,4 persen, dan di Inggris sebesar 12,2 persen. Kondisi ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kondisi di Indonesia. Negara-negara Skandinavian merupakan negara-negara yang memiliki persentase paling tinggi dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan puncak perusahaan (Salim Darmadi, 2010). Dapat dilihat bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang seluruhnya menunjukkan bahwa *gender diversity* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun disisi lain banyak hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara maju menunjukkan ada pengaruh positif *gender diversity* dewan direksi terhadap beberapa aspek perusahaan termasuk kinerja perusahaan. Dari hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ada beberapa hal dapat dicermati yaitu bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang melibatkan sangat sedikit sampel, sementara penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara maju melibatkan jauh lebih banyak sampel.

Penggunaan sampel yang sedikit pada penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang bukan saja disebabkan karena kurang maksimalnya observasi objek penelitian, namun karena ketersediaan sampel yang terbatas. Di negara-negara berkembang umumnya memiliki tingkat partisipasi perempuan dalam manajemen puncak atau peran pengambil keputusan masih sedikit. Hal ini berbeda jauh dengan yang terjadi dinegara-negara maju dimana emansipasi perempuannya sudah sangat bagus.

## 2) Remunerasi direksi

Remunerasi direksi memiliki nilai sig 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05, berarti bahwa secara parsial remunerasi direksi berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Sedangkan terhadap kinerja internal perusahaan yang diukur dengan ROE, variabel bebas remunerasi direksi memiliki nilai sig 0.320 yaitu lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa remunerasi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan yang diukur dengan ROE. Hipotesa H3 (ada pengaruh positif remunerasi dewan direksi terhadap kinerja pasar perusahaan) diterima. Sedangkan Hipotesa H4 (ada pengaruh positif remunerasi direksi terhadap kinerja internal perusahaan) ditolak. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan. Hal ini berarti bahwa baik kinerja internal perusahaan mungkin dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar remunerasi direksi.

Hal ini mendukung anggapan bahwa sampai dengan tingkat tertentu memberikan remunerasi lebih tinggi kepada direksi perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori motivasi, bahwa setiap individu akan bertindak karena motivasi tertentu misalnya motivasi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Setiap tambahan remunerasi yang diberikan akan memberikan semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan.

Hal yang sebaliknya ditemukan terjadi bahwa pemberian remunerasi yang terlalu tinggi dapat merusak keuangan maupun kinerja perusahaan. Banyak terjadi hancurnya perusahaan-perusahaan yang CEO nya berkompensasi tinggi. Atau alih-alih karena ingin menaikkan kompensasi pengurus mereka sering mengabaikan tatakelola perusahaan yang baik. Hal ini mungkin akibat dari terjadi persekongkolan antara top manajemen serta middle manajemen untuk lebih mementingkan kepentingannya dengan mengabaikan kepentingan para pemegang saham. Temuan ini mendukung hampir semua temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu Brick et al. (2005), Stapledon (2003), dan Ames dan Drake (2003).

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

1. *Gender diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keberagaman gender dewan direksi semakin baik kinerja pasar perusahaan.
2. *Gender diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja internal perusahaan, semakin tinggi tingkat keberagaman gender dewan direksi, semakin meningkatkan kinerja internal perusahaan.
3. Remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Hal ini berarti bahwa dengan menaikkan faktor remunerasi direksi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Kinerja pasar perusahaan mungkin dipengaruhi variabel-variabel lain di luar faktor remunerasi.
4. Remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan. Demikian juga halnya terhadap pasar, kinerja internal perusahaan lebih dominan dipengaruhi variabel-variabel lain di luar faktor remunerasi.

### Implikasi dan Keterbatasan

Secara empiris terbukti bahwa keragaman gender berpengaruh positif terhadap kinerja pasar dan kinerja internal perusahaan. Hasil ini mendukung perlunya kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan untuk menduduki jabatan kunci di dunia bisnis.

Remunerasi secara empiris berpengaruh terhadap kinerja pasar yang berarti bahwa semakin baik remunerasi maka investor merespon positif dengan anggapan bahwa remunerasi yang baik akan dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih profesional.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data yang dianalisis adalah data perusahaan (emiten) yang meliputi beberapa perusahaan anak (konsolidasian). Jumlah direksi perempuan yang dimasukkan ke dalam model penelitian hanya pada perusahaan emiten dan tidak merupakan keseluruhan jumlah direksi perempuan di anak perusahaan konsolidasian. Kinerja yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan emiten juga merupakan kinerja anak perusahaan konsolidasian

sehingga mungkin menghasilkan bias jika hanya diasosiasikan dengan jumlah direksi wanita di perusahaan emiten yang bersangkutan saja (*holding*).

Selain itu keterbatasan penelitian ini adalah sebatas meneliti keragaman jender semata tanpa melihat variabel lainnya antara lain latar belakang pendidikan, budaya, umur, struktur kepemilikan perusahaan, yang mungkin memberikan pengaruh terhadap efektifitas kontribusi perempuan terhadap kinerja perusahaan.

# Appendix 1 : Deskripsi umum *gender diversity* dan remunerasi

Statistics							
		Gender Diversity	Rasio Remunerasi	Ukuran Perusahaan	Ukuran Dewan	Porsi Komisaris Independen	Kinerja Pasar
N	Valid	279	279	279	279	279	279
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		.3897	.3061	15659.6360	4.2724	.3844	.5806
Median		.4400	.0500	1552.4400	4.0000	.4000	.5200
Mode		.44	.01	.90 <sup>a</sup>	3.00	.33	.62
Std. Deviation		.40978	2.03358	58897.12350	2.22097	.17597	.50307
Minimum		.00	-13.17	.90	1.00	.00	-.02
Maximum		4.00	18.81	551891.70	12.00	.67	6.49

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

# Appendix 2 : Uji F– terhadap kinerja pasar

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	1.624	5	.325	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.310	273	.001	
	Total	1.934	278		

# Appendix 3 : Uji F– terhadap kinerja internal

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	123.021	5	24.604	.000 <sup>a</sup>
	Residual	23.241	273	.085	
	Total	146.263	278		

# Appendix 4 : Tabel Analisis R<sup>2</sup> – terhadap kinerja pasar

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 <sup>a</sup>	.840	.837	.03369692	1.973

# Appendix 5 : Analisis R<sup>2</sup> – terhadap kinerja internal

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.917 <sup>a</sup>	.841	.838	.29177577	2.051

# Appendix 6 : Uji koefisien regresi parsial (uji – t) terhadap kinerja pasar

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.260	.012		21.939	.000		
	Gender Diversity	.239	.009	.646	26.494	.000	.988	1.013
	Rasio Remunerasi	-.071	.004	-.480	-17.331	.000	.765	1.308
	Ukuran Dewan	.014	.003	.156	4.738	.000	.543	1.842
	Ukuran Perusahaan	.037	.005	.230	7.704	.000	.657	1.522
	Porsi Komisaris Independen	-.042	.010	-.106	-4.238	.000	.934	1.071

a. Dependent Variable: 95% L CI for Tobing mean

# Appendix 7 : Uji koefisien regresi parsial (uji – t) terhadap kinerja internal

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.302	.102		-22.473	.000		
Gender Diversity	.833	.078	.259	10.675	.000	.988	1.013
Rasio Remunerasi	-.036	.036	-.028	-1.017	.310	.765	1.308
Ukuran Dewan	.594	.025	.776	23.705	.000	.543	1.842
Ukuran Perusahaan	-.439	.041	-.317	-10.642	.000	.657	1.522
Porsi Komisaris Independen	1.761	.085	.517	20.708	.000	.934	1.071

a. Dependent Variable: 95% L CI for ROE mean



## Daftar Pustaka

- ACCA Fakistan (2010), Gender Diversity on Board in Fakistan, A discussion paper by ACCA Fakistan, Conceived and commissioned by IFC in partnership with the government of the Netherlands.
- Adams, R.B., Ferreira, D. (2004). Gender Diversity in the Boardroom. *European Corporate Governance Institute (ECGI) Working Papers Series in Finance, No. 57/2004*
- Ali, Muhammad, (2008). The Impact of Gender Diversity on Perfomance in Services and Manufacturing Organization. *Melbourne Bussiness School, 200 Leicester, Victoria 3053, Australia.*
- Ames K., Drake L., (2003). Executive Remuneration and Firm Performance: Evidence from a Panel of Mutual Organizations. *Department of Economics, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH, UK.*
- Ararat, M., Aksu M., dan Cetin, A.T., (2010), Impact of board diversity on board monitoring intensity and firm performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange.
- Bar, M. at all. (2007). The Impact of Work Group Diversity on Perfomance: Large Sample Evidence from the Mutual Fund Industry, Center Financial Researc, *University of Cologne.*
- Buckingham, A., & Saunders, P. 2004. *The survey methods workbook*. Cambridge: Polity Press. Campbell, K., & MÃnguez-Vera, A. 2008. Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. *Journal of Business Ethics*, 83: 435-451
- Blau, P. 1977. Inequality and Heterogeneity. *Free Press, New York.*
- Carrington, W. at all. (2008). The Theory of Governance & Accountability. *The University of Iowa Center for International Finance and Development.*
- Catalyst, The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards 1 (Catalyst. 2007)
- Campbell, K. dan Menguez-Vera, A. (2008), Gender diversity in the boardroom and firm financial performance, *Journal of Business Ethics*, Vol. 83 No 3, pp. 435-451.
- Carter, D., Simkins, B., Simpson, W., 2003. Corporate governance, board diversity, and firm value. *Financial Review* 38(1), 33-53.
- Coles, J.L., Daniel, N. D. dan Naveen, L. (2008), Board; Does size fit all?, *Journal of Financial Economics*, Vol. 87 No. 2 pp. 329-356.
- Darmadi, Salim. (2010), Do women in top management affect firm perfomance? Evidence from Indonesia. *Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM – LK), Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta 10710, Indonesia.*
- Dimovski, W., Brook, R. (2005). The Gender Composition on Boards of Property Trust IPOs in Australia From 1994 to 2004. *Pacific Rim Property Research Journal, Vol 11, No 2*
- Donald C. Hambrick, et al., *The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms' Competitive Moves*, 41 Administrative Science Quarterly, (1996).
- Dutta at. al., (2007). Gender Diversity in the Boardroom and Financial Perfomance of Commercial Banks: Evidence from Bangladesh. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA).*
- Eklund, J.E., Palmberg, J., and Wiberg, D. (2009). Ownershif structure, board composition, and investment performance, *Working paper, Centre for Excellence for Science and Innovation Studies, Stockholm.*
- Erhardt, N., Werbel, J., Shrader, S., (2003). Board of director diversity and firm financial performance. *Corporate Governance* 11(2), 102-111.

- Farrell, Kathleen A., Hersch L. Philip, 2005, Additions to corporate boards; The effect of gender, Department of Finance, University of Nebraska–Lincoln, Lincoln, NE 68588-0490 and Department of Economics, Wichita State University, *Journal of Corporate Finance* 11, pp. 85-106.
- Francoeur, C., Labelle, R., dan Sinclair-Desgagne, B. (2008). Gender diversity in corporate governance and top management, *Journal of Business Ethics*, Vol. 81 No. 1 pp. 83-95.
- Frank Dobbin & Jiwook Jung (2003). Corporate Board Gender Diversity and Stock Performance : The Competence Gap or Institutional Bias?, *North Carolina Law Review*, Vol. 89.
- Ghozali, I. (2001). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. (hal. 99). Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N., (2003). Basic Econometrics, 4<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill, New York
- Hagendorf, J., dan Keasey, K. (2008). The Performance of U.S Bank Mergers: The Influence of Board Diversity. *Leeds University Business School, The University of Leeds LS2 9JT, UK*.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. (2006). Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies, *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 33 No. 7-8 pp. 1034-1062.
- Brick I.J. et. al, (2005). COE Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence or Cronyism?
- Joseph W., (2003). The Tobin *q* as a Company Performance Indicator, *Developments in Business Simulation Performance and Experiential Learning*, Vol. 30.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor No. Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/07-2001
- Krishnan, G.P., dan Park, D. (2005). A few good women – on top management teams. *Journal of Business Research*, Vol. 58 No. 12, pp. 1712-1720.
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan Sastra, P. (2005). Pengaruh *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif *Corporate Governance*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Marimutu, M., Kolandaysamy, I. (2009). Ethnic and Gender Diversity in Boards of Directors and Their Relevance to Financial Performance of Malaysian Companies. *CCSE Journal of Sustainable Development*.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2009.
- Rose, Caspar. 2007. “Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evedence.” *Journal Compilation Vol.15 No.02*.
- Saundra H. Glover et. al, (2002). Gender Differences in Ethical Decision Making. *Women in Management Review, Volume 17, 2002*.
- Sekaran, Uma. (2003). Research Method for Business Fifth Edition.USA: John Willey and Son.
- Stapledon, G.P. (2003). Excecutive Perfomance – Related Compensation : The Difficulty in Trully Aligning With Shareholders Returns. *Wisconsin International Law Journal*.
- Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahid, Aida S. (2010). Director heterogenity and its impact on board effectiveness. *Harvard Bussines School, USA*.

## Pengaruh Konservatisme Laba dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Earnings Response Coefficient*

**MADE DEWI AYU UNTARI**  
**I GUSTI AYU NYOMAN BUDIASIH**  
*Universitas Udayana*

**Abstrak:** Informasi pengumuman laba adalah pesan yang disampaikan manajemen kepada investor, untuk dipakai dalam mengambil keputusan. Reaksi yang ditunjukkan investor dapat berbeda-beda sesuai dengan jumlah informasi yang disediakan pasar. Standar akuntansi mengizinkan perusahaan untuk memilih berbagai metode dalam penyusunan laporan keuangan serta keluasaan perusahaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sejumlah bukti empiris mengenai pengaruh konservatisme laba dan *voluntary disclosure* terhadap *earnings response coefficient*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 120 perusahaan, dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 amatan selama tiga tahun. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi *Pooled Cross-Sectional* (CRSM) dan uji signifikansi parameter Individual (Uji *Sattistik t*).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakuka, diperoleh hasil konservatisme laba tidak memiliki pengaruh terhadap *earnings response coefficient* sedangkan *voluntary disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap *earnings response coefficient*. Penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh konservatisme laba terhadap ERC, diperkirakan hal ini disebabkan karena konservatisme yang sifatnya sementara tidak direaksi oleh pasar, yang berarti bahwa pelaku pasar telah melakukan penyesuaian pada laporan keuangan konservatif. Sementara, penelitian ini dapan menemukan terjadi pengaruh positif signifikan *voluntary disclosure* terhadap ERC, hal ini disebabkan karena semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan sukarela, maka akan semakin tinggi pasar merespons pengumuman laba.

**Kata kunci:** Konservatisme Laba, *Voluntary Disclosure*, *Earnings Response Coefficient*.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu informasi yang dapat dipakai dalam menentukan risiko oleh investor adalah laba yang diperoleh perusahaan. Laba merupakan informasi utama yang dipercayai mampu memengaruhi investor untuk membuat keputusan membeli, menjual, atau menahan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan (Diantimala, 2008). Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan hubungan laba akuntansi dan return ketika menggunakan laba akuntansi untuk menilai perusahaan. Sehingga laba dapat dikatakan memiliki kandungan informasi, apabila laba dan return memiliki hubungan (Suaryana, 2008). Ekspektasi laba dimasa yang akan datang dapat menggunakan informasi tentang tingkat laba saat ini, namun ketepatan prediksinya tergantung dari perilaku laba. Bila laba saat ini dan dimasa lalu mengalami lonjakan yang cukup besar dan hal ini merupakan kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya, maka timbul komponen yang disebut komponen yang tidak terduga (*unexpected component*) atau dikenal dengan *earnings shocks*. *Earnings shocks* ini akan memacu lonjakan pembelian atau penjualan saham disekitar waktu penerbitan laporan keuangan Conrad (2002) dalam Ambarwati (2008).

Laba mempunyai tingkat konservatisme yang berbeda-beda (Dewi 2004). Monahan (1999) dalam Kiryanto dan Supriono (2006), menyatakan semakin konservatif maka laporan akan semakin bias. Laba yang dihasilkan dari akuntansi konservatif menghasilkan laba yang berkualitas rendah Kim *et al.* (2002). Sedangkan sebaliknya berpendapat laba konservatisme yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh perusahaan, sehingga laba dengan metode yang konservatif tidak merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya (Hersanti, 2008). Sebuah definisi awal "konservatisme akuntansi" diberikan oleh Bliss (1924) dalam Knoops (2011), yang menjelaskan konservatisme sebagai "mengantisipasi tidak ada keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian". Prinsip konservatisme adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip konservatisme menganggap bahwa ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu preferensi ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham (Belkaoui, 2006: 288). Hati (2011)

melaporkan telah terjadi peningkatan penerapan akuntansi konservatif yang menunjukkan meskipun prinsip akuntansi konservatif menuai banyak kritik, namun sampai saat ini masih tetap digunakan dan cenderung meningkat.

Reaksi terhadap laba tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan kata lain, laba yang dihasilkan memiliki kekuatan respon (*power of response*). Kekuatan reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya ERC menunjukkan laba yang berkualitas (Jang, dkk., 2007). *Earnings Response Coefficient* (ERC) didefinisikan sebagai ukuran tentang besarnya return pasar sekuritas sebagai respon komponen laba tidak terduga yang dilaporkan perusahaan penerbit saham (Scott, 2000:152). Nilai ERC diprediksi akan semakin tinggi dalam merespon kabar baik yang dilaporkan perusahaan atau kabar buruk yang tercermin dalam laba saat ini untuk memprediksi laba di masa depan (Scott, 2000: 153).

Hersanti (2008) mengatakan tidak terdapat hubungan antara konservatisme laporan keuangan dengan ERC. Suaryana (2008) menemukan terdapat hubungan antara konservatisme laba terhadap ERC dimana perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif cenderung menghasilkan ERC yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi konservatif. Diantimala (2008) menemukan akuntansi konservatif berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC, sedangkan Siti Rahayu (2012) menemukan terdapat hubungan positif signifikan antara konservatisme laba dengan ERC.

Perubahan harga saham akibat perubahan laba juga dipengaruhi pula oleh informasi yang dimiliki investor. Pengungkapan laporan tahunan maupun laporan keuangan, mencerminkan proksi informasi publik yang dimiliki investor. Beberapa peneliti kemudian menggabungkan penelitian tentang pengungkapan (*disclosure*) dengan ERC (Rahayu, 2008). Lang dan Lundholm (1993) dalam Murwaningsari (2007), menguji faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai korelasi return dan ERC rendah lebih banyak melakukan pengungkapan, dengan kata lain ERC berhubungan negatif dengan luas pengungkapan. Murwaningsari (2007) melakukan pengujian pengaruh pengungkapan sukarela dengan ERC menunjukkan temuan sejalan dengan Kartadjudena (2010) berpendapat bahwa luas pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap ERC.

## 1.2 Motivasi Riset

Peneliti termotivasi oleh sejumlah penelitian terdahulu Siti Rahayu (2012) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh konservatisme terhadap *earnings response coefficient* dan berhasil membuktikan konservatisme berpengaruh positif signifikan terhadap *earnings response coefficient*. Dimana hasil penelitian Siti Rahayu paling berbeda dengan penelitian sebelumnya Suaryana (2008) dan Diantimala (2008) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara konservatisme terhadap ERC. sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang sama dengan menambah satu variabel *voluntary disclosure* yang dinyatakan oleh Adharani (2005) mempengaruhi ERC serta ingin membuktikan hasil penelitian Pennman dan Zhang (2002) yang menyatakan bahwa praktik konservatisme dalam akuntansi menghasilkan laba dengan mutu yang lebih tinggi sehingga adanya kemungkinan respons pasar yang tinggi terhadap konservatisme laba.

## 1.3 Pertanyaan Riset

Berdasarkan latar belakang, peneliti memiliki pertanyaan yaitu bagaimana pengaruh konservatisme laba dan *voluntary disclosure* terhadap *earnings response coefficient*.

## 1.4 Tujuan Riset

Riset ini dilakukan dalam menjawab pertanyaan riset untuk mengetahui pengaruh secara empiris konservatisme laba dan *voluntary disclosure* terhadap *earnings response coefficient*.

## 2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

### Konservatisme

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengatur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan utang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Konservatisme akuntansi merupakan suatu pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku dari *net assets* relatif rendah (Penman dan Zhang, 2002). Basu (1997) menjelaskan konservatisme tidak berarti bahwa semua arus kas pendapatan harus di terima sebelum keuntungan diakui, melainkan arus kas harus diverifikasi. Disini akuntan di katakana cenderung memerlukan tingkat verifikasi yang tinggi untuk mengakui



kabar baik daripada saat mengakui kabar buruk. Menurut Richardsdson dan Tinaikar (2003) ada dua jenis laba konservatis : *news-independent conservatism* berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi laba secara independent dan *news dependent conservatism* yaitu menggambarkan lebih tepat waktu untuk pengakuan laba terhadap *bad news* daripada *good news*.

Suaryana (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh konservatisme laba terhadap koefisien respons laba dengan jumlah sampel 91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 1999 samapai dengan 2004. Pengujian yang dilakukan dengan uji beda dua rata-rata sampel independent untuk kelompok konservatif dan nonkonservatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan daya prediksi laba pada kelompok konservatif dan nonkonservatif. Penelitian ini juga dapat menyimpulkan ERC perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif lebih rendah daripada perusahaan tidak menerapkan akuntansi konservatif. Penelitian yang terbaru dilakukan oleh Siti Rahayu (2012) yang menemukan konservatisme laba berhubungan positif signifikan dengan ERC. Penelitian Siti Rahayu (2012) mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pennman dan Zhang (2002) yang menyatakan bahwa praktek konservatisme dalam akuntansi menghasilkan laba dengan mutu yang lebih tinggi: “*Conservatism yields lower earnings, it is said, and so prima facie these “conservatism” earnings are higher quality.*”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis hubungan konservatisme laba terhadap ERC sebagai berikut:

**H1 : Konservatisme Laba berpengaruh terhadap ERC.**

### **Voluntary Disclosure**

Pengertian Pengungkapan Sukarela menurut Meek *et al.* (1995) dalam Janadi *et al.* (2011) merupakan pengungkapan laporan akuntansi dan informasi lainnya yang relevan, dan dilakukan secara bebas oleh manajer perusahaan berdasarkan kebutuhan pengguna laporan tahunan. Pengungkapan sukarela akan jauh dirasakan manfaatnya apabila manajer mengungkapkan faktor penentu keberhasilan perusahaan dan *trend* sekitar faktor tersebut, dengan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang mencakup kabar baik, melainkan juga hal-hal yang mengecewakan (Levinshon, 2001).

Rahayu (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat ketaatan pengungkapan wajib dan luas pengungkapan sukarela terhadap kualitas laba. Hasil

penelitiannya adalah tidak dapat membuktikan tingkat ketaatan pengungkapan wajib dan luas pengungkapan sukarela secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laba yang diukur dengan ERC. Hasil penelitian tetap konsisten sebelum dan setelah dimasukkan variabel kontrol.

Murwaningsari (2007) menemukan bahwa luas pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap ERC. Adharani (2005) melakukan pengujian terhadap pengaruh variasi tingkat pengungkapan sukarela terhadap ERC. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan yang komplementer antara informasi laba dan pengungkapan sukarela. Hussainey dan Walker (2009) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung akan melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pasar dalam mengantisipasi perubahan laba masa depan. Oleh sebab itu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H2 : *Voluntary disclosure pengaruh terhadap ERC.***

### **Earnings Response Coefficient**

ERC umumnya diperkirakan sebagai slope koefisien regresi untuk mengukur pendapatan tidak normal yang dihasilkan dari laba kejutan (*earnings surprise*) (Teoh dan Wong, 1993). Mayangsari (2004) mendefinisikan koefisien respon laba sebagai suatu dampak dari tiap dollar laba kejutan pada return saham dan biasanya diukur dengan slope koefisien hasil regresi return abnormal dan laba kejutan. Itu berarti bahwa koefisien respon laba adalah suatu reaksi yang datang dari pengumuman laba perusahaan. Pada hipotesis pasar yang efisien (Fama 1970, 1976 dan 1991 dalam Cheng dan Nasir, 2010) menyatakan harga saham akan menyesuaikan dengan cepat berdasarkan perubahan informasi. Sehingga ERC didefinisikan sebagai perkiraan perubahan harga saham yang terjadi akibat pengumuman laba perusahaan yang masuk ke informasi pasar.

Pengertian koefisien respon laba (ERC) menurut Cho dan Jung (1991) adalah : koefisien response laba didefinisikan sebagai efek setiap dolar *unexpected earnings* terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal return saham dan *unexpected earning*. Cho dan Jung (1991) ( mengklasifikasi pendekatan teoritis ERC menjadi dua kelompok yaitu (1) model penilaian yang didasarkan pada informasi ekonomi (*information economics based valuation model*) seperti dikembangkan



oleh Lev (1989) yang menunjukkan bahwa kekuatan respon investor terhadap sinyal informasi laba (ERC) merupakan fungsi dari ketidakpastian di masa mendatang. Semakin besar *noise* dalam sistem pelaporan perusahaan (semakin rendah kualitas laba), semakin kecil ERC dan (2) model penilaian yang didasarkan pada time series laba (*time series based valuation model*) seperti yang dikembangkan oleh Braver, Lambert dan Morse (1980) dalam Murwaningsari (2007).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi dari seluruh perusahaan manufaktur yang sudah *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

#### 3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah (1) data laporan tahunan, (2) data harga saham  $\pm 5$  hari tanggal pengumuman laporan tahunan, (3) indeks harga saham gabungan (IHSG)  $\pm 5$  hari tanggal pengumuman laporan tahunan, (4) data earning pershare (EPS) tahun 2009-2011, (5) return saham harian  $\pm 5$  hari publikasi laporan tahunan dan (6) market return harian  $\pm 5$  hari publikasi laporan tahunan.

#### 3.3 Definisi dan Operasional Variabel

##### Variabel Independen

##### 1) Konservatisme Laba

Akuntansi konservatif merupakan reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan (SFAC No. 2, FASB 1980, *glossary of term*). Pengukuran akuntansi konservatif yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dalam penelitian yang digunakan oleh Diantimala (2008) dengan mengacu kepada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Givoly dan Hayn (2002), yaitu mengukur konservatisme dengan melihat kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Apabila perhitungan akrual non-operasi negatif, maka laba digolongkan konservatif dan sebaliknya.

Menghitung akuntansi konservatisme dilakukan dengan menghitung total akrual operasional perusahaan dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - OCF_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana  $TA_{it}$ : total akrual perusahaan i pada tahun t;  $NI_{it}$ : laba bersih perusahaan i pada tahun t; dan  $OCF_{it}$ : kas bersih dari aktifitas operasi perusahaan i pada tahun t.

Kemudian menghitung akrual operasional perusahaan dengan persamaan sebagai berikut:

$$OA_{it} = \Delta ACCREC_{it} + \Delta PREPEXP_{it} + \Delta INV_{it} - \Delta ACCPAY_{it} - \Delta TAXPAY_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana  $OA_{it}$ : akrual operasional perusahaan i pada tahun t;  $\Delta ACCREC_{it}$ : perubahan piutang perusahaan i pada tahun t;  $\Delta PREPEXP_{it}$ : perubahan biaya dibayar dimuka perusahaan i pada tahun t;  $\Delta INV_{it}$ : perubahan persediaan perusahaan i pada tahun t;  $\Delta ACCPAY_{it}$ : perubahan hutang usaha perusahaan i pada tahun t; dan  $\Delta TAXPAY_{it}$ : perubahan hutang pajak perusahaan i pada tahun t.

Kemudian terakhir adalah persamaan menghitung akrual non-operasi sebagai indikasi adanya indikasi praktik akuntansi konservatif dengan tanda negatif sebagai berikut:

$$NOA_{it} = TA_{it} - OA_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana  $NOA_{it}$  : akrual non operasi perusahaan i pada tahun t.

## 2) *Voluntary Disclosure*

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah mengungkapkan informasi yang dianggap perlu oleh perusahaan untuk diungkapkan yang melebihi dari yang diwajibkan. Mengacu pada penelitian Baskaraningrum (2012) indeks kelengkapan pengungkapan sukarela dapat dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap perusahaan, kemudian dikalikan 100 persen. Berikut adalah model perhitungan:

$$\text{Indeks Pengungkapan Sukarela} = \frac{N}{K} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

$N$  = Total item yang diungkapkan (1 jika diungkap, 0 jika tidak diungkap)

K = Total item pengungkapan sukarela

Dalam penelitian ini jumlah informasi yang diungkapkan terdiri dari 35 item dengan 5 point yang sebelumnya digunakan oleh Baskaraningrum (2012) sebagai berikut:

- Latar belakang perusahaan
- Ringkasan hasil kinerja perusahaan selama sepuluh sampai lima tahun
- Informasi non keuangan
- Informasi mengenai proyek informasi perusahaan di masa depan
- Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen

### Variabel Dependen

*Earnings response coefficient* merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi. Proksi harga saham yang digunakan adalah *Cumulative Abnormal Return* (CAR), sedangkan proksi laba akuntansi yang digunakan adalah *Unexpected Earnings* (UE)

Besarnya ERC diperoleh dengan melakukan beberapa tahap perhitungan:

Tahap pertama adalah menghitung (CAR) masing masing perusahaan sampel. Berikut adalah tahapan menghitung CAR:

- Menghitung retur abnormal :

$$AR_{it} = R_{it} - R_{m_{it}} \dots\dots\dots(5)$$

Dimana :

$AR_{it}$  = *Abnormal Return* perusahaan i pada hari t.

$R_{it}$  = *Return* sesungguhnya perusahaan i pada hari t.

$R_{m_{it}}$  = *Return* pasar perusahaan i pada hari t.

- Menghitung return sesungguhnya dan return pasar dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}} \dots\dots\dots(6)$$

Dalam hal

$R_{it}$  = *return* sesungguhnya perusahaan i pada hari t.

$P_{it}$  = harga saham penutupan (*closing price*) perusahaan i pada hari t.

$P_{it-1}$  = harga saham penutupan (*closing price*) perusahaan i pada hari sebelum t.

Return pasar dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$RM_{it} = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}} \dots\dots\dots(7)$$

Dimana :

$RM_{it}$  = return pasar pada hari t

$IHSG_t$  = Indeks harga saham gabungan pada periode (hari) t.

$IHSG_{t-1}$  = Indeks harga saham gabungan pada periode (hari) sebelum t.

Dalam hal ini  $CAR_{it}$  : CAR perusahaan i pada tahun t; dan  $AR_{it}$  : return abnormal perusahaan i pada hari t. CAR pada saat laba akuntansi dipublikasikan dihitung dalam jendela peristiwa selama 11 hari (5 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa).

$$CAR_{it} = CAR_{i(-5+5)} = \sum_{t=-5}^{+5} AR_{it} \dots\dots\dots(8)$$

Tahap kedua adalah menghitung UE masing-masing perusahaan. *Unexpected earnings* atau *earnings surprise* merupakan proksi laba akuntansi yang menunjukkan kinerja intern perusahaan. UE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$UE_{it} = (EPS_{it} - EPS_{it-1}) / Pit-1 \dots\dots\dots(9)$$

Dimana :

$UE_{it}$  = *Unexpected Earnings* perusahaan i pada tahun t

$EPS_{it}$  = *Earnings per share* perusahaan i pada tahun t-1

$EPS_{it-1}$  = *Earnings per share* perusahaan i pada tahun t

$Pit-1$  = Harga saham perusahaan i akhir tahun t-1

### 3.4 Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan Regresi *Cross-Sectional* (CRSM) yang bertujuan untuk menguji pengaruh laba konservatisme dan *voluntary disclosure* terhadap ERC adalah dengan cara mengembangkan model regresi *cross-sectional* (CRSM) seperti yang dikembangkan oleh Ecker *et al.* (2005) dan Suaryana (2005). Penelitian ini menggunakan regresi *cross-sectional* (CRSM) karena model regresi ini dapat menghasilkan hasil pengamatan yang lebih konsiten dan efisien. Model penelitian dengan regresi *cross-sectional* (CRSM) sebelumnya juga digunakan untuk menguji variabel-variabel yang

mempengaruhi ERC oleh Ecker *et al.* (2005) dan Suaryana (2005). Model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$CAR_{it} = \alpha + \beta_1(UE_{it}) + \beta_2(AK_{it}) + \beta_3(VD_{it}) + \beta_4(UE_{it})*(AK_{it}) + \beta_5(UE_{it})*(VD_{it}) + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(10)$$

Dimana :  $CAR_{it}$  adalah *cummulatif abnormal return* saham perusahaan ke i pada tahun t;  $AK_{it}$  adalah laba konservatisme saham perusahaan ke i pada tahun ke t;  $VD_{it}$  adalah *voluntary disclosure* perusahaan i tahun t;  $\alpha$  adalah konstanta; dan  $\varepsilon_{it}$  adalah *error term*. Pengaruh laba konseravatisme terhadap ERC ditunjukkan oleh koefisien  $\beta_4$ , sedangkan pengaruh *voluntary disclosure* terhadap ERC ditunjukkan oleh koefisien  $\beta_5$ .

#### 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan pengambilan sampel dengan kriteria *purposive sampling*, sampel penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan sampel dari 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2011.

##### 4.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UE	60	-2,7252	13,6400	0,2814	1,8151
AK	60	-3,8184	-0,0017	-0,3399	0,6301
VD	60	-0,3429	0,8857	0,6076	0,1328
CAR	60	-0,2047	0,2193	0,0024	0,0676

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa konservatisme laba terendah dimiliki oleh Asia Pasific Fibers Tbk. pada tahun 2011 dan konservatisme laba tertinggi adalah Indofarma Tbk. pada tahun 2009, dengan nilai mean perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 yang menjadi sampel adalah -0,3399 dan standar deviasi sebesar 0,6301. Nilai minimum untuk *voluntary disclosure* adalah 0,3429 dan nilai maksimum adalah 0,8857. Hal ini berarti bahwa diantara perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 yang memiliki *voluntary disclosure* terendah adalah

Delta Djakarta Tbk. pada tahun 2009, 2010, dan 2011, sedangkan *voluntary disclosure* tertinggi dimiliki oleh Indofarma Tbk. pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Nilai mean perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 yang menjadi sampel adalah 0,6076 dan standar deviasi sebesar 0,1328. *Unexpected earnings* terendah dimiliki Asia Pasific Fibers Tbk. pada tahun 2010, sedangkan *unexpected earnings* tertinggi dimiliki oleh Asia Pasific Fibers Tbk. pada tahun 2009. Dengan Nilai mean adalah 0,2814 dan standar deviasi sebesar 1,8151. *CAR* terendah dimiliki Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 2011, sedangkan *CAR* tertinggi dimiliki oleh Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2010. Nilai mean *CAR* adalah 0,0024 dan standar deviasi sebesar 0,0676.

## 4.2 Pengujian Asumsi Klasik

### Asumsi Outlier

Outlier adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Dari hasil pengujian normalitas data, diketahui terdapat kasus outlier karena diketahui nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorof-Smirnov* sebesar  $0,014 < 0,05$ . Langkah selanjutnya adalah menghilangkan data yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya. Setelah data yang terlihat ekstrim tinggi atau rendah dihilangkan dari observasi, maka tidak ditemukan lagi permasalahan outlier. Dari 23 sampel perusahaan yang didapat dihilangkan 3 perusahaan yaitu : Asahimas Flat Glass Tbk, Gudang Garam Tbk, dan Semen Gresik Tbk. Sehingga amatan dalam penelitian ini berjumlah 20 perusahaan selama tiga periode yaitu 60 amatan.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* dengan level of significant 5%. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > tingkat signifikan ( $\alpha = 5\%$ ) maka data dikatakan berdistribusi normal.

### Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000
	Std. Deviation	,061
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,154
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		1,193
Asymp. Sig. (2-tailed)		,116

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.2 Maka, dapat diketahui nilai signifikansi dengan uji *Kolmogorof-Smirnov* sebesar  $0,116 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji statistic *Glejser*. Model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai *absolute residual* statistik lebih besar dari 0,05. Hasil uji *Glejser* dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model						
1	(Constant)	,041	,030		1,364	,178
	UE	,036	,143	1,457	,252	,802
	AK	-,004	,010	-,052	-,376	,709
	VD	-,001	,049	-,003	-,020	,984
	UE*AK	-,006	,008	-,113	-,756	,453
	UE*VD	-,065	,238	-1,574	-,272	,786

a. Dependent Variable: Absolut Residual

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pengganggu antara variabel pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya data autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Run Test*. Deteksi autokorelasi dilihat dari nilai *Asymp. Sig* yang dihasilkan. Jika nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05 maka model uji terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 121).

**Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi dengan *Run Test***

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00433
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	29
Z	-,521
Asy mp. Sig. (2-tailed)	,602

a. Median

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai *Asymp. Sig*  $> 0.05$  maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi, sehingga model yang dibuat layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Analisis dan Uji Hipotesis

**Tabel 4.5 Rangkuman Hasil analisis regresi *Pooled Cross-Sectional***

$$CAR_{it} = \alpha + \beta_1(UE_{it}) + \beta_2(AK_{it}) + \beta_3(VD_{it}) + \beta_4(UE_{it})*(AK_{it}) + \beta_5(UE_{it})*(VD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

	Koefisien	T	sig.
Koefisien			
Regresi	-0.503	-2,571	0,013
UE	-0,031	-2,322	0,024
AK	-0,021	-0,314	0,755
VD	-0,003	-0,262	0,794
UE*AK	0,837	2,572	0,013
UE*VD			



F hitung	2,503	0,041
R	0,434	
R Square	0,188	

Berdasarkan Tabel 5 maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,003 - 0,503X_1 - 0,031X_2 - 0,021X_3 - 0,003X_4 + 0,837X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Cummulative Abnormal Return (CAR)*

X1 = *Unexpected Earnings (UE)*

X2 = Laba Konservatisme

X3 = *Voluntary Disclosure*

X4 = UExLaba konservatisme

X5 = UEx*Voluntary Disclosure*

$\varepsilon$  = Komponen pengganggu lain yang mewakili faktor lain yang berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) tetapi tidak dimasukkan ke dalam model.

Uji regresi *Pooled Cross-Sectional* yang dilakukan dengan menggunakan SPSS digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara konservatisme laba dan *voluntary disclosure* terhadap ERC dengan melihat nilai Sig. pada X4 untuk pengaruh konservatisme laba terhadap ERC dan nilai Sig. pada X5 untuk melihat pengaruh *voluntary disclosure* terhadap ERC. Apabila nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependent.

Berdasarkan uji statistik dengan SPSS (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa UExLaba Konservatisme tidak berpengaruh terhadap ERC. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sig. untuk variabel UExKonservatisme laba adalah  $0,794 < 0,005$  sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme laba tidak memiliki pengaruh terhadap ERC atau konservatisme laba berpengaruh tidak signifikan terhadap ERC. Dengan melihat persamaan regresi yang dibuat berdasarkan uji regresi *Pooled Cross-Sectional* nilai beta koefisien UExKonservatisme laba adalah -0,003 sehingga konservatisme laba memiliki pengaruh negatif terhadap ERC.

Pada penelitian ini menguji pengaruh laba konservatisme terhadap ERC dengan kesimpulan tidak terdapat hubungan antara laba konservatisme dengan ERC. Berdasarkan

hasil penelitian terdahulu memang terdapat hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Vita (2008) yang memperoleh hasil tidak terdapat hubungan antara Konservatisme Laporan Keuangan dengan *Earnings Response Coefficient*.

Hasil penelitian saat ini yang tidak dapat menemukan pengaruh laba konservatisme terhadap ERC, dimungkinkan karena ada beberapa perusahaan yang menentukan sendiri kebijakan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan, misalnya perusahaan yang mempunyai nilai ERC positif tetapi memilih metode akuntansi yang konservatif atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme yang sifatnya sementara tidak direaksi oleh pasar yang berarti bahwa pelaku pasar telah melakukan antisipasi pada laporan keuangan konservatisme yang tidak persisten.

Nilai beta UExKonservatisme laba diperoleh sebesar  $-0,003$  yang artinya konservatisme laba pengaruhnya negatif terhadap ERC, berdasarkan penelitian Suaryana (2008) hasil ini menunjukkan daya prediksi laba pada perusahaan yang konservatif lebih rendah daripada perusahaan yang nonkonservatif. Laba yang dilaporkan oleh perusahaan sesungguhnya merupakan pesan yang disampaikan manajemen kepada investor, yang selanjutnya pesan tersebut akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk menggunakan pengumuman laba sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Karena arah yang ditunjukkan dari nilai koefisien beta UExKonservatisme Laba adalah negatif hal ini dapat terjadi karena laba yang dihasilkan dari penerapan prinsip akuntansi konservatif cenderung lebih berfluktuasi sehingga daya prediksi laba cenderung lebih rendah pada perusahaan yang menerapkan prinsip konservatif.

Nilai Sig. untuk variabel UEx*Voluntary Disclosure* adalah  $0,013 < 0,005$  sehingga dapat dikatakan bahwa *Voluntary Disclosure* memiliki pengaruh terhadap ERC atau *Voluntary Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap ERC. Dengan melihat persamaan regresi yang dibuat berdasarkan uji regresi *Pooled Cross-Sectional* nilai beta koefisien UEx*Voluntary Disclosure* adalah  $0,837$  sehingga *Voluntary Disclosure* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ERC.

Penelitian ini berhasil menemukan adanya pengaruh positif antara *Voluntary Disclosure* terhadap ERC, yang berbeda dengan hasil penelitian terdahulu (Rahayu, 2008) yang tidak dapat membuktikan terdapat pengaruh antara *Voluntary Disclosure* terhadap ERC, baik sebelum dan sesudah dimasukkan variabel kontrol.

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan sukarela maka akan semakin tinggi pasar merespon pengumuman laba. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang transparan dalam pengungkapan informasi perusahaannya akan banyak membantu investor dalam membuat keputusan, sehingga perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela akan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Penelitian ini sejalan dengan Adhariani (2005) yang meneliti hubungan komplementer antara informasi laba dan pengungkapan sukarela. Hasil uji beda mendukung hipotesis karena setiap investor memberikan penilaian yang berbeda untuk masing-masing pengungkapan. Uji beda yang dilakukan antara skor terbobot dan skor tanpa bobot menunjukkan hubungan komplementer antara informasi laba dan pengungkapan sukarela serta tetap konsisten setelah ditambahkan faktor pengendali lainnya yang mempengaruhi ERC.

#### **Pengujian Uji Parsial (Uji-t)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara UE, laba konservatisme, voluntary disclosure, UExLaba konservatisme, dan UExVoluntary Disclosure terhadap CAR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Pengujian secara parsial dalam penelitian ini menggunakan t tabel dengan taraf nyata  $\alpha = 0,05$  dan  $df (n-k) = (60-6) = 54$  sehingga diperoleh nilai t tabel = 1,684. Adapun hasil analisis uji t pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Analisis Uji t**

Variabel	T hitung	T tabel	Hasil Uji t	Hasil Hipotesis (H0)	Sig.
X1	-2,571	-1,684	$-2,571 > -1,684$	Ditolak	0,013
X2	-2,322	-1,684	$-2,322 > -1,684$	Ditolak	0,024
X3	-0,314	-1,684	$-0,314 < -1,684$	Diterima	0,755
X4	-0,262	-1,684	$-0,262 < -1,684$	Diterima	0,794
X5	2,572	1,684	$2,572 > 1,684$	Ditolak	0,013

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai Sig. untuk variabel UExKonservatisme laba adalah  $0,794 < 0,005$  sehingga  $H_1$  ditolak. Hasil ini menyimpulkan bahwa konservatisme laba tidak memiliki pengaruh terhadap ERC atau konservatisme laba berpengaruh tidak signifikan terhadap ERC. Dengan melihat persamaan regresi yang dibuat berdasarkan uji regresi *Pooled Cross-Sectional* nilai beta koefisien UExKonservatisme laba adalah  $-0,003$  artinya konservatisme laba memiliki pengaruh negatif terhadap ERC.
- 2) Nilai Sig. untuk variabel UEx*Voluntary Disclosure* adalah  $0,013 > 0,005$  sehingga  $H_2$  diterima. Hasil ini menyimpulkan bahwa *Voluntary Disclosure* memiliki pengaruh terhadap ERC atau *Voluntary Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap ERC. Dengan melihat persamaan regresi yang dibuat berdasarkan uji regresi *Pooled Cross-Sectional* nilai beta koefisien UEx*Voluntary Disclosure* adalah  $0,837$  sehingga *Voluntary Disclosure* memiliki pengaruh positif terhadap ERC.

### 5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya melakukan pengujian pada perusahaan konservatif tanpa melakukan pengujian pada perusahaan nonkonservatif, sehingga kurangnya variasi variabel independent.
2. Penelitian ini menggunakan periode amatan yang sangat singkat yaitu selama 3 tahun (2009-2011).
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independent yang mempengaruhi ERC tanpa menggunakan variabel kontrol.

### 5.3 Implikasi Riset

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan uji beda agar variabel independent lebih bervariasi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode amatan penelitian sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel kontrol seperti: *size*, profitabilitas, *default risk*, dan rasio pembayaran deviden.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhariani, Desi. 2005. Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan dan Hubungan dengan Current Earning Response Coefficient <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=108223&lokasi=lokal> Diunduh pada 20 Juni 2013.
- Ambarwati, Sri. 2008. Earnings Response Coefficient. *ISSN1412-0240*. Vol. 7, No.2, Maret 2008: 128-134..
- Baskaraninggrum, Made Ratih. 2012. Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Skripsi Jurusan Akuntansi: Universitas Udayana.
- Basu, S. 1997. The conservatism principle and the asymmetric of earnings. *Journal of Accounting & Economic* 24 (Desember): 3-37.
- Belkaoui, 2006. *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Jakarta:Salemba Empat.
- Cheng F F and A. Nasir. 2010. Earning Response Coefficients and The Financial Risks of China Commercial Banks. *International Review of Business Research Papers*. Vol. 6, No. 3, Agustus: 178-188.
- Cho, J.Y and K. Jung. 1991. Earnings Response Coefficient: A Sythesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*.
- Dewi, A.A.A. Ratna. 2004. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap *Earnings Response Coefficient*. *SNA VI*.
- Diantimala, Yossi. 2008. Pengaruh Akuntansi Konservatif, Ukuran Perusahaan, dan Default Risk Terhadap Koefisien Respon Laba (ERC). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 1, No.1, Januari 2008: 102-122.
- Ecker et al. 2005. A Returns-Based Representation of Earnings Quality. <https://faculty.fuqua.duke.edu>. Diunduh pada 24 Juni 2013.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Undip.
- Givoly, Dan dan Carla Hayn. 2002. Rising Conservatism: Implication for Financial Analysis. *AIMR*. Januari/Februari.
- Hati, Lia Alfiah Dinanar. 2011. Telaah Lite ang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ekonomi & Pend* ol. 8, No. 2, November 2011.
- Hersanti, Vita Amni. 2008. Hubungan Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Janadi, Yaseen Al, Rashidah Abdul Rahman, dan Normah Haji Omar. 2011. The Level of Voluntary Disclosure Practices Among Public Listed Companies in Saudi Arabia and the UAE: Using a Modified Voluntary Disclosure Index. *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol. 9, No. 2. Desember: 191-201.
- Jang, L., B. Sugiarto, dan D. Siagian. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. *Akuntabilitas* Vol. 6, No. 2 (Maret): 142-149.
- Kartadjumena, Eriana. 2010. Pengaruh Voluntary Disclosure of Financial Information dan CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient. <http://dspace.widyatama.ac.id>. Diunduh pada 5 April 2013.

- Kim *et al.* 2000 Default Risk as a Factor Affecting the Earnings Response Coefficient. *Working Paper*. Queensland University of Tehnology. (December)
- Kiryanto dan Suprianto, Edy. 2006. Pengaruh Moderasi Size Terhadap Hubungan Laba Konservatisme dengan Neraca Konservatisme. *SNA IX : Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Knoops, C.D. 2011. Master Accounting, Auditing & Control Master" s. *Thesis Accounting, Auditing & Control : FEM 11032*.
- Levinsohn, Alan. 2001. FASB Weighs the V oluntary Disclosure. *ABI/INFORM Research*, Vol. 82, No. 9.
- Mayangsari, S. dan Wilopo. 2002. Konservatisme Akuntansi, Value Relevance dan Descretionary Accruals: Implikasi Empiris Model Feltham Ohlson (1996). *Journal Riset Akuntansi Indonesia III*.
- Murwaningsari, Etty. 2008. Pengujian Simultan : Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earning Response Coefficient (ERC). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.
- Penman, S.H, dan Zhang, X.J. 2002. Accounting Conservatism, the quality of Earnings, and Stock Returns. *The Accounting Review*, 77: 237-264.
- Siti Rahayu. 2012. Pengaruh Konservatisme Laba Terhadap Koefisien Respon Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. <http://digilib.unimed.ac.id>. Diunduh pada 5 April 2013.
- Rahayu, Sovi Ismawati. 2008. Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Kualitas Laba Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. *SNA XI*. Pontianak.
- Richardson, G. and S. Tinaikar. 2003. Accounting Based Valuation Models. What Have We Learned?. *Working Paper, University of Toronto*.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. United States of America: Pearson Prentice Hall.
- Suaryana, Agung. 2005. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba. *SNA VIII*. Solo. 15-16 September.
- Suaryana, Agung. 2008. Pengaruh konservatisme laba terhadap koefisien respon laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 1. Januari.
- Teoh, Siew Hong dan T. J. Wong. 1993. Perceived Auditor Quality and the Earnings Response Coefficient. *The Accounting Review*, Vol. 88, No. 2. April: 346-366.
- Watts, Ross.L. 2003. Conservatism in Accounting Part I: Evidence and Research Opportunities <http://www.ssrn.com>. Diunduh pada 12 April 2013.
- Wirawan, Nata. 2002. Cara Mudah Memahami Statistik 2. Denpasar : Keraras Emas.

# Lampiran 1

## Daftar Nama dan Kode Perusahaan Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
3.	BRNA	Berlina Tbk
4.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
5.	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
6.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
7.	INAF	Indofarma Tbk
8.	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
9.	KAEF	Kimia Farma Tbk
10.	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
11.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
12.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
13.	POLY	Asia Pasific Fibers Tbk
14.	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk
15.	SPMA	Suparma Tbk
16.	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
17.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
18.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
19.	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
20.	YPAS	Yana Prima Hasta Persada Tbk

## Lampiran 2.

### Uji Normalitas 2

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	,000
Std. Deviation	,061
Most Extreme Absolute	,154
Differences Positive	,154
Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z	1,193
Asymp. Sig. (2-tailed)	,116

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 3.

### Statistik Deskriptif Data Uji

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UE	60	-2,7252	13,6400	,2814	1,8151
AK	60	-3,8184	-,0017	-,3399	,6301
VD	60	,3429	,8857	,6076	,1328
CAR	60	-,2047	,2193	,0024	,0676
UE*AK	60	-1,8455	6,0420	,0339	,8430
UE*VD	60	-1,6351	8,1840	,1712	1,0922
Valid N (listwise)	60				

## Lampiran 4.

### Uji Autokorelasi

#### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00433
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	29
Z	-,521
Asymp. Sig. (2-tailed)	,602

a. Median

## Lampiran 5.



### Uji Heterokedastisitas

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	UE*VD, VD, AK, UE*AK, UE <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Absolut Residual

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,041	,030		1,364	,178
	UE	,036	,143	1,457	,252	,802
	AK	-,004	,010	-,052	-,376	,709
	VD	-,001	,049	-,003	-,020	,984
	UE*AK	-,006	,008	-,113	-,756	,453
	UE*VD	-,065	,238	-1,574	-,272	,786

a. Dependent Variable: Absolut Residual

### Lampiran 6.

### Regresi Cross Sectional

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	UE*VD, VD, AK, UE*AK, UE <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CAR

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,434 <sup>a</sup>	,188	,113	,0636430

a. Predictors: (Constant), UE\*VD, VD, AK, UE\*AK, UE

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,051	5	,010	2,503	,041 <sup>a</sup>
	Residual	,219	54	,004		
	Total	,269	59			

a. Predictors: (Constant), UE\*VD, VD, AK, UE\*AK, UE

b. Dependent Variable: CAR

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,003	,041		,074	,941
	UE	-,503	,196	-,13519	-2,571	,013
	AK	-,031	,013	-,291	-2,322	,024
	VD	-,021	,067	-,042	-,314	,755
	UE*AK	-,003	,011	-,036	-,262	,794
	UE*VD	,837	,325	13,524	2,572	,013

a. Dependent Variable: CAR

## Reaksi Volume Perdagangan Seputar Pengumuman Laba: Analisis Dampak Berlakunya PSAK 1 (Revisi 2009)

**BEATRISE SIHITE\***  
**ARIA FARAHMITA**  
*Universitas Indonesia*

**Abstrak:** Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati dampak kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap reaksi volume perdagangan saham di seputar penerbitan laporan keuangan tahun 2011. PSAK 1 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan untuk menyajikan bottom-line income dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif, yaitu angka yang merangkum seluruh perubahan ekuitas perusahaan, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode Februari hingga Agustus 2012, dengan total observasi sebanyak 88 pengumuman laba tahunan. Temuan menunjukkan bahwa pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif sebagai bottom-line income, memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan Laba Bersih.

**Kata kunci:** laba rugi komprehensif, PSAK 1 (Revisi 2009), volume perdagangan saham

**Abstract:** This study investigates the effect of PSAK 1 (Revised 2009) on trading volume reaction around 2011 yearly earning announcements. PSAK 1 (Revised 2009) requires companies to present bottom-line income as Comprehensive Income, a number that reflect equity's changes of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from non-owner sources. Sample consist of 44 companies, taken from LQ45 index for periode February until August 2012, with total observations of 88 earning announcements. The evidence suggests that earning announcement which uses earning figure in form of Comprehensive Income, has higher information content than earning figure which presented as Net Income.

**Keywords:** comprehensive income, PSAK 1 (Revised 2009), trading volume

---

\* Corresponding author: beatri.sehite@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Dalam proses konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS, diterbitkan PSAK 1 (Revisi 2009) yang mulai berlaku efektif untuk periode 1 Januari 2011. Revisi ini mengubah komponen laporan keuangan menjadi (1) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, (2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode, (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode, (4) Laporan arus kas selama periode, (5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi lainnya, dan (6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Perbedaan yang signifikan yang dihasilkan oleh revisi tersebut adalah penambahan komponen pendapatan komprehensif lain dibawah *net income*, sehingga pada laporan laba rugi komprehensif muncul istilah “laba rugi komprehensif” sebagai *bottom-line income*.

Laba rugi komprehensif merupakan satu angka yang merangkum perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan. Sebelum revisi, informasi mengenai pendapatan komprehensif lain disajikan pada laporan perubahan ekuitas. Revisi ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat menemukan satu angka laba yang merangkum seluruh perubahan ekuitas selain perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemilik modal. Dengan berlakunya PSAK 1 (Revisi 2009), pengguna laporan keuangan diharapkan memperoleh informasi laba yang memperhitungkan perubahan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan akan lebih dipermudah dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan seluruh aspek yang berpengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan. Dapat juga dikatakan, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi laba yang kandungannya lebih tinggi.

Suatu pengumuman dikatakan memiliki kandungan informasi jika perubahan harga saham dan volume perdagangan saham di seputar tanggal pengumuman tersebut lebih tinggi dibandingkan saat

lain pada periode yang sama (Beaver, 1968). Penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) memunculkan isu baru terkait pengumuman laba, yaitu masalah kandungan informasi laba yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif. Chambers et al. (2005) menemukan bahwa laba rugi komprehensif merupakan informasi yang berguna bagi investor, atau dengan kata lain, laba rugi komprehensif memiliki kandungan informasi yang tinggi. Biddle dan Choi (2006) juga menemukan hasil yang konsisten dengan Chambers et al. (2005), yaitu laba rugi komprehensif mampu mencerminkan kinerja keuangan secara lebih baik dibandingkan laba bersih.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penyajian laba rugi komprehensif, yang berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2009), dapat memenuhi tujuan revisi tersebut, yaitu menyajikan informasi laba yang merangkum seluruh perubahan nilai perusahaan. Jika informasi laba dapat mencerminkan seluruh perubahan nilai perusahaan, maka pengguna laporan keuangan akan memperoleh informasi yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Dapat juga dikatakan, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kualitas informasi dari laba rugi komprehensif. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai bagi investor (Chambers et al., 2005). Artinya, laba rugi komprehensif dinilai penting dan informasi mengenaiya dapat menyebabkan reaksi pasar berupa perubahan harga saham.

Implementasi PSAK 1 (Revisi 2009) dibarengi dengan implementasi revisi PSAK lainnya. Diantara revisi PSAK yang mulai berlaku 1 Januari 2011, revisi PSAK 1 merupakan revisi yang paling signifikan pengaruhnya terhadap informasi laba perusahaan, karena revisi ini mengubah lokasi penyajian pendapatan komprehensif lain. Hirst dan Hopkins (1998) membuktikan bahwa lokasi penyajian pendapatan komprehensif lain berpengaruh terhadap estimasi pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, lokasi penyajian pendapatan komprehensif lain memiliki relevansi nilai, sehingga PSAK 1 (Revisi 2009) adalah revisi yang dampaknya signifikan bagi investor. Selain itu, sebagian besar revisi PSAK lain yang berlaku 1 Januari 2011, tidak berdampak langsung terhadap pengukuran sehingga tidak mempengaruhi laba, contohnya PSAK 2 mengenai laporan arus kas, PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim, PSAK 4 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan

keuangan tersendiri, dan PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Sebagian lagi, dampaknya tidak meluas terhadap seluruh perusahaan, contohnya PSAK 19 mengenai aset tak berwujud, PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis, dan PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Oleh karena itu, PSAK 1 (Revisi 2009) merupakan revisi PSAK yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengumuman laba.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal penggunaan proksi untuk menguji reaksi pasar terhadap penyajian laba rugi komprehensif. Reaksi pasar yang digunakan untuk mengukur dampak penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) dalam penelitian ini adalah reaksi volume perdagangan saham. Penelitian ini akan membandingkan reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba, dalam hal ini penerbitan laporan keuangan tahunan, pada periode sebelum dan sesudah kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait, yaitu (1) Dewan Penyusun Standar Akuntansi, sebagai pandangan atas efek Revisi PSAK 1 (2009) mengenai pengaturan penyajian laporan keuangan apakah penyajian *bottom line-income* dalam bentuk laba rugi komprehensif memiliki kandungan informasi yang lebih baik dibandingkan laba rugi bersih. (2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kalangan akademisi yang kelak bermanfaat dalam menguji efek perubahan format penyajian laba terhadap volume perdagangan saham. Penelitian sebelumnya mengenai laba rugi komprehensif telah membuktikan bahwa laba rugi komprehensif berpengaruh terhadap *return* saham. Penelitian ini menambahkan variabel reaksi volume perdagangan sebagai penguji kandungan informasi laba rugi komprehensif. (3) Bagi investor, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: Bagian 1 Pendahuluan, berisi latar belakang dan motivasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian; Bagian 2 Telaah Literatur, berisi tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis; Bagian 3 Metode Riset, berisi tentang desain riset, data dan sampel, model penelitian dan

operasionalisasi variabel; Bagian 4 berisi pembahasan dan analisis; Bagian 5 berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. PSAK 1 (Revisi 2009)

Terbitnya PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari menyebabkan perubahan format penyajian pendapatan komprehensif lain yang semula disajikan terpisah di Laporan Perubahan Ekuitas, saat ini disajikan dalam satu laporan bersama dengan laba rugi periode berjalan, yaitu pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Revisi ini merupakan usaha harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan standar akuntansi internasional. Revisi PSAK 1 mewajibkan perusahaan melaporkan laba secara lebih komprehensif, yaitu dalam satu laporan yaitu laporan laba rugi komprehensif. PSAK 1 (Revisi 2009) konsisten dengan konsep *all inclusive approach* yang bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kinerja keuangan perusahaan dengan lebih akurat. *All inclusive approach* melaporkan seluruh laba yang berasal dari transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas kecuali transaksi dengan pemilik modal dalam satu laporan laba rugi.

Berikut ini merupakan akun-akun yang termasuk ke dalam Pendapatan komprehensif lainnya:

- Perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap (PSAK 16 Revisi 2007) dan Aset Tak Berwujud (PSAK 19 Revisi 2009)
- Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui (PSAK 24 Revisi 2010, *Imbalan Kerja*)
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas asing (PSAK 10 Revisi 2009, Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing)
- Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual (PSAK 55 Revisi 2006, *Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan*)
- Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (PSAK 55 Revisi 2006, *Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan*)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba belum pernah difokuskan pada pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif. Oleh karena itu, digunakan dua tema penelitian untuk mendapat gambaran yang lebih baik. Yang pertama adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba, dan yang kedua adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak penyajian Laba rugi komprehensif.

Penelitian pertama yang menguji reaksi pasar terhadap pengumuman laba dilakukan oleh Ball dan Brown (1968). Ball dan Brown (1968) menemukan variasi *return* saham yang lebih besar di sekitar tanggal pengumuman laba, yang mengindikasikan adanya kandungan informasi dari pengumuman laba tersebut. Selanjutnya, Beaver (1968), menguji dampak pengumuman laba terhadap *return* saham dan volume perdagangan saham. Beaver (1968) mengatakan bahwa suatu pengumuman memiliki kandungan informasi apabila jumlah lembar saham yang diperdagangkan di sekitar tanggal pengumuman tersebut lebih besar dibandingkan pada saat lain di tahun yang sama. Beaver (1968) berhasil membuktikan bahwa reaksi perubahan harga dan volume perdagangan meningkat di sekitar tanggal pengumuman laba perusahaan. Menurut Beaver (1968), perubahan harga merefleksikan perubahan dalam kepercayaan rata-rata pasar secara agregat, sementara reaksi volume perdagangan menunjukkan jumlah tindakan atau perdagangan tiap investor.

Penelitian-penelitian berikutnya mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman laba berusaha menentukan hubungan reaksi harga dan volume perdagangan di sekitar tanggal pengumuman, dengan membandingkan besarnya reaksi harga dan volume perdagangan. Salah satunya adalah penelitian Bamber dan Cheon (1995) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara reaksi harga dan volume perdagangan. Namun, hubungan tersebut tidak disertai dengan perubahan harga yang sama besar dengan perubahan volume. Bamber dan Cheon (1995) menyimpulkan bahwa frekuensi pengumuman laba menghasilkan reaksi volume dan harga yang besarnya berbeda. Bukti empiris yang diperoleh Bamber dan Cheon (1995) menunjukkan bahwa reaksi volume perdagangan akan lebih besar relatif terhadap perubahan harga. Reaksi volume perdagangan yang lebih besar disebabkan oleh



perubahan keyakinan antar investor yang besar tetapi perubahan keyakinan pasar secara agregat cenderung kecil.

Kandel dan Pearson (1995), dalam penelitiannya tentang reaksi return dan volume perdagangan saham terhadap pengumuman publik, menghasilkan model perdagangan spekulatif yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mereka menemukan bahwa terdapat *abnormal volume* yang positif dan signifikan padahal tidak terdapat perubahan harga. Penemuan ini tidak konsisten dengan model yang biasanya digunakan pada penelitian sebelumnya. Jika informasi diinterpretasikan secara homogen oleh seluruh partisipan pasar maka seharusnya *abnormal volume* terjadi ketika terdapat reaksi perubahan harga juga. Penemuan Kandel dan Pearson (1995) mendukung hasil penelitian Bamber dan Cheon (1995) mengenai perbedaan reaksi harga dan reaksi volume. Hanya saja, Bamber dan Cheon (1995) tidak menyimpulkan penyebab dari perbedaan tersebut. Kandel dan Pearson (1995) menyimpulkan bahwa *abnormal volume* yang terjadi ketika perubahan harga adalah nol, terjadi karena adanya perbedaan interpretasi tiap investor terhadap pengumuman publik.

Penelitian Kandel dan Pearson (1995) didukung oleh hasil penelitian Kim dan Verrecchia (1997) mengenai reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman informasi. Model Kim dan Verrecchia digunakan untuk menjelaskan bagaimana *abnormal volume* terjadi pada saat pengumuman informasi. Kim dan Verrecchia menjelaskan bahwa volume perdagangan timbul akibat, (1) perbedaan presisi informasi antar investor pada periode sebelum pengumuman dan (2) rata-rata keyakinan investor dan perbedaan interpretasi informasi pada saat pengumuman laba. Yang pertama, volume perdagangan yang timbul akibat perbedaan presisi antar investor merupakan volume perdagangan yang timbul akibat implikasi dari informasi sebelum pengumuman. Volume perdagangan ini disertai oleh perubahan harga saham. Penemuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa volume perdagangan memiliki hubungan positif dengan nilai absolut perubahan harga (Bamber dan Cheon, 1995). Volume perdagangan yang kedua, timbul akibat perbedaan interpretasi. Volume perdagangan tersebut terjadi tidak disertai dengan perubahan harga. Volume perdagangan tersebut tidak mengakibatkan perubahan keyakinan pasar secara agregat, tetapi hanya menimbulkan perbedaan keyakinan antar investor. Dengan kata lain, *abnormal volume* terjadi ketika tidak terdapat

perubahan permintaan jumlah lembar saham, misalnya pada saat terjadi pertukaran komposisi portofolio.

Utama dan Cready (1997) menemukan bahwa terjadi peningkatan reaksi volume ketika kepemilikan saham oleh investor institusional adalah rendah dan menurun ketika kepemilikan saham didominasi oleh investor institusional. Penemuan Utama dan Cready (1997) konsisten dengan pernyataan Kim dan Verrecchia (1991a) bahwa reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba meningkat seiring dengan bertambahnya variasi presisi informasi antar investor. Ahmed dan Schneible (2007) melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan *Fair Disclosures* terhadap transaksi pada bursa saham. Ahmed dan Schneible (2007) ingin melihat bagaimana reaksi volume dan harga saham terhadap pengumuman laba triwulan pada periode sebelum dan setelah berlakunya kebijakan *Fair Disclosures*. Ahmed dan Schneible (2007) menggunakan model volume perdagangan Kim dan Verrecchia (1997) sebagai model penelitian dasarnya. Kesimpulan yang didapat adalah kebijakan *Fair Disclosures* memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan kecil dan perusahaan berteknologi rendah, tapi dampaknya tidak signifikan terhadap perusahaan besar dan perusahaan berteknologi tinggi. Hasil yang didapat oleh penelitian ini terkait dengan perbedaan kualitas *disclosures* antara perusahaan besar dan perusahaan berteknologi tinggi dengan perusahaan kecil dan perusahaan berteknologi rendah. Penelitian Ahmed dan Schneible (2007) membuktikan bahwa reaksi volume perdagangan dan perubahan harga sangat dipengaruhi oleh kualitas *disclosures* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang mirip dengan penelitian Ahmed dan Schneible (2007) karena sama-sama mengevaluasi dampak sebuah kebijakan terhadap volume perdagangan saham di sekitar tanggal pengumuman laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pengumuman laba yang ingin dilihat reaksi volumenya dalam penelitian ini adalah laba yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif.

Laba rugi komprehensif merupakan suatu angka laba yang merangkum seluruh perubahan nilai perusahaan, selain yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham. Biddle dan Choi (2006) membuktikan bahwa kandungan informasi laba rugi komprehensif lebih tinggi dibandingkan laba bersih. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif dinilai penting bagi investor.

Penelitian lain yang berusaha menguji kandungan informasi dari laba rugi komprehensif adalah penelitian Hirst et al. (2001). Hirst et al. (2001) menyelidiki apakah pengukuran dan pelaporan laba rugi komprehensif pada Laporan Keuangan secara sistematis mempengaruhi perkiraan dan penilaian analisis keuangan. Hirst et al. (2001) melakukan eksperimen yang melibatkan 80 analis *buy-side* yang berspesialisasi pada industri keuangan. Hirst et al. (2001) menemukan bukti bahwa pertimbangan analisis keuangan akan dipengaruhi oleh kejelasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Laba rugi komprehensif yang dilaporkan pada laporan kinerja keuangan yang terpisah lebih mempengaruhi penilaian analisis atas resiko bank, dibandingkan pelaporan pada laporan perubahan ekuitas dan laporan kinerja keuangan. Dari hasil penelitian Hirst et al. (2001), diketahui bahwa angka Laba rugi komprehensif memiliki kandungan informasi yang berbeda jika disajikan pada lokasi yang berbeda. Laba rugi komprehensif yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan juga diramalkan lebih dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan (King et al., 1999).

Penelitian terdahulu mengenai laba rugi komprehensif kebanyakan berfokus pada dampak penyajian *item* tersebut terhadap harga saham perusahaan. Salah satunya adalah penelitian Chambers et al. (2005) yang menguji relevansi nilai laba rugi komprehensif dengan cara membandingkan penyajian laba sebelum dan setelah berlakunya SFAS 130<sup>1</sup>. Chambers et al. (2005) berusaha membandingkan dampak penyajian laba rugi komprehensif antara periode sebelum berlakunya SFAS 130 dengan periode setelah berlakunya SFAS 130. Chambers et al. (2005) membuktikan bahwa penyajian OCI setelah penerapan SFAS 130, memiliki relevansi nilai bagi investor, yaitu pada basis *dollar-for-dollar*. Tetapi Chambers et al. (2005) tidak menemukan bukti bahwa investor lebih memperhatikan OCI yang disajikan pada Laporan Kinerja Keuangan. Penemuan ini bertolak belakang dengan hasil

<sup>1</sup> SFAS 130 merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai pelaporan Laba rugi komprehensif. SFAS 130 memperbolehkan perusahaan memilih satu diantara tiga format penyajian Laba rugi komprehensif, yaitu 1) dibawah Laba Bersih pada Laporan Kinerja Keuangan, 2) pada Laporan Kinerja Keuangan yang terpisah, dan 3) pada Laporan Perubahan Ekuitas. SFAS 130 mendorong perusahaan untuk melaporkan pendapatan komprehensif lain pada Laporan Kinerja Keuangan, yaitu dibawah Laba Bersih. Standar ini menyatakan bahwa pelaporan Pendapatan komprehensif lain pada Laporan Kinerja Keuangan adalah konsisten dengan Kerangka Konseptual FASB dan ditujukan agar pelaporan keuangan lebih transparan.

survey Hirst et al. (2001) dan King et al. (1999) yang menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan lebih menyukai penyajian OCI pada laporan perubahan ekuitas.

### 2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa volume perdagangan akan meningkat ketika sebuah pengumuman yang memiliki kandungan informasi diterbitkan (Beaver, 1968). Penelitian terdahulu terkait dengan kandungan informasi laba rugi komprehensif menyatakan bahwa laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting karena pelaporannya dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan seluruh perubahan nilai perusahaan, kecuali yang berasal dari transaksi dengan pemilik modal (Hirst et al., 2004; Chambers et al., 2005; Biddle dan Choi, 2006)

Berdasarkan paparan di atas, dapat dihipotesiskan bahwa pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk Laba rugi komprehensif mengandung informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, dapat diekspektasikan terdapat reaksi volume perdagangan yang timbul sebagai respon dari pengumuman laba perusahaan (penerbitan laporan keuangan). Penelitian ini akan membandingkan reaksi volume perdagangan seputar pengumuman laba sebelum PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan dan setelah revisi. Sebelum revisi, *bottom line-income* disajikan dalam bentuk laba bersih sedangkan setelah revisi disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif merupakan angka laba yang cakupannya lebih luas dibandingkan laba bersih sehingga kandungan informasinya lebih tinggi (Biddle dan Choi, 2006).

Dengan kata lain, penyajian laba rugi komprehensif pada laporan laba rugi komprehensif berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2009) memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih yang disajikan sebelum PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan. Kandungan informasi pengumuman yang lebih tinggi akan menyebabkan reaksi volume perdagangan yang lebih tinggi di seputar tanggal pengumuman laba (Beaver, 1968; Ahmed dan Schneible, 2007). Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa reaksi volume perdagangan di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan pada

periode setelah PSAK 1 (Revisi 2009), lebih besar dibandingkan volume perdagangan di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan pada periode sebelum PSAK 1 (Revisi 2009) berlaku.

Hipotesis penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$H_1$  : *Reaksi volume perdagangan seputar pengumuman laba setelah revisi lebih tinggi dibanding sebelum revisi PSAK 1 (2009).*

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Data dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2011. Adapun beberapa kriteria sampel yang digunakan adalah

- Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk keperluan analisis
- Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 selama periode Februari-Agustus 2012
- Perusahaan yang harga dan volume perdagangannya tersedia di BEI

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari publikasi BEI, *Indonesian Capital Market Directory*. Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data *cross section* perusahaan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Pengujian dilakukan dengan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) menggunakan software E-views 7.0.

#### 3.2. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk mengestimasi dampak pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif terhadap volume perdagangan saham adalah mengikuti model Kim dan Verrecchia (1997) dan Ahmed dan Schneible (2007) yaitu:

$$ABVOL_{(-1,+5)it} = \alpha_0 + \alpha_1 PSAK1 + \alpha_2 ABSRET_{it} + \alpha_3 PSAK1 * ABSRET_{it} + \alpha_4 MKTVOL_{it} + \alpha_5 DIFVOL_{it} + \alpha_6 LGMVE_{it} + \alpha_7 LGPRC_{it} + e_{it}$$

ABVOL adalah volume perdagangan kumulatif tujuh hari selama periode penerbitan laporan keuangan periode  $t$ , dalam bentuk persentase terhadap jumlah saham beredar, dikurang median volume perdagangan kumulatif tujuh hari yang dihitung berurutan selama periode estimasi. Variabel  $PSAK1*ABSRET$  merupakan variabel interaksi antara *dummy* PSAK1 dengan variabel ABSRET. PSAK1 merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika periode  $t$  adalah periode setelah berlaku Revisi PSAK 1 tahun 2009, dan bernilai 0 jika sebelum. ABSRET adalah nilai absolut dari *return* saham kumulatif tujuh hari pada periode penerbitan laporan keuangan. MKTVOL adalah volume perdagangan pasar pada di seputar tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan dalam sampel. DIFVOL adalah beda antara rata-rata volume perdagangan dan mediannya pada periode estimasi LGMVE adalah logaritma natural dari nilai pasar ekuitas (nilai penutupan dikali jumlah saham beredar dua hari sebelum penerbitan laporan keuangan). LGPRC adalah logaritma natural dari harga saham (harga penutupan dua hari sebelum penerbitan laporan keuangan). Hipotesis diterima jika koefisien dari variabel  $PSAK1*ABSRET$  ( $\alpha_3$ ) signifikan dan positif.

Operasionalisasi variabel dependen dan variabel independen model penelitian ditunjukkan pada tabel 1 (tidak ditampilkan).

### 3.3. Periode Pengukuran

Periode pengumuman yang digunakan dalam penelitian ini adalah hari -1 dari tanggal pengumuman sampai hari +5 setelah tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan. Jika terdapat tanggal libur maka tanggal tersebut tidak diikutsertakan dalam periode pengumuman. Misalnya, tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan adalah tanggal 21, dan ternyata tanggal 20 dan 22 adalah tanggal libur dimana tidak terdapat aktivitas perdagangan saham di BEI, maka hari -1 adalah tanggal 19 dan hari +1 adalah tanggal 23.

Pemilihan periode pengumuman hari -1 sampai dengan +5 didasarkan pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa reaksi volume perdagangan terjadi pada hari -1 dan hari 0 dari tanggal

pengumuman dan tetap bertahan sampai hari +5 dari tanggal pengumuman (Bamber, 1987; Utama dan Cready, 1997).

#### 4. Analisis Hasil

##### 4.1. Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 selama periode Ferbruari-Agustus 2012. Dari 45 perusahaan, diperoleh 44 perusahaan yang memiliki data-data relevan untuk dijadikan sampel penelitian ini. Hanya satu perusahaan yaitu Salim Invomas yang tidak diikutsertakan sebagai sampel, dengan alasan baru terdaftar di BEI pada tanggal 9 Juni 2011. Pengamatan dilakukan selama dua tahun, yaitu tahun 2010 dan 2011, untuk mendapatkan perbandingan reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba pada saat sebelum dan sesudah berlakunya PSAK 1 (Revisi 2009).

##### 4.2. Statistik Deskriptif

Tabel 2 (tidak ditampilkan) menunjukkan statistik deskriptif variabel secara keseluruhan, tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif sebelum dan sesudah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan. Secara keseluruhan, rata-rata *abnormal volume* adalah 0,0024 dengan nilai tertinggi terjadi pada periode setelah revisi dan nilai terendah terjadi pada periode sebelum revisi. Rata-rata *abnormal volume* pada periode sebelum revisi lebih tinggi dibandingkan rata-rata *abnormal volume* pada periode setelah revisi, yaitu sekitar 0,0014154 pada periode penerbitan LK 2010 dan 0,0033963 pada periode penerbitan LK 2011. Hasil uji signifikansi beda rata-rata menunjukkan bahwa perbedaan reaksi volume pada periode sebelum dan setelah revisi adalah signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Artinya, terjadi penurunan *abnormal volume* yang signifikan pada periode setelah revisi diterapkan. Penurunan rata-rata *abnormal volume* pada periode setelah revisi tidak mendukung hipotesis penelitian yang memprediksi reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba yang lebih tinggi setelah revisi diterapkan.

Pada tabel 3 (tidak ditampilkan), dapat dilihat bahwa penurunan rata-rata *abnormal volume* pada periode setelah revisi tidak diikuti dengan penurunan *abnormal return*. Reaksi volume yang menurun bukan merupakan reaksi volume yang terkait dengan perubahan harga absolut. Oleh karena itu, kita tidak dapat langsung menolak hipotesis. Mungkin saja penurunan *abnormal volume* bukan merupakan dampak dari pengumuman laba, melainkan faktor-faktor lain yang terjadi pada saat pengumuman laba tersebut.

Dari tabel 2, diperoleh nilai rata-rata *abnormal return* secara keseluruhan adalah sebesar 0,39% dengan nilai maksimum 1,6%, terjadi pada periode setelah revisi dan nilai minimum 0,02%, juga terjadi pada periode setelah revisi. Akan tetapi, berdasarkan uji beda rata-rata, perbedaan *abnormal return* sebelum dan setelah revisi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Jika dihubungkan dengan nilai rata-rata *abnormal volume* yang lebih kecil pada periode setelah revisi, tidak adanya perbedaan *abnormal return* pada periode sebelum dan setelah revisi, belum dapat memprediksi bagaimana hubungan antara *abnormal volume* dengan *abnormal return* pada periode sebelum dan setelah revisi. Hasil statistik deskriptif, belum dapat menjelaskan bagaimana reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba pada periode sebelum dan setelah revisi.

#### 4.3. Hasil Uji Pendahuluan

Uji pendahuluan dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi volume perdagangan di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan. Uji pendahuluan secara substansi sesuai dengan pengujian reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman laba pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut antara lain Beaver, 1968; Bamber dan Cheon, 1995; Kim dan Verrecchia, 1997; Utama dan Cready, 1997, dan Ahmed dan Schneible, 2007. Penelitian-penelitian tersebut menguji pengaruh *abnormal return* terhadap *abnormal volume* dengan fokus variabel utama yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa *abnormal return* secara signifikan mempengaruhi *abnormal volume*, mengindikasikan adanya reaksi volume perdagangan yang signifikan di seputar tanggal pengumuman laba.



Model pengujian yang digunakan mirip dengan model utama penelitian ini, tetapi menghilangkan variabel *dummy* PSAK 1 (Revisi 2009) dan variabel interaksi *dummy* dengan *Abnormal Return*. Tujuannya adalah untuk fokus pada dampak *abnormal return* terhadap *abnormal volume* dan menghilangkan dampak perbedaan periode sebelum dan setelah implementasi PSAK 1 (Revisi 2009). Pengujian dilakukan menggunakan program *E-views 7.0*, dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

Tabel 4 (tidak ditampilkan) menunjukkan *probability F statistics* yang lebih kecil dari  $\alpha$ , yaitu sebesar 0,0075, mengindikasikan bahwa model telah layak digunakan untuk pengujian. *Adjusted R-squared* menunjukkan hasil 12,2%, mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebanyak 12,2%. Dalam ilmu sosial, angka tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah baik.

*Probability t-statistic* untuk variabel *abnormal return* (ABSRET) adalah sebesar 0,019 (<5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *abnormal return* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *abnormal volume*. Hasil koefisien ABSRET yang positif menandakan bahwa kenaikan *abnormal return* seputar pengumuman laba terkait dengan kenaikan *abnormal volume*, mengindikasikan adanya reaksi volume perdagangan yang positif dan signifikan di seputar tanggal pengumuman.

#### 4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil regresi model pada tabel 5 (tidak ditampilkan) menunjukkan model signifikan secara statistik yang ditunjukkan dengan *probability F-statistics* sebesar 0.000497 dan nilai *adjusted R-square* sebesar 2,07%. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien PSAK1\*ABSRET yang positif dan signifikan, menandakan bahwa PSAK 1 (Revisi 2009) menyebabkan reaksi volume perdagangan yang signifikan dan lebih besar di seputar tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan tahun 2011. Dengan demikian, dapat diambil keputusan untuk menerima hipotesis ( $H_1$ ). Pengumuman laba yang menyajikan *bottom-line income* dalam bentuk laba rugi komprehensif terbukti memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan laba rugi bersih.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu mengenai relevansi nilai laba rugi komprehensif. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai bagi investor (Chambers *et al.*, 2005; Biddle dan Choi, 2006).

Koefisien *dummy* PSAK 1 yang negatif dan signifikan mengindikasikan bahwa *abnormal volume* pada periode setelah revisi lebih besar dibandingkan *abnormal volume* pada periode sebelum revisi.

Walau demikian, *abnormal volume* yang terkait dengan kandungan informasi pengumuman laba lebih besar pada periode setelah revisi dibanding sebelum. Jadi, *abnormal volume* yang lebih besar pada periode sebelum revisi diterapkan bukanlah *abnormal volume* yang timbul akibat kandungan informasi pengumuman laba. Kim dan Verrecchia (1997) menyebutkan 4 determinan teoritis volume perdagangan, yaitu (1) perbedaan presisi tiap investor pada saat sebelum pengumuman, (2) perbedaan interpretasi investor atas pengumuman laba, (3) perubahan rata-rata keyakinan investor dan (4) tingkat risiko yang ditolerir. *Abnormal volume* yang timbul akibat kandungan informasi pengumuman laba adalah sama dengan *abnormal volume* akibat perbedaan presisi tiap investor pada saat sebelum pengumuman. *Abnormal volume* tersebut merupakan *abnormal volume* yang terkait dengan nilai absolut *abnormal return*. Itulah sebabnya mengapa hipotesis tetap diterima walaupun *abnormal volume* pada periode sebelum revisi lebih besar daripada *abnormal volume* setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan.

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien DIFVOL yang signifikan dan negatif, sesuai dengan ekspektasi awal. Sementara itu, ditemukan bahwa, variabel LSIZE, LPRC dan MKTVOL tidak berpengaruh signifikan terhadap *abnormal volume*.

#### 4.5. Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas merupakan pengujian tambahan yang dilakukan untuk menguji kekuatan (*robustness*) kesimpulan hasil uji hipotesis. Untuk menguji sensitivitas dari hasil pengujian hipotesis, dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan *event window* yang berbeda. Uji sensitivitas dilakukan dengan

menggunakan periode pengumuman selama 2 hari, yaitu hari ke -1 dan hari ke 0 dari tanggal penerbitan laporan keuangan, mengikuti penelitian Utama dan Cready (1997).

Walaupun *event window* yang digunakan berbeda, hasil yang diperoleh tetap sama dengan hasil pengujian awal. Koefisien  $\alpha_3$  yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa terdapat *abnormal volume* terkait pengumuman laba, yang lebih besar di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan pada periode setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan dibandingkan pada periode sebelum revisi. Hasil uji sensitivitas yang diperoleh menguatkan hasil uji hipotesis penelitian, dimana kandungan informasi Laba Rugi Komprehensif terbukti lebih tinggi dibandingkan kandungan informasi Laba Bersih. Hasil uji sensitivitas juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis untuk variabel-variabel bebas lainnya.

## 5. Kesimpulan, Implikasi, Saran dan Keterbatasan

### 5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai (Chambers *et al.*, 2005). Selain itu, ditemukan pula bahwa *bottom line-income* yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan laba rugi bersih. Penemuan tersebut ditunjukkan oleh reaksi volume perdagangan seputar pengumuman laba yang lebih tinggi pada periode setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan dibandingkan sebelum revisi. Dapat juga dikatakan bahwa pada periode setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan, kandungan informasi pengumuman laba lebih tinggi dibanding pengumuman laba sebelum revisi. Laba yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif terbukti memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) telah mendukung peningkatan kualitas informasi laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, biaya transaksi, dan *market volume* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan di seputar tanggal penerbitan laporan keuangan.

Ketidaksimetrisan volume perdagangan pada periode estimasi, yang tercermin dalam kandungan *measurment error* dalam *expected volume*, secara signifikan mempengaruhi reaksi volume perdagangan di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan periode 2010 dan 2011. Selain itu, ditemukan pula hubungan negatif antara ketidaksimetrisan dengan reaksi volume yang terjadi di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan 2010 dan 2011.

Uji sensitivitas dilakukan terhadap model penelitian dengan menggunakan *event window* 2 hari, yaitu hari ke -1 dan hari ke 0 dari tanggal penerbitan laporan keuangan 2010 dan 2011. Berdasarkan hasil uji sensitivitas, diperoleh hasil yang sama dengan hasil uji hipotesis, yaitu terdapat reaksi volume perdagangan yang lebih besar dan signifikan di sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan pada periode setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan dibandingkan pada saat revisi belum diterapkan.

## 5.2. Implikasi Penelitian

PSAK 1 (Revisi 2009) mengubah *bottom line-income* yang sebelumnya berupa laba rugi bersih menjadi laba rugi komprehensif setelah revisi. Revisi ini bertujuan agar investor memperoleh angka laba yang memperhitungkan seluruh faktor yang mempengaruhi perubahan nilai perusahaan, atau dengan kata lain, informasi laba yang memiliki kandungan informasi lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai bagi investor. Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa *bottom-line income* yang disajikan dalam bentuk laba rugi komprehensif setelah PSAK 1 (Revisi 2009) memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih sebelum PSAK 1 (Revisi 2009). Ditemukan bahwa reaksi volume perdagangan akibat pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk laba komprehensif lebih tinggi dibandingkan reaksi volume perdagangan akibat pengumuman laba rugi bersih, mengindikasikan bahwa penyajian laba rugi komprehensif memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan laba rugi bersih. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa penyajian *bottom line-income* dalam bentuk laba rugi komprehensif lebih baik dalam mencerminkan kinerja perusahaan

dibandingkan laba bersih. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) mendukung penyajian informasi laba yang memiliki kandungan informasi lebih tinggi.

### 5.3. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah penggunaan jumlah sampel yang kecil. Untuk dapat mengobservasi reaksi volume perdagangan, dibutuhkan sampel yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang aktif dalam melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 sehingga jumlah sampel yang diperoleh masih tergolong kecil. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, misalnya dengan mengikutsertakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Penelitian ini menggunakan periode observasi yang pendek. Hasil penelitian bisa saja berbeda jika periode yang digunakan lebih panjang. PSAK 1 (Revisi 2009) mulai berlaku untuk laporan keuangan periode 2011, sehingga penelitian hanya dapat dilakukan dengan menggunakan periode dua tahun, yaitu setahun sebelum revisi berlaku dan setahun setelah revisi berlaku. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kekurangan dari pendekatan volume perdagangan adalah volume perdagangan saham tidak hanya dipengaruhi oleh pengumuman khusus yang dilakukan perusahaan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti heterogenitas ekspektasi investor. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang digunakan sebagai pengukur reaksi pasar terhadap pengumuman laba pada periode setelah dan sebelum PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan, contohnya reaksi perubahan harga saham dan frekuensi perdagangan saham.

# LAMPIRAN

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

Jenis	Variabel	Deskripsi	Ekspektasi Tanda
Dependen	$ABVOL_{it}$	<i>Cumulative abnormal volume</i> di seputar tanggal pengumuman laba	
Independen	PSAK1	Variabel indikator yang bernilai 1 untuk periode setelah revisi diterapkan dan bernilai 0 untuk periode sebelum revisi diterapkan	+
Independen	$ABSRET_{it}$	<i>Cumulative abnormal return</i> , mengukur perubahan harga yang terkait dengan volume perdagangan di seputar pengumuman laba	-
Independen	$PSAK1*ABSRET$	Variabel interaksi yang menunjukkan nilai $ABSRET$ setelah PSAK 1 (Revisi 2009) diterapkan	H1: +
Control	$MKTVOL_{it}$	<i>Market Volume</i> diproksikan oleh volume perdagangan pasar harian di seputar tanggal pengumuman laba tahunan	+
Control	$DIFVOL_{it}$	<i>Differential Volume</i> diproksikan oleh beda antara mean dan median volume perdagangan harian pada periode estimasi(hari -11 sampai -70 dan hari +11 sampai hari +7 dari tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan)	-
Control	$LGMVE_{it}$	Ukuran perusahaan yang diproksikan oleh logaritma dari nilai pasar ekuitas	-
Control	$LGPRC_{it}$	Biaya transaksi yang diproksikan oleh logaritma dari harga saham penutupan	-

**Tabel 2. Statistik Dekskriptif Variabel Penelitian**

	Mean	Median	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
<i>Abnormal Volume</i>	0,0024	0,0005	0,0112	-0,0216	0,0573
<i>Abnormal Return</i>	0,0393	0,0337	0,0279	0,0003	0,1621
Interaksi PSAK1 dengan <i>Abnormal Return</i>	0,0194	0,0001	0,0288	0,0000	0,1621
<i>Closing Price</i>	8513	3413	13692	113	72350
Kapitalisasi Pasar (trilyun rupiah)	52	33	57	1.6	292
<i>Differential Volume</i>	0,0019	0,0011	0,0032	-0,0023	0,0158
<i>Market Volume</i>	0,0017	0,0016	0,0003	0,0012	0,0026

Sumber : Hasil Olahan Output Regresi

**Tabel 3 Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah**

	Periode Setelah Revisi		Periode Sebelum Revisi		Signifikan
	Mean	Standar Deviasi	Mean	Standar Deviasi	
<b>ABVOL</b>	0,001415	0,009990	0,0033963	0,0122789	0,0201*
<b>ABSRET</b>	0,040072	0,029538	0,0399092	0,1174849	0,2510
<b>SIZE</b>	55.333.193.232.955	63.747.434.725.641	48.720.199.090.909	51.469.327.021.394	0,0000**
<b>PRICE</b>	9.093	15.093	7.933	12.280	0,0000**
<b>DIFVOL</b>	0,001581	0,002453	0,002275	0,003747	0,0096**
<b>MKTVOL</b>	0,001838	0,000433	0,001672	0,000236	0,0415*

\*\*signifikan pada tingkat keyakinan 99%

\*signifikan pada tingkat keyakinan 95%

ABVOL adalah *abnormal volume* seputar pengumuman tanggal pengumuman laba, ABSRET adalah *abnormal return* seputar pengumuman laba, SIZE adalah kapitalisasi pasar perusahaan dalam sampel, PRICE adalah harga saham penutupan dua hari sebelum tanggal pengumuman laba, DIFVOL adalah beda antara mean dan median volume perdagangan harian pada periode estimasi (hari -11 sampai -70 dan hari +11 sampai hari +7 dari tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan), MKTVOL adalah volume perdagangan pasar seputar tanggal pengumuman laba tahunan

Sumber : Hasil Olahan Output Regresi

**Tabel 4. Hasil Uji Pendahuluan**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Probability</i>
C	0.044016	0.044789	0.982737	0.3286
<b>ABSRET</b>	<b>0.098657</b>	<b>0.041222</b>	<b>2.393316</b>	<b>0.0190*</b>
LSIZE	-0.001161	0.001678	-0.691838	0.4910
LPRC	-0.001417	0.001347	-1.052177	0.2958
DIFFOL	-1.126173	0.433496	-2.597887	0.0111
MKTVOL	2.330139	4.051119	0.575184	0.5667
R-squared				0.172102
Adjusted R-squared				0.121620
F-statistic				3.409199
Prob(F-statistic)				0.007552

Sumber : Hasil Olahan Output Regresi

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Abnormal Volume**

$ABVOL_{(-1,+5)_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 PSAK1 + \alpha_2 ABSRET_{it} + \alpha_3 PSAK1 * ABSRET_{it} + \alpha_4 MKTVOL_{it} + \alpha_5 DIFVOL_{it} + \alpha_6 LGMVE_{it} + \alpha_7 LGPRC_{it} + e_{it}$					
<b>Variable</b>	<b>Expected Sign</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Probability</b>
C		0.045605	0.042728	1.067336	0.2890
PSAK1	+	-0.010214	0.002983	-3.424025	0.0010***
ABSRET	+	0.004309	0.013275	0.324621	0.7463
PSAK1*ABSRET	(H <sub>1</sub> ) +	0.199547	0.053356	3.739931	0.0003***
LSIZE	-	-0.001087	0.001595	-0.681283	0.4977
LPRC	-	-0.001080	0.001285	-0.840437	0.4032
DIFFOL	-	-1.121086	0.415929	-2.695376	0.0086***
MKTVOL	+	1.353551	3.941029	0.343451	0.7322
R-squared		0.270859	Mean dependent var		0.002406
Adjusted R-squared		0.207059	S.D. dependent var		0.011173
S.E. of regression		0.009949	Akaike info criterion		-6.296094
Sum squared resid		0.007919	Schwarz criterion		-6.070881
Log likelihood		285.0281	Hannan-Quinn criter.		-6.205361
F-statistic		4.245450	Durbin-Watson stat		1.760587
Prob(F-statistic)		0.000497			

\*\*\* signifikan pada tingkat keyakinan 99%

Sumber : Hasil Olahan Output Regresi



## DAFTAR PUSTAKA

- AbuGhasaleh, Naser M., Al-Hares, O.M., Haddad, Ayman E. (2012). The Value Relevance of Goodwill Impairments: UK Evidence. *International Journal of Economic and Finance Vol. 4, No. 4*, pp. 206-216.
- Ahmed A.S., & Schneible, R.A. (2007). The impact of regulation Fair Disclosure on investor's prior information quality: evidence from an analysis of changes in trading volume and stock price reactions to earning announcement. *Journal of Corporate Finance Vol. 13*, pp. 282-299.
- Atiase, R.K., Bamber, L.S. (1994). Trading volume reactions to annual accounting earnings announcements. *Journal of Accounting and Economics Vol. 17*, pp. 309-331.
- Ball, R. Dan Brown P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research Vol. 6, No.2*.
- Bamber, L.S. (1986). The information content of annual earnings releases: Trading volume approach. *Journal of Accounting Research Vol. 24*, pp. 40-56.
- Bamber, L.S. (1987). Unexpected earnings, Firm size and trading volume around quarterly earnings announcements. *The Accounting Review Vol. 62*, pp. 510-532.
- Bamber, L.S., Cheon, S.Y. (1995). Differential price and volume reactions to accounting earnings announcements. *The Accounting Review Vol. 70*, pp. 417-442.
- Bandi & Jogiyanto, H.M. (1999). Perilaku reaksi harga dan volume perdagangan saham terhadap pengumuman dividen. Malang: SNA2, UNBRAW.
- Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (1992). The market valuation implications of net periodic pension cost components. *Journal of Accounting and Economics Vol 15*, pp. 27-62.
- Beaver, W. (1968). The Information Content Of Annual Earning Announcement, Empirical Research In Accounting. *Supplement to Journal of Accounting Research 6*, pp. 67-92.
- Biddle, G., & Choi, J. H. (2006). Is comprehensive income useful?. *Journal of Contemporary Accounting & Economic Vol. 2(1)*, pp. 1-32
- Cahan, S. F., Courtenay, S. M., Gronewoller, P. L., & Upton, D. R. (2000). Value relevance of mandated comprehensive income disclosures. *Journal of Business Finance & Accounting Vol. 27*, pp. 1273-1301.
- Chambers, D., T. J. Linsmeier, C. Shakespeare, and T. Sougiannis. (2007). An evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosures. *Review of Accounting Studies, Vol. 12*. pp. 557-593.
- Dhaliwal, D., Subramanyam, K., & Trezevant, R. (1999). Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance? *Journal of Accounting and Economics Vol. 26*, pp. 43-67.
- Fama, Eugene F., (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance, American Finance Association, vol. 25(2)*, pages 383-417
- Farahmita, Aria. (2012). Relevansi Nilai Pendapatan Komprehensif Lain setelah Revisi PSAK No. 1 (2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan. Seminar Doktorat Akuntansi Pasar Modal.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., dan Holmes, S. (2011). *Accounting Theory*. Jakarta : Wiley, 7th Edition, pp. 406-420.
- Hirst, D., & Hopkins, P. (1998). Comprehensive Income Reporting and Analysts' Valuation Judgments. *Journal of Accounting Research Vol. 36*, pp. 47-74.
- Hirst, D., Hopkins, P., dan Wagen E. (2001). Fair Values, Comprehensive Income Reporting, And Bank Analysts' Risk And Valuation Judgments. *Working paper*, University of Texas.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. PSAK No. 55. Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK No. 16. Aset Tetap. Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 1. Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 19. Aset Tak Berwujud. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 10. Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 22. Kombinasi Bisnis. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 48. Penurunan Nilai Aset. Jakarta.
- Khan, S. (2009). “*Value Relevance of Comprehensive Income*”. Auckland: ARA.
- Kieso, Donal E., Weygandt Jerry J., dan Warfield Terry D. (2012). *Akuntansi Intermedite*, Edisi keempatbelas Erlangga, Jakarta.
- Kim, O., Verrecchia, R.E., (1991a). Trading volume and price reactions to public announcements. *Journal of Accounting Research Vol. 29*, pp. 302-321.
- Kim, O., Verrecchia, R.E., (1997). Pre-announcement and event-period private information. *Journal of Accounting and Economics, Vol. 36 (Supplement 1998)* pp. 113-115.
- King, T. E., Ortengren, A. K., and Redd, B. J. (1999). An Analysis of the impact of alternative financial statement presentations of comprehensive income. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 3 No. 1*, pp. 19-42
- Nachrowi, N. D. & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Newberry, S. (1993). Reporting Performance Comprehensive Income and Its Components. *ABACUS Vol. 39, No. 3*, pp. 325-339.
- O’Hanlon, J., & Pope, P. (1999). The value-relevance of U.K. dirty surplus accounting flows. *British Accounting Review, Vol. 31*, pp. 459–482.
- Ohlson, J. A. (1999). On transitory earnings. *Review of Accounting Studies, Vol.4*, pp.145–162.
- Schroeder, R.G. Clark, Myrtle W., Cathey, Jack M. (2009). *Accounting theory and analysis*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Utama, S., & Cready, W. (1997). Institutional ownership, differential predisclosure precision and trading volume at announcement dates. *Journal of Accounting and Economics Vol. 24*, pp. 129-150
- Transaksi Perdagangan Saham. 2011. *Indonesian Capital Market Directory*
- Transaksi Perdagangan Saham. 2012. *Indonesian Capital Market Directory*

# Apakah Kualitas Audit Berpengaruh terhadap Kualitas Laba dalam Masa Krisis Ekonomi Global? (Studi Kasus terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Andri Sri Wibowo\*  
Bandi  
Universitas Sebelas Maret

**Abstract:** *This study aims to find empirical evidence on the effect of audit quality on earnings quality corporate financial statement in Indonesia. This study uses secondary data with the observation during the period 2004 to 2008. The population used in this study includes companies that are in the chemical sector, various industries, and consumer goods that have been listed on the Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method, 92 samples obtained.*

*Proxies of the dependent variable, the earnings quality, is Absolute Discretionary Accruals that have been used by Kothari et al. (2005). Audit Quality is proxied by the size of the auditor (BIG4) and Old Relationships (TENURE). We use regression model to test hypothesis.*

*The results of the test show that there is no significant effect between the size of the auditors on the quality of corporate earnings. From the test results also show that there is a significant effect of the long-standing relationship with the company's earnings quality. This implies that using of a long working relationship between the auditor and the client company as a proxy for audit quality during the economic crisis, is more relevant than using auditor size.*

**Keyword** : *audit quality, auditor size, length of relationship, quality of earnings, discretionary accruals.*

---

\* Corresponding author: andraexs@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam perusahaan *go public* merupakan kewajiban dari manajemen untuk menyajikan keadaan keuangan perusahaan ke dalam sebuah laporan sesuai standar yang berterima umum. Dalam laporan keuangan, terdapat beberapa komponen yang salah satunya adalah komponen laba yang merupakan poin yang menarik bagi investor. Menurut Widjaja dan Maghviroh (2011), kualitas laba merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Jika laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka akan menimbulkan kesalahan persepsi bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Dalam dunia akuntansi, terdapat istilah manajemen laba yang merupakan istilah yang didapat dari "*Income Smoothing*". Menurut Meutia (2004), manajemen laba adalah perilaku manajemen yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan selama tidak melanggar dari prinsip akuntansi guna memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan agar manajer dapat mempercantik kinerjanya. Secara prinsip, tindakan memanipulasi laba ini dapat menurunkan kepercayaan dari pihak eksternal dan dapat menurunkan kualitas laba dari laporan keuangan perusahaan.

Menjelang tahun 2008, dunia keuangan disibukkan oleh adanya krisis ekonomi global yang berasal dari Amerika. Menurut Bank Indonesia (2009), krisis ekonomi global muncul sejak bulan Agustus 2007 yaitu pada saat Bank Perancis BNP Paribas mengumumkan bahwa pihaknya telah membekukan sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan yang memiliki risiko tinggi yang dikenal dengan *subprime mortgage*. Masalah ini menjadi krisis ekonomi global karena kredit perumahan berisiko tinggi tersebut diperdagangkan ke dalam sekuritas dan akhirnya gagal bayar dan berefek ke pasar modal Amerika dan ke para investor yang merugi. Krisis ekonomi global ini juga dirasakan sampai ke Indonesia ditandai dengan

melemahnya nilai IHSG dan melemahnya ekspor akibat lesunya perdagangan dunia sehingga menuntut perusahaan untuk dapat tampil dengan baik agar harga saham tidak jatuh.

Menurut Lin dan Shih (2002), perusahaan akan cenderung untuk melakukan manajemen laba dalam masa krisis agar dapat meningkatkan nilai dari kinerja perusahaan. Selama ini penelitian mengenai kualitas auditor dari KAP BIG 4 (Lawrence, Minuti-Meza, dan Zhang, 2011; Becker, Defond, Jiambalvo, dan Subramanyam, 1998; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; dan DeAngelo, 1981) selalu berada pada masa perekonomian yang stabil sehingga akan bias jika hasil tersebut diterapkan di masa krisis ekonomi. Selain menggunakan ukuran auditor, kualitas audit juga dapat diukur dengan menggunakan lamanya hubungan dari perusahaan dan auditor. Menurut Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan lamanya hubungan antara auditor dan perusahaan.

Dalam penelitian (Lawrence *et al.*, 2011; Becker *et al.*, 1998; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; dan DeAngelo, 1981) menemukan bahwa auditor besar akan mempunyai kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor kecil. Berbeda dengan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas audit yang diukur oleh ukuran auditor dengan *discretionary accruals*. Sementara itu, Widiastuty dan Febrianto (2003) menyebutkan fakta tentang jatuhnya Arthur Andersen merupakan bukti bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa kualitas audit dari auditor besar lebih baik dibanding auditor kecil. Untuk itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian atas perbedaan antara temuan dalam penelitian terdahulu dengan fakta. Menurut Krishnan dan Visvanathan (2007), tingkat manajemen laba dari perusahaan yang diaudit oleh Arthur Anderson adalah setara dengan KPMG sedangkan Deloitte adalah yang terburuk dalam tingkat manajemen laba.

Penelitian ini menguji kembali penelitian dari Lawrence, Minuti-Meza, dan Zhang (2011). Peneliti membedakan penelitian sebelumnya dengan mengambil sebagian dari pengujian yaitu tentang pengaruh BIG 4 terhadap *discretionary accruals*. Selain itu penelitian ini juga membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan merubah variabel CURR yang merupakan variabel kontrol untuk risiko keuangan menjadi CFO (*cash flow operation*) karena risiko keuangan sudah diwakili oleh LEV (*leverage*) mengikuti penelitian Siagian dan Tresnaningsih (2011). Hal yang membedakan lainnya adalah menambah variabel independen TENURE (lama hubungan auditor dan perusahaan) mengikuti penelitian dari dan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran auditor dan lamanya hubungan auditor dengan perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba dari perusahaan (*client*) pada masa krisis ekonomi global.

Akhirnya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang dampak kualitas audit yang diukur dengan ukuran auditor dan lama hubungan kerja sama terhadap kualitas laba. Pada bagian 2 peneliti membahas literatur terdahulu dan pembangunan hipotesis; bagian 3 menyajikan data, sampel, dan pengukuran variabel; bagian 4 menganalisis hasil; dan diakhiri bagian 5 dengan kesimpulan.

## 2. LITERATUR TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Literatur Terdahulu

#### 2.1.1. Kualitas Laba

Kualitas laba dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi dalam penelitian, salah satu metode yang paling populer adalah dengan menggunakan *discretionary accruals*. Menurut Stubben (2010), *discretionary accruals* adalah perbedaan antara perubahan *accrual* aktual dengan prediksi *accrual* yang diprediksikan. Menurut Sloan (1996), kualitas laba yang

diukur dengan *discretionary accruals* dengan menggunakan model Jones dan modifikasi dari model Jones merupakan persamaan *discretionary accruals* paling tepat.

Kothari, Leone, dan Wasley (2005) melakukan penelitian terhadap kualitas laba dengan memproksikannya ke dalam *absolute discretionary accruals* (ADA) untuk menguji *earnings management* dan efisiensi pasar. Dalam penelitiannya, Kothari *et al.* (2005) menggunakan model Jones yang juga dipakai oleh Dechow *et al.* (1995) dan kemudian memodifikasinya agar dapat terhindar dari *misspecified*. Model Jones merupakan model yang paling populer digunakan untuk mengestimasi tingkat *discretionary accruals*. Kothari *et al.* (2005) menyarankan dalam penelitian *earnings management* dengan menggunakan *absolute discretionary accruals* dilakukan dengan hati-hati. Kothari *et al.* (2005) menemukan bahwa pengukuran akrual dapat menunjukkan tingkat *discretionary accruals*.

### 2.1.2. Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan klien, dan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981; Herusetya, Rossieta, dan Veronica, 2012).

Kualitas audit merupakan hal yang sulit untuk dilakukan observasi, maka dalam penelitian mengenai kualitas audit lebih banyak menggunakan ukuran dari auditor sebagai proksi dari kualitas audit (Lawrence *et al.*, 2011; Becker *et al.*, 1998; dan Siagian dan Tresnaningsih, 2011; Francis, Maydew, dan Sparks, 1999). Dalam dunia keuangan terdapat dua tipe ukuran auditor yang sering digunakan, yaitu auditor BIG 4 dan non BIG 4. Auditor BIG 4 adalah auditor yang sudah memiliki nama besar, memiliki pendapatan terbesar, dan memiliki jaringan yang meliputi berbagai negara sedangkan non BIG 4 sebaliknya.

Lawrence *et al.* (2011); Becker *et al.* (1998); Siagian dan Tresnaningsih (2011); dan DeAngelo (1981) menemukan bahwa auditor besar lebih baik daripada auditor kecil. Berbeda dengan temuan empiris Kabir, Sharma, Islam, dan Salat (2011); dan Al-Thuneibat, Al Issa,



dan Baker (2011) yang menemukan bahwa BIG 4 tidak lebih baik dari non BIG 4. Krishnan dan Visvanathan (2007) mengenai tingkat manajemen laba dari Arthur Anderson yang tidak lebih buruk dari Delloite dan KPMG.

Kualitas audit juga dapat diukur dengan menggunakan lama hubungan auditor dan perusahaan. Penelitian yang menggunakan lama hubungan sebagai proksi kualitas audit antara lain Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011); Meutia (2004); Allen dan Woodland (2010). Lama hubungan antara auditor dengan perusahaan dapat menunjukkan seberapa tingkat kedekatan dari auditor dan perusahaan. Hal ini akan memicu adanya konspirasi manajemen laba terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh auditor.

Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) juga menemukan hubungan positif signifikan antara lama hubungan perusahaan dengan auditor terhadap *discretionary accruals*. Temuan tersebut dapat diartikan bahwa semakin lama hubungan kerjasama perusahaan dengan auditornya maka manajemen laba semakin tinggi dan kualitas laba akan semakin rendah.

Meutia (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang diukur dengan menggunakan lama perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals*. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama yang semakin lama maka akan meningkatkan *discretionary accruals* dan akan menurunkan kualitas laba.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1. Pengaruh Ukuran Auditor Terhadap Kualitas Laba

Penelitian terdahulu (Lawrence *et al.*, 2011; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; Becker *et al.*, 1998; Sun dan Liu, 2011) telah menguji dan menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor besar mempunyai kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan yang menggunakan jasa selain Big 4. Dari beberapa penelitian terdahulu (Lawrence *et al.*, 2011; Siagian dan Tresnaningsih, 2011) menemukan bahwa perusahaan



yang diaudit oleh Big 4 dapat menurunkan manajemen laba (*discretionary accruals*) sehingga kualitas laba menjadi meningkat.

Dengan adanya ukuran audit besar maka dapat mengurangi perilaku manajemen dalam memanipulasi laba sehingga kualitas laba akan meningkat dan informasi dari laporan keuangan dapat menunjukkan situasi yang mendekati kebenaran. Peneliti memperkirakan bahwa kualitas dari sistem pelaporan keuangan yang menggunakan jasa audit Big 4 akan meningkat dan tingkat manajemen laba akan menurun. Peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>:** Perusahaan yang diaudit oleh auditor Big 4 berpengaruh negatif terhadap *absolute discretionary accruals*.

### **2.2.2. Pengaruh Lama Hubungan Auditor dengan Perusahaan Terhadap Kualitas Laba**

Penelitian terdahulu (Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker, 2011; Meutia, 2004; Chi dan Huang, 2004) telah menguji dan menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara lama hubungan antara auditor dengan perusahaan terhadap *absolute discretionary accruals*.

Dengan adanya lama hubungan antara auditor dengan perusahaan maka dapat mengurangi independensi auditor dalam menekan manajemen dari memanipulasi laba sehingga kualitas laba akan menurun dan informasi dari laporan keuangan tidak dapat menunjukkan situasi yang mendekati kebenaran. Peneliti memperkirakan bahwa kualitas dari sistem pelaporan keuangan yang menggunakan jasa audit semakin lama akan meningkatkan manajemen laba dan kualitas laba akan menurun. Peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>:** Perusahaan yang menjalin hubungan kerjasama yang semakin lama, akan meningkatkan *absolute discretionary accruals*.

### 3. DATA, SAMPEL, DAN PENGUKURAN VARIABEL

#### 3.1. Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yaitu dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang dipilih adalah laporan keuangan tahun 2008 karena pada tahun tersebut sedang terjadi krisis ekonomi global. Sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut.

1. perusahaan berada pada sektor kimia, aneka industri, dan barang konsumsi,
2. perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir 31 Desember,
3. laporan keuangan tersedia untuk tahun 2004-2008,
4. dalam laporan keuangan perusahaan mencantumkan laporan auditor independen, dan
5. perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah.

#### 3.2. Pengukuran Variabel

Peneliti menggunakan ukuran *absolute discretionary accruals* sebagai proksi kualitas laba mengikuti Lawrence *et al.* (2011) yang menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Kothari *et al.* (2005). Model persamaan yang dipakai yaitu:

$$\frac{TACC_{it}}{ASSETS_{it-1}} = \beta_0 + \beta_1 \left( \frac{1}{ASSETS_{it-1}} \right) + \beta_2 \frac{(\Delta SALES_{it} - \Delta REC_{it})}{ASSETS_{it-1}} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{ASSETS_{it-1}} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$TACC_{it}$  : laba bersih sebelum adanya item pos luar biasa<sub>t</sub> dikurangi dengan arus kas operasi perusahaan<sub>t</sub>,

$\Delta SALES$  : perubahan penjualan dari tahun<sub>t-1</sub> ke penjualan tahun<sub>t</sub>,

$\Delta REC$  : perubahan dari piutang tahun<sub>t-1</sub> ke piutang tahun<sub>t</sub>, dan

$PPE$  : aset tetap periode<sub>t</sub>.

Semua variabel baik dependen maupun independen dari persamaan (1) diskalakan dengan total aset periode lalu atau  $ASSETS_{t-1}$ . Untuk mendapatkan nilai *absolute discretionary accruals* (ADA), dari regresi persamaan (1) dicari residualnya dan kemudian residual tersebut diabsolutkan.

Peneliti selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan persamaan yang juga dipakai oleh Lawrence *et al.* (2011) dengan memodifikasi beberapa variabel, yaitu: merubah variabel CURR yang merupakan variabel kontrol untuk risiko keuangan menjadi CFO (*cash flow operation*) karena risiko keuangan sudah diwakili oleh LEV (*leverage*) mengikuti penelitian Siagian dan Tresnaningsih (2011); menambah variabel independen TENURE (lama hubungan auditor dan perusahaan) mengikuti penelitian dari dan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011); dan mengganti LOGMKT dari model Lawrence *et al.* (2011) dengan ukuran perusahaan (SIZE) karena memiliki fungsi yang sama yaitu mengukur perusahaan.

Dari hasil modifikasi diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$ADA_{it} = \beta_0 + \beta_1 BIG4_{it} + \beta_2 TENURE_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it-1} + \beta_5 LEV_{it-1} + \beta_6 CFO_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

ADA : nilai absolut dari residual persamaan (1),

BIG4 : variabel dummy, 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor  
BIG 4 dan 0 jika perusahaan diaudit oleh lainnya,

TENURE : jumlah tahun dari lama hubungan perusahaan dengan  
auditor independen sampai tahun t,

SIZE : log natural dari total aset<sub>t</sub>,

ROA : laba bersih sebelum pos luar biasa<sub>t-1</sub> dibagi dengan aset<sub>t-1</sub>,

LEV : total utang<sub>t-1</sub> dibagi dengan aset<sub>t-1</sub>, dan

CFO : arus kas operasi<sub>t</sub> dibagi dengan total aset<sub>t-1</sub>.

## 4. HASIL

### 4.1. Statistik Deskriptif

#### 4.1.1. Hasil Pemilihan Sampel dan Penggunaan Data

Sesuai dengan kriteria yang dipilih oleh penulis yakni perusahaan yang berada pada sektor kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. Sektor tersebut dipilih karena memiliki struktur laporan keuangan yang hampir sama. Kriteria lainnya yaitu perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir 31 Desember, laporan keuangan tersedia untuk tahun 2004-2008, dalam laporan keuangan perusahaan mencantumkan laporan auditor independen, dan perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah. Secara ringkas dapat ditampilkan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Pemilihan Sampel**

TOTAL PERUSAHAAN	430
PERUSAHAAN BEDA SEKTOR	298
	132
LAPORAN KEUANGAN TIDAK TERSEDIA	15
	117
TIDAK TERDAPAT OPINI AUDITOR INDEPENDEN	12
	105
MENGGUNAKAN MATA UANG SELAIN RUPIAH	10
	95
OUTLIER	3
TOTAL OBSERVASI	92

Sumber : data olahan

Dari populasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sampel perusahaan yang berada di sektor kimia, aneka industri, dan sektor barang konsumsi sejumlah 132 perusahaan. Pada rentang tahun 2004-2008 terdapat 15 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau tidak *listing* lagi pada Bursa Efek Indonesia. Selama masa observasi terdapat 12 perusahaan yang tidak mencantumkan opini dari auditor dan 10 perusahaan yang

menggunakan mata uang selain Rupiah pada laporan keuangan tahunan. Dalam proses penormalan data terdapat 3 sampel yang *outlier*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 92 perusahaan.

#### 4.1.2. Besaran Angka Variabel Penelitian

Rata-rata ADA pada perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 adalah 0,084 dan median adalah 0,067. Sedangkan pada non BIG 4 memiliki rata-rata 0,098 dan median 0,067. Selisih dari rata-rata antara BIG 4 dan non BIG 4 adalah -0,013 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata manajemen laba dari perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 pada masa krisis ekonomi global adalah lebih rendah daripada KAP non BIG 4 sedangkan nilai median adalah sama.

**Tabel 4.2**

#### Statistik Deskriptif

	<b>Semua Observasi</b>	<b>BIG4</b>	<b>NON BIG4</b>	<b>Perbedaan</b>
	Mean	Mean	Mean	Mean
	Median	Median	Median	Median
	Std Deviasi	Std Deviasi	Std Deviasi	
ADA	0.092	0.084	0.098	-0.013
	0.067	0.067	0.067	0.000
	0.082	0.065	0.093	
TENURE	3.478	4.175	2.942	1.233
	4.000	5.000	3.000	2.000
	1.471	1.217	1.434	
SIZE	13.775	14.581	13.155	1.427
	13.693	14.545	13.261	1.284
	1.456	1.492	1.084	
ROA	0.034	0.065	0.011	0.054
	0.030	0.046	0.022	0.024
	0.125	0.097	0.138	
LEV	0.574	0.516	0.618	-0.103
	0.552	0.542	0.558	-0.016
	0.470	0.244	0.587	
CFO	0.068	0.144	0.010	0.134
	0.051	0.108	0.004	0.104
	0.149	0.160	0.111	
No. Obs	92	40	52	
Persentase	100	43.48	56.52	

Sumber : data olahan

Rata-rata TENURE pada perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 adalah 4,175 dan median adalah 5,000. Sedangkan pada non BIG 4 memiliki rata-rata 2,942 dan median 3,000. Selisih dari rata-rata antara BIG 4 dan non BIG 4 adalah 1,233 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama hubungan (TENURE) dari perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 pada masa krisis ekonomi global adalah lebih tinggi daripada KAP non BIG 4. Selisih dari median antara perusahaan BIG 4 dengan non BIG 4 adalah 2,000. Hal ini berarti secara nilai tengah lama hubungan dari perusahaan yang diaudit oleh BIG 4 adalah lebih lama dari non BIG 4.

#### 4.2. Pengujian Hipotesis

**Tabel 4.3**

**Hasil Regresi Ordinary Least Square Dengan Variabel Dependen Absolute**

**Discretionary Accruals**

$$ADA_{it} = \beta_0 + \beta_1 BIG4_{it} + \beta_2 TENURE_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it-1} + \beta_5 LEV_{it-1} + \beta_6 CFO_{it} + \varepsilon_{it}$$

		Koefisien	
	Prediksi	t-statistic	p-value
(Constant)		0.653	0.000
		5.344	
Big4	-	0.005	0.859
		0.178	
Tenure	+	0.017	0.048
		2.007	
Size	-	-0.036	0.000
		-3.994	
Roa	-	-0.355	0.002
		-3.244	
Lev	+	0.089	0.001
		3.451	
Cfo	-	0.296	0.003
		3.055	

No. Obs	92	
F	7.715	0.000
Adjusted R <sup>2</sup>	0.307	

Sumber : data olahan

Sebelum pengujian hipotesis ini, peneliti telah menguji normalitas data dan menguji model agar terbebas dari kebiasaan hasil. Dari Tabel 4.3, hasil uji Fisher menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 7,715 dengan signifikansi 0.000 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) menunjukkan nilai 0,307. Nilai ini menunjukkan bahwa 30,7 % dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sedangkan sisanya 69,3 % dijelaskan oleh faktor lainnya.

#### 4.2.1. Pengujian Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)

Hasil uji t dari variabel independen BIG4 tidak menunjukkan adanya hubungan antara ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals* yaitu dengan *p-value* 0,859. Hasil ini berbeda dengan temuan dari DeAngelo (1981), Francis *et al.* (1999); Becker *et al.* (1998), Lawrence *et al.* (2011), dan Siagian dan Tresnaningsih (2011) yang menemukan hubungan negatif signifikan pada kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*.

Hasil ini mendukung temuan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang tidak menemukan pengaruh signifikan ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*. Hasil ini dipengaruhi pengambilan data sampel yang berada di masa krisis ekonomi global sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, menurut Krishnan dan Visvanathan (2007), Delloite dan KPMG pun tidak lebih baik dari Arthur Anderson yang telah tumbang terlebih dahulu karena kegagalan audit terhadap manajemen laba perusahaan Enron.

Dari hasil pengujian  $H_1$  dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba karena tidak dapat memenuhi syarat signifikan pada tingkat 5% sehingga menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ .

#### 4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 ( $H_2$ )

Hasil uji t dari variabel independen TENURE menunjukkan hubungan positif dengan signifikansi 0,048. Hasil ini mendukung temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang menemukan hubungan positif signifikan pada kualitas audit yang diukur dengan menggunakan lama hubungan auditor dengan perusahaan terhadap *absolute discretionary accruals*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  dapat diterima sehingga kualitas audit lebih tepat diukur dengan menggunakan lama hubungan antara auditor dengan perusahaan daripada ukuran auditor.

Dari hasil pengujian regresi dapat diartikan bahwa semakin lama perusahaan menjalin hubungan kerjasama dengan auditor maka akan menurunkan independensi dari auditor dan manajemen laba semakin tinggi sehingga kualitas laba akan menurun.

### 5. PENUTUP

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit yang diukur dengan ukuran auditor dan lama hubungan kerjasama terhadap kualitas laba.

Hasil dari analisis  $H_1$  menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini dipengaruhi oleh kecenderungan auditor BIG 4 yang berada di Indonesia memiliki masa hubungan kerjasama yang relatif lebih lama daripada auditor non BIG 4, selain itu juga dipengaruhi oleh pengambilan sampel yang berada pada masa krisis ekonomi global. Temuan ini mendukung



temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang tidak menemukan hubungan antara ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*.

Hasil dari analisis H<sub>2</sub> menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama yang lebih lama dengan auditornya akan mengurangi tingkat independensi dari auditor sehingga manajemen laba tidak mampu ditekan dan kualitas laba akan menurun. Temuan ini mendukung temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011), Chi dan Huang (2004), dan Meutia (2004).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian hanya dilakukan pada masa krisis ekonomi global, sehingga akan bias jika hasil penelitian diterapkan pada masa ekonomi yang stabil. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan sektor kimia, aneka industri, dan sektor barang konsumsi sehingga tidak dapat digeneralisasi ke sektor selain ketiga sektor tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas ke sektor lain agar hasil temuan dapat digeneralisasi ke semua sektor. Selain itu dapat menambah spesifikasi kualitas audit dengan menggunakan intensitas bertemu untuk berunding antara klien dan auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thuneibat, A. A.; R. T. I. Al Issa; dan R. A. A. Baker. 2011. Do audit tenure and firm size contribute to audit quality?: empirical evidence from Jordan. *Managerial Auditing Journal*, 26, (4), hlm. 317-334.
- Allen, A., dan A. Woodland. 2010. Education requirements, audit fees, and audit quality. *Auditing*, 29, (2), hlm. 1-25.
- Bank Indonesia. 2009. *Outlook ekonomi Indonesia 2009 - 2014*, Edisi Januari.
- Becker, C. L.; M.L. Defond; J. Jiambalvo; dan K. R. Subramanyam. 1998. The effect of audit quality on earnings management. *Contemporary Accounting Research*, 15, (1), hlm. 1-24.
- Chi, W., dan H. Huang. 2004. Discretionary accruals, audit-firm tenure and audit-partner tenure: empirical evidence from Taiwan. *working paper*, National Chengchi University, Taipei.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size dan auditor quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3, hlm. 183-199.
- Dechow, P. M.; R. G. Sloan; dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70, hlm. 193-225.
- Dechow, P. M., dan I. D. Dichev. 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. *The Accounting Review*, 77, Supplement, hlm. 35-59.
- Francis, J. R.; E. L. Maydew; dan H. C. Sparks. 1999. The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. *Auditing*, 18, (2), hlm. 17.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herusetya, A.; H. Rossieta; dan S. Veronica. 2012. Analisis kualitas audit terhadap manajemen laba akuntansi studi pendekatan composite measure versus conventional measure.  
<http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/093-SIPE-03.pdf>. diakses pada 1 Februari 2013.
- Kothari, S. P.; A. J. Leone; dan C. E. Wasley. 2005. Performance matched discretionary accruals measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39, (1), hlm. 163-197.
- Krishnan, G. V., dan G. Visvanathan. 2007. Was Arthur Andersen different? further evidence on earnings management by clients of Arthur Andersen International. *Journal of Disclosure and Governance*, 5, (1), hlm. 36-47.
- Lawrence, A.; M. Minuti-Meza; dan P. Zhang. 2011. Can Big 4 versus Non Big 4 differences in audit-quality proxies be attributed to client characteristics?. *The Accounting Review*, 86, (1), hlm. 259-286.

- Lin, Z. X., dan M. S. H. Shih. 2002. Earnings management in economic downturns and adjacent periods: evidence from the 1990-1991 recession. Disampaikan dalam workshop National University of Singapore. <http://ssrn.com/abstract=331400>. Diakses pada 19 Desember 2012.
- Meutia, I. 2004. Pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba untuk KAP Big 5 dan non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 7, (3), hlm. 333-350.
- Siagian, F. T., dan E. Tresnaningsih. 2011. The impact of independent directors and independent audit committees on earnings quality reported by Indonesian firms. *Asian Review of Accounting*, 19, (3), hlm. 193-207.
- Sloan, R. G. 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?. *The Accounting Review*, 71, (3), hlm. 289-315.
- Stubben, S. R. 2010. Discretionary revenues as a measure of earnings management. *The Accounting Review*, 85, (2), hlm. 695-717.
- Sun, J., dan G. Liu. 2011. Client-specific litigation risk and audit quality differentiation. *Managerial Auditing Journal*, 26, (4), hlm. 300 – 316.
- Widiastuty, E., dan R. Febrianto. 2003. Pengukuran kualitas audit: sebuah esai. <http://go.to.web.id/bali/downloads/jurnal/jurnal-akuntansi-dan-bisnis/PENGUKURAN-KUALITAS-AUDIT-SEBUAH-ESAI/rahmatfebriantofin.pdf?attredirects=0&d=1>. diakses pada 9 Juni 2012.
- Widjaja, F. P., dan R. E. Maghviroh. 2011. Analisis perbedaan kualitas laba dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya komite pada bank-bank go public di Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 1, (2), hlm. 117 – 134.

# Apakah Kualitas Audit Berpengaruh terhadap Kualitas Laba dalam Masa Krisis Ekonomi Global? (Studi Kasus terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Andri Sri Wibowo\*  
Bandi  
Universitas Sebelas Maret

**Abstract:** *This study aims to find empirical evidence on the effect of audit quality on earnings quality corporate financial statement in Indonesia. This study uses secondary data with the observation during the period 2004 to 2008. The population used in this study includes companies that are in the chemical sector, various industries, and consumer goods that have been listed on the Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method, 92 samples obtained.*

*Proxies of the dependent variable, the earnings quality, is Absolute Discretionary Accruals that have been used by Kothari et al. (2005). Audit Quality is proxied by the size of the auditor (BIG4) and Old Relationships (TENURE). We use regression model to test hypothesis.*

*The results of the test show that there is no significant effect between the size of the auditors on the quality of corporate earnings. From the test results also show that there is a significant effect of the long-standing relationship with the company's earnings quality. This implies that using of a long working relationship between the auditor and the client company as a proxy for audit quality during the economic crisis, is more relevant than using auditor size.*

**Keyword** : *audit quality, auditor size, length of relationship, quality of earnings, discretionary accruals.*

---

\* Corresponding author: andraexs@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam perusahaan *go public* merupakan kewajiban dari manajemen untuk menyajikan keadaan keuangan perusahaan ke dalam sebuah laporan sesuai standar yang berterima umum. Dalam laporan keuangan, terdapat beberapa komponen yang salah satunya adalah komponen laba yang merupakan poin yang menarik bagi investor. Menurut Widjaja dan Maghviroh (2011), kualitas laba merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Jika laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka akan menimbulkan kesalahan persepsi bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Dalam dunia akuntansi, terdapat istilah manajemen laba yang merupakan istilah yang didapat dari "*Income Smoothing*". Menurut Meutia (2004), manajemen laba adalah perilaku manajemen yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan selama tidak melanggar dari prinsip akuntansi guna memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan agar manajer dapat mempercantik kinerjanya. Secara prinsip, tindakan memanipulasi laba ini dapat menurunkan kepercayaan dari pihak eksternal dan dapat menurunkan kualitas laba dari laporan keuangan perusahaan.

Menjelang tahun 2008, dunia keuangan disibukkan oleh adanya krisis ekonomi global yang berasal dari Amerika. Menurut Bank Indonesia (2009), krisis ekonomi global muncul sejak bulan Agustus 2007 yaitu pada saat Bank Perancis BNP Paribas mengumumkan bahwa pihaknya telah membekukan sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan yang memiliki risiko tinggi yang dikenal dengan *subprime mortgage*. Masalah ini menjadi krisis ekonomi global karena kredit perumahan berisiko tinggi tersebut diperdagangkan ke dalam sekuritas dan akhirnya gagal bayar dan berefek ke pasar modal Amerika dan ke para investor yang merugi. Krisis ekonomi global ini juga dirasakan sampai ke Indonesia ditandai dengan

melemahnya nilai IHSG dan melemahnya ekspor akibat lesunya perdagangan dunia sehingga menuntut perusahaan untuk dapat tampil dengan baik agar harga saham tidak jatuh.

Menurut Lin dan Shih (2002), perusahaan akan cenderung untuk melakukan manajemen laba dalam masa krisis agar dapat meningkatkan nilai dari kinerja perusahaan. Selama ini penelitian mengenai kualitas auditor dari KAP BIG 4 (Lawrence, Minuti-Meza, dan Zhang, 2011; Becker, Defond, Jiambalvo, dan Subramanyam, 1998; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; dan DeAngelo, 1981) selalu berada pada masa perekonomian yang stabil sehingga akan bias jika hasil tersebut diterapkan di masa krisis ekonomi. Selain menggunakan ukuran auditor, kualitas audit juga dapat diukur dengan menggunakan lamanya hubungan dari perusahaan dan auditor. Menurut Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan lamanya hubungan antara auditor dan perusahaan.

Dalam penelitian (Lawrence *et al.*, 2011; Becker *et al.*, 1998; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; dan DeAngelo, 1981) menemukan bahwa auditor besar akan mempunyai kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor kecil. Berbeda dengan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas audit yang diukur oleh ukuran auditor dengan *discretionary accruals*. Sementara itu, Widiastuty dan Febrianto (2003) menyebutkan fakta tentang jatuhnya Arthur Andersen merupakan bukti bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa kualitas audit dari auditor besar lebih baik dibanding auditor kecil. Untuk itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian atas perbedaan antara temuan dalam penelitian terdahulu dengan fakta. Menurut Krishnan dan Visvanathan (2007), tingkat manajemen laba dari perusahaan yang diaudit oleh Arthur Anderson adalah setara dengan KPMG sedangkan Deloitte adalah yang terburuk dalam tingkat manajemen laba.

Penelitian ini menguji kembali penelitian dari Lawrence, Minuti-Meza, dan Zhang (2011). Peneliti membedakan penelitian sebelumnya dengan mengambil sebagian dari pengujian yaitu tentang pengaruh BIG 4 terhadap *discretionary accruals*. Selain itu penelitian ini juga membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan merubah variabel CURR yang merupakan variabel kontrol untuk risiko keuangan menjadi CFO (*cash flow operation*) karena risiko keuangan sudah diwakili oleh LEV (*leverage*) mengikuti penelitian Siagian dan Tresnaningsih (2011). Hal yang membedakan lainnya adalah menambah variabel independen TENURE (lama hubungan auditor dan perusahaan) mengikuti penelitian dari dan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran auditor dan lamanya hubungan auditor dengan perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba dari perusahaan (*client*) pada masa krisis ekonomi global.

Akhirnya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang dampak kualitas audit yang diukur dengan ukuran auditor dan lama hubungan kerja sama terhadap kualitas laba. Pada bagian 2 peneliti membahas literatur terdahulu dan pembangunan hipotesis; bagian 3 menyajikan data, sampel, dan pengukuran variabel; bagian 4 menganalisis hasil; dan diakhiri bagian 5 dengan kesimpulan.

## 2. LITERATUR TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Literatur Terdahulu

#### 2.1.1. Kualitas Laba

Kualitas laba dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi dalam penelitian, salah satu metode yang paling populer adalah dengan menggunakan *discretionary accruals*. Menurut Stubben (2010), *discretionary accruals* adalah perbedaan antara perubahan *accrual* aktual dengan prediksi *accrual* yang diprediksikan. Menurut Sloan (1996), kualitas laba yang

diukur dengan *discretionary accruals* dengan menggunakan model Jones dan modifikasi dari model Jones merupakan persamaan *discretionary accruals* paling tepat.

Kothari, Leone, dan Wasley (2005) melakukan penelitian terhadap kualitas laba dengan memproksikannya ke dalam *absolute discretionary accruals* (ADA) untuk menguji *earnings management* dan efisiensi pasar. Dalam penelitiannya, Kothari *et al.* (2005) menggunakan model Jones yang juga dipakai oleh Dechow *et al.* (1995) dan kemudian memodifikasinya agar dapat terhindar dari *misspecified*. Model Jones merupakan model yang paling populer digunakan untuk mengestimasi tingkat *discretionary accruals*. Kothari *et al.* (2005) menyarankan dalam penelitian *earnings management* dengan menggunakan *absolute discretionary accruals* dilakukan dengan hati-hati. Kothari *et al.* (2005) menemukan bahwa pengukuran akrual dapat menunjukkan tingkat *discretionary accruals*.

### 2.1.2. Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan klien, dan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981; Herusetya, Rossieta, dan Veronica, 2012).

Kualitas audit merupakan hal yang sulit untuk dilakukan observasi, maka dalam penelitian mengenai kualitas audit lebih banyak menggunakan ukuran dari auditor sebagai proksi dari kualitas audit (Lawrence *et al.*, 2011; Becker *et al.*, 1998; dan Siagian dan Tresnaningsih, 2011; Francis, Maydew, dan Sparks, 1999). Dalam dunia keuangan terdapat dua tipe ukuran auditor yang sering digunakan, yaitu auditor BIG 4 dan non BIG 4. Auditor BIG 4 adalah auditor yang sudah memiliki nama besar, memiliki pendapatan terbesar, dan memiliki jaringan yang meliputi berbagai negara sedangkan non BIG 4 sebaliknya.

Lawrence *et al.* (2011); Becker *et al.* (1998); Siagian dan Tresnaningsih (2011); dan DeAngelo (1981) menemukan bahwa auditor besar lebih baik daripada auditor kecil. Berbeda dengan temuan empiris Kabir, Sharma, Islam, dan Salat (2011); dan Al-Thuneibat, Al Issa,



dan Baker (2011) yang menemukan bahwa BIG 4 tidak lebih baik dari non BIG 4. Krishnan dan Visvanathan (2007) mengenai tingkat manajemen laba dari Arthur Anderson yang tidak lebih buruk dari Delloite dan KPMG.

Kualitas audit juga dapat diukur dengan menggunakan lama hubungan auditor dan perusahaan. Penelitian yang menggunakan lama hubungan sebagai proksi kualitas audit antara lain Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011); Meutia (2004); Allen dan Woodland (2010). Lama hubungan antara auditor dengan perusahaan dapat menunjukkan seberapa tingkat kedekatan dari auditor dan perusahaan. Hal ini akan memicu adanya konspirasi manajemen laba terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh auditor.

Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) juga menemukan hubungan positif signifikan antara lama hubungan perusahaan dengan auditor terhadap *discretionary accruals*. Temuan tersebut dapat diartikan bahwa semakin lama hubungan kerjasama perusahaan dengan auditornya maka manajemen laba semakin tinggi dan kualitas laba akan semakin rendah.

Meutia (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang diukur dengan menggunakan lama perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals*. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama yang semakin lama maka akan meningkatkan *discretionary accruals* dan akan menurunkan kualitas laba.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1. Pengaruh Ukuran Auditor Terhadap Kualitas Laba

Penelitian terdahulu (Lawrence *et al.*, 2011; Siagian dan Tresnaningsih, 2011; Becker *et al.*, 1998; Sun dan Liu, 2011) telah menguji dan menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor besar mempunyai kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan yang menggunakan jasa selain Big 4. Dari beberapa penelitian terdahulu (Lawrence *et al.*, 2011; Siagian dan Tresnaningsih, 2011) menemukan bahwa perusahaan

yang diaudit oleh Big 4 dapat menurunkan manajemen laba (*discretionary accruals*) sehingga kualitas laba menjadi meningkat.

Dengan adanya ukuran audit besar maka dapat mengurangi perilaku manajemen dalam memanipulasi laba sehingga kualitas laba akan meningkat dan informasi dari laporan keuangan dapat menunjukkan situasi yang mendekati kebenaran. Peneliti memperkirakan bahwa kualitas dari sistem pelaporan keuangan yang menggunakan jasa audit Big 4 akan meningkat dan tingkat manajemen laba akan menurun. Peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>:** Perusahaan yang diaudit oleh auditor Big 4 berpengaruh negatif terhadap *absolute discretionary accruals*.

### **2.2.2. Pengaruh Lama Hubungan Auditor dengan Perusahaan Terhadap Kualitas Laba**

Penelitian terdahulu (Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker, 2011; Meutia, 2004; Chi dan Huang, 2004) telah menguji dan menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara lama hubungan antara auditor dengan perusahaan terhadap *absolute discretionary accruals*.

Dengan adanya lama hubungan antara auditor dengan perusahaan maka dapat mengurangi independensi auditor dalam menekan manajemen dari memanipulasi laba sehingga kualitas laba akan menurun dan informasi dari laporan keuangan tidak dapat menunjukkan situasi yang mendekati kebenaran. Peneliti memperkirakan bahwa kualitas dari sistem pelaporan keuangan yang menggunakan jasa audit semakin lama akan meningkatkan manajemen laba dan kualitas laba akan menurun. Peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>:** Perusahaan yang menjalin hubungan kerjasama yang semakin lama, akan meningkatkan *absolute discretionary accruals*.

### 3. DATA, SAMPEL, DAN PENGUKURAN VARIABEL

#### 3.1. Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yaitu dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang dipilih adalah laporan keuangan tahun 2008 karena pada tahun tersebut sedang terjadi krisis ekonomi global. Sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut.

1. perusahaan berada pada sektor kimia, aneka industri, dan barang konsumsi,
2. perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir 31 Desember,
3. laporan keuangan tersedia untuk tahun 2004-2008,
4. dalam laporan keuangan perusahaan mencantumkan laporan auditor independen, dan
5. perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah.

#### 3.2. Pengukuran Variabel

Peneliti menggunakan ukuran *absolute discretionary accruals* sebagai proksi kualitas laba mengikuti Lawrence *et al.* (2011) yang menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Kothari *et al.* (2005). Model persamaan yang dipakai yaitu:

$$\frac{TACC_{it}}{ASSETS_{it-1}} = \beta_0 + \beta_1 \left( \frac{1}{ASSETS_{it-1}} \right) + \beta_2 \frac{(\Delta SALES_{it} - \Delta REC_{it})}{ASSETS_{it-1}} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{ASSETS_{it-1}} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$TACC_{it}$  : laba bersih sebelum adanya item pos luar biasa<sub>t</sub> dikurangi dengan arus kas operasi perusahaan<sub>t</sub>,

$\Delta SALES$  : perubahan penjualan dari tahun<sub>t-1</sub> ke penjualan tahun<sub>t</sub>,

$\Delta REC$  : perubahan dari piutang tahun<sub>t-1</sub> ke piutang tahun<sub>t</sub>, dan

$PPE$  : aset tetap periode<sub>t</sub>.

Semua variabel baik dependen maupun independen dari persamaan (1) diskalakan dengan total aset periode lalu atau  $ASSETS_{t-1}$ . Untuk mendapatkan nilai *absolute discretionary accruals* (ADA), dari regresi persamaan (1) dicari residualnya dan kemudian residual tersebut diabsolutkan.

Peneliti selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan persamaan yang juga dipakai oleh Lawrence *et al.* (2011) dengan memodifikasi beberapa variabel, yaitu: merubah variabel CURR yang merupakan variabel kontrol untuk risiko keuangan menjadi CFO (*cash flow operation*) karena risiko keuangan sudah diwakili oleh LEV (*leverage*) mengikuti penelitian Siagian dan Tresnaningsih (2011); menambah variabel independen TENURE (lama hubungan auditor dan perusahaan) mengikuti penelitian dari dan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011); dan mengganti LOGMKT dari model Lawrence *et al.* (2011) dengan ukuran perusahaan (SIZE) karena memiliki fungsi yang sama yaitu mengukur perusahaan.

Dari hasil modifikasi diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$ADA_{it} = \beta_0 + \beta_1 BIG4_{it} + \beta_2 TENURE_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it-1} + \beta_5 LEV_{it-1} + \beta_6 CFO_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

ADA : nilai absolut dari residual persamaan (1),

BIG4 : variabel dummy, 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor  
BIG 4 dan 0 jika perusahaan diaudit oleh lainnya,

TENURE : jumlah tahun dari lama hubungan perusahaan dengan  
auditor independen sampai tahun t,

SIZE : log natural dari total aset<sub>t</sub>,

ROA : laba bersih sebelum pos luar biasa<sub>t-1</sub> dibagi dengan aset<sub>t-1</sub>,

LEV : total utang<sub>t-1</sub> dibagi dengan aset<sub>t-1</sub>, dan

CFO : arus kas operasi<sub>t</sub> dibagi dengan total aset<sub>t-1</sub>.

## 4. HASIL

### 4.1. Statistik Deskriptif

#### 4.1.1. Hasil Pemilihan Sampel dan Penggunaan Data

Sesuai dengan kriteria yang dipilih oleh penulis yakni perusahaan yang berada pada sektor kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. Sektor tersebut dipilih karena memiliki struktur laporan keuangan yang hampir sama. Kriteria lainnya yaitu perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir 31 Desember, laporan keuangan tersedia untuk tahun 2004-2008, dalam laporan keuangan perusahaan mencantumkan laporan auditor independen, dan perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah. Secara ringkas dapat ditampilkan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Pemilihan Sampel**

TOTAL PERUSAHAAN	430
PERUSAHAAN BEDA SEKTOR	298
	132
LAPORAN KEUANGAN TIDAK TERSEDIA	15
	117
TIDAK TERDAPAT OPINI AUDITOR INDEPENDEN	12
	105
MENGGUNAKAN MATA UANG SELAIN RUPIAH	10
	95
OUTLIER	3
TOTAL OBSERVASI	92

Sumber : data olahan

Dari populasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sampel perusahaan yang berada di sektor kimia, aneka industri, dan sektor barang konsumsi sejumlah 132 perusahaan. Pada rentang tahun 2004-2008 terdapat 15 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau tidak *listing* lagi pada Bursa Efek Indonesia. Selama masa observasi terdapat 12 perusahaan yang tidak mencantumkan opini dari auditor dan 10 perusahaan yang

menggunakan mata uang selain Rupiah pada laporan keuangan tahunan. Dalam proses penormalan data terdapat 3 sampel yang *outlier*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 92 perusahaan.

#### 4.1.2. Besaran Angka Variabel Penelitian

Rata-rata ADA pada perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 adalah 0,084 dan median adalah 0,067. Sedangkan pada non BIG 4 memiliki rata-rata 0,098 dan median 0,067. Selisih dari rata-rata antara BIG 4 dan non BIG 4 adalah -0,013 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata manajemen laba dari perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 pada masa krisis ekonomi global adalah lebih rendah daripada KAP non BIG 4 sedangkan nilai median adalah sama.

**Tabel 4.2**

#### Statistik Deskriptif

	<b>Semua Observasi</b>	<b>BIG4</b>	<b>NON BIG4</b>	<b>Perbedaan</b>
	Mean	Mean	Mean	Mean
	Median	Median	Median	Median
	Std Deviasi	Std Deviasi	Std Deviasi	
ADA	0.092	0.084	0.098	-0.013
	0.067	0.067	0.067	0.000
	0.082	0.065	0.093	
TENURE	3.478	4.175	2.942	1.233
	4.000	5.000	3.000	2.000
	1.471	1.217	1.434	
SIZE	13.775	14.581	13.155	1.427
	13.693	14.545	13.261	1.284
	1.456	1.492	1.084	
ROA	0.034	0.065	0.011	0.054
	0.030	0.046	0.022	0.024
	0.125	0.097	0.138	
LEV	0.574	0.516	0.618	-0.103
	0.552	0.542	0.558	-0.016
	0.470	0.244	0.587	
CFO	0.068	0.144	0.010	0.134
	0.051	0.108	0.004	0.104
	0.149	0.160	0.111	
No. Obs	92	40	52	
Persentase	100	43.48	56.52	

Sumber : data olahan

Rata-rata TENURE pada perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 adalah 4,175 dan median adalah 5,000. Sedangkan pada non BIG 4 memiliki rata-rata 2,942 dan median 3,000. Selisih dari rata-rata antara BIG 4 dan non BIG 4 adalah 1,233 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama hubungan (TENURE) dari perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 pada masa krisis ekonomi global adalah lebih tinggi daripada KAP non BIG 4. Selisih dari median antara perusahaan BIG 4 dengan non BIG 4 adalah 2,000. Hal ini berarti secara nilai tengah lama hubungan dari perusahaan yang diaudit oleh BIG 4 adalah lebih lama dari non BIG 4.

#### 4.2. Pengujian Hipotesis

**Tabel 4.3**

**Hasil Regresi Ordinary Least Square Dengan Variabel Dependen Absolute**

**Discretionary Accruals**

$$ADA_{it} = \beta_0 + \beta_1 BIG4_{it} + \beta_2 TENURE_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it-1} + \beta_5 LEV_{it-1} + \beta_6 CFO_{it} + \varepsilon_{it}$$

		Koefisien	
	Prediksi	t-statistic	p-value
(Constant)		0.653	0.000
		5.344	
Big4	-	0.005	0.859
		0.178	
Tenure	+	0.017	0.048
		2.007	
Size	-	-0.036	0.000
		-3.994	
Roa	-	-0.355	0.002
		-3.244	
Lev	+	0.089	0.001
		3.451	
Cfo	-	0.296	0.003
		3.055	

No. Obs	92	
F	7.715	0.000
Adjusted R <sup>2</sup>	0.307	

Sumber : data olahan

Sebelum pengujian hipotesis ini, peneliti telah menguji normalitas data dan menguji model agar terbebas dari kebiasaan hasil. Dari Tabel 4.3, hasil uji Fisher menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 7,715 dengan signifikansi 0.000 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) menunjukkan nilai 0,307. Nilai ini menunjukkan bahwa 30,7 % dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sedangkan sisanya 69,3 % dijelaskan oleh faktor lainnya.

#### 4.2.1. Pengujian Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)

Hasil uji t dari variabel independen BIG4 tidak menunjukkan adanya hubungan antara ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals* yaitu dengan *p-value* 0,859. Hasil ini berbeda dengan temuan dari DeAngelo (1981), Francis *et al.* (1999); Becker *et al.* (1998), Lawrence *et al.* (2011), dan Siagian dan Tresnaningsih (2011) yang menemukan hubungan negatif signifikan pada kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*.

Hasil ini mendukung temuan Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang tidak menemukan pengaruh signifikan ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*. Hasil ini dipengaruhi pengambilan data sampel yang berada di masa krisis ekonomi global sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, menurut Krishnan dan Visvanathan (2007), Delloite dan KPMG pun tidak lebih baik dari Arthur Anderson yang telah tumbang terlebih dahulu karena kegagalan audit terhadap manajemen laba perusahaan Enron.



Dari hasil pengujian  $H_1$  dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba karena tidak dapat memenuhi syarat signifikan pada tingkat 5% sehingga menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ .

#### 4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 ( $H_2$ )

Hasil uji t dari variabel independen TENURE menunjukkan hubungan positif dengan signifikansi 0,048. Hasil ini mendukung temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang menemukan hubungan positif signifikan pada kualitas audit yang diukur dengan menggunakan lama hubungan auditor dengan perusahaan terhadap *absolute discretionary accruals*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  dapat diterima sehingga kualitas audit lebih tepat diukur dengan menggunakan lama hubungan antara auditor dengan perusahaan daripada ukuran auditor.

Dari hasil pengujian regresi dapat diartikan bahwa semakin lama perusahaan menjalin hubungan kerjasama dengan auditor maka akan menurunkan independensi dari auditor dan manajemen laba semakin tinggi sehingga kualitas laba akan menurun.

## 5. PENUTUP

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit yang diukur dengan ukuran auditor dan lama hubungan kerjasama terhadap kualitas laba.

Hasil dari analisis  $H_1$  menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini dipengaruhi oleh kecenderungan auditor BIG 4 yang berada di Indonesia memiliki masa hubungan kerjasama yang relatif lebih lama daripada auditor non BIG 4, selain itu juga dipengaruhi oleh pengambilan sampel yang berada pada masa krisis ekonomi global. Temuan ini mendukung

temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) yang tidak menemukan hubungan antara ukuran auditor terhadap *absolute discretionary accruals*.

Hasil dari analisis H<sub>2</sub> menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama yang lebih lama dengan auditornya akan mengurangi tingkat independensi dari auditor sehingga manajemen laba tidak mampu ditekan dan kualitas laba akan menurun. Temuan ini mendukung temuan dari Al-Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011), Chi dan Huang (2004), dan Meutia (2004).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian hanya dilakukan pada masa krisis ekonomi global, sehingga akan bias jika hasil penelitian diterapkan pada masa ekonomi yang stabil. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan sektor kimia, aneka industri, dan sektor barang konsumsi sehingga tidak dapat digeneralisasi ke sektor selain ketiga sektor tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas ke sektor lain agar hasil temuan dapat digeneralisasi ke semua sektor. Selain itu dapat menambah spesifikasi kualitas audit dengan menggunakan intensitas bertemu untuk berunding antara klien dan auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thuneibat, A. A.; R. T. I. Al Issa; dan R. A. A. Baker. 2011. Do audit tenure and firm size contribute to audit quality?: empirical evidence from Jordan. *Managerial Auditing Journal*, 26, (4), hlm. 317-334.
- Allen, A., dan A. Woodland. 2010. Education requirements, audit fees, and audit quality. *Auditing*, 29, (2), hlm. 1-25.
- Bank Indonesia. 2009. *Outlook ekonomi Indonesia 2009 - 2014*, Edisi Januari.
- Becker, C. L.; M.L. Defond; J. Jiambalvo; dan K. R. Subramanyam. 1998. The effect of audit quality on earnings management. *Contemporary Accounting Research*, 15, (1), hlm. 1-24.
- Chi, W., dan H. Huang. 2004. Discretionary accruals, audit-firm tenure and audit-partner tenure: empirical evidence from Taiwan. *working paper*, National Chengchi University, Taipei.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size dan auditor quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3, hlm. 183-199.
- Dechow, P. M.; R. G. Sloan; dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70, hlm. 193-225.
- Dechow, P. M., dan I. D. Dichev. 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. *The Accounting Review*, 77, Supplement, hlm. 35-59.
- Francis, J. R.; E. L. Maydew; dan H. C. Sparks. 1999. The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. *Auditing*, 18, (2), hlm. 17.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herusetya, A.; H. Rossieta; dan S. Veronica. 2012. Analisis kualitas audit terhadap manajemen laba akuntansi studi pendekatan composite measure versus conventional measure.  
<http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/093-SIPE-03.pdf>. diakses pada 1 Februari 2013.
- Kothari, S. P.; A. J. Leone; dan C. E. Wasley. 2005. Performance matched discretionary accruals measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39, (1), hlm. 163-197.
- Krishnan, G. V., dan G. Visvanathan. 2007. Was Arthur Andersen different? further evidence on earnings management by clients of Arthur Andersen International. *Journal of Disclosure and Governance*, 5, (1), hlm. 36-47.
- Lawrence, A.; M. Minuti-Meza; dan P. Zhang. 2011. Can Big 4 versus Non Big 4 differences in audit-quality proxies be attributed to client characteristics?. *The Accounting Review*, 86, (1), hlm. 259-286.

- Lin, Z. X., dan M. S. H. Shih. 2002. Earnings management in economic downturns and adjacent periods: evidence from the 1990-1991 recession. Disampaikan dalam workshop National University of Singapore. <http://ssrn.com/abstract=331400>. Diakses pada 19 Desember 2012.
- Meutia, I. 2004. Pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba untuk KAP Big 5 dan non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 7, (3), hlm. 333-350.
- Siagian, F. T., dan E. Tresnaningsih. 2011. The impact of independent directors and independent audit committees on earnings quality reported by Indonesian firms. *Asian Review of Accounting*, 19, (3), hlm. 193-207.
- Sloan, R. G. 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?. *The Accounting Review*, 71, (3), hlm. 289-315.
- Stubben, S. R. 2010. Discretionary revenues as a measure of earnings management. *The Accounting Review*, 85, (2), hlm. 695-717.
- Sun, J., dan G. Liu. 2011. Client-specific litigation risk and audit quality differentiation. *Managerial Auditing Journal*, 26, (4), hlm. 300 – 316.
- Widiastuty, E., dan R. Febrianto. 2003. Pengukuran kualitas audit: sebuah esai. <http://go.to.web.id/bali/downloads/jurnal/jurnal-akuntansi-dan-bisnis/PENGUKURAN-KUALITAS-AUDIT-SEBUAH-ESAI/rahmatfebriantofin.pdf?attredirects=0&d=1>. diakses pada 9 Juni 2012.
- Widjaja, F. P., dan R. E. Maghviroh. 2011. Analisis perbedaan kualitas laba dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya komite pada bank-bank go public di Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 1, (2), hlm. 117 – 134.

## Efektifitas Dewan Komisaris, Efektifitas Komite Audit, Kepemilikan Keluarga dan Penerapan Konservatisme Akuntansi di Indonesia

**PRISCILLIA WEKU\***  
Universitas Sam Ratulangi

**Abstract:** *Conservatism is an issue that is still relevant to the current discussed. Accounting practices have long used the concept of conservatism in financial reporting. In addition to conservatism, corporate governance mechanism through the effectiveness of board of commissioners and the effectiveness of the audit committee is also important to mitigate information asymmetry. In addition, as generally encountered in Indonesian firms, family ownership also played a role in the effectiveness of corporate governance mechanisms (board of commissioners). This study aimed to determine the association between board effectiveness, the audit committee as part of the corporate governance and ownership of the family to accounting conservatism. Previous research using the method of measurement of conservatism on an accrual base and market base. This study uses a different measurement of conservatism with previous research, which as done by Khan and Watts using C-score.*

*Hypothesis testing results show that when using the C-score measure of conservatism, none of the major variables are related to conservatism. However, when using other measures of market-based conservatism that is the ratio of book-to-market, the effectiveness of the board of commissioners is quite related to conservatism. Number of measurements conservatism suggests that conservatism is a topic that can be interpreted from various aspects. Impact on this study is the use of C-score measure of conservatism that the results are not significant may be different when using another measure of conservatism. Future research should be use the measures that have not been used in this study, as a comparison. In addition, the use of C-score as noted by Khan and Watts should be done with caution in order to produce estimates as expected.*

**Keyword:** *Conservatism, Effectiveness Board of Commissioners, the Audit Committee, Family Ownership*

---

\* Author can be contacted at: prisweku@gmail.com

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Konservatisme merupakan isu yang masih tetap relevan dibicarakan sampai dengan saat ini. Praktik akuntansi telah lama menggunakan konsep konservatisme dalam pelaporan keuangan. Basu (1997) menginterpretasikan bahwa konservatisme adalah adanya kecenderungan untuk melakukan verifikasi yang lebih tinggi ketika terdapat berita baik dibandingkan dengan berita buruk pada laporan keuangan. Dengan kata lain terdapat asimetri pada pengakuan berita baik dan berita buruk yang tercermin dalam laba (Basu, 1997). Ball & Shivakumar (2005) menunjukkan bahwa tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi berkaitan erat dengan ketepatan waktu pengakuan rugi (*timely loss recognition*). Konservatisme dibutuhkan dalam laporan dan pelaporan akuntansi dinyatakan oleh (Chi dan Wang, 2010) disebabkan karena adanya ketidakpastian yang terjadi pada aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga diperlukan kehati-hatian (*prudence*). Bentuk kehati-hatian ini dilakukan melalui tingkat verifikasi yang lebih tinggi ketika menetapkan aset yang diakui dibandingkan dengan kewajiban (Chi dan Wang, 2010).

*Corporate governance* adalah mekanisme yang digunakan untuk memitigasi konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pihak-pihak lain (Ahmed dan Duellman, 2007). Sistem *governance* merupakan mekanisme alternatif yang dapat digunakan ketika transparansi perusahaan terbatas, bermanfaat untuk mengurangi terjadinya *moral hazard* yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi yang dimiliki manajer dengan pemegang saham (Bushman *et al.*, 2004).

Beberapa penelitian menghubungkan konservatisme dengan mekanisme *corporate governance*. Menurut Watts (2003b) konservatisme diperkirakan dapat membantu terwujudnya *corporate governance* dengan memitigasi masalah agensi yang berhubungan dengan keputusan investasi yang dibuat oleh manajer. Sedangkan temuan Lara *et al.* (2009)

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *governance* yang kuat akan memiliki tingkat konservatisme akuntansi kondisional yang lebih tinggi. Secara spesifik penelitian Lara et al. (2009) mengemukakan bahwa rata-rata perusahaan dengan *governance* yang kuat menggunakan akrual diskresioner untuk memberi informasi kepada investor tentang *bad news* secara lebih tepat waktu.

Salah satu mekanisme *corporate governance* adalah berfungsinya dewan komisaris secara efektif yang diharapkan dapat mengatasi masalah agensi. Penelitian Beekes et al (2004), yang menguji hubungan independensi *board* dengan konservatisme di Inggris menunjukkan adanya hubungan yang positif antara keduanya. Penelitian Ahmed dan Duellman (2007) tentang hubungan karakteristik *board of directors* dan praktek akuntansi yang konservatis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara persentase *inside director* dalam *board* dengan konservatisme dan terdapat hubungan positif antara persentase kepemilikan perusahaan oleh *outside directors* dan praktik konservatisme. Namun demikian, tidak diperoleh hasil yang serupa ketika menggunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian Wardhani (2008) tidak menemukan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan tingkat konservatisme akuntansi perusahaan di Indonesia.

Selain komisaris independen, keberadaan komite audit juga merupakan bagian penting dalam mekanisme *corporate governance*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat asosiasi antara komite audit dan kualitas laba (Klein, 2002; Defond *et al.*, 2005; DeZoort *et al.*, 2002). Komite audit yang memiliki pengalaman di bidang keuangan dan frekuensi pertemuan yang lebih sering, membatasi kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba (Xie et al., 2003). Penelitian Wardhani (2008) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme di Indonesia. Hasil yang serupa diperoleh Krishnan dan Visvanathan (2008) bahwa keahlian akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite audit berasosiasi positif dengan konservatisme.

Seperti halnya di negara-negara berkembang, kepemilikan keluarga masih sangat mendominasi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut Arifin (2003) perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah keluarga memiliki masalah agensi yang lebih kecil karena konflik antara pemilik dan manajer yang menjalankan perusahaan berkurang. Dalam kaitannya dengan efektifitas dewan, Jaggi *et al.* (2009) mengatakan bahwa adanya konsentrasi kepemilikan keluarga akan mempengaruhi hubungan antara independensi komisaris dan manajemen laba.

Berbagai pendekatan digunakan untuk mengukur konservatisme, seperti pengukuran berbasis akrual (Givoly dan Hyan, 2000), pengukuran berbasis pasar (Beaver dan Ryan, 2000), maupun pengukuran berdasarkan *asymmetric timeliness of earnings* (Roychowdhury dan Watts, 2006) digunakan oleh Ahmed dan Duellman (2007), dan Wardhani (2008). Kemudian Khan dan Watts (2009) mengembangkan ukuran konservatisme akuntansi melalui metrik atau skala yang disebut C-score. Pengukuran ini diperkirakan dapat menggambarkan variasi konservatisme baik secara *cross-sectional* maupun secara *time-series*. Semakin tinggi C-score maka semakin konservatif praktik akuntansi. Chi *et al* (2009) yang menggunakan ukuran konservatisme C-score dalam menguji hubungan antara konservatisme dengan *corporate governance* menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang lemah, cenderung lebih konservatif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan yang timbul adalah apakah *corporate governance* yang diproksi dengan berfungsinya dewan komisaris dan komite audit secara efektif berhubungan dengan konservatisme akuntansi untuk mengurangi asimetri informasi dalam konteks di Indonesia. Selain itu, apakah pengaruh kepemilikan keluarga juga dapat memengaruhi konservatisme akuntansi di Indonesia.



Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit dan kepemilikan keluarga dengan konservatisme akuntansi di Indonesia, dan menggunakan *C-score* sebagai pengukur konservatisme.

Penelitian ini melengkapi dan memperluas penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan konservatisme seperti pada penelitian Wardhani (2008) dan penelitian Chi *et al.* (2009). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mekanisme *corporate governance* yang digunakan lebih luas yaitu dengan melihat efektivitas dewan direksi dan efektivitas komite audit serta menambahkan kepemilikan keluarga sebagai variabel yang diperkirakan berhubungan dengan praktik *corporate governance* dan konservatisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan penelitian Wardhani (2008) yang menggunakan pengukuran berbasis akrual dan pengukuran berbasis pasar. Penelitian ini menggunakan pengukuran Khan dan Watts (2009) dalam mengukur konservatisme akuntansi.

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme merupakan salah satu konsep penting yang diklaim telah mempengaruhi praktik akuntansi selama lima ratus tahun (Basu, 1997). Lebih lanjut Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai kecenderungan akuntan untuk mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi ketika mengakui *good news* sebagai laba dibandingkan ketika mengakui *bad news* sebagai rugi. Watts (2003a) menyebutkan bahwa konservatisme adalah perbedaan verifikasi atas pengakuan laba dibanding rugi, dimana semakin besar perbedaan tingkat verifikasi yang dilakukan atas pengakuan laba dibanding rugi maka semakin konservatif.

Konservatisme akan tetap berlangsung karena konservatisme dapat mengurangi timbulnya masalah agensi (Watts, 2003a; Holthausen dan Watts 2001; Beatty, 2008). Konservatisme akuntansi akan berbeda tergantung faktor-faktor seperti, adanya insentif yang berkaitan dengan kontrak utang (Schipper, 2005; Guay dan Verrecchia, 2006; Beatty, 2008) dan kontrak kompensasi, litigasi, pajak, dan peraturan (Watts, 2003a). Givoly et al (2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ekuitas publik akan lebih konservatif dalam pelaporannya ketika risiko litigasi yang dihadapi dan biaya agensi perusahaan semakin besar. Demikian juga LaFond dan Watts (2008) menyatakan bahwa dalam suatu kontrak, konservatisme muncul sebagai alat untuk mengurangi biaya agensi yang berkaitan dengan: (1) asimetri informasi dan rugi antar pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak; (2) ketidakmampuan melakukan verifikasi atas informasi privat yang dimiliki oleh salah satu pihak.

### 2.1.2. *Corporate Governance*

*Corporate governance* memainkan peran penting dalam implementasi konservatisme akuntansi (Lara et al 2009). Ketika transparansi pengelolaan perusahaan terbatas sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang sangat besar, maka diperlukan sistem *corporate governance* untuk mengurangi masalah moral hazard antara manajer dan pemegang saham (Bushman et al., 2004). *Corporate governance* merupakan seperangkat mekanisme untuk memastikan bahwa aset perusahaan digunakan secara efisien, dan untuk menjamin bahwa investasi yang dilakukan oleh pemilik dana di perusahaan memperoleh hasil, serta mencegah manajer atau pihak lain mengambil aset perusahaan yang tidak sepatutnya sehingga merugikan pemangku kepentingan lainnya (Shleifer dan Vishny 1997 dalam Lara et al., 2009).

Terdapat beberapa penelitian terkait konservatisme akuntansi dan *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Beekes et al. (2004) mengindikasikan bahwa

perusahaan yang memiliki komisaris independen akan mengakui *bad news* pada laba secara lebih tepat waktu. Demikian juga penelitian Ahmed dan Duellman (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara persentase kepemilikan *inside directors* pada *board* dengan konservatisme, dan menemukan hubungan positif antara kepemilikan saham oleh *outside director* dengan konservatisme. Penelitian Wardhani (2008) yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik *boards of directors* sebagai bagian dari implementasi praktik *corporate governance* terhadap praktik konservatisme di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak konklusif, dimana keberadaan komite audit berpengaruh positif pada konservatisme dengan menggunakan ukuran akrual. Sedangkan independensi dewan berpengaruh positif terhadap konservatisme dengan menggunakan ukuran *market to book ratio*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada konservatisme dengan menggunakan *market to book ratio*.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji hubungan antara efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit dan kepemilikan keluarga, dan konservatisme akuntansi di Indonesia.

### 2.2.1. Efektivitas Dewan Komisaris

Salah satu bentuk penerapan *corporate governance* adalah adanya komisaris independen dalam dewan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, maupun perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan (Wardhani, 2008). *Boards of directors* yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga cenderung untuk lebih konservatif. Ahmed dan Duellman (2007) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan bahwa *boards of director* yang banyak didominasi oleh pihak internal memiliki insentif monitoring yang lemah, sehingga memberi kesempatan yang lebih besar bagi

manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang kurang konservatif. Penelitian yang dilakukan oleh Xie *et al.* (2003) menunjukkan bahwa keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan berhubungan dengan semakin kecilnya akrual diskresioner saat ini. Demikian juga frekuensi rapat yang dilakukan para anggota dewan berhubungan dengan tingkat akrual diskresioner yang rendah.

Komisaris independen dan keahlian keuangan merupakan bagian dari efektivitas dewan komisaris pada penelitian Hermawan (2009). Selain itu, aktivitas dewan, ukuran dewan, serta keahlian dan kompetensi dewan juga merupakan bagian penilaian efektivitas dewan komisaris (Hermawan, 2009). Penelitian Lara *et al* (2007) yang menghubungkan antara karakteristik dewan dengan konservatisme kondisional di Spanyol menunjukkan hubungan yang positif. Berdasarkan penjelasan di atas, dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

**H1:** *Efektifitas dewan komisaris berhubungan positif terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia*

### 2.2.2. Efektivitas Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (BAPEPAM, 2004). Komite audit merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sering diteliti hubungannya dengan konservatisme (Defond *et al.*, 2005; Klein 2002; DeZoort *et al.*, 2002, Wardhani, 2008). Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia (Wardhani, 2008). Demikian juga keahlian akuntansi yang dimiliki oleh anggota-anggota komite audit akan ditanggapi positif oleh pasar, dan perusahaan-perusahaan dengan *corporate governance* yang kuat cenderung memilih anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi (Defond *et al*, 2005). Perusahaan yang memiliki komite audit yang independen dan juga aktif cenderung lebih sedikit melakukan penyimpangan akuntansi

(Dechow *et al.*, 1996; McMullen dan Raghunandan, 1996; Abbot dan Parker, 2000; Peasnell *et al.*, 2001). Demikian juga komite audit yang memiliki latar belakang keuangan atau korporasi serta frekuensi rapat dewan dan komite audit memperkecil akrual diskresioner perusahaan saat ini (Xie *et al.*, 2003). Penelitian Krishnan dan Visvanathan (2008) juga menunjukkan bahwa keahlian akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite audit berasosiasi positif dengan konservatisme.

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Xie *et al.*, 2003; Klein, 2002; Abbot dan Parker, 2000). Komite audit dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan tiga tanggung jawab yang berkaitan dengan peraturan, seperti: (1) memastikan integritas pelaporan keuangan, (2) mengamati dengan seksama fungsi audit eksternal, dan (3) memonitor proses audit internal (DeZoort *et al.*, 2002; Vera dan Munoz, 2005). Efektivitas komite audit menurut Mohiuddin dan Karbhari (2010) sangat tergantung pada kemampuan serta lingkup tanggung jawab dan peran pengawasan yang didelegasikan oleh dewan. Berdasarkan penjelasan tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

**H2:** *Efektifitas komite audit berhubungan positif dengan konservatisme akuntansi perusahaan di Indonesia*

### 2.2.3. Kepemilikan Keluarga

Seperti halnya di negara-negara berkembang, banyak perusahaan publik di Indonesia masih dimiliki oleh keluarga yang sekaligus menjadi pemegang saham pengendali (Arifin, 2003). Kepemilikan oleh keluarga dalam posisi pengendali dapat menimbulkan ekspropriasi manajemen terhadap pemegang saham minoritas dan dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan untuk menutupi ekpropriasi tersebut. Fan dan Wong (2002) memperlihatkan bahwa dampak *entrenchment* dan dampak informasi yang dimiliki

dihubungkan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi menghasilkan ketidaktransparan perusahaan dan tingkat keinformatifan laba akuntansi yang rendah. Leuz (2003) juga menemukan bahwa pemegang saham pengendali memiliki diskresi atas kebijakan pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan.

Sedangkan di pihak lain, Wang (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga pendiri dengan konsentrasi kepemilikannya yang unik, lebih sedikit melakukan perilaku oportunistik dalam pelaporan laba akuntansi sebab hal tersebut dapat merusak reputasi keluarga, kekayaan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Kurangnya perilaku oportunistik ditunjukkan melalui absolute abnormal akrual yang rendah, *earning response coefficient* yang lebih besar, dan persistensi yang rendah atas komponen rugi transitory dalam laba. Hal ini diperkuat dengan Ali *et al* (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki ERC yang lebih besar, akrual diskresioner yang lebih sedikit, kemampuan prediksi *cash flow* yang lebih besar, dan cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela atas *bad news* melalui peringatan laba.

Kepemilikan keluarga yang besar (tinggi) diperkirakan dapat mempengaruhi keefektifan *corporate governance*. Jaggi *et al.* (2009) menunjukkan bahwa pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri, efektifitas dewan dimoderasi dengan adanya konsentrasi kepemilikan dan adanya anggota keluarga di dalam dewan. Secara spesifik Jaggi *et al.* (2009) menyatakan bahwa efektivitas komite audit dalam memonitor *earnings management* berkurang ketika *board of directors* didominasi oleh anggota keluarga. Siregar dan Utama (2008) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga dapat membantu praktik *corporate governance* karena pemegang saham keluarga dapat mengawasi secara langsung tindakan manajemen.

Berdasarkan penjelasan di atas konservatisme akuntansi pada perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah keluarga (pendiri) dapat dilihat dari dua sisi yang

berbeda, dimana pada satu sisi perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung tidak konservatif karena ingin menutupi ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas, namun di sisi lain menunjukkan konservatisme karena melakukan pengungkapan sukarela atas *bad news*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dibangun adalah:

**H3:** *Kepemilikan keluarga berhubungan dengan konservatisme akuntansi perusahaan di Indonesia*

### 3. Metoda Penelitian

#### 3.1 Sampel dan Data Penelitian

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Proses pemilihan sampel menggunakan metoda *purposive*, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, (2) perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun amatan. (3) perusahaan yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan penelitian ini pada tahun amatan. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan dan informasi pasar modal.

Data laporan keuangan perusahaan tersaji pada *Thomson Reuters Datastream* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara, data yang bersumber dari informasi pasar modal, yaitu return perusahaan tersaji pada *Datastream* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Periode amatan penelitian ini adalah tahun 2010.

#### 3.2 Model Penelitian

Tujuan penelitian adalah menguji hubungan antara konservatisme akuntansi dan efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kepemilikan keluarga. Proses pengujian dilakukan dengan dua urutan tahap berikut ini. Pertama, penelitian ini melakukan pengukuran tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. Pengukuran menggunakan model

*C-score* yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2007). Proses pengukuran berdasarkan pada langkah yang dilakukan oleh Chi *et al.* (2009). Model pengukuran adalah berdasarkan pada persamaan regresi linear berikut:

$$Earn_i = \beta_1 + \beta_2 Neg_i + Ret_i(\mu_1 + \mu_2 Size_i + \mu_3 MTB_i + \mu_4 LEV_i) + Neg_i \times R_i(\lambda_1 + \lambda_2 SIZE_i + \lambda_3 MTB + \lambda_4 LEV_i) + \varepsilon_i \dots\dots\dots(1)$$

Dalam Keterangan:

- Earn<sub>i</sub>* : Laba sebelum pos-pos luarbiasa perusahaan (*i*) yang dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun.
- Neg<sub>i</sub>* : Dummy dengan nilai 1 untuk return negatif, dan 0 untuk yang lainnya.
- Ret<sub>i</sub>* : Return saham tahunan perusahaan (*i*). Dihitung dari return bulanan yang diakumulasikan mulai dari sembilan bulan sebelum tahun fiskal berakhir dan tiga bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- Size<sub>i</sub>* : Ukuran perusahaan (*i*) yang diukur berdasarkan logaritma natural nilai pasar ekuitas.
- MTB<sub>i</sub>* : Rasio perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku ekuitas perusahaan (*i*).
- LEV<sub>i</sub>* : Pengungkit kemampuan melaba perusahaan (*i*). Dihitung dengan utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek dibagi nilai pasar ekuitas awal tahun.
- ε<sub>i</sub>* : nilai error

Model persamaan (1) akan menghasilkan nilai-nilai koefisien  $\lambda$  ( $\lambda_1$ -  $\lambda_4$ ) masing masing perusahaan. Selanjutnya, nilai-nilai koefisien tersebut digunakan untuk menghitung nilai *C-Score* setiap perusahaan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$C\_Score = \lambda_1 + \lambda_2 Size_i + \lambda_3 MTB + \lambda_4 LEV_i \dots\dots\dots(2)$$

Nilai *C-score* yang dihasilkan merupakan tingkat konservatisme perusahaan. Semakin tinggi nilai *C-score* menunjukkan bahwa perusahaan semakin konservatif, dan sebaliknya.

Kedua, penelitian ini melakukan pengujian hubungan antara konservatisme akuntansi dan efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kepemilikan keluarga. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model persamaan regresi linear berikut ini.

$$C\_Score = \beta_0 + \beta_1 BOC + \beta_2 KomAu + \beta_3 KepKel + \beta_4 Age + \beta_5 Volatility + \beta_6 Cycle + \beta_7 KuaAu + \beta_2 KomAu + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Dalam keterangan :



- C-Score* : Tingkat konservatisme dengan ukuran skor tahunan perusahaan (*i*) pada tahun amatan.
- BOC* : Efektifitas dewan komisaris, yang diukur berdasarkan jumlah skor atas pertanyaan-pertanyaan penilaian keefektifan dewan komisaris.
- KomAu* : Efektifitas komite audit, yang diukur berdasarkan jumlah skor atas pertanyaan-pertanyaan penilaian keefektifan komite audit.
- KepKel* : Perusahaan keluarga kepemilikan tinggi diberi nilai 1 dan 0 jika kepemilikan rendah.
- Age* : Lamanya perusahaan berdiri
- Volatility* : Standar deviasi return saham harian perusahaan dalam satu tahun kalender
- Cycle* : Beban penyusutan dibagi dengan total aset tahun sebelumnya
- KuaAu* : Variabel dummy dengan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4, dan 0 jika tidak

Ekpektasi atas koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh model persamaan (3) adalah:  $\beta_1 >$

$0$ ;  $\beta_2 > 0$ ;  $\beta_3 \neq 0$ ;  $\beta_4 < 0$ ;  $\beta_5 > 0$ ;  $\beta_6 > 0$ ; dan  $\beta_7 \neq 0$ .

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Pengukuran efektifitas dewan komisaris, didasarkan pada penelitian Hermawan (2009) yang mengukur independensi, aktivitas, ukuran, keahlian dan kecakapan dewan melalui 17 pertanyaan. Demikian juga dengan penilaian efektifitas komite audit, melalui 11 pertanyaan yang terbagi atas penilaian aktivitas, ukuran, keahlian dan kecakapan anggota komite audit.

Faktor lain yang dipertimbangkan akan mempengaruhi konservatisme adalah adanya kepemilikan keluarga di perusahaan. Definisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian Arifin (2003) yang membagi keluarga dalam empat kategori, yaitu:

1. **Keluarga (1)** adalah keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pension, bank, koperasi dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib tercatat). Definisi keluarga inilah yang dipakai oleh La Porta et al (1999) dan Claessens et al (2000).
2. **Keluarga (2)** adalah keseluruhan individu yang kepemilikannya tercatat. Definisi ini untuk menampung kemungkinan bahwa perusahaan meskipun tidak *go public* tetapi

bukan dimiliki oleh keluarga melainkan oleh perusahaan publik, institusi keuangan, atau negara.

3. **Keluarga (3)** adalah keseluruhan individu dan perusahaan tercatat, kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik. Dikeluarkannya perusahaan asing dalam definisi ini untuk menghindari bahwa perusahaan asing tersebut meskipun tidak *go public* di Indonesia tetapi merupakan perusahaan publik di negara lain.
4. **Keluarga (4)** adalah satu pemilik terbesar di antara individu atau perusahaan tercatat, kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, negara, institusi keuangan dan publik. Definisi ini adalah definisi yang ketat karena memaikai anggapan bahwa individu atau perusahaan local yang memiliki suatu perusahaan tidak terkait hubungan keluarga antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan definisi Arifin (2003) tersebut, maka yang digunakan adalah definisi ketiga bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya atas nama individu dan perusahaan tercatat, kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik. Kepemilikan keluarga diklasifikasi menjadi perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga tinggi ( $>50\%$ ) dan perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga rendah ( $\leq 50\%$ ).

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan pada kriteria yang dinyatakan di dalam metoda penyampelan, maka sampel akhir yang digunakan penelitian ini berjumlah 71 perusahaan. Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dependen dan independen yang membentuk *C-score* tersajikan pada Tabel 4.1.

(Masukkan Tabel 4.1 Disini)

Hasil pada Tabel 4.1. menunjukkan perbedaan yang cukup besar pada variabel *earn*, dengan *mean* 0.189 dan standar deviasi 0.230. Demikian juga pada variabel *market-to-book* menunjukkan varians cukup besar terlihat dari *mean* dan standar deviasi yaitu sebesar 2.441 dan 2.417. Hal inipun ditemui pada variabel *leverage* yang menunjukkan nilai *mean* dan standar deviasi sebesar 1.086. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat jarak yang cukup jauh untuk nilai *market-to-book* dan *leverage* pada sampel perusahaan.

Sementara itu, hasil statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang terkait dengan pengujian hipotesis tersajikan pada Tabel 4.2.

#### (Masukkan Tabel 4.2 Disini)

Hasil pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel *C-score* yang merupakan proksi ukuran konservatisme memiliki nilai *mean* sebesar 0.107 dan *median* sebesar 0.091, serta standar deviasi sebesar 0.062. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat konservatisme masing-masing perusahaan sampel tidak terlalu besar. Demikian juga dengan variabel kepemilikan keluarga dan variabel *cycle* yang merupakan proksi untuk siklus investasi perusahaan. Kedua variabel tersebut secara berturut-turut menghasilkan nilai *mean* (standar deviasi) sebesar 0.338 (0.476) dan 0.048 (0.030) yang tidak terlalu besar.

## 4.2 Analisis Regresi C Score

Hasil regresi untuk memperoleh nilai koefisien *C-score* pada persamaan (1) tersajikan pada Tabel 4.3. berikut ini.

#### (Masukkan Tabel 4.3 Disini)

Hasil pada Tabel 4.3. menunjukkan hasil koefisien untuk semua variabel independen, yaitu Return, Return x *Market-to-Book*, Neg x Return, Neg x Return x MTB dan Neg x Return x *Leverage*. Koefisien-koefisien tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan (2) untuk

menghasilkan nilai *C-score* setiap perusahaan. Semakin tinggi nilai *C-score* berarti perusahaan semakin konservatif.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan pada persamaan regresi (3) tersajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

#### (Masukkan Tabel 4.4 Disini)

Hasil pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu *BOC*, *KomAu*, dan *KepKel*, secara berturut-turun menunjukkan nilai koefisien (nilai *p*) sebesar 0.002 (0.418), -0.004 (0.199), dan 0.012 (0.404). Nilai-nilai koefisien yang dihasilkan menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Variabel *BOC* yang menunjukkan efektifitas dewan komisaris ternyata tidak berhubungan dengan tingkat konservatisme yang diukur dengan *C-score*, meskipun arah sudah sesuai dengan ekspektasi. Demikian juga dengan variabel *KOMAU* yang merupakan proksi dari efektifitas komite audit, tidak signifikan. Hal tersebut berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara efektifitas komite audit dan konservatisme akuntansi perusahaan. Hal yang sama juga untuk kepemilikan keluarga. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa kepemilikan keluarga tidak berhubungan dengan konservatisme akuntansi perusahaan. Dengan demikian, secara keseluruhan hipotesis penelitian ini tidak terdukung.

Untuk variabel kontrol, lamanya perusahaan berdiri berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat konservatisme dengan signifikansi 5%. Namun demikian, arah tidak sesuai dengan ekspektasi. Berdasarkan Khan dan Watts (2007), umur perusahaan akan mempengaruhi konservatisme secara negatif. Atau dengan kata lain, konservatisme akan semakin menurun dengan bertambahnya umur perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang masih lebih muda lebih cenderung memiliki peluang pertumbuhan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua.

Peluang pertumbuhan ini cenderung meningkatkan asimetri informasi antara manajer dan investor oleh karena *cash flow* yang dihasilkan di masa depan biasanya sulit untuk diverifikasi. Oleh karenanya, hal ini akan mengarah ke praktik konservatisme yang lebih tinggi (Khan Watts, 2007). Dugaan atas hasil yang berlawanan ini adalah bahwa perusahaan yang sudah cukup lama masih memiliki kecenderungan untuk bertumbuh sehingga praktek konservatisme pun meningkat. Variabel volatilitas yang merupakan bentuk ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan meningkatkan konservatisme. Hal ini terbukti dengan signifikannya variabel volatilitas terhadap konservatisme.

#### 4.4 Pengujian Tambahan

Hasil pengujian dengan menggunakan *C-score* sebagai pengukur variabel konservatisme menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berhubungan dengan efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, dilakukan pengujian tambahan dengan menggunakan pengukuran konservatisme berbasis pasar, yaitu rasio *Book-to-Market* yang dihitung dengan membagi *book value of equity* dengan *market value of equity*. Kemudian hasil yang diperoleh dikali dengan -1 untuk mencerminkan bahwa nilai positif berhubungan dengan konservatisme yang lebih tinggi. Pengujian dengan menggunakan rasio *Book-to-Market* tersajikan pada Tabel 4.5. berikut ini.

**(Masukkan Tabel 4.5 Disini)**

Hasil pengujian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai koefisien (nilai *p*) variabel *BOC* adalah sebesar -0.054 (0.095). Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi pada level 10%. Hal tersebut berarti bahwa terdapat hubungan negatif antara konservatisme akuntansi dan efektivitas dewan komisaris. Hubungan negatif tersebut dapat diterjemahkan bahwa ketika dewan komisaris sudah berfungsi efektif, maka perusahaan akan menerapkan konservatisme yang lebih rendah, dan sebaliknya. Variabel utama lainnya seperti efektifitas komite audit dan kepemilikan keluarga tidak menunjukkan asosiasi yang signifikan pada

konservatisme. Variabel kontrol yang berasosiasi negatif signifikan adalah volatilitas dan siklus investasi. Kedua proksi ketidakpastian ini justru membuat perusahaan semakin tidak konservatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu dikaji secara mendalam.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kepemilikan keluarga dan konservatisme akuntansi perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran konservatisme C-score. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ketika menggunakan model pengukuran konservatisme *C-score*, tidak satupun dari variabel-variabel utama berhubungan dengan konservatisme. Namun ketika menggunakan pengukuran konservatisme lain yang berbasis pasar yaitu rasio *book-to-market*, efektifitas dewan komisaris berhubungan dengan konservatisme.

Penelitian ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah: banyaknya pengukuran konservatisme yang ada menunjukkan bahwa konservatisme merupakan topik yang dapat diinterpretasikan dari berbagai aspek. Dampaknya pada penelitian ini adalah penggunaan ukuran konservatisme *C-score* yang hasilnya tidak signifikan mungkin saja akan berbeda ketika menggunakan ukuran konservatisme yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk penelitian di masa yang akan datang agar menggunakan ukuran-ukuran yang belum digunakan dalam penelitian ini, sebagai bahan perbandingan. Selain itu penggunaan *C-score* seperti yang telah dikemukakan oleh Khan dan Watts (2009) harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat menghasilkan estimasi sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, L.J., S. Parker., G.F. Peters., and K. Raghunandan. 2003. An Empirical Investigation of Audit Fees, Nonaudit Fees, and Audit Committees, *Contemporary Accounting Research* 20: 215-234.
- Ahmed, A. and S. Duellman. 2007. Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis, *Journal of Accounting and Economics* 43 (2-3): 411-437.
- Ali, A., Chen, T. Y., & Radhakrishnan, S. 2007. Corporate disclosures by family firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1-2): 238-286.
- Arifin,Z. 2003. Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Disertai Pascasarjana FEUI.
- Ball, R. and L. Shivakumar. 2005. Earnings Quality In UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness, *Journal of Accounting and Economics* 39: 83-128.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Lampiran Peraturan Nomor IX.1.5. Jakarta.
- Basu, S. 1997. The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings, *Journal of Accounting and Economics* 24 (1): 3-37
- Beaver, W. and S. Ryan. 2005. Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modelling, *Review of Accounting Studies* 10: 269-305.
- Beekes, W., Pope, and P., Young, S. 2004. The Link Between Warnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition: Evidence from the UK, *Corporate Governance: An International Review* 12 (1): 47-59.
- Bushman, R., J. Piotroski. 2006. Financial Reporting Incentives for Conservative Accounting: The Influence of Legal and Political Institutions, *Journal of Accounting and Economics* 42 (1-2), (2006): 107-148
- Chi,W., Chiawen Liu., and Taychang Wang. 2009. What Affect Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective, *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 5: 47-59
- Dechow, P. M., R.G. Sloan, & A.P. Sweeney. 1996. Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research* 13: 1-36
- Defond, M., R. N. Hann, and X. Hu. 2005. Does The Market Value Financial Expertise on Audit Committees of Board of Directors? *Journal of Accounting Research* 43 (2): 153-193.
- DeZoort, F. T., D. R. Hermanson, D. S. Archambeault, and S. A. Reed. 2002. Audit committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committee literature. *Journal of Accounting Literature* 21: 38-75.
- Hermawan, Ancella A. 2009. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandungan Informasi Laba, Disertasi PIA FE-UI
- Lara, J.M.G., Beatriz García Osma, Fernando Penalva. 2007. Boards of Directors Characteristics and Conditional Accounting Conservatism: Spanish Evidence. *European Accounting Review* 16 (4): 727-755
- \_\_\_\_\_. 2009. Accounting Conservatism and Corporate Governance, *Review of Accounting Studies* 14 (1): 161-201
- Jaggi, B, Sidney Leung, Ferdinand Gul. 2009. Family Control, Board Independence and Earnings Management: Evidence based on Hongkong Firms, *J. Account. Public Policy*: 281-300



- Klein, A. 2002. Audit Committee, Board of Directors' Characteristics, and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics*, 33: 375-400
- Krishnan, G. V., and G. Visvanathan, 2008, Does the SOX Definition of An Accounting Expert Matter? The Association Between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism, *Contemporary Accounting Research* 25: 827-858
- LaFond, R. and R.L.Watts. 2008. The Information Role of Conservatism, *The Accounting Review*, Vol. 83(2): 447-478
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes and A. Shleifer. 1999. Corporate Ownership around the World. *Journal of Finance* 54: 471-517.
- Leuz, C., Nanda, D.J., Wysocki, P. 2003. Earnings Management and Investor Protection: An International comparison. *Journal of Financial Economics* 69 (3), 505-527
- McMullen, D. A., and K. Raghunandan. 1996. Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal of Accountancy* 182 (2): 79-81.
- Mohiudin Md., and Y. Karbhari. 2010. Audit Committee Effectiveness: A Critical Literature Review. *AIUB Journal of Business and Economics* Vol 9 (1): 97-125
- Peasnell, K.V., P.F. Pope and S. Young. 2005. Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals? *Journal of Business Finance and Accounting* 32: 1311-1346
- Roychowdhury, Sugata and R.L. Watts. 2009. Asymmetric Timeliness of Earnings, Market-to-Book and Conservatism in Financial Reporting, *Journal of Accounting and Economics*, Vol 44 issue 1-2: 2-31
- Siregar, S.V., Utama, S. 2008. Type of Earnings Management and the Effect of Ownership Structure, Firm Size, and Corporate-Governance Practices: Evidence from Indonesia, *The International Journal of Accounting* 43: 1-27
- Vera & Muñoz, S.C. 2005. Redefined Expectations of Audit Committee Responsibilities and Effectiveness. *Journal of Business Ethics* Vol. 62, No. 2, pp. 115-127
- Wang, D. 2006. Founding Family Ownership and Earnings Quality, *Journal of Accounting Research* 44(3): 619-656
- Wardhani, Ratna. 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya Dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance, Paper SNA XI Pontianak.
- Watts, R.L. 2003a. Conservatism in Accounting, Part I: Explanation and Implication, *Accounting Horizons* 17 (3, September): 207-221
- \_\_\_\_\_, 2003b. Conservatism in Accounting, Part II: Evidence and Research Opportunities, *Accounting Horizons* 17 (4, Desember): 287-301
- Xie, B., Wallace N. Davidson III and Peter J. Dadalt. 2000. Earnings Management and Corporate Governance: the Role of the Board and the Audit Committee, *Journal of Corporate Finance* 9: 295-316



# Lampiran

**Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel C-Score**

Variabel	Mean	Median	Max	Min	Std. Deviasi
EARN	0.189	0.129	1.58	-0.068	0.230
RET	0.836	0.45	9.86	-0.8	1.564
DNEG	0.254	0	1	0	0.438
SIZE	12.115	12.025	14.344	9.881	0.954
MTB	2.441	1.394	12.079	0.324	2.417
LEV	1.086	0.427	9.758	0.002	1.806

**Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Variabel**

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
Cscore	0.107	0.091	0.347	0.034	0.062
BOC	18.704	19.000	24.000	10.000	2.856
KOMAU	15.141	16.000	19.000	6.000	2.743
KEPKEL	0.338	0.000	1.000	0.000	0.476
AGE	29.507	30.000	58.000	9.000	10.892
VOLATILITY	1,458.31	332.260	22,003.67	6.430	3,278.04
CYCLE	0.048	0.039	0.125	0.006	0.030
KUAAU	0.535	1.000	1.000	0.000	0.502
N = 71					

**Tabel 4.3. Koefisien Hasil Regresi c score (variabel dependen earning)**

Variabel Independen	Prediksi Tanda	Koefisien	Nilai t-test
Intercept		0.125	6.412
Dneg		-0.016	-0.441
Ret	+	0.180	0.535
Ret x Size	+	-0.010	-0.366
Ret x MTB	-	-0.004	-0.743
Ret x Lev	-	0.032	7.682
Dneg x Ret	+	1.115	-0.174
Dneg x Ret x Size	-	0.088	0.219
Dneg x Ret x MTB	+	0.016	1.356
Dneg x Ret x Lev	+	0.047	0.267
Adjusted R-squared		0.717	

**Earn** : laba sebelum pos-pos luarbiasa dibagi dengan market value of equity awal tahun

**DNeg** : variabel dummy dengan nilai 1 untuk return negatif, dan 0 untuk yang lainnya.

**Ret** :return saham tahunan yang dihitung dari return bulanan yang diakumulasikan mulai dari sembilan bulan sebelum tahun fiskal berakhir dan tiga bulan setelah tahun fiskal berakhir.

**Size** : natural log dari market value of equity

**MTB** : market to book ratio

**LEV** : utang jangka panjang ditambah dengan utang jangka pendek dibagi dengan market value of equity awal tahun.

**Tabel 4.4. Hasil Regresi Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris, Efektifitas Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga terhadap Konservatisme**

Variabel	Tanda Prediksi	Nilai Koefisien Regresi	Nilai t-Test	Tingkat Signifikansi
Intersep		0.041	0.835	0.407
BOC	+	0.002	0.815	0.418
KOMAU	+	-0.004	-1.296	0.199
KEPKEL	?	0.012	0.840	0.404
AGE	-	0.001	1.938	0.057*
VOLATILITY	+	0.0007	3.518	0.008***
CYCLE	+	0.375	1.561	0.123
KUAAU	?	0.020	1.383	0.171

Nilai F-test 4.153

Probabilitas 0.0008\*\*\*

R<sup>2</sup> 0.316

Adjusted R<sup>2</sup> 0.239

\*\*\*Signifikan pada 1%; \*\*Signifikan pada 5%; \*Signifikan pada 10%

BOC (Efektifitas Dewan Komisaris) diukur dengan menggunakan 17 pertanyaan berdasarkan Hermawan (2009)

KOMAU (Efektifitas Komite Audit) diukur dengan menggunakan 11 pertanyaan penilaian berdasarkan Hermawan (2009)

KEPKEL (Kepemilikan Keluarga) diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu= 1 jika kepemilikan keluarga tinggi; 0 lainnya

**Tabel 4.5. Hasil Regresi Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris, Efektifitas Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga terhadap Konservatisme menggunakan rasio BM**

Variabel	Tanda Prediksi	Nilai Koefisien Regresi	Nilai t-Test	Tingkat Signifikansi
Intersep		1.295	2.294035	0.025
BOC	+	-0.054	-1.697029	0.095*
KOMAU	+	0.025	0.755769	0.453
KEPKEL	?	0.004	0.022628	0.982
AGE	-	-0.009	-1.279585	0.205
VOLATILITY	+	-0.0005	-2.943821	0.005***
CYCLE	+	-7.987	-2.896846	0.005***
KUAAU	?	-0.073	-0.43575	0.665

Nilai F-test 3.533

Probabilitas 0.003\*\*\*

R<sup>2</sup> 0.282

Adjusted R<sup>2</sup> 0.202

\*\*\*Signifikan pada 1%; \*\*Signifikan pada 5%; \*Signifikan pada 10%

BOC (Efektifitas Dewan Komisaris) diukur dengan menggunakan 17 pertanyaan berdasarkan Hermawan (2009)

KOMAU (Efektifitas Komite Audit) diukur dengan menggunakan 11 pertanyaan penilaian berdasarkan Hermawan (2009)

KEPKEL (Kepemilikan Keluarga) diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu= 1 jika kepemilikan keluarga tinggi; 0 lainnya

## **Analisis Pengaruh *Agency Cost Of Free Cash Flow* terhadap Tingkat Konservatisme dan Pengujian Efek Moderasi dari Kebijakan Hutang, Pendistribusian Kas, Persistensi Kas, dan Tata Kelola Perusahaan**

**HENDRO**

**RATNA WARDHANI\***

*Universitas Indonesia*

**Abstract:** *The objective of this research is to investigate whether the J-type firm (high agency cost of free cash flow) will have more conservative financial report compared with non J-type firm. Moreover, this research also aim to investigate the effect of debt (H2), dividend (H3a), stock repurchase (H3b), cash persistency (H4), and corporate governance (H5) as moderating variables in the relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial report. This research uses two measures of conservatism, accruals and market. The result shows that there is a positive and significant relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial reporting for the two measures. And for the moderating variables, both measures show that there are no effects, which means the moderating variables have no effect in the relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial report.*

**Keywords:** *Conservatism, accruals, agency cost of free cash flow, debt, dividend, stock repurchase, cash retention, corporate governance.*

---

\* Corresponding author: ratnawardhani@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan, maka muncul kebutuhan untuk mempekerjakan pihak yang kompeten dan profesional untuk menjalankan aktivitas operasional. Oleh karena itulah pemilik perusahaan (*principal*) mempekerjakan manajer (*agent*) dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan agar manajer dapat bertindak sebagai perpanjangan tangan dari sang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Akan tetapi kondisi tersebut akan menjadi tidak ideal apabila manajer bersifat *utility maximizers*, yakni manajer bersifat oportunistik untuk memaksimumkan kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan pemilik. Dalam rangka mencapai titik temu atas perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukanlah biaya yang disebut sebagai *agency cost*.

Dalam jurnalnya, Jensen mengemukakan bahwa salah faktor utama yang menyebabkan munculnya *agency cost* adalah keberadaan dari *free cash flow* (FCF) yang substantif dalam perusahaan, yang kerap disebut sebagai *agency cost of free cash flow* (Jensen, 1986). Adapun FCF tersebut didefinisikannya sebagai kelebihan arus kas setelah digunakan untuk membiayai semua proyek yang memiliki NPV positif ketika didiskon (*discounted*) pada *cost of capital* yang relevan. *Agency cost of free cash flow* tersebut timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, yang mana pemilik menghendaki FCF dibagikan dalam bentuk dividen, sedangkan manajer cenderung menahan dana berlebih tersebut di bawah kendalinya.

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 1986 dan 1989, Jensen pun menemukan bahwa manajer pada perusahaan yang memiliki FCF tinggi namun pertumbuhannya rendah, yang lebih lanjut akan disebut perusahaan "*tipe-J*", cenderung terlibat dalam aktivitas yang bersifat tidak menguntungkan perusahaan (*non-value-maximizing*). Manajer pada perusahaan tipe ini cenderung bersifat oportunistik dan terlibat dalam aktivitas yang bersifat merusak value perusahaan dengan melakukan investasi berlebihan (*overinvest*) dan menyalahgunakan modal perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Shleifer and Vishny (1989) yang menunjukkan bahwa manajer cenderung menahan dana di bawah kendalinya agar dapat meningkatkan kompensasi dan melakukan aktivitas yang terkait dengan *management entrenchment*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *agency cost of free cash flow* akan lebih tinggi pada perusahaan tipe-J.

Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan untuk memitigasi eksposur terkait tindakan ekspropriasi yang dilakukan manajer pada perusahaan tipe-J adalah dengan menerapkan praktik konservatisme yang bersifat kondisional (*conditional conservatism*), yakni pengurangan pada laba akuntansi merupakan refleksi dari *economic loss* yang tengah terjadi (bersifat *news dependent*). Penelitian membuktikan bahwa konservatisme mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam merespon kebutuhan dari pengguna laporan keuangan, yang secara langsung mengimplikasikan adanya pengawasan terkait penilaian (*assessment*) dari manajer terhadap peristiwa ekonomi yang terjadi secara periodik, dalam proses penyusunan laporan keuangan (Watts, 2003; Holthausen dan Watts, 2001; LaFond dan Roychowdhury, 2008; LaFond dan Watts, 2008). Hal ini senada dengan penelitian Ball dan Shivakumar (2006) yang mengemukakan bahwa dengan adanya pelaporan keuangan secara konservatif akan menjadi disinsentif bagi manajer yang oportunis, dikarenakan kerugian sebagai dampak dari investasi pada proyek yang memiliki NPV negatif akan dibebankan pada periode tersebut.

Selain itu, kebijakan hutang pun dapat menjadi mekanisme kontrol atas permasalahan keagenan tersebut. Jensen (1986) mengemukakan bahwa hutang menimbulkan tuntutan untuk melakukan pembayaran sejumlah kas untuk tiap periode, yang lebih lanjut akan menurunkan kelebihan kas yang terdapat dalam perusahaan. Dengan demikian dapat mengurangi kemungkinan adanya ekspropriasi yang dilakukan oleh manajer

Mekanisme lain yang dapat memitigasi *agency cost of free cash flow* adalah kebijakan pendistribusian kas yang diterapkan perusahaan, yakni pembagian dividen ataupun *stock repurchase*. Dengan adanya kebijakan pendistribusian kas kepada *shareholder*, maka sumber daya perusahaan yang berada di bawah kendali manajer akan berkurang. Hal ini tentu akan mendorong manajer untuk lebih selektif dalam memutuskan kebijakan investasi sehingga akan mengurangi penggunaan dana untuk investasi yang bersifat tidak menguntungkan. Hal senada diungkapkan oleh Easterbrook (1984) dan Kose John & Anzhela Knyazevan (2006) yang menyatakan bahwa dividen dapat mengurangi *agency cost of free cash flow*. Selain itu, dengan adanya peningkatan pada *dividend payout ratio*, maka dapat mendorong manajer untuk mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya, yang lebih lanjut dapat mengurangi eksposur penggunaan FCF yang bersifat *non-value maximizing* (Crutchley dan Hansen, 1989). Dan terkait dengan *stock repurchase*, Grullon dan Michaely (2004) menemukan bahwa cadangan kas dalam *balance sheet* perusahaan yang melakukan *stock*

*repurchase* turun secara signifikan, yang mengindikasikan berkurangnya sumber daya perusahaan (FCF) yang dapat disalahgunakan oleh manajer.

Persistensi kas pun dapat mempengaruhi *agency cost of free cash flow*, yang mana akan lebih tinggi pada perusahaan yang cenderung menahan kelebihan kas-nya. Penelitian yang dilakukan oleh Dechow, Richardson, dan Sloan (2008) membuktikan bahwa perusahaan yang persisten menahan kas akan mengalami penurunan ROA di masa mendatang sebagai dampak dari penurunan *marginal return* dari investasi baru dan sebagai dampak dari praktik *overinvestment* yang dilakukan oleh manajer.

Mekanisme terakhir yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut adalah tata kelola perusahaan. Dittmar, Mahrt-Smith, dan Servaes (2003) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat berperan sebagai mekanisme efektif untuk mengatasi eksposur dari *agency cost of free cash flow*. Adapun La Porta et al. (2000) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan *outside investor* untuk melindungi kepentingan mereka dari eksposur ekspropriasi yang dilakukan oleh *insider*, atau dalam konteks ini adalah manajer.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat lima mekanisme yang dapat diterapkan perusahaan untuk memitigasi eksposur dari *agency cost of free cash flow*, yakni (1) Konservatisme, (2) Kebijakan hutang, (3) Kebijakan pendistribusian kas, (4) Kebijakan persistensi kas, dan (5) Tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada satu mekanisme, yakni konservatisme. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Jensen (1986), yang mengungkapkan bahwa konservatisme merupakan mekanisme yang dapat secara *ex-ante* mengontrol keputusan investasi dan secara *ex-post* memfasilitasi pengawasan pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, konservatisme dianggap sebagai mekanisme efektif untuk membantu memitigasi eksposur terkait penurunan *value* perusahaan ataupun ekspropriasi kekayaan *shareholder* yang timbul sebagai akibat dari adanya *agency cost of free cash flow*.

Kembali ke pernyataan Jensen sebelumnya yang mengemukakan bahwa *agency cost of free cash flow* akan lebih tinggi pada perusahaan tipe-J, dapat disimpulkan bahwa *shareholder* pada perusahaan tersebut tentulah akan menuntut pelaporan yang bersifat lebih konservatif dibandingkan dengan *shareholder* pada perusahaan tipe non-J, sehingga laporan keuangan

perusahaan tipe-J akan lebih konservatif. Atas dasar pemikiran inilah peneliti mulai mengembangkan kerangka penulisan terkait dengan konservatisme pelaporan keuangan sebagai mekanisme pengendalian *agency cost of free cash flow*. Dalam melakukan analisa, peneliti akan mengambil proksi *free cash flow* (FCF) yang didasarkan pada penelitian Jensen (1986) yang membuktikan bahwa *agency problem* akan semakin tinggi pada perusahaan yang memiliki FCF yang besar.

Adapun penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni (1)Membuktikan bahwa perusahaan tipe-J akan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda dengan perusahaan tipe non-J;<sup>1</sup> dan (2)Melihat pengaruh faktor-faktor lain seperti hutang, pendistribusian kas, kebijakan persistensi kas, dan tata kelola perusahaan terhadap hubungan positif tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.

## 2. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1 Konservatisme dan *Agency Cost of Free Cash Flow*

Teori keagenan memberikan penjelasan bahwa dengan adanya pendelegasian tugas dari pemilik kepada manajer untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan, maka muncul permasalahan keagenan yang merupakan dampak dari kecenderungan kedua pihak untuk memaksimalkan keuntungannya (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam jurnalnya pada tahun 1986, Jensen menyatakan bahwa faktor utama penyebab timbulnya permasalahan keagenan adalah keberadaan dari *free cash flow* yang substantif dalam perusahaan, atau yang lebih dikenal sebagai *agency cost of free cash flow hypothesis*. Dan mekanisme yang menurut Jensen (1986) dapat secara efektif mengontrol permasalahan keagenan tersebut adalah penerapan konservatisme laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan konservatisme merupakan mekanisme yang dapat secara *ex ante* mengontrol keputusan investasi dan secara *ex post* memfasilitasi pengawasan pengambilan keputusan oleh manajer.

Akan tetapi, peneliti menyadari bahwa konservatisme sendiri merupakan suatu mekanisme yang diperdebatkan, bahkan dalam kerangka konseptual IFRS, prinsip konservatisme ini telah dikeluarkan dari karakteristik kualitatif dan digantikan oleh prinsip netralitas, yang dianggap

<sup>1</sup> Perusahaan tipe-J adalah perusahaan yang memiliki *free cash flow* tinggi, namun pertumbuhannya rendah. Adapun perusahaan tipe-J ini oleh Jensen dikatakan memiliki *agency cost of free cash flow* yang tinggi.



tidak menimbulkan bias. Oleh karena itulah peneliti merasa perlu untuk memaparkan sedikit teori terkait dengan konservatisme.

Dalam perkembangannya, konservatisme akuntansi terbagi menjadi dua definisi. Pertama, konservatisme dapat bersifat *unconditional* (atau *ex ante* atau *news independent*), yang berarti bahwa proses akuntansi ditentukan pada saat awal dari aset dan liabilitas, yang menghasilkan *expected unrecorded goodwill*. Kedua, konservatisme dapat bersifat *conditional* (atau *ex post* atau *news dependent*), yang berarti bahwa nilai buku di catat lebih rendah pada situasi yang buruk, namun tidak di catat lebih tinggi pada situasi yang baik. Contoh dari *conditional conservatism* mencakup *lower of cost or market* dalam pencatatan inventori dan *impairment* akuntansi pada *long-lived tangible* dan *intangible assets* (Beaver dan Ryan, 2005).

Menurut Ball dan Shivakumar (2005), pembedaan antara konservatisme yang bersifat *unconditional* dan *conditional* sangatlah penting untuk memahami peranan dari konservatisme terhadap *efficient contracting* dalam perusahaan. Dan Beliau berpendapat bahwa *conditional conservatism* dapat meningkatkan *contracting efficiency* dengan meminimalkan insentif manajer untuk mengambil proyek yang secara *ex ante* memiliki NPV negatif dan memberikan insentif untuk dengan segera meninggalkan investasi yang secara *ex post* mendatangkan kerugian. Sementara *unconditional conservatism* terkesan tidak efisien dari *contractual perspective* dikarenakan besaran bias tersebut dapat menimbulkan *randomness* dalam pembuatan keputusan yang didasarkan pada informasi keuangan, yang lebih lanjut hanya akan mengurangi *contracting efficiency*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konservatisme yang bersifat *conditional* (lebih lanjut disebut konservatisme) dikarenakan konservatisme jenis ini lebih relevan dalam menggambarkan kondisi perusahaan, yakni pengurangan pada laba akuntansi merupakan refleksi dari *economic loss* yang tengah terjadi.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini meneliti apakah perusahaan tipe-J (memiliki *agency cost of free cash flow* tinggi) akan memiliki tingkat konservatisme yang lebih tinggi di bandingkan perusahaan tipe non-J. Selain itu, peneliti juga ingin menguji efektivitas mekanisme kontrol konservatisme secara relatif terhadap mekanisme kontrol lain seperti hutang, pendistribusian kas, persistensi



kas, dan tata kelola perusahaan dengan menjadikan mekanisme kontrol lain tersebut sebagai variable pemoderasi.

### 2.2.1 Konservatisme

LaFond dan Watts (2008) mengungkapkan bahwa konservatisme mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam merespon kebutuhan pengawasan terkait penilaian manajemen atas peristiwa ekonomi, sehingga dapat menghalangi manajer untuk mengekspropriasi kekayaan *shareholder*. Ball dan Shivakumar (2008) pun membuktikan bahwa pelaporan keuangan secara konservatif menjadi disinsentif bagi manajer dikarenakan kerugian yang merupakan dampak dari investasi pada proyek yang memiliki NPV negatif akan dibebankan pada periode tersebut. Dan dengan berlandaskan pada pernyataan Jensen (1986; 1989) bahwa *agency cost of free cash flow* akan lebih tinggi pada perusahaan tipe-J, yang mengindikasikan lebih besarnya kebutuhan akan konservatisme, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** *Laporan keuangan pada perusahaan tipe-J akan lebih konservatif dibandingkan dengan perusahaan tipe non-J.*

### 2.2.2 Hutang

Menurut Jensen (1986), hutang juga merupakan salah satu mekanisme yang dapat memitigasi *agency cost* terkait dengan *free cash flow*. Hal tersebut dikarenakan kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari kontrak hutang berdampak pada semakin minimnya keberadaan *free cash flow* yang dapat dieksploitasi oleh manajer. Selain itu, manajer juga dituntut untuk dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran berupa bunga dan pokok dari hutang tersebut. Menyadari bahwa kebijakan hutang yang diterapkan perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* yang dihadapi perusahaan dan tingkat konservatisme dari laporan keuangan yang diterbitkan, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** *Hutang memperlemah hubungan positif tingkat agency cost of free cash flow terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.*

### 2.2.3 Pendistribusian Kas

Terdapat dua jenis pendistribusian kas yang umumnya dilakukan perusahaan, yakni dividen dan *stock repurchase*. Dengan dilakukannya pendistribusian kas, maka dapat mengurangi FCF di bawah kendali manajemen dan oleh karena itulah dapat meminimkan insentif bagi

manajer untuk melakukan investasi yang tidak menguntungkan dan berkontribusi pada peningkatan *value* perusahaan.

### 2.2.3.1 Dividen

Dividen cenderung menjadi sebuah *long-term commitment* ketika sudah diumumkan, yang secara efektif mengikat manajer untuk melakukan pembayaran sejumlah kas di masa mendatang, yang lebih lanjut dapat mengurangi atau memitigasi permasalahan terkait FCF. Jensen (1986) memperluas penelitian Berle dan Means (1932) terkait pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, dan berpendapat bahwa perusahaan dengan FCF yang substansial akan memiliki tendensi untuk melakukan *overinvest* dengan menerima proyek yang memiliki NPV negatif. Jika manajer melakukan *overinvesting*, peningkatan pada dividen (faktor lain dianggap konstan) akan mengurangi jumlah dana yang dapat digunakan untuk melakukan *overinvestment* dan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara pengumuman perubahan dividen dan pergerakan harga saham, sesuai dengan hipotesis atas *agency cost of free cash flow* yang dipaparkan oleh Jensen (1986). Terkait dengan kebijakan pendistribusian kas dalam bentuk dividen, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3a</sub>** *Dividen memperlemah hubungan positif tingkat agency cost of free cash flow terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.*

### 2.2.3.2 Stock Repurchase

Grullon dan Michaely (2004) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan *stock repurchase* akan mengalami penurunan yang signifikan pada cadangan kas dalam *balance sheet*-nya. Mereka pun menemukan bahwa perusahaan yang melakukan *stock repurchase* cenderung mengurangi *current level of capital expenditures* dan biaya *research and development*-nya (R&D), serta reaksi pasar terhadap pengumuman *stock repurchase* lebih kuat pada perusahaan yang cenderung *overinvest*. Penelitian mereka mendukung hipotesis terkait FCF yang diungkapkan oleh Jensen (1986), yang mana dengan dilakukannya *stock repurchase* oleh perusahaan, maka FCF akan berkurang dan mengurangi eksposur atas penyalahgunaan FCF oleh manajer. Oleh karena itulah peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3b</sub>** *Stock repurchase memperlemah hubungan positif tingkat agency cost of free cash flow terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.*

#### 2.2.4 Persistensi Kas

Pada dasarnya terdapat dua motif utama dari persistensi penahanan aset yang bersifat likuid oleh perusahaan (Opler et al., 1999), yakni: (1)*Transaction cost motive*, perusahaan dapat menghemat biaya transaksi untuk mengumpulkan dana dan tidak perlu melikuidasi aset untuk melakukan pembayaran; dan (2)*Precautionary motive*, perusahaan menahan dana agar dapat digunakan untuk membiayai aktivitas dan investasi bila sumber pembiayaan lain tidak tersedia atau mahal.

Akan tetapi Dechow, Richardson, dan Sloan (2008) mengemukakan bahwa persistensi kas pada hakekatnya dapat mengakibatkan penurunan ROA di masa mendatang sebagai akibat dari kombinasi antara penurunan *marginal return* dari investasi baru dan sebagai dampak dari *overinvestment* yang dilakukan manajer yang oportunis. Dengan demikian, kebijakan perusahaan terkait persistensi kas juga dapat mempengaruhi hubungan tingkat *agency cost of free cash flow* perusahaan terhadap tingkat penerapan prinsip konservatisme laporan keuangan. Oleh karena itulah peneliti membuat hipotesis

**H<sub>4</sub>** *Persistensi perusahaan dalam memegang kas memperkuat hubungan positif tingkat agency cost of free cash flow terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.*

#### 2.2.5 Tata Kelola Perusahaan

Garcia Lara, Garcia Osma, dan Penalva (2009) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* suatu perusahaan dan tingkat konservatisme laporan keuangan, yang menandakan bahwa pada dasarnya tata kelola dan konservatisme bukanlah bersifat substitusi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Bushman dan Piotroski (2006) menunjukkan bahwa ketika *earning timeliness* rendah, *board* akan mengadopsi mekanisme tata kelola yang lebih baik sebagai substitusi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Dari pemaparan di atas, dapat kita amati bahwa tata kelola dan pelaporan yang konservatif dapat bersifat substitusi ataupun komplementer. Menanggapi hal tersebut, peneliti mencoba menyusun hipotesis yang bersifat netral, yakni:

**H<sub>5</sub>** *Tata kelola perusahaan mempengaruhi hubungan positif tingkat agency cost of free cash flow terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan.*

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Sumber Data dan Pemilihan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui *datastream*. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan *Corporate Governance Index*, yang diperoleh peneliti melalui *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Teknik pemilihan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan tergolong sebagai perusahaan manufaktur dan terdaftar aktif di BEI selama periode 2007-2008 dan 2010; (2) Memiliki laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia lengkap; (3) Memiliki tanggal tutup buku 31 Desember; (4) Memiliki laporan keuangan dalam mata uang rupiah; (5) Memiliki nilai buku atas ekuitas yang positif; (6) Untuk sampel penelitian hipotesis 5, perusahaan memiliki *Corporate Governance Index*, yang dipublikasikan oleh IICD; dan (7) Untuk pengujian konservatisme dengan nilai pasar, perusahaan memiliki saham aktif yang diperdagangkan selama tahun 2007-2008 dan 2010.

#### 3.2 Model Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel independen *agency cost of free cash flow*, yang diindikasikan oleh Jensen (1986) akan semakin tinggi pada perusahaan tipe-J (FCF tinggi namun growth rendah), akan mendorong perusahaan untuk menyusun pelaporan keuangan yang bersifat konservatif. Selanjutnya, hubungan antara variabel independen dan dependen tersebut akan diuji satu per satu dengan menggunakan variabel moderasi seperti hutang, pendistribusian kas, persistensi kas, dan tata kelola perusahaan untuk mengamati perubahan kebutuhan akan konservatisme.

Dalam penelitian ini digunakan dua ukuran konservatisme, yakni ukuran akrual dan nilai pasar. Konservatisme dengan ukuran akrual didasarkan pada model yang disusun oleh Ahmed et al. (2002) sebagai pengembangan dari model yang dipaparkan oleh Givoly dan Hayn (2000). Sementara konservatisme dengan nilai pasar didasarkan pada model Beaver dan Ryan (2000) dalam Wardhani (2008), yang menggunakan rasio *book-to-market* perusahaan.

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa variabel kontrol. Pertama adalah ukuran perusahaan (*SIZE*). Menurut Watts dan Zimmerman (1978), ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingkat biaya politis yang dihadapi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biaya politis yang dihadapinya tinggi sehingga mengakibatkan perusahaan

terdorong untuk menerapkan prinsip akuntansi yang lebih konservatif dalam rangka mengurangi biaya politis tersebut. Kedua, mengendalikan profitabilitas perusahaan (ROA). Ahmed et al. (2002) menyatakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung untuk menerapkan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Oleh karena itulah profitabilitas harus dimasukkan sebagai variabel kontrol. Dan terkait dengan pengukuran konservatisme dengan nilai pasar, peneliti akan memasukkan juga return saham saat ini (CURR\_RET) dan lag return satu tahun (LAG\_RET) dalam meregresikan konservatisme dengan ukuran nilai pasar untuk mengontrol efek *noise* dari pasar.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah model penelitian yang disusun oleh peneliti untuk tiap hipotesis dan tiap ukuran konservatisme:

### i) Model Hipotesis 1

Untuk menguji hipotesa pertama yang menyatakan perusahaan tipe-J membuat laporan keuangan yang bersifat lebih konservatif dibandingkan perusahaan tipe non-J, peneliti menggunakan model penelitian sebagai berikut:

#### a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 SIZE_i + \beta_3 ROA_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- $CONACC_i$      Tingkat konservatisme dengan ukuran akrual perusahaan.  
 $AGENCY_i$      Jenis perusahaan  $i$ , apakah tergolong sebagai perusahaan tipe-J atau non-J.  
 $SIZE_i$      Ukuran perusahaan  $i$ .  
 $ROA_i$      Profitabilitas perusahaan  $i$ .

#### b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 SIZE_i + \beta_3 ROA_i + \beta_4 CURR\_RET_i + \beta_5 LAG\_RET_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- $CONMKT_i$      Tingkat konservatisme dengan ukuran pasar perusahaan  $i$ .  
 $CURR\_RET_i$      *Holding period return* satu tahun perusahaan  $i$ .  
 $LAG\_RET_i$      *Return* periode sebelumnya.

### ii) Model Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk melihat efek moderasi dari hutang terhadap hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan, peneliti menggunakan model sebagai berikut:

a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 AGENCY_i LEV_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$LEV_i$  Tingkat hutang (*leverage*) perusahaan  $i$ .

b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 CURR\_RET_i + \beta_6 LAG\_RET_i + \beta_7 AGENCY_i LEV_i + \varepsilon_i$$

iii) Model Hipotesis 3a

Untuk menguji efek moderasi dari dividen terhadap hubungan pada hipotesis 1, peneliti menggunakan model sebagai berikut:

a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 DPO_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 AGENCY_i DPO_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$DPO_i$  Besaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan  $i$ .

b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 DPO_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 CURR\_RET_i + \beta_6 LAG\_RET_i + \beta_7 AGENCY_i DPO_i + \varepsilon_i$$

iv) Model Hipotesis 3b

Terkait pengujian atas efek moderasi dari *stock repurchase* terhadap hubungan pada hipotesis 1, peneliti menggunakan model penelitian sebagai berikut:

a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 REPUR_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 AGENCY_i REPUR_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$REPUR_i$  Besaran *repurchase* perusahaan  $i$ .

b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 REPUR_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 CURR\_RET_i + \beta_6 LAG\_RET_i + \beta_7 AGENCY_i REPUR_i + \varepsilon_i$$

#### v) Model Hipotesis 4

Pengujian efek moderasi persistensi kas perusahaan terhadap hubungan pada hipotesis 1 menggunakan model penelitian sebagai berikut:

- a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 PERS_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 AGENCY_i PERS_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$PERS_i$  Persistensi kas perusahaan  $i$ .

- b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 PERS_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 CURR\_RET_i + \beta_6 LAG\_RET_i + \beta_7 AGENCY_i PERS_i + \varepsilon_i$$

#### vi) Model Hipotesis 5

Dan untuk pengujian efek moderasi dari tata kelola perusahaan terhadap hubungan pada hipotesis 1, peneliti menggunakan model penelitian sebagai berikut:

- a. Konservatisme dengan ukuran akrual

$$CONACC_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 GOV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 AGENCY_i GOV_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$GOV_i$  Tingkat tata kelola perusahaan  $i$ .

- b. Konservatisme dengan nilai pasar

$$CONMKT_i = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_i + \beta_2 GOV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 ROA_i + \beta_5 CURR\_RET_i + \beta_6 LAG\_RET_i + \beta_7 AGENCY_i GOV_i + \varepsilon_i$$

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam model-model di atas dapat dilihat pada Lampiran 1.

### 3.3 Pengujian Model

Model-model penelitian di atas akan diuji dengan menggunakan PLS (*Pooled Least Square*). Dalam pengujian ini juga diuji terpenuhinya asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yang mana model penelitian harus memenuhi asumsi terdistribusi secara normal, tidak adanya heteroskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan tidak adanya autokorelasi. Pengujian secara umum dilakukan dengan menggunakan software STATA.



## 4. Analisis Hasil Penelitian

### 4.1 Statistik Deskriptif

Sebagaimana telah dijelaskan pada pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2007-2008 dan 2010. Dan berikut adalah rincian mengenai statistik deskriptif dari sampel penelitian untuk tiap ukuran konservatisme:

#### a. Konservatisme dengan ukuran akrual

Terkait dengan statistik deskriptif, peneliti membaginya menjadi dua bagian, yakni statistik deskriptif umum yang membahas mengenai data statistik atas variabel-variabel yang memiliki jumlah sampel yang sama, dan statistik deskriptif khusus, yakni untuk variabel moderasi *stock repurchase* dan tata kelola perusahaan yang memiliki jumlah sampel yang berbeda. Adapun karakteristik sampel terkait dengan pengukuran konservatisme dengan ukuran akrual dapat dilihat pada Panel A di Lampiran 2. Pada lampiran tersebut, dapat diamati bahwa perusahaan dalam industri manufaktur belum menerapkan prinsip pelaporan keuangan yang bersifat konservatif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata konservatisme ukuran akrual (CONACC) yang bernilai negatif. Konservatisme pada dasarnya merupakan akrual yang bersifat negatif. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti telah mengalikan nilai akrual dengan negatif satu, sehingga semakin positif akrual maka semakin besar tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan. Statistik juga menunjukkan bahwa rata-rata total aset perusahaan sampel terdiri dari 12% hutang jangka panjang. Dan nilai DPO (*dividend payout ratio*) menunjukkan bahwa perusahaan sampel pada umumnya membagikan 17.6% laba perusahaan sebagai dividen kepada *shareholder*. Selain itu, dapat diamati pula bahwa pada umumnya perusahaan pada industri manufaktur menahan aset perusahaan dalam bentuk kas dan setara kas sebesar 9.6%. Sementara dari statistik deskriptif khusus dapat diamati bahwa pada umumnya perusahaan tidak melakukan *stock repurchase*. Terkait dengan pengujian efek moderasi tata kelola perusahaan, dapat diamati dari total 181 sampel, terdapat 91 sampel yang memiliki index CG relatif lebih baik dibandingkan dengan sampel lainnya.

#### b. Konservatisme dengan nilai pasar

Sama halnya dengan statistik deskriptif konservatisme ukuran akrual, pada pengukuran konservatisme dengan nilai pasar pun peneliti membaginya menjadi statistik deskriptif umum dan statistik deskriptif khusus, yang mencakup pengujian efek moderasi *stock repurchase* dan tata kelola perusahaan. Terkait rincian mengenai statistik deskriptif konservatisme nilai pasar



(CONMKT) dapat dilihat pada Panel B di Lampiran 2. Data statistik pada konservatisme nilai pasar menunjukkan hasil yang selaras dengan konservatisme ukuran akrual, yakni perusahaan rata-rata belum menerapkan prinsip laporan keuangan yang konservatif. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki rasio hutang jangka panjang terhadap total aset sebesar 11.1%. Sementara rasio dividen perusahaan adalah sebesar 17% dari labanya, dan data pun menunjukkan bahwa umumnya perusahaan menahan kas sebesar 10.3% dari total aset yang dimilikinya. Selain itu, terkait statistik deskriptif khusus, pengujian dengan menggunakan konservatisme nilai pasar pun menunjukkan bahwa perusahaan sampel rata-rata tidak melakukan *stock repurchase*. Terkait dengan tata kelola perusahaan, dari total 171 sampel, terdapat 88 sampel yang memiliki tata kelola relatif lebih baik.

#### 4.2 Analisis Pengaruh *Agency Cost of Free Cash Flow* terhadap Tingkat Konservatisme

Dalam menganalisa pengaruh *agency cost of free cash flow* terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan persamaan pada model hipotesis 1 di atas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Panel A di Lampiran 3 untuk konservatisme ukuran akrual dan Panel B untuk konservatisme nilai pasar pada lampiran 3. Dari tabel tersebut dapat diamati F-test menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen konservatisme. Dan dapat dilihat angka R-square menunjukkan nilai sebesar 13.83% pada konservatisme ukuran akrual, yang berarti 13.83% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 13.66%.

Hasil uji t-test pada kedua ukuran konservatisme menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* perusahaan terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan. Hal ini selaras dengan hipotesis 1 yang telah disusun peneliti. Dan hasil ini senada pula dengan pernyataan Jensen (1986; 1989) bahwa perusahaan yang memiliki permasalahan keagenan yang besar terkait keberadaan *free cash flow* dalam perusahaan akan menerapkan sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan LaFond dan Watts (2008) mengungkapkan bahwa konservatisme merupakan mekanisme yang berkembang secara pesat dalam merespon kebutuhan pengawasan oleh *shareholder*, yang didukung oleh pernyataan Ball dan Shivakumar (2008) yang membuktikan konservatisme menimbulkan disinsentif bagi manajer untuk menyalahgunakan *free cash flow* yang terdapat di perusahaan.

Selain itu, pada kedua ukuran konservatisme, ditemukan bahwa SIZE memiliki hubungan positif dan signifikan. Hal ini selaras dengan pernyataan Watts dan Zimmerman (1978) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka biaya politis yang dihadapinya semakin besar pula dan mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip pelaporan keuangan yang konservatif. Sementara hasil pengujian menunjukkan arah pengaruh ROA yang terbalik dengan ekspektasi arah, yakni ROA berpengaruh secara negatif dan signifikan pada level 1%. Hal dikarenakan semakin negatif akrual, maka semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan dan yang lebih lanjut mengurangi nilai ROA perusahaan (Ahmed et al, 2000). Dan secara spesifik untuk variabel kontrol konservatisme nilai pasar, hasil regresi menunjukkan bahwa hanya CURR\_RET yang berpengaruh signifikan.

#### 4.3 Analisis Efek Moderasi Kebijakan Hutang

Efek moderasi dari kebijakan hutang dapat diperoleh dengan meregresikan model hipotesis 2 di atas. Adapun hasil regresi hipotesis 2 dapat dilihat pada Lampiran 3, yang mana Panel A untuk konservatisme ukuran akrual, dan Panel B untuk konservatisme nilai pasar. Dari hasil regresi dengan menggunakan kedua ukuran konservatisme, hasil pengujian F-test menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan. Dan dapat dilihat angka R-square menunjukkan nilai sebesar 13.44% pada konservatisme ukuran akrual, yang berarti 13.44% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 13.73%.

Hasil uji t-test kedua ukuran menunjukkan bahwa sebagai variabel pemoderasi, hutang tidak berpengaruh terhadap hubungan positif antara tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan, yang bertentangan dengan hipotesis 2 yang telah disusun oleh peneliti. Hasil regresi yang menunjukkan bahwa hutang tidak berpengaruh terhadap hubungan tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan dimungkinkan terjadi karena kreditur (dalam hal ini bank) juga menghadapi masalah keagenan. Supriyanto (2006) mengemukakan bahwa pengelola bank cenderung berusaha memaksimalkan fasilitas subsidi (Program Penjamin Simpanan) melalui peningkatan risiko usaha dengan cara-cara yang tidak efisien seperti menyalurkan pinjaman kepada perusahaan dengan tidak optimal, yang mengakibatkan memburuknya kondisi keuangan bank dan membuatnya dapat memperoleh fasilitas subsidi tersebut.

#### 4.4. Analisis Efek Moderasi Kebijakan Dividen

Hasil regresi dari efek moderasi kebijakan dividen dapat diamati pada Lampiran 3. Dari hasil regresi dapat diamati bahwa F-test menunjukkan secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan. Dan R-square menunjukkan angka sebesar 14.02% untuk konservatisme ukuran akrual, yang berarti 14.02% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 13.36%.

Hasil t-test untuk hipotesis 3a dalam pada kedua ukuran menunjukkan bahwa dividen tidak mempengaruhi hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dengan *signaling theory*. Dan apabila kita mengacu pada hasil regresi yang ditemukan pada hipotesis 2, kreditur sekalipun mengalami masalah keagenan yang membuatnya cenderung bertindak untuk meningkatkan risiko usaha guna memaksimalkan subsidi. Dengan demikian, apabila kita pandang dari segi konflik antara *bondholder* dan *shareholder* sekalipun tidaklah relevan dikarenakan dari pihak *bondholder* pun tidak menuntut konservatisme laporan keuangan.

#### 4.5 Analisis Efek Moderasi *Stock Repurchase*

Hasil regresi dari efek moderasi *stock repurchase* dapat diamati pada Lampiran 3. Pada tabel tersebut, dapat diamati bahwa F-test menunjukkan secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan. Dan R-square menunjukkan angka sebesar 14.64% untuk konservatisme ukuran akrual, yang berarti 14.64% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 14.92%.

Dari hasil t-test, dapat diamati bahwa *stock repurchase* tidak berpengaruh terhadap hubungan pada hipotesis 1 ketika diuji dengan menggunakan konservatisme ukuran akrual. Hal tersebut dikarenakan *stock repurchase* bersifat fleksibel dan cenderung diterapkan oleh perusahaan dengan perlindungan investor yang lemah (Harford et al., 2008). Selain itu, di Indonesia sendiri masih sedikit perusahaan yang menerapkan *stock repurchase* dikarenakan dibutuhkan biaya yang besar. Tercatat dari tahun 2001-2007 hanya terdapat 30 kali pengumuman terkait *stock repurchase*. Akan tetapi, pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan hal yang berlawanan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena *stock repurchase* mengakibatkan cadangan kas perusahaan mengalami penurunan secara signifikan (Grullon dan Michaely,

2004), yang membuat pasar akan melakukan penyesuaian terhadap penilaian *value* perusahaan.

#### 4.6 Analisis Efek Moderasi Persistensi Kas

Terkait pengujian efek moderasi persistensi kas, hasil regresi dapat diamati pada Lampiran 3. Pada kedua tabel, hasil F-test menunjukkan secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan. Dan R-square menunjukkan angka sebesar 16.11% untuk konservatisme ukuran akrual, yang berarti 16.11% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 13.39%.

Berdasarkan hasil t-test, dapat dilihat bahwa persistensi kas perusahaan tidak mempengaruhi hubungan pada hipotesis 1 untuk kedua ukuran konservatisme. Hal tersebut dikarenakan dari data statistik, rata-rata perusahaan pada sampel memiliki rasio PERS sebesar 9.4% sementara rasio hutang jangka panjang terhadap total asetnya mencapai rata-rata 14.6%. Oleh karena itulah kebijakan perusahaan untuk secara persisten menahan kas dimungkinkan untuk mengantisipasi ketidakmampuan pelunasan hutang jangka panjang yang dimilikinya, sehingga PERS tidaklah relevan sebagai mekanisme kontrol terkait *agency cost of free cash flow*.

#### 4.7 Analisis Efek Moderasi Tata Kelola Perusahaan

Pada Lampiran 3, dapat diamati pula hasil regresi dari variabel pemoderasi tata kelola perusahaan. Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa F-test menunjukkan secara keseluruhan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan. Dan R-square menunjukkan angka sebesar 18.66% untuk konservatisme ukuran akrual, yang berarti 18.66% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sementara R-square atas pengujian dengan konservatisme nilai pasar menunjukkan angka sebesar 26.65%.

Hasil t-test menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi hubungan pada hipotesis 1. Hal tersebut dikarenakan secara rata-rata perusahaan di Indonesia masih belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dari data IICD, tercatat rata-rata tingkat konservatisme perusahaan manufaktur di Indonesia berada pada *performance level fair*, yakni pada rentang 60%-79%. Dengan demikian, tata kelola perusahaan belum dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif dalam mengatasi *agency cost of free cash flow*.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah untuk mengetahui apakah perusahaan yang memiliki *agency cost of free cash flow* tinggi (perusahaan tipe-J) akan membuat laporan keuangan yang bersifat lebih konservatif dibandingkan perusahaan tipe non-J. Sedangkan tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh efek moderasi hutang (H2), dividen (H3a), *share repurchase* (H3b), persistensi perusahaan dalam menahan kas (H4), dan tata kelola perusahaan (H5) terhadap hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, maka peneliti menyusun model penelitian yang menghubungkan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan, tingkat *agency cost of free cash flow*, serta juga turut memasukkan komponen variabel moderasi dalam model.

Dalam penelitian ini digunakan dua ukuran konservatisme, yakni ukuran akrual dan nilai pasar. Hasil penelitian secara umum menunjukkan pada dasarnya tingkat *agency cost of free cash flow* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap disusunnya laporan keuangan yang bersifat konservatif. Akan tetapi, terkait pengujian dengan variabel moderasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel pemoderasi yang sesuai dengan hipotesis yang disusun oleh peneliti. Seluruh model pengujian dengan menggunakan variabel moderasi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh variabel pemoderasi hutang, dividen, *share repurchase*, persistensi perusahaan dalam menahan kas, serta tata kelola perusahaan terhadap hubungan antara tingkat *agency cost of free cash flow* dan tingkat konservatisme laporan keuangan pada perusahaan tipe-J dan tipe non-J.

## 6. Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni:

- (1) Pendeknya rentang waktu periode penelitian, yakni tahun 2007-2008 dan 2010. Padahal menurut Richardson et al., (2005), akrual memiliki kecenderungan untuk membalik pada periode satu hingga dua tahun, sehingga dalam perhitungan konservatisme dengan ukuran akrual peneliti merata-ratakan nilai konservatisme selama tiga tahun. Dengan rentang waktu yang relatif pendek, maka dimungkinkan hasil penelitian yang diperoleh kurang menunjukkan realita yang sebenarnya. Oleh karena itulah penelitian berikutnya dapat memperbaikinya dengan mengambil periode penelitian yang lebih panjang.

(2) Penelitian ini hanya menggunakan dua ukuran konservatisme, yakni ukuran akrual dan nilai pasar. Padahal banyak model penelitian lainnya seperti model Basu yang menggunakan pergerakan harga saham ataupun model *discretionary accrual*. Oleh karena itulah, penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan model lain untuk melihat apakah hasil yang diperoleh sama dengan temuan peneliti atau tidak.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, A. S., Billings, B. K., Morton, R. M., Stanford-Harris, M., 2002. The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs. *The Accounting Review* 77, 377-400.
- Ahmed, A. S., Duellman, S., 2007. Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis, *Journal of Accounting and Economics*.
- Ball, R. A. Y., and Shivakumar, L. 2006. The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition. *Journal of Accounting Research*, 44(2): 207-242.
- Beaver, W. H., Ryan, S. G., 2000. Biases and Lags in Book Value and Their Effects on The Ability of The Book-to-Market Ratio to Predict Book Return on Equity. *Journal of Accounting Research* 38, 127-148.
- Chu, Junhong, 2011. Agency Cost under the Restriction of Free Cash Flow, *Journal of Service Science and Management* 4, 79-85.
- Fatma, Ben Moussa and Jameleddine Chichti, 2011. Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach, *Journal of Management Research*.
- F.A. Gul, J.S.L Tsui, 1998. A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit pricing, *Journal of Accounting and Economics* 24.
- Fitriany, dan Haniati, Sri. 2010. Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Givoly, D., Hayn, C., 2000. The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? *Journal of Accounting and Economics* 29, 287-320.
- Givoly, D., Hayn, C., 2002. Rising Conservatism: Implications for Financial Analysis. *Financial Analysts Journal* (January/February): 56-74.
- Grullon, Gustavo., and Michaely, Ron., 2002. Dividends, Share Repurchases, and The Substitution Hypothesis. *The Journal of Finance*.
- Hyung Ha, Joo., 2011. Agency Costs of Free Cash Flow and Conditional Conservatism. *Working Paper, Oklahoma State University*.
- Iancu, Diana Christina and Radulescu, Georgiana, 2011. Ownership Dynamics: How ownership changes hands over time and the determinants of these changes, *BI Norwegian Business School*.
- Jagannathan, Murali., Stephens, Clifford P., and Weisbach, Michael S., 1999. Financial Flexibility and The Choice between Dividends and Stock Repurchases, *Journal of Financial Economics*.
- Jensen, Michael C and William H. Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*.
- LaFond, Ryan., and Sugata Roychowdhury., 2008. Managerial Ownership and Accounting Conservatism. *Working Paper, Massachusetts Institute of Technology*.
- Lee, Edward, and Powell, Ronan., 2007. Excess Cash Holdings and Shareholder Value, *Working Paper, University of New South Wales*.
- Mieta Mulia, Rahma, 2009. Pengaruh Stock Repurchase terhadap Stockholder, Bondholder, dan Value Perusahaan di Indonesia Periode 2001-2007. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



- Nasih, Moh., dan Hudaya, Robith., 2011. Konservatisme Akuntansi dan Konflik Bondholder-Shareholder pada Perusahaan Non-Kuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 22, 193-202.
- Qiang Xingrong, 2003. The Economic Determinants of Self-imposed Accounting Conservatism. *Dissertation*. State University of New York at Buffalo (January): 1-41.
- Richardson, Scott, 2006. Over-investment of free cash flow, *Springer Science*.
- Richardson, S. A., Sloan, R. G., Soliman, M. T., Tuna, I. A., 2005. Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices. *Journal of Accounting and Economics* 39, 437-485.
- Roychowdhury, S., Watts, R. L., 2006. Asymmetric Timeliness of Earnings, Market-to-Book and Conservatism in Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*.
- Sari, Cynthia., dan Adhariani, Desi., 2008. Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, *Working Paper, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Supriyatno. 2006. Pengaruh Corporate Governance dan Bentuk Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia Periode 1999-2004. Ph.D. Dissertation. Gadjah Mada University.
- Thomson Financial Datastream and Worldscope, 2011. The differential properties of unconditional vs conditional conservatism: The case of R&D accounting.
- Watts, Ross L, 2003. Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Working Paper, Massachusetts Institute of Technology*.
- Watts, Ross L, and Zimmerman, Jerold L. 1978. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review, Vol LIII, No. 1*.
- Wardhani, Ratna, 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance*. *Working Paper, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Wulandini, Dwinita., dan Zulaikha, 2012. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010), *Diponegoro Journal of Accounting* 1, 1-14.



**LAMPIRAN 1**  
**OPERASIONALISASI VARIABEL**

Nama Variabel	Operasionalisasi Variabel
<b>Konservatisme</b>	<p><b>1. Ukuran Akrua</b> Rata-rata dari laba sebelum extra-ordinary items dikurangi dengan arus kas operasi ditambah biaya depresiasi/amortisasi. Selanjutnya angka tersebut dikalikan dengan (-1) dan dideflasikan dengan rata-rata total aktiva. Nilai yang digunakan sebagai proksi adalah nilai rata-rata selama tiga tahun dengan nilai tengah pada periode t.</p>
	<p><b>2. Ukuran Nilai Pasar</b> Rasio book-to-market perusahaan. Nilai tersebut dikali dengan (-1) agar nilai positif mencerminkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi.</p>
<i>Agency Cost of Free Cash Flow</i>	Variabel <i>dummy</i> , nilai = 1 (0) jika <i>FCF</i> berada di atas (di bawah) nilai median industri dan <i>GROWTH</i> berada di bawah (di atas) nilai median.
<b>Ukuran Perusahaan</b>	Logaritma natural dari nilai pasar ekuitas.
<b>Profitabilitas</b>	Laba sebelum extra-ordinary items dibagi dengan total aset.
<i>Leverage</i>	Total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan.
<i>Dividen Payout</i>	Persentase dari laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen
<i>Stock Repurchase</i>	Nilai bersih dari <i>stock repurchase</i> setelah dikurangi <i>stock issuance</i> , kemudian dibagi dengan laba sebelum extra-ordinary items.
<b>Persistensi Kas</b>	Rata-rata rasio kas dan setara kas, yakni jumlah total rasio kas dan setara kas periode t dan t-1 dibagi 2.
<b>Tata Kelola Perusahaan</b>	Variable <i>dummy</i> , yang mana memiliki nilai = 1 (0) jika perusahaan memiliki CG index di atas (di bawah) nilai median industri.

**LAMPIRAN 2  
STATISTIK DESKRIPTIF**

**Panel A:** Statistik Deskriptif Konservatisme Ukuran Akrua

Variabel	Statistik Deskriptif Umum					Statistik Deskriptif Stock Repurchase					Statistik Deskriptif Tata Kelola Perusahaan				
	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N
CONACC	-0.0181	0.072	-0.256	0.213	333	-0.024	0.068	-0.256	0.182	310	-0.026	0.069			181
LEV	0.12	0.163	0	0.988	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	0.176	0.346	-0.098	2.057	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPUR	-	-	-	-	-	-0.25	1.473	-11.409	1.243	310	-	-	-	-	-
PERS	0.096	0.1	0.001	0.42	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MVE	4,268,512	17,046,822	4,625	213,550,500	333	4,545,569	17,619,683	4,625	213,550,500	310	5,893,411	21,931,783	5,807	213,550,500	181
ROA	0.038	0.12	-0.469	0.389	333	0.039	0.119	-0.469	0.389	310	0.047	0.109	-0.242	0.371	181
AGENCY	1 = 74 (25.225%)		0 = 249 (74.775%)		333	1 = 83 (26.774%)		0 = 227 (73.226%)		310	1 = 41 (22.652%)		0 = 140 (77.348%)		181
GOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 = 91 (49.742%)		0 = 90 (50.256%)		181

**Panel B:** Statistik Deskriptif Konservatisme dengan Nilai Pasar

Variabel	Statistik Deskriptif Umum					Statistik Deskriptif Stock Repurchase					Statistik Deskriptif Tata Kelola Perusahaan				
	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N
CONMKT	-1.136	2.057	-9.091	9.091	293	-1.069	1.959	-7.143	9.091	277	-1.285	1.305	-5.882	-0.017	171
LEV	0.111	0.157	0	0.988	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	0.17	0.284	-0.039	1.31	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPUR	-	-	-	-	-	-0.188	1.07	-7.851	-0.309	277	-	-	-	-	-
PERS	0.103	0.104	0.001	0.42	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MVE	4,599,918	18,102,439	10,182	213,550,500	293	4,840,174	18,579,558	10,638	213,550,500	277	6,261,535	22,632,812	11,500	213,550,500	171
ROA	0.046	0.113	-0.396	0.389	293	0.046	0.112	-0.396	0.389	277	0.054	0.102	-0.197	0.371	171
CURR_RET	0.806	2.301	-1.656	14.133	293	0.815	2.335	-1.656	14.133	277	0.503	1.613	-1.546	5.841	171
LAG_RET	-1.525	5.842	-23.956	20.629	293	-1.37	5.899	-23.956	20.629	277	-1.119	6.75	-23.956	20.629	171
AGENCY	1 = 74 (25.256%)		0 = 219 (74.744%)		293	1 = 73 (26.354%)		0 = 204 (73.646%)		277	1 = 40 (23.392%)		0 = 131 (76.608%)		171
GOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 = 88 (51.462%)		0 = 83 (48.538%)		171

**LAMPIRAN 3  
HASIL REGRESI**

**Panel A:** Hasil Regresi Konservatisme Ukuran Akrua

Variabel	Ekspektasi Tanda	Hipotesis1		Hipotesis2		Hipotesis3a		Hipotesis3b		Hipotesis4		Hipotesis5	
		Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi
Constant	?	-0.076247	0.002	-0.0770616	0.002	-0.0734797	0.002	-0.1210128	0	-0.0899781	0	-0.1266225	0
AGENCY	+	0.018363	**0.016	0.0205339	**0.026	0.011151	0.135	0.0211791	***0.005	0.0164448	*0.093	0.0310698	**0.030
LEV	-	-	-	-0.0085291	0.375	-	-	-	-	-	-	-	-
AGEN X LEV	-	-	-	-0.0229629	0.339	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	0.0044728	0.365	-	-	-	-	-	-
AGEN X DPO	-	-	-	-	-	0.0296113	0.11	-	-	-	-	-	-
REPUR	-	-	-	-	-	-	-	0.0020253	0.259	-	-	-	-
AGEN X REPUR	-	-	-	-	-	-	-	-0.0015623	0.376	-	-	-	-
PERS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1391822	***0.001	-	-
AGEN X PERS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0217802	0.392	-	-
GOV	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0170331	0.117
AGEN X GOV	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0144369	0.481
SIZE	+	0.0110599	***0.009	0.0114313	***0.008	0.0104988	**0.013	0.0177108	***0.000	0.0116298	***0.006	0.0172871	***0.001
ROA	+	-0.2374047	***0.000	-0.2431021	***0.000	-0.2477456	***0.000	-0.2218895	***0.000	-0.2818605	***0.000	-0.2434943	***0.000
F-test Sign		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Adjusted Square		0.1383		0.1344		0.1402		0.1464		0.1611		0.1866	
***Signifikan pada level 1%													
**Signifikan pada level 5%													
*Signifikan pada level 10%													
Note: Signifikan dalam one-tail, kecuali untuk variabel GOV dan AGEN X GOV													

**Panel B:** Hasil Regresi Konservatisme Nilai Pasar

Variabel	Ekspektasi Tanda	Hipotesis1		Hipotesis2		Hipotesis3a		Hipotesis3b		Hipotesis4		Hipotesis5	
		Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi
Constant	?	-5.38121	0.000	-5.593291	0.000	-5.237454	0.000	-4.898982	0.000	-5.203957	0.000	-3.908597	0.000
AGENCY	+	0.3829374	*0.072	0.3367184	0.142	0.3707517	0.126	0.3183892	0.115	0.1845119	0.316	0.5271009	**0.044
LEV	-	-	-	-1.143891	*0.090	-	-	-	-	-	-	-	-
AGEN X LEV	-	-	-	0.0438566	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	0.4765307	0.189	-	-	-	-	-	-
AGEN X DPO	-	-	-	-	-	-0.0903575	0.458	-	-	-	-	-	-
REPUR	-	-	-	-	-	-	-	0.0727124	0.158	-	-	-	-
AGEN X REPUR	-	-	-	-	-	-	-	-0.1604571	*0.070	-	-	-	-
PERS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.35532	0.162	-	-
AGEN X PERS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	1.871151	0.214	-	-
GOV	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4147899	0.109
AGEN X GOV	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.4681041	0.223
SIZE	+	0.7490717	***0.000	0.8156044	***0.000	0.7127762	***0.000	0.6777358	**0.000	0.7390451	***0.000	0.3859467	***0.002
ROA	+	-4.913272	***0.000	-5.397557	***0.000	-5.248383	***0.000	-5.200976	***0.004	-4.664123	***0.000	0.235225	0.399
CURR_RET	+	0.1400064	***0.002	0.138507	***0.003	0.1467207	***0.002	0.1383192	***0.000	0.135219	***0.004	0.2722953	***0.000
LAG_RET	+	-0.0147422	0.222	-0.0126692	0.257	-0.0145116	0.228	0.0143773	0.219	-0.0151193	0.217	0.0005338	0.477
F-test Sign		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Adjusted Square		0.1366		0.1373		0.1336		0.1492		0.1339		0.2665	
***Signifikan pada level 1%													
**Signifikan pada level 5%													
*Signifikan pada level 10%													
Note: Signifikan dalam one-tail, kecuali untuk variabel GOV dan AGEN X GOV													

## Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Potensi Pertumbuhan Laba Perusahaan Keluarga

MIRANTI MARTIN

ANCELLA ANITAWATI HERMAWAN\*

Universitas Indonesia

**Abstrak:** Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh peranan dividend payout ratio dalam memprediksi pertumbuhan laba perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan regresi berganda dengan data panel terhadap 129 perusahaan yang terdaftar pada BEI periode 2006 sampai dengan 2009 dan membagi rentang waktu penelitian menjadi 1, 3 dan 5 tahun. Penelitian ini juga menguji apakah adanya kepemilikan keluarga akan memperlemah pengaruh dividen terhadap pertumbuhan laba. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah perubahan peraturan pajak penghasilan atas dividen di tahun 2008 akan memperlemah pengaruh dividen terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dividend payout ratio memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba di masa yang akan datang untuk jangka waktu pendek dan pengaruh ini melemah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh positif kebijakan dividen terhadap pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kemudian, perubahan peraturan pajak penghasilan atas dividen memperlemah pengaruh positif kebijakan dividen terhadap pertumbuhan laba perusahaan hanya dalam jangka waktu menengah.

**Kata kunci:** kebijakan dividen, pertumbuhan laba, perusahaan keluarga, pajak penghasilan atas dividen

---

\* Corresponding author: ancella\_hermawan@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Dividen merupakan *cash payment* utama untuk para pemegang saham, semakin besar *expected future stream* dari dividen maka akan semakin besar *value* dari saham tersebut (Carlson, 2001). Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk ‘laba ditahan’ guna pembiayaan investasi di masa mendatang (Nasution, 2004). Laba yang dibagikan sebagai dividen akan mengurangi laba ditahan yang selanjutnya mengurangi total sumber dana internal atau *internal financing*.

Kebijakan dividen adalah salah satu isu yang penting dan kontroversial dalam *corporate finance* karena selalu dikaitkan dengan pembiayaan perusahaan dan keputusan investasi (Gupta dan Banga, 2010). Di satu sisi, dividen dapat meningkatkan *market value* dari perusahaan tapi di sisi lainnya juga dapat mengurangi ketersediaan dalam *internal funds* dan menambah ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar. Kebijakan dividen juga membentuk dasar dari perhitungan teori finansial lainnya seperti *asset pricing*, *capital structure*, merger dan akuisisi juga *capital budgeting*.

Lintner (1966) berpendapat bahwa investor lebih suka menerima dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Investor memandang *dividend yield* lebih pasti daripada *capital gains yield*. Satu burung di tangan (dividen saat ini) lebih berharga daripada seribu burung di udara (*capital gain* di masa yang akan datang). Miller dan Rock (1985) berpendapat bahwa kenaikan dividen yang lebih besar dari yang sebelumnya merupakan suatu sinyal kepada investor bahwa manajemen perusahaan melihat prospek yang lebih baik untuk perusahaan di masa yang akan datang. Sebaliknya, penurunan dividen atau kenaikan dividen di bawah kenaikan normal diyakin investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di masa yang akan datang.

Abor dan Bokpin (2010) mengatakan bahwa dividen digunakan manajemen sebagai sinyal atas profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Dividen dibayarkan bahkan saat ada kesempatan berinvestasi yang menguntungkan. Investor juga dapat menggunakan pengumuman dividen sebagai informasi untuk menilai harga saham. Studi ini juga menunjukkan hasil bahwa manajer sangat memperhatikan kontinuitas dari dividen. Kontinuitas menunjukkan kestabilan dalam pendapatan perusahaan dan pertumbuhan yang konstan.

Dari sisi *capital structure*, “*Pecking Order Theory*” (Myers, 1984) mengatakan bahwa perusahaan dengan kesempatan *growth* yang tinggi sebaiknya memilih sumber dana internal dibandingkan dengan sumber dana eksternal. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *dividend payout* dengan *future earnings growth*. Gordon (1962) mengatakan bahwa *dividend growth* yang konstan menunjukkan bahwa dengan *expected return* yang konstan, *dividend payout* yang tinggi akan diikuti oleh P/E yang tinggi atau *expected earnings growth* yang rendah. Brav *et al.* (2005) memperkuat temuan Lintner (1956) bahwa manajer hanya akan meningkatkan dividen bila *earnings* diperkirakan akan menguat dimasa yang akan datang. Miller dan Modigliani (1961) mengatakan bahwa dalam teori tidak relevan (*irrelevance theory*) investasi yang tidak mengalami perubahan dengan *expected return* yang konstan, maka *dividend payout* yang tinggi akan membawa kepada *growth* yang lebih rendah.

Nissim dan Ziv (2001) menemukan bahwa peningkatan dividen memberikan sinyal untuk abnormal laba di masa yang akan datang. Hal ini diperkuat oleh Arnott dan Asness (2003), yang meneliti hubungan antara *payout* dengan *future earning growth* dengan fokus terhadap *market portfolio*, yakni *proxy SP 500 index*. Penelitian ini menemukan bahwa *future earnings growth* lebih terasosiasikan dengan *dividend payout* yang tinggi dibandingkan

dengan *dividend payout* yang rendah. Vivian (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara *dividend payout ratio* dengan *future earnings growth*.

Hubungan antara *dividend payout ratio* dan *future earnings growth* berbeda antara perusahaan dalam penelitian Arnott dan Asness (2003) dengan perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) berukuran lebih kecil, *less profitable* dan lebih *growth oriented* daripada perusahaan yang termasuk dalam S&P 500 *composite index* yang dijadikan *sample* dalam penelitian tersebut. Struktur kepemilikan juga adalah faktor yang dominan dalam perusahaan yang *listing* di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang jenis perusahaannya didominasi oleh perusahaan keluarga (Hanazaki dan Liu, 2006). Kebijakan dividen cenderung berpengaruh terhadap harga saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan yang tinggi akan memilih untuk membayar dividen yang rendah sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusional cenderung memilih untuk memberikan dividen yang tinggi untuk meningkatkan kontrol terhadap manajemen perihal pembiayaan eksternal perusahaan.

Preferensi pembayaran dividen juga dipengaruhi oleh pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, tarif pajak di Indonesia bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Tarif pajak dividen terbagi dua: tarif pajak dividen untuk pemegang saham institusional dan individual. Terjadi perubahan perpajakan mengenai dividen di tahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah mengatur bahwa atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dikenai PPh final dengan tarif maksimal 10%. Pajak dividen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berubah dari 15% menjadi 10%.



Berdasarkan uraian tersebut terdapat berbagai permasalahan yang ingin dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah *dividend payout ratio* (DPR) mempengaruhi *future earnings growth* perusahaan, untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga akan dapat berpengaruh terhadap hubungan antara kebijakan dividen perusahaan dan *future earnings growth* perusahaan dan untuk mengetahui apakah periode peraturan pajak pendapatan atas dividen yang berbeda akan dapat berpengaruh terhadap hubungan antara kebijakan dividen perusahaan dan *future earnings growth* perusahaan.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1. Hubungan antara Dividend Payout Ratio dan Earnings Growth

Zhou dan Ruland (2006) melakukan analisa *company by company* dengan sampel perusahaan selama periode 50 tahun dan menemukan hubungan positif yang kuat antara pembayaran dividen saat ini terhadap *future earnings growth*. Hubungan yang positif ini lebih menonjol untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh yang terbatas dan cenderung untuk *overinvestment*. Model penelitian ini meneliti *earnings growth* menggunakan *time horizon* 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Nissim dan Ziv (2001) menemukan bahwa peningkatan dividen mengindikasikan *profitability* di masa yang akan datang meskipun pengurangan dividen tidak berkorelasi dengan *future earnings*. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan dividen mempengaruhi secara positif *earnings level* dan perubahannya dalam 2 tahun setelah pengumuman dividen.

Meskipun studi empiris banyak yang fokus di level mikro atau level perusahaan tetapi terdapat pula studi yang meneliti konten kebijakan dividen di level makro dan juga memiliki hasil yang positif. Arnott dan Assnes (2003) menggunakan data dari *aggregate S&P 500 index* dan menemukan bahwa *future earnings growth* lebih cepat apabila *payout ratio* saat ini tinggi dan rendah apabila *payout ratio* juga rendah. Penelitian tersebut dilakukan dengan data 130 tahun, dibagi dalam beberapa sub-period, didominasi oleh *aggregate* perusahaan besar

dengan bisnis yang sudah terbangun dengan baik dan menggunakan beberapa variasi pengujian dengan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya.

Gwylim *et al.* (2004) melakukan penelitian ke 11 market internasional termasuk Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Portugal, Spanyol, Yunani, Swiss dan Inggris menemukan bahwa meskipun institusionalnya berbeda, pajak dan kondisi legalitasnya berbeda antar negara, bukti internasional mendukung penelitian Arnott dan Assnes (2003) bahwa substansi investasi kembali laba yang ditahan tidak membawa kepada *future earnings growth* yang lebih cepat. Penelitian ini juga mengatakan bahwa berinvestasi di negara dengan *payout ratio* yang tinggi menghasilkan *earnings growth* yang juga tinggi dibandingkan berinvestasi di negara dengan *payout ratio* yang rendah.

Vivian (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa empat teori utama yang berkembang antara hubungan antara *dividend payout ratio* dengan *earnings growth* antara lain:

- *Perceived Wisdom* dan Teori Investasi optimal

Teori ini sering digunakan oleh para praktisi bahwa *payout ratio* yang rendah mengindikasikan *future earnings growth* yang tinggi (Vivian, 2006). Khususnya karena perusahaan tampak menahan proporsi tinggi labanya guna berinvestasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan bagi perusahaan. Teori ini berlaku dimana terdapat *financial constraints* yang menghalangi perusahaan mendapatkan pendanaan secara eksternal dan dividen hanyalah sisa laba setelah manajer menentukan kebijaksanaan dividen yang optimal. Teori ini juga menyatakan bahwa apabila hubungan antara *payout* dan *earnings growth* tidak negatif, maka hal itu dikarenakan pendanaan eksternal telah tersedia atau manajer mengikuti kebijakan investasi yang sub-optimal.

- Teori *Over Investment*

Teori '*empire building*' oleh Jensen (1986) mengatakan bahwa perusahaan mungkin *over invest* apabila CEO kurang dimonitor pemegang saham. Terkadang perusahaan mempertahankan jumlah kelebihan kas yang dapat digunakan manajer untuk melakukan proyek investasi yang mendukung status perusahaan atau manajemen. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan manajer saat laba lebih tinggi daripada biasanya dan oleh karena itu *payout ratio* lebih rendah dari normal. Namun terdapat kemungkinan bahwa keputusan investasi perusahaan menyimpang karena CEO yang *over confidence* (Tate & Malmendier, 2005). Apabila CEO terlalu yakin dan terlalu optimis akan membawa *error* pada ekspektasi mereka terhadap *future payoffs* dari proyek-proyek investasi yang ada. Singkatnya, manajer mungkin akan *over optimistic* selama periode dimana *earnings growth* saat ini sedang tinggi dan oleh karena itu *payout ratio* akan rendah.

- *Market* yang kompetitif/ teori *mean reversion*

Penjelasan untuk hubungan positif antara *payout ratio* dan *earnings growth* datang dari teori market yang kompetitif (Fama & Fench, 2001). *Payout ratio* dibawah rata-rata industri dapat dikarenakan oleh laba sementara yang tinggi di atas normal dalam industri tersebut. Dengan banyaknya perusahaan baru yang memasuki market maka kompetisi terjadi dan laba yang abnormal tersebut akan menjadi rendah atau negatif di masa yang berikutnya. Peramalan oleh *payout ratio* mengaitkan rata-rata pengembalian *earnings* dengan dividen yang dibagikan secara terus menerus.

- Teori *Signaling*

Seperti dinyatakan oleh Miller dan Rock (1985) bahwa terdapat informasi asimetrik antara manajemen dan pemegang saham bahwa dividen dapat digunakan sebagai 'sinyal' atas ekspektasi manajerial untuk *future earnings growth* (Vivian, 2006). Alhasil, saat manajer mengharapkan *earnings* akan naik di masa yang akan datang, mereka akan meningkatkan

dividen untuk mengisyaratkan investor. Dapat disimpulkan bahwa *dividend payout ratio* yang tinggi adalah sinyal bahwa *future earnings* diharapkan juga akan tinggi. Oleh sebab itu, hubungan antara *payout ratio* dan *future earnings growth* adalah positif.

## 2.2 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Future Earnings Growth Perusahaan Keluarga

Berdasarkan struktur kepemilikannya, perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu : perusahaan yang struktur kepemilikannya *widely held*, perusahaan keluarga, perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik institusi keuangan, dan perusahaan milik institusi non keuangan (Hanazali dan Liu, 2006). Perusahaan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Hermawan (2009) yakni perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga adalah perusahaan dengan kepemilikan keluarga (bukan yayasan, bukan perusahaan terbuka, bukan perusahaan keuangan, dan bukan publik) dalam perusahaan > 50%.

Sugiarto (2007) mengatakan bahwa *agency problem* yang terdapat di perusahaan keluarga sangat minim karena terbentuk sinergi antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham sehingga perusahaan dapat tumbuh secara optimal. *Agency problem* yang muncul pada jenis perusahaan keluarga biasanya hanya antara pemegang saham mayor dan pemegang saham minor. Gama dan Galvao (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa karakter perusahaan keluarga adalah *dividend payout* yang tinggi serta distribusi kembali keuntungan perusahaan kepada *stakeholders*.

Gama dan Galvao (2012) menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah bentuk organisasi yang paling efisien karena sedikitnya pemisahan antara kepemilikan, kontrol dan mitigasi informasi asimetrik. Posisi ekuitas dan manajemen kontrol yang terkonsentrasi disertai dengan keberadaan keluarga sebagai *founder* perusahaan menawarkan posisi yang menguntungkan bagi keluarga untuk mengawasi bisnisnya. Beberapa literatur mengatakan bahwa kepemilikan keluarga mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi dan

konsekuensinya terhadap *performance* dan *value* perusahaan. Fama dan Jensen (1983) mengungkapkan bahwa tidak adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen membawa perusahaan pada orientasi bisnis yang positif dalam jangka panjang. Namun, perbedaan antara kepentingan anggota keluarga dan konflik peranan dapat menimbulkan perilaku yang mengabaikan kepentingan perusahaan sehingga efek dari kepemilikan keluarga tetap menjadi isu yang diperdebatkan.

Meskipun perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga cenderung memberikan dividen yang tinggi, namun kebijakan dividen yang tinggi belum tentu mencerminkan *future earnings growth* yang tinggi pula. Terdapat kepentingan-kepentingan lain dibalik pembagian dividen seperti yang dinyatakan oleh Gama dan Galvao (2012) bahwa konflik kepentingan yang ada pada perusahaan keluarga adalah *agency problem* tipe II dimana pemegang saham utama yakni keluarga menggunakan posisinya untuk mengontrol perusahaan dan mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak dipikirkan. Anderson dan Reeb (2003) menambahkan bahwa seringkali manajer dan pemegang saham dalam perusahaan keluarga adalah orang yang sama, oleh karena itu klaim residual atas *cost* dan pendapatan berasal dari aksi yang dilakukannya sendiri.

### 2.3 Pengenaan Pajak atas Dividen sebagai *Cost of Signaling*

Terjadi perdebatan dari sisi teori dan literatur empiris mengenai implikasi pajak atas dividen terhadap *equity value*. Millier dan Modigliani (1961) mengatakan bahwa perbedaan aturan pajak atas dividen dan *capital gain* memiliki potensi untuk membuat *value* dari dividen tersebut relevan. Meskipun demikian, *clienteles effect* dapat saja terjadi dan menyebabkan perusahaan menarik minat investor yang kepentingannya atas dividen sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Saham dengan *dividend yield* yang tinggi menarik investor dengan golongan pajak atas dividen yang rendah dan berlaku sebaliknya, saham

dengan *dividend yield* yang rendah menarik investor dengan golongan pajak atas dividen yang yang tinggi.

Bernheim dan Wantz (1995) mengatakan bahwa dalam mekanisme dividen sebagai sinyal, semakin tinggi *cost of dividend*, semakin besar konten informasinya, dan oleh karena itu, semakin besar reaksi *market* terhadap informasi atas dividen tersebut. Teori ini disebut dengan *bang-for-the-buck*. Dalam arti kata lain, mekanisme dividen sebagai sinyal yang digunakan perusahaan di masa yang akan datang sangat tergantung pada *cost of signaling*. *Signaling cost* yang dimaksud di sini adalah besarnya pajak yang dikenakan atas dividen. Li (2007) menyatakan bahwa pengenaan pajak atas dividen yang lebih besar relatif terhadap *capital gain*, berpengaruh secara marjinal terhadap dividen sebagai sinyal positif dan efek *agency cost* yang disebabkan. Lebih lanjut, keberadaan investor institusional meringankan efek negatif pajak atas dividen.

### 3. Pengembangan Hipotesis

Kebijakan dividen merupakan keputusan pihak manajemen tentang besar kecilnya jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham (Kahar, 2007). Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan meliputi dua komponen dasar, yaitu : *Dividend payout ratio* (DPR) merupakan perbandingan antara dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan *earnings* dari perusahaan tersebut dan stabilitas dividen dari waktu ke waktu yang merupakan daya tarik bagi investor yang menginginkan kepastian (*risk averse*). Meskipun dividen mengurangi ketersediaan dana perusahaan untuk berinvestasi, beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara *dividend payout* dengan *future earning growth*. Menurut Abor dan Bokpin (2010), dividen digunakan manajemen sebagai sinyal atas profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Konsisten dengan teori *signaling*, dividen dibayarkan bahkan saat ada kesempatan berinvestasi yang menguntungkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis mengenai

pengaruh besarnya *dividend payout ratio* terhadap *future earnings growth* perusahaan sebagai berikut:

**H1a** : Tingkat *dividend payout ratio (DPR)* berpengaruh positif terhadap *future earnings growth* perusahaan.

Kepemilikan keluarga turut mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi dan konsekuensinya terhadap *performance* dan *value* perusahaan. Gama dan Galvao (2012) mengungkapkan penelitian yang lebih baru bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi justru menghilangkan permasalahan *free-riding*, *agency cost* yang minim dan membuat manajer mengawasi dengan lebih mudah dan oleh karena itu *performance* perusahaan yang positif. Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga cenderung memberikan dividen yang tinggi, lebih *profitable*, terkonsentrasi terhadap pencapaian *earnings* tetapi memiliki *growth opportunities* yang lebih sedikit. Namun kebijakan dividen yang besar belum tentu mencerminkan *future earnings growth* yang besar pula. Terdapat kepentingan-kepentingan lain dibalik pembagian dividen seperti yang dinyatakan oleh Gama dan Galvao (2012) bahwa konflik kepentingan yang ada pada perusahaan keluarga adalah *agency problem* tipe II dimana pemegang saham utama yakni keluarga menggunakan posisinya untuk mengontrol perusahaan dan mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap hubungan antara kebijakan dividen perusahaan dan *future earnings growth* perusahaan sebagai berikut:

**H2a** : Kepemilikan keluarga pada tingkat pengendali perusahaan akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio (DPR)* terhadap *future earnings growth* perusahaan.

Peraturan perpajakan membedakan pendapatan dividen (pajak dividen) dengan pendapatan *capital gain* dimana pengenaan pajak tersebut akan mengurangi jumlah bersih



yang diterima investor. Adanya perubahan peraturan pajak penghasilan atas dividen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan PPh final dengan tarif maksimal 10% dan bersifat final. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2010. Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, PPh atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dikenakan tarif 15%.

Peraturan pajak dengan prosentase yang lebih kecil diharapkan mendorong *behavior* perusahaan untuk membagikan dividen kas. Namun dividen kas yang dibagikan lebih dikarenakan karena tarif pajak pendapatan atas dividen yang lebih rendah bukan karena mekanisme dividen sebagai sinyal. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh DPR terhadap *future earnings growth* perusahaan lebih lemah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis mengenai perubahan pajak pendapatan atas dividen di tahun 2008 terhadap hubungan pengaruh antara *dividend payout ratio* (DPR) perusahaan dan *future earnings growth* perusahaan sebagai berikut:

**H3a :** *Periode pajak pendapatan atas dividen yang berbeda akan memperlemah pengaruh positif dividend payout ratio (DPR) terhadap future earnings growth perusahaan.*

## 4. Metode Penelitian

### 4.1. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu pengaruh *dividend payout ratio* terhadap *future earnings growth* perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan berbagai variabel untuk menunjukkan *dividend payout ratio* bagi *future earnings growth* perusahaan. Model penelitian ini dikembangkan dari model penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Ruland (2006). Untuk mengetahui



apakah tingkat *dividend payout ratio (DPR)* berpengaruh positif terhadap *future earnings growth* perusahaan digunakan model penelitian untuk hipotesis pertama sebagai berikut :

$$EG_{0,t} = \beta_0 + \beta_1 DPR_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 CFFO_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 PBV_{it} + \beta_7 PEG_{-t,0} + \varepsilon_{it}$$

Sedangkan untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio (DPR)* terhadap *future earnings growth* perusahaan menggunakan model penelitian untuk hipotesis kedua sebagai berikut:

$$EG_{0,t} = \beta_0 + \beta_1 DPR_{it} + \beta_2 FAM_{it} + \beta_3 DPR \times FAM_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 CFFO_{it} + \beta_7 LEV_{it} + \beta_8 PBV_{it} + \beta_9 PEG_{-t,0} + \varepsilon_{it}$$

Dan

untuk mengetahui apakah periode pajak pendapatan atas dividen yang berbeda memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio (DPR)* pada *future earnings growth* perusahaan menggunakan model penelitian untuk hipotesis ketiga sebagai berikut:

$$EG_{0,t} = \beta_0 + \beta_1 DPR_{it} + \beta_2 POST_{it} + \beta_3 DPR \times POST_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 CFFO_{it} + \beta_7 LEV_{it} + \beta_8 PBV_{it} + \beta_9 PEG_{-t,0} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$EG_{0,t}$  : *Earnings growth*, dihitung sebagai *compounded annual earnings growth* untuk *common shareholder* dari tahun 0 ke tahun ke t, dimana *growth* dihitung dalam periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun ( $t= 1,3$  atau  $5$ ).

$DPR_{it}$  : Besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham pada tahun penelitian yang dibagi dengan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan pada akhir tahun penelitian.

$SIZE_{it}$  : *Size Of The Firm* yang diukur dengan menghitung nilai log dari *net total asset* pada akhir tahun penelitian.

$ROA_{it}$  : *Return On Asset (ROA)* yang dihitung dari *earnings* pada tahun penelitian dibagi dengan total asset pada akhir tahun penelitian.

$CFFO_{it}$  : Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun penelitian yang distandarkan dengan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun penelitian.

$LEV_{it}$  : *Leverage*, besarnya pinjaman yang dilakukan perusahaan yang dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun penelitian.

$PBV_{it}$  : *Market To Book Ratio* pada akhir tahun penelitian.

$PEG_{t,0}$  : *Past Earnings Growth*, dihitung sebagai *compounded annual earnings growth* untuk *common shareholder* dari tahun  $-t$  ke tahun ke 0, dimana *growth* dihitung dalam periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun ( $t= 1,3$  atau  $5$ )

$FAM_{it}$  : Kepemilikan keluarga, merupakan *variabel dummy*, 1 jika perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dan 0 jika perusahaan tidak dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga.

$POST_{it}$  : Perubahan peraturan pajak dividen, merupakan *variabel dummy*, 1 jika sudah terjadi perubahan peraturan pajak dan 0 jika belum terjadi perubahan peraturan pajak.

#### 4.2. Data dan Sampel

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tabel 1 menunjukkan prosedur pemilihan sampel. Karena regresi yang akan digunakan menggunakan data panel maka dari 347 sampel tersebut terdiri dari 129 perusahaan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 516 observasi data panel yang terdiri dari periode 4 tahun dengan data *cross section* 129 perusahaan yang tersebar di 8 jenis industri.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Tahapan	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan yang membagikan dividen kas di tahun 2006 sampai dengan 2009	665
2	Jumlah perusahaan yang bergerak di industri keuangan	(130)
3	Jumlah perusahaan yang membagikan dividen interim	(91)
4	Jumlah perusahaan yang delisting selama periode 2006 sampai dengan 2009	(11)
5	Jumlah perusahaan dengan laba negatif atau rugi	(5)
6	Jumlah total sampel	428
7	Sampel dengan data yang tidak lengkap	(81)
	Sampel dengan data yang lengkap	347

## 5. Hasil Pengujian Hipotesis

### 5.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif disajikan dalam tabel 2. Sebelum dilakukan analisis statistik deskriptif, akan dilakukan *treatment* terhadap data *outlier* menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Hermawan (2009), yaitu dengan menggunakan metode *winsorizing*. Penetapan *outlier* dilakukan pada data yang terletak di luar batas angka 3 standar deviasi dari rata-rata (*mean*) variabel tersebut. Kemudian data *outlier* akan diganti dengan angka tertinggi atau terendah yang terdapat dalam observasi yang masih berada di dalam batas-batas 3 standar deviasi dari *mean* (*winsorized approach*).

Tabel 2. Hasil Pengolahan Statistik Deskriptif

VARIABEL	MINIMUM	MAXIMUM	MEAN	MEDIAN	STANDAR DEVIASI
EG(0,1)	(7.2783)	13.6414	0.5453	0.2145	2.0732
EG(0,3)	(2.0373)	2.2402	0.1952	0.2039	0.6043
EG(0,5)	(0.4617)	0.8181	0.2135	0.2262	0.2575
DPR	0.0114	1.5006	0.3882	0.2821	0.3315
SIZE (dalam juta rupiah)	13,600	45,305,086	5,880,633	1,822,206	10,169,879
ROA	0.0001	0.3627	0.0968	0.0727	0.0821
CFFO	(0.2575)	0.4867	0.1084	0.1014	0.1240
LEV	0.0004	0.7100	0.2445	0.2309	0.1669
PBV	0.0487	9.8800	2.0074	1.3500	1.9604
PEG(-1,0)	(4.7959)	8.4825	0.4552	0.1716	1.4498
PEG(-3,0)	(2.1605)	2.0504	0.1320	0.1631	0.7003
PEG(-5,0)	(2.3067)	1.7935	(0.0142)	0.1163	0.7051

Sumber : Data hasil pengolahan (SPSS 19)

Jumlah observasi : Untuk perhitungan *future earnings growth* 1 tahun terdapat 516 observasi. Jumlah perhitungan menjadi lebih sedikit untuk perhitungan *future earnings growth* 3 tahun menjadi 480 observasi sedangkan untuk perhitungan *future earnings growth* 5 tahun menjadi hanya 172 observasi saja. Semua data observasi telah melewati proses *winsorized* berdasarkan batas-batas tiga standar deviasi dari *mean*.

EG<sub>0,t</sub>: *Earnings growth*, dihitung sebagai *compounded annual earnings growth* untuk *common shareholder* dari tahun 0 ke tahun ke t, dimana *growth* dihitung dalam periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun (t: 1, 3 atau 5). DPR<sub>it</sub>: Besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham pada tahun penelitian yang dibagi dengan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan pada akhir tahun penelitian. SIZE<sub>it</sub> : *Size Of The Firm* yang diukur dengan menghitung nilai log dari *net total asset* pada akhir tahun penelitian. ROA<sub>it</sub> : *Return On Asset* (ROA) yang dihitung dari *earnings* pada tahun penelitian dibagi dengan total asset pada akhir tahun penelitian. CFFO<sub>it</sub>: Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun penelitian yang distandarkan dengan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun penelitian. LEV<sub>it</sub>: *Leverage*, besarnya pinjaman yang dilakukan perusahaan yang dibagi dengan *total asset* yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun penelitian. PBV<sub>it</sub>: *market to book ratio* pada akhir tahun penelitian. PEG<sub>t,0</sub>: *Past Earnings Growth*, dihitung sebagai *compounded annual earnings growth* untuk *common shareholder* dari tahun -t ke tahun ke 0, dimana *growth* dihitung dalam periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun (t: 1, 3 atau 5)

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 2, dapat dilihat bahwa untuk variabel dependen yang berupa *future earnings growth*, diperoleh rata-rata sebesar 0.5453 untuk t = 1 tahun, 0.1952 untuk t = 3 tahun dan 0.2135 untuk t = 5 tahun. Dari hasil perhitungan rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan *earnings* oleh perusahaan yang membagikan dividen kas pada periode tahun 2006 hingga 2009 cukup tinggi, yaitu 54.53 % untuk 1 tahun ke depan, namun angka ini menjadi rendah untuk pertumbuhan *earnings* di tahun ketiga yakni 19.52% dan berkisar di angka 21.35% untuk

pertumbuhan *earnings* di tahun kelima. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan *median* data ditahun pertama, yang menunjukkan bahwa data tengah dari sampel yang diuji memiliki tingkat pertumbuhan *earnings* sebesar 21.45 % di tahun pertama, 20.39% di tahun ketiga dan 22.62% di tahun kelima. Bila dilihat dari nilai minimum variabel ini, terlihat bahwa terdapat perusahaan mengalami pertumbuhan *earnings* yang negatif hingga 727.83% , sedangkan berdasarkan data maksimum variabel ini terlihat bahwa terdapat perusahaan yang mendapatkan pertumbuhan *earnings* yang sangat besar, yaitu sebesar 13.64 atau 1364.14 %.

Variabel independen berupa tingkat *Dividend Payout Ratio* (DPR) yang dibagikan perusahaan terhadap para pemegang saham. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel ini diperoleh rata-rata sebesar 0.3882. Dari hasil perhitungan rata-rata, dapat dikatakan bahwa perusahaan membagikan dividen di tahun 2006-2009 membagikan 38.82% laba bersihnya untuk dividen. Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan yang tetap membagikan dividen walaupun perusahaan mengalami kerugian sehingga data minimum dari variabel ini adalah 0.0114 atau 1.14% dan terdapat perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar sehingga dihasilkan data maksimum sebesar 1.5006 atau 150.06%.

## 5.2. Analisa Korelasi Pearson

Dari tabel 3 terlihat bahwa untuk *future earnings growth* 1 tahun, terdapat lima variabel independen yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen berupa *earnings growth* 1 tahun ke depan. Variabel tersebut adalah *Dividend Payout Ratio* ( $DPR_{it}$ ), *Return On Asset* ( $ROA_{it}$ ) dan *Past Earnings Growth* 1, 3 dan 5 tahun ke belakang. Variabel  $DPR_{it}$  sendiri memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap *future earnings growth* 1 tahun.

Tabel 3. Hasil Pengolahan Korelasi *Pearson* untuk *Future Earnings Growth 1 tahun*

	<b>EG (0,1)</b>	<b>DPR</b>	<b>SIZE</b>	<b>ROA</b>	<b>CFFO</b>	<b>LEV</b>	<b>PBV</b>	<b>PEG (-1,0)</b>	<b>PEG (-3,0)</b>	<b>PEG (-5,0)</b>
<b>EG (0,1)</b>	1.00									
<b>DPR</b>	0.322** (0.000)	1.00								
<b>SIZE</b>	0.004 (0.934)	0.094 (0.080)	1.00							
<b>ROA</b>	-0.166** (0.002)	-0.037 (0.491)	0.170** (0.001)	1.00						
<b>CFFO</b>	-0.034 (0.523)	0.116* (0.031)	0.190** (0.000)	0.539** (0.000)	1.00					
<b>LEV</b>	0.053 (0.323)	0.087 (0.106)	0.253** (0.000)	-0.245** (0.000)	-0.173** (0.001)	1.00				
<b>PBV</b>	-0.006 (0.913)	0.086 (0.111)	0.337** (0.000)	0.558** (0.000)	0.408** (0.000)	0.055 (0.309)	1.00			
<b>PEG (-1,0)</b>	-0.135* (0.012)	-0.353** (0.000)	-0.018 (0.739)	0.216** (0.000)	0.057 (0.293)	0.001 (0.991)	0.099 (0.065)	1.00		
<b>PEG (-3,0)</b>	-0.133* (0.013)	-0.052 (0.332)	-0.024 (0.658)	0.218** (0.000)	0.155** (0.004)	-0.058 (0.281)	0.066 (0.218)	0.215** (0.000)	1.00	
<b>PEG (-5,0)</b>	-0.144** (0.007)	-0.065 (0.226)	0.047 (0.386)	0.260** (0.000)	0.126* (0.019)	-0.124* (0.020)	0.144** (0.007)	0.215** (0.000)	0.207** (0.000)	1.00

Sumber : Data hasil pengolahan (SPSS 19)

\*\* Signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (2-tailed)

\* Signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed)

Angka di dalam kurung menunjukkan *p-value*

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi DPR yang dibagikan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan *earnings* untuk 1 tahun ke depan. Variabel ROA memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap *future earnings growth* 1 tahun. Hal ini berarti perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih sulit dalam mencapai *earnings growth* yang kuat. Variabel berikutnya yang memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap *future earnings growth* 1 tahun adalah *past earnings growth* baik 1, 3 dan 5 tahun ke belakang. Hal ini berarti perusahaan yang telah mengalami *earnings growth* yang tinggi sebelumnya akan lebih sulit dalam mencapai *earnings growth* yang lebih tinggi lagi.

Hasil uji korelasi *Pearson* ini juga dapat melihat hubungan antar variabel independen.

Dapat terlihat bahwa *dividend payout ratio* (DPR) memiliki hubungan yang positif dan

signifikan dengan *size* perusahaan dan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan yang dinilai dari nilai total asetnya dan semakin besar arus kas yang berhasil diperoleh perusahaan dari aktivitas operasinya maka dividen yang dapat dibayarkan kepada para pemegang saham juga otomatis akan semakin besar. DPR juga memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan *past earnings growth* 1 tahun ke belakang. Hal ini berarti semakin besar tingkat pertumbuhan *earnings* yang telah dicapai oleh perusahaan dari setahun sebelumnya justru tingkat dividen yang dapat dibayarkan kepada para pemegang saham akan semakin rendah.

Variabel SIZE memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan ROA. Berarti perusahaan yang semakin besar akan memiliki profitabilitas yang semakin tinggi dari total asset yang dimilikinya. Kemudian, variabel SIZE memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan CFFO. Semakin terbangunnya bisnis perusahaan tentu saja yang laba utama diharapkan perusahaan berasal dari kegiatan operasionalnya. Variabel SIZE juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan LEV. Terlihat bahwa bank lebih mempercayai perusahaan yang berukuran lebih besar dalam keputusannya dalam memberikan kredit.

Variabel ROA memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan CFFO yang berarti perusahaan sampel mampu memberikan kualitas laporan keuangan yang baik, baik secara maupun *cash basis* secara *accrual* karena keduanya bergerak secara searah. Variabel CFFO juga hubungan yang positif dan signifikan dengan PBV yang berarti semakin besar arus kas yang diperoleh perusahaan sampel dari kegiatan operasionalnya maka akan semakin besar pula keatraktifan perusahaan di mata investor dalam memandang kinerja perusahaan.

Tabel 4. Hasil Pengolahan Korelasi *Pearson* untuk *Future Earnings Growth* 3 tahun

	EG (0,3)	DPR	SIZE	ROA	CFFO	LEV	PBV	PEG (-1,0)	PEG (-3,0)	PEG (-5,0)
EG (0,3)	1.00									
DPR	0.087 (0.129)	1.00								
SIZE	0.035 (0.545)	0.067 (0.239)	1.00							
ROA	-0.195** (0.001)	-0.042 (0.465)	0.177** (0.002)	1.00						
CFFO	0.002 (0.968)	0.134* (0.019)	0.211** (0.000)	0.564** (0.000)	1.00					
LEV	0.016 (0.784)	0.094 (0.102)	0.250** (0.000)	-0.251** (0.000)	-0.204** (0.000)	1.00				
PBV	-0.007 (0.896)	0.074 (0.196)	0.339** (0.000)	0.556** (0.000)	0.436** (0.000)	0.061 (0.291)	1.00			
PEG (-1,0)	-0.076 (0.183)	-0.355** (0.000)	-0.002 (0.968)	0.226** (0.000)	0.026 (0.647)	-0.010 (0.856)	0.121* (0.034)	1.00		
PEG (-3,0)	-0.108 (0.059)	-0.032 (0.575)	0.014 (0.810)	0.251** (0.000)	0.156** (0.006)	-0.060 (0.299)	0.095 (0.097)	0.194** (0.001)	1.00	
PEG (-5,0)	-0.146* (0.010)	-0.091 (0.113)	0.057 (0.317)	0.312** (0.000)	0.157** (0.006)	-0.113* (0.047)	0.166** (0.004)	0.243** (0.000)	0.199** (0.000)	1.00

Sumber : Data hasil pengolahan (SPSS 19)

\*\* Signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (2-tailed)

\* Signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed)

Angka di dalam kurung menunjukkan *p-value*

Variabel independen yang memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen berupa EG 3 tahun ke depan hanyalah *return on asset* (ROA) dan *past earnings growth* (PEG) untuk 5 tahun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa dari semua variabel independen, hanya ROA dan PEG 5 tahun yang memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan *earnings* perusahaan untuk 3 tahun ke depan. Berbeda dengan pada *time horizon* 1 tahun, variabel independen DPR memiliki hubungan yang positif tapi tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa DPR yang dibagikan di tahun penelitian tidak berkorelasi secara signifikan terhadap pertumbuhan *earnings* 3 tahun ke depan.

Untuk *future earnings growth* 5 tahun, variabel independen memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap variabel dependen berupa *earnings growth* 5 tahun ke depan



adalah ROA, CFFO dan PEG 1, 3 dan 5 tahun ke belakang. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan *earnings* untuk 5 tahun ke depan terhitung dari tahun penelitian berhubung terbalik dengan profitabilitas yang berasal dari aset-aset perusahaan. Seperti dengan EG 3 tahun, variabel independen DPR memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan *earnings* 5 tahun ke depan.

### 5.3 Analisis Hasil Pengujian Model Penelitian

#### 5.3.1 Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Future Earnings Growth

Pengujian hipotesis 1a ditujukan untuk menguji apakah tingkat *dividend payout ratio* (DPR) berpengaruh positif terhadap *future earnings growth* perusahaan, dan hasil pengujian disajikan pada tabel 6. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel DPR pada tahun penelitian memiliki pengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 1\%$  untuk *future earnings growth* perusahaan satu tahun mendatang.

Tabel 5. Hasil Pengolahan Korelasi *Pearson* untuk *Future Earnings Growth* 5 tahun

	<b>EG (0,5)</b>	<b>DPR</b>	<b>SIZE</b>	<b>ROA</b>	<b>CFFO</b>	<b>LEV</b>	<b>PBV</b>	<b>PEG (-1,0)</b>	<b>PEG (-3,0)</b>	<b>PEG (-5,0)</b>
<b>EG (0,5)</b>	1.00									
<b>DPR</b>	0.100 (0.264)	1.00								
<b>SIZE</b>	-0.055 (0.540)	-0.016 (0.854)	1.00							
<b>ROA</b>	-0.381 <sup>*</sup> (0.000)	-0.046 (0.605)	0.204 <sup>*</sup> (0.021)	1.00						
<b>CFFO</b>	-0.185 <sup>*</sup> (0.036)	0.096 (0.281)	0.196 <sup>*</sup> (0.027)	0.620 <sup>**</sup> (0.000)	1.00					
<b>LEV</b>	0.174 <sup>*</sup> (0.049)	0.052 (0.558)	0.242 <sup>**</sup> (0.006)	-0.300 <sup>**</sup> (0.001)	-0.188 <sup>*</sup> (0.034)	1.00				
<b>PBV</b>	-0.095 (0.284)	0.059 (0.505)	0.380 <sup>**</sup> (0.000)	0.602 <sup>**</sup> (0.000)	0.494 <sup>**</sup> (0.000)	0.008 (0.932)	1.00			
<b>PEG (-1,0)</b>	-0.211 <sup>*</sup> (0.017)	-0.306 <sup>**</sup> (0.000)	0.088 (0.326)	0.304 <sup>**</sup> (0.000)	0.114 (0.201)	-0.058 (0.513)	0.166 (0.062)	1.00		
<b>PEG (-3,0)</b>	-0.255 <sup>**</sup> (0.004)	0.042 (0.636)	-0.098 (0.270)	0.294 <sup>**</sup> (0.001)	0.253 <sup>**</sup> (0.004)	-0.0158 (0.075)	0.110 (0.215)	0.230 <sup>**</sup> (0.009)	1.00	
<b>PEG (-5,0)</b>	-0.198 <sup>*</sup> (0.025)	-0.017 (0.847)	0.180 <sup>*</sup> (0.042)	0.401 <sup>**</sup> (0.000)	0.177 <sup>*</sup> (0.046)	-0.173 (0.050)	0.237 <sup>**</sup> (0.007)	0.256 <sup>**</sup> (0.004)	0.191 <sup>*</sup> (0.031)	1.00

Sumber : Data hasil pengolahan (SPSS 19)

\*\* Signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (2-tailed)

\* Signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (2-tailed)

Angka di dalam kurung menunjukkan *p-value*

Pengaruh ini kemudian melemah untuk *time horizon* selanjutnya, dimana variabel DPR memiliki pengaruh positif dan marjinal pada  $\alpha = 10\%$  pada *future earnings growth* 3 tahun. Untuk lima tahun mendatang atau jangka waktu yang panjang, variabel DPR tidak memiliki pengaruh signifikan pada *future earnings growth* perusahaan

Tabel 6 Hasil Regresi Model Penelitian 1

	Expected sign	EG (0,1)			EG (0,3)			EG (0,5)		
		Unstandardized coefficient	t	Sig.	Unstandardized coefficient	t	Sig.	Unstandardized coefficient	t	Sig.
		B			B			B		
C		0.003	0.724	0.235	0.005	1.026	0.153	0.017	4.713	0.000***
DPR	+	1.980	3.518	0.000***	0.098	1.461	0.072*	0.042	1.211	0.114
SIZE	-	0.005	0.506	0.307	0.010	3.187	0.001***	0.010	14.999	0.000***
ROA	-	-4.583	-1.858	0.032**	-2.295	-5.367	0.000***	-1.316	-4.203	0.000***
CFFO	+	0.138	0.105	0.458	0.553	3.815	0.000***	0.097	0.679	0.249
LEV	+	-0.457	-1.490	0.069*	-0.186	-0.968	0.167	-0.039	-0.268	0.394
PBV	+	0.084	1.086	0.139	0.032	2.571	0.005***	0.015	9.483	0.000***
PEG1	-	0.062	1.201	0.115	0.009	0.435	0.332	-0.013	-0.600	0.275
PEG3	-	-0.227	-1.554	0.060*	-0.044	-0.861	0.195	-0.045	-2.275	0.012**
PEG5	-	-0.255	-2.424	0.008***	-0.082	-2.702	0.004***	-0.017	-0.790	0.215
R-squared	0.165				0.123			0.345		
Adjusted R-squared	0.150				0.106			0.308		
Durbin-Watson stat	2.464				1.992			2.024		
F-statistic	11.092				7.383			9.468		
Prob(F-statistic)	0.000				0.000			0.000		

Sumber : Data hasil pengolahan (EViews 7)

\*\*\* signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

\*\* signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\* signifikan pada level  $\alpha = 10\%$  (*one-tailed*)

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1a dan penelitian Abor dan Bokpin (2010), dimana menyatakan bahwa dividen digunakan manajemen sebagai sinyal atas profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Konsisten dengan teori *signaling*, dividen dibayarkan bahkan saat ada kesempatan berinvestasi yang menguntungkan. Hanya saja teori *signaling* ini hanya berlaku untuk *future earnings growth* dalam jangka waktu pendek yakni satu tahun dan semakin melemah untuk *time horizon* yang selanjutnya. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian oleh Zhou dan Ruland (2006) dimana koefisien dari variabel DPR memiliki pengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 1\%$  pada *future earnings growth* perusahaan untuk ketiga *time horizon*. Hal ini berarti kebijakan dividen yang besar belum tentu mencerminkan *future earnings growth* yang besar pula, terutama pada jangka waktu yang panjang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lamont (1998) bahwa variabel dividen memang dapat digunakan untuk *forecasting earnings* di masa yang akan datang, tetapi hanya terbatas pada *short term horizon*. Dalam kata lain, variabel dividen adalah variabel yang tidak dapat diandalkan untuk memprediksi *earnings* perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Vivian (2006) juga memiliki hasil penelitian yang sama namun berbeda *time horizon*, dimana *dividend payout ratio* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *future earnings* di level industri dan signifikansi ini lebih kuat di *time horizon* yang lebih lama.

Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian Gwylim *et al.* (2004) yang juga meneliti tentang hubungan *dividend payout ratio* dan *real earnings growth* di level perusahaan, menemukan bahwa investasi kembali laba yang ditahan tidak membawa pada pertumbuhan *real earnings* yang lebih cepat, akan tetapi temuan yang ada di 11 *market* internasional memiliki hasil yang bervariasi di tiap negara terutama dalam periode waktu dan signifikansinya. Terdapat keterbatasan variabel *dividend payout ratio* untuk memprediksi

*earnings* di *time horizon* 1 sampai dengan 10 tahun. Regresi dengan data panel dari penelitian ini justru memberikan hasil bahwa pengaruh positif *payout ratio* (PR) terhadap *real earnings growth* (REG) justru kurang meyakinkan untuk *time horizon* 1 tahun dan lebih signifikan untuk *time horizon* 5 dan 10 tahun.

Hasil penelitian ini bersama-sama dengan penelitian Zhou dan Ruland (2006), Lamont (1998), Gwyllim *et al.* (2004) dan Vivian (2006) menuju pada satu kesimpulan yang menentang pendapat tradisional atau *perceived wisdom* yang mengatakan bahwa penahanan laba yang lebih tinggi akan membawa pada *growth* yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang atau hubungan yang negatif antara *dividend payout ratio* dan *future earnings*. Karena dari hasil yang didapatkan adalah koefisien yang positif meskipun masing-masing penelitian bervariasi untuk rentang waktunya.

### 5.3.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Hubungan Dividend Payout Ratio (DPR) dan Future Earnings Growth

Pengujian hipotesis 2a ditujukan untuk menguji apakah kepemilikan keluarga pada level pengendali perusahaan akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan kepemilikan dan pengendalian oleh keluarga terhadap pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* dilakukan pengujian dengan variabel DPR\*FAM yang mencerminkan moderasi variabel kepemilikan keluarga pada tingkat pengendali (FAM). Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7, terlihat bahwa variabel DPR\*FAM memiliki koefisien negatif dan signifikan pada  $\alpha = 1\%$  untuk *time horizon* 1 dan 5 tahun ke depan. Hubungan pengaruh ini negatif sesuai dengan harapan, sehingga hasil penelitian ini

Tabel 7. Hasil Regresi Model Penelitian 2

	Expected sign	EG (0,1)			EG (0,3)			EG (0,5)		
		Unstandardized coefficient	t	Sig.	Unstandardized coefficient	t	Sig.	Unstandardized coefficient	t	Sig.
C		0.000	-0.728	0.233	0.004	0.711	0.239	0.015	5.860	0.000***
DPR	+	2.297	7.162	0.000***	0.154	1.076	0.141	0.165	3.964	0.000***
FAM	-	0.515	7.856	0.000***	0.028	0.242	0.405	0.095	12.160	0.000***
DPR*FAM	-	-1.027	-5.474	0.000***	-0.094	-0.326	0.372	-0.207	-9.732	0.000***
SIZE	-	-0.002	-0.434	0.332	0.010	1.837	0.033**	0.008	8.175	0.000***
ROA	-	-3.416	-16.744	0.000***	-2.251	-4.425	0.000***	-1.243	-4.210	0.000***
CFFO	+	-0.256	-1.316	0.094	0.544	3.951	0.000***	0.087	0.561	0.288
LEV	+	-0.936	-3.816	0.000***	-0.176	-0.843	0.200	-0.024	-0.176	0.430
PBV	+	0.067	9.756	0.000***	0.032	2.439	0.008***	0.017	3.642	0.000***
PEG1	-	0.071	3.695	0.000***	0.008	0.392	0.348	-0.016	-0.802	0.212
PEG3	-	-0.217	-10.203	0.000***	-0.045	-0.933	0.176	-0.047	-2.063	0.0204**
PEG5	-	-0.242	-3.217	0.001***	-0.082	-2.646	0.004***	-0.012	-0.555	0.290
R-squared	0.835				0.124			0.356		
Adjusted R-squared	0.832				0.103			0.312		
Durbin-Watson stat	1.943				1.991			2.014		
F-statistic	230.803				6.049			8.035		
Prob(F-statistic)	0.000				0.000			0.000		

Sumber : Data hasil pengolahan (EViews 7)

\*\*\* signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

\*\* signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\* signifikan pada level  $\alpha = 10\%$  (*one-tailed*)

mendukung hipotesis 2a. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga pada level pengendali perusahaan akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga biasanya memiliki manajemen yang didominasi oleh keluarga, sehingga lebih kecil kemungkinan terjadinya masalah agensi antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Perusahaan keluarga walaupun memiliki *agency problem* yang minim, tetapi *corporate governance* dari perusahaan jenis ini buruk, hal ini dikarenakan pihak manajemen dalam membuat perancangan dan pengambilan keputusan lebih mengedepankan kepentingan keluarga yang merupakan pemegang peranan penting dalam perusahaan. Galvao (2012) menyatakan bahwa konflik kepentingan yang ada pada perusahaan keluarga adalah *agency problem* tipe II dimana pemegang saham utama yakni keluarga menggunakan posisinya untuk mengontrol perusahaan dan mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas. Salah satu keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan akan besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Keputusan dividen pada perusahaan keluarga bisa jadi berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan yang *widely held*. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham lebih berorientasi kepada kepentingan keluarga. Seringnya manajer dan pemegang saham dalam perusahaan keluarga adalah orang yang sama, oleh karena itu klaim residual atas *cost* dan pendapatan berasal dari aksi yang dilakukannya sendiri. Keputusan dividen pada tahun penelitian kemungkinan tidak didasarkan pada kepentingan perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga pada level pengendali perusahaan akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio*

(DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang dikarenakan keputusan perusahaan untuk membagikan dividen tidak berorientasi pada kepentingan perusahaan.

### 5.3.3 Pengaruh Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Atas Dividen Terhadap Hubungan Dividend Payout Ratio (DPR) dan Future Earnings Growth

Pengujian hipotesis 3a ditujukan untuk menguji apakah periode pajak pendapatan atas dividen yang berbeda akan memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8, terlihat bahwa variabel moderasi DPR\*POST memiliki koefisien yang negatif dan signifikan pada  $\alpha = 5\%$  hanya untuk *time horizon* 3 tahun ke depan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa perubahan peraturan pajak atas dividen di tahun 2008 memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan untuk *time horizon* 3 tahun ke depan. Dengan demikian temuan penelitian ini mendukung hipotesis 3a.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Berheim dan Wantz (1995) yang menyatakan bahwa mekanisme dividen sebagai sinyal sangat tergantung pada *cost of signaling*. Semakin besar atau semakin rendahnya nilai pajak atas dividen adalah *cost of signaling*. Semakin besar nilai pajak atas dividen maka semakin besar pula konten informasi dividen tersebut sebagai sinyal dan berlaku sebaliknya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Li (2007) yang menyatakan bahwa pengenaan pajak atas dividen yang lebih besar relatif terhadap *capital gain*, berpengaruh secara marjinal terhadap dividen sebagai sinyal positif dan efek *agency cost* yang disebabkan.

Perusahaan dalam membagikan dividen terhadap para pemegang sahamnya tidak berorientasi kepada mekanisme dividen sebagai sinyal yang positif akan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang tapi lebih karena ingin menyenangkan investornya. Bila dilihat dari sisi investor, dimana pajak penghasilan atas dividen yang persentasenya



berkurang dari 15% menjadi hanya 10% dan bersifat final. Lintner (1956) berpendapat bahwa investor lebih suka menerima dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Investor memandang *dividend yield* lebih pasti daripada *capital gains yield*. Satu burung di tangan (dividen saat ini) lebih berharga daripada seribu burung di udara (*capital gain* di masa yang akan datang). Bagi tipe investor ini, kebijakan terhadap dividen adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kepentingan investor inilah yang kemudian menjadi orientasi perusahaan dalam mengambil kebijakan dividen.

Pengaruh perubahan peraturan pajak atas dividen di tahun 2008 yang memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan ini tidak langsung terlihat dalam satu tahun berikutnya namun dalam 3 tahun setelahnya. Hal ini dikarenakan terkadang perusahaan dalam menjalankan kebijakan dividen berpikir untuk kepentingan dalam waktu dekat atau hanya satu tahun ke depan dan tidak berorientasi pada efek kebijakan dividen untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dalam penelitian ini, terlihat pula pada tabel 8 bahwa variabel DPR berpengaruh secara signifikan pada  $\alpha = 1\%$  terhadap potensi pertumbuhan laba perusahaan untuk *time horizon* 3 tahun, di mana hal ini tidak terjadi pada hasil penelitian di kedua model lainnya.

Tabel 8. Hasil Regresi Model Penelitian 3

	Expected sign	EG (0,1)			EG (0,3)		
		Unstandardized coefficient	t	Sig.	Unstandardized coefficient	t	Sig.
		B			B		
C		-0.001	-0.108	0.457	0.006	1.117	0.132
DPR	+	2.405	2.674	0.004***	0.271	2.678	0.004***
POST	-	0.241	0.488	0.313	0.108	2.227	0.013**
DPR*POST	-	-0.254	-0.277	0.391	-0.312	-2.233	0.013**
SIZE	-	0.000	-0.025	0.490	0.008	3.044	0.001***
ROA	-	-4.892	-1.921	0.028**	-2.327	-5.049	0.000***
CFFO	+	-0.474	-0.368	0.357	0.586	4.273	0.000***
LEV	+	-0.489	-1.383	0.084*	-0.176	-0.892	0.187
PBV	+	0.109	1.338	0.091*	0.032	2.014	0.022**
PEG1	-	0.062	1.044	0.148	0.011	0.607	0.272
PEG3	-	-0.206	-1.246	0.107	-0.052	-0.974	0.165
PEG5	-	-0.388	-3.629	0.000***	-0.080	-2.305	0.011**
R-squared		0.190			0.131		
Adjusted R-squared		0.171			0.111		
Durbin-Watson stat		2.559			1.999		
F-statistic		9.814			6.476		
Prob(F-statistic)		0.000			0.000		

Sumber : Data hasil pengolahan (EViews 7)

\*\*\* signifikan pada level  $\alpha = 1\%$  (one-tailed)

\*\* signifikan pada level  $\alpha = 5\%$  (one-tailed)

\* signifikan pada level  $\alpha = 10\%$  (one-tailed)

## 6. Kesimpulan

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan untuk satu tahun ke depan. Pengaruh variabel DPR ini kemudian melemah untuk *time horizon* selanjutnya yakni untuk 3 tahun ke depan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan menjadikan dividen sebagai sinyal karena informasi yang ada dalam perubahan kebijakan dividen bisa jadi dimaksudkan dan diinterpretasikan berbeda oleh *market* tergantung pada faktor-faktor spesifik masing-masing perusahaan. Kemungkinan lainnya adalah dividen dibayarkan hanya untuk mengurangi *agency problem* yang ada dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan pengaruhnya ke pertumbuhan *earnings* dalam jangka waktu panjang tidak signifikan. Terdapat pula kemungkinan bahwa besarnya dividen yang tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan pada *time horizon* 5 tahun dikarenakan CEO yang *over confidence* dan *over optimis* akan mekanisme *signaling* ini sehingga keputusannya atas level investasi optimal perusahaan untuk jangka panjang berasal dari *behavioural biases*.

Pengaruh kepemilikan keluarga pada level pengendali memperlemah hubungan antara kebijakan dividen perusahaan dengan *future earnings growth* perusahaan secara signifikan baik untuk jangka pendek maupun jangka waktu yang panjang. *Agency problem* tipe II yang ada pada perusahaan keluarga dimana pemegang saham utama yakni keluarga menggunakan posisinya untuk mengontrol perusahaan dan mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas. Salah satu keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan akan besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Keputusan dividen pada perusahaan keluarga bisa jadi berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan yang *widely held*. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham lebih berorientasi kepada kepentingan keluarga. Keputusan dividen pada

tahun penelitian kemungkinan tidak didasarkan pada kepentingan perusahaan di masa yang akan datang.

Perubahan peraturan pajak atas dividen di tahun 2008 memperlemah pengaruh positif *dividend payout ratio* (DPR) terhadap *future earnings growth* perusahaan, baik untuk *time horizon* 3 ke depan. Hal ini dapat disebabkan perusahaan dalam membagikan dividen terhadap para pemegang sahamnya tidak berorientasi kepada mekanisme dividen sebagai sinyal yang positif akan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang tapi lebih karena ingin menyenangkan investornya. Bila dilihat dari sisi investor, dimana pajak penghasilan atas dividen yang persentasenya berkurang dari 15 % menjadi hanya 10% dan bersifat final.

Pajak atas dividen yang lebih tinggi atau lebih rendah adalah salah satu bentuk dari *signaling cost*. Terdapat tipe investor yang lebih suka menerima dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Investor memandang *dividend yield* lebih pasti daripada *capital gains yield*. Satu burung di tangan (dividen saat ini) lebih berharga daripada seribu burung di udara (*capital gain* di masa yang akan datang). Bagi tipe investor ini, kebijakan terhadap dividen adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kepentingan investor inilah yang kemudian menjadi orientasi perusahaan dalam mengambil kebijakan dividen.

## DAFTAR REFERENSI

- Abor, Joshua & Bokpin, Godfred A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy: Evidence from emerging markets. *Journal of Studies in Economics and Finance*, Vol. 27 No, 3, pp. 180-194.
- Anderson, R & Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*. Vol. 58 No. 3, pp. 1301-28.
- Arnott & Assness C. (2003). Surprise! higher dividend = higher earnings. *Financial Analysts Journal*, 59 (1): 70-87.
- Bernheim, B.D., & A. Wantz. (1995). A tax-based test of the dividend signaling hypothesis. *American Economic Review*, 85: 532-551.
- Brav, A., Graham, J., Harvey, C. & R. Michaely. (2005). Payout policy in the 21st century. *Journal of Financial Economics*.
- Carlson, John B. (2001). Why is the dividend yield so low? Federal Reserve Bank of Cleveland.
- Fama, Eugene F., & Kenneth R. French. (2001). Dissapearing dividends changing firms characteristics or lower propensity to pay? *Journal of Financial Economics*, Vol. 60, no 1: 3-43.
- Gama, Ana P., & Galvao, Jorge M. (2012). Perfomance, valuation and capital structure: survey of family firms. *Corporate Gorvenance*. Vol 12 No 2 2012, pp. 199-214.
- Gupta, Amitabh, & Banga, Charu. (2010). The determinants of corporate dividend policy. Research Scholar, Department of Financial Studies, University of Delhi.
- Gordon, Myron J. (1962). The investment valuation and financing of the corporation. Homewood. IL.
- Gwlym, O., Seaton, J., Suddason, K., & Thomas, S. (2004). International evidence on payout ratio, returns, earnings and dividends. Discussion papers in accounting and finance.
- Hanazaki, M. & Q. Liu. (2006). Corporate governance and investment in East Asian firms-empirical analysis of family-controlled firms. *Journal of Asian Economics*, 18 (2007) 76-97.
- Hermawan, Ancella A. (2009). *Pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga, dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba*. Disertasi Universitas Indonesia.
- Jensen, M. (1986). The agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers. *American Economic Review*, 76, 323-329.
- Lamont, O. (1998). Earnings and expected returns. *Journal of Finance*, 53: 4563-1587.

- Li, Oliver Z. (2007). Taxes and valuation: Evidence from dividend change announcements. *JATA*. Vol. 29, No. 2, pp. 1-23.
- Lintner, J. (1956), Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes. *American Economic Review*, 46: 97-113.
- Miller M. & Modigliani F. (1961). Dividend policy, growth and the valuation of shares. *Journal of Business*, 34: 411-433.
- Miller M. & Rock K. (1985). Dividend policy under asymmetric information. *Journal of Finance*, 40: 1031-1051.
- Myers, Stewart C. (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance*. July 39:3, Pp: 575-92.
- Nasution, Hasanul Aswadi. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan publik di Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nissim D. & Ziv. A. (2001). Dividend changes and future profitability. *Journal of Finance*, 61: (6), 2111-2134.
- Malmendier U., & Tate, G. (2005a). CEO overconfidence and corporate investment. *Journal of Finance*, 60: 2661-2700
- Sugiarto. (2007). Telaah indikasi keagenan pada kebijakan leverage perusahaan keluarga di BEJ. *Akuntabilitas*, Maret 2007, Vol.6 (2), 165-178.
- Vivian, Andrew. (2006). *The payout ratio, earnings growth and returns: UK industry evidence*. Paper presented at EFM Behavioural Finance Symposium, Durham, UK.
- Zhou, Ping & Ruland, William. (2006). Dividend payout and future earnings growth. *Financial Analysts Journal*, 62.3: 58-69.

# **Pengaruh Manajemen Laba, Risiko Pasar dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Pasar**

## **(Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)**

***TITI SUHARTATI \****  
***Politeknik Negeri Jakarta***

***HILDA ROSSIETA***  
***Universitas Indonesia***

***Abstract:*** This research examines the influence of earnings management, market risk and ownership structure upon market value. The earnings management indicated by discretionary accrual, market risk (beta) and ownership structure (institutional and managerial). Secondary data taken from manufacture companies quoted in OSIRIS, ICMD, and IDX database for period 2008-2009. While SBI interest rate data for 2008-2009 is obtained from Bank Indonesia database. Using purposive sampling method, 72 manufacture companies are quoted from IDX. The ordinary least squares regression was run to drive the conclusion in the significance level of 5% and 10%. The result of hypothesis test shows that earnings management, market risk, and managerial ownership indicate positively significant influence on market value.

***Keywords:*** earnings managements, risk, ownership, market value.

---

\* Corresponding author: b\_titis@yahoo.com

## 1. Introduction

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Wibisono, 2004), yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba/*earnings management* (Richardson, 1998).

Adanya *agency problem* dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi operasionalisasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan (Bhagat dan Black, 2002; Bonn dan Phan, 2004). Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki. Demsetz dan Lehn (1985) menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan perusahaan untuk menghilangkan masalah keagenan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Bathala et al. (1994) bahwa level kepemilikan lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan *opportunistic*, sehingga akan menyatukan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham.



Pada umumnya manajemen laba mencakup manajemen laba secara riil dan manajemen laba melalui pelaporan. Manajemen laba secara riil merupakan suatu tindakan dalam hal manajemen berusaha untuk mengatur laba agar dapat memenuhi target manajemen. Sebagai contoh, manajemen dapat memilih suatu proyek, meningkatkan atau menurunkan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan aktivitas kebijakan yang lain. Semua aktivitas tersebut menuju pada manajemen laba yang riil (Christie dan Zimmerman, 1994). Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1999), dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Praktik manajemen laba dapat menyebabkan pengungkapan informasi dalam laporan laba tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak memperoleh informasi keuangan yang akurat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu pemakai laporan keuangan adalah partisipan atau investor pasar modal. Laporan laba yang mengandung praktek manajemen laba dapat menyesatkan investor dalam mengestimasi *return* yang diharapkan. Dalam transaksi keuangan secara umum terdapat dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan yaitu hasil *return* dan *risk* (Rusdin, 2006). Dengan dua unsur tersebut seorang investor dapat memprediksikan nilai saham perusahaan yang dimilikinya. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara *return actual* yang diterima dengan *return* yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut.

Manajemen laba yang digunakan manajer untuk menyampaikan informasi privat mereka mengenai kondisi perusahaan akan direaksi oleh para investor jika mereka mengetahui kondisi perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan berbeda dengan

kondisi yang sesungguhnya. Investor mengetahui adanya praktek manajemen laba tersebut dengan menganalisa laporan keuangan secara langsung atau dengan mendasarkan pada harga-harga saham yang merefleksikan berbagai rangkaian informasi, termasuk laporan keuangan, tanpa harus memproses semua informasi secara langsung (Beaver, 2002). Reaksi pasar terhadap praktek manajemen laba akan positif jika manajemen laba mengisyaratkan kondisi perusahaan yang lebih baik, dan sebaliknya, pasar akan memberikan reaksi negatif jika manajemen laba mengisyaratkan kondisi perusahaan yang lebih buruk. Reaksi pasar ini akan berakibat pada harga/nilai saham.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, risiko pasar dan struktur kepemilikan terhadap nilai pasarsaham (*market value*). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya terkait dengan manajemen laba dengan kinerja. Penelitian ini menambahkan variabel risiko pasar dan struktur kepemilikan, baik institusi dan manajerial, yang berdasarkan penelitian terdahulu dapat mempengaruhi nilai pasar saham.

## 2. *Theoretical Framework and Hypothesis Development*

### 2.1. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Scott (1997) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs* (*opportunistic earnings management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*efficient earnings management*), di mana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajemen laba dilakukan perusahaan berdasarkan tiga motivasi terkait dengan perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Pertama, hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*) yang membicarakan tentang hubungan pemilihan metode akuntansi dengan rencana bonus manajer. Kedua, hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), yakni persyaratan perjanjian utang yang harus dipenuhi yang mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan rasio-rasio akuntansi seperti *debt to equity ratio*, rasio modal kerja minimum, serta batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi perusahaan.

Ketiga, hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) yang menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politis cenderung untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 1997:303).

## 2.2. Konsep Akruai

Konsep akrual ini memungkinkan dilakukannya rekayasa laba atau *earningmanagement* oleh manajer untuk menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi (Hidayati dan Zulaikha, 2003). Konsep akrual terdiri atas akrual diskresioner (*discretionary accrual*) dan akrual nondiskresioner (*nondiscretionary accrual*). *Discretionary accrual* adalah pengakuan laba akrual atau beban yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, sedangkan *nondiscretionary accrual* adalah pengakuan laba akrual yang wajar, tidak dipengaruhi kebijakan manajemen, serta tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan jika standar tersebut dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Hidayati & Zulaikha, 2003). Hasil penelitian Subramanyam (1996) menunjukkan bahwa komponen laba berupa akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner tersebut akan direspons oleh pasar saham. Untuk melakukan penelitian

mengenai manajemen laba digunakan *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Selain itu, akrual diskresioner mencerminkan informasi privat yang diberikan oleh manajer untuk mencerminkan kondisi atau nilai ekonomis suatu perusahaan, sehingga memungkinkan manajer terlibat dalam pelaporan yang oportunistik untuk memaksimalkan kemakmuran mereka (Subramanyam, 1996).

### 2.3 Risiko Pasar (*Market Risk*) dan Beta

Risiko merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Pada dasarnya terdapat dua macam risiko dalam investasi saham, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis (Husnan, 2008). Risiko sistematis (risiko pasar/ *market risk*) adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan, seperti kebijakan pemerintah (misalnya tentang pajak). Sebaliknya, risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat didiversifikasi dan mempengaruhi sebagian kecil dari suatu kelompok. Menurut Jones (1996), risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio yang relatif terhadap risiko pasar dapat diukur dengan beta. Beta saham mengukur tingkat kepekaan saham terhadap perubahan pasar. Semakin tinggi tingkat beta, semakin tinggi risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Untuk menghitung beta digunakan teknik regresi, yaitu mengestimasi beta suatu sekuritas dengan menggunakan *return* sekuritas sebagai variabel terikat dan *return* pasar sebagai variabel bebas.

Penggabungan risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis akan membentuk risiko total. Investor yang berinvestasi pada suatu sekuritas akan menanggung risiko total. Jika investor menambah jumlah atau jenis sekuritasnya maka ia dapat menghilangkan risiko tidak sistematis sehingga risiko yang tersisa adalah risiko sistematis (Anastasia, 2001). Risiko ini tidak dapat dihilangkan dan setiap sekuritas memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda antara sekuritas satu dengan yang lain, tetapi risiko ini dapat diukur dan diestimasi menggunakan

koefisien beta. Saham dapat memiliki nilai beta positif atau negatif. Jika nilai beta pasar sama dengan satu, maka tidak terjadi bias. Sekuritas yang memiliki beta diatas satu berarti sekuritas tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi daripada pasar atau disebut dengan *aggressive stock*. Beta sekuritas satu berarti sekuritas tersebut memiliki risiko sistematis yang lebih kecil daripada risiko pasar atau disebut dengan *defensive stock* (Gul et al., 2000).

Jika informasi laporan keuangan diharapkan berguna bagi pengambilan keputusan investasi, maka informasi laporan keuangan juga diharapkan berguna untuk menilai risiko sistematis dalam investasi (Anastasia, 2001). Dengan kata lain informasi laporan keuangan dalam bentuk variabel-variabel akuntansi (variabel fundamental) dapat digunakan untuk menilai beta saham. Dengan menggabungkan antara beta yang diukur berdasarkan data return pasar dengan data karakteristik perusahaan berupa variabel-variabel akuntansi diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang lebih akurat.

#### 2.4. Struktur Kepemilikan (*Ownership*)

Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Fidyati (2004) menyebutkan dua perbedaan pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama, didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Fidyati (2004) menyatakan bahwa investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan likuidasi dari investor, manajer akan melakukan *earnings management*. Pendapat kedua, memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (*sophisticated*). Menurut pendapat

ini, investor lebih terfokus pada laba masa datang (*future earnings*) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. Shiller dan Pound (1989) dalam Fidyati (2004), menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan *monitoring* secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional dan ukuran dewan direksi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Hartzel dan Starks (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet *et al*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Dalam teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan sejalan dengan Boediono (2005) berpendapat bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Menurut Warfield *et al*. (1995) terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba, sejalan dengan hasil

penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003). Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005). Siallagan dan Machfoedz (2006) yang juga meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accrual* dan nilai perusahaan menyimpulkan dari hasil pengujian bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba, sedangkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan adalah negatif. Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976). *Income smoothing* secara signifikan lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

## 2.5. Nilai Pasar (*Market Value*)

*Market Price* merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya atau *closing price* (Anoraga dan Pakarti, 2006). Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, baik bursa utama maupun *over the counter market* (OTC). Transaksi di sini sudah tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi.

Harga pasar ini merupakan harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain, dan disebut sebagai harga di pasar sekunder. Harga pasar inilah yang menyatakan naik-turunnya suatu saham dan setiap hari diumumkan di surat-surat kabar atau media-media lainnya. Informasi dari rasio keuangan yang mengindikasikan profitabilitas dan tingkat risiko perusahaan akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun negatif, sehingga

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham perusahaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi harga saham perusahaan di pasar bursa.

## **2.6 Hypothesis Development**

### **2.6.1. Manajemen Labadan Nilai Pasar**

Praktik manajemen laba dapat menyebabkan pengungkapan informasi dalam laporan laba tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak memperoleh informasi keuangan yang akurat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu pemakai laporan keuangan adalah partisipan atau investor pasar modal. Laporan laba yang mengandung praktek manajemen laba dapat menyesatkan investor dalam mengestimasi *return* yang diharapkan. Manajemen laba yang digunakan manajer untuk menyampaikan informasi privat mereka mengenai kondisi perusahaan akan direaksi oleh para investor jika mereka mengetahui kondisi perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Investor mengetahui adanya praktek manajemen laba tersebut dengan menganalisis laporan keuangan secara langsung atau dengan mendasarkan pada harga-harga saham yang merefleksikan berbagai rangkaian informasi, termasuk laporan keuangan, tanpa harus memproses semua informasi secara langsung (Beaver, 2002). Reaksi pasar terhadap praktek manajemen laba akan positif jika manajemen laba mengisyaratkan kondisi perusahaan yang lebih baik, dan sebaliknya, pasar akan memberikan reaksi negatif jika manajemen laba mengisyaratkan kondisi perusahaan yang lebih buruk. Reaksi pasar ini akan berakibat pada harga/nilai saham.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian empiris yang telah dilakukan, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

**H1:** *Manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai pasar.*



### 2.6.2. Risiko Pasar dan Nilai Pasar

Risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio yang relatif terhadap risiko pasar dapat diukur dengan beta saham. Beta suatu sekuritas adalah kuantitatif yang mengukur sensitivitas keuntungan dari suatu sekuritas dalam merespon pergerakan keuntungan pasar. Semakin tinggi tingkat beta, semakin tinggi risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi (Jones, 2004). Sementara itu, nilai pasar (*market value*) mencerminkan nilai keseluruhan suatu perusahaan yang terjadi di pasar saham. Makin besar nilai pasar suatu perusahaan, makin lama pula investor menaruh kepemilikan sahamnya, karena investor masih menganggap bahwa perusahaan besar biasanya lebih stabil keuangannya, risikonya lebih kecil dan mampu menghasilkan laporan dan informasi keuangan. Risiko saham merupakan tingkat risiko yang terjadi dari suatu kegiatan investasi terutama akibat transaksi saham di pasar bursa (*gain or lose*) (Subali dan Zuhroh, 2002). Semakin besar risiko saham maka semakin pendek saham ditahan atau dimiliki oleh investor.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian empiris yang telah dilakukan, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

**H2:** *Risiko pasar berpengaruh positif terhadap nilai pasar*

### 2.6.3. Struktur Kepemilikan dan Nilai Pasar

Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham yang dapat dilakukan melalui kebijakan investasi dan keuangan yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. Semakin tinggi harga saham berarti kesejahteraan pemilik semakin meningkat dan nilai perusahaan juga akan meningkat (Brigham and Ehrhardt, 2005). Wibisobo (2004) menyimpulkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menyatakan bahwa konflik kepentingan ini dapat dikontrol dengan beberapa mekanisme yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial

(*insider ownership*), *dividend payout ratio*, dan pendanaan dengan menggunakan utang. Dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial, pihak manajemen tentunya akan mengutamakan kepentingan pemegang saham karena mereka juga sebagai pemegang saham. Manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Hartono dan Mahadwarta, 2002). Sedangkan Suranta dan Machfoedz (2003) mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa nilai perusahaan akan lebih tinggi ketika direktur memiliki bagian saham yang lebih besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarma (2004) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Suranta dan Midiastuty (2003) telah menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara struktur kepemilikan manajerial dengan penciptaan nilai perusahaan

Berdasarkan landasan teori tersebut dan penelitian empiris yang telah dilakukan, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

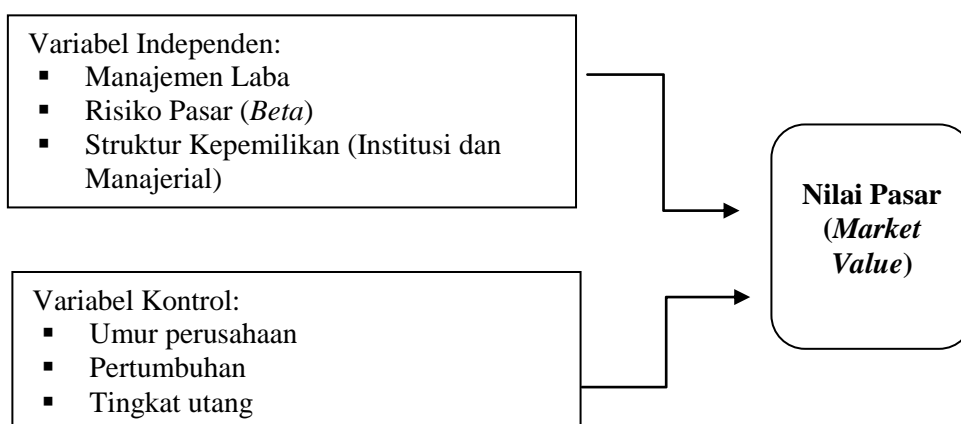
**H3a:** *Struktur kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap nilai pasar.*

**H3b:** *Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai pasar.*

## 2.7. Rerangka Model Penelitian

Berdasarkan kepada rerangka teoritis, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis yang disampaikan maka disusun rerangka model penelitian dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Rerangka Model Penelitian



### 3. Research Method

#### 3.1 Data dan Pemilihan Sampel Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan Auditan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia ([www.jsx.co.id](http://www.jsx.co.id)). Data pasar dan keuangan lainnya diperoleh dari database OSIRIS tahun 2008-2009 dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2009-2010. Selain itu, data mengenai nilai IHSG dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tahun 2007-2010 diperoleh dari Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2008-2009. Metode pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. (Indriantoro dan Supomo, 2002:131), dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap dari tahun 2008-2009.
- 2) Perusahaan sampel memiliki komponen yang diperlukan sebagai variabel regresi penelitian.

Hasil pemilihan sampel penelitian, dari 110 jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2009, yang memiliki data lengkap sesuai variabel penelitian sejumlah 72 perusahaan. Daftar nama perusahaan sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### 3.2. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

##### 3.2.1. Variabel Penelitian

Untuk menguji hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, maka variabel yang digunakan penelitian ini, antara lain: variabel dependen nilai pasar dan variabel independen:

manajemen laba yang diukur dengan proksi *discretionary accruals*, risiko pasar (*beta*) dan struktur kepemilikan. Selain variabel utama, penelitian ini menggunakan variabel kontrol atas nilai pasar yaitu ukuran perusahaan (*size*), pertumbuhan perusahaan (*growth*) dan *leverage*.

### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel independen nilai pasar (*market value*) dihitung dengan menggunakan model Feltham-Ohlson (1996) dengan rumus:

$$V_t = B_t + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t (ROE_t + 1 - r) B_{t-1}}{(1+r)^i}$$

Keterangan:

- $B_t$  = nilai buku ekuitas (*BVE*) pada waktu  $t$
- $E_t$  = nilai ekspektasi koefisien dari *abnormal operating earnings*
- $ROE_t$  = ROE pada periode  $t+1$  dan  $r$  merupakan *cost of capital (COC)*
- $V_t$  = nilai intrinsik saham

*COC* dihitung dengan rumus model *CAPM* (Botosan, 1996)

$$COC = R_{ft} + \beta(R_{mt} - R_{ft})$$

- $R_{ft}$  = *risk free* (tingkat suku bunga Bank Indonesia)
- $\beta$  = risiko pasar/beta saham
- $R_{mt}$  = *return market*

Risiko saham/beta, return market dan return saham dihitung dengan rumus berikut: (Jogiyanto, 2003)

$$\text{Beta} = \frac{(n \sum R_m \cdot R_i \cdot \sum R_m \sum R_i)}{(n \sum R_m^2 \cdot (\sum R_m)^2)}$$

$$R_m = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

Keterangan:  $R_m$  (*return market*) dan  $R_i$  (*return saham*)

Variabel independen manajemen laba diukur dengan menggunakan model *Modified Jones* (1991) karena Dechow et al, (1995) menyatakan bahwa model ini memberikan kekuatan statistik yang tinggi untuk mendeteksi adanya manipulasi laba. Pada model ini *discretionary accruals* digunakan sebagai proksi dari manajemen laba. Jika terjadi

manajemen laba maka nilai *discretionary accruals* signifikan. Sebelum menggunakan model Jones (1991), maka dihitung dulu total akrual sesuai dengan rumusan Healy (1985), yaitu:

$$TA_{it} = (\Delta CA_t - \Delta CL_t - \Delta Cash_t - Dep_t) / A_{it-1} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

$\Delta CA_t$  = perubahan *current assets* selain kas

$\Delta CL_t$  = perubahan *current liabilities*

$\Delta Cash_t$  = perubahan *cash* dan ekuivalennya

$Dep_t$  = beban depresiasi dan amortisasi

$A_{it-1}$  = total aset tahun sebelumnya

Kemudian deteksi *discretionary accruals* dan *non- discretionary accruals* dengan persamaan berikut: nilai total akrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

$TA_{it}$  = total akrual pada tahun t untuk perusahaan i

$\Delta Rev_{it}$  = perubahan pendapatan pada tahun t dan t-1

$PPE_{it}$  = total property, plant dan equipment pada tahun t

$A_{it-1}$  = total aset tahun t-1

e = error pada tahun t untuk perusahaan i

i = perusahaan

t = tahun ke 1, 2, ... (periode estimasi untuk perusahaan i)

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung dengan rumus :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - (\alpha (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / A_{it-1})) \dots\dots\dots (3)$$

Jika manajemen melakukan manajemen laba maka akan diperoleh nilai *discretionary accruals* positif atau negatif yang signifikan.

Variabel kontrol yang digunakan atas nilai pasar saham yaitu ukuran perusahaan (*size*), pertumbuhan (*growth*) dan *leverage* (*Lev*), dengan operasionalisasi sebagai berikut:

- Ukuran perusahaan (*LSize*) diukur menggunakan logaritma (log) dari total aset.

- Pertumbuhan perusahaan menggunakan pertumbuhan dalam penjualan (*Growth*) yang dihitung dengan rumus:

$$Growth = \frac{\text{sales tahun ini} - \text{sales tahun sebelumnya}}{\text{sales tahun sebelumnya}}$$

Mak and Kusnadi (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan terkait dengan nilai perusahaan dan hubungannya positif dan signifikan.

- Tingkat utang (*Leverage*) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset.

### 3.3. Model Persamaan Penelitian

Untuk menguji hipotesis maka dibuat model yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Model disusun menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$MValue = \alpha_0 + \alpha_1 DACC + \alpha_2 Risk + \alpha_3 OIns + \alpha_4 OMgt + \alpha_5 LSize + \alpha_7 SGrowth + \alpha_8 Lev + \varepsilon \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

*DACC* = discretionary accruals; *Risk* = risiko pasar (*beta*); *Oins* = kepemilikan institusional; *OMgt* = kepemilikan manajemen; ukuran perusahaan (*LSize*), pertumbuhan perusahaan (*Growth*) dan tingkat utang (*Lev*).

### 3.4. Pengolahan Data dan Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan program SPSS 17 dan Eviews 7 dalam mengolah data dan melakukan pengujian statistik. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. (Winarno, 2009)

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan metode regresi berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik. Hal ini dimaksudkan agar model regresi dapat menghasilkan penduga (*estimator*) yang tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2005). Seluruh tabel dan gambar hasil pengujian uji asumsi klasik disajikan pada Lampiran 3.

### 3.4.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 3.2. Uji normalitas dalam pengujian ini menggunakan *One-sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* residual model regresi di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Selain menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dilakukan analisis plot normalitas yang diperlihatkan pada Gambar 3.2. Gambar tersebut memperlihatkan titik-titik berada di sepanjang garis. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal.

### 3.4.2. Uji Multikolinearitas

Pada matrik korelasi, jika antar variabel bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Selain itu, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance* TOL. Batas VIF adalah  $<10$ . Terlihat pada Tabel 3.3 bahwa nilai  $VIF < 10$  untuk seluruh variabel penelitian, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas multikolinearitas.

### 3.4.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi diuji dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (D-W). Uji D-W merupakan salah satu uji untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi (Winarno, 2009). Apabila koefisien D-W ( $d$ ) akan berada di kisaran 1.54-2.46 maka tidak ditemukan adanya autokorelasi. Koefisien Durbin-Watson menunjukkan angka 2,046 yang menunjukkan bahwa dalam model penelitian tidak menunjukkan adanya autokorelasi antara satu residual dengan residual observasi lainnya.

### 3.4.4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey (Winarno,2009). Pada uji ini, nilai residual absolut diregresi dengan variabel Independent. Jika pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara statistik adalah signifikan, maka terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dengan menggunakan software Eviews7 menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel utama menunjukkan nilai yang tidak signifikan, artinya bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas.

### 3.5. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian atas model regresi berganda untuk menguji hipotesis menggunakan SPSS 17 dengan menggunakan model persamaan (4) yang telah disusun yaitu:

$$Mvalue = \alpha_0 + \alpha_1 DACC + \alpha_2 Risk + \alpha_3 OIns + \alpha_4 OMgt + \alpha_5 LSize + \alpha_7 Growth + \alpha_8 Lev + \varepsilon \dots \dots \dots (4)$$

Signifikansi level yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 1%,5% dan 10%. Hasil regresi disajikan pada Tabel 3.6 dan tabel 3.7 pada Lampiran 4. Menunjukkan bahwa beberapa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 15.5% (Adj-R Squared=0,155), sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Tabel 3.7 menyajikan koefisien hasil regresi, sehingga membentuk model persamaan regresi penelitian ini, yaitu:

$$MValue = 155 + 8,0DACC - 5,1Risk + 14,3OwIns + 28,5OMgt + 11,2LSize + 5,1Growth - 5,9Lev + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 4. Result

Dalam penelitian ini nilai *discretionary accruals (DACC)* digunakan sebagai proksi adanya manajemen laba (*earnings management*) dan risiko sistematis (beta saham)



merupakan proksi dari risiko pasar (*Risk*). Sedangkan untuk variabel kepemilikan baik institusi (*OwIns*) maupun manajerial (*OMgt*) dinilai berdasarkan jumlah kepemilikan saham masing-masing yang dibandingkan dengan keseluruhan jumlah saham beredar.

Tabel hasil perhitungan nilai *DACC* dan data statistik deskriptif disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 4.

#### 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data penelitian yang mengacu pada metodologi yang digunakan telah menghasilkan nilai hasil pengujian hipotesis dan hasil regresi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan dilakukan analisis atas hasil statistik deskriptif tabel 4.1 dan ringkasan hasil regresi yang pada tabel 4.2. Selanjutnya analisis dan pembahasan akan dikembangkan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Hasil pengujian statistik deskriptif yang diperlihatkan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel nilai saham (*MValue*) memiliki nilai rata-rata (*mean*) 20,27 dengan nilai maksimum 254,47, hal ini menunjukkan bahwa penilaian investor terhadap nilai saham pada perusahaan sampel secara rata-rata masih rendah. Proksi manajemen laba (*DACC*) menunjukkan nilai minimum negatif (-2,20) dan maksimum 0,95. Nilai rata-ratanya negatif (-0,60) menunjukkan bahwa nilai *discretionary accruals* mendekati nilai 0, yang artinya bahwa manajemen laba pada perusahaan sampel tidak bertujuan untuk merekayasa laba tetapi karena proses pencatatan akrual yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Nilai risiko pasar (*Risk*) menunjukkan nilai rata-rata 0,67 dengan nilai minimum -4,5 dan maksimum 2,32 memperlihatkan bahwa secara rata-rata beta saham pada perusahaan sampel memiliki nilai dibawah angka 1, yang berarti memiliki risiko sistematis lebih kecil dibandingkan risiko pasar.

Nilai kepemilikan institusi dalam perusahaan mempunyai proporsi yang tinggi atas kepemilikan saham perusahaan. Sementara kepemilikan manajerial (*OMgt*) secara rata-rata hanya 0,084 (8,4%). Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam perusahaan sampel kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris masih sedikit dibandingkan kepemilikan institusi yang memiliki rata-rata 0,197.

Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (*LSize*), *Growth* dan *leverage* untuk perusahaan sampel mempunyai nilai rata-rata diatas nilai minimum cukup jauh. Ukuran perusahaan yang diproksikan total aset memiliki total aset yang cukup tinggi dengan nilai 12 mendekati nilai maksimum 13. Untuk *growth*, nilai rata-rata cukup rendah 11% dibandingkan nilai maksimum 142%. Nilai *leverage* yang menunjukkan banyaknya utang perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 55% dengan nilai maksimum 88%. Menandakan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki utang cukup banyak.

## 4.2. Analisis Hasil Regresi

Tabel 4.2 menyajikan ringkasan atas hasil regresi atas variabel independen yang dihubungkan dengan pengujian hipotesis dengan nilai *p-value* dari hasil Tabel 3.7

Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Regresi

Variabel Independent	Hasil ( $\alpha = 0.01, 0.05, 0.10$ )
Manajemen laba ( <i>DACC</i> ) positif signifikan	$p\text{-value} = 0.053 < 0.10$
Risiko Pasar ( <i>Risk</i> ) negatif signifikan	$p\text{-value} = 0.074 < 0.10$
Kepemilikan Institusi ( <i>Owns</i> ) tidak signifikan	$p\text{-value} = 0.163 > 0.10$
Kepemilikan Manajerial ( <i>OMgt</i> ) positif signifikan	$p\text{-value} = 0.093 < 0.10$
Ukuran Perusahaan ( <i>LSize</i> ) positif signifikan	$p\text{-value} = 0.095 < 0.10$
Pertumbuhan Penjualan ( <i>Growth</i> ) positif signifikan	$p\text{-value} = 0.076 < 0.10$
Tingkat Utang ( <i>Lev</i> ) tidak signifikan	$p\text{-value} = 0.569 > 0.10$

Sumber: data diolah dari hasil regresi SPSS 17

### 4.2.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Pasar

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba (*earnings management*) signifikan ( $p\text{-value} = 0.053$ ) berpengaruh terhadap nilai pasar dan mempunyai arah positif. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis awal (H1) bahwa terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai pasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Fischer dan Rosenzweig (1995) bahwa *earnings management* adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasi sebagai suatu keuntungan. Sloan (1996) menguji sifat kandungan informasi komponen akrual dan komponen aliran kas apakah terefleksi dalam harga saham. Terbukti bahwa kinerja laba yang berasal dari komponen akrual sebagai aktifitas manajemen laba memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. Laba yang dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan saat tertentu, tidak untuk jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Widjaja (2004) yang menyatakan manajemen laba tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan

manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan dan berakibat pada penurunan nilai perusahaan (Mayangsari, 2001).

#### 4.2.2. Pengaruh Risiko Pasar terhadap Nilai Pasar

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai risiko pasar signifikan ( $p\text{-value} = 0.074$ ) berpengaruh terhadap nilai pasar dan mempunyai arah negatif. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis awal (H2) bahwa terdapat pengaruh risiko pasar terhadap nilai pasar. Investor dalam berinvestasi selalu mempertimbangkan resiko, oleh karena itu selalu memilih resiko sampai tingkat tertentu untuk mendapatkan *gain* yang maksimal. Pengurangan resiko dapat dilakukan dengan memilih jenis saham yang berkinerja baik. Selain resiko dan kinerja perusahaan, investor juga perlu memperhatikan *transaction cost* untuk menentukan lamanya memegang *financial asset* tersebut (Amihud dan Mendelson, 1986). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat resiko pasar yang tinggi dapat menurunkan nilai pasar karena menyebabkan investor tidak tertarik untuk melakukan investasi. Kothari dan Zimmerman (1995) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki saham yang berisiko rendah, informasi laba yang disampaikan akan direaksi positif oleh pasar, sehingga ERC perusahaan tersebut tinggi. Sebaliknya, semakin berisiko *return* yang diharapkan di masa yang akan datang dari suatu perusahaan, pemodal akan memberikan reaksi yang lebih rendah terhadap laba yang tak terduga, hal tersebut berakibat pada nilai saham perusahaan.

#### 4.2.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Pasar

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusi tidak signifikan ( $p\text{-value} = 0.163$ ). Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal (H3a) bahwa terdapat pengaruh kepemilikan institusi terhadap nilai pasar. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan

kinerja perusahaan. Mamduh (2003) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan keberadaan kepemilikan institusi tidak secara langsung terlibat dalam operasionalisasi perusahaan sehingga nilai pasar akan tergantung dari kinerja perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak lain/manajer. Sebab lain adalah kurangnya pengendalian dari kepemilikan institusi terhadap kinerja manajemen pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial cukup tinggi. Boediono (2005) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap nilai perusahaan ( $p\text{-value} = 0.093$ ). Hasil penelitian ini mendukung hipotesis awal (H3b) bahwa terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial, pihak manajemen tentunya akan mengutamakan kepentingan pemegang saham karena mereka juga sebagai pemegang saham. Manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Hartono dan Mahadwarta, 2002). Sedangkan Suranta dan Machfoedz (2003) mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa nilai perusahaan akan lebih tinggi ketika direktur memiliki bagian saham yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Semakin

terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan nilai saham perusahaan.

#### 4.2.4. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Nilai Perusahaan

Variabel kontrol dalam model regresi penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan (*size*), pertumbuhan penjualan (*growth*) dan *leverage*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap nilai pasar ( $p\text{-value} = 0.095$ ) dan mempunyai arah positif sehingga semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin meningkatkan nilai pasar. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Majamdar (1997) yang menyatakan bahwa terjadi hubungan positif antara ukuran perusahaan (total aset) dan kinerja perusahaan yang berakibat pada peningkatan harga saham.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *growth* signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ( $p\text{-value} = 0.076$ ) dan mempunyai arah positif sehingga semakin bertambah *growth* perusahaan maka semakin meningkatkan nilai pasar. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mak and Kusnadi (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan terkait dengan nilai perusahaan dan hubungannya positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan teori dasar yang menyatakan bahwa tingginya kinerja perusahaan memiliki kesempatan bertumbuh tinggi (Darmawati, 2005).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* tidak signifikan berpengaruh terhadap nilai pasar ( $p\text{-value} = 0.569$ ). Hasil ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh *leverage* terhadap nilai pasar. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Dhaliwal et al, (1991) bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, setiap peningkatan laba (sebelum bunga) akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu keamanan. Jadi peningkatan laba lebih banyak akan direspon oleh *debtholder*, bukan oleh *shareholder* sehingga ERC perusahaan yang tinggi utangnya akan lebih rendah (Dhaliwal et al 1991) dibandingkan dengan perusahaan yang rendah tingkat utangnya. Core dan Schrand

(1999) juga membuktikan bahwa reaksi harga saham terhadap laba yang tak terduga akan meningkat pada saat perusahaan hampir menghadapi pelanggaran perjanjian utang.

## 5. Conclusion, Limitation and Implication

### 5.1. Conclusion

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa: Manajemen laba (*earnings management*) yang diproksikan dengan nilai *discretionary accruals* signifikan berpengaruh terhadap nilai pasardan mempunyai arah positif sehingga semakin tinggi nilai manajemen laba maka akan meningkatkan nilai pasar; Risiko pasar (*systematic risk/beta*) signifikan berpengaruh terhadap nilai pasardan mempunyai arah positif sehingga semakin tinggi nilai risiko pasar maka akan semakin meningkatkan nilai pasar; Kepemilikan institusi (*institutional ownership*) tidak signifikan menunjukkan peningkatan maupun penurunan jumlah kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap nilai pasar; Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) signifikan berpengaruh terhadap nilai pasar dan mempunyai arah positif sehingga semakin bertambah kepemilikan maka semakin meningkatkan nilai pasar.

Variabel kontrol nilai perusahaan yang diproksikan dengan umur perusahaan (*age*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan ukuran perusahaan/total aset (*size*) menunjukkan hasil sebagai berikut: ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap nilai pasar dan mempunyai arah positif; pertumbuhan penjualan signifikan berpengaruh terhadap nilai pasar dan mempunyai arah positif; tingkat utang tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis H1, H2 dan H4 terbukti, sedangkan H3 tidak terbukti.

### 5.2. Limitation

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari database OSIRIS, ICMD dan Laporan Keuangan atau *Annual Report* dari Bursa Efek Indonesia terkadang terdapat perbedaan dalam jumlah sehingga terdapat kesulitan menentukan jumlah yang tepat.

Hal tersebut juga mempengaruhi nilai yang diperoleh terutama dalam melakukan pengukuran nilai *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba yang banyak menggunakan data akuntansi. Keterbatasan lainnya adalah jumlah sampel penelitian yang terbatas sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak bisa digeneralisasikan untuk industri yang tidak sejenis.

### **5.3. Implication and Future Research**

Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap perkembangan pasar modal terutama di Indonesia, bahwa peningkatan manajemen laba dan risiko saham berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai pasar. Hasil ini memperlihatkan bahwa para investor tetap dapat memperoleh *return* yang tinggi meski perusahaan melakukan manajemen laba.

Untuk penelitian mendatang, kemungkinan dapat digunakan proksi manajemen laba (*earnings management*) lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan di Indonesia. Sampel penelitian diperluas baik dalam jumlah atau dalam waktu penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang memadai.



## References

- Anastasia, Njo. 2001. Analisis Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham Properti di BEJ, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Kristen Petra Vol.5 No.2: 123-131.
- Anoraga, Pandji dan Pakarti Piji,. 2006. Pengantar Pasar Modal, Cetakan Kelima, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Ball, Ray and Philip Brown. 1968. "An Empirical Evaluation of Accounting Income Number". *Journal of Accounting Research*. Vol 6
- Beaver, William H. 1968. "The Information Content of Annual Earnings Announcement." *Journal of Accounting Research*. pp.67-92 Beaver, William H. 2002. "Perspective on Recent Capital Market Research". *The Accounting Review*. pp. 453-474
- Bhagat, S., Black, B., 2002. The non-correlation between board independence and long term firm performance. *Journal of Corporation Law*, 27, 231–274.
- Bjuggren, Per-Olof, Johan E. Eklund, dan Daniel Wiberg, 2007. Institutional Owners and Firm Performance. *Working Paper*, Royal Institute of Technology, Stockholm, February, pp 1-26.
- Boediono, Gideon. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan menggunakan Analisis Jalur, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo,
- Bonn, I., Yoshikawa, T. dan Phan, P. H. 2004, 'Effects of Board Structure on Firm Performance: A Comparison between Japan and Australia', *Asian Business & Management*, vol. 3, pp. 105-125.
- Brigham and Ehrhardt. 2005. Financial Management: Theory And Practice, Eleventh Edition, Thomson South-Western Ohio, United States Of America
- Brigham, Eugene F; Gapenski, Louis C. 2005. Financial Management Theory and Practice, Florida: Dryden Press.
- Christie, A. A., and J. L. Zimmerman. 1994. "Efficient and Opportunistic Choice of Accounting Procedures: Corporate Control Contest. *The Accounting Review*. Vol. 69. October: 539 – 566.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. <http://papers.ssrn.com/>
- Dechow, P.M., R.G. Sloan. and A.P. Sweeney. 1995. "Detecting Earning Management". *The Accounting Review*. Vol 70. pp 193-225
- DeFond, M. dan C.W. Park. 1997. "Smoothing Income in Anticipation of Future Earning". *Journal of Accounting and Economics*. Vol 23, pp.115-140.
- Dhaliwal, Dan S., Micah Frankel, and Robert Trezervant. 1994. "The Taxable and Book Income Motivation for LIFO Layer Liquidation". *Journal of Accounting Research*. Autumn. pp 278-287

- Easton, P. D., and M. E. Zmijewski. 1989. Cross-sectional Variation in the Stock Market Response to Accounting Earning Announcement. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 11. July: 117 – 141.
- Fidyati, Nisa. 2004. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earning Management Pada Perusahaan Seasoned Equity Offering (SEO), *Jurnal Ekonomi & Akuntansi*, Vol .2, No. 1.
- Fitdini, J. Eka. 2009. “Hubungan Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas dengan Kondisi Financial Distress”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam. 2005. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Guay, W. R., S. P. Kothari, and R. L. Watts. 1996. “A Market Based Evaluation of Discretionary Accrual Models. *Journal of Accounting Research*. Vol. 34. pp. 83 – 105.
- Gul, F. A., S. Leung, dan B. Srinidhi. 2000. ”The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earning – Returns Relationship and the Pricing of Discretionary Accruals.” *Working Paper*: 1 – 36.
- Hartono, Jogiyanto dan Mahadwartha Putu Anom. 2002. Uji Teori Keagenan Dalam Hubungan Interpendensi antara Kebijakan Utang dengan Kebijakan Dividen, *Simposium Nasional Akuntansi V*, Hal: 635-647.
- Healy, P.M. 1985. “The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions”. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 7. pp. 85-107
- Healy, P.M., and J.M. Wahlen, 1998. “A Review of The Earning Management Literature and Its Implication for Standard Setting”, *Working Paper*.
- Healy, P.M., and K.G. Palepu. 1993. “The Effect of Firm’s Financial Disclosure Strategies on Stock Prices”. *Accounting Horizons*. pp. 1-11
- Hidayati, Siti Munfiah dan Zulaikha. 2003. “Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax”. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya
- Ismiyanti, Fitri dan Mamduh M. H. 2003. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen: Analisis Persamaan Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober, Surabaya.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics*. October. pp 305-360
- Jiambalvo, J. 1996. “Discussion of Causes and Consequences of Earnings Manipulation, *Contemporary Accounting Research*. Vol. 13. Spring, p.37-47.
- Jogiyanto, H.M. 2003. “*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*”. Edisi 4. BPFE, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Jones, J. 1991. “Earning Management during Import Relief Investigation.” *Accounting Research*. Vol. 29. Autumn: 193 – 228.
- Machfoedz, Mas’ud. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Juli. Hal 174-191

- Mak, Y. T. and Kusnadi, Y. 2005. Size really matters: Further evidence on the negative relationship between board size and firm value, *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol.13, pp.301-318
- Midiastuty, P.P. dan Machfoedz M. 2003. "Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba", *Simposium Nasional Akuntansi VI*, p 176-199.
- Nasir, M., Arifin dan A. Suzanti. 2002. "Analisa Pengaruh Perataan Laba terhadap Risiko Pasar Saham dan Return Saham Perusahaan-Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta". *Kompak*. Mei. pp 139-157
- Nawari, 2010, Analisis Regresi dan SPSS 17, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ohlson, James A. 1995. "Earnings, Book Values, and dividends in Equity Valuation." *Contemporary Accounting Research*. Vol. 11 (2). Spring: 661-687.
- Rahwamati dan Zaki Baridwan 2006, "Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi Perbankan, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba dengan Model Akrua Khusus Perbankan", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol 6, no. 2, p 139-150.
- Richardson, V.J. 1998 "Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence". <http://www.ssrn.com>.
- Rusdin. 2006. Pasar Modal. Alfabeta. Bandung.
- Salno, Hanna dan Baridwan, Zaki. 2000. "Analisis Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.3, No.1, hal 17-34.
- Scott, W.R. 1997. *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im, 2000, "Manajemen Laba", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol.15, No.4, 424-441
- Siallagan, Hamonangan dan M. Machfoedz. 2006. "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Sloan, R. 1996. "Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings?" *The Accounting Review*. pp 289-315
- Subali, dan Zuhroh, Diana. 2002. "Analisis Pengaruh Transaction Cost terhadap Holding Period Saham Biasa." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5.No. 2, hal:193- 213.
- Subramanyam, K. 1995. "The Pricing of Discretionary Accruals". *Journal of Accounting and Economics*. Vol 22 August-December. pp. 249-281.
- Sudarma, M. 2004. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Faktor Intern dan Faktor Ekstern terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan (studi pada Industri yang Go-Public di Bursa Efek Jakarta), Disertasi, Universitas Brawijaya
- Suharli, Michell. 2005. Earning Management: Konsep, Penelitian, dan Implikasi terhadap Praktik Akuntansi, *Balance*, vol 2, no. 2, p 40-58
- Sukartha, Made, 2007, "Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.10, No.3 (September) Hal: 243-

- Sulistiyanto, Sri H. 2008, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, Grasindo, Jakarta.
- Suranta, Eddy dan Machfoedz, Mas'ud. 2003. "Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Suranta, Eddy dan Midiastuty, Pratana. 2003. Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan dan Investasi dengan Model Persamaan Linier Simultan, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.6, No.1, hal. 54-68.
- Suranta, Eddy dan Midiastuty, Pratana. 2004. Income Smoothing, Tobins Q, Agency Problems dan Kinerja Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 15-16 September Solo.
- Ujiyanto, M dan Pramuka B. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Watts, Ross L. dan Zimmerman Jerold L. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten – Year Perspective." *Accounting Review*. Vol. 65. January: 131 – 156.
- Wibisono, Haris. 2004. Pengaruh Earning Manajemen terhadap Kinerja di Seputar SEO. Tesis S2. Magister Sains Akuntansi UNDIP. Tidak Dipublikasikan.
- Widiastuti, Tri 2009, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI", *Jurnal Maksi*, vol. 9, no.1, p 30-41
- Widyaningsih, Agnes U. 2001. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol.3, No.2, hal. 89-101.
- Winarno, Wing W. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

## Appendix

### Lampiran 1

#### DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No	Stock	Company name
1	ADES	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
2	AKRA	PT AKR CORPORINDO TBK
3	AKKU	PT ANEKA KEMASINDO UTAMA TBK
4	MYTX	PT APAC CITRA CENTERTEX TBK
5	AQUA	PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK
6	AKPI	PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY TBK
7	ARGO	PT ARGO PANTES TBK
8	ARNA	PT ARWANA CITRA MULIA
9	POLY	PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK
10	APLI	PT ASIAPLAST INDUSTRIES
11	ASGR	PT ASTRA GRAPHIA TBK
12	AUTO	PT ASTRA OTOPARTS TBK
13	BNBR	PT BAKRIE & BROTHERS TBK
14	BRPT	PT BARITO PACIFIC TBK
15	RMBA	PT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK
16	BRNA	PT BERLINA TBK
17	BETON	PT BETONJAYA MANUNGGAL TBK
18	BUDI	PT BUDI ACID JAYA
19	BUMI	PT BUMI RESOURCES TBK
20	CEKA	PT CAHAYA KALBAR TBK
21	CMPP	PT CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA TBK
22	CTBN	PT CITRA TUBINDO TBK
23	DVLA	PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
24	DAVO	PT DAVOMAS ABADI TBK
25	DLTA	PT DELTA DJAKARTA TBK
26	DPNS	PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK
27	DYNA	PT DYNAPLAST TBK
28	EPMT	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
29	ETWA	PT ETERINDO WAHANATAMA TBK
30	FASW	PT FAJAR SURYA WISESA TBK
31	FAST	PT FAST FOOD INDONESIA TBK
32	GJTL	PT GAJAH TUNGGAL TBK
33	GDYR	PT GOODYEAR INDONESIA TBK
34	HMSP	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA
35	SMCB	PT HOLCIM INDONESIA TBK
36	INKP	PT INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION TBK
37	BRAM	PT INDO KORDSA TBK
38	INTP	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
39	INAF	PT INDOFARMA (PERSERO) TBK

40	INDF	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
41	INDR	PT INDORAMA SYNTHETICS TBK
42	INDS	PT INDOSPRING TBK
43	INTA	PT INTRACO PENTA TBK
44	JKSW	PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LIMITED TBK
45	JPFA	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
46	JPRS	PT JAYA PARI STEEL TBK
47	KBLM	PT KABELINDO MURNI
48	KLBF	PT KALBE FARMA TBK
49	KICI	PT KEDAUNG INDAH CAN TBK
50	KDSI	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
51	KAEF	PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
52	LION	PT LION METAL WORKS TBK
53	MEDC	PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
54	MLBI	PT MULTI BINTANG INDONESIA
55	MRAT	PT MUSTIKA RATU TBK
56	NIPS	PT NIPRESS TBK
57	TKIM	PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
58	ADMG	PT POLYCHEM INDONESIA TBK
59	SCPI	PT SCHERING-PLOUGH INDONESIA TBK
60	SMGR	PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
61	BATA	PT SEPATU BATA TBK
62	STTP	PT SIANTAR TOP TBK
63	SIMA	PT SIWANI MAKMUR TBK
64	IKBI	PT SUMI INDO KABEL TBL
65	TOTO	PT SURYA TOTO INDONESIA TBK
66	TRST	PT TRIAS SENTOSA TBK
67	TURI	PT TUNAS RIDEAN TBK
68	ULTJ	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK
69	UNVR	PT UNILEVER INDONESIA TBK
70	UNTR	PT UNITED TRACTORS TBK
71	WIKA	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
72	YPAS	PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK



## Lampiran 2

### HASIL PERHITUNGAN DISCRETIONARY ACCRUALS TAHUN 2008-2009

No	Stock	Company name	DACC 2009	DACC 2008	Selisih DACC
1	ADES	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK	-0,596	-0,666	0,070
2	AKRA	PT AKR CORPORINDO TBK	-0,869	-1,660	0,791
3	AKKU	PT ANEKA KEMASINDO UTAMA TBK	-0,334	-0,250	-0,084
4	MYTX	PT APAC CITRA CENTERTEX TBK	-0,512	-0,311	-0,202
5	AQUA	PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK	-0,469	-0,803	0,334
6	AKPI	PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY TBK	-0,516	-0,697	0,181
7	ARGO	PT ARGO PANTES TBK	-0,616	-0,713	0,097
8	ARNA	PT ARWANA CITRA MULIA	-0,961	-0,995	0,034
9	POLY	PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK	-0,357	-0,534	0,177
10	APLI	PT ASIAPLAST INDUSTRIES	-0,610	-1,024	0,414
11	ASGR	PT ASTRA GRAPHIA TBK	-0,455	-0,798	0,343
12	AUTO	PT ASTRA OTOPARTS TBK	-0,307	-0,539	0,232
13	BNBR	PT BAKRIE & BROTHERS TBK	-0,950	-0,837	-0,113
14	BRPT	PT BARITO PACIFIC TBK	-0,593	-1,762	1,169
15	RMBA	PT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK	-0,405	-0,620	0,214
16	BRNA	PT BERLINA TBK	-0,600	-0,792	0,192
17	BETON	PT BETONJAYA MANUNGGAL TBK	-0,442	-1,421	0,979
18	BUDI	PT BUDI ACID JAYA	-0,746	-0,790	0,044
19	BUMI	PT BUMI RESOURCES TBK	-0,747	-0,798	0,051
20	CEKA	PT CAHAYA KALBAR TBK	-0,296	-2,203	1,907
21	CMPP	PT CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA TBK	-0,195	-0,360	0,165
22	CTBN	PT CITRA TUBINDO TBK	-0,403	-0,388	-0,014
23	DVLA	PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK	-0,360	-0,398	0,038
24	DAVO	PT DAVOMAS ABADI TBK	-0,505	-0,766	0,261
25	DLTA	PT DELTA DJAKARTA TBK	-0,323	-0,606	0,284
26	DPNS	PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK	0,016	-0,185	0,201
27	DYNA	PT DYNAPLAST TBK	-0,693	-0,862	0,168
28	EPMT	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK	-0,305	-0,628	0,323
29	ETWA	PT ETERINDO WAHANATAMA TBK	0,005	-0,684	0,689
30	FASW	PT FAJAR SURYA WISESA TBK	-0,672	-0,808	0,135
31	FAST	PT FAST FOOD INDONESIA TBK	-0,437	-0,974	0,537
32	GJTL	PT GAJAH TUNGGAL TBK	-0,444	-0,582	0,138
33	GDYR	PT GOODYEAR INDONESIA TBK	-1,114	-1,213	0,099
34	HMSP	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	-0,295	-0,588	0,293
35	SMCB	PT HOLCIM INDONESIA TBK	-0,772	-0,935	0,163
36	INKP	PT INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION TBK	-0,884	-0,923	0,039
37	BRAM	PT INDO KORDSA TBK	-0,456	-0,477	0,021
38	INTP	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	-0,801	-1,004	0,202
39	INAF	PT INDOFARMA (PERSERO) TBK	-0,059	-0,294	0,234
40	INDF	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	-0,672	-0,872	0,200

41	INDR	PT INDORAMA SYNTHETICS TBK	-0,667	-0,683	0,016
42	INDS	PT INDOSPRING TBK	-0,547	-1,018	0,471
43	INTA	PT INTRACO PENTA TBK	-0,297	-0,525	0,228
44	JKSW	PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LIMITED TBK	-0,192	-0,365	0,173
45	JPFA	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	-0,585	-1,315	0,730
46	JPRS	PT JAYA PARI STEEL TBK	-0,375	-1,186	0,811
47	KBLM	PT KABELINDO MURNI	-0,576	-1,064	0,488
48	KLBF	PT KALBE FARMA TBK	-0,344	-0,428	0,084
49	KICI	PT KEDAUNG INDAH CAN TBK	-0,143	0,128	-0,272
50	KDSI	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK	-0,258	-0,633	0,375
51	KAEF	PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	-0,319	-0,531	0,212
52	LION	PT LION METAL WORKS TBK	-0,224	-0,316	0,092
53	MEDC	PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK	-0,612	-0,623	0,011
54	MLBI	PT MULTI BINTANG INDONESIA	-0,787	-1,206	0,420
55	MRAT	PT MUSTIKA RATU TBK	-0,292	-0,361	0,069
56	NIPS	PT NIPRESS TBK	-0,551	-0,746	0,195
57	TKIM	PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK	-0,706	-0,709	0,003
58	ADMG	PT POLYCHEM INDONESIA TBK	-0,464	-0,562	0,098
59	SCPI	PT SCHERING-PLOUGH INDONESIA TBK	-0,607	-0,106	-0,501
60	SMGR	PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	-0,575	-0,692	0,116
61	BATA	PT SEPATU BATA TBK	-0,561	-0,555	-0,006
62	STTP	PT SIANTAR TOP TBK	-0,694	-0,679	-0,015
63	SIMA	PT SIWANI MAKMUR TBK	-0,401	0,255	-0,656
64	IKBI	PT SUMI INDO KABEL TBL	-0,267	-0,301	0,034
65	TOTO	PT SURYA TOTO INDONESIA TBK	-0,495	-0,703	0,208
66	TRST	PT TRIAS SENTOSA TBK	-0,616	-0,792	0,176
67	TURI	PT TUNAS RIDEAN TBK	-0,262	-0,530	0,268
68	ULTJ	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK	-0,682	-1,030	0,348
69	UNVR	PT UNILEVER INDONESIA TBK	-0,647	-1,055	0,408
70	UNTR	PT UNITED TRACTORS TBK	-0,949	-1,480	0,531
71	WIKA	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	-0,341	-0,632	0,290
72	YPAS	PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK	-0,860	-0,996	0,136



### Lampiran 3

#### Hasil uji asumsi klasik

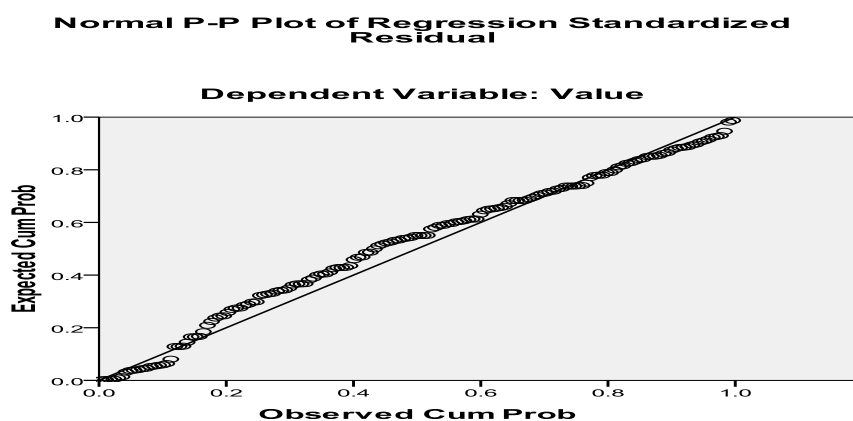
**Tabel 3.2 Uji Normalitas**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Value	.625	144	.078	.875	144	.082

a. Lilliefors Significance Correction

Data diolah menggunakan software SPSS versi 17



**Gambar 3.2. Analisis Plot Normalitas**

**Tabel 3.3 Uji Multikolineritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	155.208	78.792		1.970	.051		
	DACC	8.018	12.873	.061	.623	.053	.735	1.361
	Risk	-5.123	6.526	-.070	-.785	.074	.870	1.149
	OwIns	14.313	15.696	.084	.912	.163	.815	1.227
	OMgt	28.538	16.854	.163	1.693	.093	.755	1.324
	LSize	11.162	6.641	.165	1.681	.095	.725	1.379
	Growth	5.153	14.700	.034	.351	.076	.755	1.325
	Lev	-5.930	10.394	-.048	-.571	.569	.965	1.037

a. Dependent Variable: MValue

Data diolah menggunakan software SPSS versi 17

**Tabel 3.4. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 <sup>a</sup>	.163	.155	544.962	2.046

a. Predictors: (Constant), LEV, Growth, DACC, Risk, OwnIn, LSize, OwMg

b. Dependent Variable: MValue

**Tabel 3.5 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.785643	Prob. F(6,149)	0.7434
Obs*R-squared	2.532300	Prob. Chi-Square(6)	0.7247
Scaled explained SS	4.765906	Prob. Chi-Square(6)	0.7322

Test Equation:  
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares  
Date: 06/03/11 Time: 17:05  
Sample: 1 144  
Included observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.006753	0.006511	1.276643	0.3799
DACC	0.004530	0.005430	0.769396	0.6486
RISK	0.005390	0.006340	0.648044	0.5587
OWINS	0.004580	0.003240	0.834095	0.6467
OMGT	0.005290	0.004337	2.340805	0.3264

R-squared	0.087254	Mean dependent var	0.005490
Adjusted R-squared	0.109020	S.D. dependent var	0.005350
S.E. of regression	0.007340	Akaike info criterion	6.233436
Sum squared resid	0.008460	Schwarz criterion	7.643903
Log likelihood	340.5320	Hannan-Quinn criter.	7.240132
F-statistic	0.085403	Durbin-Watson stat	2.060121
Prob(F-statistic)	0.086590		

Data diolah menggunakan software Eviews 7

## Lampiran 4

**Tabel 4.1 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
MValue	144	-279.68	254.47	20.8749	4.20855	50.50255
DACC	144	-2.20	.95	-.6019	.03181	.38175
Risk	144	-4.50	2.32	.6760	.05766	.69192
OwIns	144	0.05	0.256	.1972	.02477	.29729
OMgt	144	0.02	0.12	.0843	.02396	.28758
LSize	144	10.73	13.95	12.2687	.06207	.74484
Growth	144	-1.00	1.42	.1108	.02749	.32988
Lev	144	0.220	0.808	.5544	.03439	.41269
Valid N (listwise)	144					

Data diolah menggunakan software SPSS versi 17

**Tabel 3.6 Hasil Regresi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 <sup>a</sup>	.163	.155	544.962	2.046

a. Predictors: (Constant), LEV, Growth, DACC, Risk, OwnIn, LSize, OwMg

b. Dependent Variable: MValue

**Tabel 3.7 Koefisien Hasil Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	155.208	78.792		1.970	.051		
	DACC	8.018	12.873	.061	.623	.053	.735	1.361
	Risk	-5.123	6.526	-.070	-.785	.074	.870	1.149
	OwIns	14.313	15.696	.084	.912	.163	.815	1.227
	OMgt	28.538	16.854	.163	1.693	.093	.755	1.324
	LSize	11.162	6.641	.165	1.681	.095	.725	1.379
	Growth	5.153	14.700	.034	.351	.076	.755	1.325
	Lev	-5.930	10.394	-.048	-.571	.569	.965	1.037

a. Dependent Variable: MValue

Data diolah menggunakan software SPSS versi 17

## **Dampak Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan terhadap Relevansi Nilai Komponen dalam Laporan Posisi Keuangan : studi pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

*Viska Anggraita\**  
*Universitas Indonesia*

**Abstract:** *We investigate the effects of PSAK 50/55 (2006 revision) financial instruments adoption on value relevance of accounting numbers in the Statement of Financial Position in banking industry. We use 21 samples of bank in Indonesia (public) over 2008 and 2011 period. The main findings are: 1) there are increase in value relevance of book value of equity, book value of net financial assets and other assets after the adoption of PSAK 50/55 (2006 revision) ; 2) no change in the value relevance of loan loss provision after the adoption of PSAK 50/55 (2006 revision)*

**Keywords:** *value relevance, financial assets/ liabilities, PSAK 50/55 (2006 revision)*

---

\* Author can be contacted at: [viskaviska257@yahoo.co.id](mailto:viskaviska257@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

PSAK 50/55 (revisi 2006) yang merupakan adopsi standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) IAS 32 dan IAS 39 tentang Instrumen Keuangan adalah PSAK yang kontroversial terutama karena dampaknya yang besar pada industri perbankan di Indonesia. PSAK ini merupakan standar akuntansi yang kompleks sehingga penerapannya terutama di Industri perbankan dimana instrumen keuangan adalah komponen utama dari aset dan liabilitas bank membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan investasi dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) di industri perbankan diduga memiliki dampak positif terhadap relevansi dan keandalan kualitas informasi di laporan keuangan dan transparansi serta kesenjangan informasi antara pihak internal dan eksternal bank. Perubahan signifikan dari PSAK 50/55 (revisi 2006) antara lain penggunaan nilai wajar yang lebih pervasif dibandingkan PSAK sebelumnya, perhitungan pencadangan penurunan nilai piutang yang lebih objektif, persyaratan klasifikasi dan *derecognition* instrumen keuangan yang lebih ketat, dan tingkat pengungkapan yang lebih komprehensif. Namun disisi lain terdapat kelemahan dari PSAK 50/55 (revisi 2006) yang dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan seperti peningkatan peluang manipulasi manajemen melalui estimasi nilai wajar dan aturan estimasi *loan loss provision* yang tidak *forward looking*. Ditambah lagi karena tingkat kompleksitas yang tinggi dari PSAK 50/55 (revisi 2006) maka bila sumber daya manusianya, baik dari akuntan internal perusahaan maupun auditor eksternal, serta teknologi informasi belum siap maka dapat menyebabkan tingkat akurasi diragukan.

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan penerapan IAS 32 dan 39 tentang instrumen keuangan meningkatkan relevansi laporan keuangan. Duh et al. (2012) dan Papadomous dan Tzivinikos (2012) yang meneliti dampak penerapan IAS 32 dan 39 terhadap relevansi risiko dan hasil temuannya menunjukkan penerapan standar akuntansi instrumen

keuangan (IAS 32/39, SFAS 159) meningkatkan relevansi risiko laba yang dilaporkan. Kedua penelitian ini menemukan penerapan IAS 32 dan 39 meningkatkan relevansi risiko laporan keuangan. Laporan keuangan mengalami volatilitas yang lebih tinggi namun volatilitas ini mencerminkan risiko perusahaan. Fietcher (2011) meneliti dampak penerapan fair value option berdasarkan SFAS 159 yang mana FVO ini juga berlaku di PSAK 50/55 (revisi 2006) dan IAS 32/39. Hasil penelitian menunjukkan FVO mengurangi volatilitas laba yang disebabkan *accounting mismatch* atau dengan kata lain volatilitas laba setelah penerapan IAS 32/39 lebih mencerminkan volatilitas yang disebabkan karena kondisi ekonomi.

Namun demikian penelitian-penelitian terdahulu mengenai standar akuntansi instrumen keuangan IAS 32 dan IAS 39 seperti dijelaskan sebelumnya hampir semuanya dilakukan di negara maju dimana perusahaan-perusahaan memiliki insentif untuk lebih transparan, pasar yang aktif, dan dimana *legal enforcement* kuat. Ali dan Hwang (2000) menemukan negara-negara yang sistem keuangannya lebih berorientasi pada bank dibandingkan pada pasar modal memiliki relevansi data akuntansi yang rendah. Pada negara berkembang seperti Indonesia dimana nilai kapitalisasi pasar tidak terlalu besar, pasar tidak terlalu likuid, dan *legal enforcement* nya lemah maka penggunaan akuntansi nilai wajar dapat menyebabkan prospek *mistatement* yang lebih besar pada laporan keuangan dibandingkan *historical cost*. Tidak adanya pasar yang likuid dan *legal enforcement* yang lemah membuka peluang bagi manajemen untuk memanipulasi perkiraan nilai wajar sehingga menyebabkan keandalan aset keuangan yang dilaporkan rendah. **Hal ini konsisten dengan temuan** Untoro (2012) bahwa manajemen bank melakukan perataan laba melalui diskresi nilai wajar kredit dan nilai wajar aset valas. Di Indonesia peneliti belum menemukan penelitian mengenai dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *value relevance loan loss provision* di perbankan. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *value relevance* instrumen keuangan dalam

laporan keuangan bank. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin menyelidiki secara empiris beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) apakah terjadi peningkatan relevansi nilai buku ekuitas setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) ?; 2) apakah terjadi peningkatan relevansi aset dan liabilitas keuangan yang diakui dalam laporan keuangan PSAK 50/55 (revisi 2006) ?; 3) apakah terjadi peningkatan relevansi loan loss provision (cadangan kerugian penurunan nilai kredit )setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) ?

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Bagi literatur terkait penelitian *value relevance* informasi akuntansi dalam laporan keuangan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mengenai pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) *value relevance* cadangan kerugian penurunan nilai di perbankan di Indonesia.; 2) bagi regulator penelitian ini menguji efektifitas penerapan PSAK 50/55(revisi 2006) terhadap kualitas informasi laba bank bank di Indonesia sehingga dapat memberikan masukan pada regulator (Bank Indonesia dan IAI khususnya) dalam membuat kebijakan sehubungan dengan penerapan PSAK ini dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan perbankan.

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan ruang lingkupnya. Sedangkan bagian kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan membahas mengenai dampak penerapan PSAK 50/55 terhadap perbankan dan perumusan hipotesis. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang berkaitan dengan pemilihan sampel, model empiris yang digunakan, operasionalisasi variabel, dan model yang digunakan. Sedangkan bagian empat akan membahas mengenai hasil penelitian ini. Akhirnya dibagian lima akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan potensi bagi riset dimasa mendatang.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Dampak Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) terhadap perbankan

PSAK 50 (revisi 2006) tentang *Penyajian dan pengungkapan Instrumen Keuangan* dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang *Pengakuan dan Pengukuran Instrumen keuangan* menggantikan PSAK 50 (1998) tentang *akuntansi investasi efek tertentu* dan PSAK 55 (1999) tentang *Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai*. PSAK 50/55 (2006) sebelumnya wajib diterapkan pada tahun 2010 namun karena banyak bank yang mengalami kesulitan dalam penerapan maka pada tahun 2010 bank diperbolehkan untuk menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebagian saja misalnya untuk penghitungan penilaian pencadangan secara kolektif masih dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia . Ditahun 2011 seluruh bank sudah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) secara penuh.

Berikut adalah analisis dampak perubahan yang signifikan yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di perbankan:

#### 1) **Penggunaan nilai wajar yang lebih pervasif dibandingkan PSAK sebelumnya**

PSAK 55 (revisi 2006) seperti juga IAS 39 meningkatkan penggunaan akuntansi nilai wajar untuk item-item instrumen keuangan dalam laporan keuangan untuk mengukur instrumen keuangan karena penggunaan akuntansi nilai wajar dipercaya merupakan pengukuran yang lebih baik dibandingkan pengukuran lainnya seperti biaya historikal ataupun *amortized cost*. Perubahan-perubahan dalam PSAK 50/55 (revisi 2006) dibandingkan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 50 (1998) tentang *akuntansi investasi efek tertentu* dan PSAK 55 (1999) tentang *Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai* yang menyebabkan peningkatan penggunaan nilai wajar antara lain adalah: 1) pengukuran pengakuan awal berdasarkan nilai wajar untuk semua item instrumen keuangan sedangkan pada PSAK instrumen keuangan sebelumnya (PSAK 50 (1998) untuk instrumen keuangan selain diperdagangkan diukur



menggunakan biaya perolehan; 2) adanya opsi untuk mengukur instrumen keuangan pada tanggal neraca menggunakan nilai wajar walaupun instrumen keuangan tersebut bukan untuk diperdagangkan (Fair Value Option) ; 3) ruang lingkup PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih luas dibandingkan PSAK sebelumnya misalnya kredit yang diberikan yang sebelumnya tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK instrumen keuangan sekarang masuk sebagai instrumen keuangan.

## 2) **Perhitungan pencadangan penurunan nilai piutang (*loan loss provision*)**

Sebelumnya penghitungan CKPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ( No.7 /2/PBI/2005 dan perubahannya No.8/2/PBI/2006, No.9/6/PBI/2007, dan No.11/2/PBI/2009). Didalam peraturan ini ditetapkan kriteria penentuan kualitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit. Berdasarkan PBI No.7/2/PBI/2005, kualitas kredit ditetapkan berdasarkan penilaian atas tiga faktor yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Lebih lanjut peraturan ini juga memberi panduan mengenai komponen-komponen yang perlu dinilai dari masing-masing faktor tersebut. Dengan pendekatan ini maka manajemen masih memiliki ruang (diskresi) terutama dalam pengklasifikasian kualitas kredit.

Sedangkan setelah penerapan PSAK 55 (revisi 2006) cadangan penurunan nilai kredit ini tidak ditentukan besarnya persentase yang harus dibentuk oleh masing-masing bank sebagaimana yang terjadi pada pembentukan PPAP yang dulu. Akan tetapi pembentukan CKPN lebih didasarkan pada data historis dari masing-masing bank tersebut. Berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan PAPI 2008, pencadangan penurunan nilai piutang pada akhir tahun harus berdasarkan bukti objektif yang menjadi dasar dari penurunan nilai tersebut. Dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, estimasi dilakukan secara individual dan kolektif dengan membutuhkan data-data *probability of default* dan kerugian historis minimal 3 tahun kebelakang dan untuk kolektif dibutuhkan data-data kerugian historis yang

pernah dialami aset-aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok aset keuangan tersebut.

### 3) **Pengungkapan yang lebih Komprehensif**

PSAK 50 (revisi 2006) maupun PAPI 2008 meminta pengungkapan yang lebih komprehensif terkait teknik penilaian instrumen keuangan dan juga manajemen risiko terkait instrumen keuangan terutama pengungkapan kuantitatif. Peningkatan pengungkapan ini bertujuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

### 4) **Persyaratan klasifikasi (reklasifikasi) dan derecognition yang lebih ketat**

PSAK 50/55 (revisi 2006) berdampak terhadap perlakuan investasi efek tertentu terkait dengan masalah reklasifikasi antar instrumen keuangan yang lebih ketat dibandingkan PSAK 50 (1998). PSAK 50 (1998) memperbolehkan perusahaan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangannya, dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Sedangkan berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) perlakuan reklasifikasi antar instrumen keuangan lebih ketat. Di PSAK revisi ini manajemen tidak diperbolehkan untuk: 1) mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen tersebut dimiliki atau diterbitkan.; 2) walaupun tidak secara eksplisit dilarang namun secara implisit tidak dimungkinkan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang dari atau ke kelompok yang lain; 3) mereklasifikasi instrumen keuangan tersedia untuk dijual menjadi menjadi kelompok dimiliki hingga jatuh tempo kecuali ada alasan yang kuat (ada justifikasinya); 4) mereklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Selain itu di PSAK 50/55 (revisi 2006) ada penalti yang dikenakan (*tainting rule*) dimana entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun

sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo, kecuali ketika sudah mendekati jatuh tempo, jumlah pokok hutang hampir seluruhnya tertagih, ataupun terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali entitas.

Di India seperti juga di Indonesia, Firoz et al. (2011) berdasarkan studi mengenai dampak penerapan IAS 39 mengenai instrumen keuangan dan IFRS 9 mengenai klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan pada perbankan di India menemukan bahwa penerapan kedua standar ini akan sangat mempengaruhi industri perbankan terutama dalam klasifikasi financial aset yang lebih ketat dan valuasi pencadangan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan porfolio piutang. Selain itu untuk penurunan nilai pinjaman, IFRS mengajukan model yang berdasarkan kerugian yang diekspektasi (*expected loss*) dan bukan kerugian yang terjadi (*incurred loss*).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menemukan laporan keuangan di indonesia memiliki nilai informasi yang relevan (*value relevant*). Ariani dan Nashih (2006) dengan menggunakan data selama periode 1993-2003 menemukan informasi laporan keuangan (nilai buku ekuitas dan laba) memiliki nilai informasi yang relevan. Konsisten dengan temuan ini, Naimah dan Utama (2006) menemukan sample perusahaan manufaktur selama periode 1994-2002 menemukan terdapat hubungan signifikan antara nilai buku ekuitas dan laba akuntansi dengan harga saham dan hubungan ini dipengaruhi oleh profitabilitas dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

Terkait dengan dampak penerapan standar akuntansi mengenai instrumen keuangan terhadap nilai relevansi informasi keuangan di perbankan penelitian yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Kilic et al. (2010). Kilic et al. (2010) meneliti dampak penerapan SFAS 133 akuntansi untuk derivative dan aktifitas lindung nilai terhadap tingkat

manajemen laba dan kandungan informasi laba di bank komersial di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan manajemen laba melalui *loan loss provision* setelah penerapan SFAS 133. Diduga terjadinya peningkatan ini disebabkan karena manajemen bank beralih melakukan manajemen laba melalui *loan loss provision* yang merupakan akun alternative untuk melakukan manajemen laba karena ketatnya aturan mengenai derivative setelah penerapan SFAS 133. Selain itu penelitian ini juga menemukan terjadinya penurunan kandungan informasi dari *loan loss provision* setelah penerapan SFAS 133.

Penelitian terdahulu mengenai dampak penerapan IAS 32/39 diluar negri pada umumnya meneliti dampak penerapan terhadap volatilitas laba dan relevansi informasi akuntansi. Duh et al. (2012) menguji pengaruh penerapan IAS 39 pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan pada bank *cross listed* di Amerika. Penelitian ini menemukan IAS 39 meningkatkan volatilitas laba dan relevansi resiko volatilitas laba. Fietcher (2011) dengan menggunakan sampel 221 bank dari 41 negara menemukan bahwa bank yang menggunakan FVO dapat mengurangi volatilitas laba yang disebabkan *accounting mismatch*. Fietcher juga menemukan bukti lemah bahwa volatilitas laba bank-bank tersebut mengalami penurunan setelah penerapan FVO dibandingkan sebelum penerapan FVO. Hasil penelitian secara umum menunjukkan FVO mengurangi volatilitas laba yang disebabkan *accounting mismatch* atau dengan kata lain volatilitas laba setelah penerapan IAS 32/39 lebih mencerminkan volatilitas yang disebabkan karena kondisi ekonomi.

## **2.5. Dampak Penerapan PSAK 50/55 terhadap *value relevance* komponen-komponen laporan posisi keuangan**

Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan penggunaan nilai wajar pada aset dan kewajiban keuangan di bank karena ruang lingkupnya yang lebih luas dan adanya pilihan untuk menetapkan (*designated*) instrumen keuangan diluar untuk keperluan *trading*, sebagai

*fair value through profit or loss (FVTPL)* yang berarti pengukurannya akan menggunakan nilai wajar. Selain itu pengklasifikasian dan juga transfer antar kelompok yang lebih ketat pada PSAK ini dibandingkan PSAK sebelumnya memperkecil kemungkinan perusahaan menghindari penggunaan nilai wajar untuk mengukur instrumen keuangan. Akuntansi nilai wajar lebih mencerminkan kondisi pasar sehingga memberikan informasi yang lebih tepat waktu, meningkatkan transparansi dan memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat (Swamy dan Vijayalakshmi, 2012). Menurut Barley dan Haddad (2003), laba berdasarkan biaya historis tidak mencerminkan kualitas laba dan tidak memadai untuk pengambilan keputusan investasi. Penelitian sebelumnya mengenai penerapan IAS 32 dan IAS 39 (standar akuntansi internasional yang di Indonesia diadopsi menjadi PSAK 50/55 (revisi 2006) menemukan terjadinya peningkatan relevansi laba setelah penerapan (Duh et al., 2012; Fietcher, 2011).

Selain itu pengungkapan yang lebih komprehensif pada PSAK 50/55 (revisi 2006) mengenai nilai wajar dan resiko terkait instrumen keuangan memberikan informasi lebih bagi investor untuk menilai instrumen keuangan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian Bonetti et al. (2012) menemukan pengungkapan resiko mata uang berdasarkan IFRS 7 membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan perubahan nilai tukar secara benar. Penelitian Gaynor et al. (2011) menemukan pengungkapan yang secara spesifik menyebutkan arah pengaruh perubahan resiko kredit terhadap laba (rugi) secara signifikan mengurangi kesalahan interpretasi pengguna laporan keuangan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan menggunakan pengungkapan instrumen keuangan dan pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan angka-angka yang diakui didalam laporan keuangan. Berdasarkan argumen diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1:** Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan relevansi aset bersih yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan.

**H2:** Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan relevansi nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan.

Kredit yang diberikan bank adalah komponen utama aset yang dimiliki bank. Dampak paling besar dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) adalah dalam penilaian pencadangan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan porfolio piutang. dalam valuasi pencadangan kredit bermasalah (*loan loss provision*). Penilaian pencadangan penurunan nilai kredit yang diberikan berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih objektif dan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena harus berdasarkan data historikal minimal 3 tahun kebelakan serta memperhitungkan karakteristik resiko kredit serta adanya keharusan untuk melakukan penilaian secara individu bagi saldo kredit yang nilainya signifikan dan juga penilaian kolektif . Sebelumnya perhitungan CKPN (*loan loss provision*) berdasarkan peraturan Bank Indonesia dimana terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria penentuan kualitas kredit beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit. Bila diterapkan dengan benar maka penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) akan meningkatkan akurasi dan nilai relevansi (*value relevance*) dari CKPN/*loan loss provision*. Namun demikian karena sifat PSAK 50/55 (revisi 2006) yang sifatnya *principle based* maka pada penerapannya dapat memberikan ruang yang lebih bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba sehingga dapat mengurangi *value relevance* dari *loan loss provision*. Ditambah lagi karena tingkat kompleksitas yang tinggi dari PSAK 50/55 (revisi 2006) maka bila sumber daya manusianya, baik dari akuntan internal perusahaan maupun auditor eksternal, serta teknologi informasi belum siap maka dapat menyebabkan tingkat akurasinya diragukan. Sehingga hipotes yang diajukan adalah:

**H3:** Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) mempengaruhi relevansi nilai cadangan kerugian penurunan nilai kredit (*loan loss provision*) yang diakui perusahaan dalam laporan keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Populasi, Sampel, dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 dan 2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Bank-bank di Indonesia baik yang *go public* selama periode 2008-2011
2. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2008 - 2011.
3. Data yang diperlukan untuk semua variabel penelitian tersedia (harga saham, laporan keuangan tahunan, jumlah saham beredar).
4. Nilai buku ekuitas positif

Sampel yang digunakan adalah bank yang sama sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Bank yang diambil adalah bank yang pada tahun 2010 sudah secara penuh menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006)<sup>1</sup>

### 3.2. Periode Pengamatan

Periode pengamatan dilakukan selama 4 (dua) tahun, yaitu tahun 2008 - 2011. Untuk periode sebelum penerapan PSAK 50/55 (2006) adalah sampel bank –bank di tahun 2008-2009 dan untuk periode setelah penerapan PSAK 50/55 (2006) adalah sampel bank yang telah menerapkan PSAK 50/55 (2006) secara penuh di tahun 2010 dan 2011.

<sup>1</sup> Pada tahun 2010 bank masih boleh menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebagian saja dimana untuk perhitungan secara kolektif masih berdasarkan peraturan Bank Indonesia

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari sumber sekunder yaitu laporan keuangan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), *IDX Fact Book*, dan data harga saham harian dari Yahoo Finance. Bank terdaftar di BEI yang telah menerapkan PSAK secara penuh di tahun 2010 adalah 21 bank. Sehingga diperoleh total observasi sebanyak 100 sampel.

### 3.4. Model Penelitian

Mengikuti penelitian Ahmed et al. (2006) model penelitian menunjukkan nilai perusahaan (price) sebagai fungsi dari nilai komponen-komponen yang diakui di laporan posisi keuangan seperti aset keuangan, liabilitas keuangan, aset non keuangan, liabilitas non keuangan, aset dan liabilitas lain dan lain.

Berdasarkan hipotesa 1 penelitian ini menduga penerapan PSAK 50/55 (2006) meningkatkan relevansi nilai buku ekuitas. Untuk menguji hipotesis 1 ini digunakan model 1 berikut:

$$AP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BV_{it} + \alpha_2 NPL_{it} + \epsilon_{it} \quad (1a)$$

$$AP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BV_{it} + \alpha_2 NPL_{it} + \alpha_3 POST * BV_{it} + \alpha_4 POST * NPL_{it} + \epsilon_{it} \dots \quad (1b)$$

Ekspektasi: H1:  $\alpha_3 > 0$

Dimana:

$AP_{it}$  : Harga saham bank pada akhir tahun

$BV_{it}$ : nilai buku ekuitas bank i pada akhir tahun t

$AP_{it}$  = harga saham perusahaan i pada tiga bulan setelah akhir tahun t

$NPL_{it}$  = nilai non performing loan bank i pada tahun t.

$POST_{it}$  = dummy penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), diberi nilai satu untuk observasi setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan 0 untuk periode sebelum penerapan.

$\epsilon_{it}$  = residual



Semua variabel kecuali variabel dummy dibagi (diskalakan) dengan total saham beredar per akhir tahun t

Berdasarkan hipotesa 2 terjadi peningkatan relevansi nilai aset keuangan dan Liabilitas keuangan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

Untuk menguji hipotesa ini digunakan model 2 berikut:

$$APit = \beta_0 + \beta_1 FAit + \beta_2 NFAit + \beta_3 OTHt + \beta_4 NPLit + \epsilon it \quad (2a)$$

$$APit = \beta_0 + \beta_1 NetFAit + \beta_2 NetNFAit + \beta_3 OTHt + \beta_4 NPLit + \beta_5 POST*FAit + \beta_6 POST*NFAit + \beta_7 POST*OTHt + \beta_8 POST*NPLit + \epsilon it \dots \quad (2b)$$

Ekspektasi:  $\beta_5 > 0$

Dimana:

NetFAit = nilai buku aset keuangan dikurangi liabilitas keuangan bank i pada tahun t.

NetNFAit = adalah nilai buku aset non keuangan dikurangi liabilitas non keuangan bank i pada tahun t.

OTHit = adalah nilai buku aset lain-lain dikurangi liabilitas lain-lain bank i pada tahun t

Semua variabel kecuali variabel dummy dibagi (diskalakan) dengan total saham beredar per akhir tahun t

Definisi variabel lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada model 1

Pada model 2 nilai buku aset bersih ( nilai buku ekuitas) dipecah menjadi komponen aset bersih keuangan (NETFA), aset bersih non keuangan (NFA) dan Aset bersih lain-lain (OTH). Pengujian dengan model 2a dan 2b memiliki kelemahan karena koefisien dari aset dan liabilitas dipaksakan menjadi satu namun kelebihan model 2 adalah mengurangi dampak multikolineritas<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Kami sudah mencoba menguji model 2 ini dengan memecah komponen aset dan liabilitas dengan koefisien yang berbeda tetapi karena terjadi multikolineritas yang sangat tinggi maka hasil tidak bisa diinterpretasikan

Berdasarkan hipotesa 3 penelitian ini menduga penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) mempengaruhi *value relevance* dari loan loss provision (LLP). Untuk menguji hipotesis 3 ini digunakan model 3 berikut:

$$APit = \mu_0 + \mu_1 LLPit + \mu_2 BVELLPit + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$APit = \mu_0 + \mu_1 LLPit + \mu_2 BVELLPit + \mu_3 POST * LLPit + \mu_4 POST * BVELLPit + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Ekspektasi:  $\mu_3 \neq 0$

**Dimana:**

LLPit= loan loss provision bank i pada akhir tahun t

BVELLPit= nilai buku aset bersih (ekuitas) tanpa LLP pada akhir tahun t

Semua variabel kecuali variabel dummy dibagi (diskalakan) dengan total saham beredar per akhir tahun t

Defini variabel lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada model 1

### 3.5. Operasionalisasi Variabel

#### Variabel penerapan PSAK 50/55 (POST)

Variabel yang menunjukkan dampak dari penerapan PSAK 50/55 adalah variabel dummy POST. Dimana bila bank sudah secara penuh menerapkan PSAK 50/55 akan diberi nilai 1 sedangkan sampel bank yang belum menerapkan PSAK 50/55 diberi nilai 0.

#### Nilai Buku Aset Keuangan Bersih (NetFA)

Diperoleh dari FAit-FLit

Dimana:

FAit= nilai total aset keuangan bank i pada tahun t. Merupakan penjumlahan aset keuangan yaitu kas, giro, penempatan, surat berharga, obligasi, tagihan derivatf, kredit yang diberikan, piutang tagihan akseptasi, dan penyertaan.

FLit= nilai total liabilitas keuangan bank i pada tahun t. Merupakan penjumlahan liabilitas keuangan yaitu simpanan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat-surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima

#### **Nilai Buku Aset NonKeuangan Bersih (NetNFA)**

Adalah nilai aset non keuangan dikurangi nilai liabilitas keuangan. Aset nonkeuangan antara lain aset tetap dan aset pajak tangguhan. Liabilitas keuangan anatara lain kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak kini. Pada aset non keuangan dan liabilitas keuangan yang dimasukan disini adalah yang dapat diidentifikasi secara jelas dari laporan posisi keuangan sebagai aset/liabilitas non keuangan.

#### **Nilai Buku Aset Lain-lain Bersih (NetOTH)**

Adalah nilai aset lain-lain dikurangi kewajiban lain-lain. Pada akun ini dari laporan posisi keuangan tidak dapat diidentifikasi apakah merupakan aset/kewajiban keuangan atau nonkeuangan. Terkadang sering kali aset/kewajiban lain-lain terdiri dari kombinasi aset/kewajiban keuangan atau nonkeuangan. Karena kesulitan identifikasi maka untuk item ini kami masukan sebagai aset/kewajiban lain-lain (NetOTH).

#### **Variabel pengendali**

Untuk variabel kontrol mengikuti penelitian Barth et al. (1993) dalam Ahmed et al. (2006) dimasukan non performing loan untuk mengontrol informasi terkait default risk diluar pencadangan penurunan nilai kredit (loan loss provision).

### **3.6. Pengujian Tambahan**

Untuk pengujian tambahan dilakukan pegujian model 1-model 3 dengan menggunakan harga saham pada akhir tiga bulan setelah tutup buku untuk mengantisipasi pasar baru menerima laporan keuangan atau informasi akuntansi dalam laporan keuangan setelah 31 Desember.

### 3.7. Teknik analisis data

Prosedur yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross-section*. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan yaitu *Least Square (LS)* atau *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* (Nachrowi dan Usman, 2006). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dengan *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Penelitian ini menggunakan *Hausman Test* untuk menentukan estimasi parameter yang terbaik apakah menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Program yang digunakan SPSS dan Eviews6. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji-t terhadap koefisien regresi. Uji F juga dilakukan untuk menguji uji signifikansi koefisiensi regresi secara bersama- sama.

## HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

### 4.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bank-bank sampel dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif-Model (1), (2) & (3)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BV	96	4,351	927	920
LLP	1	1,145	161	214
NetFA	10	4,296	774	874
NetNFA	1	590	148	145
PRC	47	8,000	1,656	1,959
NPL	1	1,761	336	414
TA	772	33,092	8,828	7,844

Definisi Variabel: BV: nilas buku aset bersih (nilai buku ekuitas); LLP: loan loss provion; NetFA: Nilai aset keuangan bersih; NetNFA: Nilai buku aset non keuangan bersih; OTH: nilai bersih aset lain-lain dikurangi kewajiban lain-lain; PRC: harga saham pada akhir tahun; NPL: Non Performing Loan; TA: Total aset.

Dari tabel statistik deskriptif dapat dilihat dari bahwa bank yang menjadi perusahaan sample mencakup bank besar sampai bank kecil dengan variasi yang cukup tinggi. Berdasarkan perbandingan nilai rata rata NetFA, NetNFA, dan OTH bahwa aset keuangan adalah komponen utama dari aset dan kewajiban bank. Rata-rata variabel memiliki variabilitas yang tinggi. Kami sudah membandingkan rata-rata ditambah/dikurang standar deviasi masih ada sample yang melebihi 3 standar deviasi dari rata-rata tetapi karena jumlah selisihnya tidak terlalu signifikan dan karena jumlah sampel sedikit tidak dikeluarkan dari sampel.

#### 4.2. Analisis Korelasi antar Variabel

Berdasarkan hasil uji korelasi pada lampiran 1 untuk model (1) dan model (2) setelah dilakukan centering untuk variabel kontrol NPL tidak terjadi multikorelasi yang parah (korelasi  $<0.8$ ) baik untuk model tanpa moderasi maupun dengan moderasi. Namun untuk model 3 walaupun telah dilakukan centering untuk variabel NPL tetap terjadi multikolinearitas yang tinggi dengan variabel LLP sehingga pada pengujian model (3) kami mengeluarkan variabel NPL yang merupakan variabel kontrol. Pada model 4 juga terjadi multikolineritas yang tinggi antara LLP dengan BVLLP walaupun sudah dilakukan centering untuk salah satunya maupun kedua-duanya<sup>3</sup>. Sehingga dalam analisis model (3) harus dipertimbangkan bahwa ada mulitolineritas yang tinggi antara LLP dan BVLLP.

#### 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil regresi analisis model 1 untuk pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut.

<sup>3</sup> Kami sudah mencoba melakukan regresi dengan variabel nilai kredit yang diberikan bersih (Loan dikurangi LLP) namun hasilnya tetap terjadi multikolineritas yang tinggi.

**Tabel 4.2.**

**Hasil Pengujian hipotesis 1 (model 1a dan 1b)**

		Model 1(a)		Model 1(b)	
Variabel	Hipotesa	Coef	p-Value	Coef	p-Value
C		284.3625	0.2378	900.3862	0.0126
BV		1.479916	0.0001***	0.418479	0.20675
NPL		0.196493	0.39195	0.577579	0.22825
POST*BV	H1: +			0.683736	0.003***
POST*NPL				0.062853	0.43315
Adjusted R Square		0.422360		0.462172	
F-Statistic		31.34412		18.83110	
P value (F-Statistic)		0.000000		0.000000	

Definisi Variabel: BV: nilas buku aset bersih (nilai buku ekuitas); NPL: Non Performing Loan; POST: dummy penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), diberi nilai 1 setelah penerapan dan 0 sebelum penerapan.

Signifikansi: \*signifikan pada level 10%, \*\*5,\*\*\*1%

Koefisien BV pada model 1(a) signifikan positif sesuai prediksi . Ini berarti nilai buku ekuitas (nilai aset bersih) yang diakui dilaporan keuangan bank-bank pada periode penelitian memiliki nilai relevansi. Koefisien moderasi penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) (POST) dengan nilai buku ekuitas (BV) signifikan positif sesuai prediksi yang berarti hipotesa 1 diterima. Ini berarti setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terjadi peningkatan nilai relevansi nilai buku ekuitas yang diakui dalam laporan keuangan bank-bank di Indonesia. Untuk selanjutnya untuk menganalisis komponen dari nilai ekuitas ini yang mengalami peningkatan nilai relevansi diuji pada model 2.

Hasil regresi analisis model 2 untuk pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

**Tabel 4.3.**

**Hasil Pengujian hipotesis 2 (model 2a dan 2b)**

Variabel	Hipotesa	Model 2(a)		Model (2b)	
		Coef	p-Value	Coef	p-Value
C		628.7914	0.1096	895.8040	0.0314
NETFA		1.601051	0.00005***	0.891918	0.06325*
NETNFA		1.490379	0.3253	-1.825702	0.17965
NETOTH		1.676144	0.15165	2.335884	0.08455
NPL		0.167180	0.4358	0.846061	0.1946
POST*FA	H2: +			0.500898	0.07035*
POST*NFA				1.945762	0.173
POST*OTH				3.184189	0.0663*
POST*NPL				0.578071	0.05485*
Adjusted R Square		0.403065		0.479495	
F- Statistic		15.01088		10.55755	
P value (F-Statistic)		0.000000		0.000000	

Definisi Variabel: NetFA: nilas buku aset keuangan bersih; NetNFA: nilas buku aset non keuangan bersih; NetOTH: Nilai buku aset lain-lain bersih; NPL: Non Performing Loan; POST: dummy penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), diberi nilai 1 setelah penerapan dan 0 sebelum penerapan.

Signifikansi: \*signifikan pada level 10%, \*\*5,\*\*\*1%

Hasil regresi model 2 (a) dan 2(b) menunjukan adalah sebagai berikut:

- Sebelum penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) yang memiliki nilai relevansi hanya aset bersih keuangan. Hal ini masuk akal karena aset keuangan dan kewajiban keuangan adalah komponen utama dari aset bersih perusahaan terkait dengan operasionalisasi bank. Selain itu karena sebagian besar komponen dari aset keuangan dan kewajiban keuangan bahkan sebelum penerapan sebagian besar sudah berdasarkan nilai wajar.
- Tidak signifikkannya aset non keuangan bersih sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) kemungkinan disebabkan karena sebagian besar aset non keuangan masih berdasarkan nilai historikal sehingga tidak mencerminkan nilai wajar pada tanggal neraca.

- Sebelum penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) aset lain-lain tidak signifikan kemungkinan karena penyajian dalam laporan keuangan yang digabungkan serta tidak diungkapkan tersendiri dan juga karena komponennya bercampur antara aset keuangan dan nonkeuangan menyulitkan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai komponen tersebut.
- Setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terjadi peningkatan nilai relevansi aset keuangan bersih (POST\*FA signifikan positif) sesuai ekspektasi. Ini berarti penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan kualitas informasi dan relevansi aset/liabilitas keuangan seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya.
- Terjadi peningkatan relevansi nilai komponen aset bersih lain-lain (koefisien POST\*OTH signifikan positif). Terjadinya peningkatan relevansi nilai komponen aset bersih kemungkinan disebabkan karena pengungkapan yang lebih komprehensif dalam catatan atas laporan keuangan mengenai komponen-komponen dari aset keuangan dan kewajiban keuangan perusahaan. Berdasarkan observasi laporan keuangan di bank-bank sampel komponen aset bersih lain-lain bervariasi dan proporsi antara komponen aset/liabilitas keuangan dan non keuangan dalam akun aset/liabilitas lain-lain bervariasi. Dengan adanya pengungkapan yang lebih ini memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memvaluasi akun aset/kewajiban lain-lain di laporan posisi keuangan.

Hasil regresi analisis model 1 untuk pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut.

**Tabel 4.4.**

**Hasil Pengujian hipotesis 3 (model 3a dan 3b)**

Variabel	Hipotesa	Model 3(a)		Model (3b)	
		Coef	p-Value	Coef	p-Value
C		323.4064	0.1542	655.7112	0.02455
LLP		-1.567889	0.2128	-0.493848	0.39115



BVELLP		1.457082	0.0001***	0.710092	0.01985**
POST*LLP	H3: +/-			1.634573	0.283
POST*BVE LLP				0.283431	0.093**
Adjusted R Square		0.423094		0.485747	
F- Statistic		31.43550		20.59978	
P value (F- Statistic)		0.000000		0.000000	

Definisi Variabel: LLP: loan loss provision;BVELLP: nilas buku ekuitas selain LLP; POST: dummy penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), diberi nilai 1 setelah penerapan dan 0 sebelum penerapan.

Signifikansi: \*signifikan pada level 10%, \*\*5,\*\*\*1%

Berdasarkan hasil pengujian model 3 (a) dan model (b) dapat dilihat bahwa koefisien LLP signifikan negatif sesuai prediksi tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa loan loss provision yang diakui di laporan keuangan sebelum penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tidak memiliki nilai relevansi. Namun demikian tidak signifikannya koefisien LLP bisa saja disebabkan karena sampel penelitian yang sedikit (84 tahun perusahaan). Variabel moderasi (POST\*LLP) tidak signifikan bahkan koefisiennya positif yang mungkin disebabkan karena multikolinearitas yang tinggi antara LLP dan BVELLP seperti dijelaskan di bagian analisis korelasi. Tidak adanya perubahan relevansi nilai setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) juga mungkin disebabkan karena: (1) adopsi PSAK ini masih baru sehingga dalam proses penilaiannya masih belum sesuai ekspektasi ; (2) adanya kecurigaan pengguna laporan keuangan bahwa dengan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) yang *principle based* memberikan diskresi yang lebih bagi manajemen bank untuk melakukan manajemen laba melalui *loan loss provision*.

#### 4.4. Hasil Pengujian Tambahan

Hasil pengujian tambahan dengan mengganti harga saham akhir tahun pada pengujian utama dengan harga saham tiga bulan setelah tutup buku (akhir Maret) dapat dilihat pada lampiran 3. Secara keseluruhan hasil pengujian sama dengan hasil pengujian utama. Kecuali

pada model 2 (b) variabel moderasi POST dengan FA tidak signifikan walaupun arahnya sama.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) mengenai instrumen keuangan terhadap relevansi nilai dari informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan bank yaitu relevansi nilai buku ekuitas, relevansi nilai buku instrumen keuangan, dan relevansi cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui (*Loan loss provision*). Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan relevansi nilai buku ekuitas setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Peningkatan nilai relevansi buku ekuitas setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terutama bersumber dari peningkatan relevansi nilai aset keuangan bersih dan aset lain-lain bersih. Aset bersih non keuangan tidak terbukti memiliki nilai relevansi akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Tidak ditemukan bukti terjadinya perubahan relevansi nilai informasi *loan loss provision* setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Hal ini mungkin disebabkan karena kecurigaan pengguna laporan keuangan bahwa penerapan PSAK ini memberikan diskresi lebih bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui *loan loss provision*.

### 5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Sampel yang digunakan hanya 2 tahun dan ini mencakup masa transisi yaitu tahun 2010. Walaupun sampel yang digunakan hanya bank yang sudah mengadopsi PSAK 50/55 (revisi 2006) secara penuh pada tahun 2010 mungkin saja hal ini menjelaskan hasil yang diperoleh.

2. Terjadi multikolienaritas yang tinggi pada model 3 dan setelah dilakukan treatment multikolienaritas ini masih belum dapat diatasi. Seandainya multikolienaritas ini sudah diobati maka mungkin hasilnya terkait relevansi loan loss provision bisa berbeda.
3. Penelitian ini belum memperhitungkan adanya kemungkinan perbedaan relevansi nilai buku ekuitas beserta komponennya antar bank dengan tingkat insentif manajemen laba yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat memasukan variabel insentif manajemen laba sebagai variabel tambahan.
4. Nilai relevansi informasi akuntansi masing-masing bank bisa saja dipengaruhi oleh ukuran, profitabilitas, dan pertumbuhan bank (Naimah dan Utama, 2006) hal ini belum dimasukan dalam model penelitian disini. Penelitian selanjutnya dapat memasukan variabel ini sebagai variabel tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Anwer S., Emre Kilic, dan Gerald J. Lobo. "Does Recognition versus Disclosure Matter? Evidence from Value-Relevance of Banks' Recognized and Disclosed Derivative Financial Instruments". *The Accounting Review* Vol.81, No.3 (2006): 567-588.
- Ali, Ashiq dan Lee-Seok Hwang. "Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting Data". *Journal of Accounting Research* Vol.38, No.1 (Spring, 2000): 1-21.
- Barth, M. E. 2004. Fair values and financial statement volatility. Working paper, Stanford University.
- Beatty, A., S.L. Chamberlain and J. Magliolo. 1995. Managing financial reports of commercial banks: the influence of taxes, regulatory capital, and earnings. *Journal of Accounting Research*, 33, 231-261.
- Bonetti, Pietro, Marco M. Mattei, dan Fabrizio P. 2012. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 16 (3), 13-24.
- Collins, D.W and S.P. Kothari. 1989. An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients. *Journal of Accounting and Economics*, 11 (2-3), 143-182.
- Davis-Friday, Paquita Y., L. Buky Folami, Chao-Shin Liu, dan H. Fred Mittelstaedt. "The Value Relevance of Financial Statement Recognition vs. Disclosure: Evidence from SFAS No.106". *The Accounting Review* Vol.74, No.4 (October 1999): 403-423.
- Duh, Rong., A.W. Hsu., dan P.A. Alves.2012. The Impact of IAS 39 on the Risk Relevance of Earning Volatility: Evidence from Foreign Bank Cross Listed in the USA. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 8: 23-38
- Fiechter, Peter. 2011. The Effects of the Fair Value Option under IAS 39 on the Volatility of Bank Earnings. *Journal of International Accounting Research*, 85-108.
- Firoz, C A Mohammad. Ansari, A Aziz. Akhtar, Kahkashan.2011. IFRS - Impact on Indian Banking Industry. *International Journal of Business and Management*, 277-283.
- Gaynor, M. Lisa, Linda M, dan Teri L. Yohn. 2011. Fair value accounting for liabilities: The role of disclosures in unraveling the counterintuitive income statement effect from credit risk changes. *Accounting, Organizations and Society*, 36, 125-134.
- Henning, Steven L., Barry L. Lewis, dan Wayne H. Shaw. "Valuation of the Components of Purchase Goodwill". *Journal of Accounting Research* Vol. 38, No.2 (Autumn 2000). Printed in USA.
- Hariani, Arie Rahayu dan Mohammad Nashih, 2006. Value Relevance Laporan Keuangan di Indonesia dan Kaitannya dengan Beban Iklan dan Promosi, *Symposium Nasional Akuntansi* 9.
- Louis, Henock. "The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment". *The Accounting Review* Vol.78, No.4 (2003): 1027-1047.
- Kallapur, Sanjay dan Sabrina Y.S. Kwan. "The Value Relevance and Reliability of Brand Assets Recognized by U.K. Firms". *The Accounting Review* Vol.79, No.1 (2004): 151-172.

- Kilic, E., et al. 2010. *The impact of SFAS 133 on income smoothing by banks through loan loss provision*. Working paper, University of Houston
- Naimah, Zahroh, dan Siddharta Utama, 2006. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba dan Koefisien Respon Nilai Buku Ekuitas: Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, *Simposium Nasional Akuntansi* 9.
- Piot, Charles. Pascal D. Remmi J.2011. IFRS Consuquences on Accounting Conservatism within Europe: The Role of Big 4 auditors. Working Paper, University of Grenoble and CERAG-CNRS
- Song, C. J. 2008. An evaluation of FAS 159 fair value option: Evidence from the banking industry. Working paper, Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Untoro.2012. Perataan Laba Sebagai Respon Perbankan terhadap Implementasi Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) Melalui Penentuan Nilai Wajar Aset . Disertasi. Fakultas Ekonomi , PascaSarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok.

## God-Based Management: An Ethical Perspective On Managerial Functions (A Conceptual Paper)

**SAID MUNIRUDDIN**

*Syiah Kuala University*

**Abstract: Purpose** – The aims of this paper are: first, to question if Henry Fayol was the first person to promote a complete set of managerial functions; second, to examine the weaknesses of Fayol's functions; and third, to up-date management functions in response to the ethical issues in managing today's business.

**Design/methodology/approach** – This study reviews the established theory, the origins, and the on-going formulation of management functions. The paper then gives an overview to the Islamic texts that have been earlier in history suggesting an ethical-based management.

**Findings** – The paper finds that Fayol's "planning", "organizing", "leading", and "controlling" have gained much popularity. However, tremendous organizational changes advocate up-dated functions. In fact, Fayol's functions are simply normative concepts. They prescribe rational steps to do things, but advise no moral guidance. It is a positivism paradigm, value-free functions. Thus, a need to define new functions, in which ethics is inherent in them, is unavoidable. The study reveals that more than 1200 years ago, Muhammad SAW taught his daughter Fatimah a set of spiritual-based management functions: SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. This is called Tasbih Fatimah or Dhikr al-Zahra. Besides functioning as the esoteric spells after prayers, the words are divine names to be manifested in managers' works. It places God in every Fayol's functions.

**Research limitations/implications** – This is a preliminary research that discovers essential managerial messages from the Islamic spirituality. To enhance the theory and to re-test its applicability are left for further studies.

**Originality/value** – The paper challenges the established classical functions and introduces a spiritual-based management.

**Keywords:** Management, Management Functions, Tasbih Fatimah, Dhikr al-Zahra, a Spiritual-Based Management, Ethics.

## INTRODUCTION

“Why choose to be an accountant?”, the question was posed by a professor to new accounting students in the first day of their study in a university. Almost all students answered, “because easy to get a job”. Some said, “because well-paid”. The professor replied, “That is right. Your answers are quite rational. But they do not enrich your soul”. The professor then explained the nature of becoming an accountant in a rational and spiritual perspective: “It is true that to work is to earn some money. Above all, our profession is truly needed by the society, and clearly declared by God. Read *al-Baqarah* 282. It is God, the ultimate reason we have to become an accountant. We should plan, organize, direct, and control our accounting works in His Names and to the good of humanity. We should manage our profession for the sake of God and to the benefit of ourselves and society” (Anon).

Since the very first day, the professor has given value to students about “who we are”, “why we are here”, and “where we are going”. Beside the secular reasons of why we have to perform our job, the divine values are the foundation of every action (Mutahhari, 2003). These godly values are the source of ethics, the basis of all managerial functions, and the spirit that constitutes a good accountant, a good leader or a good manager.

*Why Management?* “Every one of you is a leader, and you shall be asked about those you lead” is a hadith from Muhammad SAW (narrated by Bukhari and Muslem). The saying is equal to “each of you is a manager, and each of you should responsible for your managerial works”. This view indicates the universality of leadership and management. Researchers such as Robbins and Coulter (2009) further explain the value of studying management in a similar perspective. First is *the universality of management*. With the absolute certainty, it shows that management is needed in all types and sizes of the organizations, at all organizational levels and in all organizational work areas, and in all organizations, no matter where they are located. Second is *the reality of work* that shows whoever you are and whatever you do, you will either manage or be managed. The third is *the challenges and rewards* of being a manager. Challenges can be goals and missions that everyone should accomplish in life or at work, while rewards are varied from recognition, status, money and even divine profit or *Ridha Allah*. *Ridha* literally means “the fact of being pleased or contented; contentment, or approval” (Almaany Dictionary, 2013). In religious context, this term is interpreted as *satisfaction* or “*perfect contentment* with God's will or decree” (Schimmel, 1975). These are among the reasons “why study management”.

*What is management?* There is no universal definition of management. Various definitions have been given, from popular perspectives to scientific ones. M.P Follet defined Management as, “the art of getting things done through others” (Graham, 1995). This simple definition has been a popular quotation. Williams (2009) put forwarded, “Whether you begin your career at the entry level or as a supervisor, your job as a manager is not to do the work, but to help others do theirs”. Putting effectiveness and efficiency in the processes, good management is defined as “Working through others to accomplished tasks that help fulfills organizational objectives as efficiently as possible” (William, 2009). Other researchers have further



defined management with what managers do. R.L Katz (1974), for example, suggests three approaches to describe what managers do: functions, role and skills. Based on skills, management is described through types of skills managers need: *technical skills* –highly needed by lower level managers, *human skills* –are equally important to all level of managers, and *conceptual skills* –are most important to top managers. Based on roles, H. Mintzberg (1980) defines management in reference to specific actions or behavior expected to be performed at work: “*the interpersonal roles*”, “*the informational roles*”, and “*the decisional roles*” entail making decisions.

### **Classical Functions: a clearer definition of management.**

The last approach, argued to be the best way of defining management, is by explaining the functions performed by a manager. “Management is a process of planning, organizing, leading and controlling of organizational activities to achieve organizational objectives using organizational resources” (Robbins and Coulter, 2009). Some researchers define management with somewhat different functions: planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Others argue the functions are planning, controlling, and decision making (Hansen and Mowen, 2005). Others suggest planning, directing and motivating, and controlling (Folk *et al.*, 2002). Some have shortened them into three: planning, implementing, and evaluating. According to M.M Hanafi (2003), the different categorization is resulted from the different ‘tastes’ of individual researchers. However, the four classical functions are the most popular framework in describing management. As mentioned by Carrol and Gillen (1987), “the classical functions provide clear and discrete methods of classifying the thousands of activities that managers carry out and the techniques they use in terms of functions they perform for the achievement of goals.”

Various books have been written based on this classical perspective. It is believed, it was Henri Fayol (1841-1925), a French Businessman, who first proposed in the 1916 that all managers perform five functions: planning, organizing commanding, coordinating, and controlling. Today, as seen in the **Appendix 1**, these classical functions have been condensed to four: planning, organizing, leading, and controlling.

Traditionally, as shown in the Appendix 1, management is performing these four functions. Just how well does the functions approach describe what managers do? Do managers always plan, organize, lead, and finally control? In reality, what a manager does may not always happen in this sequence (Robbins and Coulter, 2009). Some managers are action-oriented, thus, less in planning. Some are just jumping from one function to another. Others are doing the whole functions interactively and possibly simultaneously, not as ordered by the theory. For example, when someone is working to keep his or her staff motivated and engaged, that is leading. As someone is dealing with unhappy users, he or she has to control, lead, and maybe even plan. Regardless of the order in which these functions are performed, the fact is that managers do plan, organize, lead, and control. In addition to that, the evidence is clear. Managers serve their companies well when they plan, organize, lead, and control (Williams, 2009; Stagner, 1969; Bray, Campbell, and Grant, 1993).



### Up-dating classical management functions.

Influential authors such as Peter Drucker (1998) and Henry Mintzberg (1994) believe that the classical functions published by Henri Fayol in 1916 need up dating. Tremendous changes and development faced by modern organizations are the reason to have a better form and ways of performing management. Managers are facing the changing of workplaces, security threats, ethical issues, global economics and political uncertainties, and technological advancement (Robbins and Coulter, 2009). Fortune Magazine, for example, believes that the demand to re-organize the classical functions is due to the changes of management philosophy, from “old” to “new”. These include the changes from “boss” to “team leaders”, from “hierarchical” to “less hierarchical organization”, from “keeping” to “sharing idea”, from “self-centered” to “participation”, from “people work with managers” to “managers work with people” (Dumaine, 1993). These changes do not actually make the classical functions obsolete. Managers are still responsible for performing the functions. The functions are just performed differently, by jumping from one to another as needed, doing two functions at the same time, or even up-dating those function by reorganizing and adding a new management function, as seen in the **Appendix 2**.

### Study Objective and Methodology.

This article is about to clarify and seek further answers for the following questions: (1) Is it Henri Fayol who first proposed a complete set of managerial functions, (2) What are the weaknesses of Fayol’s classical management functions, (3) Is there any other ‘better’ formulation of management functions, (4) If so, what will be the significance, in particular in guiding today’s business practices.

This study reviews the management functions. An attempt is made to explain “what is management” based on the functions performed by a manager. In doing so, the study discusses the origins of the functions, their development, significance, and weaknesses. This paper highlights the changes made by current researchers to up-date the functions. The unethical issues in today’s business practices have led this study to seek a form of ethical management functions. Since religion is among the source of ethics, a review to Islamic literature is considered to be essential in finding spiritual messages on management. Therefore, the study investigates Muhammad SAW. Author believes, as a great leader and a great manager Muhammad must have advised very basic things related to the functions one should perform at work.

This is a secondary research (Mann, 2005). Data are collected through a desk research technique, where printed and electronic materials are acquired and summarized by sitting at author’s desk. Secondary data include books, journals, articles, magazines, and various hadith compilations. The Prophet’s spiritual perspective on management functions is interpreted in comparison to the four Fayol’s classical functions. The finding is hoped to draw attention to the Islamic contribution on the management that relies on the spiritual-ethical concept. It is important to note that interpretation of evidence by researcher in this qualitative research might not entirely free from intellectual subjectivity. Thus, the presented results are tentative at best. However, the author believes this limitation does not invalidate the findings.

## DISCOVERING A GOD-BASED MANAGEMENT.

### What is missing from the classical functions.

Fayol's classical functions have played an invaluable role in the history of management. Not only the functions have served the activities by providing a theoretical framework in executing a job, but also have shown why management matters. However, it is a positivism-paradigm concept. The functions is value-free, therefore, lack of ethical guidance. It is not clear whether the functions should be used to serve good activities or bad activities. When a manager has to plan, they can plan to make profit at the expense of others, or vice-versa, plan to achieve the mission aligned with the moral principles. There is no prescription in these functions that to achieve something one should act in an ethical manner. The functions are indeed 'rational' that provide steps to accomplish things. It is merely a guidance "to do thing right". However, the functions are having no 'spirit' that those steps should be done in an ethical way. It has no guidance "to do the right thing". In fact, numerous studies and well-known corporate scandals make clear the distressing state of managerial ethics in today's business world (Williams, 2009).

A study by J. Schramm (2004) shows only 27 percent of employees felt that their organization leadership is ethical. In M. Jackson (2007) study of 1,324 randomly selected workers, managers, and executive across multiple industries, almost 48 percent of them admitted to actually committing an unethical or illegal act in the past year. The case of Enron, WorldCom, Tyco, and HealthSouth is among the evidence of a serious and widespread problem of poor business ethics in today's business world. Evidences across countries proof the same thing. Fraudulent acts and the misuses of public money are taking place at various levels of government and business. The management practices both in public and private sectors have everywhere gone wrong and harmed the stakeholders since the managers' moral is not well developed (Schuette, 2008).

Ethics is "the set of moral principles or values that defines right and wrong for a person or group" (Williams, 2009). The sources of ethics are varied. It can be from religious injunctions, personal virtue, distributive justice, utilitarian benefits, individual rights, government requirements, and long-term self-interest (L.T Hosmer, 1995). Whenever it comes from, truly that ethics is one of the biggest concerns in today's business world and development, or perhaps since the beginning of history.

From the Islamic epistemological and ontological perspective it is proved that the highest source of ethics is the Divine One. As God is the Absolute Truth, His words are the primary source of moral guidance. Whatever we do is because of Him and only for Him. "*Bismillahirrahmanirrahim*" (in the Name of *Allah* the Gracious the Most Merciful) is an ideological expression that precedes any activities. Everything is since the beginning declared for the sake of God. "*Inna salati, wanusuki, wamahyaya, wa mamati, lillahi rabbil 'alamin*" means "Say: Behold, my prayer, and my acts of worship, and my living and my dying are for God [alone], the Sustainer of all the worlds." (QS. 6: 162). This is among the divine virtue that all activities must be planned, organized, implemented, and evaluated in the way to get closer to Him. In the Islamic teaching, God is the main interest and goal that everyone should pursue.

Unfortunately, the four classical functions exhibit no divine perspectives. Since they fail to provide an ethical spirit, it is better to have alternative functions that enclose ethical principles derived from divine values. In fact, Fayol himself was an atheist that failed to offer spiritual-based functions. To ensure his functions work effectively, he himself created a separate set of principles (Fayol, 1949; Fells, 2000; Rodrigues, 2001). These separate 14 managerial principles are seen in the **Appendix 3**. We can see that almost all his separate principles are suggesting ethics that are not mentioned in his five, later condensed to four, management functions.

Greedy business is the challenge to our world (Suranovic, 2011). We actually have enough resources to live with, as every creation has been created with enough provisions (*rizq*). Unfortunately, *nafs* or uncontrolled greed has imbalanced the nature (QS. 91:8; 12:53; 107:1-3; 30:29; 30:41; 2:11; 59:7; 7:56; 26:183). Capitalism or exploitation is an enemy to humanity. This aggressive business has no faith. They can be very brutal and know nothing but profit. Therefore, we need a new business paradigm whose ideological view drags us away from such a harmful behavior. We need to discover a new set of management functions in which moral values are well-integrated and encourage the development of moral. We need not only a managerial functions that comes from the brain (a rationalistic perspective), but also the functions that arises from the heart (a spiritualistic perspective). These combined rational-spiritual functions should be the one that guides our world to a better managerial practice.

### **The Management of Fatimah, an Ethical-Based Management.**

In various texts and hadiths we find the very famous phrases: “*SubhanAllah - Alhamdulillah - La ilaha illAllah - Allahu Akbar*”. These words are a famous set of *dhikr*, well-known as *Tasbih Fatimah or Dhikr al-Zahra*. *Dhikr* means “invocation”, “glorification”, or “remembrance” (of God). *Dhikr* or *tasbih* is a devotional act to get closer to God. Prophet SAW has taught his beloved daughter Lady Fatimah al-Zahra this *Tasbih* (Azizi, 2006; Ordoni, 1987).

Interestingly, the *Tasbih* was first taught by the prophet to Fatimah in relation to the work her daughter was performing. A complete set of this *dhikr* was issued in order to ease and give value to Fatimah’s daily jobs. It is reported: Fatimah used to run her house without much help. Many people including her neighbors had always suggested her come to her father’s house to ask for servants that would ease her routines. Fatimah was too shy to ask for such a help until one day she fulfilled the suggestion. Soon after she knocked her father’s house, Muhammad SAW opened the door. Before Fatimah even express her need, the Prophet had already spoken, “*O Fatimah! Shall I teach you something that is superior to a maidservant and to the world and everything in it? Ya Fatimatuz Zahra, I grant you: SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha illAllah, Allahu akbar.*”

This saying of Muhammad SAW can be found in various hadith compilations, narrated by scholars from various Islamic groups (al-Suyuti, 1997, Majlisi, 2000). There are various narrations about Tasbih Fatimah's order (Ordoni, 1987). Shi’ah considers the Tasbih is begun by *Allahu Akbar*, then *Alhamdu Lillah*, followed by *SubhanAllah*, and ended with *Laa ilaaha illAllah*. Yet, the Sunni, as presented in this paper, believes the Tasbih to be started with *SubhanAllah*, then *Alhamdulillah*, after

that *La ilaha illAllah*, and ended with *Allahu Akbar*. Despite the differences in ordering the Tasbih, both Sunni and Shi'ah agree with the above four elements and the importance of Tasbih. This Prophetic gift is actually the guidance, the spirit, the value, or functions that help one works to achieve something higher than money, status and other worldly interests.

In the teaching of Islam, *Tasbih Fatimah* has two functions. *First*, it functions as an esoteric spell. *Secondly*, it applies as an exoteric practice (Michon, 2008). As the esoteric spell, *Tasbih* is observed verbally with one's tongue, or performed silently within one self. This esoteric spells help the performers connect to the Holiest, the Praised One, the One and Only, the Greatest, the Perfection, the Truth, the Beauty, the Beloved, *Allah*. The manifestation of God's perfections will be internalized in one's character when performing this *in-heart dhikr*. The *dhikr* is also functioning as the rational-exoteric practice, which are the management functions. The essential meaning of these individual divine words is translated into daily activities by performing the obedient actions to God. Mutahhari (2007) put forwarded, the manifestation (*tajalli*) of these Glory Names in one's acts and personality defines a perfect man, a perfect manager, or a perfect leader. In other words, this is a management practice or management functions that place God in the centre of every Fayol's functions, as seen in the **Appendix 4**.

In the Islamic spirituality, putting God in every managerial activity (from planning, organizing, leading to controlling) is described by the *Tasbih of Sayyidah Fatimah Zahra*: "*SubhanAllah, Alhamdulillah, Lailaaha illa Allah, Allahu Akbar*". Below is a further explanation of these four spiritual-based management functions.

**SubhanAllāh** or (سبحان الله) is an Arabic phrase often translated as "God is devoid", "Glorious is God", or "Exalted be *Allah*". Mohammed Abubakar al-Razy, in his book "Mukhtar al-Sihah": "The meaning of *subhanAllah* is, making God pure, and it is bound to its original word (*sabh*, meaning void) as if he said, I verily absolve God from all evil" (al-Razi, 1993). Thus, *SubhanAllah* means purification, far above is *Allah* from any dirt, shortcoming or imperfection. A manager should purify him/herself in the beginning of activity. The evil must be wiped-out of the mind. Having a clean mind and heart before implementing the works is above all. "*Innamal a'malu binniyat*", it is the initial idea that defines the value of one's works. When you plan something, do it for the goodness of mankind. Do not see the business opportunity as a mean to glorify yourself, to fulfil your own interests, to corrupt, to cheat, and other evil plans. Do it for the sake of the highest purpose of life, for humanity, for God. *SubhannAllah* is the first ethical managerial function, the purification of plan, intention, or idea.

Indeed, the problem of today's business has actually aroused from the beginning of an activity. Normally, people plan an activity in a rational approach. Fantastic programs with beautiful success indicators are discussed and put on the papers. In fact, at the back of their mind is about to earn the profit at the expense of others. Many managers quietly plan dirty goals deep in the beginning of a project. One is considered committing idolatry (*polytheism*) when setting a particular goal without having God in his/her thought (Shari'ati, 1988). *Taqwa* is fear/consciousness of God, an attempt to avoid evil illusions that destroy human's *fitrah* (*pureness*). Therefore, purification of mind from any polluted intention since the beginning of planning, and along the way



when implementing activity, is the meaning of *SubhanAllah*. It is to consider *Allah* to be above all needs.

**Alhamdulillah** or (الْحَمْدُ لِلَّهِ) is an Arabic phrase meaning "Praise be to God", "all Praise be to *Allah*", "Thank God", similar to the Hebrew phrase *Halelu Yah* (Hallelujah -alHamdulellah). It means anything in existence to which is ascribed praise, thanks, glorification, or gratitude, is only able to achieve it due to God's infinite mercy and grace. As an internal *dhikr*, *Alhamdulillah* is to be said with profound sense of love, adoration, and awe of the power, glory, and mercy of God. All creations reflect the goodness and beauty of God. He gives life to the universe.

Putting it into practice, *Alhamdulillah* is a positive approach to management. When organizing the business, one should be positive by respecting and recognizing the best in people and the world around us. "Appreciative Inquiry", the current approach to management by D.L Cooperrider and D.Whitney (2000), has put appreciation which is another meaning of *Alhamdulillah*, in the heart of its practice. So, *Alhamdulillah* is the appreciation or praise, another ethical management function in which resources are organized by thanking, valuing, honouring, esteeming, and prizing, instead of criticism, underestimation, and negation.

**La ilaha illa Allah** or (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) is the declaration of belief in the Oneness of God, "There is no god but *Allah*". The statement is known as *Kalimah Tawhid*, the word of Divine Oneness. In the esoteric aspect, one recites the words to liberate himself/herself from submission to many deceiving matters, various worldly gods. In the exoteric uses, the statement also implies the unity of movement, the unity of organizational goals. The statement functions as the unity of destination in a strategic planning. Every person in the organization should move to one stated purpose. We are one. So, *La ilaha illa Allah* is the unity, the design of oneness of goals and movement. This statement reflects the unity of act, the oneness of all, to agree on differences, to negate the individuations of creation, to reject the colour or racism. The word suggests the oneness of system, the uniqueness of team. The member of organization is one as a group or one as a team not by numbers, but by spirit. The bond is not divisible. This divine name is the foundation of team building or team work.

**Allahu Akbar** or (الله أكبر) is a phrase, called *Takbir*, meaning "God is the greatest". It is used in various contexts by Muslims. In formal prayer, it is repeatedly mentioned as an informal expression of faith. In times of struggle, it expresses "fear of nothing but God", courage, commitment, determination or defiance. On the other occasions it expresses celebration or victory. *Allahu Akbar* also means everything is small and nothing can supersede God. The word indicates the absolute supremacy of God. His greatness has no comparison. The phrase has functioned as an ideological spirit to achieve the goal. No matter what will the situation be, whether in time of extreme stress or in full of joy, this spiritual management function gives us a never-ending energy to accomplish the job. It shows the highest commitment to fulfill the mission of the organization. It advises not only strength but also irresistible, the overwhelming power that no one is to defeat your true commitment. One is even ready to submit life for the goodness, the sacred mission of the institution. *Allahu Akbar* is leading or implementation. It is showing your best, to accomplish the mission, to fulfill your destiny, to be great, to become powerful, to be the champion, to win.

After *Allahu Akbar*, the function goes back to *SubhanAllah*, which is the re-purification or evaluation of the job. It is to ensure that the work is accomplished as planned and conformed to the divine values, the ethics. At the same time, it also functions as the control to the activities. Any movement of the organization that deviates from heading to God should be re-purified. The whole functions can be seen in the **Appendix 5**.

The functions are interconnected to each other. More than one function can take place at a time. For example, when praising the staff (*Alhamdulillah*), one should do it purely or honestly (*SubhannAllah*). When you are energetically executing the work (*Allahu Akbar*), you build the oneness of team or team work that focuses on one same goal (*La ilaha illa Allah*), and done by praising or motivating the staff (*Alhamdulillah*), and so forth.

### **Putting Muhammad SAW and Fatimah into the Equation.**

The discovery shows that Muhammad SAW had defined a complete set of managerial functions together with its ethical contents, 1200 years before Henry Fayol published his classical functions. This finding suggests that Muhammad SAW is the prophet of ethical management. Therefore, it is important to appreciate the role of Prophet Muhammad SAW and His daughter Fatimah in the history of management ideas and practice like enhancing the table provided by C.S George, Jr. (1972), see **Appendix 6**.

## **CONCLUSION**

If Henry Fayol in 1916 introduced his management functions in English, Muhammad SAW had introduced them in around 600 AC in so divine Arabic words that need a little contemplation to comprehend them. They are “*SubhanAllah*” (purification of idea or plan), “*Alhamdulillah*” (praise the resources when organizing the business), “*La ilaha illa Allah*” (design a unity of movement), and “*Allahu Akbar*” (fulfill your destiny, be the greatest by implementing the jobs to the fullest). These management functions were taught by Muhammad SAW to his daughter Fatimah al-Zahra, thus called *Tasbih Fatimah* or *Dhikr al-Zahra*. This suggests Fatimah the mother of ethical management. These divine functions are an act of submission to the will of God (Islam), something that constitutes a good manager and a good leader.

Inheriting this functions from the Prophet SAW has been the reason for Fatimah to be labeled *Sayyidatun Nisa-il Ahl al-Jannah*, “the leader of women in paradise”; or *Sayyidatun Nisa-il al-'Alamin*, “the leader of women of the universe” (Shari’ati, 1980). The *Fatimah Management Functions* were later spread out to the entire Muslim world. The *Tasbih* has enlightened early Muslims in maximizing the value of their work. Muslim’s achievement and contribution to the European dark ages could be accelerated by the implementation of this God-based management functions.

Today’s concern on the unethical business practices suggests the re-conceptualization of Fayol’s management functions. Lying, cheating, stealing, and various scandals of abusing authority and power in both public and private sectors, indicates the lack of spiritual ideological perspective. We need a set of spiritual-rational paradigm of

business guidance. The *Management of Fatimah* would be something we need to empower the inner spirit and to improve the outer practices.

This paper is a preliminary conceptual discussion. Although the *Tasbih of Fatimah* has long established as the Islamic esoteric concept, it is now re-introduced in the form of spiritualistic managerial functions. Management functions are topic that is usually introduced to students on their first day of management course. It is important to be presented in a spiritual perspective. This is the foundation of management and ethics. Both scholars and practitioners will be benefited from these new functions. Further studies are needed to enrich the concept. Scientific experiments are also required to test if the concept really works, which I strongly hypothesize “yes”.

## References

- Almaany Dictionary (2013), the meaning of “ridha“, available at [http://www.almaany.com/names.php?language=english&lang\\_name=Arabic&word=ridha&type\\_word=0](http://www.almaany.com/names.php?language=english&lang_name=Arabic&word=ridha&type_word=0) (accessed 2 March 2013).
- Azizi, A. (2006). “*The Tasbih of Fatima Zahra*”, Islamic Unitarian Service, Ontario, Canada, available at: <http://www.scribd.com/doc/2296632/The-Tasbih-of-Fatima-Zahra>.
- Al-Suyuti, J. (1997), *Musnad Fatimah Al-Zahra*, Trans. A.R. Siddiq (Hadith No. 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256), Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Al-Razi, M.A. 1993. *Tartib Mukhtar al-Shihah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Bray, D.W., Campbell, R.J. and D.L. Grant. (1993) *Formative Years in Business: A Long-Term AT&T Study of Managerial Lives*, Wiley, New York.
- Carrol, S.J and Gillen, D.A. (1987) “Are the Classical Management Functions Useful in Describing Managerial Work?” *Academy of Management Review*, January, pp. 48.
- Drucker, P. (1998) “Management’s New Paradigms”, *Forbes*, 5 October, pp. 152.
- Dumaine, B. (1993) “The New Non-Manager Managers”, *Fortune*, 22 February, pp. 80-84.
- Cooperrider, D.L. and Whitney, D. 2000. *Collaborating for Change: Appreciative Inquiry*, Berrett-Koehler Publishers, San Fransisco.
- Fayol, H. 1949. *General and Industrial Management*, Pittman & Sons, London.
- Fells, M. (2000) “Fayol stands the Test of Time”, *Journal of Management History*, Vol. 6, pp. 345-360.
- Folk, J.M., Garrison, R.H, and Noreen, E.W. 2002. *Introduction to Managerial Accounting*, Mc-Graw Hill Companies Inc., New York.
- Graham, P. 1995. “Mary Parker Follet –Prophet of Management: A Celebration of Writings from the 1920s”, Harvard Business School Press, Boston.
- George, C.S, Jr. 1972. *The History of Management Thought*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.
- Hanafi, M.M. 2003. *Manajemen*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Hansen, D.R and Mowen, M.M. 2005. *Management Accounting*, Thomson Learning Inc, Mason.
- Hosmer, L.T. (1995) “Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics”, *Academy of Management Review*, Vol. 20, pp. 379-403.
- Jackson, M. (2007) “Workplace Cheating Rampant, Half of Employees Surveyed Admit They Take Unethical Actions”, *Peoria Journal Star*, 5 April.
- Katz, R.L. (1974) “Skills of an effective Administrator”, *Harvard Business Review*, September-October, pp. 90-102.
- Majlisi, M.B. 2000. *Biharul Anwar*, The Open School, Chicago.

- Mann, T. 2005. *The Oxford Guide to Library Research*, Oxford University Press, New York.
- Mintzberg, H. 1980. *The Nature of Managerial Work*, Harper and Row, New York.
- Mintzberg, H. (1994) "Rounding Out the Manager's Job", *Sloan Management Review*, Vol. 36, pp. 80-84.
- Michon, J.L. 2008. *Introduction to Traditional Islam: Foudations, Arts, and Spirituality*, World Wisdom. Inc, Indiana.
- Mutahhari, M. 2003. *Perfect Man*, Foreign Department of Boyad Be'that, London.
- Ordoni, A.M. 1987. *Fatima the Gracious*, Anssarian Publications, Teheran, available at <http://playandlearn.org/eBooks/FatimaTheGracious.pdf> (accessed 26 September 2012).
- Rodrigues, C. (2001) "Fayol's 14 Principles of Management Then and Now: A Framework for Managing Today's Organization Effectively", *Management Decision*, Vol. 39, pp. 880-889.
- Robbins, S.P and Coulter, M. 2009. *Management*, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Schimmel, A. 1975. *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
- Schuette, S.A. 2008. *Fighting Corruption from Aceh to Papua: 10 Stories on Corruption Eradication in Indonesia*, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta.
- Schramm, J. (2004) "Perceptions on Ethics", *HR Magazine*, November 2004, available at <http://www.shrm.org> (accessed 21 September 2012).
- Stagner, R. (1969) "Corporate Decision Making", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 53, pp. 1-13.
- Suranovic, S. (2011) "Is Greed the Problem with Capitalism?", *Liberty*, April 19, available at: <http://libertyunbound.com/node/541> (accessed 5 August 2012).
- Shari'ati, A. 1980. *Fatima is Fatima*, trans. Laleh Bakhtiar, The Syariati Foundation, Teheran, available at: <http://www.al-islam.org/fatimaisfatima/> (accessed 19 September 2012).
- Shari'ati, A. 1988. *Religion vs. Religion*, Laleh Bakhtiar, Abjad, Albuquerque.
- Transparency International. 2011. "Corruption Perception Index", available at: <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults> (accessed 10 August 2012).
- Williams, C.R. 2009. *Principles of Management*, South-Western Cengage Learning, Mason.



## Appendices

### Appendix 1: Classical Management Functions.

Planning	Organizing	Leading	Controlling	Lead to
Defining goals, establishing strategy, and developing plans to coordinate activities	Determining what needs to be done, how it will be done, and who is to do it	Motivating, leading, and any other actions involved in dealing with people	Monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned	<i>Achieving the organization's stated purposes</i>

Source: Robbins and Coulter (2009).

### Appendix 2: New Management Functions.

New Functions	Classical Functions	Issues
1. Making things happen	(Planning and Control)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planning and decision making</li> <li>Managing information</li> <li>Control</li> </ul>
2. Meeting the competition	(A brand new management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Global management</li> <li>Organizational strategy</li> <li>Innovation and change</li> <li>Designing adaptive organizations</li> </ul>
3. Organizing people, projects, and processes	(Organizing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Managing individuals and a diverse of work force</li> <li>Managing teams</li> <li>Managing human resource systems</li> <li>Managing service and manufacturing operations</li> </ul>
4. Leading	(Leading)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivation</li> <li>Leadership</li> <li>Managing communication</li> </ul>

Source: Williams (2009).

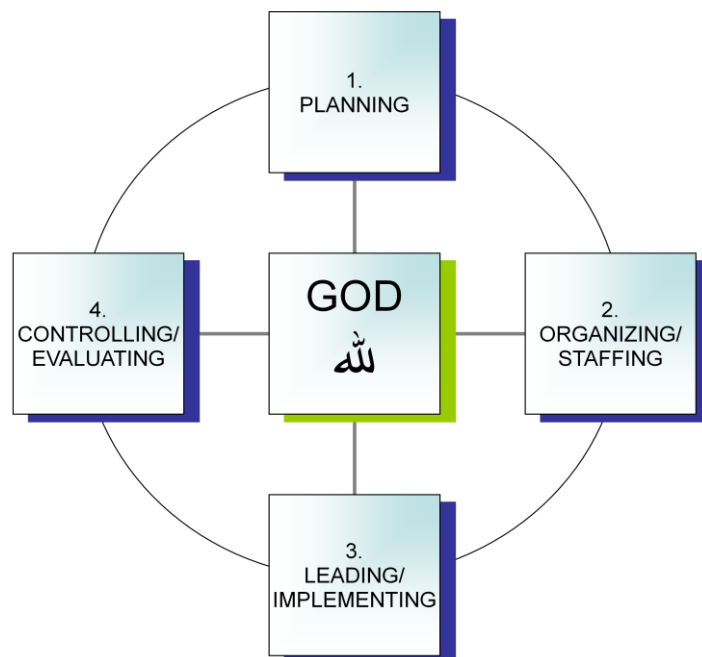
### Appendix 3: Fayol's 14 Principles of Management.

1.	Division of Work	Increase production by dividing work so that each worker completes smaller tasks or job elements.
2.	Authority and Responsibility	A manager's authority, which is the "right to give orders", should be commensurate with the manager's responsibility. However, organizations should enact controls to prevent managers from abusing their authority.

3.	Discipline	Clearly defined rules and procedures are needed at all organizational levels to ensure order and proper behavior.
4.	Unity of Command	To avoid confusion and conflict, each employee should report to and receive orders from just one boss.
5.	Unity of Direction	One person and one plan should be used in deciding the activities to be used to accomplish each organizational objective.
6.	Subordination of Individual Interest to the General Interest	Organization must put the organization's interests and goals before their own.
7.	Remuneration	Compensation should be fair and satisfactory to both the employees and the organization; that is, don't overpay or underpay employees.
8.	Centralization	Avoid too much centralization or decentralization. Strike a balance depending on the circumstances and employees involved.
9.	Scalar Chain	From the top to the bottom of an organization, each position is part of vertical chain of authority in which each worker reports to just one boss. For the sake of simplicity, communication outside normal work groups or departments should follow the vertical chain of authority.
10.	Order	To avoid conflict and confusion, order can be obtained by having a place for everyone and having everyone in their place; in other words, there should be no overlapping responsibilities.
11.	Equity	Kind, fair, and just treatment for all will develop devotion and loyalty. This does not exclude discipline, if warranted, and consideration of the broader general interest of the organization.
12.	Stability of Tenure of Personnel	Low turnover, meaning a stable work force with high tenure, benefits an organization by improving performance, lowering costs, and giving employees, especially managers, time to learn their jobs.
13.	Initiative	Because it is a "great source of strength for business", managers should encourage the development of initiative, the ability to develop and implement a plan, in others.
14.	Esprit de Corps	Develop a strong sense of morale and unity among workers that encourages coordination of efforts.

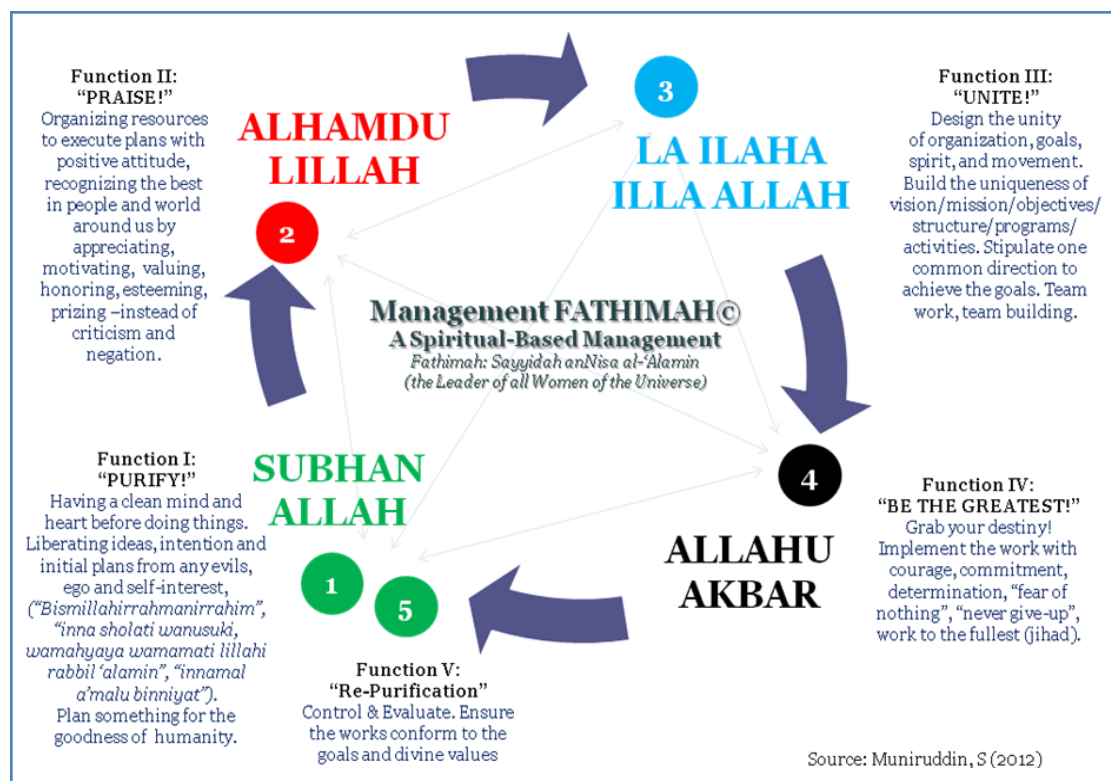
Source: William (2009).

#### Appendix 4: “An Ethical-Based Management”, Putting God in Fayol’s Functions.



Source: Author's Research (2012).

#### Appendix 5: “The Management of Fatimah”, a Spiritual-Based Management.



Source: Muniruddin, S (2012)

Source: Author's Research (2012).

**Appendix 6: Management Ideas and Practice throughout History.**

<b>Time</b>	<b>Individual or Group</b>	<b>Planning</b>	<b>Organizing</b>	<b>Leading</b>	<b>Controlling</b>
5000 BC	Sumerians				√
	<i>Record keeping</i>				
4000 BC – 2000 BC	Egyptians	√	√		√
	<i>Recognized the need for planning, organizing, and controlling when building the pyramids. Submitted requests in writing. Made decisions after consulting staff for advice.</i>				
1800 BC	Hammurabi				√
	<i>Established controls by using witnesses (to vouch for what was said or done) and writing to document transactions.</i>				
600 BC	Nebuchadnezzar		√	√	
	<i>Wage incentives and production control.</i>				
500 BC	Sun Tzu	√		√	
	<i>Strategy, identifying and attacking opponent's weaknesses.</i>				
400 BC	Xenophon	√	√	√	√
	<i>Recognized management as a separate art.</i>				
400 BC	Cyrus		√	√	√
	<i>Human relations and motion study.</i>				
175 BC	Cato the Elder		√		
	<i>Job descriptions.</i>				
284	Diocletian		√		
	<i>Delegation of authority.</i>				
600	<b>Muhammad SAW and Fathimah Zahra</b>	√	√	√	√
	<i>A complete set of ethical managerial functions. It puts God in the very heart of activities, therefore promotes spiritual values to ethical behavior. These functions are to be rationally applied in any areas of life. The functions can be said a set of "rational-spiritual functions of management".</i>				
900	Alfarabi			√	
	<i>Listed leadership traits.</i>				
1100	Ghazali			√	
	<i>Listed managerial traits.</i>				
1418	Barbarigo		√		
	<i>Different organizational forms/structures.</i>				
1436	Venetians				√
	<i>Numbering, standardization, and interchangeability of parts.</i>				
1500	Thomas More			√	
	<i>Critical of poor management and leadership.</i>				
1525	Machiavelli		√	√	
	<i>Cohesiveness, power, and leadership in organizations.</i>				

Source: C.S. George Jr. (1972) and Author's Research (2012).

## Exploring The Interpretation Of *Balik Modal* As "The Other" Break Even Point: A Hermeneutic Romantics Study

**DIMAS RAMADHAN PUTRA \***

**ARI KAMAYANTI**

*Universitas Brawijaya*

**Abstract:** Accounting has been argued to be the cause of capitalism since it is profit oriented. In non-corporate accounting, the case may be different since other values can be abstracted especially from local practice, one of which is BEP. The conventional BEP will be discussed to have the same profit-oriented nature. There is 'other' accounting practice that does not seem to always end up in achieving profit as the main goal. This research is to explore the interpretation of balik modal as the other meaning of Break Even Point (BEP) using hermeneutics romantics approach in micro business namely Bakso sellers. The result of this research indicates that there are different interpretations of balik modal as well as its underlying values. The first informant interpret that his balik modal is kulak equals to dapet where kulak is the money that he spends for raw and supplementary materials and dapet is his income or his selling. The other informant concept is  $Kulak = Dapet + Setoran$ . Different interpretation arises because of different underlying values such as togetherness and religious spirituality.

**Keywords:** Bakso Sellers, Non-Corporate Accounting, Break Even Point, Balik Modal, Hermeneutic Romantics

---

\* Corresponding author: [dimasramadhanputra@gmail.com](mailto:dimasramadhanputra@gmail.com)

### **Background of Research: *Bakso* Sellers in the Midst of Capitalism**

The present accounting practice has supported capitalism, which means that an economic system is based on a free market, open competition, profit motive and private ownership of the means of production. Profit has been the cause of capitalism where the rich becomes richer and the poor becomes poorer. For companies that have gone public is a must to disclose to the public about the quality of the company's performance. All parties concerned will surely take the most wise decision is considered on the basis of the disclosure of the company's performance. Form of disclosures made by the company through the financial statements (Gunawati, 2006). The financial report is a reflection of the company condition, because the information contained in the financial statements is needed by the company stakeholders with an interest in the company and also the statements of historical performance management of a company (Jatiningrum, 2000).

For Harahap (1997), capitalist accounting practices are actually inspired by the social values of a capitalist society. This means that accounting practices actually reflects the social reality of society. He further explains that a capitalist society will have a capitalist ideology. When a capitalist ideology has been formed, subsequent values also affect economic system in a capitalist economic system. The capitalist economy will in turn directly affect the development theories of which will leads to the behavior of capitalist society. The nuance of capitalism will therefore be apparent to grow at smaller levels of society. Harahap (1997) sees that such condition relates to the development of accounting theory. At this stage the development of accounting theory certainly will lead to a capitalist accounting theory, and this continues until the application of accounting theory is reflected in the capitalist accounting practices, one of which is Break Even Point (BEP).

However, there is 'other' accounting practice that in local contest that does not seem to always end up in achieving profit as the main goal. In our neighborhood, there are various micro-sellers, one of which is meatball seller or *bakso* seller. Competition is also happening in the micro-scale *bakso* seller. In our observation, every *bakso* seller who is competing one another lives in harmony even though they know that their friends are also their competitors in business. This motivates us to explore the values underlying their business ethics that seems to be different to the values of capitalist accounting or society that has been described previously.

One term that is commonly heard in their conversation is *balik modal*. In cost accounting, the term *balik modal* can be equated to Break Even Point. This is interesting because balik modal or BEP (which will be referred to as BEP from now on) is a concept of 'zero profit' unlike profit itself.

These *bakso* sellers in my neighborhood have their own unique culture and history. They live simple life and seem to enjoy their work. Of course, to sustain their business they need accounting, although it is different to the accounting for large corporations as culture influences accounting practice. BEP or *balik modal* can be regarded as text. This research propose a question of how is the interpretation of *Balik Modal* as 'the other' BEP? This study will be conducted by employing hermeneutic which is to trace the idea of understanding the meaning through history and culture which is given to us by our descendant and experience.



## Literature Review: Small/Micro Business in Non-Corporate Accounting Perspective & Research

*Bakso* sellers located in the region Sengkaling are small/micro business. Definition of a small business varies from a variety of sources of information. The definition of a small business according to BPD in Amalia (2004), imposes limits on the use of labor based on the number of between 15-19 people. While the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises defines small businesses based on the assets and the value of sales, namely:

"Small businesses are the economic activities of the people of small-scale with the following criteria: 1) a maximum net worth Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) excluding land and buildings, or 2) the maximum annual sales of Rp. 1,000,000,000 (one billion dollars), 3) belongs to citizens of Indonesia, 4) stands alone and is not a subsidiary or a branch or indirectly with medium and large businesses. "

([www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_glossary&func=display&letter=U&Itemid=73&catid=43&page=1](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=U&Itemid=73&catid=43&page=1))

From the definition, a small business can be defined as an economic activity of the people which is owned by Indonesian citizens with the use of labor as much as 15-19 people. It has a maximum net worth Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) excluding land and building and selling a maximum value of one million dollars.

According to the Saleh in Widayanti (2005), small scale industries are grouped into three categories. Local industry categories consist of group of industries that relies on its survival limited to the local market as well as the spread in terms of location. The scale of this business is generally very small and very limited marketing targets causes of this group are generally just use a simple means of transport such as carts, load and others. Medium categories include industrial type group in terms of small-scale units have yet to form a



grouping or production area consisting of a collection of business units that produce similar goods. Judging from the target marketing, these categories generally reach a wider market than the former categories. Modern industry categories are groups of industries which in principle can be described as a group of industries that still have the nature of a small industry, but have been able to adapt production technology is quite advanced.

Small and medium sized entity uses the SAK ETAP (*Standard Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*). ETAP is an entity which does not have significant public accountability and does not need to publish general purpose financial statements for external users. SAK ETAP is intended that all business units must prepare a financial statement in accordance with standards that have been set. ETAP standards is quite simple and certainly will not be difficult for its users. This is done because all companies certainly want the business continues to grow. To develop a business certainly various efforts were made, it is an effort to convince the public that the work done can be justified.

ETAP is using the reference from IFRS for Small Medium Enterprises. SAK-ETAP published in 2009 and became effective January 1, 2010 and can be applied on 1 January 2011. This SAK-ETAP is applied retrospectively, but if it is regarded not practical it can be applied prospectively, which means recognize all assets and liabilities in accordance with SAK ETAP also does not recognize assets and liabilities if it is unauthorized by SAK ETAP, besides correcting accounts that were using the old PSAK to account in accordance with SAK ETAP also apply measurement assets and liabilities are recognized SAK ETAP.

With this SAK ETAP, small and medium enterprises can also prepare its own financial statements which also can be audited and obtain an audit opinion, so that the company can use its financial statements to obtain funding for their business development.

Bambang (2003) performed a study on "Social Interpretation on the Concept of Profit By Using a hermeneutic approach". One major goal of the study is trying to build an understanding of the liberating aspects of human life. This liberating insight into important social processes caused by three things.

First, this liberating understanding will bring us to an understanding and a broader interpretative concerning the conception or problems that arise. Interpretative means that the concept should not be interpreted narrowly and rigidly. A concept can be understood at least in perspective, so that what we understand the concept of it being intact on one side. Second, through this understanding enables this process as a reflection of ourselves concerning human nature. That human nature is free to express his own life as well as his choice.

Third, this understanding will minimize the processes which have reduced the significance of social preferences. Meanings are often denied of their social significance due to the reduction caused by the one-sided hegemony of meaning. Social meaning should be understood to be formed by social aspects.

Research on *bakso* sellers, especially its sales was carried out by Farid (2006). His research aims to determine what the impact of formalin issues against the sales of meatballs in Malang and to determine what step should be taken to anticipate.

### **Hermeneutics as Methodology**

This research uses hermeneutic romantic approach. The purpose of the hermeneutic romantic approach is to trace the idea of interpretive tradition, with a myriad of theoretical, philosophical, and practical, which inherited us (Maulidin, 2003). The research conducted

here, is a study that used a non-positivistic paradigm to understand the concept of *balik modal*, which can be equated as "BEP" and is a type of qualitative research. This study seeks to understand the meaning based on what is in the research place. This study is an analysis of social subjective approach, which seeks to understand the situation for what it is. The paradigm that will be used in this research is the interpretive paradigm. Thus, the expected lack of understanding the meaning of "BEP" not only from the point of view of financial accounting alone, but also able to see and describe what will be provided by the informants so that there is a broader view of the meaning of "BEP" itself (Purnamasari & Triyuwono, 2010).

Hermeneutic, etymologically, the word comes from the Greek hermeneutic that interprets *hemeneuein* meaning. So, literally *hermeneia* (noun) can be interpreted as the interpretation (Sumaryono 1999). Hermeneutics is not a new method. The term hermeneutics is already known about the seventeenth century that this method performed by FDE Schleiermacher (1768-1834). What has been done by the hermeneutist basically to bring us further look at a text and a context to understand and be understood. Mistakes can lead to understanding of the sense of misunderstanding (Sumaryono 1999). Although hermeneutic term is known since the seventeenth century, but a hermeneutic interpretation method has actually been known since ancient times. The difference between interpreting something on one side, the issues surrounding the interpretation of the rules and on the other hand, is something that has been known since the "early days" the study of the Qur'an and the Gospels (Esack 2000). Hermeneutic interpretation as the work and theories of interpretation of religion, literature, law, has been around since ancient times, before the effort was labeled hermeneutic interpretation. Palmer in Esack (2000) mentions, there are

two main currents must be distinguished according to Palmer in search of definition Hermeneutics. First current hermeneutic view as the major methodological principles underlying the interpretation effort, while the second current view as a philosophical exploration of the character and the conditions necessary for all forms of understanding. Two of these flows summarized by Carl Braaten and defines hermeneutics as a science that tries to describe how a word or an existentially meaningful events in our situation right now. Palmer himself eventually defines hermeneutics as a process of changing something or ignorance to understand (Esack, 2000).

Hermeneutic according to Howard (2000) is an acquired skill that a person with learning how to use the instrument of history, philology, manuscriptology, and so on. Proficiency is developed to understand the texts that cannot be separated from the question of the influence of time, due to cultural differences, or coincidences of history. Hermeneutic for Schleiermacher is a theory of translation and interpretation of the texts of the traditional concept of scripture and dogma. As Schleiermacher, Gadamer says that hermeneutic rather to understand and interpret the text. Gadamer's hermeneutics more broadly whether it is a scriptural text, music notation even artwork can be said as text (Sumaryono, 1999). Meanwhile, in the view of Dilthey hermeneutic is an attempt interpretation of social life. Interpretation and understanding of the concept is an attempt to overcome the objectivism of positivism that is biased to minimize and even eliminate the role of the subject in shaping social reality (Dilthey, in Triatmoko 1993). Understanding the meaning we give the categories and meaningful relationships. Much reality happens intuitively due to the long process of socialization.

Hermeneutic is a new way to hang out with the language. Hermeneutics as a method of interpretation, requires language as a medium to understand a text. Without language people probably would not get the sense and meaning of a text. The lack of understanding and articulation of the text of the hermeneutic fails to provide an understanding of a text. Language here is quite significant for the hermeneutic to help gain understanding. Thus, language is part of the text which also requires an understanding of (Bambang, 2003). Hermeneutic romantics introduce two further shifts which the strong influence is felt even to the present: focus on action of the interpretation (as culture) and its historical (Maulidin, 2003)

In this study, the source of data comes from interviews with informants' records and records of surveys of research. Informant is a person who is willing to provide the information required in this study both the situation and condition of background research and other information related to the research. This research will be done to the two *bakso* seller which is located in the area of Sengkaling. The informant chosen is Cak To and Mas Ambon. They are a micro scale *bakso* sellers who do their selling activity in the area of Sengkaling. These informants are chosen because they are very different in characteristic, history, and culture. Cak To has been selling *bakso* since he was a little boy and right now he still insist to sell *bakso* by himself and does not want to expand or develop his business. While Mas Ambon is an open minded *bakso* seller who owns a business which has several employees and willing to expand his business.

The analysis of text '*balik modal*' was performed in two stages, and one additional stage to compare *balik modal* with BEP.

1. Cultural and historical aspects of Cak To and Mas Ambon regarding their *bakso* selling activities, to portray formulation of *balik modal* in term of equation or formulation.
2. Based on the previous step, the underlying values of '*balik modal*' and how this interpretation is caused by historical and cultural aspects of informants were abstracted
3. Comparing how *balik modal* differs to BEP, by its formulation as well as values.

### Conventional Break Even Point Values Abstraction

Several values that can be drawn from conventional BEP by analysing its formulation. There is a separation between fixed costs and variable costs and its use for short-term profit planning. Separation between fixed costs and variable costs will impact positively and negatively. This separation is intended to make it easier to control the cost. Control is set and done by humans in this regard is the owner of the company. Separation of the control will create an organized process of company policies which is implemented. The regularities that are created by the separation of these controls has impacts which are effective and efficient for the company. The effectiveness of the company can be measured from the company's success in implementing the goals, vision and mission that has been set by the company. While the efficiency can be measured when the company was able to achieve the targets and be able to minimize expenses or costs which have been budgeted.

This control is to ensure that people will be the center of power. This is often referred to as anthropocentric. Ansari (1984) argues that the anthropocentric is a view that places humans at the center of the universe. Man is the center of control, and in effect, man

negates the existence of higher existence, *i.e.* God. This is an indication of secularism which means just thinking about the world or materialism, instead of religiousness. Secularism is the notion that religion is not worthy to be the foundation of moral and education.

Another thing that can be drawn from conventional BEP is a short-term profit planning. In each entity, profit is the original purpose of the business. According to the equity holders, profit is considered as a measure of the success of their business. There are lot things that can be exploited from the profit. One of them is to increase the capital of their business from the profits. This will happen what we call capital accumulation if the profit acquired by the entity is over the target. The capital increase will also result in the increase of profits indirectly. This happens in every entity that competed with each other to get great profits in order to develop his business. What happens is that every entity or business will be a capitalist as they are motivated to seek as much profit and ignoring other aspects.

### **Empirical Results 1: *Balik Modal = Kulak = Dapet***

As mentioned before BEP have a provision such as fixed cost and variable cost, but it is slightly different from the informant. Cak To is a mobile *bakso* seller and is classified as a micro scale industry. Small traders sometimes ignore several aspects of the production costs have been determined in the BEP formula. Thus was the case in Cak To, which is a mobile *bakso* seller in the area of Sengkaling. He did not include several aspects of the production costs in the calculation of his *balik modal*. Cak To argue that his *balik modal* is *kulak* equals to *dapet*. The element of *kulak* consists of raw material expenditure and supplementary materials. He stated:

*"Yaa, lengkap itu, ya daging ya tahu sama bumbu bumbunya itu. Soalnya itu kan lihat yang kulakannya itu banyak atau sedikit gitu lho. Nah biasanya beli sedikit sedikit cuma satu kilo."*

Cak To argue that the raw material of making this *bakso* are beef and the supplementary materials (those spices used) in making *bakso*. When we asked whether there any other things which are purchased during his *kulak*, he said:

*"Kalo kecap, saos, sambel ya setiap hari beli. Beli titik-titik gitu. Sudah termasuk itu, 200 ribu."*

He said he bought some other supplementary materials such as soy souce, chilli, and ketchup. So everyday Cak To spend his money in *kulak*, buying his raw and supplementary materials about two hundred rupiah. Cak To does not include the BEP component where the BEP calculation should also be calculated for example transport costs. From the analysis above, we can obtained a formula of *balik modal* according to Cak To which is:

$$Kulak = Dapet$$

$$Raw\ Material + Supplementary\ Material = Dapet$$

This formula simplified into:

Meanwhile,

$$Dapet = Sales\ Price \times Sales$$

So,

$$Raw\ Material + Supplementary = Sales\ Price \times Sales$$

Cak To *balik modal* concept is different with the conventional meaning of BEP, therefore it also have a different values that can be taken from this concept. The first value is there is no separation between the owner and the entity. This is proven by Cak To that he does not include variable cost such as gas, oil, and transportation cost because he thinks that



those can be also used in his family. This explains that Cak To is contrasting the entity theory. Entity Theory is where a legal entity is regarded as having a separate existence from the owners. The financial statements are prepared from the perspective of the entity, not its owners. By combining the manner of owner and the entity, Cak To concept can be regarded as proprietary theory. Proprietary Theory is where no fundamental distinction is drawn between a legal entity and its owners reference, i.e. the entity does not exist separately from the owners for accounting purposes. The primary focus is to report information useful to the owners, and therefore the financial statements are prepared from their perspective.

The second value is what it is called family love. As we know the conventional understanding of BEP, the labour and transportation is an expense that must be included in the formulation of total cost. Cak To does not include those costs because he said that he does not need labour cost. He owns the business as well as he runs the business by him self. There are no other employees or labours that work at Cak To entity. That is why he excludes this cost. He also stated that he work is for his family matter. As a Muslim, he has an obligation that a man must work for their family. This is one way to worship God or what he called *ibadah*. The real purpose of his work is only to make his family live as it is. So he do all the working process including selling with what he called *ikhlas*.

In his concept of *balik modal* there is no short term profit planning. All of his income is for the family matter. This simple way of thinking is making Cak To live in a stable situation. As we know every entity is trying their best to gain profit as higher as possible. In this situation makes a competition becomes hard because they compete each other by unfriendly way. Cak To does not have a competition like that. He knows that there are a lot of *bakso* sellers beside him, he also knows that there is a competition between them but he

does not experience an unhealthy ones. That is why he and other bakso seller around his area do not have a bad thinking between them.

### **Empirical Results 2: *Kulak = Dapet + Setoran***

*Mas Ambon* has the different interpretation of *balik modal* with the conventional BEP of the concept from *Cak To*. Several aspects from *Mas Ambon* are slightly different from *Cak To* because *Mas Ambon* has a different system in his *bakso*. *Mas Ambon* is the owner of an entity which is productizing and selling *bakso*. He has five carts and four of them were run by his employees. The calculation of everything in here is also different. As we compare to the conventional BEP, there are some aspects that is closely the same with his concept. Those aspects are labor payment and short term profit. *Mas Ambon* has four employees and every employee responsible of one cart. He allocates the same amount of *bakso* in every cart including his cart. He said that when he shop in the market he always buy the same quantity of the materials to each carts he have. He has his own calculation which is stated by *Mas Ambon*:

*"Tapi iku ndisik mas. Lek saiki wes tak anu mas wes tak target. Pokok sedino kulakan kudu iso sewu gopek. Iku kudu is owes pokoke."*

*"Yo gawe iku gawe 5 rombongan wes pokoke"*

*"Iyo. Sak rombongan e tak gawe 300. 300 yo arek arek mubeng ngono.."*

He has a target which is not more than 1.500.000 Rupiah for every *kulak*. That is mean every cart is 300 Rupiah when he has five carts. Those are consists of raw and supplementary materials which is the same with *Cak To*, he said:

*"Yo daging mas, daging sapi lak larang a saiki. Trus yo tahu, mie, sing gae somay iku, trus yo sing liyane mas, bangsane tepung, sambel, caos, trus brambang ngono ngono iku wes."*

From his statement, *Mas Ambon* has the same argument with *Cak To* which is the raw material of making this *bakso* is beef and the supplementary materials are those spices which are used to make any materials become *bakso*.

*Mas Ambon* is using a *setor* system which means that every employee has to deposit the amount of *kulak* and the amount of *setor*. Every employee is holding one cart and the amount of *kulak* is the same with the other which is 300.000 Rupiah. And the amount of *setor* is 50.000 Rupiah. The he explain that the amount of *setor* is relatively the same with other *bakso* which has some employees like he said:

*"...yo iku roto roto ne juragan bakso kabeh lek gae setor setoran yo sakmonoan mas."*

That is a big amount of money in one day. But *Mas Ambon* has big expenses too. He said that he have a payments to pay every month. Those payments are for his house, motorcycle and a debt to some person for his business. Even though *Mas Ambon* has a lot of payments to pay, he never gives up or complaining in every situation. In his formula he stated a *Kulak* and *Dapet*. This is the same meaning with *Cak To* interpretation which is *Kulak* consist of raw material and supplementary material, and *dapet* means sales price times sales. *Mas Ambon* which has a different system with *Cak To* is resulting in different formulas too. This result is also different from the concept of conventional BEP although some aspects were found almost the same. The benefits generated by this formula are the increased of income that could cover all the existing debts and could be gleaned to develop their business. Another benefit is his *bakso* will be famous around the Sengkaling area

because he has five carts using the same identity. Compared with benefits of conventional BEP where the main benefit is to generate profit, the *Mas Ambon's* formula does discuss about profit and has several the same aspects, this raises some different and similarity values with conventional BEP.

*Mas Ambon balik modal* concept can be classified as a values combination from *Cak To* and conventional BEP. The first value is that *Mas Ambon* has the same value with the conventional BEP which is profit oriented. From the analysis above *Mas Ambon* is willing to expand his business even though he still has many debts. He has five carts and each of them must deposit 50.000 rupiah beside the amount of *kulak*. From that money some is used to pay his payments monthly. When there is a residual amount of money, he saves it to be used for expanding his business. By expanding his business he has an increasing income and his aim for the profit is reached. Therefore he has the same values which is short term profit planning.

The second value is the same with *Cak To* value which is family love. Even though he runs his business to reach a large amount of money, he still dedicates his hard working for his wife and kid. He stops gambling because of his family. He realizes that the real purpose of his working is for living his family. All the profit oriented things is for his family's better living. He also mentioned about the obligation for a man in Islam. He said that a Muslim must works for their family and their religion as worship to his God or *ibadah*. That is why he never complains in any situation although his life is a little bit hard with that kind of debts and payments. *Mas Ambon* has another same value with *Cak To* which is *ikhlas*. He keep doing his job and willing to raise his business instead of giving up for his huge amount of debts.

The last value that we found is that *Mas Ambon* has a modern mind or an open minded. He never gains the knowledge about business or accounting but he see a chance and willing to take a risk. He borrows money to some person to run his business and he did it. He got several loans and develops his business until now. Although he still pays his debts monthly, he has a plan to expand his business by building a *bakso* shop. This is contrast with *Cak To* concept. *Cak To* has a simple way of thinking and he does not want to take any risk at all. *Cak To* is afraid of confusing in managing his financial but *Mas Ambon* is willing to take this risk because he thinks that if he gets a high income, he gets high profit, and his family will not suffer for a financial problem. Table 1 summarizes the findings of research.

Table 1.  
Research Findings

	Formulation of <i>Balik Modal</i> or BEP	Values abstraction	Hermeneutics Romantics
Cak To	<i>Kulak = Dapet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No separation of owner and entity</li> <li>Family love</li> <li>God's based activity</li> <li>Simple way of thinking</li> </ul>	<p>History:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cak To works to help his parent</li> <li>Selling bakso since he was a boy</li> <li>His parent works for his family</li> </ul> <p>Culture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>He came from religious family</li> <li>His family avoid any risk in every job</li> <li>Be grateful every day</li> </ul>
Mas Ambon	<i>Kulak = Dapet + Setoran</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profit oriented</li> <li>Family love</li> <li>Open minded</li> </ul>	<p>History:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>From a poor family</li> <li>His parent works hard for his family</li> <li>Experience in <i>bakso</i> by working with his boss</li> </ul> <p>Culture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>He came from a Muslim</li> <li>Never complain in any circumstances</li> <li>Be grateful every day</li> </ul>
Conventional BEP	Revenue = Total Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Well control cost</li> <li>Short term profit planning</li> <li>Secularism</li> </ul>	

## Conclusion

According to the research that we have conducted, we found the interpretation of *balik modal* as well as the underlying values according to the informants who are *bakso* sellers, Cak To and Mas Ambon. The result is that every informant has their own interpretation about the concept of *balik modal*. How they interpret this concept is affected by their historical and cultural aspects as we know that they have different history and culture between them. Cak To interpret that his *balik modal* is *kulak* equals to *dapet* where *kulak* is the money that he spends for raw and supplementary materials and *dapet* is his income or his selling. A simple way of thinking is influencing Cak To to came up with this concept. From his concept, we abstract the underlying values. The first is that there is no separation between the owner and the entity which unlike the legal entity which they separate the between private things and the entity because Cak To runs his business by himself. The second value is family love. He works for his family that is why he does not include a labor expense in his calculation of *balik modal*. He stated that his income is for the sake if his family. The third value is God-based activity. He is a Muslim which his religion teaches him that working for his family is a way to worship God or *ibadah*. And the last is his simple way of thinking which he insists that he does not want to expand the business due to a risk which he does not want to face it. All of those values are caused by his history and culture. Meanwhile, Mas Ambon has different interpretation about his *balik modal* concept. His concept is  $Kulak = Dapet + Setoran$ . Mas Ambon is also a *bakso* seller, but he is different with Cak To. Mas Ambon has four employees to run his business. His income is high as well as his expenses. That is why Mas Ambon uses *setoran* system which is every employee should deposit a certain amount of money to Mas Ambon. From his concept, we

abstract certain values. The first value is profit oriented, but this is not exactly the same with the conventional BEP. Mas Ambon still considers other aspect in chasing his profit. He came from a poor family which drives him into a man who works hard for his family. The second value is family love which Mas Ambon dedicates his works for his family. He must make a living for his wife and kid. This value is the same with Cak To value because they both are Muslim and a Muslim man should work for their family. The last value that can be abstracted from the concept is that Mas Ambon has an modern way of thinking. Unlike Cak To which does want any risk involve in his business, Mas Ambon is willing to take a risk by planning to build a *bakso* shop. He wants to expand his business even though his debt is high. He wanted someone invest their money to Mas Ambon and he will work for it. All this values are caused by his history and culture. Both Mas Ambon and Cak to have a different formulation as well as the values form the conventional BEP. This study should bring awareness that the non-corporate accounting at small/micro levels also provide us with values that may one day become an alternative of thinking, in term of accounting values and practice.



## Studi Perkembangan Perjanjian Perpajakan

ARFIAN ERMA ZUDANA  
Universitas Gadjah Mada

**Abstrak:** Keterbatasan pembahasan mengenai sejarah dari perjanjian perpajakan membuat para pembelajar kesulitan untuk memahami dan memahami pola perkembangan perjanjian perpajakan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan sejarah dari perjanjian perpajakan yang dapat digunakan untuk memetakan pola dan mekanisme perjanjian perpajakan selama ini. Tulisan ini akan dengan dilakukan metode kajian pustaka. Sejarah perjanjian pajak akan didokumentasikan dan ditabulasi dalam konteks tahap- tahap kesejarahan, seperti perjanjian pajak dimasa kerajaan, masa imperialisme kuno, masa imperialisme modern, dan masa kini. Hasil yang akan diperoleh diharapkan merupakan tulisan yang bersifat *critical descriptive* yang mendeskripsikan perjanjian perpajakan pada setiap masanya. Hasil tulisan ini menemukan bahwa setiap perjanjian perpajakan memiliki mekanisme dan pola yang berbeda untuk setiap masa yang mewakili masing-masing kepentingan dari masa itu. Sumber data bagi penulisan ini didasarkan pada berbagai bacaan yang tersedia dan relevan terhadap bahasan serta pencarian data dari sumber lain yang tersedia.. Tulisan ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan mengenai sejarah dari perjanjian perpajakan serta mampu memberikan gambaran mengenai mekanisme dan pola perjanjian perpajakan dari masa ke masa yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penulisan lebih lanjut maupun membantu proses pengambilan keputusan.

**Keyword:** sejarah perjanjian perpajakan, perpajakan, perjanjian, masa kerajaan, masa imperialisme, masa kini.

**Abstract:** Limited number of study about the history of tax treaty made it difficult for scholars to understand about the tax treaty pattern. The aim of this study is to give a broader description about the development and history of tax treaty that can be used to map the pattern and mechanism of tax treaty to date. This study will be conducted in the form of literature review. The history of tax treaty will be documented and tabulated in the context of stages in history, for instance tax treaty in the kingdom period, tax treaty in the ancient imperialism period, tax treaty in the modern imperialism period, and tax treaty in the present period. The result of this study is expected to be a critical descriptive writing that will describe tax treaty in each of its period. The study discovered that every tax treaty has its own pattern and mechanism representing each of the concerns at that period. The data sources for this study is based on various available literatures which are relevant to the topic and also from previous studies. This study is expected to enrich the literature about the history of tax treaty and also be able to give a broader description about the pattern and mechanism of tax treaty to date which can be utilized as a reference for further studies and assists decision making process.

**Keyword:** tax treaty history, taxation, tax treaty, kingdom period, imperialism period, present period.

## I. Pengantar

### 1. Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk melindungi warga negaranya. perlindungan kepada warga negara bukan hanya mengenai perlindungan dari serangan baik dari negara lain maupun dari dalam negaranya sendiri. Pemenuhan kebutuhan masyarakat juga merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harus dilaksanakan oleh negara terhadap warga negaranya. pada masa lalu. Saat rakyat suatu negara masih dalam jumlah yang minimal, negara dapat melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya hanya dengan pertanian, perdagangan, perkebunan dan kegiatan sederhana lainnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu lingkup wilayah negara maka akan semakin sulit pula upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga cara-cara sederhana yang dahulunya digunakan tidak lagi mencukupi dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara. Saat itulah upaya lain dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mencapai tujuan berdirinya secara utuh, yaitu dengan melakukan eksplorasi atas sumber daya alam yang mereka miliki, misalnya pertambangan minyak bumi dan batu bara. Sayangnya, sumber pendapatan dari adanya eksplorasi dari sumber daya alam tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti misalnya kondisi cuaca, permintaan, keamanan suatu negara dan hal-hal lain. sehingga pendapatan dari sektor tersebut walaupun jumlahnya besar namun cukup sulit untuk diandalkan karena berbagai faktor eksternal tadi yang tidak bisa dikendalikan oleh negara.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara adalah dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Pungutan pajak merupakan upaya yang lebih dipengaruhi oleh keadaan internal suatu negara, karena pemungutan pajak dapat dipengaruhi oleh upaya legalisasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara.

Upaya legalisasai tersebut antara lain adalah dengan diterbitkannya berbagai peraturan terkait pajak, misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

Selain dikeluarkannya berbagai peraturan, upaya legalisasi lain untuk meningkatkan pendapatan suatu negara agar dapat memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengadakan perjanjian pajak dengan negara lain agar tindak pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat terhindar dan terjadinya peningkatan investasi sehingga dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan semakin banyak dan mencukupi. Seiring dengan majunya teknologi dan informasi, praktek perpajakan suatu negara juga mengalami perubahan, selain dengan penerapan teknoloi dalam pemungutan pajak, ternyata muncul praktek perjanjian perpajakan antar negara. Perjanjian itu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi praktek dari bisnis yang ada, seperti adanya Badan Usaha Tetap serta semakin maraknya mobilisasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sebenarnya perjanjian terkait pajak yang kita kenal sekarang sudah ada sejak zaman dahulu dengan mekanisme dan kerangka hubungan yang berbeda-beda dari tiap masanya. Artikel ini akan membahas satu persatau mekanisme dan kerangka hubungan yang terjadi pada perjanjian pajak pada masa kerajaan, masa imperialisme, dan masa kini sebagai gambaran mengenai masing-masing perjanjian perpajakana pada masanya.

## 2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah

- a) Bagaimanakan mekanisme dan pola perjanjian perpajakan pada masa kerajaan?
- b) Bagaimanakan mekanisme dan pola perjanjian perpajakan pada masa imperialisme?
- c) Bagaimanakan mekanisme dan pola perjanjian perpajakan pada masa kini?

### 3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

- a) Memahami mekanisme formulasi perjanjian pajak dari waktu ke waktu.
- b) Memahami sejarah perubahan dari mekanisme dan pola perjanjian perpajakan internasional waktu ke waktu.

## II. Tinjauan Pustaka

### 1. Masa Kerajaan

Makna kerajaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) Indoneisa adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kepala negara dan atau kepala pemerintahannya disebut sebagai raja. Selain memiliki penguasa atau pemimpin yang sering disebut raja, kerajaan haruslah memiliki rakyat dan wilayah. Karena dengan rakyat dan wilayah itulah seorang raja dapat memiliki kekuasaan.

Masa kerajaan ini diakhiri dengan munculnya konsep negara yaitu pada tahun 1531 saat Niccolo Machiavelli mengenalkan istilah *Lo Stato* dalam bukunya yang berjudul *Il Principe*. Sehingga tulisan mengenai perjanjian pajak pada masa kerajaan dibatasi sampai tahun 1531 dan sebelumnya. Munculnya konsep negara ini menjadikan kerajaan tidak bergerak se bebas seperti sebelumnya, karena dengan adanya konsep negara ini maka kerajaan akan berada dibawah suatu garis pemerintahan negara tertentu. Misalnya adalah kerajaan Kraton Yogyakarta yang sekarang berada di wilayah Republik Indonesia.

Perjanjian pajak pada masa kerajaan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Perjanjian pajak antara sesama kerajaan merdeka
- b) Perjanjian pajak antara kerajaan yang melindungi dan dilindungi
- c) Perjanjian pajak antara kerajaan yang menguasai dan dikuasai

## 2. Masa Imperialisme

Imperialisme berasal dari bahasa latin, yaitu imperare. Imperare adalah usaha suatu negara untuk menguasai, mengendalikan, dan memerintah negara lain demi keuntungannya (Tahroni dan Jarwika, 2006). Masa Imperialisme terbagi menjadi dua masa yaitu masa imperialisme kuno dan imperialisme modern.

### a) Imperialisme kuno

Menurut no name, staff.ui.ac.id, imperialisme kuno terjadi sebelum tahun 1870. Imperialisme kuno ditandai dengan adanya imperium-imperium seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China (no name, staff.ui.ac.id). Berdasarkan tahun yang disebutkan oleh staff.ui.ac.id maka penulis akan mengelompokkan perjanjian yang berada antara tahun 1531 (batas akhir masa kerajaan) dan 1870 merupakan perjanjian pada masa imperialisme kuno.

### b) Imperialisme modern

Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan barang di negara-negara Barat. Sehingga mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industrinya (Staff.ui.ac.id).

Selain tujuan ekonomi, dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai The White Man

Burden(Staff.ui.ac.id).Perjanjian yang masuk pada masa imperialisme modern ini adalah perjanjian yang dilaksanakan setelah adanya revolusi industri dan diatas tahun 1870 sampai dengan munculnya model perjanjian pajak berganda yaitu pada tahun 1928.

### 3. Masa Kini

Masa Kini dideskripsikan sebagai masa setelah tahun 1928 (munculnya model perjanjian pajak berganda antar negara) hingga tahun dibuatnya penulisan ini.

## III. Metodologi Penulisan

Tulisan ini akan dilakukan dengan metode kajian pustaka. Sejarah perjanjian pajak akan didokumentasikan dan ditabulasi dalam konteks tahap- tahap kesejarahan, seperti perjanjian pajak dimasa kerajaan, masaimperialisme kuno, masa imperialisme modern, dan masa kini sesuai denan kriteria yang telah dijelaskan bahwa untuk perjanjian perpajakan masa kerajaan berakhir pada tahun 1531, masa imperialisme kuno antara tahun 1531 hingga 1870, masa imperialisme moderen antara tahun 1870 hingga 1926, dan masa kini dari 1928 hingga tulisan ini dibuat.

Hasil yang akan diperoleh diharapkan merupakan tulisan *critical descriptif*. Sumber bagi penulisan ini didasarkan pada berbagai bacaan yang tersedia dan relevan terhadap bahasan serta pencarian data dari sumber lain yang tersedia.

## IV. Hasil Penulisan

### 1. Masa Kerajaan

Makna kerajaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) Indoneisa adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kepala negara dan atau kepala pemerintahannya disebut sebagai raja. Selain memiliki penguasa atau pemimpin yang sering disebut raja, kerajaan

haruslah memiliki rakyat dan wilayah. Karena dengan rakyat dan wilayah itulah seorang raja dapat memiliki kekuasaan.

Masa kerajaan ini diakhiri dengan munculnya konsep negara yaitu pada tahun 1531 saat Niccolo Machiavelli mengenalkan istilah *Lo Stato* dalam bukunya yang berjudul *Il Principe*. Sehingga tulisan mengenai perjanjian pajak pada masa kerajaan dibatasi sampai tahun 1531 dan sebelumnya. Munculnya konsep negara ini menjadikan kerajaan tidak bergerak se bebas seperti sebelumnya, karena dengan adanya konsep negara ini maka kerajaan akan berada dibawah suatu garis pemerintahan negara tertentu. Misalnya adalah kerajaan Kraton Yogyakarta yang sekarang berada di wilayah Republik Indonesia.

Perjanjian pajak pada masa kerajaan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Perjanjian pajak antara sesama kerajaan merdeka
- b) Perjanjian pajak antara kerajaan yang melindungi dan dilindungi
- c) Perjanjian pajak antara kerajaan yang menguasai dan dikuasai

Berikut merupakan pembahasan dari masing-masing kategori dari perjanjian perpajakan masa kerajaan.

a) **Perjanjian pajak antar sesama kerajaan merdeka**

Perjanjian pajak antar sesama kerajaan yang merdeka berarti bahwa kerajaan yang melakukan perjanjian adalah kerajaan yang tidak sedang dalam pengaruh dari kerajaan lain akibat ditaklukan maupun tunduk karena sebab lainnya. Perjanjian pajak antar negara yang sama-sama merdeka pada umumnya selain karena alasan ekonomi, alasan yang utamanya adalah politik dan diplomasi. Contoh perjanjian pajak dalam kategori ini adalah:

- Kerajaan Sriwijaya dan Kekaisaran Cina

Sebagai upaya memperkuat posisi dan penguasaannya di wilayah Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Cina dan secara teratur mengirimkan utusan bersama upeti (Tahroni dan Jarwika, 2006).

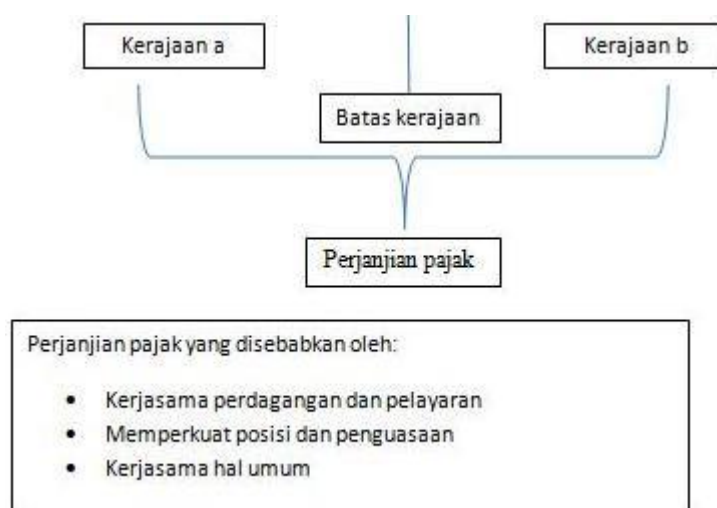
- Kraton Aceh dan Kraton Malaka

Saat itu Kraton Malaka diserang oleh Portugis pada tahun 1511. Hal tersebut membuat Sultan Mahmud Syah melarikan diri kedaerah Kampar di Sumatra, sedangkan keluarga dari Sultan Mahmud Syah diungsikan ke Aceh. Dalam masa sulit akibat penyerangan Portugis dan pelarian Sultan Mahmud Syah, Kraton Aceh membantu Kraton Malaka. Sehingga terjalinlah hubungan kerjasama antara Kraton Aceh dengan Kraton Malaka. Hubungan kerjasama tersebut terus berkembang hingga pada akhirnya diputuskan untuk saling menikahkan putra dan putri kedua kraton tersebut. Pernikahan ini disebut-sebut sebagai pernikahan politik sebagai penguat hubungan kerjasama antara Kraton Malaka dan Kraton Aceh. Pada pernikahan itu, seorang putra Kraton Malaka yang bernama Sultan Alaudin Mansyur Syah dinikahkan dengan putri Kraton Aceh dan Putri Kraton Malaka dinikahkan dengan Raja Linge ke XIII (Acehpedia.org).

Sehingga pada kategori ini mekanisme perjanjian pajak yang terjadi adalah raja suatu kerajaan akan bernegosiasi dengan raja dari kerajaan lain untuk membicarakan mengenai kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya untuk tidak saling serang dengan diikuti oleh perjanjian untuk saling menerima upeti satu sama lain. dengan perjanjian tersebut maka antar kerajaan akan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dan jika kewajiban tersebut dicerai



maka perjanjian dapat menjadi batal dan akan terjadi perpecahan antar kerajaan yang melakukan perjanjian. Dari mekanisme ini, kerangka hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa pada kategori perjanjian pajak antara sesama kerajaan merdeka, perjanjian pajak yang terjadi lebih didominasi oleh kegiatan kerjasama perdagangan, perkuatan posisi, dan bentuk kerjasama lainnya yang lebih umum. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat					
		A 1	B 1	A 2	B 2	A 3	B 3
1	kerjasama perdagangan dan pelayaran	-	+				
2	memperkuat posisi dan penguasaan			-	+		
3	kerjasama umum					-	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak antar kerajaan yang merdeka yang disebutkan sebagai contoh pada perjanjian pajak antar kerajaan yang merdeka. Keterkaitan pihak juga dikaitkan dengan kerangka hubungan

perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang mengirim upeti atau pajak. Sedangkan tanda *plus* (+) menunjukkan bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang menerima upeti atau pajak. Sehingga Tabel diatas menunjukkan bahwa kerajaan A1 (Majapahit) melakukan perjanjian dengan kerajaan B1 (Kerajaan Cina, Ayodya, Champa, Kamboja), dimana Kerajaan Majapahit mengirimkan upeti kepada kerajaan-kerajaan di B1 dengan alasan untuk melakukan kerjasama persagangan dan pelayaran. Kerajaan A2 (Kerajaan Sriwijaya) mengirimkan upeti kepada Kerajaan B2 (Kerajaan Cina) dalam rangka memperkuat posisi dan penguasaan Kerajaan Sriwijaya di Wilayah kekuasaannya. Kerajaan A3 (Kerajaan Malaka) mengirimkan Upeti kepada kerajaan B3 (Kerajaan Aceh) dalam rangka kerjasama umum antar dua kerajaan itu.

**b) Perjanjian pajak antara kerajaan yang melindungi dan dilindungi**

Sebagai upaya melindungi kerajaan, permintaan bantuan kepada kerajaan lain untuk melindunginya merupakan hal yang sangat sering terjadi pada masa itu. Hal tersebut terjadi karena pada masa kerajaan, perebutan maupun perluasan wilayah merupakan hal yang wajar sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dan pengakuan kedaulatan. Permintaan untuk melindungi bukanlah hal yang bisa secara cuma-cuma didapatkan. Sebagai kerajaan yang dilindungi, mereka pada umumnya harus menyetorkan sejumlah upeti kepada negara yang melindunginya.

Perjanjian pajak pada kategori ini sangat erat dengan konsep pada masa kerajaan Budha, dimana muncul konsep mandala dan tributari, yaitu konsep bahwa suatu kerajaan akan menjadi mandala (kerajaan yang diikuti) dari kerajaan lain yang merupakan tributarinya (kerajaan yang mengikuti).

Pada masa ini, mekanisme perjanjian pajaknya adalah kerajaan yang lemah (nantinya dilindungi) meminta bantuan kepada kerajaan kuat. Permohonan bantuan tersebut diikuti dengan adanya barang atau komoditas yang harus diserahkan kepada kerajaan kuat oleh kerajaan lemah. Barang atau komoditas tersebut pada umumnya merupakan hal yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua pihak memiliki andil dalam penentuannya. Baik dalam hal bentuk, jumlah dan waktu penyerahan. Dari mekanisme ini, kerangka hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut:



Pada kategori ini, perjanjian pajak yang terjadi lebih didasari pada upaya untuk mendapat perlindungan dari serangan kerajaan lain. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat	
		A1	B1
1	Perlindungan dari serangan	-	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak antar kerajaan yang dilindungi dan melindungi yang disebutkan sebagai contoh pada perjanjian pajak antar kerajaan yang dilindungi dan melindungi. Keterkaitan pihak

juga dikaitkan dengan kerangka hubungan perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang mengirim upeti atau pajak. Sedang tanda *plus* (+) menunjukkan bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang menerima upeti atau pajak. Tabel diatas menunjukkan kerajaan A1 mengirimkan upeti kepada kerajaan B1 dalam upaya untuk mencari perlindungan agar tidak diserang dan dibantu apabila ada penyerangan dari kerajaan lain.

c) **Perjanjian pajak antara kerajaan yang menguasai dan dikuasai**

Semakin besar wilayah suatu kerajaan maka akan semakin banyak pajak atau upeti yang dapat didapat oleh sang raja. Hal itulah yang menjadi salah satu pendorong mengapa suatu kerajaan ingin memperlebar wilayah kekuasaanya, sehingga terkadang terjadi benturan antar kerajaan untuk berebut suatu wilayah. Sehingga akan muncul pihak pemenang dan pihak yang kalah, yang kemudian dapat berlanjut pada perjanjian penyerahan upeti.

Upeti atau pajak pada kategori ini digunakan sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan rakyat atau daerah jajahan kepada sang raja atau penguasa kerajaan. Selain sebagai bentuk ketaatan dan rasa hormat, upeti juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antara raja kepada rakyat dan sebaliknya, karena dari upeti inilah raja dapat melihat kesetiaan dan ketaatan rakyatnya. Contoh perjanjian pajak pada kategori ini antara lain adalah:

- Perjanjian Kerajaan Jin dengan Dinasti Song

Kerajaan Jin merupakan kerajaan yang didirikan oleh Bangsa Jurchen. Mereka mulanya mendiami wilayah Manchuria. Saat Bangsa Jurchen dibawah kepemimpinan Wanyan Min, mereka mulai melebarkan wilayah kekuasaan

dengan menaklukan negeri-negeri tetangga. Perluasan wilayah itu akhirnya membuat Kerajaan Jin harus menghadapi Dinasti Song yang saat itu ibukotanya telah berpindah ke Linan. Kemenangan Kerajaan Jin atas Dinasti Song membuat Dinasti Song harus menandatangani perjanjian perdamaian yang mengharuskan mereka membayar upeti tahunan sejumlah 250.000 ons perak dan 250.000 gulungan sutra(Taniputera, 2009).

- Perjanjian perdamaian antara Dinasti Song dan Xia Barat.

Perjanjian perdamaian ini didahului dengan adanya penyerangan oleh Bangsa Tangut yang saat itu mendirikan Kerajaan Xia. Pertempuran itu akhirnya memunculkan perjanjian perdamaian antara Xia dan Dinasti Song. Pada perjanjian tersebut Dinasti Song dituntut untuk membayar upeti tahunan kepada Xia sejumlah 130.000 gulungan sutra, 1.400 kg perak, dan 9.000 kg teh(Taniputera, 2009).

Mekanisme yang ada terkait perjanjian pajak pada perjanjian pajak antara negara taklukan dan yang menaklukannya adalah penguasa atau raja dari kerajaan yang menaklukan memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak atau upeti yang harus dibayar oleh negara taklukan. Sebagai negara yang ditaklukan, maka dia harus memenuhi permintaan tersebut. sehingga pada perjanjian pajak jenis ini, pada umumnya raja yang berkuasa akan menentukan bentuk, jumlah, dan waktu penyerahan pajak secara sepihak. Dari mekanisme tersebut, kerangka hubungannya adalah sebagai berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa pada kategori perjanjian pajak antara kerajaan yang menguasai dan dikuasai, perjanjian pajak lebih dipengaruhi oleh masalah penguasaan kerajaan lain, perluasan wilayah, perdagangan, dan perdamaian. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat					
		A 1	B 1	A 2	B 2	A 3	B 3
1	Penguasaan	-	+				
2	Memperluas wilayah, perdagangan, dan upeti			-	+		
3	Perdamaian					-	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak antar kerajaan yang dikuasai dan menguasai yang disebutkan sebagai contoh pada perjanjian pajak antar kerajaan yang kerajaan yang dikuasai dan menguasai. Keterkaitan pihak juga dikaitkan dengan kerangka hubungan perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang mengirim upeti atau pajak. Sedang tanda *plus* (+) menunjukkan

bahwa kerajaan yang memiliki tanda tersebut adalah kerajaan yang menerima upeti atau pajak. Tabel diatas menunjukkan kerajaan A1 (Kerajaan Bima dan Brunei) mengirimkan upeti kepada kerajaan B1 (Kerajaan Majapahit) karena pada saat itu Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan di Kerajaan A1 (Kerajaan Bima dan Brunei). Kerajaan A2 (Kerajaan Kroyo dan Dinasti Song) mengirimkan upeti atau pajak ke kerajaan B2 (Kerajaan Mongol dan Kerajaan Jin) karena pada waktu itu Kerajaan Mongol memiliki kekuasaan di wilayah kerajaan A2 untuk memperluas wilayah, memperlancar perdagangan dan mendapatkan upeti. Kerajaan A3 (Kekaisaran Gaodi dan Dinasti Song) mengirimkan upeti atau pajak kepada kerajaan B3 (Xiangnou, Bangsa Kitan, dan Xia Barat) yang digunakan sebagai bukti tanda perdamaian antara mereka karena peperangan.

## 2. Masa Imperialisme

Masa Imperialisme terbagi menjadi dua mas yaitu masa imperialisme kuno dan imperialisme modern. Keduanya memiliki mekanisme dan kerangka hubungan perjanjian pajak yang berbeda.

### a) Imperialisme kuno

Keinginan untuk memperoleh kekayaan (*gold*), menyebarkan agama (*gospel*), dan mendapat kejayaan (*glory*) membuat negara barat melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mewujudkan keinginan tersebut. perjalanan itu tak ayal membuat antar negara yang memiliki keinginan sama akan berbenturan, benturan itu yang akan membuat diadakannya perjanjian. Perjanjian yang berada antara tahun 1531 (batas akhir masa kerajaan) dan 1870 merupakan perjanjian pada masa imperialisme kuno.

Contoh perjanjian pajak pada masa ini antara lain adalah:

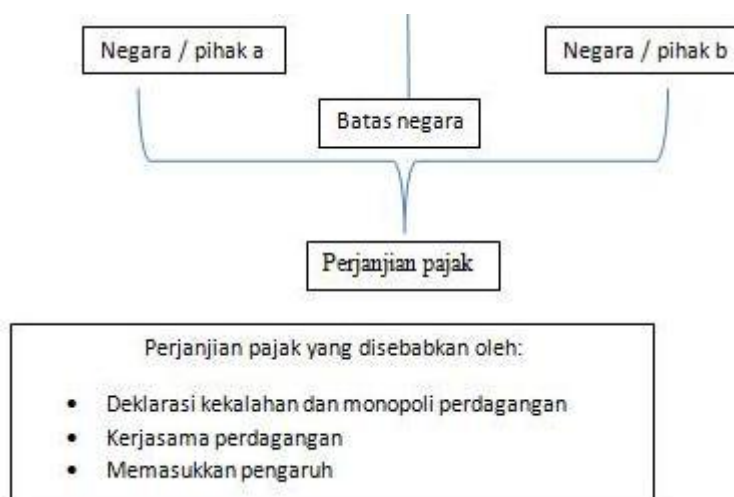
- Perjanjian Bongaya atau Bungaya

Isi dari perjanjian bungaya yang terkait perjanjian pajak adalah bahwakompeni harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor. Istilah kompeni pada isi tersebut merujuk pada VOC (Vereenigde Oost Indisgce Compagnie), yaitu organisasi perkumpulan pedagang Belanda yang menguasai wilayah Indonesia.

- Perjanjian antara Sultan Hamengkubuwono III dengan gubernemen Inggris.

Perjanjian ini adalah perjanjian yang disengaja oleh Gubernur Jenderal Raffles untuk membekukan Kraton Yogyakarta dengan suatu sistem yang disusupkannya ke dalam Kraton. Perjanjian ini mengharuskan Sultan Hamengku Buwono III untuk melepaskan mengenai enarikan bea dari bandar-bandar dan pasar-pasar (Dwiyanto, 2009).

Mekanisme perjanjian pajak pada masa imperialime kuno ini didominasi dengan keberadaan negara yang menjajah wilayah lain. Mekanisme perjanjian pajak pada masa imperialisme kuno ini mirip dengan mekanisme perjanjian pajak antara kerajaan yang menaklukan dengan yang ditaklukkannya. Sehingga kerangka perjanjian pajaknya adalah sebagai berikut:





Gambar diatas memperlihatkan bahwa pada masa imperialisme kuno, perjanjian pajak yang terjadi didasari oleh masalah deklarasi kekalahan dan monopoli perdagangan, kerjasama perdagangan, dan cara untuk memasukkan pengaruh ke pihak yang dijajah. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat							
		A 1	B 1	A 2	A2 *	B 2	B2 *	A 3	B 3
1	Deklarasi kekalahan dan monopoli perdagangan	-	+						
2	kerjasama perdagangan			-	+	+	+		
3	memasukkan pengaruh							-	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak pada masa imperialisme kuno yang disebutkan sebagai contoh pada masa imperialisme kuno. Keterkaitan pihak juga dikaitkan dengan kerangka hubungan perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan pihak tersebut dirugikan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Sedang tanda *plus* (+) menunjukkan pihak tersebut diuntungkan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Tabel diatas menunjukkan pihak A1 (Kerajaan Gowa) mengalami kerugian akibat adanya perjanjian terkait perpajakan sedangkan pihak B1 (VOC atau Belanda) mendapat keuntungan dari adanya perjanjian terkait perpajakan yang merupakan deklarasi kekalahan dan pengesahan monopoli perdagangan oleh VOC di Kerajaan Gowa. Pihak A2 (Kerajaan Banten) mengalami kerugian akibat perjanjiannya dengan pihak B2 (VOC atau Belanda), dimana pihak B2 (VOC atau Belanda) mengalami keuntungan karena hilangnya salah satu pungutan pajak yang dikenakan terhadapnya. Selanjutnya pihak A2\* (Jayakarta) dan pihak B2\* (Belanda atau VOC) sama-sama mendapat keuntungan dari perjanjian

terkait pajak yang dilakukan oleh mereka, dimana pihak VOC atau Belanda dapat berdagang di pelabuhan Jayakarta dengan pajak yang minimal, namun pihak Jayakarta diuntungkan karena masih dapat memungut pajak. Pihak A3 (Sultan Hamengkubuwono III) dirugikan dengan adanya perjanjian terkait pajak dengan pihak B3 (VOC atau Belanda), karena pada perjanjian itu VOC atau Belanda memasukkan pengaruhnya sehingga merugikan pihak Sultan Hamengkubuwono III.

**b) Imperialisme modern**

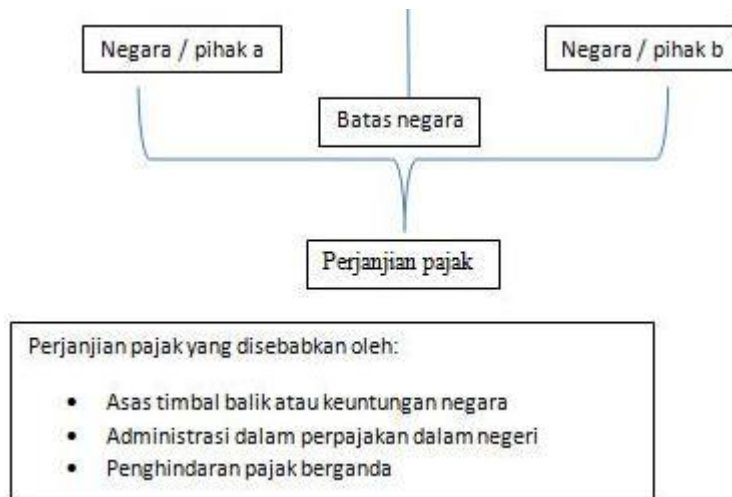
Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Sehingga mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industrinya (Staff.ui.ac.id).

Selain tujuan ekonomi, dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai The White Man Burden(Staff.ui.ac.id).

Perjanjian yang akan masuk pada masa imperialisme modern ini adalah perjanjian yang dilaksanakan setelah adanya revolusi industri dan diatas tahun 1870 sampai dengan munculnya model perjanjian pajak berganda yaitu pada tahun 1928. Contoh perjanjian pajak pada masa ini antara lain adalah:

- Perjanjian pajak antara Austro-Hungarian Empire dan Prusia pada tahun 1899(Jogarajan, 2011).
- Perjanjian pajak yang diperkenalkan oleh German. Dimana kapal negara asing tidak akan dikenakan pajak di Negara German apabila negara asing itu juga membebaskan pajak atas kapal German yang berada diwilayahnya(Jogarajan, 2011).
- Perancis dan Belgia pada tahun 1843. Perjanjian tersebut mengatur mengenai masalah kerjasama administrasi antara kedua negara terkait perpajakan(Jogarajan, 2011).

Berbagai contoh diatas memperlihatkan bahwa perjanjian pajak masa itu digunakan untuk satu komoditas khusus, misalnya informasi dan penghindaran pajak berganda yang masih sederhana. Hal tersebut berbeda dengan keadaan perjanjian pajak pada dekade ini, karena kecenderungannya perjanjian pajak yang sekarang ada merupakan perjanjian pajak atas suatu isu yang merupakan gabungan dari isu perpajakan yang ada (Bundling Item). Namun perjanjian pajak pada masa imperialisme modern ini menjadi cikal bakal perkembangan perjanjian pajak pada masa kini yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Mekanisme yang terjadi pada masa ini adalah negara akan melakukan perjanjian kerjasama dengan negara lain terkait perjanjian pajak, maupun hal-hal yang mendukung pemungutan pajak dalam negaranya. kerangka hubungan yang dimiliki pada masa ini adalah sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa, pada masa imperialisme modern, perjanjian pajak dipengaruhi oleh masalah hubungan yang berkaitan dengan asas timbal balik atau keuntungan negara, administrasi dalam perpajakan dalam negeri, dan penghindaran pajak berganda. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti atau keuntungan berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat					
		A1	B1	A2	B2	A3	B3
1	Asas timbal balik atau keuntungan negara	+	+				
2	Administrasi perpajakan dalam negeri			+	+		
3	Penghindaran pajak berganda					+	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak pada masa imperialisme modern yang disebutkan sebagai contoh pada masa imperialisme modern. Keterkaitan pihak juga dikaitkan dengan kerangka hubungan perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan pihak tersebut dirugikan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Sedang tanda *plus* (+) menunjukkan pihak tersebut diuntungkan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Tabel diatas menunjukkan pihak A1 (German dan Britania Raya) mengalami keuntungan akibat

adanya perjanjian yang menganut asas timbal balik, sedangkan pihak B1 (pihak yang menerapkan perjanjian dengan asas timbal balik yang sama dengan Jerman dan Britania Raya) juga mendapat keuntungan dari adanya perjanjian. Pihak A2 (Perancis) mengalami keuntungan akibat perjanjiannya dengan pihak B2 (Belgia dan Britania Raya), dimana pihak B2 (Belgia dan Britania Raya) juga mengalami keuntungan karena adanya pertukaran informasi atas kedua pihak sehingga urusan perpajakan dalam negeri mereka dapat terbantu. Pihak A3 (Austro-Hungarian Empire) diuntungkan dengan adanya perjanjian pajak berganda dengan pihak B3 (Prusia, Liechtenstein, Saxony, Bavaria, Baden, dan Wuerttemberg), karena pada perjanjian itu kedua belah pihak bersepakat untuk mengupayakan adanya pajak berganda yang akan mengakibatkan kerugian bagi mereka misalnya arus investasi dan penghindaran pajak.

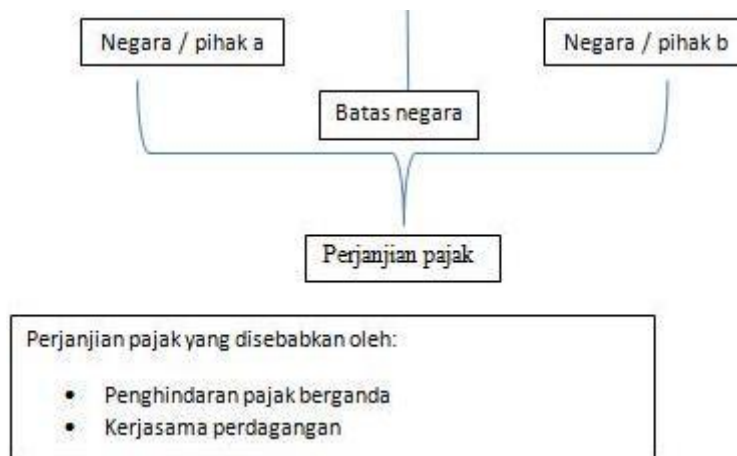
### 3. Masa kini

Saat ini perpajakan tidaklah hanya diterapkan dalam suatu domestik wilayah sebuah negara saja, dengan berkembangnya bisnis dan perekonomian dunia membuat aliran barang dan jasa seperti tidak memiliki pembatas, sehingga memunculkan berbagai permasalahan dalam sistem perpajakan yang ada. Hal ini berkaitan dengan status, keberadaan, dan penghasilan dari subjek pajak, karena dimungkinkan dengan keadaan tersebut membuat subjek pajak menerima penghasilan dari dua negara yang berbeda.

Permasalahan-permasalahan seperti diatas pada akhirnya mendesak untuk dimunculkan suatu sistem hukum perpajakan internasional yang sekarang ini kita kenal. Hukum perpajakan internasional ini merupakan alat untuk menyelesaikan pemajakan berganda yang dapat terjadi dan merugikan subjek pajak. Negara akan melakukan perjanjian pajak karena sesama negara tersebut saling membutuhkannya dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, perjanjian pajak ini juga digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan adanya

subjek pajak yang curang sehingga dia bisa lolos dari pajak di beberapa negara. Perjanjian pajak yang akan digolongkan pada perjanjian pajak masa kini adalah perjanjian pajak setelah tahun 1928 hingga tulisan ini dibuat.

Contoh perjanjian pajak pada masa ini sangatlah banyak, misalnya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Belanda, Indonesia dengan Amerika dan lain-lain. selain itu, terdapat pula perjanjian pajak yang melibatkan negara dalam satu regional wilayah, misalnya yang terjadi di ASEAN dengan adanya AFTA. Kerangka hubungan perjanjian pajak pada perjanjian pajak masa kini adalah sebagai berikut:



Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pada masa kini didasari oleh upaya untuk melakukan penghindaran pajak berganda dan kerjasama perdagangan. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kerangka tersebut dalam bentuk pihak mana yang memperoleh upeti berdasarkan kerangka yang ada.

No	Kerangka hubungan	Kerajaan yang terlibat			
		A1	B1	A2	B2
1	Penghindaran pajak berganda	+	+		
2	kerjasama perdagangan			+	+

Tabel diatas menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pajak pada masa kini yang disebutkan sebagai contoh pada masa kini. Keterkaitan pihak juga dikaitkan dengan kerangka hubungan perjanjian pajak pada masa itu. Tanda *minus* (-) menandakan pihak tersebut dirugikan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Sedang tanda *plus* (+) menunjukkan pihak tersebut diuntungkan akibat adanya perjanjian terkait pajak. Tabel diatas menunjukkan bahwa perjanjian terkait perpajakan pada masa kini digunakan demi keuntungan kedua belah pihak, baik karena alasan perdagangan (misalnya dalam AFTA mengenai pengenaan bea masuk) maupun karena penghindaran pajak berganda yang pada masa kini merupakan perjanjian terkait pajak yang mencakup banyak hal seperti pembagian hak pemajakan, pertukaran informasi, dan lingkup perjanjian.

## V. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

### 1. Kesimpulan

Keberadaan perjanjian terkait perpajakan telah ada sejak zamankerajaan hingga sekarang. Walaupun demikian, bentuk dari perjanjian pajak pada masa kerajaantidaklah serumit seperti apa yang sekarang terjadi. Pada masa kerajaan perjanjianpajak yang terjadi masihlah sangat sederhana, yaitu terjadinya penyerahan upetiatau pajak akibat adanya perjanjian yang didasari oleh berbagai kondisi. Padamasa imperialisme, perjanjian pajak sudah memunculkan suatu bentukkesepakatan atas pemungutan pajak antar dua pihak serta sudah mulai munculperjanjian-perjanjian yang sangat erat kaitannya dengan perpajakan, misalnyapertukaran informasi, bahkan perjanjian penghindaran pajak berganda yangbentuknya masih sederhana. Pada masa kini, perjanjian pajak bersifat *bundlingitem*. Yaitu pada satu perjanjian terdapat bermacam-macam kesepakatan, misalnyamengenai hak pemajakan dan pertukaran informasi mengenai

perpajakan. Perjanjian pajak pada setiap masanya memiliki mekanisme dan pola hubungan yang berbeda bergantung pada masing-masing kepentingan serta kondisi yang terjadi.

## 2. Implikasi

- a) Bagi pihak akademisi dan penulis lainnya, diharapkan tulisan ini mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme formulasiaupun dampak perjanjian pajak dari waktu-kewaktu untuk memahami hubungan politik ekonomi internasional dari waktu –kewaktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian atau tulisan lainnya.
- b) Bagi pembuat kebijakan, diharapkan tulisan ini mampu memberikangambaran mengenai bagaimana mekanisme formulasi maupun dampakperjanjian pajak dari waktu-kewaktu untuk memahami hubungan politikekonomi internasional dari waktu –kewaktu sehingga dapat dimanfaatkandalam merumuskan kebijakan pada masa yang akan datang.

## 3. Keterbatasan

Permasalahan yang dihadapi penulis adalah permasalahan keterbatasan sumber bacaan. Sehingga penulis berharap apabila karya ini akan diteliti dan dikaji lebih lanjut maka permasalahan keterbatasan sumber bacaan harus ditangani terlebih dahulu, sehingga ulasan dari penulisan semacam ini akan menjadi lebih tajam dan hasil dari penulisan dapat digunakan sebagai salah satu citasi akademik yang baik



## VI. Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Djoko. 2009. *Kraton Yogyakarta: sejarah, nasionalisme & teladan perjuangan*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Jogarajan, Sunita. 2011. Prelude to the International Tax Treaty Network: 1815- 1914 Early Tax Treaties and the Conditions for Actions. *Oxford Journal of Legal Studies Advance Access*, Oxford Journal of Legal Studies, (2011), pp. 1–29
- Ruhydin, Hujjat. 2011. Kerajaan pada masa awal Hindu-Budha. Diakses pada J umat 11 November 2011. Jam 10.20. Dari alamat website <http://blog.unnes.ac.id/hujjat/author/hujjat/>
- Tahroni dan Jarwika. 2006. *Pelajaran Sejarah Untuk SMA Kelas XI*. Depok: Arya Duta
- Taniputera, Ivan. 2009. *History of China*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- \_\_\_\_\_. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada Minggu 06 November 2011. Jam 10.35. Dari alamat website <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>
- \_\_\_\_\_. Diakses pada Kamis 10 November 2011. Jam 17.35. Dari alamat website <http://staff.ui.ac.id/internal/131285157/material/PHKI-2.pdf>
- \_\_\_\_\_. 2011. Legenda Gajah Putih di Kerajaan Aceh Darussalam. Diakses Kamis 10 November 2011. Jam 15.05. Dari alamat website [http://acehpedia.org/Legenda Gajah Putih di Kerajaan Aceh Darussalam](http://acehpedia.org/Legenda_Gajah_Puteh_di_Kerajaan_Aceh_Darussalam)

## **Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Fiskus terhadap Pengetahuan Umum, Perencanaan, Strategi Perencanaan, dan Penggelapan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Padang**

**BOBBY ILYAS  
POPI FAUZIATI  
RESTI YULISTIA.M  
Universitas Bung Hatta Padang**

**Abstract:** *This study analyzes the level of understanding of the corporate taxpayer and the tax authorities on tax planning and tax evasion in the city of Padang. This study aims to determine how well the level of understanding of the corporate taxpayer and the tax authorities to the general knowledge of taxation, tax planning, tax planning strategies, and tax evasion. The sample in this study is the corporate taxpayer and the tax authorities at Padang city. Total processed questionnaires consisting of as many as 65 to 35 people and 30 corporate tax payer for the tax authorities. Processing data using the Wilcoxon signed test. The results prove that there is a significant difference in understanding between the taxpayer and the tax authorities of the planning agency and tax evasion. Level of understanding of the difference is due to the educational background, training followed, and work experience.*

**Keywords:** *corporate taxpayer, tax authorities, tax planning, tax fraud, tax evasion, tax planning strategies*

## 1. Pendahuluan

Sudah menjadi dilema dalam praktek perpajakan di suatu negara yaitu terdapatnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Di satu sisi wajib pajak berusaha meminimalisasi kewajibannya sedangkan pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak menjadi maksimal. Bagi pemerintah, pajak adalah salah satu sumber penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam hal pelaksanaan beban perpajakan ini, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Bagi Wajib Pajak, dalam hal ini perusahaan sebagai Wajib Pajak badan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Sedangkan dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara, yang sebagian berasal dari pajak

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini bisa terjadi jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia yang bertugas dibagian perpajakan. Dengan adanya anggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memberatkan *cash flow* perusahaan, maka perusahaan cenderung berusaha meminimalisir beban pajak dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) yaitu usaha meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara tidak melanggar Undang-Undang, maupun secara ilegal (*tax evasion*) yaitu usaha untuk meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang yang disebut juga penggelapan pajak. Bagaimanapun perusahaan akan termotivasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga pajak yang ditanggung

dusahakan sekecil mungkin. Sebagai Wajib Pajak badan, dengan adanya sistem *self assessment* dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak, maka didalam perusahaan sangat diperlukan suatu perencanaan pajak yang baik.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak dan juga upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2006:8), umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak yang telah terjadi supaya hutang pajak yang harus dibayar berada dalam jumlah yang minimal tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan.

Hal-hal yang memungkinkan dilakukan dalam perencanaan pajak karena adanya keinginan perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak, maka dituntut perlunya pemahaman dan keahlian yang baik tentang perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dari karyawan yang berwenang dalam melakukan perhitungan pajak di perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik.

Pemahaman terbatas tentang perencanaan pajak badan mengakibatkan perusahaan terjebak pada tindakan yang ilegal yang disebut juga *tax evasion* yaitu usaha meringankan dan menghindari beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan. Apabila Wajib Pajak badan/perusahaan melakukan tindakan pengurangan pajak dilakukan secara ilegal, maka menimbulkan resiko yang besar bagi perusahaan karena selain sanksi pidana dan administratif, nama baik perusahaan juga akan tercemar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kurangnya pemahaman Wajib Pajak badan terhadap perencanaan pajak serta terhadap aturan perpajakan, dapat mengakibatkan perencanaan pajak tidak terencana dengan baik dan dapat membuka peluang terjadinya tindakan penggelapan pajak yang melanggar ketentuan hukum Undang-Undang perpajakan, hal ini mengakibatkan perusahaan harus menanggung

risiko.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak terjadi kasus yang menarik perhatian peneliti, terutama kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh grup perusahaan Bakrie (Kaltim Prima Coal, Bumi, dan Arutmin) yang berpotensi merugikan negara sebesar US\$ 1.680 Milyar. Akan tetapi grup perusahaan Bakrie menyangkal tuduhan tersebut dalam suatu konferensi pers, mereka menyatakan bahwa perusahaan sama sekali tidak melakukan penggelapan pajak, justru melaksanakan perencanaan pajak yang baik (Subagyo, 2010).

Penelitian ini menarik untuk diteliti, selain karena masih sedikitnya penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak, juga adanya indikasi kurangnya pemahaman mengenai perencanaan pajak terutama bagi wajib pajak dan sering terjadi perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak badan dan fiskus mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang membuat wajib pajak tergelincir melakukan tindakan illegal. Penelitian tentang hal ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Sari (2007) di kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di wilayah KPP Kota Padang dan fiskus di KPP Kota Padang. Perusahaan-perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Kota Padang diambil sebagai sampel karena banyaknya aktivitas ekonomi yang kompleks yang berhubungan dengan objek pajak penghasilan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan baik kepada Wajib Pajak badan maupun fiskus mengenai pemahaman terhadap perencanaan dan penggelapan pajak. Dengan mengetahui adanya perbedaan pemahaman ini, maka wajib pajak badan akan lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak. Di lain pihak, petugas pajak harus lebih peka terhadap perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dimana penggelapan pajak sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan karena penggunaan *self assesment* dalam perhitungan pajak.

## 2. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa riset sebelumnya meneliti pajak dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti Sari (2007) yang meneliti perencanaan dan penggelapan pajak dan menemukan bahwa wajib pajak badan PT dan fiskus pada wilayah KPP Pekanbaru dianggap paham terhadap perencanaan dan penggelapan pajak, tetapi terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara wajib pajak badan dengan fiskus mengenai perencanaan dan penggelapan pajak tersebut. Riset mengenai etika penggelapan pajak dalam perspektif agama (Izza dan Hamzah, 2009) dan membuktikan bahwa menurut Islam penggelapan pajak itu tidak beretika dari segi peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah, karena peraturan yang dibuat pemerintah tentang pajak sekarang sudah mendekati sempurna. Menurut Kristen penggelapan pajak itu kadang-kadang beretika karena wajib pajak mengetahui arti pajak dan pentingnya pajak tetapi kenyataannya masih banyak aparat melakukan korupsi sehingga masyarakat tidak mau untuk membayar pajak. Namun Islam juga mengatakan bahwa penggelapan pajak itu beretika dilihat dari kondisi sekarang, yaitu pembangunan masih banyak yang belum terealisasi padahal wajib pajak sudah membayar pajaknya, sehingga wajib pajak menganggap pembayaran pajak adalah sebuah pencurian. Umat Kristen juga mengatakan bahwa penggelapan pajak itu beretika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini yaitu banyaknya aparat pajak melakukan korupsi dari hasil uang pajak, sehingga membuat Wajib Pajak tidak mau membayar pajak.

Penelitian mengenai kepemilikan perusahaan terpusat dengan perencanaan pajak (Violita, 2009) dan membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan terpusat yang tinggi cenderung untuk memiliki pendapatan yang rendah dan memenuhi ketentuan pajak yang berlaku sebagai wajib pajak, sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan perencanaan pajak secara maksimal, hal ini disebabkan oleh rendahnya *market pressure*. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan terpusat sedang dan kecil memiliki

kecenderungan untuk menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya dan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada untuk perencanaan pajak yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya *market pressure* yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

Penelitian mengenai tingkat pemahaman wajib pajak pribadi mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Khairiah, 2009), dan menyimpulkan bahwa faktor pengetahuan/pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor utama dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hermansyah, Tarjo, dan Herawati (2009) melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap *sunset policy*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalaman melalui *name (sunset policy)*, *quality* (kualitas) berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak. Ada kesan bahwa wajib pajak dalam memanfaatkan *sunset policy* cenderung memanfaatkan pengalaman masa lalu dan pengalaman internal individu, hal ini sebagai langkah antisipasi wajib pajak untuk mengurangi resiko pribadi. Sedangkan di satu sisi wajib pajak dalam memanfaatkan *sunset policy* terkesan ingin gratis, hal ini membuktikan bahwa pengalaman tidak dapat digunakan modal untuk membentuk persepsi.

## 2.1 Perbedaan Pemahaman antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pajak

Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2008:7) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari; perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Pada tahap

ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk tindakan penggelapan pajak, yaitu dengan sengaja melaporkan penghasilan kena pajak lebih kecil dari yang seharusnya sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil. Yang terpenting dari perencanaan pajak ini adalah tetap pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan rencana kebijaksanaan keuangan perusahaan dengan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak, peraturan pembayaran pajak dan kapasitas badan usaha serta faktor eksternal lain yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar perencanaan pajak. Sari (2007) juga menambahkan bahwa terlihat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus, dari perhitungan statistik nilai rata-rata fiskus jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Wajib Pajak badan. Nilai rata-rata pemahaman dan hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan konsep dasar perencanaan pajak antara Wajib Pajak badan dan fiskus.

Yin (2004) dalam Violita (2009:10) menyatakan bahwa perusahaan harus mampu memaksimalkan perencanaan pajaknya supaya bisa meringankan beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang dimaksud disini adalah jumlah pajak yang terhutang oleh perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat disusun hipotesis :

**H<sub>1</sub> :** *Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak Badan dan fiskus terhadap konsep dasar perencanaan pajak.*



## 2.2 Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan

Menurut Suandy (2008:7) perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang digunakan. Peraturan perpajakan yang berlaku merupakan pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak untuk memulai perencanaan pajak. Selain dari peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh KMK, konsep dasar perpajakan yang meliputi definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak merupakan bagian dari pengetahuan umum perpajakan. Dengan pengetahuan umum perpajakan yang memadai maka kekhawatiran Wajib Pajak akan terjerumus ke dalam tindakan pajak yang diluar peraturan perpajakan (*unlawfull*) dapat diminimalisir.

Hasil penelitian Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan. Sari (2007) juga menambahkan bahwa terlihat perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuan umum perpajakan antara Wajib Pajak badan dan fiskus, dari perhitungan statistik nilai rata-rata fiskus jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Wajib Pajak badan. Nilai rata-rata pemahaman dan hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan konsep dasar pengetahuan umum perpajakan antara Wajib Pajak badan dan fiskus.

Hasil penelitian Khairiah (2009) menyatakan bahwa pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan pajak adalah variabel yang digunakan untuk mewakili dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan perpajakan merupakan bagian dari pengetahuan umum perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan umum perpajakan yang dimiliki oleh seseorang maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> :** *Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan*

### **2.3 Perbedaan Pemahaman antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2008:8) perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Transaksi dan fenomena ini seringkali mengalami perubahan. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi memerlukan respon strategis yang tepat dalam penanganannya. Dari sebuah perencanaan pajak maka dibuatlah oleh Wajib Pajak strategi-strategi yang efektif untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarnya dengan cara tidak melanggar ketentuan perpajakan dan secara bisnis masuk akal.

Hasil penelitian Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap strategi perencanaan pajak. Sari (2007) juga menambahkan bahwa terlihat perbedaan yang signifikan terhadap strategi perencanaan pajak antara Wajib Pajak badan dan fiskus, dari perhitungan statistik nilai rata-rata fiskus jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Wajib Pajak badan. Nilai rata-rata pemahaman dan hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan strategi perencanaan pajak antara Wajib Pajak badan dan fiskus. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan fiskus yang memiliki tingkat pendidikan rata-rata D4 dan S1, serta jumlah fiskus yang mengikuti pelatihan lebih banyak dari pada Wajib Pajak badan sehingga membuat perbedaan pemahaman yang signifikan terhadap strategi perencanaan pajak.

Izza dan Hamzah (2009) menyatakan bahwa dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus

dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: 1. Memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah; 2. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan; 3. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah; dan 4. Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar. Setelah melakukan perencanaan pajak, tahapan selanjutnya merupakan implementasi dari perencanaan pajak yaitu strategi perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak meliputi ; Upayakan mendapatkan penghasilan yang bebas pajak, dengan memanfaatkan keuntungan adanya kredit pajak selama tahun berjalan, melakukan penundaan (tanggguhkan) pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administrasi (penalti) oleh kantor pajak, memaksimalisasi *tax deduction*, mengusahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif pajak, mengusahakan untuk menggeser beban pajak ke pihak lain (*tax shifting to others*), Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> :** *Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap strategi perencanaan pajak*

## **2.4 Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Konsep Dasar Penggelapan Pajak**

Pemahaman yang baik dan benar tentang perencanaan pajak ini sangat penting bagi Wajib Pajak badan terutama perusahaan yang memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas, agar perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak badan tersebut sesuai dengan aktifitas perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan, sehingga perencanaan pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak terjadinya penggelapan pajak. Adanya pemahaman yang baik atas ketiga komponen/variabel tersebut

dapat menggambarkan pemahaman terhadap perencanaan pajak secara umum. Hal ini peneliti simpulkan dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang perencanaan pajak.

Hasil penelitian Sari (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar penggelapan pajak. Sari (2007) juga menambahkan bahwa terlihat perbedaan yang signifikan terhadap konsep dasar penggelapan pajak antara Wajib Pajak badan dan fiskus, dari perhitungan statistik nilai rata-rata fiskus jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Wajib Pajak badan. Nilai rata-rata pemahaman dan hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan konsep dasar penggelapan pajak antara Wajib Pajak badan dan fiskus.

Izza dan Hamzah (2009) mengungkapkan alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak adalah karena para Wajib Pajak kurang percaya dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti sekarang, Wajib Pajak banyak melihat para fiskus melakukan korupsi dan selalu menganggap fiskus menjadi kaya karena didapat dari uang pajak. Padahal pemerintah membuat aturan bahwa korupsi itu dilarang tetapi mereka sendiri melakukan korupsi. Itulah sebabnya masyarakat melakukan penggelapan pajak.

Salah satu cara melakukan penggelapan pajak adalah dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara menaikkan biaya dan menurunkan penjualan sehingga penghasilan kena pajak pun sedikit. Untuk hal tersebut, biasanya perusahaan menyiapkan 3 laporan keuangan yang berbeda, masing-masing untuk pemegang saham, manajemen, serta untuk laporan pajak. Selain itu penggelapan pajak juga bias dilakukan dengan bekerjasama dengan oknum petugas pajak yang korup. Umumnya, penggelapan pajak sulit dilakukan oleh satu pihak saja, tidak heran ketika ada penggelapan kasus pajak terbongkar, akan menyeret beberapa tersangka termasuk fiskus. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Wajib Pajak badan lebih suka menggelapkan pajak ketimbang meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mengakibatkan kelangkaan modal karena uang hasil dari penggelapan pajak

disembunyikan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang mengukur perbedaan pemahaman Wajib Pajak badan dan fiskus mengenai konsep dasar penggelapan pajak untuk diuji dalam penelitian ini :

**H<sub>4</sub>** : *Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar penggelapan pajak*

### 3. Metoda Penelitian

#### 3.1 Sumber Data, Populasi dan Sampel

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menyebarkan kuesioner (daftar pertanyaan) yang kemudian dijawab oleh responden. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan perusahaan yang berlokasi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang yang memiliki badan hukum dan fiskus di KPP Kota Padang.

Wajib Pajak badan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas, yaitu sebanyak 35 perusahaan. Perusahaan yang berstatus badan hukum PT sengaja dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini untuk mewakili Wajib Pajak badan karena memiliki perlakuan pajak yang berbeda dan ruang lingkup perpajakan yang lebih kompleks dari badan hukum yang lain. Sedangkan untuk sampel fiskus pajak adalah karyawan KPP Padang yang bertugas di bagian teknis yaitu bagian Pajak Penghasilan Badan, bagian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta bagian Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Alasan karyawan pada tiga bagian ini yang dipilih sebagai sampel karena karyawan-karyawan yang bertugas pada bagian ini memang sudah berpengalaman dalam hal menghitung dan memeriksa jumlah pajak secara teknis dan pemahamannya berpengaruh terhadap perhitungan dan pemeriksaan pajak.

**Tabel 1 di sini**

Sampel dipilih dengan metode pertimbangan/*judgement sampling* (Sekaran, 2000). Metode *judgement sampling* yang dipilih adalah metode *hunting*, yaitu dengan mendatangi perusahaan yang dinilai layak untuk dijadikan responden.

### 3.2 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak badan dan Fiskus terhadap perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Mengukur pemahaman seseorang terhadap sesuatu berarti mengukur sejauh mana ia mengetahui, mengerti dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya tingkat pendidikan, pola penyebaran informasi, keberadaan media informasi yang memadai, pengalaman dan lain-lain.

Variabel penelitian ini ada 4 yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan, pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak secara legal, pemahaman terhadap konsep dasar penggelapan pajak dan pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak.

#### 1. Pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan

Variabel pertama digambarkan dengan pertanyaan tentang pengetahuan umum perpajakan seperti mengenai perolehan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Pemberitahuan (SPT), Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, tarif yang digunakan untuk menghitung Tarif PPh Badan, penghitungan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, sanksi-sanksi dalam perpajakan dan lain-lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin untuk 7 pertanyaan yang digunakan oleh Sari (2007).

#### 2. Pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak

Variabel kedua ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pengertian perencanaan pajak dan tujuannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu

perencanaan pajak, kedudukan perencanaan pajak dalam manajemen pajak, syarat-syarat yang diperlukan dan dipenuhi dalam melaksanakan aktivitas perencanaan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin untuk 5 pertanyaan yang digunakan oleh Sari (2007).

### 3. Pemahaman terhadap konsep dasar penggelapan pajak

Variabel ketiga ini digambarkan dengan pertanyaan tentang tindakan-tindakan apa saja yang dianggap sebagai tindakan penggelapan pajak, faktor-faktor yang memotivasi untuk melakukan penggelapan pajak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dan memperkecil penghasilannya. Variabel ini diukur dengan skala Likert 4 poin untuk 4 pertanyaan yang digunakan oleh Sari (2007).

### 4. Pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak

Variabel keempat ini digambarkan tentang strategi perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konsep dasar perencanaan pajak. Dari variabel ini akan diketahui apakah responden telah mengetahui dan memahami tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Variabel ini diukur dengan skala Likert 4 poin untuk 7 pertanyaan yang digunakan oleh Sari (2007).

## 3.3 Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, dan kemudian pengujian normalitas data. Uji validitas dilakukan dengan analisa faktor setiap variabel dengan *varimax rotation*. Nilai dikatakan valid apabila nilai KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) diatas 0,5 Dan *factor loading* di atas 0,4. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item variabel. Nilai dikatakan reliable *cronbach alpha* >

0,6.

Pengujian hipotesis penelitian ini diolah dan dianalisis dengan pengujian *independent sample t-test*. Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan pengujian non parametrik (uji *wilcoxon sign test*)

#### 4. Analisis Hasil

##### 4.1 Karakteristik Responden

Kuesioner yang disebar sebanyak 30 eksemplar untuk fiskus dan 35 eksemplar untuk wajib pajak. Deskripsi dari pengembalian kuesioner ini terlihat dari tabel berikut :

**Tabel 2 di sini**

Hasil deskripsi responden wajib pajak dan petugas pajak (fiskus), sebagai berikut:

**Tabel 3 di sini**

##### 4.2 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4 di sini**

##### 4.3 Uji Instrumen Data dan Uji Normalitas Data

Berdasarkan proses pengujian validitas dan reliabilitas, maka diperoleh semua valid dan reliable (Tabel 5 dan 6). Tetapi setelah diuji normalitas data, diperoleh hasil bahwa data tidak berdistribusi normal (Tabel 7). Dari hasil uji yang dilakukan terlihat bahwa variabel pengetahuan umum perpajakan, konsep dasar perencanaan pajak, konsep dasar penggelapan pajak dan strategi perencanaan pajak tidak memiliki distribusi normal. Dari hasil uji ini maka uji beda yang digunakan adalah statistik non parametrik yaitu uji z (uji *wilcoxon sign test*).

**Tabel 5, 6 dan 7 di sini**



#### 4.4. Uji Hipotesis

Terdapat 4 hipotesis yang diuji pada penelitian ini. Untuk pengujian hipotesis, digunakan alat statistik non parametrik yaitu uji z (*wilcoxon sign test*). Uji ini dipilih karena hasil uji normalitas menunjukkan distribusi data yang tidak normal. Hasil analisis uji wilcoxon yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 8.

##### Tabel 8 di sini

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa keempat hipotesis yang diujikan terbukti dan mendukung hasil penelitian Sari (2007) yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan, perencanaan pajak, penggelapan pajak dan strategi perencanaan pajak (semua variabel penelitian memperoleh nilai signifikan 0,000).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2007) yang juga menguji tingkat pemahaman Wajib Pajak dan fiskus dengan menggunakan empat variabel penelitian yaitu, pengetahuan umum perpajakan, konsep dasar perencanaan pajak, konsep dasar penggelapan pajak, dan strategi perencanaan pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak dan fiskus terhadap pengetahuan umum perpajakan, konsep dasar perencanaan pajak, konsep dasar penggelapan pajak dan strategi perencanaan pajak.

Perbedaan pemahaman ini bisa disebabkan oleh latar belakang pendidikan dari petugas pajak itu sendiri dimana hampir seluruh petugas pajak memiliki latar belakang pendidikan S1. Selain itu pelatihan dan seminar yang lebih banyak diikuti oleh fiskus juga mempengaruhi pemahaman mereka mengenai perencanaan dan penggelapan pajak ini. Lama bekerja (pengalaman) juga mempengaruhi kemampuan fiskus dalam memahami perencanaan pajak dan apa yang menjadi kategori penggelapan pajak.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman Wajib Pajak dan fiskus. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak dan fiskus mengenai perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak dan petugas pajak di daerah Padang Sumbang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 responden, yaitu 30 orang petugas pajak (fiskus) dan 35 orang Wajib Pajak badan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari jawaban kuesioner responden.

Variabel yang diuji untuk melihat tingkat pemahaman adalah pengetahuan umum perpajakan, konsep dasar perencanaan pajak, konsep dasar penggelapan pajak, dan strategi perencanaan pajak. Dari hasil deskripsi data, dapat diketahui bahwa secara rata-rata tingkat pemahaman Wajib Pajak dan fiskus berada pada kategori yang sama yaitu kategori paham. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 sehingga semua hipotesis alternatif diterima, sedangkan  $H_0$  ditolak.

Hasil uji yang diperoleh membuktikan bahwa secara empiris pengetahuan yang dimiliki oleh fiskus dan Wajib Pajak di kota Padang berbeda. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman mengenai perpajakan pada kelompok Wajib Pajak badan. Kondisi ini dapat menyebabkan wajib pajak dapat 'terpeleset' dalam perbuatan ilegal dalam pajak. Untuk mengantisipasi hal ini sudah sewajarnya perusahaan memfasilitasi pelatihan dan seminar pada karyawan perusahaan.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Wajib Pajak badan dan fiskus pada

kantor Pelayanan Pajak kota Padang.

2. Jumlah sampel yang terbatas untuk objek penelitian ini yaitu 65 orang, Wajib Pajak badan 35 orang dan fiskus 30 orang.
3. Sulitnya mendapat data dari Wajib Pajak karena hampir sebagian dari responden menolak untuk mengisi kuesioner karena berhubungan dengan pajak, jadi responden takut diketahui kewajiban perpajakannya oleh orang lain.
4. Penelitian ini hanya melihat dari 4 variabel sedangkan masih banyak variabel lain yang bisa menjelaskan perbedaan antara Wajib Pajak Badan dan fiskus.

Sedikitnya sampel dan sulitnya memperoleh data mungkin menyebabkan data berdistribusi tidak normal. Untuk itu disarankan untuk menambah sampel dan mempertimbangkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian.

## Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2009. *Akuntansi Perpajakan. Edisi-2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cooper, Donald. R dan Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis, Edisi-9. Mcgraw-Hill Irwin*. Jakarta.
- Hermansyah, Wawan. Tarjo. Herawati, Nurul. 2009. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy. *Symposium Nasional Akuntansi Ke-12*. Palembang.
- Ilyas, Wirawan.B dan Burton, Richard. 2008. *Hukum Pajak, Edisi-4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Izza, Ika Alfi Nur dan Hamzah, Ardi. 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama : Sebuah Studi Interpretatif. *Symposium Nasional Akuntansi Ke-12*. Palembang.
- Khairiah, Rini. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Guguk. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang*
- Sari, Yulia. 2007. *Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Perencanaan Pajak Dan Penggelapan Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang*
- Sekaran, Uma. 2000. *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi-3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak, Edisi Keempat*, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak, Edisi-4*. Salemba Empat Jakarta.
- Subagyo. 2010. *Kasus Pengempalangan Pajak Grup Bakrie*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian, cetakan ke-empat*, Alfabheta. Bandung.
- S. R, Soemarso. 2007. *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Violita, Evony Silvino. 2009. Concentrated Ownership And Tax Planning. *Symposium Nasional Akuntansi Ke-12*. Palembang.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak, Edisi-2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia, Edisi-9*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi-3*. Salemba Empat. Jakarta.

## Lampiran

**Tabel 1. Rincian Jumlah Karyawan KPP Kota Padang Yang Menjadi Sampel Fiskus**

Bagian	PPh Badan	PPN & PTLL	PPh Pribadi
Jumlah	12 Orang	8 Orang	10 Orang

**Tabel 2. Distribusi Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
Total Kuesioner yang disebarkan	65	100
Kuesioner yang kembali	65	100
Kuesioner yang tidak kembali	65	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0
Total Kuesioner yang diolah	65	100

Sumber : Hasil pengolahan data

**Tabel 3 Deskripsi Responden**

Deskripsi	Wajib Pajak		Fiskus	
Jenis Kelamin:				
- Laki-laki	17	48%	13	43%
- Perempuan	18	52%	17	57%
Pendidikan:				
- SMU	8	23%	-	0%
- D3	15	43%	-	0%
- S1	12	34%	30	100%
- S2	-	0%	-	
Lama Bekerja:				
- 0-2 tahun	17	48%	12	40%
- > 2-5 tahun	15	43%	18	60%
- > 5 tahun	3	9%	-	0%
Kursus Pajak:				
- tidak pernah	23	66%	-	0%
- pernah	12	34%	30	100%

Sumber : Hasil pengolahan data

**Tabel 4: Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PUP	65	8	21	17,18	3,482	12,122
KDPPL	65	5	15	12,68	2,494	6,222
KDPP	65	2	12	8,98	2,934	8,609
SPP	65	7	21	16,42	4,572	20,903
Valid N (listwise)	65					

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS

**Tabel 5. Pengujian Validitas**

Keterangan	KMO	Nilai Batas	Factor Loading	Nilai Batas	Kesimpulan
Pengetahuan Umum Pajak	0,836	0,50	0,687 – 0,845	0,40	Valid
Perencanaan Pajak	0,816	0,50	0,513 – 0,944	0,40	Valid
Penggelapan Pajak	0,649	0,50	0,776 – 0,904	0,40	Valid
Strategi Perencanaan Pajak	0,772	0,50	0,506 – 0,912	0,40	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

**Tabel 6. Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian**

Keterangan	Cronbach Alpha	Nilai Batas	Kesimpulan
Pengetahuan Umum Pajak	0,862	0,60	Reliabel
Perencanaan Pajak	0,769	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,714	0,60	Reliabel
Strategi Perencanaan Pajak	0,814	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

**Tabel 7. Uji Normalitas**

Keterangan	Asymp Sig (2-Tailed)	Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Umum Pajak	0,027	0,05	Tidak Normal
Perencanaan Pajak	0,012	0,05	Tidak Normal
Penggelapan Pajak	0,022	0,05	Tidak Normal
Strategi Perencanaan Pajak	0,017	0,05	Tidak Normal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

**Tabel 8. Hasil Uji Wilcoxon Sign Test**

Variabel	Signifikan	Probabilitas
Pengetahuan Umum Pajak	0,000	0,05
Perencanaan Pajak	0,000	0,05
Penggelapan Pajak	0,000	0,05
Strategi Perencanaan Pajak	0,000	0,05

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

## Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan

WINANTO\*  
Universitas Indonesia

UTOYO WIDAYAT  
Universitas Tarumanagara

**Abstract:** The aim of this study is to analyze the effect of tax planning and corporate governance mechanisms on firm value, as well as examine the role of corporate governance mechanisms in moderating the relationship between tax planning and firm value. This research used the sample non financial firms in Indonesia Stock Exchange for period 2007-2011. Panel data analysis is used in this research. Results of this study on model I, the result do not support the first hypothesis that CASH\_ETR showed a positive and significant. In the second hypothesis that the results of the test book-tax difference gives a positive and significant effect to firm value. In the third hypothesis that the test results can provide a permanent book-tax difference is negative and significant effect to firm value. This is not consistent with the framework of the above hypothesis. The fourth hypothesis, the result that discretionary permanent book-tax differences negatively. On the proxy of the tax planning, this result that tax sheltering sheltering negative and significant effect on firm value. The results in model II, the study concluded that the results of this study are inconsistent with previous framework with the results of managerial ownership has a negative influence on firm value, family ownership is negative and the effect is not significant. And the proportion of independent commissioner board in this study provide a positive and significant effect on firm value. The result which showed negative effect on moderation tax planning to firm value moderated by managerial ownership, family ownership as a positive moderating tax planning to firm value, and the proportion of independent board as a positive moderating tax planning to firm value.

**Keywords:** Firm Value, Tax Planning, Corporate Governance Mechanism

\* Corresponding author: winanto91@yahoo.com



## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran warga Negara kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan merupakan salah satu sumber penting untuk pembiayaan Negara. Sejalan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi suatu negara tentunya akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak.

Berdasarkan hal tersebut banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan perencanaan untuk meminimalisasi beban pajak tanpa harus melanggar peraturan untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Terkait dengan penghindaran pajak yaitu perusahaan multinasional (PMA), dalam tahun 2005 di Indonesia, realisasi investasi yang berasal dari PMA diperkirakan mencapai 8,68 miliar USD. Jumlah tersebut meningkat dua kalinya dari tahun sebelumnya. Seiring dengan besarnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, pendapatan pemerintah yang berasal pajak dari perusahaan multinasional seharusnya tinggi. Namun, pernyataan mantan Menteri Keuangan RI Jusuf Anwar pada akhir November 2005, yang menyatakan bahwa 750 PMA tidak pernah membayar pajak (Artikel perpajakan Darrusalam dan Danny, 26 November 2012).

Beberapa upaya yang dilakukan manajemen dalam penghindaran pajak yaitu *tax avoidance*, *tax saving* dan optimalisasi kredit pajak. (Prastowo 2010). Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya yang boleh dikurangkan menurut pajak agar laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Upaya yang dilakukan merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh perilaku manajemen perusahaan yang oportunistik.

Perilaku ini berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima manajemen. Dengan adanya perencanaan pajak tentu akan menghambat pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak dengan adanya perencanaan pajak. Selain itu biaya potensial dapat timbul dari perencanaan pajak yaitu *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976), yang dapat menyebabkan pemegang saham untuk mengurangi nilai perusahaan (Wahab dan Holland, 2012).

Pemegang saham berpendapat kurangnya transparansi terkait dengan perencanaan pajak menyediakan manajer dengan "layar" atau penutup untuk menyembunyikan tindakan untuk kepentingan diri sendiri (Desai et al., 2006). Sebuah survei yang dilakukan oleh Henderson Global Investors (2005) menemukan keengganan manajer untuk mengungkapkan pajak terkait informasi manajemen risiko kepada pemegang saham. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham yang menimbulkan moral hazard. Sebuah kekhawatiran yang terkait pemegang saham adalah bahwa manajer yang "agresif" sehubungan dengan perencanaan pajak juga mungkin "agresif" dalam keputusan pelaporan keuangan mereka (Frank, Lynch & Rego, 2009). Hal tersebut terjadi karena lemahnya corporate governance yang ada di perusahaan. Oleh karena itu juga relevan untuk mempertimbangkan peran mekanisme *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan (Desai et al., 2006).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya terletak pada kajian lebih lanjut mengenai perencanaan pajak yang juga bersifat agresif dan non agresif yang dilakukan perusahaan dan juga kajian pengukuran nilai perusahaan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2007 sampai dengan 2011. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh perencanaan pajak dan mekanisme corporate governance

terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran mekanisme *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Penelitian ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan dan latar belakang penelitian. Bagian kedua berisi kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang berupa prosedur pemilihan sampel dan pengukuran variabel. Bagian keempat membahas tentang interpretasi dan analisis hasil penelitian. Bagian lima memuat kesimpulan akhir dari penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan pembahasan atas penelitian selanjutnya yang mungkin dilaksanakan.

## II. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (agen), untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Teori keagenan juga menjadi dasar dalam penerapan *corporate governance*, sehingga diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga mereka percaya bahwa manajer tidak akan

mencuri/menggelapkan aset dan investasinya ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

## 2.2. Perencanaan Pajak/*Tax Planning*

*Tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *material non taxfactor* untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya. Dalam prakteknya *tax planning* dapat berupa *tax avoidance*. Motivasi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan *tax shelter*. Pertama, Tarif pajak merupakan motif utama seseorang melakukan *tax planning* karena semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pajak yang harus ditanggung/dibayar oleh Wajib Pajak. Kedua, dasar pengenaan pajak (*Base of Tax*) adalah berkaitan dengan atas dasar apa wajib pajak dikenakan pajak, apakah dari pendapatan tabungan, pendapatan atas modal, penerimaan, pengeluaran atau dari sumber lainnya. Ketiga *tax sheltering* dalam penelitian Graham dan Tucker (2006) dalam Masri dan Martani (2011) mendefinisikan *tax shelters* berdasarkan US kongres (Dewan Komite Perpajakan, 1999) sebagai upaya untuk menghindari pajak tanpa terkena risiko ekonomi atau kerugian

Modigliani dan Miller di tahun 1963, menghubungkan *capital budgeting* perusahaan dengan *tax planning*. Berdasarkan teori tersebut, nilai perusahaan meningkat sejalan meningkatnya utang. Kenaikan nilai perusahaan ini disebabkan oleh adanya *tax shield* yang diperoleh oleh perusahaan yang membayarkan bunga, karena bunga yang muncul karena perusahaan berhutang, menjadi pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pengukuran yang digunakan *cash effective tax rated* (Cash-ETR), *book-tax difference*,

*permanent book-tax difference, discretionary permanent book-tax difference* dan prediksi *tax shelter*.

### 2.3. Mekanisme *corporate governance*

Berkembang dan populernya konsep *corporate governance* di seluruh dunia didorong pula oleh banyak dan kuatnya desakan dari berbagai pihak agar menerapkan konsep tersebut. Menurut Ariyoto, *et al.*, (2000), *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), mengutip definisi Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good governance* dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme untuk memastikan bahwa kepentingan *outside* investor terlindungi dari kemungkinan terjadi pengambilalihan oleh pihak *insider*, yaitu manajer dan pemegang saham pengendali.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Monks & Minow (2001), yang menyatakan bahwa *corporate governance* berkaitan dengan proses dan mekanisme aktivitas perusahaan dalam menjalankan wewenang dan mengarahkan perusahaan, supervisi pelaksana tindakan, dan pengarahan perusahaan. Mekanisme yang dimaksud adalah hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka mengarahkan dan menentukan kinerja perusahaan. Pihak utama yang terkait *corporate governance* adalah: (1) pemegang saham, (2) manajemen, dan (3) *Board of directors*. Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Shleifer

dan Vishny (1997), yang menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan cara-cara untuk memberikan keyakinan kepada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya *return* atas investasi mereka. *Corporate governance* mengatur hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen perusahaan agar terjadi *check and balances* dalam pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini tata kelola menggunakan variabel kepemilikan managerial, kepemilikan keluarga, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan keluarga yang merupakan unsur dari mekanisme tata kelola perusahaan.

## 2.4. Nilai perusahaan

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Dalam *theory of the firm*, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (*firm value*) (Salvatore, 2005). Bagi pemegang saham, memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Harahap dan Wardhani (2012) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan yang dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, makin tinggi kemakmuran pemegang saham.

Sedangkan menurut Wahab dan Holland (2012) menjelaskan nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Ada yang menjelaskan bahwa *enterprise value* (EV) atau dikenal juga sebagai *firm value* (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Maka nilai perusahaan dapat dikatakan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual.

## 2.5. Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai perusahaan

Beberapa studi menemukan hubungan langsung antara ukuran nilai perusahaan dan perencanaan pajak. Adanya hubungan ini telah dikaitkan dengan efek *unquantifiable non tax costs* (Cloyd, Mills & Weaver, 2003). Secara khusus Desai et al. (2006) memprediksi bahwa pengaturan perencanaan pajak dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan ketika manajer memiliki kesempatan untuk mengecilkan laporan laba akuntansi dan insentif untuk mengurangi kewajiban pajak penghasilan badan dengan mengecilkan penghasilan kena pajak. Hal ini karena manajer menutupi perencanaan pajak yang dilakukannya kepada pemegang saham.

Hasil ini berbeda apabila dilihat dari penelitian Desai dan Dharmapala (2009) yang menguji hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Dari pengujiannya diperoleh hubungan yang positif antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan, apabila perusahaan memiliki tata kelola yang tinggi. Hasil yang sama diperoleh Desai dan Dharmapala (2009) yang menyelidiki efek penilaian penghindaran pajak badan pada perusahaan besar di AS yang diperdagangkan secara publik. Mereka menemukan bahwa efek rata-rata penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tidak signifikan, tapi positif bagi perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi.

Dryeng, Hanlon dan Maydew (2008) mengembangkan ukuran untuk tax avoidance dengan *cash effective tax rate (cash-ETR)* untuk menguji pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian Wang (2010) membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *tax avoidance* dengan mengukur *cash effective tax rate* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang transparansinya baik. Penelitian Wahab dan Holland (2012) menguji

perusahaan di Inggris dari tahun 2005 – 2007 memiliki hubungan yang negatif antara *tax planning* dengan ukuran *cash-ETR* terhadap nilai perusahaan.

Konsistendengan pandanganbiaya keagenan dalampenghindaran pajak, dua studi terbaru menyelidiki apakahkegiatanpenghindaranpajakmeningkatkankekayaan pemegang saham. HanlondanSlemrod(2009) mengujireaksi pasar terhadapberita tentangketerlibatanpenghindaran pajak. Mereka menemukan bahwapengumuman beritatersebutrata-ratamempengaruhiharga saham suatu perusahaan secara negatif. Penurunanhargaakan terjadi pada perusahaandengan *cash effective tax rate* yang rendah. Padaevent studysampel yang keciljuga menunjukkan bahwapajak agresiftidak selalu meningkatkannilai perusahaan.Oleh karenanya, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: *Cash-ETR* memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan.**

Sejumlah studi yang menunjukkan *book-tax difference* dapat digunakan sebagai cara perencanaan pajak. Mills (1998) menemukan bahwa usulan penyesuaian audit IRS berhubungan positif terkait dengan *book-tax difference* yang besar. Desai (2003) berpendapat bahwa perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal selama tahun 1990 disebabkan oleh peningkatan tingkat *tax sheltering* berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Selain itu, Wilson (2008) menemukan bahwa *book-tax difference* yang berhubungan positif dengan nilai perusahaan.

Meskipun bukti bahwa *book-tax difference* yang besar positif terkait dengan pelaporan pajak agresif, ukuran ini juga memiliki keterbatasan. Hanlon (2003) dan Manzon dan Plesko (2002) dalam Wahab dan Holland (2012) mengidentifikasi karakteristik spesifik perusahaan yang menghasilkan *book-tax difference*, tetapi tidak selalu mencerminkan pelaporan pajak agresif. Phillips, Pincus, Rego dan (2003) dan Hanlon (2005) menunjukkan bagaimana *book-tax difference* dapat mencerminkan kegiatan manajemen laba. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karenanya, hipotesis kedua penelitian ini adalah:



**H<sub>2</sub>: *book-tax difference* memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

Kongres AS Komite Bersama Perpajakan (1999), Weisbach (2002), dan Shevlin (2002) dalam Rego dan Wilson (2008) menggambarkan *tax sheltering* ideal sebagai menciptakan perbedaan permanen, bukan sementara, *book-tax difference* memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja perusahaan yang akan datang namun akan memberikan nilai yang positif terhadap nilai perusahaan seperti dalam penelitian Wilson (2009). Akibatnya, *permanent book-tax difference* (PERM\_BT D) sebagai ukuran perencanaan pajak yang bersifat agresif dalam penelitian ini. Keuntungan utama dari tindakan ini adalah pengecualian atas perbedaan temporer yang dapat mencerminkan aktivitas manajemen laba dan / atau *book-tax difference* terkait dengan perencanaan pajak. Oleh karenanya, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: *permanent book-tax difference* memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

Meskipun *permanent book-tax difference* menunjukkan banyak keuntungan dibandingkan ukuran perencanaan pajak lainnya, *permanent book-tax difference* mencerminkan item yang tidak dianggap dalam pelaporan pajak agresif, termasuk pajak penghasilan badan, kredit pajak, perubahan pajak kontinjensi, dan perubahan akun nilai penyisihan. Frank, Lynch, dan Rego (2008) dalam Rego dan Wilson (2008) menghitung perbedaan *discretionary permanent book-tax difference* (DTAX) oleh kemunduran *permanent book-tax difference* pada item *non-discretionary* terkait dengan perencanaan pajak yang diketahui menyebabkan perbedaan permanen. Wang (2010) menemukan bahwa *tax avoidance* memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang positif. Oleh karenanya, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>: *discretionary permanent book-tax difference* memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

Wilson (2009) juga menyoroti apakah *tax sheltering* menciptakan kekayaan bagi pemegang saham atau memfasilitasi oportunistik manajerial dengan memeriksa kinerja return saham perusahaan pada *tax sheltering*. Dia menemukan bahwa *tax sheltering* perusahaan dengan *anti-takeover protection* rendah mengungguli non- *tax sheltering* perusahaan masing-masing selama periode 24 bulan: pra- *tax sheltering*, saat *tax sheltering*, dan pasca- *tax sheltering*. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa *tax sheltering* menciptakan kekayaan bagi perusahaan dengan tata kelola yang baik. Namun, sulit untuk menentukan apakah *tax sheltering* kemungkinan memiliki efek umpan balik positif atau negatif. Desai dan Dharmapala (2009) menemukan bahwa perubahan struktur kompensasi eksekutif oleh manajer pada nilai perusahaan menyebabkan menurunnya tingkat pajak *tax sheltering*. Oleh karenanya, hipotesis kelima penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub>: *tax sheltering* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.**

### **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Nilai perusahaan**

Struktur kepemilikan berfokus pada kepemilikan manajerial dan keluarga sebagai potensi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan. Namun, studi sebelumnya dari kepemilikan manajerial baik efek positif melalui keselarasan tujuan (Jensen & Meckling, 1976) dan efek negatif, pada tingkat kepemilikan yang rendah (Florackis, 2008). Seiring dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Dengan begitu manajemen akan selaras dengan kepentingan pemegang saham, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh penelitian Suranta dan Machfoedz (2003) yang menjelaskan hubungan negatif menunjukkan nilai perusahaan tinggi hanya pada saat kepemilikan manajerial sedikit, sedangkan peningkatan kepemilikan manajerial justru

menurunkan nilai perusahaan meskipun tidak signifikan.

Kepemilikan keluarga diharapkan untuk lebih memantau tindakan manajer dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya seperti saran profesional dan analisis laporan, karena memiliki konflik keagenan yang kecil sehingga dapat mengurangi konflik antara *principal* dan *agent*. Studi di negara lain tentang tingkat kepemilikan keluarga merupakan proporsi yang signifikan dari kepemilikan perusahaan. Kepemilikan keluarga terdiri 51,6 persen dari total nilai pasar perusahaan Amerika Serikat yang tercatat pada tahun 1996 (Gompers dan Metrick, 2001) dalam (Bhattacharya, Desai dan Venkataraman, 2008), rata-rata 65 persen dari semua perusahaan Inggris yang terdaftar antara tahun 1990 dan 1995 (Hsu dan Koh, 2005) dalam (Bhattacharya, Desai dan Venkataraman, 2008) dan sekitar 49 persen dari Australia yang terdaftar perusahaan di tahun 1997 (Stapleton, 1998) dalam (Bhattacharya, Desai dan Venkataraman, 2008).

**H<sub>6</sub>: kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

**H<sub>7</sub>: kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

Struktur dewan didefinisikan dalam hal komposisi *non-executive director* (komisaris independen) terhadap total dewan komisaris dapat menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi hubungan pemegang saham dan manajer (Florackis, 2008). *Non-executive director* telah ditemukan efektif dalam mengurangi masalah keagenan karena efek konstruktif terhadap direksi, pengetahuan profesional dan pengalaman (Zahra & Pearce, 1989). Ukuran dewan komisaris independen sebagai fungsi monitoring untuk mempengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan baik secara positif maupun negatif. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Suranta dan Machfoedz (2003) menggunakan

proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laba, sedangkan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab dan Holland (2012) bahwa dewan komisaris independen dapat memberikan pengaruh yang positif.

**H<sub>8</sub>: Komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.**

**Pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai perusahaan dengan Mekanisme *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi**

Desai et al. (2009) memberikan bukti empiris yang memberikan beberapa dukungan untuk prediksi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan dengan Mekanisme *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Temuan ini konsisten dengan kesimpulan bahwa perencanaan pajak ditafsirkan telah dilakukan untuk kepentingan pemegang saham hanya ketika tingkat tata kelola perusahaan yang tinggi. Dalam kasus lain pemegang saham tampaknya mencurigai motif manajer dan tidak ada nilai perencanaan pajak secara positif. Demikian pula, Wilson (2009) dan Hanlon dan Slemrod (2009) bukti dokumen yang valuasi pemegang saham kegiatan perencanaan pajak adalah tergantung pada status tata kelola perusahaan. Sebuah efek valuasi terkait berkontribusi lebih lanjut untuk masalah potensial pemegang saham adalah bahwa "agresivitas" dalam perencanaan pajak dapat dikaitkan dengan nilai perusahaan (Frank, Lynch dan Rego, 2009).

**H<sub>9</sub>: *Tax Planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi**

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2011. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu agar dapat mewakili populasinya. Kriteria pemilihan sampel adalah: 1) Perusahaan non keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai tahun 2011, 2) Perusahaan yang tidak dalam keadaan delisting pada tahun observasi, 3) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama periode pengamatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 pada tanggal 31 Desember, 4) Perusahaan mempunyai *pretax income* yang positif selama tahun observasi, 5) Perusahaan yang mempunyai CETR kurang dari 1.

#### 3.2 Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis kesatu sampai kelima, penelitian ini menggunakan model regresi I sebagai berikut:

$$FV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CASH\_ETR_{it} + \alpha_2 BTDS_{it} + \alpha_3 PERM\_DIFF_{it} + \alpha_4 DTAX_{it} + \alpha_5 SHELTER_{it} + \alpha_6 SIZE_{it} + \alpha_7 LEVERAGE_{it} + \alpha_8 ROE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- FV = nilai perusahaan yang diukur dengan tobins'Q  
 CASH\_ETR = *cash effective tax rate* merupakan rasio kumulatif pajak yang dibayar dibagi dengan kumulatif laba komersial dikurang *special item*  
 BTDS = *book-tax difference* merupakan selisih laba komersial dikurang laba fiskal dibagi total aset  
 PERM\_DIFF = hasil persamaan regresi persamaan *permanent book-tax difference*  
 DTAX = Nilai residu dari hasil persamaan regresi persamaan *permanent book-tax difference*  
 SHELTER = hasil model variabel independen perencanaan pajak yang dikaitkan dengan aktivitas *tax sheltering*  
 SIZE = ukuran perusahaan.  
 LEVERAGE = total liabilitas dibagi total aset  
 ROE = diukur menggunakan rasio laba bersih dibagi *total equity*.

Untuk menguji hipotesis keenam, ketujuh dan kedelapan, penelitian ini menggunakan model persamaan regresi II sebagai berikut:

$$FV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 MGT_{it} + \alpha_2 FC_{it} + \alpha_3 BCSIZE_{it} + \alpha_4 SIZE_{it} + \alpha_5 LEVERAGE_{it} + \alpha_6 ROE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- FV = nilai perusahaan yang diukur dengan tobins'Q  
 MGT = kepemilikan manajerial  
 FC = kepemilikan keluarga  
 BCSIZE = Board of Commissioner Size yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris  
 SIZE = ukuran perusahaan.  
 LEVERAGE = total liabilitas dibagi total aset  
 ROE = diukur menggunakan rasio laba bersih dibagi *total equity*.

Untuk menguji hipotesis pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi digunakan persamaan regresi III sebagai berikut:

$$FV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CASH\_ETR_{it} * MGT_{it} + \alpha_2 BTDS_{it} * MGT_{it} + \alpha_3 PERM\_DIFF_{it} * MGT_{it} + \alpha_4 DTAX_{it} * MGT_{it} + \alpha_5 SHELTER_{it} * MGT_{it} + \alpha_6 CASH\_ETR_{it} * FC_{it} + \alpha_7 BTDS_{it} * FC_{it} + \alpha_8 PERM\_DIFF_{it} * FC_{it} + \alpha_9 DTAX_{it} * FC_{it} + \alpha_{10} SHELTER_{it} * FC_{it} + \alpha_{11} CASH\_ETR_{it} * BCSIZE_{it} + \alpha_{12} BTDS_{it} * BCSIZE_{it} + \alpha_{13} PERM\_DIFF_{it} * BCSIZE_{it} + \alpha_{14} DTAX_{it} * BCSIZE_{it} + \alpha_{15} SHELTER_{it} * BCSIZE_{it} + \alpha_{16} SIZE_{it} + \alpha_{17} LEVERAGE_{it} + \alpha_{18} ROE_{it} + \varepsilon_{it}$$

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

#### 1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang digunakan oleh Suranta dan Machfoedz (2003) yang diukur dengan Tobins'Q. Tobins'Q merupakan proksi dari rasio dari *equity market value* (EMV) dan total debt (D) dengan *equity book value* (EBV) dan total debt (D) atau dapat dirumuskan:

$$Tobins'Q = \frac{EMV + D}{EBV + D}$$

Equity market value diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

#### 2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

##### a. CASH\_ETR (*Cash effective tax rate*)

*Cash effective tax rate* menggunakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et al. (2008) terdapat pada lampiran 1.

##### b. BTDS (*book-tax difference*)

*Book-tax difference* dalam penelitian ini menggunakan model yang digunakan oleh Rego dan Wilson (2008) terdapat pada lampiran 1.

c. (PERM\_DIFF) *Permanent book-tax difference*

*Permanent book-tax difference* menggunakan model Rego dan Wilson (2008) terdapat pada lampiran 1

d. *Discretionary Permanent Book-Tax Differences* (DTAX) dihitung menggunakan model Frank, Lynch, and Rego (2008) dengan mencari nilai residu dari persamaan regresi *Permanent Book-Tax Differences*.

e. SHELTER (*Tax sheltering*)

Ukuran ini menggunakan model yang dikembangkan Rego dan Wilson (2008) terdapat pada lampiran 1

f. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki manajerial perusahaan dari jumlah saham perusahaan yang beredar (Wahab dan Holland, 2012).

g. Kepemilikan keluarga diukur menggunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 20% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 20% dengan menggunakan model Arifin (2003) yaitu : Keluarga adalah keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib tercatat).

h. Komposisi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris (Suranta dan Machfoedz (2003).

3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang digunakan Wahab dan Holland (2012):

- SIZE = logaritma natural dari total aset
- LEVERAGE = total liabilitas dibagi total aset
- ROE = Rasio laba bersih dibagi dengan total ekuitas

## IV. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Gambaran umum sampel penelitian

Dalam data laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2007 sampai 2011 diketahui bahwa hanya ada 370 perusahaan yang tetap terdaftar dalam kurun waktu 2007-2011. Dalam masa observasi selama lima tahun dan berdasarkan seleksi pemilihan sampel yang dilakukan, maka didapat total sampel sebanyak 785 perusahaan tahun (157 perusahaan, selama 5 periode). Pada lampiran 2 tabel 1 disajikan proses pemilihan sampel.

### 4.2 Analisis statistik deskriptif

Tabel 2 (lampiran 2) panel A menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian. Nilai tobins'Q menunjukkan mean dan median sebesar 1.523 dan 1.163 serta nilai standar deviasi 1.14. Dan nilai minimum dan maksimum sebesar 0.07 dan 5.16 menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang semakin meningkat. Dalam panel A juga terdapat statistik deskriptif pada ukuran perencanaan pajak seluruh perusahaan sampel. Panel tersebut menunjukkan secara keseluruhan nilai tindakan pajak agresif perusahaan sampel relatif seragam, hal ini terlihat dari nilai standar deviasi yang relatif kecil.

Untuk variabel mekanisme *corporate governance*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga memiliki nilai yang relatif rendah dengan nilai maksimum 0.479 sedangkan kepemilikan keluarga memiliki nilai yang relatif tinggi dengan nilai maksimum 0.918. Proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai mean dan median 0.37 dan 0.33



dan standar deviasi 0.12. Nilai minimum dan maksimum untuk proporsi dewan komisaris independen sebesar 0.5 dan 0.167 berarti dewan komisaris independen pada perusahaan non keuangan di Indonesia relatif tinggi.

*Leverage* memiliki mean dan median sebesar 0.507 dan 0.5285 dengan deviasi standar sebesar 0.204, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0.00002 dan 0.9. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki tingkat resiko yang rendah. *Size* memiliki mean dan median sebesar 26.829 dan 27.484 dengan deviasi standar sebesar 3.106, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 14.803 dan 32.67. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki ukuran yang relatif sama. ROE menunjukkan hasil mean dan median sebesar 0.19 dan 0.103 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0.00015 dan 3.17. Menunjukkan tingkat pengembalian ekuitas yang relatif sama. Pada tabel 3 menunjukkan korelasi antar lima ukuran perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance*. Nilai korelasi antara variabel *PERM\_DIFF* dengan *DTAX* sangat tinggi, namun hal ini dianggap wajar karena nilai *DTAX* merupakan nilai residual dari regresi *PERM\_DIFF* (Rego dan Wilson, 2008).

#### 4.3 Analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

Model menggunakan data panel tidak relevan untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian dilakukan dengan metode *cross section weights*. Dari tabel 4 lampiran 2 diperoleh hasil regresi ukuran perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yaitu *CASH\_ETR* dan *BTDs* menunjukkan nilai yang positif dan *PERM\_DIFF*, *DTAX*, dan *SHELTER*. Hal ini tidak mendukung hipotesis 1, bahwa *CASH\_ETR* menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Penemuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, Wahab dan Holland (2012) menguji perusahaan di Inggris dari tahun 2005 – 2007 memiliki hubungan yang negatif antara *tax planning* dengan ukuran *cash-ETR* terhadap

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan investor merespon *cash effective tax rate* yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pada hipotesis kedua bahwa hasil pengujian *book-tax difference* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan selisih perbedaan *book income* dan *taxable income* bukan merupakan tindakan perencanaan pajak yang bersifat agresif, sehingga pasar menerima informasi tersebut sebagai hal bukan merupakan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Selain itu, tindakan ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak yang baik, maka pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang sama seperti Wahab dan Holland (2012) menjelaskan *book-tax difference* tidak selalu mencerminkan pelaporan pajak agresif. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam hipotesis 3, bahwa hasil pengujian *permanent book-tax difference* dapat memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut tidak konsisten dengan kerangka hipotesis diatas. Hal ini dipandang oleh investor bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang *non compliance*, karena menurut data penelitian ini banyaknya koreksi yang dilakukan perusahaan pada perbedaan permanen yang dapat menurunkan laba yang akan dibagi kepada investor.

Hipotesis keempat berkaitan dengan hipotesis ketiga dengan mengukur nilai residu dari *permanent book-tax difference*, diperoleh hasil bahwa *discretionary permanent book-tax differences* memberikan pengaruh negatif. Perusahaan dalam observasi ini cenderung mendapatkan penghasilan atau bebanyang bukan merupakan dari tindakan manajemen laba, karena perusahaan melakukan manajemen laba pada *temporary difference*. Dimana tindakan ini merupakan tindakan manajemen laba. Manajemen juga cenderung menyembunyikan informasi kepada pemegang saham karena berkaitan dengan masalah keagenan bahwa manajemen cenderung ingin mendapatkan kompensasi. Hal ini konsisten dengan penelitian

Desai et al. (2006) memprediksi bahwa dalam perencanaan pajak dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan ketika manajer memiliki kesempatan untuk mengecilkan laba kena pajak.

Pada ukuran perencanaan pajak pada *tax sheltering* diperoleh hasil bahwa *tax sheltering* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dimungkinkan, namun, untuk membuat prediksi yang jelas tentang efek relatif terhadap perusahaan-perusahaan dengan tata kelola yang lebih kuat akan menghasilkan perencanaan pajak yang baik dapat mengurangi *tax sheltering* yang bersifat agresif. Namun hasil hubungan negatif ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang lemah. Desai dan Dharmapala (2006) menemukan hubungan negatif antara tingkat kompensasi insentif dan tingkat pajak berlindung.

#### 4.4 Analisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap nilai perusahaan

Hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan disebabkan adanya insentif yang dimiliki oleh manajer dan mereka cenderung berusaha untuk melakukan penyejajaran kepentingan dengan *outside owners* dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Suranta dan Machfoedz, 2003). Hasil penelitian tidak ini konsisten dengan kerangka pemikiran sebelumnya dengan hasil kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun konsisten dengan penelitian Suranta dan Machfoedz (2003)

Bukti ini didukung oleh statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa rata-rata kepemilikan manajerial di Indonesia masih rendah. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi adalah karena penerapan *corporate governance* di Indonesia relatif masih rendah. Dalam menerapkan *good corporate governance* perusahaan publik cenderung hanya sebatas memenuhi peraturan BEI/Bapepam-LK. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata

seluruh komponen *Indonesian Corporate Governance Scorecard* tahun 2007 yang hanya sebesar 64,96% (IICD, 2009).

Selain kepemilikan manajerial terdapat kepemilikan keluarga dalam mekanisme *corporate governance*. Hasil penelitian ini bahwa kepemilikan keluarga memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arifin (2003) menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah keagenannya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah keagenannya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara principal dan agent

Untuk proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris independen sebagai fungsi monitoring untuk mempengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan baik secara positif maupun negatif. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat lebih dipercaya investor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Suranta dan Machfoedz (2003) menyatakan dengan adanya tambahan komisaris independen sehingga proporsi jumlah dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

#### **4.5 Analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi**

Pada tabel 3 panel B secara keseluruhan diperoleh hasil penelitian kepemilikan manajerial sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung negatif terhadap nilai perusahaan sebesar 61,13%, dengan tingkat signifikansi 1%, kepemilikan keluarga sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung positif terhadap nilai perusahaan, dan proporsi dewan

komisaris independen sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena kepemilikan manajerial yang tergolong rendah sehingga manajemen memiliki sedikit atau tidak mempunyai hak voting dalam pengambilan suara, sehingga manajemen melakukan tindakan manajemen laba dalam perencanaan pajak. Sedangkan kepemilikan keluarga memberikan pengaruh hasil yang positif terhadap nilai perusahaan berarti kepemilikan keluarga dapat menyelesaikan masalah keagenan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut didukung oleh semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen sehingga manajemen bertindak demi kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Desai, et al (2009) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak ditafsirkan telah dilakukan untuk kepentingan pemegang saham hanya ketika tingkat tata kelola perusahaan yang tinggi.

#### **4.6 Analisis variabel kontrol**

Dalam lampiran 2 tabel 4 panel A dan B bahwa variabel kontrol SIZE mempunyai pengaruh yang positif, LEVERAGE mempunyai pengaruh negatif dan ROE mempunyai pengaruh yang positif. Hal ini terbukti bahwa semakin besar perusahaan, perusahaan tersebut mempunyai reputasi dan nama baik sehingga investor lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan tingkat utang yang semakin tinggi membuat investor menjadi takut untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga nilai pasar terhadap ekuitas perusahaan semakin kecil. Selain itu variabel kontrol terakhir yaitu ROE memberikan pengaruh positif karena semakin tinggi ROE semakin tinggi nilai perusahaan tersebut karena perusahaan mampu menghasilkan laba terhadap total ekuitas. Wahab dan Holland (2012) menunjukkan hasil yang sama, ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif dan leverage memberikan pengaruh yang negatif.

## V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 5.1 Simpulan Penelitian

Dengan menggunakan sampel sebanyak 157 perusahaan yang terdaftar di BEI yang menghasilkan 785 selama 5 tahun observasi, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: hasil regresi ukuran perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yaitu CASH\_ETR dan BTDs menunjukkan nilai yang positif dan PERM\_DIFF, DTAX, dan SHELTER. Hal ini tidak mendukung hipotesis 1, bahwa CASH\_ETR menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Pada hipotesis kedua bahwa hasil pengujian *book-tax difference* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan selisih perbedaan *book income* dan *taxable income* bukan merupakan tindakan perencanaan pajak yang bersifat agresif, sehingga pasar menerima informasi tersebut sebagai hal bukan merupakan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam hasil pengujian *permanent book-tax difference* dapat memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut tidak konsisten dengan kerangka hipotesis diatas. Dalam mengukur nilai residu dari *permanent book-tax difference*, diperoleh hasil bahwa *discretionary permanent book-tax differences* memberikan pengaruh negatif. Perusahaan dalam observasi ini cenderung mendapatkan penghasilan atau beban yang bukan merupakan dari tindakan manajemen laba, karena perusahaan melakukan manajemen laba pada *temporary difference*. Dimana tindakan ini merupakan tindakan manajemen laba. Manajemen juga cenderung menyembunyikan informasi kepada pemegang saham karena berkaitan dengan masalah keagenan bahwa manajemen cenderung ingin mendapatkan kompensasi. Pada ukuran perencanaan pajak pada *tax sheltering* diperoleh hasil bahwa *tax sheltering* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dimungkinkan, namun, untuk membuat prediksi yang jelas tentang efek relatif

terhadap perusahaan-perusahaan dengan tata kelola yang lebih kuat akan menghasilkan perencanaan pajak yang baik yang akan mengurangi *tax sheltering* yang bersifat agresif. Namun hasil hubungan negatif ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang lemah.

Untuk hasil regresi pada model II, penelitian ini disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak konsisten dengan kerangka pemikiran sebelumnya dengan hasil kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan. Bukti ini didukung oleh statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa rata-rata kepemilikan manajerial di Indonesia masih rendah. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi adalah karena penerapan *corporate governance* di Indonesia relatif masih rendah. Selain kepemilikan manajerial terdapat kepemilikan keluarga dalam mekanisme *corporate governance*. Hasil penelitian ini bahwa kepemilikan keluarga memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

Untuk proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris independen sebagai fungsi monitoring untuk mempengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan baik secara positif maupun negatif. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat lebih dipercaya investor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam pengaruh *cash effective tax rate*, *book-tax difference*, *permanent book-tax difference*, *discretionary permanent book-tax difference*, dan *tax sheltering* terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh mekanisme *corporate governance*, dapat disimpulkan kepemilikan manajerial sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan keluarga sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung positif

terhadap nilai perusahaan, dan proporsi dewan komisaris independen sebagai moderasi perencanaan pajak cenderung positif terhadap nilai perusahaan sebesar 61,13% dan signifikan. Hal ini terjadi karena kepemilikan manajerial yang tergolong rendah sehingga manajemen memiliki sedikit atau tidak mempunyai hak voting dalam pengambilan suara, sehingga manajemen melakukan tindakan manajemen laba dalam perencanaan pajak. Sedangkan kepemilikan keluarga memberikan pengaruh hasil yang positif terhadap nilai perusahaan berarti kepemilikan keluarga dapat menyelesaikan masalah keagenan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut didukung oleh semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen sehingga manajemen bertindak demi kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan.

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini memberikan bukti bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh yang negatif kecuali untuk *book-tax difference* yang memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan di Indonesia melakukan perencanaan pajak dilakukan manajemen untuk kepentingan sendiri. Namun ketika adanya moderasi mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan keluarga dan dewan komisaris independen yang dapat mengawasi manajemen dalam segala tindakan yang dilakukannya. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif, sehingga dapat mengurangi kepentingan pribadi manajemen, yang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini yaitu kurang tepatnya prosedur pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel, tiap ada perusahaan yang memiliki laba negatif pada salah satu tahun observasi, maka perusahaan tersebut langsung dikeluarkan



dari sampel. Hal ini membuat jumlah sampel yang dipilih tiap tahun berjumlah sama dan seluruhnya merupakan perusahaan dengan nilai laba positif, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan prosedur pemilihan sampel dilihat berdasarkan per perusahaan per tahun. Penelitian ini juga perlu menambah rentang waktu penelitian. Selain itu terlalu banyaknya variabel proksi perencanaan pajak yang digunakan, bisa jadi merupakan penyebab dari inkonsistensi dalam signifikansi dan arah koefisien variabel independen. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain dalam perencanaan pajak yang lebih mempengaruhi hasil penelitian ini seperti *effective tax rate*.

#### DAFTAR PUSTAKA



#### SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVI

Manado, 25-28 September 2013

- Arifin, Z. (2003). Masalah Keagenan dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Disertasi Pascasarjana FEUI.
- Bhattacharya, Nilabhra, Hemang Desai, dan Kumar Venkataraman. (2008). *Working paper series American Accounting Association annual meetings*, 2008.
- Boediono, Gideon, SB. (2005). Kualitas Laba Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII*, september 2005, Solo.
- Cloyd, C. B., Mills, L. F., Weaver, C. D. (2003). Firm valuation effects of the expatriation of US corporations to tax-haven countries. *Journal of the American Taxation Association*, 25(S-1), 87-109.
- Desai, M.A. (2003). The divergence between book and tax income, *Tax Policy and Economy 17*, ed. J. Porterba, MIT press, 169-206.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537-546.
- Dyreg, S., Hanlon, M., Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). *Corporate governance*. Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid 1 Edisi ke-2. Jakarta: FCGI
- Florackis, C. (2008). Agency costs and corporate governance mechanisms: Evidence for UK firms. *International Journal of Managerial Finance*, 4(1), 37-59.
- Frank, Mary Margaret, L. Lynch, dan S. Rego. 2009. Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, forthcoming 2009.
- Harahap, Ludwina dan Wardhani, Ratna. (2012). Analisis komprehensif Pengaruh Family Ownership, Masalah Keagenan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Corporate Governance Dan Opportunity Growth Terhadap Nilai Perusahaan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, September 2012, Banjarmasin*.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.(3) : 305-360
- Keown et.al. (2004). *Manajemen Keuangan : Prinsip-Prinsip dan Aplikasi*. Edisi 9. Jakarta
- Masri, Indah dan Dwi Martani. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, September 2012, Banjarmasin*.
- Mills, L. (1998). Book-tax differences and Internal Revenue service adjustments. *Journal of Accounting Research* 36 (2): 343-356.
- Modigliani, F. and Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction (in communications). *American Economic Review* 53, pp. 443-433.
- Monks R., dan Minow, N. (2001). *Corporate governance*. Second edition. Blackwell business.
- Phillips, J., M. Pincus, and S. Rego. 2003. Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review* 78 (2): 491-521.
- Prastowo, Yustinus. (2010). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rego, S. dan R. Wilson. (2008). Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance. *Working paper, University of Iowa*
- Salvatore, Dominick. (2005). *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*. Salemba Empat: Jakarta
- Shleifer, A., and R.W. Vishny. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance*, 52(2): 737-783.
- Suranta, Edy dan Mas'ud Machfoedz. (2003). Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VI. Universitas Airlangga Surabaya*.
- Wahab, Nor Shaipah Abdul dan Kevin M. Holland. (2012). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value. *British Accounting Review*, Vol. 44, No. 2, 2012
- Wilson, Ryan. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. *The Accounting Review*, forthcoming 2009.
- Zahra, S. A., Pearce, J. A. (1989). Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model. *Journal of Management*, 15(2), 291-334.

## Lampiran 1

a. CASH\_ETR (Cash effective tax rate)

$$CASH\_ETR_{it} = \frac{\sum Income Tax_{it}}{\sum pre tax income_{it} - \sum special item_{it}}$$

b. BTDs (*book-tax difference*)

$$Book\ tax\ difference_{it} = Book\ Income_{it} - Taxable\ Income_{it}$$

c. (PERM\_DIFF) *Permanent book-tax difference*

$$PERM\_DIFF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 INTANG_{it} + \alpha_2 UNCON_{it} + \alpha_3 MI_{it} + \alpha_4 CSTE_{it} + \alpha_5 CHGNOL_{it} + LAG_{it-1} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

PERM\_DIFF = Total *book-tax difference* dikurang *temporary difference*

INTANG = Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya dibagi dengan total aset (t-1)

UNCON = Laba komprehensif dibagi dengan total aset (t-1)

MI = Laba komprehensif yang diatribusikan kepada pihak non pengendali dibagi dengan total aset (t-1)

CSTE = *income tax* dibagi dengan total aset (t-1)

CHGNOL = (*net operating loss carryforward* pada tahun t dikurangi *net operating loss carryforward* pada tahun t-1) dibagi dengan total aset (t-1)

LAG = Lag *permanent book-tax difference* t-1

d. SHELTER (*Tax sheltering*)

$$SHELTER = -4.86 + 5.20 \times BTD_{it} + 4.08 \times DAP_{it} + -1.41 \times LEV_{it} + 0.76 \times SIZE_{it} + 3.51 \times ROA_{it} + 1.72 \times FOR\_INCOME_{it} + 2.42 \times R\&D_{it}$$

Keterangan:

BTDS = laba sebelum kena pajak dikurang laba kena pajak dibagi total aset

DAP = *discretionary accruals* dari the modified performance-adjusted cross-sectional Jones Model yang dikembangkan oleh Kothari et al. (2005):  $TA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1(\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it}) + \alpha_2 PPE_{it} + \alpha_3 ROA_{it} + \epsilon_{it}$

SIZE = logaritma dari total aset

LEVERAGE = total liabilitas dibagi total aset

ROA = laba sebelum kena pajak dibagi total aset

FOR\_INCOME = jika terdapat *foreign income* diberi nilai 1 dan 0 untuk lainnya

R&D = total biaya penelitian dan pengembangan dibagi total aset

Kemudian nilai SHELTER tersebut diprediksi dengan rumus:

$$P(Sheltering) = \frac{e^{(Predicted\ Value)}}{(1 + e^{(Predicted\ Value)})}$$

Lampiran 2

Tabel 1  
Proses pemilihan sampel

Sampel awal	Jumlah perusahaan tahun
Perusahaan publik yang terdaftar di BEI periode 2007-2011	2040
Dikurangi kriteria sampel	
1. Perusahaan non keuangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai tahun 2011.	(190)
2. Dalam keadaan delisting	(100)
3. Data laporan keuangan yang tidak lengkap	(40)
4. Perusahaan mempunyai pretax income yang negatif selama tahun observasi	(875)
5. Perusahaan mempunyai CETR lebih dari 1	(50)
	(1,395)

Jumlah sampel	785
---------------	-----

Sumber : Data diolah

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	TOBINSQ	CASHETR	BTDS	PERMDIFF	DTAX	SHELTER
Mean	1.523	0.304	0.003	0.087	0.321	0.487
Median	1.163	0.284	0.000	0.084	0.327	0.498
Maximum	5.161	0.975	0.088	0.173	0.348	0.500
Minimum	0.071	0.020	(0.043)	0.050	0.208	0.233
Std. Dev.	1.141	0.144	0.018	0.023	0.021	0.033
Skewness	1.861	1.531	1.125	0.947	(2.422)	(4.454)
Kurtosis	5.717	6.837	6.036	4.372	9.944	26.220
Observations	785	785	785	785	785	785

	MGT	FC	BCSIZE	SIZE	LEVERAGE	ROE
Mean	0.026	0,646	0.377	26.829	0.507	0.199
Median	-	1,000	0.333	27.485	0.529	0.104
Maximum	0.497	1,000	0.500	32.670	0.914	3.175
Minimum	-	0,000	0.167	14.803	0.000	0.000
Std. Dev.	0.057	0,479	0.129	3.106	0.205	0.272
Skewness	3.991	-0,610	(0.483)	(1.301)	(0.180)	3.639
Kurtosis	24.637	1,372	1.828	4.328	2.270	26.340
Observations	785	0,646	785	785	785	785

**Tabel 3**  
**Korelasi Antar Variabel**  
**Spearman**

		CASH_ET R	BTDS	PERM_DIF F	DTAX	SHELTE R	MGT	FC	BCSIZ E
Pearson	CASH_ETR		-0.047	-.119**	-.048	-.231**	.043	-.125**	-.013
	BTDS	-.094**		.000	-.018	.071*	.008	-.042	.043
	PERM_DIFF	-.055	.037		.928**	.109**	.006	.157**	.077*
	DTAX	.001	-.013	.921**		.100**	.011	-.028	.009
	SHELTER	-.114**	.072*	.049	.010		.094**	-.011	.059
	MGT	-.031	.020	.106**	-.008	.037		.149**	.052
	FC	-.089*	-.037	.235**	-.031	.020	.107**		.048
	BCSIZE	-.064	.043	.072*	.005	.029	.076*	.092**	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level.

\* . Correlation is significant at the 0.05 level.

Sumber : Data diolah

**Tabel 3**  
**Hasil regresi model empiris**  
**Panel A**

	Prediksi	Dependent Variables	
		Tobins'Q	
		Model I	Model II
Intercept		2.032631 (0.000) ***	0,427138 0.000 ***
CASH_ETR	-	0.261069	-

		(0.0002) ***	
<b>BTDs</b>	+	1.761391 (0.0357) **	-
<b>PERM_DIFF</b>	+	-0.928469 (0.0983) *	-
<b>DTAX</b>	+	-1.72821 (0.0079) ***	-
<b>SHELTER</b>	+/-	-3.943997 (0.000) ***	-
<b>MGT</b>	+	-	-0,846802 0.000 ***
<b>FC</b>	+	-	-0,079805 0.000 ***
<b>BCSIZE</b>	+	-	0,164644 0.0466**
<b>SIZE</b>	+	0.074283 (0.000) ***	0,041077 0.000 ***
<b>LEVERAGE</b>	-	-1.139702 (0.000) ***	-1,038027 0.000 ***
<b>ROE</b>	+	2.101511 (0.000) ***	2,088985 0.000 ***
<b>Adjusted R squared</b>		<b>66,89%</b>	<b>61,45%</b>
<b>P value</b>		(0.000) ***	(0.000) ***
<b>CASH_ETR = cash effective tax rate, BTDs = book-tax difference, PERM_DIFF = permanent book-tax difference, DTAX = discretionary permanent book-tax difference, SHELTER = tax sheltering, MGT = kepemilikan manajerial, FC= kepemilikan keluarga, BCSIZE = proporsi dewan komisaris independen, SIZE = ukuran perusahaan, LEVERAGE= tingkat utang terhadap total aset, ROE = return on equity</b> * tingkat signifikansi 1% ** tingkat signifikansi 5% *** tingkat signifikansi 10%			

Sumber : data diolah

Panel B

	Prediksi	Dependent Variables
		Tobins'Q
<b>Intercept</b>		0,282795 0.0308**
CASHETR*MGT	+/-	-3,199072 0.0015*
BTDS*MGT	+/-	-25,81008 0.012**
PERMDIFF*MGT	+/-	2,032137 0,8453
DTAX*MGT	+/-	-18,02733 0,0074

SHELTER*MGT	+/-	16,11404 0.0097***
CASHETR*FC	+/-	-0,367563 0,1818
BTDS*FC	+/-	8,624008 0.0149**
PERMDIFF*FC	+/-	3,468917 0,1623
DTAX*FC	+/-	2,596569 0.0905*
SHELTER*FC	+/-	-2,102736 0.0344**
CASHETR*BCSIZE	+/-	1,377364 0.000 ***
BTDS*BCSIZE	+/-	3,627611 0,1822
PERMDIFF*BCSIZE	+/-	-0,523808 0,7798
DTAX*BCSIZE	+/-	1,639739 0,3182
SHELTER*BCSIZE	+/-	-1,640322 0,1422
SIZE	+	0,043659 0.000 ***
LEVERAGE	-	-1,013527 0.000 ***
ROE	+	2,156345 0.000 ***
<b>R squared</b>		<b>61,13%</b>
<b>P value</b>		<b>(0.000) ***</b>
<p><b>CASH_ETR = cash effective tax rate, BTDS = book-tax difference, PERM_DIFF = permanent book-tax difference, DTAX = discretionary permanent book-tax difference, SHELTER = tax sheltering, MGT = kepemilikan manajerial, FC= kepemilikan keluarga, BCSIZE = proporsi dewan komisaris independen, SIZE = ukuran perusahaan, LEVERAGE= tingkat utang terhadap total aset, ROE = return on equity</b></p> <p>* tingkat signifikansi 1%  ** tingkat signifikansi 5%  *** tingkat signifikansi 10%</p>		

Sumber : data diolah

## Implementasi *Governance* Di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kinerja

**BAYU GIRI PRAKOSA\***  
*Universitas Sebelas Maret Surakarta*

**Abstract:** *This study examines whether governance principles implementation in The Ministry of Industry the Republic of Indonesia has been well implemented. This study also tests the effect of governance implementation to Industry Ministry's performance using the Ministry of Industry's performance indicators which have been stipulated by the Minister of Industry in the Rule of Ministry of Industry No: 41/M-IND/PER/3/2010, they are: stakeholder perspective and implementation of functional perspective. Overall, this study provides new contribution since the former researches had not involved the bureaucratic reform or had not assessed the governance implementation either; it might the result do not significant to the performance.*

*The typology of governance quality from TUGI is used in this study to measure the implementation of governance. Agency theory is used in this study. Furthermore, this study used internet survey method in collecting the data. The result of this study shows that most of the governance principles (orderly implementation of state administration, public interest, proportionality, professionalism, and accountability) are implemented well. Yet, there are two governance principles that have not been well implemented; they are law enforcement and transparency. Next, solely public interest principle affected the performance in both perspectives while the others did not.*

*This study finds that governance principles in Ministry of Industry have been well implemented, despite its little value – according to TUGI. It is implied that it may cause the all of governance principles do not give influence to the performance in both perspectives except for the public interest principle which has opposite result.*

**Keywords:** *governance, performance, stakeholder perspective, implementation of functional perspective, typology, agency theory, internet survey.*

### *Acknowledgement:*

*I would like to express my deep gratitude to my lovely supervisor Dra. Y Anni Aryani, M Prof Acc., Ph.D., Ak, for her patient guidance, enthusiastic encouragement, sharing, and useful critiques of this research.*

---

\* Author can be contacted at: bayu\_giria@yahoo.com



## I. Pendahuluan

Konflik kepentingan yang terjadi dalam organisasi (antara pemilik dan agen) tidak hanya terjadi pada sektor swasta tetapi juga disektor publik. *Governance* dalam *agency theory* adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dengan prinsipal (Quintyn, 2007; Hill dan Thomas, 1992; Eisenhardt, 1985 dan 1989; serta Solomon dan Solomon, 2004). *Governance* merupakan penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan fungsinya pada entitas institusional baik pada organisasi swasta ataupun sektor publik (Monks & Minow, 2004) maupun organisasi pemerintahan (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2006; Smismans, 2006).

Implementasi *governance* di sektor publik seharusnya didahului dengan implementasi reformasi birokrasi, sebab reformasi birokrasi adalah salah satu langkah strategi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik (Mustopadidjaja, 2001; TIM Menpan; Priyantha, 2007; Prasojjo dan Teguh, 2008; Samin, 2011). Oleh karena itu, ketika reformasi birokrasi berjalan dengan sukses maka *governance* akan tercipta dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dalam *governance* akan diimplementasikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga kinerja organisasi akan menjadi lebih baik. Hal ini konsisten dengan Beaufort (2004); Kouzmin, Klages, dan Kakabadse (1999); Chaudhry, Imran, Shahnawaz, Malik, dan Shail (2009); serta CIPFA (2004) yang berpendapat bahwa *governance* adalah kunci sukses dalam keberhasilan kinerja organisasi. Masyarakat menilai kesuksesan kinerja sektor publik dari pelayanan yang mereka dapatkan, ketika mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik maka mereka menilai bahwa kinerja pemerintah baik dan sebaliknya (Diaswati, Barnes, dan Sakurai, 2008; serta Santiso, 2001).

Walaupun demikian, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pengaruh *governance* terhadap kinerja. Menurut Beaufort (2004); Kouzmin, Klages, dan Kakabadse (1999); Chaudhry, Imran, Shahnawaz, Malik, dan Shail (2009); serta CIPFA (2004) *governance* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Sedangkan Hermalin, dan Weisbach (2003); Himmelberg, Hubbard, dan Paila (1999); Denis dan Kruse (2000); serta Wintoki, Linck, dan Netter (2008) menyatakan bahwa *governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sebab kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lebih jauh lagi, World Bank (2010); Daniri (2008); Sachiko dan



Zaelke (2007) menyatakan bahwa penerapan *governance* dipengaruhi oleh *law enforcement*, ketika *law enforcement* lemah maka implementasi *governance* tidak akan berjalan dengan maksimal. Nofianti (2009) berpendapat bahwa, pelaksanaan *governance* suatu organisasi dipengaruhi oleh tingkat komitmen seluruh anggota organisasi.

Dari *research gap* di atas, peneliti tertarik untuk melakukan uji empiris apakah *governance* berpengaruh terhadap kinerja, dalam hal ini penelitian dilakukan di Kementerian Perindustrian RI sebagai organisasi sektor publik yang telah berhasil menerapkan reformasi birokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh KPK dalam penilaian inisiatif anti korupsi (PIAK) pada tahun 2011. Sebelum melakukan uji empiris terhadap pengaruh *governance* dengan kinerja, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi mengenai implementasi *governance* di Kementerian Perindustrian RI. Hal ini merupakan kontribusi baru, sebab pada penelitian terdahulu belum melibatkan reformasi birokrasi dan belum melakukan penilaian terhadap implementasi *governance*, sehingga hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja dimungkinkan karena organisasi yang diteliti belum mengimplementasikan *governance* dengan baik. Selain itu, penilaian implementasi *governance* pada penelitian ini dengan menggunakan tipologi kualitas implementasi *governance* oleh TUGI (*The Urban Governance Initiative*). TUGI memberikan petunjuk terkait bagaimana menilai implementasi prinsip-prinsip *governance* pada suatu organisasi (lebih banyak digunakan di sektor publik) dalam bentuk tipologi kualitas implementasi *governance*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini terdiri dari 5 bagian, bagian pertama menjelaskan tentang pendahuluan, bagian kedua membahas rerangka konseptual dan pengembangan hipotesis, bab ketiga tentang metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, sedangkan pada bab empat dijelaskan tentang analisis dan pembahasan dari pengujian empiris penelitian ini, dan bab terakhir membahas kesimpulan, keterbatasan, dan saran.

## II. Rerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*, sebab perkembangan perspektif *governance* dimulai dari adanya *agency model* atau *agency theory* (Wulandari, 2006). Kinerja pemerintah harus dilihat dari interaksi antara berbagai

macam faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal dari birokrasi itu sendiri, faktor-faktor tersebut ada pada konsep *governance* (Oyugi, 2000).

#### A. Rerangka Teoritis

##### Agency Theory

Hubungan keagenan di dalam teori agensi adalah perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus dan mengatur penggunaan serta pengendalian sumber daya tersebut (Jensen dan Meckling 1976). Menurut Meisser, Glover, dan Prawitt (2006) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Watts dan Zimmerman (1990) dalam *Positive accounting theory* menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, prinsipal bukan hanya pemilik perusahaan tetapi juga bisa pemegang saham, kreditor, ataupun pemerintah. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu: asumsi tentang sifat, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi.

Lebih jauh lagi, teori agensi menyatakan bahwa hubungan antara agen dan prinsipal terjadi pada setiap entitas baik di swasta ataupun di publik (pemerintah). Namun, masalah keagenan pada sektor swasta dan pemerintah memiliki perbedaan. Pada sektor swasta, *outcome* dari suatu entitas adalah bagaimana menciptakan laba yang tinggi dan peningkatan daya beli pemegang saham. Sedangkan, di sektor publik *outcome* lebih ditekankan pada efektivitas fungsi pelayanan publik, yang menyangkut hak publik untuk mendapatkan pelayanan publik yang seharusnya (Mardiasmo, 2006). Oleh karena itu, masalah keagenan dalam sektor publik timbul antara prinsipal yaitu masyarakat dengan pemerintah sebagai agen. Masalah keagenan yang terjadi dalam sektor publik adalah agen (pemerintah) yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan *opportunistic* sebab mereka memiliki peluang untuk menggunakan *discretionary power* nya. Lebih jauh lagi, Latifah (2010) menyatakan bahwa agen memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja *actual*, motivasi, dan tujuan sehingga

agen memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*.

### Governance

Isu *governance* diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, hal ini yang sering menimbulkan masalah kepentingan di antara keduanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* sebagai akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, sistem tersebut dalam hal ini adalah *governance*.

Terdapat berbagai macam definisi *governance* dari berbagai ahli dan institusi, sehingga tidak ada satupun definisi yang paling benar akan *governance* (Solomon dan Solomon, 2004). Lebih jauh lagi, hasil survei yang dilakukan oleh Solomon menunjukkan bahwa definisi dari Parkinson (1994) yang paling banyak diterima, dia mengartikan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses supervisi dan pengendalian yang digunakan guna menjamin bahwa pihak manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan.

OECD (1993) mendefinisikan *good corporate governance* menjadi dua bagian, yaitu sistem dan struktur. Menurut definisi sistem, *good corporate governance* menjelaskan bagaimana mengatur perusahaan untuk dapat diarahkan dan dikendalikan guna meningkatkan kemakmuran bisnis yang akuntabel bagi para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengesampingkan kepentingan *stakeholder* lainnya. Sedangkan menurut definisi struktur, *good corporate governance* memberikan kejelasan atas fungsi, hak, kewajiban, dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, termasuk pengendalian internal dan eksternal yang efektif guna menciptakan keseimbangan pengendalian dari pihak internal dan eksternal. Dalam konteks sektor publik, *governance* berarti bahwa pemerintah harus dapat mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam sektor publik untuk diarahkan dan dikendalikan dalam meningkatkan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan/kepentingan *stakeholder*.

Studi ini menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, SK Menpan No: 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebab pelaksanaan *governance* di sektor publik harus mengacu pada Undang-Undang dan peraturan tersebut. Adapun prinsip *governance* yang digunakan adalah: prinsip penegakan hukum, tertib penyelenggaraan administrasi negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

### Kinerja

Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi sebagaimana tercantum dalam perumusan skema strategis organisasi (Rohman, 2007 dan Ulum, 2011). Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja adalah pencapaian organisasi yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu.

GASB (2008) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dibagi menjadi tiga indikator, yaitu: (1) *service effort measurement*, (2) *service accomplishment measurement*, dan (3) *indicator that links between effort and accomplishment*. Dalam konteks sektor publik, keberhasilan kinerja ditunjukkan dengan adanya pelayanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat puas akan pelayanan publik maka pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Sadjarto (2000) dan Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa informasi tentang kinerja pemerintah dapat digunakan untuk menetapkan tujuan program secara spesifik, untuk merencanakan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan program, mengalokasikan sumber daya untuk program terkait, untuk memantau dan mengevaluasi hasil guna menentukan apakah ada kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk memodifikasi rencana program dalam rangka meningkatkan kinerja.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Strategi Peta dan Kunci Indikator Kinerja Kementerian Perindustrian. Indikator tersebut adalah perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*) dan perspektif proses pelaksanaan tugas pokok Kementerian.

Perspektif *stakeholder* adalah kinerja Kementerian Perindustrian yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan industri Indonesia, sedangkan perspektif

proses pelaksanaan tugas pokok kementerian berhubungan dengan kinerja internal satuan kerja yang ada di Kementerian Perindustrian.

## B. Pengembangan Hipotesis

### 1) Penegakan hukum dengan kinerja

*Law enforcement* di organisasi membuat kinerja akan menjadi lebih baik, sebab pelaksana dalam organisasi tersebut akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku – meminimalkan kesalahan yang dapat mengurangi kinerja atau *reward* mereka (Beaufort, 2004; Kouzmin, *et al*, 1999; Chaudhry, *et al*, 2009; Daniri, 2005). Lebih jauh lagi, ketika penegakan hukum telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan tercipta keselarasan dan keadilan dalam organisasi tersebut dalam hal ini organisasi/institusi sektor publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penegakan hukum maka akan berlaku *reward and punishment* sehingga organisasi tersebut akan berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya (*reward*) dan menghindari *punishment*. Oleh karena itu, hipotesa dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>.** *Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>2</sub>.** *Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

### 2) Tertib Administrasi penyelenggaraan negara dengan kinerja

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Ketika asas ini telah ditaati maka kinerja organisasi sektor publik akan menjadi lebih baik sebab dalam organisasi tersebut terdapat keteraturan dan keserasian dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya (Solihin, 2007). Lebih lanjut, Heracleous (2001) menyatakan bahwa ketika suatu organisasi memiliki sistem yang baik (terdapat keteraturan dalam proses administrasi operasi bisnisnya) dan organisasi tersebut menjalankan sistem tersebut dengan baik maka *outcome* atau kinerja dari organisasi tersebut seharusnya baik pula. Dari uraian di atas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>.** *Tertib penyelenggaraan negara berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>4</sub>.** *Tertib penyelenggaraan negara berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

3) Kepentingan umum dengan kinerja

Definisi asas kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif – tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan. Jika para pegawai/oknum yang terlibat dalam organisasi sektor publik telah menjalankan asas kepentingan umum dengan baik maka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik sebab mereka akan mengutamakan kepentingan umum – penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Lebih jauh lagi, Tuasikal (2008), Diaswati *et al.* (2008), dan Santiso (2001) menyatakan bahwa ketika suatu organisasi mendapat pengawasan langsung dari publik (masyarakat) maka organisasi tersebut akan memaksimalkan kinerjanya, karena masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah dari pelayanan publik yang diberikan, ketika pelayanan publik tersebut baik maka kinerja pemerintah dianggap baik pula dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>.** *Kepentingan umum berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>6</sub>.** *Kepentingan umum berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

4) Transparansi dengan kinerja

Jika kegiatan suatu organisasi secara transparan dapat dimonitor oleh *stakeholder*, maka kinerja organisasi akan meningkat sebab adanya pengawasan secara langsung dari *stakeholder* dan benturan kepentingan tidak akan terjadi (Daniri, 2005; Lennerfor, 2007; dan Greene, 2009). Dari penjelasan di atas dapat dihipotesiskan:

**H<sub>7</sub>.** *Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>8</sub>.** *Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

5) Proporsionalitas dengan kinerja

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara – adanya pemenuhan hak yang sebanding dengan kewajiban, baik oleh pemberi ataupun penerima pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa, ketika prinsip proporsionalitas telah berjalan baik di organisasi sektor publik maka kinerjanya akan meningkat – agar mendapat *reward* dari *stakeholder*, hal ini sesuai dengan Bridgman (2007) dan Krina (2003). Dari uraian di atas dapat dihipotesiskan:

**H<sub>9</sub>.** *Proporsionalitas berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>10</sub>.** *Proporsionalitas berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

6) Profesionalisme dengan kinerja

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku – sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi (bidang tugasnya). Ketika organisasi sektor publik telah memiliki orang-orang yang profesional dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat (sesuai dengan kompetensinya) maka kinerja organisasi tersebut akan meningkat. Olivero, Bane, dan Kopelman (1997) menyatakan bahwa ketika seseorang diberi pelatihan (untuk meningkatkan keahliannya) maka kinerjanya akan meningkat. Lebih jauh lagi, ketika organisasi sektor publik telah memiliki orang-orang yang profesional dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat –



sesuai dengan kompetensinya (*right man in the right place*) maka kinerja organisasi tersebut akan meningkat (Brignall, 2000). Dari penjelasan di atas dapat dihipotesiskan:

**H<sub>11</sub>.** *Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>12</sub>.** *Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

#### 7) Akuntabilitas dengan kinerja

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003). Oleh karena itu, ketika organisasi telah melaksanakan prinsip akuntabilitas maka kinerja organisasi tersebut akan meningkat, hal ini sejalan dengan Daniri, (2005). Untuk itu dapat dihipotesiskan:

**H<sub>13</sub>.** *Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif stakeholder*

**H<sub>14</sub>.** *Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja dari perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian*

### III. Metodologi Penelitian

#### Populasi, sampel, sampling

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *internet survey*. Responden untuk penelitian ini adalah pegawai di Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin). Populasi dari penelitian ini adalah satuan kerja di Kemenperin sedangkan sampelnya adalah pegawai Kemenperin. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai di satuan kerja Kementerian Perindustrian RI kecuali untuk satuan kerja dibidang pendidikan seperti Akademi Pendidikan Tinggi dan Sekolah-sekolah



- Perindustrian (SMK), sebab mereka tidak secara langsung terlibat dalam kebijakan-kebijakan industri.
2. Pegawai di satuan Kerja Kementerian Perindustrian minimal Eselon empat, karena ketika pegawai tersebut sudah eselon (minimal eselon empat) berarti pegawai tersebut sudah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
  3. Pegawai yang telah memenuhi kriteria nomor satu dan dua bisa menggunakan internet.

### Definisi operasional dan pengukuran variabel

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang diisi oleh responden secara *online*, sebab peneliti menggunakan metode *internet-survey*. Peneliti mengirim alamat (*link website*) kuisioner dengan menggunakan *email* kepada setiap responden – yang ada di 47 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengurangi bias, *link website* dibagikan kepada responden melalui intranet (*email* khusus pegawai Kementerian Perindustrian), sehingga hanya mereka yang memiliki *user id* dan *password* yang bisa membuka *email* tersebut, hal ini sejalan dengan Dilman (2007).

Sebelum membuat kuisioner *final* (yang digunakan dalam penelitian ini), peneliti melakukan *pilot project* terlebih dahulu, peneliti menyebarkan *pilot project* ke BDI Denpasar, sebanyak 16 responden telah mengisi dengan lengkap kuisioner yang dibagikan. Hasil pengujian terhadap *pilot project* menunjukkan bahwa semua pernyataan yang ada di kuisioner *reliable* namun terdapat beberapa item pernyataan yang tidak *valid* dan peneliti mendapatkan *feedback* dari responden *pilot project* sehingga peneliti melakukan perbaikan-perbaikan pada kuisioner. Pengujian validitas dan reabilitas dilakukan sejalan dengan Sekaran (2006), Sulisty (2012), dan Ghazali (2011).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *governance* yang diproksikan ke dalam prinsip penegakan hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja yang diproksikan ke dalam perspektif *stakeholder* dan perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian.

Penilaian implementasi *governance* didasarkan pada tipologi kualitas *governance* dari *The Urban Governance Initiative* (TUGI). TUGI mengelompokkan implementasi prinsip *governance* menjadi lima kelompok yaitu: sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Untuk mengukur variabel independen dan dependen, penelitian ini menggunakan

skala *Likert* – dengan lima *point* skala. Adapun lima *point* skala tersebut adalah: satu = sangat tidak setuju, dua = tidak setuju, tiga = netral, empat = setuju, dan lima = sangat setuju.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *multiple regressions*. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah antara 1% sampai dengan 10%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua model. Model pertama, regresi dilakukan antara ketujuh variabel independen dengan variabel dependen pertama (perspektif *stakeholder*). Model kedua dilakukan regresi antara tujuh variabel independen dengan variabel dependen kedua (perspektif pelaksanaan tugas pokok). Adapun persamaan untuk pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1.  $STHR = \alpha + \beta_1 PHUM + \beta_2 TADM + \beta_3 KPUM + \beta_4 TRAN + \beta_5 PROP + \beta_6 PROF + \beta_7 PAKUN + e$
2.  $TPKS = \alpha + \beta_1 PHUM + \beta_2 TADM + \beta_3 KPUM + \beta_4 TRAN + \beta_5 PROP + \beta_6 PROF + \beta_7 AKUN + e$

### Keterangan:

- STHR = Kinerja dari Perspektif *stakeholder*
- TPKS = Kinerja dari Perspektif proses pelaksanaan tugas pokok kementerian
- PHUM = Prinsip Penegakan Hukum
- TADM = Prinsip Tertib Administrasi Penyelenggaraan Negara
- KPUM = Prinsip Kepentingan Umum
- TRAN = Prinsip Transparasi
- PROP = Prinsip Proporsionalitas
- PROF = Prinsip Profesionalisme
- AKUN = Prinsip Akuntabilitas
- $\beta_1 - \beta_7$  = koefisien variable bebas
- $e$  = *errors*

## IV. Analisis dan Pembahasan

Jumlah Responden penelitian ini adalah 525, namun hanya sebanyak 77 responden atau sebesar 15% yang bersedia mengirim kembali kuisioner. Peneliti

telah melakukan uji *non-response bias* dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara kuisisioner yang kembali (dijwab) dengan kuisisioner yang tidak kembali, untuk itu peneliti melakukan uji-t terhadap responden yang menjawab kuisisioner sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan responden yang menjawab kuisisioner lewat dari batas waktu yang ditentukan, hal ini sejalan dengan (Babbie, 1990).

Peneliti telah melakukan uji asumsi klasik sebelum regresi, hal ini sejalan dengan (Ghozali, 2011 & Sulisty, 2012). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolineritas, dan autokorelasi telah memenuhi syarat. Selain itu, peneliti telah melakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap jawaban dari kuisisioner yang dibagikan, hasil pengujian menunjukkan bahwa data *valid* dan *reliable*, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya (uji hipotesis).

**a. Implementasi *Governance* di Kementerian Perindustrian RI**

Penilaian implementasi prinsip-prinsip *governance* di Kementerian Perindustrian RI yang meliputi: prinsip penegakan hukum, tertib administrasi penyelenggaraan negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas berdasarkan tipologi keberhasilan *governance* TUGI terdapat pada tabel di bawah

**Tabel 1**  
**Penilaian Implementasi *Governance***

Prinsip <i>Governance</i>	Nilai	Keterangan
Penegakan Hukum	63	Cukup
Tertib Penyelenggaraan Negara	72	Baik
Kepentingan Umum	69	Baik
Transparansi	57	Cukup
Proporsionalitas	71	Baik
Profesionalisme	67	Baik
Akuntabilitas	79	Baik

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *governance* di Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Prinsip penegakan hukum dan transparansi masih cukup

sehingga perlu diadakan perbaikan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang lain juga masih bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.

**b. Pengujian Hipotesis**

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa hanya prinsip kepentingan umum yang memiliki pengaruh terhadap kinerja, baik kinerja dari perspektif *stakeholder* ataupun kinerja dari perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga  $H_5$  dan  $H_6$  diterima walaupun pengaruh prinsip kepentingan umum terhadap kinerja dari perspektif *stakeholder* sangat lemah (signifikansi 10%). Sedangkan, prinsip penegakan hukum, tertib administrasi penyelenggaraan negara, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja atau bisa dikatakan bahwa  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ,  $H_4$ ,  $H_7$ ,  $H_8$ ,  $H_9$ ,  $H_{10}$ ,  $H_{11}$ ,  $H_{12}$ ,  $H_{13}$ , dan  $H_{14}$  ditolak.

**Tabel 2**  
**Pengujian Hipotesis**

	Model					
	I			II		
	B	t	Sig	B	t	Sig
PHUM	0,159	1,341	0,184	0,109	1,201	0,234
TADM	0,008	0,058	0,954	0,123	1,139	0,259
KPUM	0,194	1,988	0,051***	0,182	2,426	0,018**
TRAN	0,033	0,474	0,637	0,05	0,935	0,353
PROP	0,042	0,429	0,669	0,101	1,34	0,185
PROF	0,086	0,63	0,531	0,07	0,663	0,51
AKUN	0,025	0,189	0,851	-0,017	-0,173	0,863
<i>R Square</i>		0,377			0,577	
Adj R Square		0,314			0,534	
<i>F test</i>		5,962*			13,434*	

Sumber: Data yang diolah

\* signifikan pada 0% , \*\* signifikan pada 5%, dan \*\*\* signifikan pada 10%

Implementasi prinsip kepentingan umum memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kedua perspektif kinerja, sehingga ketika implementasi prinsip

pelayanan publik meningkat maka kinerja baik pada perspektif *stakeholder* dan pelaksanaan tugas pokok juga akan meningkat – dan sebaliknya. Prinsip kepentingan umum memiliki parameter yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik), sehingga publik (pihak eksternal) langsung dapat memberikan penilaian atau melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh satuan kerja atau Kementerian Perindustrian RI. Pengawasan dari pihak eksternal memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja suatu organisasi, terlebih apabila organisasi tersebut adalah sektor publik – dalam hal ini pemerintah/Kementerian Perindustrian RI (Tuasikal, 2008). Lebih jauh lagi, Diaswati *et al.* (2008) dan Santiso (2001) menyatakan bahwa, masyarakat akan langsung menilai kinerja pemerintah dari fasilitas/pelayanan publik yang disediakan, jika fasilitas publik/pelayanan publik baik/memadahi maka masyarakat akan menilai kinerja pemerintah baik, dan sebaliknya. Oleh karena itu, organisasi (satuan kerja) akan lebih termotivasi untuk melaksanakan parameter-parameter prinsip kepentingan umum guna mewujudkan kinerja yang maksimal – sesuai dengan keinginan publik.

Implementasi prinsip penegakan hukum, tertib administrasi penyelenggaraan negara, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dua perspektif kinerja, yaitu perspektif *stakeholder* dan perspektif pelaksanaan tugas pokok. Salah satu penyebab prinsip-prinsip tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karena implementasi prinsip *governance* di Kementerian Perindustrian RI belum sepenuhnya berjalan dengan baik, bahkan untuk prinsip penegakan hukum dan transparansi masih dalam kelompok cukup (menurut penilaian di Tabel 1) sehingga implementasi *governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, pendapat ini sejalan dengan (Beaufort, 2004; Kouzmin *et al.*, 1999; Chaudhry *et al.*, 2009).

Peneliti telah melakukan *robustness test* dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terkait dengan hasil penelitian. *Robustness test* dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol demografi (tempat asal/satuan kerja responden berasal) dan karakteristik responden (jabatan/eselon responden). Hasil dari pengujian *robustness test* menunjukkan bahwa dengan penambahan variable

kontrol hasil pengujian hipotesis menjadi lebih buruk daripada hasil pengujian dengan model awal penelitian.

## V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris terkait dengan tujuan dari penelitian ini, adapun hasilnya adalah sebagai berikut: implementasi prinsip-prinsip *governance* di Kementerian Prindustrian RI – sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang dijadikan acuan pada penelitian ini sebagian besar sudah baik – berdasarkan tipologi TUGI, walaupun nilai yang di dapat sangat minim untuk kategori baik. Adapun implementasi prinsip *governance* yang memiliki nilai baik, yaitu: implementasi prinsip tertib administrasi penyelenggaraan negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Namun, implementasi prinsip penegakan hukum dan transparansi masih cukup. Hasil yang kurang maksimal ini kemungkinan disebabkan karena implementasi penerapan *governance* baru efektif dilaksanakan pada tahun 2010, sehingga pelaksana masih perlu waktu untuk menyesuaikan dan memahami *governance* secara komprehensif.

Lebih lanjut, hanya prinsip kepentingan umum yang memiliki pengaruh di dua perspektif kinerja (perspektif *stakeholder* dan perspektif pelaksanaan tugas pokok). Sedangkan prinsip penegakan hukum, tertib administrasi penyelenggaraan negara, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja baik pada perspektif *stakeholder* maupun perspektif pelaksanaan tugas pokok. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena implementasi prinsip *governance* di Kementerian Perindustrian RI yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik atau lemahnya *law enforcement* dan komitmen pelaksana.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti: pernyataan yang dibagikan kepada responden tidak dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga beberapa responden mengalami kesulitan untuk memberikan presepsinya terkait dengan pernyataan yang diberikan. Namun, peneliti telah mencoba

untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan keterangan-keterangan yang mungkin bisa membantu responden. Selain itu peneliti telah berusaha untuk menyebarkan kuisioner ke hampir seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian RI, sehingga diharapkan setiap satuan kerja dapat memberikan presepsinya terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Selain itu, Waktu penyebaran kuisioner yang kurang tepat, sebab kuisioner dibagikan akhir bulan November sampai dengan awal bulan Desember dan yang menjadi responden pada penelitian ini adalah para pejabat (minimal eselon empat), sehingga *response rate* pada penelitian ini rendah (15%). Peneliti telah berusaha melakukan *follow-up* dengan menghubungi responden dengan telpon atau sms kepada sebagian besar responden dan mengirim ulang kuisioner, namun hanya sebagian kecil responden yang bersedia mengisi kuisioner, hal ini mengingat bahwa responden adalah para pejabat sehingga mereka sangat sibuk. Namun demikian *response rate* yang rendah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir, hal ini dibuktikan oleh beberapa peneliti seperti: Van der Stede, Young, dan Chen (2005) yang menemukan rata-rata *response rate* artikel yang diterbitkan di jurnal internasional tentang *survey study* (akuntansi manajemen) hanya sekitar 6%. Selain itu penelitian *survey study* lainnya yang dilakukan oleh Aryani (2009) serta Kalagnanam dan Lindsay (1999) juga rendah – kurang dari 22% dan 13%. Hal tersebut disebabkan karena responden mereka adalah para manajer divisi perusahaan besar yang sangat sibuk.

### Saran

Penelitian serupa dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti: pernyataan-pernyataan dalam kuisioner yang akan dibagikan kepada responden sebaiknya dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi responden, sehingga responden dapat dengan mudah memberikan responnya. Lebih jauh lagi, penyebaran kuisioner sebaiknya di waktu yang tidak terlalu sibuk, yaitu pada bulan Januari – Februari. Sebaiknya penelitian selanjutnya memasukkan variabel lain seperti komitmen dan penelitian ini dapat dijadikan acuan awal Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *governance* sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Anni Y. (2009). "The Effect of Fairness Perception of Performance Measurement in the Balanced Scorecard Environment". *Victoria University*. Disertasi.
- Babbie, Earl. 1990. "Survey Research Methods". Wadsowrth. 2<sup>nd</sup> Edition. USA.
- Beaufort, Viviane de. (2004). "National Sitems or European Harmonization of Corporate Governance? Approach to the Consequences of the Principles during a Takeover Bid in The European Union". ESSEC.
- Bridgman, Peter. (2007). "Performance, Conformance, and Good Governance in the Public Sector". *Chartered Secretaries Australia's Public Sector*.
- Brignall, Stan., Sven, Modell. (2000). "An Institutional Perspective on Performance Measurement and Management in the 'New Public Sector'". *Management Accounting Research*. Vol. 11, pp: 281 – 306. Available online at <http://www.idealibrary.com>
- Chaudhry, Imran Sharid., Shah Nawaz, Malik., Khurram, NK., Shail, Rasool., (2009). "Factor Affecting Good Governance in Pakistan: An Empirical Analysis". *European Journal of Scientific Research*. Vol. 35, No. 3, pp: 337 – 346.
- CIPFA. (2004). "The Independent Commission on Good Governance in Public Services". Good Governance Standard for Public Services.
- Daniri. (2005). "Good Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia". Jakarta. PT Ray Indonesia.
- (2008). "Saatnya Berubah Dengan GCG". *Bisnis Indonesia*. Edisi: 30/3/2008.
- Denis DJ., Kruse TA. (2000). "Managerial Discipline and Corporate Performance". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 7, pp. 209 – 233.



- Diaswati, Mardiasmo., Paul, Barnes., Yuka, Sakurai. (2008). "Implementation of Good Governance by Regional Government in Indonesia: The Challenges". IRSPM XII. Brisbane – Australia. pp. 1 – 36.
- Dilman, A. Don. (2006). "Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method". Wiley. United Kingdom.
- Eisenhardt, K. M. (1985). "Agency and Institutional Explanations of Compensation in Retail Sales". *Academy of Management Journal*.
- (1989). "Agency Theory: An Assessment and Review". *Accounting of Management Review*.
- GASB. (2008). "In the concept of statement No 2". <http://www.gasb.org/st/concepts>. Retrieved on 8/5/2012 at 2.15 am.
- Ghozali, Imam. 2011. "Analisis Multivariate". Universitas Diponegoro. Semarang.
- Greene, Richard. (2009). "Measuring Government Performance to Promote Transparency". The Public Manager – [www.thepublicmanager.org](http://www.thepublicmanager.org). Spring.
- Heracleous, Loizos. (2001). "What is the Impact of Corporate Governance on Organizational Performance". UK: *Blackwell Publishers*.
- Hermalin, BE., Weisbach, MS. (2003). "Board of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economics Literature". *Economic Policy Review*. Federal Reserve Bank of New York. pp. 7 – 26. April.
- Hill, L.W. Charles., Thomas, M. Jones. (1992). "Stakeholder – Agency Theory". *Journal of Management Studies*, 29:2.
- Himmelberg, C., Hubbard, G., Palia, D. (1999). "Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link Between Ownership and Performance". *Journal of Financial Economics*.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic*.
- Kalagnanam, S. S., and R. M. Lindsay. 1999. "The Use of Organic Models of Control JIT Firms: Generalizing Woodward's Findings to Modern Manufacturing Systems". *Accounting, Organizations, and Society* 24 (1), pp: 1 – 30.

- Krina, Loina. (2003). "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi". Jakarta. Sekretariat Good Public Governance BPPN.
- Kouzman, Alexander., Elke, Loffler., Helmut Klages., Nada, Korac-Kakabadse. (1999). "Benchmarking and Performance Measurement in Public Sektors – Toward Learning for Agency Effectiveness". *The International Journal of Public Sektor Management*. Vol. 12, No. 2, pp. 121 – 144.
- Latifah, P Nurul. 2010. "Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?". *Fokus Ekonomi*. Vol, 5 No, 2, pp 85 – 94.
- Lennerfor, Thomas T. (2007). "The Transformation of Transparency on the Act on Public Procurement and the Right to Appeal in the Context of the War on Corruption". *Journal of Business Ethics*. 73:381-390.
- Mardiasmo. (2004). "Akuntansi Sektor Publik". Andi. Yogyakarta.
- (2006). "Perwujudan transparansi dan akuntabilitas public melalui akuntansi sektor public suatu sarana Good Governance". *Jurnal Akutansi Pemerintah*, Vol.2, No. 1, Mei 2006 (pp. 1- 17).
- Messier, W.F., Jr., Glover, S.M., dan D.F. Prawitt. (2006). "Auditing and Assurance Service: A Systematic Approach. 4<sup>th</sup> ED. McGraw-Hill/Irwin: New York, NY.
- Monks, R. A. G. and Minow, N. (2004). "Corporate Governance". Oxford, Blackwell Publishing.
- Mustopadidjaja. (2001). "Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat Mandani". Makalah disampaikan pada Silaknas ICMI 2001.
- Nofianti, Leny. (2009). "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 14, No.2.
- OECD. (1993). "Public Management Development: Survey". OCED pp.7. Paris.
- Olivero, Gerald., Bande, K. Denise., Kopelman, Richard E. (1997). "Executive Coaching as A Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency". *Public Personal Management*. Vol. 26, No. 4. Winter.

- Oyugi, Walter O. (2000). "Decentralization for Good Governance and Development". Regional Development Dialogue. Vol. 21, No. 1. Spring.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/3/2010 Tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian.
- Prasojo, Eko & Teguh, Kurniawan. (2008). "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia". The 5th International Symposium of Jurnal Antropoligi Indonesia.
- Priyantha, Renuka I. (2007). "New Public Personnel Management Reforms at Work in Sri Lanka: A Waddling Effort of Transforming Civil Service?". Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1094309>.
- Quintyn, Marc. (2007). "Governance of Financial Supervisors and Its Effects – A Stocktaking Exercise". SUERF – The European Money and Finance Forum. Vienna.
- Rohman, Abdul. (2007). "Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Propinsi di Jawa Tengah)". UNDIP. Jurnal Maksi. Vol. 7, No. 2, pp. 206 – 220.
- Sachiko, Morita., Zaelke, Durwood. (2007). "Rule of Law, Good Governance, And Sustainable Development". Seventh International Conference on Environmental Compliance and Eforcement.
- Sadjiarto, Arja. (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan". Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 2, pp. 138 – 150.
- Samin, Rumzi. (2011). "Reformasi Birokrasi". Jurnal FISIP UMRAH. Vol. 2, No. 2, pp. 172 – 182.
- Santiso, Carlos. (2001). "Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality". The Georgetown Public Policy Review. Vol. 7, No. 1 fall 2001. pp. 1 – 22.

- Sekaran, Uma. (2006). "Metodologi Penelitian Untuk Bisnis". Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Smismans, S. (2006). "Civil Society and Legitimate European Governance". Northampton, Edward Elgar Publishing.
- Solihin, Dadang. (2007). "Pengukurang Good Governance Index". BAPPENAS.
- Solomon, Jill. Aris, Solomon. (2004). "Corporate Governance and Accountability". John Wiley & Sons Ltd.
- Sulistyo, Joko. (2012). "6 Hari Jago SPSS 17". Yogyakarta : Cakrawala.
- Tuasikal, Askam. (2008). "*Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keaungan Daerah dan Pengelolaan Keuangna Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)*". Finance and Banking Journal. Vol. 10, No.1, pp. 66-88.
- Ulum, Akhmad S. (2011). "Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory". Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 3, No.1, pp. 60 -66.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Van der Stede, W. A., S. M. Young., and C. X. Chen. (2005). "Assessing the Quality of Evidence in Empirical Management Accounting Research: The Case of Survey Studies". *Accounting, Organization, and Society* 30 (7 – 8 ), pp: 655 – 684.
- Watts, Ross I., dan Zimmerman, Jerold L. 1990. "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective". *The Accounting Review*. Vol. 65, No. 1, pp. 131 – 156.
- Wintoki, MB., Linck, JS., Netter, JM., (2010). "Endogeneity and the Dynamics of Internal Corporate Governance". SSRN: <http://ssrn.com>.
- World Bank. (2010). "Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)". retrieved at [http://www.worldbank.org/ifa/rosc\\_cg.html](http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html).
- Wulandari, Ndaruningpuri. (2006). "Pengaruh Indikator Mekanisme *Corporate governance* terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia". Fokus Ekonomi, Vol. 1, No. 2. Pp 120-136.

# **LAMPIRAN** **STATISTIK DISKRIPITIF**

KETERANGAN	N	MIN	MAX	MEAN	Std.
PHUM	77	1.60	4.80	3.1260	.70960
TADM	77	1.89	4.78	3.6156	.61068
KPUM	77	1.50	4.75	3.4286	.71619
TRAN	77	1.00	5.00	2.8701	.91910
PROP	77	1.25	5.00	3.5292	.86979
PROF	77	1.50	5.00	3.3571	.65698
AKUN	77	2.60	5.00	3.9610	.52919
STHR	77	2.15	4.62	3.3713	.52695
TPKS	77	2.17	4.39	3.3907	.49304
VALID N	77				

## **UJI REGRESI (STHR) – MODEL I** **MODEL SUMMARY**

Model	R	R Square	Adj R Square	Std.
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.314	.43655

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Predictors: (Constant), AKUN, TRAN, PROF, KPHUM, PHUM, PROP, TADM

## **ANOVA <sup>b</sup>**

Model	Sum of	Df	Mean	F	Sig
1 Regression	7.954	7	1.136	5.962	.000 <sup>a</sup>
Residual	13.150	69	.191		
Total	21.104	76			

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Predictors: (Constant), AKUN, TRAN, PROF, KPHUM, PHUM, PROP, TADM

Dependent variable: STHR

COEFFICIENTS<sup>a</sup>

MODEL I – STHR

Model	Unstd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.536	.402		3.815	.000
PHUM	.159	.118	.213	1.341	.184
TADM	.008	.141	.009	.058	.954
KPUM	.194	.098	.264	1.988	.051
TRAN	.033	.070	.058	.474	.637
PROP	.042	.097	.069	.429	.669
PROF	.086	.137	.108	.630	.531
AKUN	.025	.131	.025	.189	.851

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dependent variable: STHR

UJI REGRESI (STHR) – MODEL II  
MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adj R Square	Std.
1	.759 <sup>a</sup>	.577	.534	.33662

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Predictors: (Constant), AKUN, TRAN, PROF, KPHUM, PHUM, PROP, TADM

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of	Df	Mean	F	Sig
1 Regression	10.656	7	1.522	13.434	.000 <sup>a</sup>
Residual	7.819	69	.113		
Total	18.474	76			

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Predictors: (Constant), AKUN, TRAN, PROF, KPHUM, PHUM, PROP, TADM

Dependent variable: TPKS

COEFFICIENTS<sup>a</sup>

MODEL II – TPKS

Model	Unstd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.301	.310		4.191	.000
PHUM	.109	.091	.158	1.201	.234
TADM	.123	.108	.153	1.139	.259
KPUM	.182	.075	.265	2.426	.018
TRAN	.050	.054	.094	.935	.353
PROP	.101	.075	.177	1.340	.185
PROF	.070	.106	.093	.663	.510
AKUN	-.017	.101	-.019	-.173	.863

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Dependent variable: TPKS

## **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Accountability Disclosure* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten**

**MORINA ROOSYE LIMPO\***

**RUDI ZULFIKAR**

**DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK**

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Abstract :** *This purpose of this study is to examine the influence of local government characteristics on accountability disclosure in Banten province of municipalities in 2009-2011. Local government characteristics are identified as size (size of local government), wealth (wealth of local government), size of parliament, leverage, and intergovernmental revenue. Accountability disclosure is measured using scoring of index Local Government Accountability (LGA) who modified before by (Perwita, 2010) and adopted to Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) in Indonesian financial statements standart. Total sample as many as 8 municipalities in Banten provinces, chosen by using purposive sampling. This study uses secondary data from the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) in the form of annual financial reports in 2009-2011. Hypothesis testing using SPSS software (Statistical Package for Social Science) version 20.0. The results prove that the size (size of local governments), and intergovernmental revenue has no significant effect on accountability disclosure. Wealth (wealth of local government) have a positive significant influence on accountability disclosure, while size of parliament, and leverage have a negative significant influence on accountability disclosure.*

**Keywords:** *Mandatory disclosure, Local Government Characteristics, Governmental Accounting Standards (SAP), and Accountability Disclosure.*

---

\* Corresponding author: morina.willimpo21@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah, yang diproksikan dalam ukuran (*size*) daerah, kemakmuran (*wealth*) daerah, ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat *accountability disclosure* pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Banten untuk mengukur tingkat pengungkapan di dalam laporan tahunan dengan menggunakan indeks *Local Government Accountability (LGA)* yang sudah dimodifikasi sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, yaitu *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tahun 2010 menyatakan tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pengguna laporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan bebas yang dilakukan manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut, sedangkan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) pengungkapan yang didasarkan atas ketentuan dan standar yang berlaku.

Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan yang diharuskan dalam laporan keuangan yang diatur oleh pemerintah atau badan otoriter. Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Pengungkapan yang terdapat di dalam SAP merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang harus dibuat oleh pemerintah. Tingkat kelengkapan pengungkapan wajib di Indonesia masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh, yaitu rata-rata sebesar 52,57% (Mandasari, 2009), 30,85% (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011), dan 35,45% (Martani dan Lestiani, 2012).

Beberapa penelitian mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan dilakukan oleh Abu Bakar dan Saleh (2011); Herawaty dan Hoque (2008); dan Blanco, Lennard, dan Lamontagne (2011). Abu Bakar dan Saleh (2011) meneliti tingkat pengungkapan akuntabilitas di dalam laporan tahunan *Federal Statutory Bodies (FSB)* di Malaysia, dan hasil penelitian menunjukkan terdapat 53 item dari (115 item) yang diungkapkan hanya 45,9% dari pengungkapan keseluruhan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan akuntabilitas di dalam laporan tahun 2008 di *FSB*. Herawaty dan Hoque (2008) menganalisis 20 pengungkapan sukarela dan 47 pengungkapan wajib di 56 laporan keuangan departemen pemerintah tahun 2005 dan 2006 di Australia, dengan menggunakan indeks pengungkapan untuk mengukur tingkat pengungkapan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela lebih tinggi dengan nilai 65% dibandingkan dengan pengungkapan wajib yang hanya 58%. Blanco *et al.* (2011) melakukan penelitian terhadap tingkat pengungkapan di dalam laporan keuangan pemerintah kota di Kanada pada tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan indeks pengungkapan untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas informasi yang dipublikasikan. Hasil menunjukkan indeks pengungkapan sangat rendah hanya 35% pada tahun 2003 dan 38% pada tahun 2005. Jadi, dari hasil penelitian dari Negara Australia, Kanada, dan

Malaysia nilai pengungkapan wajib masih sangat rendah, dengan dibuktikan belum adanya Negara yang mengungkapkan *mandatory disclosure* secara penuh.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan di dalam pemerintah daerah dilakukan oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010), dan Perwita (2010). Hasil penelitian Suhardjanto *et al.* (2010) menunjukkan nilai rerata pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia tahun 2006 adalah sebesar 51,56%. Hal ini dibuktikan, BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2. Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2006-2011 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK semakin berkurang dan sebaliknya, opini tidak wajar (TW), bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 mulai menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, tetapi hal ini masih dinilai kurang bila dibandingkan dengan jumlah LKPD yang diaudit oleh BPK.

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2012 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan masih banyaknya entitas yang mendapatkan opini WDP dan TMP. Adapun dari delapan entitas di pemerintah daerah di provinsi Banten hanya tiga entitas yang mendapat opini WTP, yaitu: kabupaten Tangerang dalam empat tahun berturut-turut, kota Tangerang dalam lima tahun berturut-turut, dan kota Tangerang Selatan dua tahun berturut-turut. Seperti yang dikutip di dalam PSAP No 1 bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara penilaian pertanggungjawaban suatu daerah, dan alat kendali untuk meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan masih rendahnya nilai pengungkapan akuntabilitas pemerintah daerah di provinsi Banten dengan dibuktikan masih banyaknya opini WDP dan TMP di dalam LKPD. Masih banyaknya permasalahan pengelolaan akun kas, persediaan, investasi permanen dan non-permanen di dalam LKPD entitas yang mendapat opini WDP maupun TMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa entitas tersebut belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian terdahulu menyatakan pengungkapan di dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ingram (1984) *coalition of voters*, *administrative selection process*, dan *managemnt incentive* yang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan di pemerintahan di Amerika Serikat, Laswad *et al.* (2005) *leverage*, *municipal wealth*, dan *press visibility*, Retnoningsih (2009) karakteristik parlemen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia, Suhardjanto *et al.* (2010) karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. Perwita (2010) menyatakan kinerja keuangan berpengaruh terhadap *accountability disclosure*.

Penelitian Suhardjanto *et al.* (2010) menggunakan dua komponen organisasi, yaitu struktur organisasi yang diproksikan dengan *municipality size*, *municipality wealth*, dan lingkungan eksternal dengan *intergovernmental revenue*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *intergovernmental revenue* (jumlah dana perimbangan daerah) yang berpengaruh positif terhadap kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah. sedangkan *size* (ukuran daerah) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh Hilmi dan Martani (2012) bahwa *size* (ukuran daerah) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Patrick (2007) yang membuktikan bahwa *size* (ukuran daerah), dan *intergovernmental*

*revenue* merupakan karakteristik yang berpengaruh positif terhadap penerapan inovasi administratif GASB 34 (*Government Accounting Standards Board Statement No. 34*).

Menurut Robbins dan Austin (1986) Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Patrick (2007) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Ingram (1984) menyatakan kemakmuran daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pemerintah provinsi. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dan dapat meningkat pula pengungkapan di dalam laporan keuangan. Hal tersebut di dukung dengan hasil penelitian Hilmi dan Martani (2012) dan Liestiani (2008) bahwa kemakmuran (*wealth*) mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitan berbeda yang dibuktikan Suhardjanto *et al.* (2010) yang menyatakan *wealth* (kemakmuran daerah) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia.

Hasil penelitian Retnoningsih (2009) dan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. DPRD mempunyai peranan dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah untuk dapat mengontrol kebijakan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Semakin besar jumlah anggota DPRD maka pengawasan terhadap laporan keuangan akan semakin besar dan tingkat pengungkapan

akan semakin besar pula. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Suhardjanto, Hilda, Retnoningsih, Rusmin, dan Brown (2010) bahwa *size of parliament* (ukuran legislatif) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia.

Menurut Ismoyo (2011) faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan adalah karakteristik keuangan yang diproksikan dengan *leverage*. Hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah di internet. Semakin tinggi rasio *leverage* maka akan menyediakan informasi secara lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditor jangka panjang, sehingga entitas akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh Naim dan Rakhman (2000) dan Perwita (2010) yang membuktikan bahwa rasio *leverage* mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Perwita (2010) yang menggunakan indeks *LGA* yang dimodifikasi sesuai SAP yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, pertama, penelitian ini di dasari oleh penggunaan variabel dependen, yaitu indeks *LGA* yang dimodifikasi yang mengacu dengan SAP. Kedua, konteks penelitian ini hanya di pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten, dimana penelitian sebelumnya di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib antar pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan petunjuk tentang kondisi pemerintah pada suatu masa laporan.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Teori Agensi di Sektor Publik

Menurut Zimmerman (1977) dalam Hilmi dan Martani (2012) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *prinsiples* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1978). Hubungan keagenan terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agent dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan *monitoring* oleh rakyat atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Laporan keuangan dan pengungkapan akuntabilitas kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency problem*. Dalam konsepsi pemberian informasi yang akuntabel kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan, agar terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

## 2.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No 71/2010 menyebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Terdapat 11 PSAP dalam SAP. Dengan diberlakukan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu; memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami berbagai pihak terutama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menjalankan tugasnya (PP No. 71/2010).

### ***2.3 Accountability Disclosure***

Tetlock (1984) mendefinisikan *accountability* sebagai bentuk dorongan psikologis yang membuat seseorang yang mencoba untuk memperhitungkan semua tindakan dan keputusan yang diambil untuk lingkungan. Menurut Tan dan Alison (1999), seseorang dengan *accountability* yang tinggi dengan memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh pemimpin dibandingkan dengan seseorang yang memiliki *accountability* yang rendah.

Pengungkapan merupakan informasi yang disajikan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya, seperti: laporan catatan, peristiwa sesudah tanggal laporan, analisis manajemen mengenai operasi pada tahun yang akan datang, peramalan keuangan, operasi serta laporan keuangan tambahan dan informasi lain di luar *historical cost* (Subiyantoro, 1997).

## 2.4 Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah pemerintah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain. Mutu dan luas pengungkapan laporan keuangan masing-masing berbeda. Perbedaan ini dapat terjadi karena karakteristik, kebijakan, budaya, filosofi manajemen masing-masing entitas juga berbeda (Wardhani, 2009).

Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) Karakteristik pemerintah daerah dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor kepatuhan pengungkapan wajib. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan model Roger dalam mengemukakan karakteristik, dan penerapan inovasi administrasi sebagai suatu perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia. Patrick (2007) menggunakan struktur organisasi yang diproksikan dengan spesialisasi pekerjaan, *administrative intensity*, diferensiasi fungsional, ketersediaan *slack resources*, dan ukuran (*size*) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan *size* (ukuran daerah) yang diproksikan dengan total aset, *wealth* (kemakmuran daerah) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity* dan *intergovernmental revenue* diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.

*Size* (ukuran daerah) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi (Patrick, 2002). Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan



mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi besar akan lebih ketat dalam menerapkan aturan, salah satunya mengenai pengungkapan wajib akuntansinya.

*Wealth* (kemakmuran daerah) menurut Abdullah (2004) dalam Sumarjo (2010) adalah kekayaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ingram (1984) menyatakan kemakmuran daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pemerintah provinsi. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dan dapat meningkat pula pengungkapan di dalam laporan keuangan.

DPRD mempunyai peranan dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah untuk dapat mengontrol kebijakan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Semakin besar jumlah anggota DPRD maka pengawasan terhadap laporan keuangan akan semakin besar dan tingkat pengungkapan akan semakin besar pula.

Suatu entitas yang memiliki *leverage* yang besar artinya memiliki tingkat resiko yang besar pula. Penelitian yang dilakukan Choiriyah (2010) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* merupakan perbandingan antara jumlah total hutang dengan jumlah total ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Ismoyo, 2011). Perwitasari (2010) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

Pada negara berkembang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau

disebut *intergovernmental Revenue* (Kelly, 2010) dalam Sumarjo (2010). Penelitian yang dilakukan Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### *Size (Ukuran Daerah)*

Patrick (2007) menyebutkan ukuran organisasi (*size*) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi. Menurut Suhardjanto *et al* (2010) ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Schmalensee (1989) menemukan bahwa entitas yang lebih besar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada entitas yang kecil. Perwita (2010) memproksikan ukuran daerah dengan aset yang dimiliki pemda, menyatakan semakin besar aset suatu pemda, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Perwita, 2010) menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Hilmi dan Martani (2012) dan Suhardjanto *et al* (2010) bahwa ukuran daerah (*size*) tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. Dengan demikian semakin besar asset diharapkan semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>1</sub>: *Size* (ukuran daerah) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan**

### ***Wealth* (Kemakmuran Daerah)**

Kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Abdullah, 2004). PAD menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholders* nya bahwa pemda telah menghasilkan kinerja yang tinggi.

Penelitian oleh Ingram (1984); Martani dan Lestiani (2012); dan Hilmi dan Martani (2012) menemukan bahwa ada hubungan positif antara kekayaan tingkat daerah dan pengungkapan tingkat *municipals*. Ingram (1984) menyatakan bahwa manajemen intensif yang diukur oleh kekayaan dipengaruhi tingkat pengungkapan pemerintah daerah. Selain itu, Robbins dan Austin (1986) direplikasi penelitian Ingram (1984) dan diperoleh hasil yang sama. Laswad *et al.* (2005) juga menemukan sebuah hubungan antara kekayaan kota dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Suhardjanto *et al.* (2010) bahwa kemakmuran daerah (*municipality wealth*) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. Dengan demikian semakin besar kemakmuran suatu daerah diharapkan dapat melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>2</sub>: *Wealth* (kemakmuran daerah) berpengaruh terhadap pengungkapan**

### **Ukuran Legislatif**

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). Lembaga

legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gilligan dan Matsusaka (2001) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota legislatif terhadap kebijakan pemasukan dan pengeluaran suatu pemerintah daerah. Hasil penelitian Yulianingtyas (2010) menunjukkan jumlah anggota DPRD mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari (2010) bahwa *size of parliament* (ukuran legislatif) tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. Dengan demikian semakin besar ukuran legislatif diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah dengan lebih baik sehingga nilai *accountability disclosure* akan lebih berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

### **H<sub>3</sub>: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.**

#### ***Leverage***

Kusumawardani (2012) mengungkapkan bahwa *leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Menurut Wild *et al.* (2005) *leverage* dapat diukur dengan *total debt ratio*, *total debt equity*, *long-term debt to equity ratio*.

Marwata (2001) mengatakan teori keagenan memprediksi bahwa rasio dengan *leverage* yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membuat

pengungkapan dalam laporan keuangan dalam rangka untuk memberikan keyakinan terhadap pengguna laporan keuangan. Naim dan subiyantoro (1996), serta Dahawy (2009) menyatakan bahwa *debt equity ratio* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian Perwita (2010) menunjukkan bahwa *leverage* mempengaruhi indeks pengungkapan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian semakin besar *leverage* suatu daerah dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.**

#### ***Intergovernmental Revenue***

*Intergovernmental Revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam, 2001). Transfer tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto *et al.*, 2010). Patrick (2007) menggunakan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *intergovernmental revenue* dengan kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah.

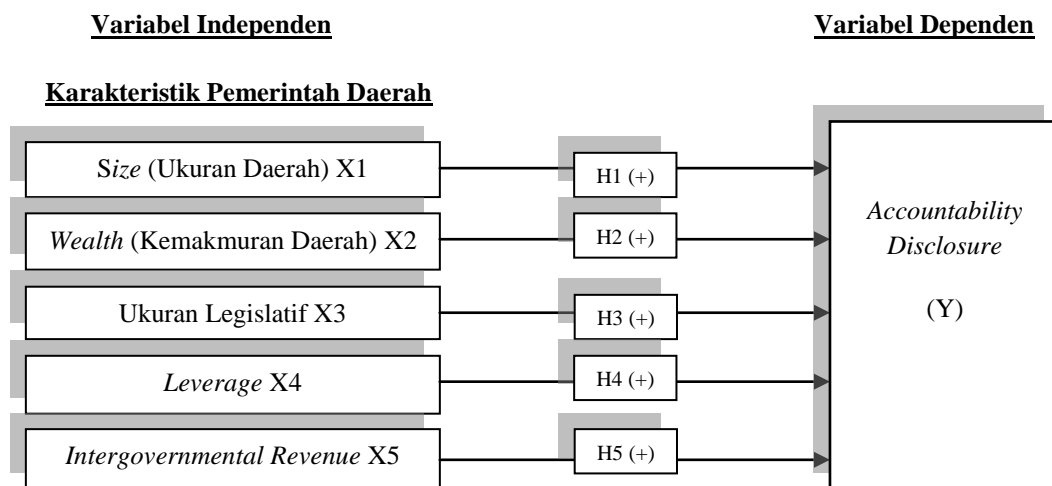
Robbins dan Austin (1986) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota. Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh Suhardjanto *et al.* (2010) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia.

Berbeda dengan hasil penelitian Hilmi dan Martani (2012) bahwa *intergovernmental revenue* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib di Indonesia. Dengan demikian semakin besar tingkat ketergantungan diharapkan semakin besar pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis :

**H<sub>5</sub>: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.**

### 3. Model Penelitian

#### Kerangka Pemikiran Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Accountability Disclosure Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



Hipotesis diatas diuji dalam sebuah model regresi berikut ini.

$$LGA = \alpha + \beta_1 BSIZE + \beta_2 WLTH + \beta_3 DPRD + \beta_4 LVRAGE + \beta_5 IR + e$$

<i>LGA</i>	Tingkat pengungkapan pertanggungjawaban keuangan dan non-keuangan LKPD	Skoring indeks dengan skala 1-5
<i>Size</i>	Jumlah asset pemerintah daerah	Asset = Total Asset
<i>Wealth</i>	Jumlah kekayaan pemerintah daerah	Wealth = Jumlah PAD
<i>DPRD</i>	Jumlah anggota legislatif	DPRD = Jumlah Anggota Legislatif
<i>Leverage</i>	Jumlah total hutang dengan total ekuitas dana pemerintah daerah	$Leverage = \frac{Debt}{Equity}$
<i>IR</i>	Tingkat ketergantungan pemerintah daerah	$IR = \frac{Jml\ pendapatan}{Jml\ dana\ perimbangan}$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2009-2011. Terdapat 8 Kabupaten/Kota. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Data mengenai LKPD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten di dapat dari BPK. Untuk proses *scoring* indeks *LGA*, menggunakan kuesioner terhadap beberapa responden yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk menguji kualitas data pengujian hipotesis. Analisis statistik yang dilakukan adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokolerasi.

#### 4. Analisis Data

##### 4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk variabel *Size* (ukuran daerah) terendah adalah sebesar 45.310.495.830 diraih oleh pemerintah daerah kota Serang pada tahun 2009. Sedangkan *Size* (ukuran daerah) tertinggi

adalah 5.965.887.977.129,65 diraih oleh pemerintah daerah kabupaten Tangerang, yaitu pada tahun 2009. Rata-rata *Size* (ukuran daerah) dari tahun 2009 sampai 2011, yaitu 2.326.059.256.903,955. Nilai standar deviasi dari rata-rata sebesar 1.722.437.239.082,1418 yang menunjukkan tidak terjadinya perubahan *Size* (ukuran daerah) tiap tahunnya.

*Wealth* (kemakmuran daerah) terendah adalah pemerintah daerah Kota Serang sebesar 25.098.799.362 terjadi pada tahun 2010. Sedangkan *Wealth* (kemakmuran daerah) tertinggi adalah pemerintah daerah kota Cilegon sebesar 858.856.748.326 yaitu pada tahun 2011. Rata-rata nilai *Wealth* (kemakmuran daerah) dari tahun 2008 sampai 2011, yaitu sebesar 175.441.225.778,8750. Sedangkan nilai standar deviasi dari rata-rata sebesar 216.866.076.791,25490 yang menunjukkan bahwa, selama periode pengamatan kondisi *Wealth* (kemakmuran daerah) mengalami perubahan tiap tahunnya.

Anggota legislatif (DPRD) terendah adalah pemerintah daerah kota Cilegon sebesar 30 orang. Kemudian jumlah anggota legislatif tertinggi adalah pemerintah daerah kabupaten Pandeglang sebesar 85 orang. Rata-rata nilai jumlah anggota legislatif (DPRD) tahun 2009 sampai 2011 adalah 51,25 dengan nilai standar deviasi dari rata-rata sebesar 14,61 yang menunjukkan bahwa selama periode pengamatan jumlah anggota legislatif mengalami perubahan setiap tahunnya.

*Leverage* terendah adalah kota Tangerang sebesar 0,001 terjadi pada tahun 2011. Kemudian nilai tertinggi *Leverage* adalah kota Serang, sebesar 0,062 terjadi pada tahun 2009. Rata-Rata nilai *Leverage* tahun 2009-2011 adalah 0,012 dengan nilai standar deviasi dari rata-rata sebesar 0,022 yang menunjukkan bahwa selama periode pengamatan nilai *Leverage* tidak mengalami perubahan setiap tahunnya. Nilai *Intergovernmental Revenue* terendah adalah kabupaten Pandeglang, sebesar 0,03827 terjadi di tahun 2010 dan nilai *Intergovernmental Revenue* tertinggi adalah kota Tangerang Selatan, sebesar 160150,93



pada tahun 2009. Rata-rata nilai *Intergovernmental Revenue* tahun 2008 sampai 2011 adalah 6673,26 dengan nilai standar deviasi dari rata-rata sebesar 32690,61 yang menunjukkan bahwa, selama periode pengamatan *Intergovernmental Revenue* tidak mengalami perubahan setiap tahunnya.

Total indeks *LGA* yang dimodifikasi sebesar 985 adalah kabupaten Pandeglang dan nilai tertinggi sebesar 1040 adalah kota Tangerang. Untuk item indeks *LGA*, nilai terendah sebesar 6,30% pada item Laporan Kinerja Keuangan dan nilai tertinggi sebesar 6,99% pada item Laporan Walikota. Hal ini seperti terlihat pada gambar grafik 4.1.

Hasil uji asumsi klasik yaitu normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* dan signifikan dari data yang telah diolah. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.767 dan signifikan pada 0.599 atau 59.9%, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal karena signifikannya berada diatas 0,05 atau 5%. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai *Tolerance* < 0,10. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Dari hasil uji heteroskedisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW pada model regresi sebesar 1.981, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2.

## 4.2 Analisis Regresi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *koefisien determinasi* nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,549. Hal ini berarti bahwa 54,9% Variabel Independen dapat menjelaskan Variabel Dependen sebesar 54,9% dan sisanya 45,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Tabel ANOVA terlihat nilai  $F = 6.598$  dengan signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Nilai signifikan pengujian lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , maka variabel *size* (ukuran daerah), *wealth* (kemakmuran daerah), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berkorelasi dengan variabel *Accountability Disclosure*.

## 5. Pembahasan dan Kesimpulan

### 5.1 Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama dengan tingkat signifikan sebesar 0,221 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis pertama menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Hal ini menunjukkan *size* (ukuran daerah) tidak berpengaruh terhadap *accountability disclosure*, hal ini dikarenakan dengan adanya pemerintah daerah yang memiliki *size* yang besar, pemerintah daerah tersebut mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas, karena *size* yang besar akan diikuti dengan resiko penyalahgunaan yang besar pula (Kusumawardhani, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto *et al.* (2010), Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), dan Hilmi dan Martani (2012) bahwa *size* (ukuran daerah) yang diproksikan dengan total asset secara parsial tidak berpengaruh. Berbeda dengan hasil penelitian Patrick (2007) dan Perwita (2010) yang menyatakan *size* (ukuran daerah) berpengaruh terhadap pengungkapan.

Pengujian hipotesis kedua dengan tingkat signifikan sebesar 0,022 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis kedua menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Hal ini menunjukkan *wealth* (kemakmuran daerah) berpengaruh terhadap *accountability disclosure*, artinya semakin besar kekayaan suatu daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) , Laswad *et.al.* (2005), serta Martani dan Lestiani (2012) dan Hilmi dan Martani (2012).

Pengujian hipotesis ketiga dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis kedua menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Hal ini menunjukkan ukuran legislatif berpengaruh tetapi negative terhadap *accountability disclosure*, artinya banyaknya jumlah anggota legislatif akan menurunkan cara kerja dalam melakukan pengawasan keuangan daerah sehingga tidak dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Anggota dewan akan lebih cenderung berperan sebagai dirinya sendiri dibandingkan membawa aspirasi masyarakat atau institusi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah anggota legislatif maka akan menurunkan nilai *accountability disclosure* di pemerintah daerah. Hal tersebut di dukung dengan hasil *scoring* indeks LGA, bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memiliki jumlah anggota legislatif tertinggi sebanyak 85 orang dan memiliki nilai *accountability disclosure* terendah dengan nilai 985 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian di dukung dengan penelitian yang dilakukan Suhardjanto, Rusmin, dan Mandasari (2010) yang membuktikan

bahwa *size of parliament* (jumlah anggota dewan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib di Indonesia.

Pengujian hipotesis keempat dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis kedua menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Hal ini menunjukkan ukuran legislatif berpengaruh tetapi negatif terhadap *accountability disclosure*, artinya semakin besar *leverage* semakin menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pendapat Sumarjo (2010) menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk kinerja entitas tersebut atau sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan, dengan besarnya hutang yang dimiliki suatu daerah maka akan membuat rencana pembangunan suatu daerah tersebut akan terhambat, dikarenakan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan akan berkurang disebabkan pemerintah harus membayar hutang kepada pihak eksternal, dan membuat kinerja pemerintah daerah tersebut buruk. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk, sehingga pengungkapan pertanggungjawabannya semakin rendah. Dapat disimpulkan bahwa besar *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah akan menurunkan nilai *accountability disclosure* pemerintah daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil *scoring* indeks *LGA*, bahwa kota Serang memiliki nilai *leverage* tertinggi sebesar 0,0625025961 di tahun 2009 dan memiliki nilai *accountability disclosure* terendah ketiga dengan nilai 1008 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Pengujian hipotesis kelima dengan tingkat signifikan sebesar 0,811 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis pertama menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Hal ini menunjukkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap *accountability disclosure*, artinya di dalam era desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat. Jika ada monitoring tersebut tidak digunakan dalam menentukan anggaran dana perimbangan di daerah, sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Insentif pelaporan keuangan baru diberikan mulai tahun 2010, namun lebih diarahkan pada pencapaian opini bukan kualitas pengungkapan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ingram (1984), Liestiani (2008), dan Hilmi dan Martani (2012) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

## 5.2 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah, yang diproksikan dalam ukuran (*size*) daerah, kemakmuran (*wealth*) daerah, ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat *accountability disclosure* pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Banten untuk mengukur tingkat pengungkapan di dalam laporan tahunan dengan menggunakan indeks *Local Government Accountability (LGA)* yang sudah dimodifikasi sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, yaitu *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. Serta mengarahkan penelitian akademik terhadap pengungkapan pertanggungjawaban keuangan dan non-keuangan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di setiap entitas pemerintah daerah

di Provinsi Banten, karena pengungkapan pertanggungjawaban di dalam LKPD merupakan fenomena yang mempunyai andil yang cukup signifikan di pemerintah daerah untuk penilaian kinerja suatu entitas daerah (PP RI No 71, 2010). Hal ini menjadikan *accountability disclosure* sebagai objek yang menarik untuk diteliti.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai indeks *LGA* yang paling tertinggi yang diungkapkan di LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah item Laporan Walikota 6,99%, dan item terendah indeks *LGA* yang diungkapkan adalah Laporan Kinerja Keuangan 6,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pengungkapan keuangan di LKPD Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Banten.

Hasil pengujian menemukan bahwa dari kelima variabel tersebut, hanya variabel *wealth* (kemakmuran daerah) yang diukur dengan jumlah PAD pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *accountability disclosure* di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Variabel *size* (ukuran daerah) yang diukur dengan total asset pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* yang diukur dengan jumlah pendapatan dan jumlah dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap *accountability disclosure*, sedangkan ukuran legislatif yang diukur dengan jumlah anggota legislatif dan *leverage* yang diukur dengan total hutang dan total dana ekuitas berpengaruh tetapi negatif terhadap *accountability disclosure*.

### 5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian dan saran berikut ini yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, Penelitian ini hanya terfokus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti Pemerintah Daerah di Provinsi

lainya di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data *annual report* dari tahun 2009-2011, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data *annual report* sampai tahun terbaru. Ketiga, untuk responden pengisian *scoring* indeks *LGA* peneliti hanya mengambil responden para staff PNS dan Non-PNS di bidang Akuntansi dan Aset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Penelitian selanjutnya untuk menjadikan Kepala Dinas, Kabag, dan Kasubbag sebagai responden *scoring* indeks *LGA*, khususnya untuk item Laporan Walikota, agar jawaban hasil responden bisa terarah.

## Daftar Referensi

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Abu Bakar, N. B., dan Saleh, Z. 2011. *Disclosure of Accountability Information in Public Sector: The Case of Malaysian Federal Statutory Bodies*. Working Paper Series.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T, and Zhang, Jean X. 2010. *An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context*. Working Paper Series. SSRN August.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I*. Diakses melalui [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Diakses 12 Desember 2012.
- Bastian, I. 2005. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Black, B. S, H. Jang, dan W. Kim. 2003. *Does Corporate Governance Affect Firm Value? Evidence From Korea*. August 5<sup>th</sup>. Diakses melalui: [www.papers.ssrn.com](http://www.papers.ssrn.com).
- Blanco, H., Lennard, J., and Lamontagne, Sylvain. 2011. *Annual Reporting and Accountability by Municipalities in Canada: An Empirical Investigation*. Accounting Perspectives. Canadian Academic Accounting Association. Vol 10 No 3.
- Cohen, S and N Kaimenakis. 2008. *An Empirical Investigation of Greek Municipaities' Quality of Financial Reporting*. Working Paper Series.
- Damanpour, F. (1991). *Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators*. Academy of Management Journal, 34, 3, 555-590.
- Evans, J., Patton, J., 1987. *Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting*. Journal of Accounting Research 25 (Supplement), 130-158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, dan Nyoto, Harryanto. (2011). *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review Of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70.
- Fuad, Budi. (2012). Kejati Selidiki Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah. [http:// TangerangNews.com](http://TangerangNews.com). Diakses 30 Januari 2013
- Gilligan, Thomas. W., dan Matsuaka, John. G. 2001. *Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20<sup>th</sup> Century*. National Tax Journal. Vol. 54:58-82.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Abdul, Hendri, Spto, dan inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian Keuangan Akutansi Sektor Publik II Badan Litbang Depdagri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Hilmi, Amirudin Zul, dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi IX Banjarmasin.
- Ingram, Robert W. 1984. *"Economic Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices"*. Journal of Accounting Research. Vol. 22 No. 1 pp 126-144.



- InfoKorupsi.com. (2012). Dugaan Korupsi APBD Banten: Kejati Didesak Tuntaskan Temuan BPK. <http://InfoKorupsi.com>. Diakses 30 Januari 2013.
- Ismoyo, Rudi. 2011. *Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah dan Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Jensen, M, Meckling W. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". Journal of Financial Economics. Vol. 3: 305-60.
- Kelly, Roy. 1999. *Intergovernmental Revenue Allocation Theory and Practice: an Application to Nepal*. Asian Journal of Public Administration Vol. 21 No. 1: 86-113. June 1999.
- Kusumawardani, Media. 2012. "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". Accounting Analysis Journal AAJ 1(1). Agustus 2012.
- Laswad, Fawzi, Fisher Richard and Oyelere, Peter. 2005. "Determinant of Voluntary internet Financial Reporting by Local Government Authorities". Journal of Accounting and Public Policy. Vol.24 pp 101-121.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akutansi Pemerintah, Vol 2 No. 1. Indonesia.
- Martani, Dwi., dan Lestiani, Annisa. 2012. *Disclosure in Local Government Financial Statements: The Case of Indonesia*. Global Review of Accounting and Finance. Vol 3 No, 1: 67-84.
- Moe, T. M. (1984). *The New Economics of Organization*. American Journal of Political Science 28 (5): 739-777.
- Mustikarini, Widya Astuti, dan Fitriasari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi IX Banjarmasin.
- Naim, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15: 70-82
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organization Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvavania: The Pennsylvania State University.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Robbins, Walter A & Austin, Kenneth R 1986, 'Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure', *Journal of Accounting Research*, vol.24, no. 2, pp. 412-421.
- Sadjiarto, Adjie. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 2, Nopember 2000: 138-150.
- Schmalensee, R. 1989. *Intra-Industry Profitability Differences in US Manufacturing*. Journal of Industrial Economics Vol 37: 337-357.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis"*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidance From Indonesian Municipalities*. Journal Public Policy. January 2010.
- Suhardjanto, D, Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Influence of Parliament Characteristics Toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian Publikasi Internasional LP2M UNS.
- Suhardjanto, D. Hartoko, dan Yulianingtyas, Rena Rukmita, 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8 No. 1.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Winarna, J dan Murni, S. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Univeresitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Zimmerman, Jerold L. 1977. "The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives". *Journal of Accounting Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions*. pp 107-144.

## Lampiran I

### Sampel Pemerintah Daerah 2009-2011

No	Nama Pemerintah Daerah
1.	Kabupaten Lebak
2.	Kabupaten Pandeglang
3.	Kabupaten Serang
4.	Kabupaten Tangerang
5.	Kota Cilegon
6.	Kota Serang
7.	Kota Tangerang
8.	Kota Tangerang Selatan

## Lampiran II

### Hasil Output SPSS

### Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE (dalam milyar rupiah)	24	45,31	5965,88	2326,05	1722,43
WLTH (dalam milyar rupiah)	24	25,09	858,85	175,44	216,86
DPRD	24	30	85	51,25	14,61
LVRG	24	,001	,062	,012	,022
IR	24	0,03827	160150,93	6673,26	32690,61
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2013)

### Hasil Uji Normalitas

### Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00987868
	Absolute	,157
Most Extreme Differences	Positive	,157
	Negative	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		,767
Asymp. Sig. (2-tailed)		,599

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,913	,084		82,461	,000		
1 SIZE	-,003	,002	-,226	-1,268	,221	,617	1,621
WEALTH	,007	,003	,444	2,497	,022	,619	1,615
DPRD	-,029	,009	-,469	-3,117	,006	,867	1,153
LEVERAGE	-,002	,001	-,327	-2,306	,033	,975	1,026
IR	,000	,001	,039	,242	,811	,771	1,296

a. Dependent Variable: LGA

### Hasil Uji Heterokedastisitas-Uji Glejser

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,034	,050		,690	,499
1 SIZE	,000	,001	,040	,146	,886
WEALTH	-,001	,002	-,137	-,499	,624
DPRD	-,004	,006	-,167	-,718	,482
LEVERAGE	-,001	,000	-,337	-1,541	,141
IR	,000	,001	-,113	-,461	,651

a. Dependent Variable: ABSUT

### Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,804 <sup>a</sup>	,647	,549	.01117	1,981

a. Predictors: (Constant), IR, LEVERAGE, WEALTH, DPRD, SIZE

b. Dependent Variable: LGA

### Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,004	5	,001	6,598	,001 <sup>b</sup>
Residual	,002	18	,000		
Total	,006	23			

a. Dependent Variable: LGA

b. Predictors: (Constant), IR, LEVERAGE, WEALTH, DPRD, SIZE

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,913	,084		82,461	,000
	SIZE	-,003	,002	-,226	-1,268	,221
	WEALTH	,007	,003	,444	2,497	,022
	DPRD	-,029	,009	-,469	-3,117	,006
	LEVERAGE	-,002	,001	-,327	-2,306	,033
	IR	,000	,001	,039	,242	,811

a. Dependent Variable: LGA

### Hasil Uji Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 <sup>a</sup>	,647	,549	.01117

a. Predictors: (Constant), IR, LEVERAGE, WEALTH, DPRD, SIZE

b. Dependent Variable: LGA

**Tabel 1.2**  
**Opini LKPD Tahun 2006-2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**  
**(Kabupaten dan Kota) di Indonesia**

Pemda Tahun	Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Σ	WTP	WDP	TW	TMP	Σ
2006	2	236	21	85	344	1	66	3	16	86
	5%	83%	4%	8%	100%	3%	90%	3%	4%	100%
2007	1	201	45	103	350	2	61	11	12	86
	1%	57%	13%	29%	100%	2%	71%	13%	14%	100%
2008	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	2%	63%	10%	255%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010*)	15	200	10	35	260	11	51	2	6	70
	6%	77%	4%	13%	100%	16%	73%	3%	8%	100%
2010**)	16	252	23	103	394	12	67	3	11	93
	4%	64%	6%	13%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011 ***)	36	240	4	33	313	21	60	1	3	85
	12%	76%	1%	11%	100%	25%	71%	1%	4%	100%
Rata-Rata	12	229	24	79	343	9	62	5	10	86
	5	69	6	62	100	11	74	5	8	100

\*) LK pemerintah kota tahun 2010 yang diperiksa pada semester I Tahun 2011

\*\*) LK pemerintah kota tahun 2010 yang diperiksa pada semester I dan II Tahun 2011

\*\*\*) LK pemerintah kota tahun 2011 yang diperiksa pada semester I Tahun 2012

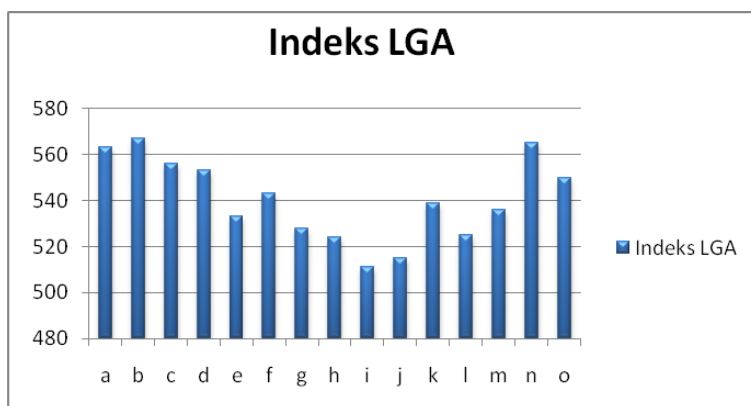
(sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

**Tabel 1.3**  
**Data LHP Semester I Tahun 2012 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**  
**Tahun 2006-2011**

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kabupaten Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2.	Kabupaten Pandeglang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
3.	Kabupaten Serang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4.	Kabupaten Tangerang	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
6.	Kota Serang	-	-	WDP	WDP	WDP	WDP
7.	Kota Tangerang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	WDP	WTP	WTP

(sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

**Gambar 4.1 Grafik Kriteria Skoring Indeks LGA**



### ITEM INDEKS *LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY DISCLOSURE (LGA)*

#### A. Pernyataan Tujuan

- 5 Memisahkan pernyataan termasuk visi/misi/nilai-nilai tujuan pencapaian dari target kinerja dimasa depan/tujuan spesifik, ringkas, mudah dimengerti dan terminology yang realistis keseluruhanya bersamaan di depan. Serta dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset dan yuridiksi
- 4 Tidak semua pernyataan muncul bersamaan dalam satu waktu yang sama
- 3 Terdapat satu kekurangan dalam pernyataan (visi/misi/nilai-nilai tujuan pencapaian dari target kinerja dimasa depan/tujuan spesifik, ringkas, mudah dimengerti dan terminology yang realistis keseluruhanya bersamaan di depan. Serta dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset dan yuridiksi)
- 2 Terdapat satu kekurangan dalam pernyataan (visi/misi/nilai-nilai tujuan pencapaian dari target kinerja dimasa depan/tujuan spesifik, ringkas, mudah dimengerti dan terminology yang realistis keseluruhanya bersamaan di depan. Serta dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset dan yuridiksi)
- 1 Penjelasan pernyataan tidak lengkap

#### B. Laporan Walikota

- 5 Belum keseluruhan diundang untuk membaca keseluruhan referensi tinjauan untuk spectrum luas dari kegiatan-kegiatan dari pencapaian, ditetapkan dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan politis
- 4 Tidak terdapat sinkronisasi antara referensi tinjauan terhadap hasil pencapaian
- 3 Terdapat diskusi dewan atau dengan penjelasan sub-klasifikasi
- 2 Penjelasan gubernur hanya berupa penjelasan singkat
- 1 Penyampaian penjelasan gubernur bersifat tertutup



### C. Struktur Pemerintahan

- 5 Komposisi dari dewan dan administrator senior, kontak informasi organisasi dan struktur keputusan terkait dari dewan dan sebagainya
- 4 Tidak ditampilkan salah satu struktur pemerintahan
- 3 Tidak ditampilkan beberapa struktur pemerintahan
- 2 Hanya menampilkan dua struktur pemerintahan dari keseluruhan struktur pemerintahan
- 1 Hanya menampilkan satu struktur pemerintahan dari keseluruhan struktur pemerintahan

### D. Pengendalian Internal

- 5 Pernyataan dari mekanisme pengendalian internal, tujuan dari manajemen resiko sistem pengendalian, penggunaan dari audit internal
- 4 Tidak ditampilkan salah satu kriteria dari mekanisme pengendalian internal, tujuan dari manajemen resiko sistem pengendalian, penggunaan dari audit internal
- 3 Tidak ditampilkan dua kriteria dari mekanisme pengendalian internal, tujuan dari manajemen resiko sistem pengendalian, penggunaan dari audit internal
- 2 Hanya menampilkan dua kriteria dari mekanisme pengendalian internal, tujuan dari manajemen resiko sistem pengendalian, penggunaan dari audit internal
- 1 Hanya menampilkan satu kriteria dari mekanisme pengendalian internal, tujuan dari manajemen resiko sistem pengendalian, penggunaan dari audit internal

### E. Personil

- 5 Jelas menyatakan berapa jumlah staf yang diklasifikasikan kedalam fungsi utama dan departemen yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaan dengan minimal tiga tahun perbandingan
- 4 Hanya menyatakan satu bagian dari jumlah staff yang telah diklasifikasikan
- 3 Tidak menyatakan bagian dari jumlah staff yang telah diklasifikasikan dengan perbandingan minimal pekerjaan selama tiga tahun
- 2 Tidak menyatakan bagian dari jumlah staff yang telah diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama dan departemen dengan perbandingan minimal pekerjaan selama tiga tahun
- 1 Tidak terdapat penjelasan terhadap pengklasifikasian jumlah staf

#### **F. Ringkasan Fakta dan Angka Statistik**

- 5 Terpisah, berjudul bagian fakta-fakta kunci dan angka setidaknya tiga tahun tren dan perbandingan ilustrasi kemungkinannya
- 4 Tidak memiliki beberapa fakta dan angka statistik (misal: tidak terdapat fakta-fakta kunci)
- 3 Lebih dari satu tahun ringkasan dengan penjelasan dan ilustrasi yang rinci
- 2 Hanya satu tahun ringkasan tanpa penjelasan dan ilustrasi yang rinci
- 1 Tidak terdapatnya penjelasan fakta dan angka statistic

#### **G. Pengukuran Kinerja**

- 5 Pemisahan antara laporan kinerja non-keuangan dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
  - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
  - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
  - h. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - i. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Laporan kinerja keuangan:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana ;
- d. pendapatan- Laporan Realisasi Anggaran
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih

- i. Pendapatan-Laporan Operasional
- j. beban; dan
- k. arus kas

4 Kurang beberapa fitur yang signifikan dalam keterangan laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja non-keuangan.

3 Menyeluruh tetapi hanya ringkasan satu tahun atau hanya satu periode

2 Satu tahun ringkasan tetapi tidak lengkap

1 Jarang referensi dalam catatan atas laporan keuangan

#### **H. Tinjauan Keuangan**

5 Adanya pemisahan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dengan meninjau isu keuangan lainnya yang signifikan dengan setidaknya tiga tahun perbandingan penjelasan dan ilustrasi kemungkinan tren

4 Kekurangan satu fitur dalam penyajian pelaksanaan anggaran dan laporan finansial

3 Berjudul dan hanya mengungkapkan tinjauan isu keuangan secara singkat

2 Tinjauan singkat dengan perbandingan kurang dari tiga tahun

1 Tidak terlalu rinci

#### **I. Laporan Operasi/ Laporan dari Kinerja Keuangan**

5 Pernyataan yang mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-Laporan Operasional dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-Laporan Operasional

dan menyatakan laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-Laporan Operasional pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
  1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya
  2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap
- d. Ekuitas akhir.
- e. Serta rincian lebih lanjut yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- 4 Kekurangan beberapa rincian pengungkapan terhadap laporan operasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 3 Tidak memiliki beberapa rincian pengungkapan terhadap laporan operasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 2 Sebuah ringkasan laporan operasi tetapi tidak memiliki rincian yang jelas
- 1 Sebuah ringkasan laporan dengan hanya menampilkan kriteria input (misal: pendapatan- Laporan Operasional dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional, Surplus/defisit-Laporan Operasional)

#### **J. Laporan Posisi Keuangan**

- 5 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan penjelasan:
  - a. Aset lancar yang segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau perubahan kas dan setara kas.
  - b. Aset non-lancar, aset yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen
  - c. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
  - d. Kewajiban jangka panjang yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- Serta perbandingan ekstensif sub pos catatan atas laporan keuangan, semua klasifikasi tidak lebih dari 20% dari asset dalam satu kriteria dalam asset catatan dianalisis sesuai dengan fungsi/program
- 4 Kurang beberapa penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (neraca)
  - 3 Terdapat lebih dari 20% dari satu item asset yang dianalisis
  - 2 Catatan atas Laporan Keuangan (neraca) hanya mempunyai penjelasan secara umum
  - 1 Buruk, atau tidak ada klasifikasi, asset utama dihilangkan, jarang ada Catatan atas Laporan Keuangan (neraca)

#### K. Laporan Arus Kas

- 5 Pernyataan atas laporan arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dengan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 4 Kurangnya informasi yang disajikan mengenai sumber dana dalam Catatan atas Laporan Keuangan (*cash flow*)
- 3 Dasar pernyataan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan perbandingan periode sebelumnya
- 2 Dasar pernyataan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa perbandingan periode sebelumnya
- 1 Catatan atas Laporan Keuangan (*cash flow*) minimnya penjelasan

#### L. Catatan untuk Laporan Keuangan

- 5 Mempresentasikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan jelas agar dapat dipahami dengan disusun secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beserta penyajian atas kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
  - c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 Serta catatan khusus yang berkaitan dengan semua kriteria utama.
- 4 Terdapat kekurangan dalam satu bagian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (misal: tidak terdapat penjelasan Laporan Operasional)

- 3 Terbatasnya referensi dalam perubahan kebijakan, dasar pengukuran, dan tidak terdapatnya catatan khusus untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan
- 2 Terdapat kekurangan dalam dua bagian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (misal: tidak terdapat penjelasan Laporan Operasional)
- 1 Tidak terdapatnya penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (keseluruhan)

**M. Akuisisi Aktiva Tidak Lancar dan Pembuangan/Penyusutannya**

- 5 Pernyataan laporan yang menjelaskan investasi non permanen, investasi permanen, dan dana cadangan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan dijelaskan secara komprehensif serta pengukuran asset tersebut sebagai berikut:
  - a. kas dicatat sebesar nilai nominal;
  - b. investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
  - c. piutang dicatat sebagai nilai nominal;
  - d. persediaan dicatat sebesar nilai perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan
- 4 Terdapat beberapa asset yang digunakan tetapi dihilangkan
- 3 Terdapat keterbatasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai akuisisi aktiva tidak lancar dan pembuangan atau penyusutannya
- 2 Terdapat keterbatasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hanya mengenai akuisisi aktiva tidak lancar
- 1 Tidak terdapat penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai akuisisi aktiva tidak lancar dan pembuangan atau penyusutannya

**N. Investasi (Lihat di kas juga)**

- 5 Pernyataan yang menjelaskan tentang
  - a. Klasifikasi investasi:  
Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
  - b. Pengakuan investasi dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- c. Pengukuran investasi  
dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- d. Metode penilaian investasi  
Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
  3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e. Pengakuan hasil investasi
  1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
  2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
- f. Pelepasan dan pemindahan investasi.
  1. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
  2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi

disajikan dalam laporan operasional.  
Yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4 Terdapat satu pernyataan investasi yang tidak dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 3 Terdapat dua pernyataan investasi yang tidak dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 2 Memisahkan pos-pos dalam item investasi tetapi kurang rinci
- 1 Penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (investasi) tidak menjelaskan secara rinci

**O. Perbandingan dari Aktual ke Anggaran**

- 5 Pernyataan laporan yang menyajikan laporan realisasi anggaran berupa:

- a. Pendapatan- Laporan Realisasi Anggaran
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-Laporan Realisasi Anggaran;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang disampaikan secara komprehensif.

- 4 Bagian dalam pernyataan laporan realisasi anggaran dikecualikan
- 3 Salah satu bagian dalam pernyataan laporan realisasi anggaran tidak dijelaskan secara rinci
- 2 Hanya salah satu bagian dalam pernyataan laporan realisasi anggaran yang dijelaskan
- 1 Seluruh bagian tidak lengkap dan hanya menampilkan pengungkapan dalam penyajian laporan realisasi anggaran



## Komitmen Organisasi, Akuntabilitas dan *Organization Citizenship Behavior* Institusi Militer Di Indonesia

**HADI MAHMUDAH<sup>A\*</sup>**

*Alumni Universitas Bangka Belitung*

**SUPENI A. MAPUASARI<sup>B</sup>**

*Alumni President University*

**Abstract:** *This research evaluates the effect of organizational commitment and accountability towards organizational behavior in Military Institution in Indonesia. Data was collected by survey method in Indonesian Airforce located in Yogyakarta. One hundred questionnaires gathered and analized with smartPLS. The result of this research shows that organizational commitment influences organization citizenship behaviour. In addition, accountability mediates the relationship of organizational commitment and organization citizenship behaviour. This research inspired by the phenomenon that there is little research on military area regarding accountability, either in Indonesia or in the world. Thus, this research will give a siginificant literature contribution based on the empirical data analyzes in Military Institution in Indonesia.*

**Keywords:** *organizational commitment, accountability and organization citizenship behavior.*

<sup>a,b</sup> Mahasiswa Magister Sains dan Doctor FEB Universitas Gadjah Mada

\* Corresponding author: hadimahmudah@yahoo.co.id

## 1.Latar belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2010).Isu akuntabilitas diangkat mulai dari tahun 1999, yaitu ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang pelaporan akuntabilitas. Akbar (2012) menyatakan bahwa peraturan tersebut sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip utama dari tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi, seperti yang diamanatkan di Undang-undang no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan untuk membangun aparatur negara yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Keberhasilan reformasi birokrasi salah satunya ditandai dengan peningkatan kinerja aparatur negara karena pembangunan aparatur negara diyakini mampu meningkatkan kinerja institusi pemerintah. Oleh sebab itu, kinerja menjadi isu sentral terkait dengan *governance* dan akuntabilitas. Kinerja pemerintah selalu terkait erat dengan perilaku kerja aparatur negara. Perilaku kerja dalam hal ini disebut *organization citizenship behaviour*.

Organization citizenship behavior (OCB) biasanya disebut perilaku kewarganegaraan adalah tindakan ekstra yang melebihi deskripsi peran karyawan. Tindakan ekstra yang dilakukan karyawan contohnya menolong rekan, berpartisipasi aktif, menggunakan waktu kerja secara efektif, tidak membolos ketika hari kerja dan lain sebagainya. Dengan kata lain karyawan tidak hanya mengerjakan tugas pokoknya (*in-role*) saja tetapi mengerjakan tugas

ekstra yang membuat nilai lebih untuk keefektifan organisasi. *Organizational citizenship behavior* (selanjutnya OCB) merupakan model kegiatan yang membuat organisasi secara instrinsik dapat bekerja sama (Katz dan Khan, 1966 dalam Ariani, 2011). Menurut Ariani (2011) organisasi efektif apabila individu yang masuk kedalam organisasi itu mau menunjukkan peran dengan kriteria minimal untuk mencapai kinerjanya dan mempunyai perilaku yang inovatif dan sportif dalam menjalankan fungsi organisasi.

Penelitian komitmen organisasi terhadap *Organization citizenship behavior* telah banyak dilakukan (Riketta dan Landerer, 2002; Ng dan Feldman, 2011). Ng dan Feldman (2011) menguji komitmen organisasi terhadap *organization citizenship behavior* (OCB) dengan *organizational tenure* sebagai variabel pemoderasi. Hasilnya *organizational tenure* sebagai pemoderasi hubungan komitmen organisasi dan *organization citizenship behavior*. Menurut Baretto dan Ellemer (2000) dalam Riketta dan Landerrer (2002) perilaku kerja (OCB) bergantung pada dua faktor yaitu identifikasi anggota group dan akuntabilitas dengan yang lainnya.

Riketta dan Landerer (2002) juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kinerja karyawan. Penelitian ini memperluas penelitian Riketta dan landerrer (2002) yang meneliti pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku kerja dengan akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian Riketta dan Lenderer (2002) justru menyatakan bahwa akuntabilitas bukan sebagai variabel pemoderasi, tetapi sebagai variabel yang independen. Akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian Riketta dan landerer (2002) tidak terdukung. Ada kemungkinan akuntabilitas bukan sebagai variabel pemoderasi tetapi sebagai variabel intervening. Jadi dalam penelitian ini akuntabilitas memediasi hubungan antara komitmen organisasi dan *organization citizenship behavior*.

Riketa dan Landerer (2002) hanya menguji akuntabilitas eksternal. Oleh sebab itu, penelitian ini akuntabilitas yang diujikan yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Peneliti berargumen bahwa didalam lingkungan militer, akuntabilitas internal memainkan peran penting hubungan antara atasan dan bawahan. Karena bawahan mempunyai *power distance* yang tinggi dengan atasannya. Kultur militer yang penuh hierarkhi ini diduga memberikan keunikan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi sektor publik yang lain. Oleh sebab itu, penelitian di sektor militer mutlak diperlukan. Penelitian militer terdahulu di luar negeri lebih banyak membahas politik dan sistem pertahanan militer.

OCB adalah tindakan ekstra yang melebihi deskripsi peran karyawan. Tindakan ekstra yang dilakukan karyawan contohnya menolong rekan, berpartisipasi aktif, menggunakan waktu kerja secara efektif, tidak membolos ketika hari kerja dan lain sebagainya. Dengan kata lain karyawan tidak hanya mengerjakan tugas pokoknya saja tetapi mengerjakan tugas ekstra yang membuat nilai lebih untuk keefektifan organisasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa OCB berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan efektifitas organisasi. Tetapi dalam konteks sektor publik, khususnya sektor militer, kinerja dan efektivitas mereka masih di pertanyakan. Kinerja sektor publik banyak mempertimbangkan kinerja formal (*in role*) dan mengabaikan dimensi perilaku kerja seperti OCB (*extra-role*), motif altruistik, komitmen (Camilleri dan Heidjen, 2007). Sehingga penting untuk mengetahui dan memahami identifikasi pegawai yang berpengaruh terhadap OCB.

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian sektor publik (pemerintah khususnya) di Indonesia yang dilakukan di dunia militer. Padahal, dari segi urgensi keuangan, porsi anggaran belanja negara yang disisihkan dari keseluruhan APBN Indonesia di bidang pertahanan tidaklah sedikit. Dari data pokok APBN yang dikeluarkan oleh Kementrian

Keuangan tahun 2006-2012, setiap tahunnya, 5-7% dari total pembelanjaan APBN dialokasikan ke sektor pertahanan. Pada tahun 2006, pertahanan mengambil porsi 5,9% total APBN. Angka ini merangkak naik menjadi 6,7 % di tahun 2012 dan di tahun 2013 (RAPBN). Lonjakan anggaran di bidang pertahanan telah mencapai 3 kali lipat dari tahun 2007 hingga tahun 2013, yaitu dari 30,7 triliun rupiah menjadi 81,8 triliun rupiah. Belanja pertahanan ditujukan untuk investasi keamanan dan kedaulatan Indonesia, sehingga iklim mampu membantu tugas TNI untuk menegakkan kedaulatan Indonesia yang mendukung pembangunan. Ditengah urgensi akan akuntabilitas dan pengukuran kinerja, sangat ironis bila riset mengenai akuntabilitas dan kinerja di sektor militer di Indonesia tidak tersentuh.

Jarangnya penelitian di sektor militer mungkin akibat dari birokrasi yang sulit ditembus oleh para peneliti dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menutup gap tersebut dengan memulai penelitian yang bertemakan akuntansi manajemen sektor militer, khususnya terkait akuntabilitas, komitmen organisasi, dan *organization citizenship behaviour*. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya akuntabilitas dan *organization citizenship behavior* di Institusi militer di Yogyakarta, Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB?
2. Apakah akuntabilitas memediasi hubungan komitmen organisasi dan OCB?

## 2. Literatur dan pengembangan hipotesis

### 2.1 literatur

#### Organizational citizenship behavior (OCB)

Definisi OCB adalah *an interest in work that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and that in the aggregate promotes the effective*

*functioning of the organization*”(Organ 1988) dalam Rayner, et al (2012). OCB terdiri dari lima dimensi yaitu *altruism*, *conscientiousness*, *courtesy*, *sportmanship*, dan *civic virtue*. *Altruisme* berkaitan dengan sikap membantu orang lain, *conscientiousnes* tentang prasyarat yang melebihi kinerja minimum seperti datang lebih awal dari jam kerja, *courtesy* tentang perilaku sopan dan taat peraturan sehingga mengurangi konflik interpersonal, *sportmanship* tentang sikap toleran terhadap kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak suka mengeluh atas kondisi tersebut, dan *civic virtue* tentang kepedulian terhadap kelangsungan hidup organisasi.

William dan Anderson (1991) membedakan kategori OCB yaitu perilaku yang bermanfaat untuk organisasi dan perilaku yang bermanfaat secara langsung bagi individu dan secara tidak langsung juga bermanfaat untuk organisasi. Camilleri dan Heidjen (2007) menjelaskan bahwa komponen utama dari kinerja karyawan untuk orientasi sistem organisasi terdiri dari OCB, penekanan identifikasi karyawan, loyalitas, komitmen dan memiliki *reward* individu yang terhubung dengan kinerja organisasi. OCB sangat penting dalam mendukung kinerja organisasi (Podsakoff et al., 2009).

### **Komitmen organisasi**

Konsep komitmen organisasional didasarkan pada premis bahwa individu membentuk suatu keterikatan (*attachment*) terhadap organisasi (Setiawan dan Gozali, 2006). Komitmen organisasi menciptakan ikatan batin antara pekerja dengan organisasi yang mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Menurut Meyer dan Allan (1995) dalam Setiawan dan Gozali (2006) komitmen organisasi tersusun atas:

1. Komponen *affective* yaitu keterikatan emosional terhadap organisasi dimana pegawai mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan menikmati keanggotaan dalam organisasi.

2. *Continuance commitment* merupakan kecenderungan untuk tetap bekerja di organisasi karena biaya pengunduran diri dianggap terlalu besar. Biaya ini dapat berupa biaya langsung, tidak langsung, maupun biaya atas kesempatan yang hilang / *opportunity cost*.
3. *Normative commitment* merupakan suatu tanggung jawab untuk tetap berada dalam organisasi. Tanggung jawab ini dapat berupa beban moral yang menyebabkan pekerja merasa harus berada di organisasi tersebut.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang sering digunakan tetapi sukar dipahami dan sampai sekarang belum ada definisi akuntabilitas yang disepakati oleh para ahli. Akuntabilitas di sektor publik memiliki makna yang *elusif* atau sukar dimengerti sehingga dapat diartikan dari berbagai perspektif (Sinclair, 1995). Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dengan forum, dimana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi apa yang sudah dilakukannya, sedangkan forum dapat mengajukan pertanyaan dan pertimbangan, kemudian aktor bisa jadi menemui konsekuensi.

Akuntabilitas berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *comper* atau *conter* yang berarti *to account* atau *to enumerate* (Cut dan Muray, 2000). Secara eksplisit, arti *to account* sendiri adalah untuk menghitung. Bovens (2007) menegaskan secara *etymological* dan akar historis bahwa akuntabilitas datang dari akuntansi. Menurut kamus *oxford*, akuntabilitas berarti tanggung jawab seseorang untuk memberikan perhitungan dan kejelasan atas sesuatu. Makna akuntabilitas kemudian diperluas dengan berbagai penelitian yang mengembangkan akuntabilitas dalam berbagai konteks. Akbar (2012) makna akuntabilitas tergantung pada konteks yang melekat pada kata akuntabilitas.

Sinclair (1995) menyebutkan lima bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas publik, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas

personal. Menurut LAN (2010) implementasi akuntabilitas di pemerintah Indonesia harus mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi, akuntabilitas kebijakan publik, akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum. Namun, Penelitian ini menggunakan 2 jenis/tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal yang dipakai dalam penelitian Akbar (2012).

Dalam konteks TNI, Akuntabilitas internal mencakup kewajiban langsung anggota untuk melaporkan pekerjaan yang telah diperintahkan kepada atasan langsung. Pelaporan mencakup keberhasilan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi. Dalam dunia militer, kecepatan dalam melapor sangat ditekankan. Proses monitoring tugas bersifat aktual dan sepanjang pelaksanaan akan ada pelaporan, baik tugas tersebut berhasil maupun gagal. Akuntabilitas internal berhubungan langsung dengan sistem kerja sehari-hari organisasi.

Sebaliknya, akuntabilitas eksternal mencakup kewajiban untuk melapor ke entitas lain di luar organisasi. Dalam era reformasi birokrasi, tentu saja akuntabilitas eksternal akan terus dinaikkan. Media dan publik saat ini sensitif terhadap apa yang terjadi di instansi pemerintah, termasuk instansi militer. Untuk sektor publik (pemerintahan) dengan tuntutan reputasi publik yang tinggi maka akuntabilitas yang sesuai adalah akuntabilitas internal dan eksternal (Riketa dan Landerer 2002).

### **Pengembangan hipotesis**

Komitmen merupakan variabel penting untuk kualitas dan kinerja (fry, et al 2005). Menurut Camillery dan Heidjen (2007) komitmen organisasi merupakan faktor esensial dalam pengembangan sumberdaya manusia (*human capital*). Selanjutnya Camileri dan Heidjen (2007) menyatakan bahwa kekurangan atau kesenjangan komitmen organisasi akan menyebabkan tingginya *turnover*, menambah biaya untuk perekrutan, seleksi, dan pelatihan.



Selain itu kesenjangan komitmen organisasi akan menyebabkan karyawan mengambil aktivitas *ekstra-contractual*. Ketika komitmen yang dimiliki pegawai itu rendah maka mereka akan mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan akuntabilitas, sebaliknya ketika komitmen pegawai itu tinggi maka dia akan berperilaku sesuai norma-norma yang ditentukan yaitu menjunjung tinggi akuntabilitas.

TNI dihadapkan dengan tugas yang berat dan rawan keselamatan. Tak jarang anggota TNI akan mengalami mutasi kerja di berbagai kota di seluruh Indonesia. Hal ini sudah merupakan bagian dari sumpah prajurit dan sumpah perwira untuk patuh terhadap perintah untuk ditempatkan dimana saja, termasuk di daerah konflik. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma mewajibkan seluruh anggota TNI untuk patuh terhadap perintah sepanjang masih dalam rangka menjaga pertahanan negara. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pekerjaan yang berat tersebut, anggota TNI perlu memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya. Komitmen anggota TNI terhadap organisasi merupakan kriteria penting yang diujikan dalam penyeleksian anggota TNI yang baru maupun penyeleksian kenaikan pangkat TNI.

**H1:** *Komitmen organisasi akan berpengaruh terhadap akuntabilitas anggota TNI.*

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dasar organisasi, namun teori dan penelitian dibidang ini terkait dengan perilaku dalam organisasi sangat sedikit. March dan Olsen (1989) dalam Moynihan dan pandey (2007) mengamati bahwa harapan, preferensi, pengalaman, dan interpretasi dari tindakan orang lain semua dibangun dalam institusi. Orang membangun keyakinan dan perilaku berdasarkan apa yang dilihat dan tepat dalam lingkungan mereka dan norma-norma perilaku orang-orang di sekitar mereka. Akuntabilitas melibatkan harapan atau asumsi bahwa individu akan berperilaku dengan cara tertentu (Hall, et al 2004). Jelas bahwa perilaku karyawan mempunyai hubungan dengan akuntabilitas.

Kepercayaan dan akuntabilitas tertanam dalam konteks sosial yang berhubungan dengan variabel sosial-psikologis dalam konteks organisasi baik formal maupun informal (Ammeter et al 2004 dalam Hall, et al 2004).

Menurut Budiyanto (2013) untuk menciptakan efektifitas organisasi yang berdampak pada peningkatan produktifitas, perlu menciptakan suasana kerja yang memberi peluang munculnya perilaku OCB dikalangan pegawai. Di instansi militer, tuntutan akuntabilitas internal sangat tinggi. Akuntabilitas internal ini diduga dapat menjadi pemicu anggota berperilaku OCB. Dari sisi akuntabilitas eksternal, dunia militer tidak lagi eksklusif dan tertutup seperti pada era orde baru. Publik menyaksikan dan turut mengawasi kinerja TNI dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kesadaran anggota TNI akan akuntabilitas eksternal yang harus dipenuhi akan mampu meningkatkan semangat untuk berperilaku OCB.

## **H2:** *Akuntabilitas akan berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior*

Riketta dan Landerrer (2002) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kerja dalam hal ini OCB. Individu yang mempunyai komitmen organisasi afektif yang tinggi akan memiliki niat untuk membalas (*reciprocate*) untuk organisasi melalui melibatkan diri dalam OCB (Cropanzano et al., 2003).

Lingkungan kerja yang menyuburkan komitmen organisasi akan berkontribusi dengan peningkatan kualitas kerja. Caraanggota TNI melihat lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja dan lingkungan kerja juga memainkan peran kunci dalam mengembangkan sikap dan perilaku pekerjaan. Menyadari akan pentingnya komitmen organisasi, pemerintah di tahun 2011 mulai memberikan remunerasi yang berupa tunjangan jabatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, sehingga diharapkan komitmen organisasi semakin tinggi.

## **H3 :** *komitmen organisasi akan berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior*

### 3. Metodologi penelitian

#### Populasi sampel dan tehnik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai angkatan udara propinsi Yogyakarta. Peneliti mempertimbangkan kesamaan kultur organisasi militer di Indonesia yaitu TNI angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kesamaan kultur ini karena para perwira pemimpin militer yang membangun budaya di 3 matra dididik secara bersama-sama di Akademi Militer di Magelang. Setelah melewati pendidikan bersama selama kurang lebih 3 bulan di Akademi Militer, sebelum kemudian para taruna dididik di masing-masing akademi (Akademi Militer untuk taruna angkatan darat, Akademi Angkatan Udara untuk taruna angkatan udara, dan Akademi Angkatan laut untuk taruna angkatan laut. Pendidikan dasar inilah yang dianggap mampu mencuci otak dan menanamkan pola pikir kepemimpinan nasionalisme para calon pemimpin militer.

Angkatan udara di Yogyakarta memiliki aktivitas yang tergolong padat. Pusat pendidikan taruna AAU selama 4 tahun dan pendidikan penerbangan calon pilot militer terdapat di Yogyakarta. Rumah sakit pusat angkatan udara pun terletak di Yogyakarta. Budaya yang ada di landasan udara militer Yogyakarta kompleks dan dinamis. Yogyakarta Oleh sebab itu, pengambilan sampel di angkatan udara Yogyakarta tepat untuk penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non probabilistic sampling* yaitu setiap elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel (Sekaran, 2003).

#### Data dan sumber data

Karena data yang diperlukan berupa opini individu maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa survey. Survey merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam sebuah wawancara yang terstruktur dengan baik

dengan atau tanpa seorang pewawancara (Cooper dan Schindler, 2011:242). Alat pengumpulan data menggunakan survey kuisioner yang berisi pertanyaan untuk responden. Kuisioner diantar langsung ke kantor angkatan udara Yogyakarta.

### **Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel**

#### **Komitmen organisasi**

Komitmen organisasi diukur dari 1 faktor/ dimensi yaitu afektif dengan 4 item versi Meyer dan Allen (1997) konsisten dengan penelitian Fry,et al (2011), Riketta dan Landerer (2002),

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas eksternal adalah akuntabilitas dari entitas pemerintah lokal untuk pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat (Akbar,2012). Akuntabilitas eksternal diukur dengan 5 item konsisten dengan Riketta dan landerer (2002).

Akuntabilitas internal terkait hubungan antara atasan dan bawahan dalam organisasi (Stewart dan Walsh, 1994 dalam Akbar, 2012). akuntabilitas internal diukur dengan 2 item sama dengan Akbar (2012).

#### ***Organization Citizenship Behaviour (OCB)***

OCB adalah perilaku karyawan yang melebihi peran yang diwajibkan, yang secara tidak langsung diakui secara eksplisit oleh sistem *reward* formal (Organ,1988 dalam Bolino, et al 2002). OCB diukur dengan 4 item dari dimensi arah langsung ke organisasi dan 4 dimensi arah langsung ke individu (William dan Anderson, 1991). Pengukuran ini konsisten dengan Chen dan Yang (2012), Rayner et al (2012).

#### 4. Hasil

Kuisisioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 100 kuisisioner dan kembali 100%. Ada 6 kuisisioner yang datanya tidak lengkap, sehingga kuisisioner yang bisa diolah berjumlah 96. Tingkat respon rate 100% mungkin dikarenakan belum ada penelitian terdahulu di kesatuan angkatan udara Yogyakarta, sehingga membuat pegawai antusias untuk mengisi kuisisioner. Demografi responden bisa dilihat di tabel 1.

#### Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Uji validitas merupakan tingkat dimana sebuah pengujian mengukur apa yang benar-benar ingin diukur (Cooper dan Schindler, 2011:280). Uji validitas dapat dilihat dari *skor loading* indikator konstruk bernilai diatas 0,5. Ada beberapa indikator yang nilainya dibawah 0,5 yaitu indikator konstruk OC4 dengan nilai *skor loading* 0,195, indikator konstruk AC 4 dan AC7 masing masing nilai *skor loading*nya 0,319 dan 0,458, dan indikator konstruk OCB2 dengan *skor loading* 0,280, sehingga indikator-indikator tersebut dikeluarkan/dihapus. Indikator-indikator tersebut memiliki *skor loading* rendah karena pertanyaan yang diajukan ambigu dan tidak sesuai dengan konteks organisasi militer.

Dari wawancara singkat dengan responden terkait pertanyaan-pertanyaan yang memiliki *skor loading* rendah, dapat disimpulkan bahwa responden tidak memahami konteks pertanyaan karena tidak sesuai dalam konteks sehari-hari dalam pekerjaan. Dalam hal ini, bias kompleksitas item dan ambiguitas item mungkin sekali terjadi akibat kata-kata yang tidak dikenal (Peterson, 2000) dan konteks pertanyaan yang tidak dikenal dan dialami di keseharian pekerjaannya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir bias kompleksitas item dan ambiguitas item, pertanyaan tersebut dihapus dari analisa statistik.

Hasil uji validitas setelah indikator konstruk yang nilainya dibawah 0,5 dikeluarkan dapat dilihat ditabel 2. Uji validitas terdiri dari dua yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas konvergen dilihat dari skor AVE dan *Communality* yang masing-masing memiliki nilai 0,5. Skor AVE yang memenuhi batas 0.5 menunjukkan bahwa konsep-konsep secara teori berkorelasi dengan kenyataan (Hartono, 2011). Uji validitas diskriminan dilihat dari skor *loading* diatas 0,5 bisa dilihat ditabel 2. Uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa antar instrumen pengukur konstruk tidak berkorelasi dengan tinggi (Hartono, 2011).

Uji reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan presisi dari sebuah prosedur pengukuran (Cooper dan Schindler, 2011:283). Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten, atau stabil dari waktu ke waktu dan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Hartono, 2011). Seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas dilihat dari nilai *cronbach alpha* > 0,60 dan nilai *Composite reliability* > 0,7.

Evaluasi model struktural dinilai berdasarkan *R Square* (tabel 2) yang menunjukan nilai 0,4392 untuk konstruk OCB. Artinya model yang diajukan dapat menjelaskan konstruk OCB sebesar 43,92% sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

### Uji hipotesis

Untuk melihat signifikansi uji hipotesis yang diajukan dengan cara membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Jika nilai t-statistik lebih tinggi dari nilai t-tabel, maka hipotesis terdukung. Sebaliknya, apabila t-statistik lebih rendah, maka tidak terdukung. Nilai t-tabel 1,645 (1-tailed) dan 1,960 (2-tailed) dengan tingkat keyakinan 95%.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel 5. Dari tabel 5 didapatkan bahwa semua hipotesis terdukung dengan nilai t-statistik untuk hipotesis pertama 4,4034 lebih tinggi

dari t-tabel 1,1960, hipotesis kedua mempunyai nilai t-statistik 2,3516 dan hipotesis ketiga memiliki nilai t-statistik 3,7544. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Riketta dan landerrerr (2002) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB. Penelitian ini memperkaya penelitian terdahulu dengan memberikan dukungan terhadap posisi akuntabilitas sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara komitmen organisasi dengan OCB.

## 5. kesimpulan, keterbatasan dan saran

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel 5. Dari tabel 5 didapatkan bahwa semua hipotesis terdukung dengan nilai t-statistik untuk hipotesis pertama 4,4034 lebih tinggi dari t-tabel 1,1960, hipotesis kedua mempunyai nilai t-statistik 2,3516 dan hipotesis ketiga memiliki nilai t-statistik 3,7544. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Riketta dan landerrerr (2002), Feldman dan Ng (2011) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB. Memperkaya penelitian sebelumnya, penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas terbukti memediasi hubungan antara komitmen organisasi dengan OCB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di sektor militer pun, komitmen organisasi dan akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perilaku kerja yang baik, atau dalam hal ini disebut *organization citizenship behaviour*. Tak heran jika dalam tes wawancara penerimaan calon tentara, baik dari jalur tamtama, bintara, perwira karir, maupun perwira taruna akademi, komitmen terhadap organisasi TNI merupakan kriteria yang sangat penting. Dasar komitmen pribadi anggota dipadukan dengan akuntabilitas yang tercipta selama menjalankan pekerjaan mendukung terciptanya *organization citizenship behaviour*.

Dari pengalaman kerja responden yang cukup lama dan respons rate yang cukup tinggi, dapat disinyalir bahwa tingkat kebersamaan dan kebersatuan antar anggota cukup tinggi.

Artinya, tindakan rekan untuk saling membantu besar. Ketika kuesioner disebar, begitu satu orang bersedia mengisi, anggota lain bergegas untuk mengambil dan mengisi kuesioner dengan segera. Namun, untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian, sampel yang disebar perlu diperluas, mencakup TNI AD dan TNI AL. Perluasan cakupan diharapkan mampu meningkatkan tingkat generalisasi hasil riset.

Riset ini dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel tambahan yaitu tipe kepemimpinan dari pemimpin militer mengingat garis komando di dunia militer begitu tegas. Gadot (2007) menemukan efek tipe kepemimpinan pada kinerja karyawan. Namun, belum pernah diuji apakah pengaruh tipe kepemimpinan terhadap OCB di lingkungan yang bergaris komando tegas akan sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan menjadi awal dari penelitian-penelitian lanjutan di bidang akuntansi manajemen di sektor militer di Indonesia.

## Daftar pustaka

- Akbar, R. 2011. *Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Governmen*. Desertasi Curtin University.
- Ariani, D.W. 2011. Hubungan antara Perilaku Kewarganegaraan Organisasional dan Kinerja Tugas. *Jurnal manajemen teori dan terapan*, tahun 4 No1.
- Bolino, M.C. Turnley, W.H., dan Bloodgood, J.M. 2002. Citizenship Behavior and The Creation of Social Capital in Organizations. *Academy of Management Review* 27: 505-522.
- Bovens, M. 2007. New Forms of Accountability and EU-governance. *Comparative European politics* 5: 104-120.
- Budiyanto. 2013. Pengembangan Organisasi Sektor Publik (Pemerintah) dengan Pendekatan Organizational Citizenship Behavior (OCB). Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 41 STIESA.
- Camilleri, E. dan Heijden, B.V. 2007. Organizational Commitment, Public Service Motivation and Performance Within The Public Sector. *Public Performance and Managerial Review* Vol 31 No 2.
- Cooper, D. R. dan Schindler, P. S. 2011. *Business Research Methods*. Edisi 11. New York. NY: McGraw-Hill.
- Chen, C.Y., dan Yang, C.F. (2012). The Impact of Spiritual Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A multi Sample Analysis. *J bus ethics* 105: 107-114.
- Cropanzano, R., Rupp, D. E., & Byrne, Z. S. 2003. The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors. *The Journal of Applied Psychology* 88: 160-1690.
- Cutt, J. dan Murray, V. 2000. *Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations*. London : Routledge.
- Fry, L.W., Vitucci, S. dan Cedillo, M. 2005. Spiritual Leadership and Army Transformation: Theory Measurement, and Establishing a Baseline. *The Leadership Quarterly* 16:835-862.



- Gadot, Eran Vigoda. 2005. Leadership Style, Organizational Politics, and Employees' Performance. *Personnel Review* Vol36 No.5.
- Fry, L.W., Hannah, S.T. Noel, M. dan Walumbwa, F.O.2011. Impact of Spiritual Leadership on Unit Performance. *The leadership Quarterly* 22:259-270.
- Hall, A.T., Blass, F.R., Ferris, G.R., dan Massengale, R. 2004. Leader Reputation and Accountability in Organizations: Implications For Disfunctional Leader Behavior. *The Leadership Quartely*15:515-536.
- Hartono, J.2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Model Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Hartono, J. 2011. *Pedoman Survei Kuesioner*. BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara,. 2010.*Naskah Akademik Sistem Akuntabilitas Nasional*.
- Moynihan, D.P. dan Pandey, S.K. 2007.The Role of Organizations in Fostering Public Service Motivation''. *Public Administration Review*Vol 67 No.1.
- Ng, T.W.H. dan Feldman, D.C. 2011. Affective Organizational Commitment and Citizenship Behavior: Linear and Non-linear Moderating Effects of Organizational Tenure. *Journal of vocational behavior*: 528-537.
- Peterson, R.A. 2000. *Constructing Effective Questionnaires*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Podsakoff, N.P, Blume, B.D, Whiting, S.W, dan Podsakoff, P.M. 2009. Individual and Organizatio Level Consequencesof Organizational Citizenship Behaviours: A Meta Analysis. *Journal of Applied Psychology*, 94, 122-141.
- Rayner, J. Lawton, A. dan Williams, H. M. 2012. Organizational Citizenship Behavior and Public Service Ethos: Whither the Organization?. *J Bus Ethics* 106: 117-130.
- Riketta, M. dan Landerer, A. 2002. Organizational Commitment, Accountability and Work Behavior: A Correlation Study. *Social Behavior and Personality* 30 (7): 653-660.
- Rus, D., Knippenberg, D., Wisse, B. 2011. Leader Power and Self Serving Behavior: The Moderating Role of Accountability. *The Leadership Quartely* 23: 13-26.
- Sekaran, U .2003. *Research method for business: A skill building approach, 4th edition*. John Wiley & Sons: NewYork.
- Setiawan, I,A.dan Gozali 2006. *Akuntansi Keperilakuan: Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sinclair, Amanda. 1995. The Chameleon of Accountability : Forms and Discourses. *Accounting, Organization, and Society*, vol. 20 no.2/3. Pp 219-237
- Williams, L.J dan Anderson.1991. Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and in Role-Behaviors. *Journal of Management* 17:601.

## Lampiran

Tabel 1 demografi responden

Profil	keterangan	jumlah
Usia	Dibawah 25 tahun	12
	26-30 tahun	23
	31-35 tahun	15
	36-40 tahun	17
	41-45 tahun	11
	46-50 tahun	14
	51 tahun keatas	2
Lama bekerja	Dibawah 5 tahun	15
	6-10 tahun	22
	11-15 tahun	15
	16-20 tahun	15
	Diatas 20 tahun	27
Pendidikan	Sma	90
	Diploma	3
	S1	0
	S2	1

Tabel 2 iterasi algoritma

	AVE	Composite reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redudancy
AC	0,5188	0,8429	0,1762	0,7659	0,5188	0,0897
OC	0,6302	0,8363	0,0000	0,7071	0,0000	0,0000
OCB	0,5066	0,8769	0,4392	0,8354	0,5066	0,1241

Tabel 3 korelasi variabel laten

	AC	OC	OCB
AC	1,0000		
OC	0,4199	1,0000	
OCB	0,5357	0,5792	1,0000

Tabel 4 Cross loading

	AC	OC	OCB
AC1	<b>0,6743</b>	0,3167	0,3472
AC2	<b>0,7978</b>	0,3762	0,4051
AC4	<b>0,7798</b>	0,3563	0,4501
AC5	<b>0,6658</b>	0,3156	0,4062
AC6	<b>0,6926</b>	0,3235	0,3573
OC1	0,3694	<b>0,8164</b>	0,4860
OC2	0,3077	<b>0,7771</b>	0,4721
OC3	0,3197	<b>0,7876</b>	0,4182
OCB1	0,2750	0,4381	<b>0,7522</b>
OCB3	0,5447	0,3759	<b>0,7470</b>
OCB4	0,4653	0,2534	<b>0,5529</b>
OCB5	0,2980	0,4068	<b>0,6969</b>
OCB6	0,4103	0,3968	<b>0,7765</b>
OCB7	0,3568	0,5595	<b>0,7016</b>
OCB8	0,2803	0,4166	<b>0,7326</b>

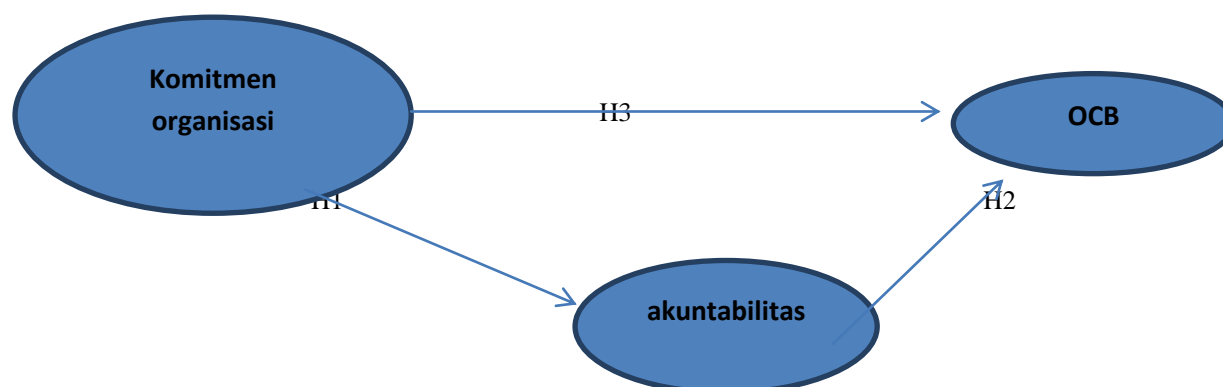
Tabel 5 koefisien jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statitics (O/STERR)
AC-> OCB	0,3549	0,3709	0,1509	0,1509	2,3516
OC-> AC	0,4199	0,4290	0,0953	0,0953	4,4034
OC-> OCB	0,4305	0,4193	0,1147	0,1147	3,7544

Instrumen penelitian

No	Pertanyaan
	<b>Akuntabilitas</b>
1	Saya bekerja dengan cukup terbuka terhadap publik
2	Pihak di luar organisasi saya jarang menyadari apakah saya telah bekerja dengan baik atau dengan buruk
3	Jika saya bekerja dengan tidak baik, maka tindakan saya tersebut dapat mempengaruhi reputasi organisasi saya di lingkungan saya
4	Saya bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan orang tentang organisasi saya dilingkungan saya.
5	Setiap pegawai harus menjaga pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari hasil aktivitas yang dilakukan
6	Atasan saya secara periodik mereview hasil kerja saya
7	Kecurangan insentif (penghargaan, kompensasi) telah dicegah dengan adanya informasi kinerja.
	<b>Komitmen organisasi</b>
1	Saya merasa menjadi bagian dari organisasi tempat saya bekerja
2	Saya senang hati menghabiskan sisa karir saya di organisasi ini
3	Saya mempromosikan organisasi ini ke teman-teman
4	Masalah diorganisasi saya seperti masalah saya sendiri
	<b>Organization citizenship behavior</b>
1	saya pernah dengan senang hati membantu teman sekerja yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan
2	saya bersedia untuk bekerja lembur untuk membantu rekan kerja anda menyelesaikan pekerjaannya tanpa dikenakan gaji lembur
3	Ada rasa puas dalam hati bila pekerjaan saya selesai tepat pada waktunya
4	Setiap tugas yang diberikan akan saya selesaikan dengan penuh tanggungjawab
5	Saya berani mengambil risiko apapun untuk bertanggung jawab dan melaksanakan hasil keputusan rapat bersama
6	Saya terlibat dalam fungsi-fungsi organisasi
7	Saya rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi tempat saya bekerja
8	Saya tertarik untuk mencari informasi-informasi penting yang dapat bermanfaat bagi organisasi

Gambar 1. Model penelitian



# The Association of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality (RAQ) Behavior (Study among Indonesian Auditors)

**ANNISA PERSIANI**  
**TJIPTOHADI SAWARJUWONO**  
*Universitas Airlangga*

**Abstract:** *Dysfunctional behaviors such as premature sign-off, reducing scope of work performed, making superficial reviews, failing to research an accounting principle, failing to obtain sufficient evidence and underreporting of audit time have consistently shown the serious negative consequences in the auditing profession. Some of the previous researches in similar study suggested that time budget pressure is associated with the occurrence of those behaviors. The objectives of the research are to examine and explain the effect of time budget pressure towards reduced audit quality (RAQ) behaviors among Indonesian auditors.*

*This research is using quantitative method. Questionnaire is used to collect data. The sample is 78 auditors at 17 Public Accounting Firms in 5 cities in Indonesia. The result indicates that the time budget pressure has a significant influence towards RAQ behaviors. The results suggest that RAQ behavior does occur in Indonesia accounting firms, particularly at staff and senior level. Further questions examined why RAQ practices were used and what areas of the audit were likely to be subject to these practices.*

**Keyword:** *Time Budget Pressure, Reduced Audit Quality Behavior, Underreporting of Audit Time, Dysfunctional Behavior*

## INTRODUCTION

In recent years, Indonesia has made significant efforts to improve the quality of financial reporting. The adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards of Auditing (ISA) has been made to strengthen the institutional framework of accounting and auditing. In order to support the implementation of Indonesian auditing standards, there is also a need to improve the quality of the professional public accountants

The quality of audit work can be evaluated based on how the auditor executes audit program steps. However, if some of the audit fieldwork is not properly performed and inappropriately described in the audit working papers, the chances of inappropriate audit opinion will increase. Nevertheless, quality judgment will be achieved if auditors comply with applicable professional standards and the firm's own standards, which makes it specifically sensitive to the behaviour of the auditors that would be reflected in the auditing engagement such as in the audit work and the possibility errors made by auditors

Auditors are responsible for ensuring that audit tasks are complied with generally accepted auditing standards and completed within the budget allocated by accounting firm. When accounting firm allocates an inadequate number of time budgets, it would constraint the implementation or completion of certain audit procedures which also would give a pressure to auditors to complete their work. According to Otley and Pierce (1996) auditors will behave unprofessionally under time budget pressure and are more likely to be involved in Reduced Audit Quality (RAQ) behaviours. Herrbach (2001) defines this act as the poor execution of an audit procedure that reduces the level of evidence gathered for the audit, so that collected evidence is unreliable, false or inadequate quantitatively or qualitatively.

There have been many studies that had already examined RAQ behaviours (Kelley and Margheim 1990; Raghunathan 1991; Azad 1994; Otley and Pierce 1996; Shapeero et al. 2003; Mohd Nor et al. 2010; Paino et al. 2011; Kelley and Seiler 1982; Herrbach 2004; Akers et al. 1998) including premature signing-off, making superficial reviews of client documents, reducing scope of work performed, failing to research an accounting principle, failing to obtain sufficient audit evidence and underreporting of audit time

Moreover, there have been many discussions about the integrity and objectivity of auditing profession especially after the highly publicized collapse of Enron. In Indonesia,

according to the Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) that reported by World Bank and International Monetary Fund, auditors sometimes do not apply necessary procedures and completely rely on management representation regarding fair values, impairment of assets, contingent liabilities, accounting estimates, etc. Also, the auditors are generally found to accept valuation reports, actuarial reports, and other expert opinions/reports without evaluating whether the expert has the necessary competence, capabilities, and objectivity for the auditor's purposes.

ROSC's report provides evidence that RAQ behaviors are highly problematic in auditing profession and should trigger a warning alarm to regulatory bodies, particularly in Indonesia. This may show an increasing trend in auditors involved in such unprofessional behaviours which could have a detrimental effect specifically on the audit opinion. This will be more responsibility for the accounting firm, as an independent institution to be trusted by the stakeholders of financial statements to express an opinion on the fairness in all material respects of financial statement in accordance with general accepted accounting principles in Indonesia and also responsibility for the accounting firm to minimize the occurrence and acceptance of RAQ behavior that conducted by their auditors, so that the financial information audited will be both reliable and relevance.

For that reason, the motivation of this research is to give a better understanding about the unfavorable impact of time budget pressure on auditor's behavior and also to investigate whether there is a tendency for auditors in accounting firms in Indonesia to use RAQ behavior. This study will examine the influence of time budget pressure towards reduced audit quality behavior among Indonesian auditors. This study will also conduct further research about the reasons and areas that respondents take in order to engage RAQ behaviors. To do so, this study will conduct a quantitative approach to determine the relation between time budget pressure and RAQ behavior. Data was obtained by spreading out the questionnaire to the 17 accounting firms in 5 cities in Indonesia. To analyze the data, the validity and reliability testing of the instruments will be conducted first then followed by hypothesis testing with regression analysis and classical assumption testing.

The model was tested 78 auditors at staff and senior levels in five cities in Indonesia. Results of this study suggested that time budget pressure has consistently been significant to RAQ behaviors and it is consistent to the results that found by Coram et al (2003), Otley and Pierce (1996), Kelley and Margheim (1990) and Azad (1994). Fundamental theory that

support the hypothesize, research methodology used in this study and the results will be examined further in the next paragraph.

## LITERATURE REVIEW

### Reduced Audit Quality Behavior

Reduced Audit Quality (RAQ) behavior defined by Herrbach (2001) as the poor execution of an audit procedure that reduces the level of evidence gathered for the audit, so that the collected evidence is unreliable, false or inadequate quantitatively or qualitatively. RAQ behavior occurs when auditors do not properly execute audit procedures required to complete their tasks. This behavior not only will have a negative effect on individual auditors (e.g., in performance evaluation), it also threatens the outcome of the engagement and the validity of the audit opinion thus affecting the overall firm's performance and users' economic decisions (Paino et al. 2011). RAQ behavior is viewed as necessary in situations where organizational and/or personal goals cannot be achieved through typical means of performance. Therefore, auditors having a lower perception of their performance level are expected to exhibit a higher acceptance of RAQ behavior (Donnelly et al. 2003)

Previous studies have attempted to measure the incidence of RAQ behavior by focusing on three types of behavior: premature sign-off, under-reporting of time and other audit quality reduction behavior. The consequences of such behavior are therefore potentially serious, since it interferes directly with the control system which supports the final audit opinion. Although RAQ behavior does not necessarily lead audit firms to issue inappropriate audit opinion, however, it would increase the audit risk (Coram et al. 2003), in the sense that the probability of firms issuing the wrong opinion is higher.

There have been many studies that had already examined RAQ behaviours (Kelley and Margheim 1990; Raghunathan 1991; Azad 1994; Otley and Pierce 1996; Shapeero et al. 2003; Mohd Nor et al. 2010; Paino et al. 2011; Kelley and Seiler 1982; Herrbach 2004; Akers et al. 1998) including premature signing-off, making superficial reviews of client documents, reducing scope of work performed, failing to research an accounting principle, failing to obtain sufficient audit evidence and underreporting of audit time

Premature sign-off is defined as the audit personnel signing-off on audit program steps before completing one or more of the required audit procedures (Raghunathan 1991). A premature audit sign-off occurs when an auditor documents the completion of a required



procedure that is not covered by other audit procedures, without performing the work or noting the omission of the procedures, unlike underreporting (where the work is performed), premature sign-off directly affect audit quality and violate professional standards (Shapeero et al. 2003). Raghunathan (1991) has studied the existence of premature sign-off among auditors of four of the Big Eight accounting firms in United States, he found that 55% of the respondents admitted to premature sign-off. Those study show a high incidence of premature sign-off compared to Mohd Nor et al (2010) with only 15,9%. According to Raghunathan (1991) a commonly quoted outcome of time budget pressures is premature sign-off.

Reducing the amount of work performed is also considered as RAQ behavior which already investigated by Kelley and Margheim (1990). They found 31% of respondent engaged with this behaviour, this number is higher than Mohd Nor et al. (2010)'s study with only 20,5%. Reducing the amount of work performed occurs when auditors do less work on an audit work than normally would have been done (Otley and Pierce 1996)

The other RAQ behavior is making superficial review of the client's documents. Making superficial review occurs when the auditor give a lack of attention of validity and accuracy of clients documents (Silaban 2009). Mohd Nor et al. (2010) found 45,5% of respondents admitting to engaging this behavior, this number shows a high incidence of RAQ behavior compared to Kelley and Margheim (1990)'s study with only 25% of respondents admitting to engaging in making superficial review.

Failing to research an accounting principle is considered as a RAQ behavior that occurs when auditors does not examine the suitability of the accounting principles that is applied by client to the generally accepted accounting principles. This behavior is so contrary to the Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Section 150, Standards of Reporting, that state the report shall state whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP). Mohd Nor et al (2010) found a low incidence in this behavior, with only 13,7% respondents admitted to engaging in failing to research an accounting principle.

The other RAQ behavior which directly impact on audit quality is failing to obtain sufficient evidence. According to Silaban (2009) Failing to obtain sufficient evidence is when the auditors didn't perform the entire sample as designed in the audit program, no further investigation of the uncertain item and not expand the scope to test the suspicious transaction



or post, and using the client's explanation to replace the evidence that cannot be obtained during the audit work.

An auditor works within economic limits that dictate that sufficient audit evidence must be obtained within a reasonable time and at a reasonable cost. Thus, the auditor is frequently faced with a decision as to whether the additional time and cost will produce commensurate benefits in terms of the persuasiveness of the evidence obtained. Mohd Nor et al (2010) has conducted the study in RAQ behaviour, found only 13,7% of their respondents admitted to engaging in failing to obtain sufficient evidence. Compared to Coram et al (2003)'s study, they found 57,1% of respondents engaged in this behavior.

Underreporting of audit time has also been shown as dysfunctional behaviour that indirectly impact on audit quality. According to Holmes and Burns (1979: 216) most public accounting firms require each member of their professional staffs to maintain a daily record of time worked and reimbursable expenses incurred. These personnel record-keeping policies usually require a record of hours worked in terms of the hours spent in various engagements and the type of work performed. Engagement time records are usually designed to accumulate actual time charges in terms of both staff members and the various segments of work done. Comparisons of actual time spent on various segments of the audit to budgeted time and the actual status of work provide the in-charge auditor a useful means for monitoring and controlling the progress of an audit. Such records also facilitate compliance with the first generally accepted auditing standard of field work (planning and supervision).

Public accounting firms use reported chargeable hours to bill clients, set time budgets for assignments, and evaluate employee performance (Akers et al. 1998). A firm's ability to successfully perform these functions depends on the accuracy of the time sheets filled out by auditors. However, the results of study conducted by Akers et al. (1998) suggest that a majority of accountants have intentionally underreported their chargeable hours, either by not recording time worked or by shifting chargeable hours to non-chargeable categories.

Underreporting may also affect a firm's ability to accurately assess employee performance. Ligthner et al. (1983) in Shapeero et al (2003) found that underreports believed would lead to better performance evaluations, supervisor recognition of competency, and increased job security. However, when employees fail to report all of their chargeable hours, the firm's ability to accurately assess employee performance is undermined. Similar to Lightner et al. (1983), Akers et al. (1998) states there are problems for both the CPA firm and

the individual accountant that result from underreporting time. Problems related to the firm from underreporting of audit time include assist in the preparation of the budget for the next year, actual time can be used in negotiating next year's fees, bill client additional fees, etc and problems related to the individual accountant include poor moral and lower productivity, which could result in poor evaluations which eventually, will lead to turnover. Ultimately, the accountant's problems become the firm's problems

### **Time Budget Pressure**

Budget related time pressure can occur when the budgeted amount of time is less than total available time and the auditor can respond to the pressure by completing the work in their own personal time and underreporting the amount of time spent on the audit task (Paino et al. 2011). In general, audit time budget pressure occurs when an audit firm allocates an inadequate number of hours for auditors to complete specified audit procedures (Margheim et al. 2005). Auditors are responsible for ensuring that audit tasks are completed within the budget allocated by management and in accordance with auditing standards, regulations and rules. The emphasis which the audit firm places on meeting time budgets can influence individual auditor behaviour because time budget achievement is seen by auditors as being critical for performance evaluation (Otley and Pierce 1996).

Once a time budget is set, it becomes a performance goal and auditors are expected to meet it. Undue emphasis on meeting budgeted time may create pressure on auditors in performing audit assignments. This in turn may lead to negative behavior similar to that exhibited by independent auditors (Mohd Nor et al. 2010). Otley and Pierce (1996) argued that auditors will behave unprofessionally under time budget pressure and are more likely to be involved in dysfunctional behaviour. A similar finding has been found in a recent study conducted by Coram et al. (2003), the 60% of auditors surveyed who admitted to engaging in RAQ behavior, almost 80% of the respondents cited time budget pressure as a factor in committing these acts.

As the time budget pressure increased, auditors' performance decreased significantly (McDaniel 1990), thus suggesting that as auditor's perception of budget attainability decreased, the higher the possibility that auditors will engage in unprofessional behaviours. Similar to Raghunathan, Otley and Pierce (1996) argue that auditors will behave unprofessionally under time budget pressure and are more likely to be involved in dysfunctional behavior. The result of Azad (1994) confirms that time budget induces auditors

to react negatively when conducting their audit work through premature sign-offs, underreporting of audit time and overruling audit programs. This is consistent with the results of Coram et al. (2003), 63% of respondents who admitted RAQ behaviors were asked why they had done so. 77,8% of them chosen the time budget pressure as the main factor of doing RAQ behavior.

According to the previous researches, their findings suggest that RAQ behavior may occur when there is a time budget pressure within their firm. Therefore, this study expects to find whether there is an association between time budget pressure and RAQ behavior.

Therefore, the following hypothesis will be tested:

**H1:** *There is an association between time budget pressure and the occurrence of RAQ behaviors*

## RESEARCH METHODOLOGY

This study is conducted in quantitative approach. The questionnaire used in this study was based on the questionnaire used by Coram et al. (2003), Mohd Nor et al. (2010) and Silaban (2009). The questionnaire was divided into two parts. The first part requested biographical information about the participant. The second part consisted of questions that used a Likert-type scale ranging from 1 to 5 to measure responses and also asked participant to tick their responses in the appropriate boxes.

The sample for this study came from contacted accounting firms which are willing to participate in this study, there are 17 accounting firms. Respondent for this study consisted of staff and senior auditors which are directly related to the process of gathering audit evidence. Staff and senior auditors were selected mainly because previous studies had found high incidence of RAQ behaviors and URT in these levels (Otley and Pierce 1996; Kelley and Seiler 1982; Mohd Nor et al. 2010; Coram et al. 2003). 107 Questionnaires were spread out to 17 accounting firms and 99 responses were received. Because of the uncompleted answer in some questionnaires, only 78 responses that will be examined in this study. Of the responses 62 (79,5%) came from junior auditor and 16 (20,5%) from senior auditor. The male-female distribution was 51,3% - 48,7%. 51,3% had less than 2 years of audit experience, 33,3% had 2-4 years and 15,4% had 5 years or more experience.

## Operational Definition and Measurement:

### a. Time Budget Pressure

In general, audit time budget pressure occurs when an audit firm allocates an inadequate number of hours for auditors to complete specified audit procedures (Margheim et al. 2005; Mohd Nor et al. 2010). According to that independent variable in this study is operationalised by asking the respondent about the adequacy of time budget allocated within their firm and also their perception about time budgets within their firms which were adapted from Otley and Pierce (1996). This independent variable is also operationalised by asking the respondent about how often respondents feel that time budget as a constraint to the implementation or completion of certain audit procedures

### b. Reduced Audit Quality Behavior

RAQ behavior occurs when auditors do not properly execute audit procedures required to complete their tasks. RAQ behaviour operationalized by premature signing-off, making superficial reviews of client documents, reducing scope of work performed, failing to research an accounting principle, failing to obtain sufficient audit and Underreporting of Audit Time

To analyze the data this research used Regression Analysis by using SPSS version 18 by conducting statistic description, classical assumption test and hypothesis testing. The regression analysis models for this research are as follow:

$$RAQ = \beta_1 TBP + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Where :

RAQ = Reduced Audit Quality Behavior

TBP = Time Budget Pressure

$\beta_n$  = regression coefficients

$e_n$  = unexplained variance

In analyzing, there are two things to note, the meaning of the correlation and the significant result of correlation (Santoso 2000). If the coefficient of correlation  $> 0,5$  it means there is a strong correlation between each indicator and if the coefficient  $< 0,5$  it means there is a weak correlation between each indicator . While the significant result of

correlation is aimed for decision making (based on probability). If the probability is  $< 0,05$  then there is a significant correlation between each indicator and if the probability is  $> 0,05$  then there is no correlation between each indicator.

## RESULTS

### Descriptive Analysis

When respondents were asked how they describe the time budget that they face within their firm, 46,2% of respondents answered the time budget was attainable with reasonable effort and followed by attainable with considerable effort with 29,5% and only 7,7% of respondents admitted that the time budget is very easy to attain. While, when respondents were asked how often they feel the time budget within their firm as a constraint to the completion of certain audit procedures. Above a half of respondent answered “sometimes”, followed by 30,8% of respondents answered “often” and only 5,1% answered “never” they feel time budget as a constraint to the completion of certain audit procedures. Based on the table 2, respondents were asked how often they think the time budget allocated within their firm is generally inadequate. Above a half of the respondents or 56,4% admitted that the time budget in their accounting firm is inadequate “sometimes”, whereas about 28,2 % of respondents admitted the time budget is “often” inadequate.

As Revealed in the table 2 that about 80% of respondents admitted that time budget as a constraint to the implementation of certain audit procedures at least “sometimes” and they also admitted that the time budget in their firms was inadequate at least “sometimes”. Margheim, Kelley and Pattison’s (2005) argument appears to add weight to these results that the time budget pressure occurs when an audit firm allocates an inadequate number of hours for auditors to complete specified audit procedures.

**Table 1**

### Time Budget Attainability

**How would you describe the time budget that you faced within your firm?**

Response	% of Respondents	
Very easy to attain	7,7%	6
Attainable with reasonable effort	46,2%	36
Attainable with considerable effort	29,5%	23
Very tight, practically unattainable	15,4%	12

Impossible to achieve	1,3%	1
-----------------------	------	---

Sumber: output SPSS

**Table 2**  
**Time Budgets**

<b>TBP</b>	<b>Never</b>	<b>Rarely</b>	<b>Some-times</b>	<b>Often</b>	<b>Nearly Always</b>
How often do you feel the time budget within your firm as a constraint to the completion of certain audit procedures?	5,1%	2,6%	59%	30,8%	2,6%
How often do you think the time budget allocated within your firms generally inadequate?	3,8%	7,7%	56,4%	28,2%	3,8%

Sumber: output SPSS

RAQ behaviors were operationalised by premature sign-off, reducing scope of work performed, making superficial review, failing to research an accounting principle and failing to obtain sufficient evidence. In this question, respondents were asked when they are under so much pressure that they were tempted to speed up, what typical behaviors they would engage. On a positive note, all of these forms of RAQ behaviors had a very low percentage of occurrence and between 14,1% - 41% of respondents admitted that they rarely engage these RAQ behaviors. These results appear lower than the results of Coram et al. (2003), where between 42% - 50% of respondents said RAQ behaviors never occurred.

The percentage of auditors who reported to “often” or “always” engaging in the following RAQ behaviors are: 29,4% for premature sign-off; 18% for reduced scope of work performed; 47,4% for making superficial review; 18,5% for failing to research accounting principle; and 24,3% for failing to obtain sufficient evidence. Most of respondents (ranging from 21,8% to 52,6%) admitted “at least sometimes” to engaging in RAQ behaviors. This study shows a low incidence of RAQ behaviors among the auditors compared to Coram et al. (2003) and Mohd Nor et al. (2010) with 63% and 68,2% of auditors admitting to engaging in RAQ behaviors. According to Donnelly et al. (2003) RAQ behavior is viewed as necessary in situations where organizational and/or personal goals cannot be achieved through typical means of performance. Therefore, auditors having a lower perception of their performance level are expected to exhibit a higher acceptance of RAQ behavior.

Underreporting were operationalised by underreport time by working on personal time, shift time to a non chargeable category and shift time to a different client. The

percentage of auditors who reported “often” to “nearly always” engaging in the following underreporting are: 34,6% for underreporting by working on personal time; 33,3% for shift time to a non chargeable category; and 29,5% for shift time to a different client. In this question, respondents were asked when they feel a time budget is unattainable, what typical behaviors they would engage. From table 4.9 it is clear that work harder and charge all time properly is a way of accommodating extra work when a time budget is unattainable, with 39,7% of respondents suggested that this occurred “often”.

**Table 3**  
**Reduced Audit Quality Behavior (RAQB)**

RAQ	Never	Rarely	Some-times	Often	Nearly Always
Premature sign-off	12,8%	35,9%	21,8%	25,6%	3,8%
Reducing scope of work performed	9%	20,5%	52,6%	16,7%	1,3%
Making superficial review	3,8%	14,1%	34,6%	39,7%	7,7%
Failing to research an accounting principle	14,1%	41%	26,9%	14,1%	3,8%
Failing to obtain sufficient evidence	7,7%	29,5%	38,5%	19,2%	5,1%
Under-report time by working on personal time	5,1%	12,8%	47,4%	26,9%	7,7%
Shift time to a non-chargeable category	6,4%	29,5%	30,8%	25,6%	7,7%



Shift time to a different client	15,4%	24,4%	30,8%	21,8%	7,7%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber: output SPSS

**Table 4**  
**Reasons For RAQ**

Reasons	Response
Inadequate Number of Time Budget	46,1%
The Work is low-risk	43,5%
The Work is boring	23,1%
Peer Pressure	34,6%

Sumber: output SPSS

Based on the table above, respondents were given four choices about what was the main reason when they do those behaviors. It can be seen that two main reasons that get high responses were inadequate number of time budget and the work is low risk with 46,1% and 43,58%. This was consistent with the results of Coram et al. (2003), where 77.7% for inadequate of time budget and 96% for the work is low risk were the main reasons why auditors admitted to engage RAQ behaviors. The high number of response to “inadequate number of time budget” as a reason for RAQ behaviors is a concern of this study. This section appears to add weight to the result in this study because when respondents were asked in question X1.1, X1.2 and X1.3 about the time budget pressure, above a half respondents admitted that there was a time budget pressure within their firm and it seems associated to the occurrence of RAQ behaviors as the results of this study revealed that time budget pressure has a significant influence towards RAQ behaviors. The high response also found in “the work is low-risk” suggests that if auditors are going to engage RAQ behaviors they are likely to do it in an area where they perceive the risk of an undetected error as low (Coram et al. 2003). However, premature sign-off, reducing scope of work performed, making superficial review, failing to research an accounting principle and failing to obtain sufficient evidence are clearly unacceptable audit practices in most circumstances and a judgment by auditors that the section of audit work is lower risk than planned should not justify these actions. An alternative theory by Coram et al. (2003) for the high justification of RAQ behaviors based on risk is that auditors are making *ad hoc* judgments about the level of risk for various components of the audit. If this is the case, perhaps junior auditors need more education about the importance of their work in performing the overall audit opinion.

Another reason to be a concern in this study was peer pressure. About 34,6% admitted peer pressure was the reasons they engage those behaviors. Ponemon (1992) describes peer pressure occurs when the auditor may be told to underreport by a superior or may perceive



other members of the same audit firm underreporting or may view his or her own performance as insufficient or may perceive other members of the audit team as being more skilled in performing assigned tasks. It can be concluded that when auditors perceive that their performance is insufficient compared to the others, they see underreporting as a “good” way to represent their performance as good as the other members’ performance in audit work or they may chose RAQ behaviors to be seen that their audit work is efficient, whether they do it by reduce the scope of work performed or no further investigation about the awkward-items in the audit work.

**Table 5**  
**Areas Subject To RAQ**

<b>Areas</b>	<b>Response</b>
Compliance Testing	37,2
Stock	25,6
Creditors	5,1
Debtors	10,2
Bank and Cash	20,5
Completion of audit	30,7

Sumber: output SPSS

Respondents in this study were asked about which areas of audit work that indicates the RAQ would be occurred. The areas that most likely to suffer from RAQ behaviors were compliance testing with 37,2%, 25,6% for stock, 5,1% for creditors, 10,2% for debtors, 20,5% for bank and cash and 30,7% for Completion of audit. These results were consistent with Coram et al. (2003) where compliance testing receives the highest response with 63% and followed by completion and creditors with 48,1%. Although “compliance testing” and “completion of audit” are not “areas” of the audit, they were included in the question as they are clearly sections of work that auditors would perceive as being separate and requiring specific types of work steps.

A concern highlighted in this study was the 37,2% of respondents who admitted to RAQ practices in the compliance testing. The results from ROSC (2011) seems to support to this study where more than 400 accounting firms in Indonesia, only few firms appear to have high level of compliance with the applicable auditing standards. A possible explanation for the high response to this question is that when auditors are struggling to meet the time budget, the superficial review of the compliance testing maybe needed by auditors.

Another concern highlighted in this study was the 30,7% of respondents who admitted to RAQ practices in the completion of audit. This part of audit includes the final analytical

review, review for subsequent events and finalizing the audit file. A possible explanation for the high response to this question is that it was interpreted by the participants as the process of tidying up the audit file by filling in all the completion schedules rather than dealing with higher-level issues such as “going concern”, “accounting treatment disputes” or “audit qualifications” (Coram et al. 2003). This would be consistent with the findings of Rhode (1978) who suggested that tests only requiring “ticks” as audit evidence are more prone to irregular auditing practices (Coram et al. 2003). The relative inexperience of the participants suggest that they may not have been familiar with the higher level aspects of the audit completion process.

## Statistical analysis

**Table 6**  
**Regression**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.274	.305		.899	.372			
TBP	.866	.099	.707	8.704	.000	.707	.707	.707

Sumber: output SPSS

Based on linear regression analysis , regression coefficient is positive with level of significance lower than 0,05 which means when time budget pressure increases it will influence auditors to engage RAQ behaviors during audit work, significantly. This result is consistent with study that conducted by Coram et al. (2003), Otley and Pierce (1996) and Kelley and Margheim (1990) where time budget pressure is positively associated with RAQ

behaviors. Further, author traces that over 90% of the respondents in this study admitted that they engage at least one of those RAQ behaviors. This result appears to be consistent with Otley and Pierce (1996) who found that 12% of respondents indicated never for all five types of RAQ behaviors and Coram et al. (2003) found high percentage that 37% of auditors admitted never engaged in any type of RAQ behaviors.

Mohd Nor et al's (2010) argument seems to add weight to this result that it is easy to understand why auditors preferred to behave unprofessionally under time budget pressure because when auditors are struggling to meet the budget which could have a destructive effect on their performance evaluation, many auditors see RAQ behavior as a way out. Consistent with studies performed overseas (Australia, Ireland, Malaysia and California) it seems that in Indonesia there is a fairly high level of time-budget pressure on auditors as revealed in table 2 and this pressure appears to be associated with RAQ behaviors

Results of this study also supported by the result that reported by World Bank and International Monetary Fund on "Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Indonesia". More than 400 accounting firms in Indonesia, only few firms appear to have high level of compliance with the applicable auditing standards. Interviews with a few practicing auditors of all sizes of firms and discussions with the audit practice reviewers of the Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), revealed some important compliance gaps in auditing practices. Some of these compliance gaps are as follows:

1. Audit planning. Many auditors in Indonesia do not seem to appreciate the importance of proper audit planning and often conduct audits without developing an appropriate audit plan.
2. Documentation. It appears that among the majority of practicing auditors there is a lack of understanding of what is to be documented and how. Mostly in the audit of small and medium-sized enterprises, documentation practices fail to provide audit evidence to support the audit opinion. Some knowledgeable stakeholders stated that in many cases, even when auditors performed the appropriate procedures, they might not document them in their working papers.
3. Fraud. Many practicing auditors do not appear to make best efforts to properly apply the procedures for detecting fraud while conducting an audit exercise. The auditors in general need to undergo practical training to understand the essence of relevant international standards and be able to use the fraud risk indicators.

4. Going concern. In some audits there is a lack of procedures to obtain sufficient audit evidence about the appropriateness of management's use of the going concern assumption in the preparation and presentation of the financial statements
5. Related parties. In some audits, the auditors do not appear to be serious about applying rigorous procedures to identify, assess, and respond to the risks of material misstatement arising from the audited entity's failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions, or balances.
6. Other issues. Auditors sometimes do not apply necessary procedures and completely rely on management representation regarding fair values, impairment of assets, contingent liabilities, accounting estimates, etc. Also, the auditors are generally found to accept valuation reports, actuarial reports, and other expert opinions/reports without evaluating whether the expert has the necessary competence, capabilities, and objectivity for the auditor's purposes.

This report provides evidence that RAQ behaviors are highly problematic in auditing profession and should trigger a warning alarm to regulatory bodies, particularly in Indonesia. This may show an increasing trend in auditors involved in such unprofessional behaviours which could have a detrimental effect specifically on the audit opinion. Although RAQ behavior does not necessarily lead audit firms to issue inappropriate audit opinion, however, it would increase the audit risk (Coram et al. 2003), in the sense that the probability of firms issuing the wrong opinion is higher.

However, 14,1% - 41% of respondents admitted that they rarely engage to RAQ behaviors when they are carrying out the audit work. This could be understood when most of auditors do not perceive time budget as their main problem when it could be achieved, although with considerable effort (Mohd Nor et al. 2010). Auditors are responsible for ensuring that audit tasks are completed within the budget allocated by management and in accordance with auditing standards, regulations and rules. Consistent to General Standards in GAAS which is stated "the audit is to be performed by a person who is having an adequate technical training and proficiency as an auditor". Accounting firms should ensure that auditors who performed an audit work should comply with Indonesian Public Accountant Professional Standards (SPAP) that set by the Audit Standards Committee (DSP), so that they can provide a high-quality auditing service and behave in the best interest of firms.

According to ROSC (2011), Indonesia needs to scale-up efforts for increasing the number of qualified professional accountants. As of December 2009, there were 47,500

MoF-registered accountants in Indonesia. Only a fraction of these have taken IAI membership. In Indonesia with a population of 240 million, IAI's membership of less than 8,000 shows a skewed picture of the availability of qualified professionals. According to ROSC (2011) the problems within the accountancy profession are exacerbated when considering that about 40 percent of public accountants in Indonesia are above the age of 60 and about 8 percent are under the age of 40.

After all, this may a responsibility of the accounting firm to be more aware of the incidence in these undesirable acts under time budget pressure in their accounting firm. As the quality of audited financial information used by the users' economic decision in Indonesia or even overseas countries, there is need to enhance the quality of corporate financial reporting and to further strengthen the effectiveness of monitoring and enforcement mechanisms, which will have an impact on enhancing investor confidence in corporate financial information (ROSC, 2011).

## CONCLUSION

This study has examined the undesirable behaviors under time budget pressure among Indonesian Auditors. The model was tested 78 auditors at staff and senior levels in five cities in Indonesia.  $R^2$  testing in this study shows us that time budget pressure can cause in Reduced Audit Quality (RAQ) behaviors for 49,9%, however there are 50,1% remaining factors that might be influence RAQ behaviors that not conducted in this study. Further, t-test conducted in this study indicates significant influence of time budget pressure toward RAQ behaviors, where H1 is accepted. From the results of this study, it can be seen that time budget pressure has consistently been significant to RAQ behaviors, it is consistent to the results that found by Coram et al. (2003), Otley and Pierce (1996), Kelley and Margheim (1990) and Azad (1994) and this study also provides evidence that RAQ behavior is still a highly problematic in auditing profession, particularly in Indonesia. Results in this study show there are 21,8% to 52,6% of respondents admitted to engage RAQ behaviors at least sometimes, however about 12,8% to 41% of respondents admitted that they rarely engage to RAQ behaviors when they are carrying out the audit work

It should be noted that although RAQ behaviors was found to be higher in this study, it doesn't mean that the audit opinion will be incorrect, as this study didn't provide further evidence about the effect of RAQ behaviors towards Audit quality. However, the work performed by staff and senior auditor does provide a foundation for the audit opinion and if

there is a high level of RAQ, the probability of an inappropriate audit opinion will be increased.

Some limitations of this study should be noted. The surveys were conducted at a limited number of auditors. There is a possibility that the results may not be representative of the population because of the small number of respondents and in addition to that, the sampling technique is also a subject to few disadvantages such as sampling bias. Further, the results of this study cannot be generalised and should be interpreted in the context of the Indonesian auditing environment. The study only examined senior and staff level, the findings are also not generalisable to other auditor levels. The survey method involving questionnaire is also exposed to certain problems, particularly related to language that is used in the questionnaire was in English may lead to misunderstanding of the topics and the questions and also the credibility of the answer given by respondents and little control over who completes a questionnaire, which can lead to bias.

## REFERENCES

- Akers, Michael D., Charles T. Horngen, and Tim V. Eaton. 1998. Underreporting Chargeable Time: A Continuing Problem For Public Accounting Firms. *The Journal of Applied Business Research*. Vol. 15 No.1. p.13-20
- Azad, Ali N. 1994. Time Budget Pressure and Filtering of Time Practices in Internal Auditing: A Survey. *Managerial Auditing Journal*.p.17-25
- Boynton, William C. and Raymond N. Johnson. 2006. Modern Auditing. Eight Edition. United States of America: Von Hoffmann Corporation.
- Coram, P., Ng, J., and D. Woodliff. 2003. A Survey of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality Among Australian Auditors. *Australian Accounting Review*.p.38-44
- Donnelly, David P., Jeffrey J. Quirin, and David O'Bryan. 2003. Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics. *Behavioral Research In Accounting*. Vol. 15. P.87-110
- Herrbach, Olivier. 2001. Audit Quality, Audit Behavior and The Psychological Contract. *The European Accounting Review*. Vol.10 No.4.p.787-802
- Holmes, Arthur W. and David C. Burns. 1979. Auditing Standards and Procedures. Ninth Edition. Singapore: Toppan Printing Co.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indonesian Institute of Accountants. 2011. Report On the Observance of Standards and Codes (ROSC).
- Kelley, Timothy and Robert E. Seiler. 1982. Auditor Stress and Time Budgets. *The CPA Journal*. p.24-34
- \_\_\_\_\_, Timothy and Loren Margheim. 1990. The Impact of Time Budget Pressure, personality and Leadership Variables on Dysfunctional Auditor Behavior. *Auditing*. Vol.9 No.2. p.21-42
- \_\_\_\_\_, Timothy, Loren Margheim and Diane Pattison. 1999. Survey On The Differential Effects of Time Deadline Pressure Versus Time Budget Pressure On Auditor Behavior. *The Journal of Applied Business Research*. Vol. 15 No. 4.p.117-128
- Margheim, Loren, Timothy Kelley, and D. Pattison. 2005. An Empirical Analysis of The Effects of Auditor Time Budget Pressure and Time Deadline Pressure. *Journal of Applied Business Research*.p.23-35
- McDaniel, Linda S. 1990. The Effects of Time Pressure and Audit Program Structure on Audit Performance. *Journal of Accounting Research*. (Autumn): Vol.28 No.2.p.267-285
- Mohd Nor, M. N., Malcolm Smith, and Zubaidah Ismail. 2010. Auditor's Perception of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality Practices: A Preliminary Study From Malaysian Context. p.1-11
- Otley, David T., and Bernard J. Pierce. 1996. The Operation of Control Systems in Large Audit Firms. *A Journal of Practice & Theory*. (Fall).p65-84
- Paino, H., A.Thani, and S. Zulkarnain. 2011. Dysfunctional Auditor Behavior: The Effect of Budget Emphasis Leadership Behaviour, and Effectiveness of Audit Review. *European Journal of Social Sciences*. Vol.21 No.3.p436-447
- Ponemon, L.A. 1990. Ethical Judgments in Accounting: A cognitive-developmental perspective. *Critical Perspectives on Accounting*.p.191-215
- Raghunathan, Bhanu. 1991. Premature Sign-Off of Audit Procedures: An Analysis. *Accounting Horizons*. (June).p.71-79
- Shapeero, Mike, Hian Chye Koh, and L. N. Killough. 2003. Underreporting and Premature Sign-Off in Public Accounting. *Managerial Auditing Journal*.p.478-489
- Silaban, Adanan. 2009. Perilaku Disfungsional Auditor Dalam Pelaksanaan Program Audit. Semarang



## The Effect of Leverage on Firm Value with Financial Health and Free Cash Flow as Moderating Variable

**TINTIEN JOSEPHA SINAGA\***  
*University of Indonesia*

**Abstract:** *The purpose of this study is to examine the effect of leverage policy on firm value and the level of financial health as well as free cash flow to the relationship between leverage and firm value of the non-financial companies in Indonesia Stock Exchange. The population is all non-financial companies listed on Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. Samples of 795 observations are selected using purposive sampling method. Testing the hypothesis uses multiple regression models. The result shows that leverage has positive and significant effect on firm value. This suggests that leverage can increase firm value since there is funds availability for operational and tax benefit. Moreover, financial health can strengthen the positive effect of leverage on firm value. Company which has health financial conditions can minimize potential bankruptcy that is possible existing because of using leverage. While free cash flow don't minimize agency problem that may exist in the relationship between debt and firm value.*

**Keywords:** *leverage, firm value, financial healthy, free cash flow, moderating*

---

\* Author can be contacted at: [tienjosepha@gmail.com](mailto:tienjosepha@gmail.com)



## 1. Introduction

Leverage policy is one of management decisions playing an important role in maximizing firm value. Funding decisions selected by the management will have an influence on investor return and risk as well as company's. Therefore management needs to determine the best funding decisions in maximizing firm value.

Various theories have explained how leverage can affect firm value. Modigliani and Miller (1963) states that firm using debt has higher value compared to firm that doesn't use debt (Pasaribu, 2009). This is due to the tax benefit. Using 100% debt for taking tax benefit isn't possible because the higher use of debt, the higher impact of bankruptcy due to inability to pay off debts. The trade off theory (Stiglitz, 1969) explains that the optimal capital structure is reached when benefits and expenses arising as a result of the use of debt is equal. The agency theory (Jensen and Meckling, 1976 in Fithri, 2012) explains that the financial structure is influenced by incentives and behavior of management. Separation of control because of delegation of authority is one of the factors that cause management more flexible to determine debt policy according to personal interest. So the policy in the capital structure is considered vulnerable to agency problems among shareholders, management and creditors. The signaling theory (Ross, 1977 in Pasaribu, 2009) also explains that funding policy used by the company can send the signal to market. It's because of information asymmetry between management and investor. Meanwhile, the pecking order theory (Myers and Majluf, 1984 in Kanam, 2011) describes the sequences of funding in accordance with the investment needs which prefers internal than external funding.

Based on these theories, many studies examine the capital structure on firm value and factors affecting financial structure. However, those haven't shown consistent results. Researches conducted by Lin and Lixin (2008), Weill (2003), Nengjiu et al., (2005), Taswan (2003), and Andriani (2008) show positive effect of debt policy on firm value. Different results described by Kim (2005), Alonso, Iturriaga, and Sanz (2005), Chen (2002), Sujoko and Soebiantoro (2007), as well as Kanam (2011) show negative effect of debt policy on firm value.

Based on researches showing inconsistent results on the relationship debt and firm value, so it is necessary to expand this study in using of contextual variables that may moderate the relationship between both measured variable. Moderating variable can provide more specific information when the positive effect of debt policy can strengthen on firm value. Financial

health is used as a moderating variable in minimizing potential bankruptcy which appears on debt. The healthier finance, the less likely bankruptcy (Altman, 1968).

While, free cash flow is used as a moderating variable in minimizing potential agency problems such as excessive dividend payment, asset substitution, underinvestment and dilution claim which adverse creditors (Smith & Warner in Godfrey et al. (2010:11). Existence of free cash flow can be used to pay dividends, invest in projects that provide high return, maximize investment and minimize dilution through debt payment. Further, potential agency conflicts between management and shareholders which appear on free cash flow can be reduced because debt absorbs the free cash flow for debt repayment. So in total, the agency conflicts between creditors, management and shareholders can be minimized by the availability of free cash flow.

There hasn't research in Indonesia yet that examines the relationship between debt and firm value using financial health and free cash flow as a moderating variable. Therefore, this study may enrich the literature which analyzes the relationship between debt and firm value with financial health and free cash flow as moderating variables.

## **2. Theoretical Framework and Hypothesis Development**

### **2.1 Theoretical Framework**

#### **2.1.1 The Static Trade Off Theory**

Stiglitz (1969) explains that the essence of trade-off theory is to optimize capital structure, benefit and burden arising from the use of debt have to be balance. The beginning of this theory is Modigliani-Miller II Theory (Modigliani & Miller, 1963) which is looking for the tax benefits because of using debt. But the usage of debt has another effect that company doesn't have inability to repay the debt (insolvency). It may build greater the potential bankruptcy of the company. So according to the trade off theory, to determine the optimal capital structure, management should take into account the trade-off between profit taxes and the financial burden arising from using debt in the capital structure. Companies will increase debt if the present value of debt benefit is greater than the present value of financial burden like bankruptcy costs.

#### **2.1.2 Agency Theory**

Jensen and Meckling (1976) state that the agency relation is a contract between agent and principal. Principal delegates authority to the agent to make decisions that can maximize the welfare of the principal. But in this situation both principal and agent strive to maximize their

individual interests so it can't be ascertained that the agent will always act in principal interest. This has led conflict interest between management and principal that harm principal interest. Conflict interest between management and shareholders occurs when management has less than 100% shares onto company ownership. Because of that, the goal maximizing shareholder wealth is hindered by various other managerial purposes being not accord with the interests of shareholders. While, agency conflicts between management and creditors according to Smith and Warner in Godfrey et al. (2010:11) can be: (1) excessive dividend payment, management borrows and uses funds to pay dividends to shareholders, (2) asset substitution, management prefer to invest projects that have high risk for getting greater returns as benefit to shareholders, (3) underinvestment, when company faces bankruptcy, shareholders won't encourage management to take project with positive NPV because it will only increase funds to creditors not for shareholders, (4 ) dilution claim, when company issues new debt, the priority of this debt will be higher than the previous debt despite of the funds availability to enhance shareholder value. This situation will reduce the value of previous debt because the addition of new debt may dilute it.

These conflicts led to mechanism needs that can be applied to protect the interests of shareholders and creditors. Monitoring mechanism causes higher agency costs borne by investor. Increasing shares ownership for management and using debt in capital structure are two ways to reduce agency costs borne by the shareholders. Furthermore, to address agency conflicts that arise between management and creditors is looking for the availability of free cash flow in the company. Companies that have high free cash flow can mitigate potential agency conflicts that arise in the form of excessive dividend payment, asset substitution, under investment, and claim dilution due to the use of debt.

### 2.1.3 Financial Health

Financial health can demonstrate the potential of company's bankruptcy (Altman, 1968). The healthier finance shows that company has good management ability in company sustainability and make the smaller the probability of bankruptcy faced by the company. Altman model is predicted with 95% accuracy against sample companies that filed for bankruptcy within 12 months. Later, broader sample of firms with various economics analysis is used with the accuracy of the Z-score in range of 82% to 85%. In Indonesia, Rifqi (2009) states that financial distress prediction model using Altman Z-Score and Springgate have accuracy rate in range of 65.38% - 70.51%.

Bankruptcy prediction formulated Altman gives Z-Score's number which can explain company's financial condition in several levels, which are:

1. For Z-Score's number is equal or less than 1.80 ( $Z\text{-score} \leq 1.80$ ), company is in distress zone that shows company is financially troubled and poor.
2. For Z-Score's number is between 1.80 to 2.99 ( $1.80 < Z\text{-score} < 2.99$ ), company is considered to be in the gray area. It shows that is possible for company to bankrupt or may not.
3. For Z-Score's number is greater than 2.99 ( $Z\text{-score} \geq 2.99$ ), company is in safe zone that shows company is financially healthy and conditionally small's bankruptcy.

#### 2.1.4 Free Cash Flow

According to Jensen and Meckling (1976), free cash flow is cash excess required to fund all projects that have positive net present value (NPV). White et al. (2003) defines free cash flow as discretionary cash will be available for companies. Free cash flow origins from operating activities minus capital expenditures being spent to meet company's current production capacity, acquisition, capital spending with growth orientation (growth-oriented), debt repayment, and dividend payment. Thus, in general free cash flow is the excess funds that can be distributed to certain activities and the related decisions made are influenced by management. Yang (2009) states that free cash flow can be proxy used in estimating cost of agency. Free cash flow is a major issue of agency conflicts to overinvest. But it is different when viewed from the creditor position, that higher free cash flow in company can provide assurance to lender that excessive dividend payment, asset substitution, underinvestment, and claim dilution because of using debt can be minimized.

## 2.2 Hypothesis Development

### 2.2.1 Leverage on Firm Value

Starting from trade off theory proposition (Stiglitz, 1969), the use of debt in the capital structure will benefit company because of tax shields from interest payments. Benefits in the form of tax shield implicating additional external capital can improve operational and investment activities of the company. Tax shield will always be positive shown from a variety of analytical models that predict the expense and risk of debt or not (Cheng & Tzeng, 2011). Departing from agency theory proposition (Jensen & Meckling, 1967), the use of debt can reduce agency problems like overinvestment between management and shareholders that lowers firm value. In Indonesia, companies try to take advantage on the lower cost of debt and credit availability to extend the maturity of the financing and to optimize the capital

structure (the study of South East Ernst & Young's Capital Confidence Barometer in SWA magazine, 14 November 2011). This positive relationship is also consistent with studies done by Lin and Lixin (2008), Weill (2003), Nengjiu et al., (2005), Taswan (2003) and Andriani (2008) which state that debt has positive effect on firm value.

H1: leverage has positive effect on firm value

### 2.2.2 Financial Health as Moderating Variable between Leverage and Firm Value

Looking for the trade off theory preposition (Stiglitz, 1969), in addition to the tax benefit, debt also is faced with potential bankruptcy. Greater using of debt, higher potential bankruptcy which can decrease firm value. Obtaining minimum potential bankruptcy in order to strengthen the positive effect of debt on firm value, should be in a health financial condition. Companies which have health financial indicate that the level of liquidity to meet the obligations's quite well, good accumulated profitability, high productivity, high value of the equity market as well as good ability to generate sales thus lead to the minimal bankruptcy problem. Further, company may also establish positive perception to investors indicated by credit rate which is better than previous one. Creditors and shareholders who assess financial health of company will lower the required return. It's beneficial to company because it can reduce cost of capital.

**H2:** *Financial health can strengthen the positive effect of leverage on firm value*

### 2.2.3 Free Cash Flow as Moderating Variable between Leverage and Firm Value

Departing from the trade off theory preposition (Jensen & Meckling, 1976), the higher the free cash flow can be implicitly more valuable for debt to contribute to firm value because it can reduce the agency problem among the shareholders, creditors and management. Agency problems between management and creditors like excessive dividend payment, asset substitution, underinvestment, and claim dilution can be mitigated because free cash flow is used to pay dividends, to invest in projects that provide high return, to maximize investment and to minimize dilution of debt as well as to pay interest. So it can guarantee debt not used to bail out management opportunistic behaviour. On other hand the existence of high free cash flow can be a source of conflict between shareholders and management without giving attention on debt. Basic understanding is free cash flow used to maximize management utility without controlling function. It causes shareholders burden will increase. However, the presence of debt increasing firm value also give other benefit to reduce potential agency conflicts between management and shareholders appearing because of free cash flow through absorb the free cash flow to pay interest. So in total, the use of debt with high free cash flow

in company can minimize agency conflicts in among shareholders, creditors and management relationship.

**H3:** *Free cash flow can strengthen the positive effect of leverage on firm value.*

### 3. Research Method

#### 3.1 Data Collection and Analysis

The samples are non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. There are 795 observations on this research. The summary of sample selection used in research is showed in Tabel 4.1. This research uses secondary data obtained from various sources, JASICA (Jakarta Stock Industrial Classification), Thomson Reuters, PDDB FEUI and companies published financial statements.

Statistical testing uses Random Effect Model. The analytical method used is multiple regression. Multiple regression analysis also was performed to meet classical assumptions like multicollinear, heterocedasticity, and autocorrelation. There isn't multicollinear problem found in research. Testing heterocedasticity and autocorrelation isn't done because the panel method uses Random Effect which has already contained Generalized Least Square. GLS estimate that heterocedasticity and autocorrelation problems become non-existing.

#### 3.2 Research Model

Research model used to test hypotheses 1, 2 and 3 is replication and modification of Cheng and Tzeng (2011) research. To find out the results of testing of hypotheses 1, 2 and 3, researcher uses two models.

Hypothesis 1

$$TQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 Lev_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 Growth_{it} + \beta_4 EPS_{it} + \beta_5 FCFS_{it} + \beta_6 ZScore_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots \text{Model 1}$$

Expectation:

$$H1 = \beta_1 > 0$$

Hypothesis 2, 3

$$TQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 Lev_{it} + \beta_2 Z - Score_{it} + \beta_3 FCFS_{it} + \beta_4 Lev * Z - Score_{it} + \beta_5 Lev * FCFS_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 Growth_{it} + \beta_8 EPS_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots \text{Model 2}$$

Expectation:

$$H1 = \beta_4 > 0$$

$$H1 = \beta_5 > 0$$

Description:

TQ firm value measured by using the ratio of Tobin's Q of firm i on the year ended t

Lev total debt per total assets of firm i on the year ended t

Z-Score financial health measured by using the Altman Z-Score of firm i on the year ended t

FCFS free cash flow per shares of firm i on the year ended t

SIZE firm size, ln total assets of firm i on the year ended t

Growth sales growth of firm on the year ended t

EPS earnings per shares of firm i on the year ended t

### 3.3 Operationalization of Variables

#### 1. Dependent Variable

The dependent variable is firm value. Based on Tobin's Q (1969) Model modified and simplified by Chung and Pruitt (1994) in Sudiyatno and Puspitasari (2010), firm value is the ratio between the sum of market value of equity to book value of total debt divided by total assets.

#### 2. Independent Variables

The independent variable is the leverage. Leverage is measured using with dividing total debt to total asset. This measurement is consistent with others made by Anggarwal and Zhao (2008), Adriani (2008) and Adry (2010).

#### 3. Moderating Variable

##### a. Financial Health (Z-Score)

Financial health of the company can demonstrate the potential company's bankruptcy (Altman, 1968). Companies that are in distress condition suggest that the company's financial poor. Investors perception will become worse over the unhealthy condition of the company and investors see not to consider it because of unattractiveness. Thus, the expected sign of the financial health effect to firm value is positif. Altman Z-Score is formulated as follows:

$$Z - \text{Score} = 1.2 X_1 + 1.4 X_2 + 3.3 X_3 + 0.6 X_4 + 1.0 X_5$$



Description:

Z-Score	The level of financial health
X1	Working capital to total assets
X2	Retained earnings to total assets
X3	Earnings before interest and tax to total assets
X4	Market value of equity to book value of total debt
X5	Total revenue to total assets

b. Free Cash Flow

Free cash flow is the excess funds that can be distributed to certain activities and the distributed decisions are influenced by management. According to Yang (2009) and Richardson (2011) researches, state that companies with high free cash flow tend to overinvest resulting in inefficiencies in the company. Thus, free cash flow is expected negative effect on firm value.

The calculation of free cash flow is following the calculations performed by Ross et al. (2008) and Cheng and Tzeng (2011).

Free cash flow is mathematically formulated as follows:

***Free cash flow = Operating cash flow - Net capital expenditure - Change in net working capital.***

Based on the research Ross et al. (2008), operating cash flow, net capital expenditure and working capital net change can be formulated mathematically as follows:

***a. Operating cash flow = Earnings before income tax + Depreciation-Tax***

***b. Net capital exp = Earning + net fixed assets Beginning net fixed assets Depreciation***

***c. Change Earning net working capital = net working capital - Beginning net working capital.***

Free cash flow is measured later by using the free cash flow per shares which divided free cash flow by the number of shares outstanding at the end of the year. It is intended to be more comparable across firms sampled (Cheng & Tzeng, 2011). The ratio of free cash flow per shares is :

***Free cash flow per shares (FCFS) = (Free cas flow) / (Outstanding Share)***

4. Variable Control

a. Firm Size

Firm size is indicated on the magnitude of the total assets owned by company. The greater assets owned by the company shows that it has stable condition because it can be more easily



to determine funding policy for investments that can increase the company's income (Anderson & Reeb, 2003 and Maury, 2006). Firm size is formulated using the natural logarithm of total assets at the end of the year.

#### b. Sales Growth

Sales growth signals investors that there is company's development which's beneficial for investor because of profit increasing that lead the higher rate of return for investors (Helfert, 1997; Maury, 2006; Villalunga and Amit, 2006). Thus, sales growths is expected positive effect on firm value. Sales growth is obtained by comparing net sales in current year minus the prior year's sales to the net sales in the prior year.

#### c. Profitability

The company's profitability can be measured using earnings per shares. The expected sign of the relationship between profitability and firm value is positif. Because the reasons for investors to buy stocks is the high returns that can be earned by investors (Brigham & Houston, 2001).

### 4. Research Findings

#### 4.1 Descriptive Statistics

Tabel 4.2 shows the descriptive statistics of firm value, leverage, firm size, sales growth, profitability, financial health, and free cash flow in each research models. Based on the descriptive statistics in Table 4.2, the average value of firm value can be seen at 1.31. This number shows that on average, non-financial companies in Indonesia have higher market value of its assets than the book value's.

The average value of leverage (LEV) is 0.23, meaning that on average, companies in the research objects use debt as a funding for getting the company's assets in the amount of 23% and there are 77% others funding used in addition to debt.

Firm size which is proxied by SIZE has average value of total assets at Rp 5,344,125,771 with maximum value at Rp 154,319,000,000 and the minimum at Rp 10,273,890. Subsequently GROWTH variable as proxy of sales growth has average value at 0.1558. EPS as proxy for measuring the level of profitability has average value at Rp 271.19. This shows that on average, each existing shares in the company has price at Rp 271.19. EPS variable has range of minimum to maximum at Rp -7,417.56 and Rp 24,254.56 respectively. Negative EPS indicates that there is loss suffered by the company that ultimately become a burden on shareholders in the company.

Z-Score variable as a proxy for the financial health have an average value at 3.27. This shows that research companies is greater than 2.99 at the level of the Z-Score. According to the Altman Z-Score level, Z-Score values  $> 2.99$  indicate that the companies have safe financial condition in which the level of corporate bankruptcy is low.

FCFS variable as a proxy for free cash flow indicates the excess cash flow that can be used to fund projects which have positive NPV. Based on descriptive statistics result that describe this variable, the average value of the free cash flow is amounted to Rp 80.78. FCFS numbers are in the range of minimum to maximum at Rp -6,420.89 and Rp 6,374.42 respectively. Minimum value at Rp -6,420.89 shows that there is company in the research objects which has negative free cash flow indicating unavailability of cash flow to fund the company's activities. This is because the availability of operating cash flow is less than net capital expenditure and the influence of current liabilities compared with current assets is too small that contribute to negative free cash flow.

## 4.2 Result

### 4.2.1 Result for Model 1

Table 4.3 shows the results of testing leverage effect on firm value. The results show that leverage has positive effect on firm value. It indicates that higher use of debt in capital structure, higher firm value. Positive sign which is produced in this research is in accordance with positive sign expected earlier so the result supports the first hypothesis. The result is also consistent with the previous studies conducted by Lin and Lixin (2008), Nengjiu et al. (2005), Weill (2003), Cheng and Tseng (2011), Taswan (2003), and Andriani (2008) who found that debt has positive effect on firm value.

Regarding to the trade off theory proposition (Stiglitz, 1969), the use of debt in capital structure will benefit the company. This is due to the interest payment implicating tax saving which affects the reduction of taxable income. Thus there is additional external capital to facilitate operational activities and investments. In various analytical models that estimate or not the expense and risk of debt, tax shield is always positive on firm value. From agency theory proposition (Jensen & Meckling, 1967), the use of debt in its capital structure can be used to reduce agency problem like overinvestment by management. This is because debt absorbs free cash flow which is often used by management to finance projects that are too risky so management interest is fulfilled. This result is also in accordance with the characteristics of funding sources in Indonesia that companies try to take advantage on the

lower cost of debt as well as the availability of credit extended the maturity and to optimize the capital structure for the growth plans (based on Ernst & Young's study of South East Capital Confidence Barometer, the SWA - 14 November 2011).

Testing SIZE as control variable shows that firm size has significant negative effect on firm value. It indicates that company which have bigger assets will have higher firm value. This result is in contrast to expected sign made earlier. Musliatun (2000) states that company which have higher total assets shows that it has reached maturity phase which has lower growth opportunities. Conflicts which are in free cash flow relating with agency problem occur mainly in firms which have low growth opportunities (Jensen et al., 1986). So, large companies have high potential agency that can reduce the firm value.

Sales growth (GROWTH) has no significant positive effect on firm value. Insignificant effect is possibly obtained from this regression because of increasing revenues followed by increasing in operating and investment costs so companies with high growth which actively invest can't get maximum yield due to the lack of investment and operating cost efficiency (Shepherd, 1979 in Anindito, 2007).

Profitability (EPS) has significant positive effect on firm value. Result is in accordance with the expected sign made earlier. Menurut Brigham & Houston (2001), that is one reason investors buy stocks is to earn dividends. Earnings per share is lower tend to be smaller companies makes it possible to distribute more dividends this kecil. Hal can discourage investors to invest in companies that can lower the value of the company.

Testing Z-Score shows that financial health has significant positive effect on firm value. This results is in accordance with research conducted by Altman (1968) that company which has health finance is indicated having low potential bankruptcy. It will create positive perception to investors implicating in increasing shareholders value.

The test results that free cash flow (FCFS) has significant positive effect on firm value. It is consistent with studies conducted by White et al. (2003), Yang (2009) and Richardson (2011) that free cash flow in large quantities will increase inefficiency because it may lead agency cost increases like monitoring costs for shareholders.

#### 4.2.2 Result for Model 2

Table 4.4 shows the results of testing leverage effect on firm value with financial health and free cash flow as moderating variable in the relationship both of variables.

### 1. Result for Hypothesis 2

The result indicates that the interaction of financial health and debt has significant positive effect on firm value. It shows that healthier financial condition of the company, stronger the positive effect of debt on firm value. Positive sign is in accordance with the expected sign that supports the hypothesis. This finding is based on trade-off theory (Stiglitz, 1969) which states that in addition to tax benefits, debt also faces potential bankruptcy which may reduce the positive effect of debt on firm value. To obtain a minimal potential bankruptcy in order to strengthen the positive effect of debt on firm value, company must be in a healthy financial condition. Company which is healthy shows less likely to be experienced by the bankruptcy. It's because company has sufficient liquidity to meet the obligations, good accumulated profitability, high productivity, high market value of equity and good ability to generate sales. It also will be responded investors with smaller required returns so the cost of capital borne by the company will be reduced. The smaller cost of capital can increase the firm value. Testing financial health in the second model shows significant positive effect on firm value. This finding is in accordance with research conducted by Altman (1968) who explains that healthy company has low potential bankruptcy. It will create a good perception implicating for increasing firm value to investors.

### 2. Result for Hypothesis 3

The result show that the interaction of free cash flow and debt doesn't have significant positive effect on firm value. This result indicates that free cash flow as moderating variable in the relationship between debt and firm value can't be proven. It is possible because the role of a high free cash flow on the one hand can minimize the use of debt for excessive dividend payments, asset substitution, under investment, and claim dilution (Smith and Warner, 2010). Availability of free cash flow can be used to pay dividends, to invest in projects that provide a high return, to maximize investment and to minimize the dilution of debt as well as to pay interest. But on the other hand, the agency conflict between shareholders and management like opportunistic behaviour on free cash flow can lead inefficiencies because it's most likely used to maximize management utilities while expenses arising of such actions being shareholder burden. This is what reduces the benefits of free cash flow to address the agency problem between creditors and management. Although the potential agency conflict between management and creditors that arise in the relationship between the value of corporate debt policy can be minimized, the existence of free cash flow containing high agency conflicts between shareholders and management is possible to disturb the benefits of free cash flow to reduce potential agency conflicts between

management and creditors. So the effect of free cash flow which strengthen the positive effect of debt on firm value provides significant result.

Testing free cash flow variable in the second model shows significant positive effect on firm value. This result is also consistent with studies conducted by White et al. (2003), Yang (2009) and Richardson (2011) who explain that free cash flow in large quantities will increase inefficiency because it may lead to increase agency costs like monitoring costs for shareholders.

### 3. Results for Control Variable

The result shows that debt has significant positive effect of deb on firm value in the second model. It indicates that higher use of debt in the capital structure, higher firm value. Positive sign which is produced in this research is in accordance with the expected sign made earlier. So the result of this study supports the first hypothesis. The result is also consistent with previous studies conducted by Lin and Lixin (2008), Nengjiu et al. (2005), Weill (2003), Cheng and Tseng (2011), Taswan (2003), and Andriani (2008) who found that the debt has positive effect on firm value.

Testing firm size on the second model shows significant negative effect on firm value. It means that the bigger total asset, the lower firm value. This is contrast with expected sign made earlier. Musliatun (2000) stated that company which has more total assets had reached maturity stage with lower growth opportunities. Problems which arise because of free cash flow will mainly occur in firms which have low growth opportunities (Jensen et al., 1986) . So large companies generally have a high potential agency that can reduce firm value.

Sales growth doesn't have significant positive effect on firm value. The insignificant result is possible because of increasing company's revenues followed by increasing in operating and investment costs. So company with high potential growth which is actively investing can't give maximum yield due to lack of investment and operating cost efficiency (Shepherd, 1979 in Anindito, 2007).

Testing profitability on the second model shows significant positive effect on firm value. This result is consistent with expected sign made earlier. According to Brigham & Houston (2001), investors will buy stocks because they will earn dividends. The lower earnings per share makes smaller possibility to distribute more dividends. It can discourage investors to invest in the company. That's why firm value will decrease.

## 5. Conclusion, Implication and Limitation

### 5.1 Conclusion

Based on results that are analyzed, it can be drawn some conclusions which are the debt was found having significant positive effect on firm value. It proves that the debt can increase firm value. Funding through the debt may facilitate operational activities and investments. In addition, there is tax gain which can lead in increasing firm value.

Further, financial health can reinforce the positive effect of debt on firm value. It means that the positive effect of debt on firm value will be stronger when the company is in a healthy financial condition. The better financial condition shows better financial performance that make less likely financial difficulties faced by the company.

While, free cash flow doesn't have significant positive effect on the relationship between debt and firm value. So, it can't be explained that higher free cash flow, stronger debt positive effect firm value.

### 5.2 Implication

Theoretically, this research is intended to enrich the literature in the further development of capital structure and firm value. Financial health can moderate the relationship between debt and firm value. For further research, it's possible taking similar study with different samples to provide more depth analysis.

The implication of the result obtained that free cash flow can't moderate the relationship between debt and firm value is irrelevant to the theory proposed. This is possible because the agency conflicts that exist in the free cash flow reduce its usefulness to resolve agency conflicts between creditor and management. So other control variables are required to describe that free cash flow can be a moderating variable in the relationship between debt and firm value.

Practically, this research is targeted for management to determine the best strategy of using debt in capital structure with respect to the financial health for its role in strengthening the positive effect of debt to firm value. So the debt policy taken by the management can be more effective in increasing firm value.

This research also can be beneficial to creditors in assessing the prospect of listed companies in Indonesia Stock Exchange that uses debt in its capital structure. Creditor may consider the financial health to grant company for loan.

### 5.3 Limitation

1. The research period covers only for three years (2009-2011) feared not fully capture the existing pattern. Therefore, suggestion for further research is taking longer time frame to capture patterns.
2. This research doesn't include different growth rate, especially in explaining the effect of free cash flow directly to firm value as well as its major role in moderating the relationship between debt and firm value. So suggestion for further research is to differentiate samples into low growth opportunity and high growth opportunity for getting different effect of the presence of free cash flow in both types .
3. The downside of using Z-Score developed by Altman as the bankruptcy measurement is using company's data in America which have different characteristics compared to Indonesia's. Suggestion for further research is using bankruptcy prediction model developed using company's data in Indonesia.
3. Control variables used in this study only include variables related to the financial aspects and haven't discussed the specific accounting variables yet. So suggestions for future research is to add more specific accounting variables such as cash flow volatility that has effect on debt policy.



## REFERENCES

- Alonso, P., Iturriaga, F.J., and J. Sanz A. 2005. Financial Decision and Growth Opportunities: A Spanish Firm's Panel Data Analysis, *Applied Financial Economics* 15 (6): 391-407.
- Andriani, Venni. 2008. *The Effect of Ownership Structure and Debt Policy to Firm Value*. Thesis. University of Indonesia, Depok.
- Altman, Edward I. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, *The Journal of Finance* 37 (6): 1603-1618.
- Arifin, Zaenal. 2003. *Agency Problems and Control Mechanism in the Concentrated Ownership Structure Company Being Controlled Family*. Dissertation. University of Indonesia, Depok.
- Begley, J., Ming, J., and Watts S. 1996. Bankruptcy Classification Errors in the 1980s: An Emperical Analysis of Altman's and Ohlson's Model S, *Review of Accounting Studies* 267-284.
- Brealey, R.A. and Myers, S.C. 2003. *Principles of Corporate Finance*, 7th ed., McGraw Hill.
- Brigham, E.F., and Gapenski, L.C. 1997. *Intermediate Financial Management*, 5th ed., The Dryden Press, Florida.
- Brigham, E.F., and Houston, J.F. 2001. *Financial Management Book II*. 8th ed., Grants, Jakarta.
- Byrd, J. 2010. Financial Policies and the Agency Costs of Free Cash Flow: Evidence from the Oil Industry, *International Review of Accounting* 2 (2), 23-50.
- Chen, Kaifeng. 2002. *The Influence of Capital Structure on Company Value with Different Growth opportunies*. Paper for EFMA 2002 Annual Meeting, 1-14.
- Cheng, M.C & Tzeng, Z.C. 2011. The Effect of Leverage on Firm Value and How The Financial Firm Quality Influence on This Effect, *World Journal of Management* 3, 30-53.
- Fama, E & French, K. 1998. Taxes, Financing Costs, and Firm Value, *Journal of Finance* 53, 819-843.
- Fiakas, D. 2005. Tobin's q: Valuing Small Capitalization Companies, *Crystal Equity Research*, April.
- Fithri A, Nadya. 2012. *The Analysis of Free Cash Flow and Ownership Structure to Dividend and Debt Policy*. Thesis. University of Indonesia, Depok.
- Gill, A. & Mathur, N. 2011. Factors that Influence Financial Leverage of Canadian Firms, *Journal of Applied Finance and Banking*, 1 (2): 19-37.
- Godfrey, Jayne, Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., and Holmes, S. 2010. *Accounting Theory*, 7th ed. Australia: John Wiley & Sons, Inc.
- Grice & Ingram. 2001. Test of The Generalizability of Altman's Banckruptcy : Prediction Model, *Journal of Business Research* 10: 53-61.
- Gujarati, D.N., Porter, D.C. 2009. *Basic Econometrics*, 5th ed. NY: McGraw-Hill.
- Helfert, A. 1991. *Techniques of Financial Analysis*, 7th ed. Homewood: IL Irwin, Ch.
- Kim, Euysung. 2005. *The Impact of Family Ownership and Capital Structure on The Productivity Performance of Korean Manufacturing Firm: Corporate Governance and The "Chaebol Problem"*. Working Paper, HGCY University, Yonsei.
- Jensen, M. & Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics* 3 : 305-360.
- Lee, Seoki, Yoon, K., Chang H. 2010. Financial Distress For U.S. Lodging Industry: Effects of Leverage, Capital Intensity and Internationalization, *International CHRIE Conference-refereed Track*, 3: 1-9.
- Leland, H. 1994. Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure, *Journal of Finance*, 1213-1252.
- Lin, C. & Lixin, X. 2008. The Relationship Between Debt Financing and Market Value of Company: Emperical Study of Listed Real Estate Company of China, *Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management*, 2043-2047.
- Lingling, Wu. 2004. *The Impact of Ownership Structure on Debt Financing of Japanese Firms With the Agency Cost of Free Cash Flow*. EFMA 2004 Basel Meetings Paper.
- Benjamin Maury. 2006. Family Ownership and Firm Performance: Empirical Evidence From Western European Corporations, *Journal of Corporate Finance* 12: 321-341.
- Megginson, William L. 1998. *Corporate Finance Theory*, . NY: Addison Wesley Education Publ. Inc.
- Modigliani, F and Miller, MH. 1963. Corporation Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, *American Economic Review* 53: 433-443.
- \_\_\_\_\_. 2009. Basic Econometrics Module. Economics Laboratory, University of Indonesia.
- Myers, S. C., and Majluf N. S. 1984. Corporation Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, *Journal of Financial Economics* 13: 187-221.
- Nengjiu, J., Parrino, R., Poteshman, AM, and Weisbach, M. S. 2005. Horses and Rabbits? Trade-Off Theory and Optimal Capital Structure, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 40: 259-281.
- Padmonanda, Adityo. 2003. The Validity of Bonds Rating Issued by PT. Pemeringkat Efek Indonesia with Altman Z-Score in Manufacturing Sector 1998-2001. Thesis. University of Indonesia, Depok.



- Penman, SH. 2001. On Comparing Cash Flow and Accrual Accounting Models for Use in Equity Valuation: A Response to Lundholm and O'Keefe, *Contemporary Accounting Research* 18: 4, 681-692.
- Rappaport, Alfred. 1998. *Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance*. New York: The Free Press.
- Richardson, Scott. 2006. Overinvestment of Free Cash Flow, *Review of Accounting Studies* 11: 159-189.
- R. Kanam, Akustika. 2011. *The Effect of Capital Structure on Firm Value with Ownership Variable as Moderating Variable*. Tesis. University of Indonesia, Depok.
- Rifqi, Muhammad. 2009. *The Comparative Analysis of Financial Distress Prediction Models such as Altman, Ohlson, Zmijewski and Springgate as well as Its Application in Indonesia*. Thesis. University of Indonesia, Depok.
- Ross, Stephen A. 1977. The Determination of Financial Structure: The Incentive - Signaling Approach, *Bell Journal of Economics* 8: 23-40.
- Ross, S.A., R. Westerfield W., J. Jaffe F. Jordan B.D. 2008. *Modern Financial Management*, 8th ed. New York: McGraw-Hill.
- Stiglitz, J.E. 1969. A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem, *American Economic Review* 59: 784-793.
- Sujoko and Soebiantoro, U. 2007. The Effect of Ownership Structure, Leverage, and Internal Factors as well as External Factors Against Corporate Value, *Journal of Management and Entrepreneurship* 9 (1): 41-48.
- Taswan. 2003. The Effect of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies Against Corporate Value and The Influencing Factors. *Journal of Economics and Business*, 1-18.
- Tobin's, James. 1969. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, *Journal of Credit and Banking*, 12-29.
- Villalonga B., and Amit, R. 2006. How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value, *Journal of Financial Economics* 80: 85-417.
- Weill, L. 2003. *Leverage and Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis on European Countries*. Paper presented at the 12 th Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Helsinki.
- Welch, I. 2004. Capital Structure and Stock Returns, *Journal of Political Economy*, 112-131.
- Zhang, Y. 2009. Are Debt and Incentive Compensation Substitutes in Controlling the Free Cash Flow Agency Problem, *Journal of Financial Management* 38 (3) : 507-541.

## APPENDICES

This table shows summary of sample selection used in research.

Table 4.1 Sample Selection

Descriptions	Number
Number of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011	317
Number of companies with incomplete data for each research models	(12)
Number of companies that have zero total income in 2008-2010	(6)
Number of companies that have negative book value of equity	(13)
Number of companies which are outliers	(21)
Net number of companies (N)	265
<b>Total Observations (Nx3)</b>	<b>795</b>

This table shows descriptive statistics results of research.

Tabel 4.2 Descriptive Statistics Results

	N	Mean	Minimum	Maximum	S. Deviation
Tobin's Q	795	1.31370	0.06929	19.72286	1.58121
Lev	795	0.23068	0	0.88805	0.18178
Size	795	5.344.125.771	10.273.890	154.319.000.000	12.992.813.623
Growth	795	0.15584	-0.92214	17.34167	0.73769
EPS	795	271.195	-7417.56	24254.56	1515.73
Z-Score	795	3.27255	-28.2559	25.38266	4.04668
FCFS	795	80.7845	-6420.89	6374.42	599.15
Descriptions: Tobin's Q = firm value, Lev = leverage, Size = firm size (in rupiahs), Growth = sales growth, EPS = profitability, earning per shares (in rupiahs), Z-Score = financial health, FCFS = free cash flow per shares (in rupiahs).					

This table shows result for model 1.

Table 4.3 Result for Model 1

Dependent Variable : Tobin's Q			
Independent Variable	Expected Sign	Coefficient	Prob. Z
CONST		1.845544	0.075
Lev	+	0.9326329	0.025**
Size	+	-0.05427	0.095*
Growth	+	0.0098116	0.412
EPS	+	0.0001189	0.005***
Z-Score	+	0.2263522	0.000***
FCFS	-	-0.0000957	0.051**
Prob > Chi2			0.0000***
R-Squared			29.98%
Number of group			265
Number of obs			795
***			Significant at 1% level
**			Significant at 5% level
*			Significant at 10% level
Descriptions : Lev = leverage, Size = firm size, Growth = sales growth, EPS = earning per shares, Z-Score = financial health, FCFS = free cash flow per shares,			

This table shows result for model 2.

Table 4.4 Result for Model 2

Dependen Variable : Tobin's Q			
Independen Variable	Expected Sign	Coefficient	Prob. z
CONST		2.006843	0.041**
Lev	+	0.709456	0.025**
Z-score	+	0.2171822	0.000***
Lev*Z-Score	+	0.1863688	0.041**
FCFS	-	-0.0001045	0.079*
Lev*FCFS	+	0.0000298	0.455
Size	+	-0.0602533	0.076*
Growth	+	0.0084692	0.424
EPS	+	0.0001224	0.004***
Prob > Chi2			0.0000***
R-Squared			29.03%
Number of group			265
Number of obs			795
***			Significant at 1% level
**			Significant at 5% level
*			Significant at 10% level
Descriptions : Lev = leverage, Z-Score = financial health, Lev*Z-Score = interaction between leverage and z-score, FCFS = free cash flow per shares, Lev*FCFS = interaction between leverage and FCFS, Size = firm size, Growth = sales growth, EPS = earning per shares.			

## Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Strategi sebagai Variabel Mediasi

**FERRY HENDRO BASUKI<sup>1</sup>**

*Program Doktor Ilmu Akuntansi FE Universitas Padjajaran*

**JANTJE EDUARD LEKATOMPESSEY<sup>2\*</sup>**

*Universitas Pattimura*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemimpinan transformasional dan partisipasi anggaran terhadap manajemen strategik, pengaruh manajemen strategik terhadap kinerja keuangan, dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap partisipasi anggaran, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja keuangan melalui partisipasi anggaran, dan pengaruh kepemimpinan transformasional dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan melalui manajemen strategi.

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data survei. Sampel diperoleh dari rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung. Sebanyak 110 responden berpartisipasi dalam penelitian yang berasal dari 35 rumah sakit. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap manajemen strategi, partisipasi anggaran berpengaruh sangat signifikan dengan manajemen strategi, manajemen strategi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggaran, partisipasi anggaran memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan, manajemen strategi tidak memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan, dan manajemen strategi memediasi pengaruh partisipasi anggaran dengan kinerja keuangan.

**Kata-kata kunci:** kepemimpinan transformasional, partisipasi anggaran, manajemen strategi, dan kinerja keuangan

**Abstract:** The aims of this research are to get the empirical effect of transformational leadership and budget participation on strategic management, the effect of strategic management on financial performance, the effect of transformational leadership on budget participation, the effect of transformational leadership on financial performance through budget participation, the transformational leadership and budget participation effect on financial performance through strategic management.

This research employed survey data collection method. Samples were gathered from private and state hospitals in Bandung City. There were 110 respondents who participate from 35 hospitals. The research used regression and path analysis to analyze the hypotheses of this study.

The results of this research indicated that transformational leadership has no effect on strategic management, however budget participation significantly effect on strategic management. Meanwhile the strategic management has no effect on financial performance and also the transformational leadership has no effect on budget participation. The budget participation was intervened the relationship of transformational leadership on financial performance whereas the strategic management has no intervening relationship of transformational leadership on financial performance, and the strategic management was intervened the relationship of budget participation on financial performance.

**Keywords:** transformational leadership, budget participation, strategic management, and financial performance.

<sup>1</sup> Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, Ambon

<sup>2</sup> Dosen Tetap Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Pattimura, Ambon

\* Corresponding author: lekatompessy\_jan@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator penting dari pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh Amartya Sen dengan menggunakan tiga basis perhitungan yakni kesehatan, pendidikan dan penghidupan yang layak (Firmanzah, 2012). Berdasarkan IPM, maka kesehatan merupakan salah satu basis perhitungan tentang bagaimana kondisi pelayanan kesehatan secara umum di Indonesia. Beberapa fenomena yang terjadi tentang hal ini ditunjukkan melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan selama periode 1 Juli-31 Desember 2011 yang disampaikan kepada legislatif dalam rapat paripurna DPR di Jakarta menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan dinas kesehatan masih buruk dan pelayanan kesehatan pemerintah masih kurang efektif, pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas tiga di bawah standar dan adanya tambahan kenaikan harga obat yang dibebankan kepada pasien (Purnomo, 2012a).

Agar dapat menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan secara maksimal dan memadai maka rumah sakit menjalankan peran strategi dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan rakyat di Indonesia. Untuk itu, para *stakeholder* kesehatan harus dapat membuat perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, perawatan, pengembangan seluruh media jasa pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai-nilai filosofi ekonomis, efisien, efektif, dan *outcome* (*Value For Money*) yang jelas, (Mardiasmo, 2009:4).

Dalam bisnis rumah sakit manajemen sering mengira bahwa bisnis ini hanya seputar produk saja, namun elemen yang lebih penting adalah *services* dan *mindset* yang sering dilupakan (Subanegara, 2008). Selain itu, mahalny biaya berobat di rumah sakit (RS), terutama RS swasta di Indonesia, merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, selain mahal, pelayanan yang diberikan kepada pasien juga belum optimal. Itulah sebabnya tidak

sedikit pasien berobat ke luar negeri, dan negara pun kehilangan devisa untuk kategori *spend health care* sebesar US\$700 juta (sekitar Rp6,3 triliun). Tingginya tarif berobat di Indonesia ternyata tidak lepas dari tingginya pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap alat-alat kesehatan, pajak produksi obat-obatan (90% bahan baku impor), bea masuk impor, dan pajak barang mewah yang total bisa mencapai 15%-30%, serta jasa dokter spesialis yang hingga kini belum ada standarnya (Widjayarta, 2011). Di sisi lain, untuk merekrut tenaga dokter ahli pada rumah sakit umum daerah (RSUD) itu sangat sulit, karena mereka sudah praktek di rumah sakit swasta dan pengadaan personel akan berdampak kepada anggaran (Hadianto, 2012).

Keberhasilan program pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh faktor kepemimpinan dan manajemen pada setiap tatanan organisasi kesehatan mulai dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah bahkan sampai Tingkat Puskesmas. Temuan Maiga dan Jacobs (2009) menunjukkan bahwa manajer di sebuah rumah sakit sangat penting karena bagi manajer rumah sakit dimaksudkan untuk mencapai proses dan kualitas klinis sekaligus mengurangi biaya dan kepuasan pasien untuk mencapai profitabilitas yang diinginkan.

Fenomena lain yang muncul di setiap organisasi kesehatan adalah menghadapi tekanan yang signifikan untuk memberikan berbagai layanan kepada publik dalam anggaran yang terbatas. Penganggaran sektor publik di Indonesia telah dipopulerkan sebagai penganggaran kinerja (*performance budgeting*) baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam penyusunannya mengadopsi pendekatan partisipatif. Penggunaan pendekatan partisipatif diharapkan dapat mempengaruhi komitmen bawahan terhadap tujuan anggaran melalui keterlibatan mereka dalam proses pembuatan anggaran (Brownell, 1982) dan dalam target-target anggaran (Shield and Shield, 1998). Selain itu penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada output organisasi dan merupakan alat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas (Shah dan Shen, 2007).

Partisipasi dalam proses penganggaran membantu dalam menciptakan spirit/semangat korporasi, memotivasi karyawan dan memberikan rasa persaudaraan dalam tim kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kyj dan Parker (2008) menemukan bahwa partisipasi bawahan di dalam penyusunan anggaran juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan berdampak kepada adanya keadilan dan kejujuran dalam evaluasi kinerja mereka. Pada kesempatan lain, Chong dan Leung (2003), menemukan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja kerja melalui dua variabel intervening, yaitu tingkat kesulitan tujuan anggaran dan komitmen tujuan anggaran.

Menurut (Wickramasinghe, 2008; Wickramasinghe et al., 2008), dalam Lonial *et al.* (2008) bahwa dalam sektor jasa terutama industri perawatan kesehatan telah menjadi salah satu industri yang berkembang sangat cepat yang dicirikan dengan peningkatan persaingan. Dalam upaya pemotongan biaya dan agar tetap bertahan dalam persaingan, institusi perawatan kesehatan menetapkan ukuran penting untuk memperbaiki kinerjanya terhadap pesaing.

Sejalan dengan kondisi lingkungan bisnis yang mempengaruhi entitas bisnis, maka Edward (1986) mengatakan bahwa manajemen strategi berkaitan dengan memilih domain lingkungan, menentukan interaksi alami dengan domain tersebut, dan membuat upaya penyesuaian internal yang disarankan atau dibutuhkan oleh pilihan-pilihan tersebut. Lebih lanjut, (Barney dan Hesterly, 2010;4) memberikan definisi bahwa strategi didefinisikan sebagai teori tentang bagaimana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

Peningkatan kesenjangan antara permintaan sistematik kesehatan oleh pelanggan dan kinerja inti rumah sakit menunjukkan adanya peningkatan pemahaman keinginan pasien/pelanggan dalam lingkungan rumah sakit. Dalam kenyataan, sifat kemanusiaan pemberian jasa-jasa kesehatan, kepuasan pasien/pelanggan dalam perawatan kesehatan tidak hanya penting bagi capaian profit secara terus menerus atau keberlangsungan hidup rumah



sakit, tetapi juga peningkatan efektivitas dan efisiensi, dan cara-cara perwujudan *outcomes* terbaik menurut Baalbaki, *et al.* (2008).

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fenomena kepemimpinan, partisipasi anggaran, manajemen strategik dan kinerja keuangan pada industri kesehatan khususnya pelayanan jasa rumah sakit di daerah Bandung Raya. Selain itu terdapat tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu, murah, mudah, dan terjangkau. Alasan dipilihnya rumah sakit karena (1) Proses penyusunan anggaran pada rumah sakit umum daerah mempunyai tingkat kompleksitas yang rumit, karena melibatkan DPRD dan *stakeholders* lain, (Purnomo, 2012b); (2) Rumah sakit saat ini menghadapi tuntutan dari masyarakat agar meningkatkan mutu pelayanan baik secara klinis maupun proses, serta efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan jasa layanan kesehatan dengan kondisi jumlah anggaran yang terbatas (Maddalena, V. 2012); (3) Tingkat persaingan rumah sakit makin kompetitif sehingga diperlukan perencanaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada tujuan, (Wickramasinghe, 2008) dalam Lonial, *et.al.* (2008).

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemimpinan transformasional dan partisipasi anggaran terhadap manajemen strategik, pengaruh manajemen strategik terhadap kinerja keuangan, dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap partisipasi anggaran, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja keuangan melalui partisipasi anggaran, dan pengaruh kepemimpinan transformasional dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan melalui manajemen strategi.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Pemberlakuan UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah khususnya mengenai Pemerintahan Daerah pada tahun 2001, membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji



dengan memakai perspektif keagenan (*agency theory*). UU tersebut memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif).

Merujuk kepada UU 22/1999 dengan jelas menggambarkan bahwa legislatif memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Pada akhirnya akan memberikan informasi bahwa legislatiflah yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepada eksekutif dengan konsekuensi jika eksekutif tidak mampu menjalankan kewenangan akan diberhentikan oleh legislatif. Pada kondisi ini, hubungan yang tercipta diantara keduanya disebut hubungan keagenan, karena melibatkan dua pihak yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen) (Abdullah, 2004).

### **Kepemimpinan Transformasional**

Yukl (2010:277) mencatat bahwa beberapa teori tentang kepemimpinan transformasional atau inspirasional sangat kuat dipengaruhi oleh ide-ide Burns (1978). Selanjutnya beberapa riset empiris telah dilakukan oleh Bass (1990) di dalam memformulasikan teori, esensi dari penelitiannya adalah membedakan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional.

Kepemimpinan transformasional umumnya melibatkan nilai-nilai, kepercayaan, integritas, keadilan, etika, visi, kharisma, agen perubahan, motivasi, komunikasi, tujuan dan standar yang jelas (Avolio dan Bass, 2002; Bass, 1985). Kepemimpinan transformasional berfokus pada kebutuhan pengikut (Bass, 1985). Pemimpin transformasional mengubah pengikut menjadi pemimpin (Avolio dan Bass, 2002). Bass (1990) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat membuat perbedaan dalam kinerja organisasi. Korelasi positif telah dilaporkan antara praktik kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja,

produktivitas karyawan, komitmen, dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu kepemimpinan transformasional harus digunakan dalam organisasi kesehatan.

### **Anggaran dan Partisipasi Anggaran**

Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang sangat pesat karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009:1). Selanjutnya, tekanan agar sektor publik lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Partisipasi dalam proses penganggaran membantu untuk menghasilkan semangat kerja sama, memotivasi para pekerja, dan menanamkan semangat kerja sama tim. Partisipasi karyawan dibutuhkan di dalam organisasi agar terjadi integrasi informasi penting yang efektif dari berbagai sumber sehingga diperoleh komitmen manajerial individual terhadap anggaran (Barfield, et al., 2004).

### **Manajemen Strategik**

Manajemen Strategi adalah proses pengidentifikasian, mengumpulkan, memilih dan menganalisis data akuntansi untuk membantu tim manajemen untuk membuat keputusan strategi dan untuk menilai efektivitas organisasi. Dengan demikian manajemen strategik dipakai untuk mengatasi tantangan kompetitif yang dihadapi oleh organisasi dengan memberikan keputusan-keputusan strategi.

### **Kinerja Keuangan**

Pemilihan ukuran kinerja akan tergantung pada sifat dari konflik insentif dalam organisasi, industri, dan lingkungan yang kompetitif. Organisasi kesehatan menghadapi tantangan khusus dalam memberikan insentif efektif karena peraturan penggantian dan rantai nilai yang kompleks dari hubungan antara rumah sakit, organisasi perawatan yang dikelola, pengusaha, dokter, pasien, dan perusahaan asuransi. Dunk (2005) mencatat bahwa sistem

pengukuran kinerja memainkan peran penting dalam pengembangan perencanaan-perencanaan strategi dan dalam mengevaluasi tujuan-tujuan organisasi.

Kaplan dan Norton (1992) mengusulkan bahwa ukuran kinerja keuangan harus dilengkapi oleh ukuran-ukuran yang bersifat operasional agar diperoleh pemahaman yang lebih baik dari kinerja perusahaan, dia juga menyimpulkan bahwa setiap hubungan antara perbaikan dalam langkah-langkah operasional dan kinerja keuangan yang dibuat. Kinerja perusahaan di area operasional lebih baik diukur dengan indikator non-finansial, sehingga perusahaan dapat mengukur faktor-faktor non-keuangan seperti loyalitas pelanggan dan kepuasan karyawan dengan harapan bahwa ukuran ini berpengaruh terhadap profitabilitas masa depan.

Dunk (2005) melakukan riset yang berusaha untuk memberikan artikulasi teoritis dan bukti empiris tentang peran empat ukuran spesifik non-keuangan yang menjadi perhatian cukup besar dalam literature evaluasi kinerja. Keempat ukuran non-keuangan yang digunakan adalah ukuran kualitas kinerja sistem informasi, integrasi lingkungan korporasi, inovasi produk, dan kualitas produk. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas kinerja sistem informasi, integrasi lingkungan perusahaan, inovasi produk, dan kualitas produk positif mempengaruhi kinerja non-keuangan.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan sebuah pemikiran tentang aspek usaha pemenuhan kebutuhan manusia, teori yang melandasi pemikiran ini adalah teori hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Manusia pertama kali membutuhkan kebutuhan psikologi seperti kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan fisik manusia seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan berkeluarga. Jika pada level pertama ini kebutuhan sudah terpenuhi maka naik ke level kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman seperti terlindung dari ancaman baik secara fisik maupun mental, selanjutnya kebutuhan naik ke level ketiga yaitu kebutuhan akan interaksi sosial, sesuai kodrat manusia sebagai makhluk sosial seperti

saling menyayangi dan menghormati, rasa diterima di tengah masyarakat, dan hubungan pertemanan. Selanjutnya pada level keempat, kebutuhan manusia akan penghargaan, terdapat dua jenis penghargaan yaitu faktor internal seperti rasa hormat, privasi dan otonomi, pencapaian prestasi, sedangkan faktor eksternal adalah status, pengakuan, dan perhatian. Pada level tertinggi yaitu aktualisasi diri yang berasal dari cita-cita apa yang mampu diwujudkan meliputi pertumbuhan, prestasi terbaik dan pencapaian sesuatu yang dicita-citakan.

Sesuai dengan piramida teori kebutuhan Maslow, maka terjadilah interaksi yang luas antara manusia dengan manusia lain baik secara formal maupun secara informal di dalam sebuah lingkungan. Agar kebutuhan terpenuhi memaksa manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan, penghasilan yang diperoleh menjadikan modal bagi dia untuk berinteraksi sosial. Jika interaksi tersebut di dalam sebuah organisasi maka teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena interaksi antara *principal* dan *agent*. Dalam lingkup teori keagenan, yang di kembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) maka dapat dijelaskan bahwa organisasi merupakan *nexus* tempat terjadinya kontrak antara *principal* dan *agent*, selanjutnya kedua belah pihak memiliki kepentingan didalam memaksimalkan manfaat ekonomi mereka.

Pada lingkungan yang penuh dengan tekanan persaingan yang ketat, tajam dan merata, maka hanya organisasi yang memiliki strategi dengan cepat, fleksibel, dan inovatif saja yang dapat hidup. Termasuk juga organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, agar berhasil di dalam persaingan bisnis pada industri perawatan kesehatan misalkan manajemen rumah sakit harus memiliki pemimpin yang mempunyai kemampuan transformasi terhadap dirinya, pengikutnya dan lingkungan agar perubahan lingkungan bisnis dapat dengan cepat diantisipasi dan diberikan solusi. Organisasi pelayanan kesehatan harus melibatkan karyawan di dalam penyusunan perencanaan anggaran dan memiliki ukuran kinerja keuangan yang terus disosialisasikan kepada anggota organisasi dan selanjutnya mampu dicapai oleh seluruh komponen organisasi.

Fenomena yang terjadi bahwa, organisasi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit di dalam negeri masih sangat tertinggal didalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan yang ditandai dengan masih banyak masyarakat kita yang mampu mencari alternatif perawatan kesehatan ke luar negeri, mengapa hal ini terjadi? Apakah *stakeholders* pelayanan jasa kesehatan tidak memperhatikan masalah ini? Bagaimana bentuk penganggaran dalam layanan kesehatan rumah sakit di Bandung Raya? Bagaimana bentuk kepemimpinan yang dapat mendorong keberhasilan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan rumah sakit, jika pengelolaan rumah sakit di bawah model kepemimpinan transformasional? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut khususnya rumah sakit akan dikaji dari aspek akuntansi manajemen sektor publik yang difokuskan dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Manajemen Strategik**

Pengakuan kepemimpinan penting dalam mempengaruhi perubahan strategi yang sukses dalam organisasi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir (Lorne Hartman, 1999). Masih ada beberapa pertanyaan tentang apakah kepemimpinan dapat dikembangkan melalui intervensi terencana khususnya dalam jangka pendek.

Ozur Ugurluoglu et al. (2010), menunjukkan bahwa semua tindakan pemimpin seperti, mengubah, mengelola, politik dan etika yang digunakan, terkait dengan efektivitas karier manajer kesehatan. Namun, penggunaan tindakan transformasi oleh manajer adalah prediktor terkuat dari efektivitas manajer perawatan kesehatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas manajer rumah sakit yang signifikan dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan organisasi. Transformasi dan tindakan politik lebih sering digunakan sebagai lingkungan yang dirasakan menjadi lebih stabil (Anna C. Gaughan, 2001). Bertolak dari uraian di atas, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

*H1: Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap manajemen strategik*

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Manajemen Strategik**

Penelitian Purvanova, et al., (2006) menunjukkan hubungan positif antara manajer kepemimpinan transformasional dan *followers' citizenship performance*. Selain itu, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap *followers' citizenship performance* dimediasi melalui persepsi karyawan dari pekerjaan mereka. Dalam kondisi ini peran manajer dapat secara efektif memotivasi terciptanya partisipasi anggaran, karena karyawan memiliki semangat kerja yang melampaui tanggung jawabnya.

Masi dan Cooke, (2000) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan saja mungkin tidak akan menjadi stimulus yang cukup kuat untuk mengubah norma-norma. Perubahan struktural, desain ulang pekerjaan, dan revisi praktik sumber daya manusia mungkin diperlukan untuk menambah bobot upaya perubahan budaya, yang terakhir adalah memperkuat kepemimpinan transformasional, dan untuk memperpanjang bahwa ini mungkin dicapai, norma-norma budaya akan diharapkan menjadi lebih memberdayakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam gaya dan citra diri pemimpin bisa berdampak pada produktivitas.

Whittington and Goodwin (2001) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara konsisten dikaitkan dengan tingginya tingkat upaya pengikut, berkinerja, dan kepuasan dengan pemimpin. Hasil lain menunjukkan bahwa *goal difficulty* tidak nyata terkait dengan kinerja. Sebaliknya, itu meningkatkan hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kedua kinerja dan komitmen afektif. Terbukti bahwa ketika karyawan sudah berkomitmen kepada organisasi maka mereka akan berperilaku melebihi yang di harapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

*H2: Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Manajemen Strategik*

### **Pengaruh Manajemen Strategik Terhadap Kinerja Keuangan**

Kecepatan perubahan yang tinggi disebabkan oleh globalisasi, inovasi teknologi, persaingan sengit, dan kecepatan pertumbuhan pengetahuan telah menciptakan turbulensi besar dalam lingkungan organisasi. Kecepatan dan ketidakpastian perubahan ini membuat sulit untuk menggunakan pengalaman masa lalu untuk merencanakan tindakan di masa depan

(Davis dan Bryant, 2003). Selanjutnya, Schein, (2004), mengatakan bahwa globalisasi dan persaingan yang luas menuntut organisasi birokrasi untuk semakin meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk itu dibutuhkan pemimpin dalam organisasi yang mempunyai jiwa kepemimpinan dengan pengetahuan dan integritas yang luas untuk menyebarluaskan budaya organisasi kepada bawahannya dan mengarahkan mereka agar memaksimalkan potensinya untuk mengadaptasi lingkungan di luar organisasi sekaligus mengintegrasikan masalah-masalah internal.

Muhammad H, (2010) mengatakan bahwa manajer menggunakan informasi sistem akuntansi manajemen sebagai cara dalam menentukan strategi perusahaan. Studi tentang manajemen strategi menekankan monitoring dan evaluasi peluang dan ancaman eksternal menentukan dalam kekuatan dan kelemahan suatu organisasi (Kenneth, 1987). Dengan demikian hipotesis ketiga dirumuskan adalah

*H3: Manajemen Strategik berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan*

### **Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Partisipasi Anggaran**

Adler dan Reid (2008) mengemukakan bahwa interaksi antara kepemimpinan transformasional dengan partisipasi anggaran meningkatkan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja maupun kinerja pekerjaan. Artinya bahwa kepemimpinan transformasional memberikan kesempatan bagi bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, sehingga karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam bekerja dan berkarya kepada organisasi.

Organisasi kesehatan menghadapi tekanan besar di dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam situasi anggaran yang terbatas. Jika organisasi siap untuk berinvestasi dalam mengembangkan perencanaan strategi secara terperinci untuk memetakan arah baru ke masa depan, juga harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa tujuan strategi dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu (Maddalena, 2012). Selanjutnya, dikatakan bahwa interaksi antara pemimpin dan pengikut

selama transformasi dapat menyebabkan penguatan tertentu atau distorsi yang ditandai dengan peningkatan saham atau distorsi delusi dengan dampak ambivalen. Sebuah gaya kepemimpinan transformasional dan praktik manajemen sumberdaya manusia yang kuat telah membantu Majan University College, Oman, untuk memenangkan serangkaian penghargaan untuk praktek bisnis yang baik. Gaya kepemimpinan utama yang ada di antara manajer senior dan menengah di Majan Colledge adalah transformasional, meskipun ada juga bukti otoriter, partisipatif dan delegatif gaya kepemimpinan (Ahmed et al., 2003). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis keempat

*H4: Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap Partisipasi Anggaran*

### **Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Keuangan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Partisipasi Anggaran**

Maiga dan Jacobs, (2009) menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam perawatan kesehatan tidak bisa terlalu ditekankan. Bukti dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan sarana untuk mempengaruhi baik kualitas klinis dan kualitas proses. Temuan ini menarik perhatian khusus untuk manajer rumah sakit karena sangat penting bagi manajer rumah sakit dari proses dan kualitas klinis guna mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pasien untuk mencapai profitabilitas yang diinginkan.

Menurut Maiga dan Jacobs (2009) institusi pelayanan kesehatan saat ini dituntut agar dapat meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pasien rela membayar atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan. Untuk itu institusi ini harus melakukan *improvement* sehingga dapat mencapai efisiensi, berbiaya murah dan peningkatan kualitas. Kepemimpinan transformasional mendorong tercapainya peningkatan kinerja pengikut, Bass, (1985), sangat membantu dalam memperbaiki komunikasi internal dan menciptakan semangat kerja sama diantara pekerja yang berbeda budaya,

Nemanich dan Keller (2007) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berkaitan dengan kinerja bawahan, kepuasan kerja, dan penerimaan akuisisi dalam konteks



perubahan besar dalam akuisisi integrasi organisasi. Krishnan (2005) menunjukkan terdapat efek positif dari kepemimpinan transformasional pada hasil dengan peningkatan durasi hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam hal kesesuaian dan identifikasi, tetapi tidak dalam hal keterikatan dan komitmen afektif. Barling, *et al.* (1996) menunjukkan efektifitas pelatihan manajer dalam kepemimpinan transformasional berdampak signifikan terhadap komitmen organisasi bawahan dan selanjutnya mendukung perubahan kinerja keuangan level kantor cabang. Hal yang sama ditunjukkan oleh Avolio dan Bass (2002) berdasar data longitudinal dan menyediakan beberapa indikasi bahwa perubahan kepemimpinan transformasional dapat menyebabkan dampak pada kinerja keuangan.

*H5: Partisipasi anggaran memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan.*

### **Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Keuangan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung melalui Manajemen Strategi**

Maiga (2005) menyatakan pentingnya partisipasi anggaran sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, partisipasi anggaran juga berfungsi sebagai fungsi informasi, dimana bawahan dapat berkumpul, bertukar dan menyebarkan informasi kerja yang relevan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan mengkomunikasikan informasi pribadi ke pengambil keputusan organisasi. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa tindakan partisipasi dalam proses penganggaran berfungsi melayani dengan menginduksi bawahan untuk menerima dan berkomitmen untuk tujuan anggaran mereka.

Deery dan Shaw (1999) dan LaLopa (1997) dalam Desmond Yuen (2006) menyatakan bahwa industri jasa kesehatan ditandai oleh rendahnya moral kerja karyawan dan tingginya pergantian karyawan. Hasilnya, laporan penelitian menyarankan agar elemen otonomi, identitas tugas, variasi penugasan dan umpan balik dimasukkan dalam desain anggaran agar meningkatkan kepuasan kerja karyawan dalam situasi dimana terdapat tingkat kesulitan tugas (*task difficulty*) dan ketidak jelasan penetapan tujuan (*unclear goal setting*). Rancangan anggaran yang lebih baik berarti kepuasan kerja karyawan dan moral dapat

ditingkatkan dan tingkat *turnover* tinggi dapat dikurangi. Pada akhirnya efisiensi dan efektifitas pekerjaan meningkat dan berdampak kepada pencapaian kinerja keuangan yang baik.

Fisher, et al. (2002) penggunaan anggaran untuk dua tujuan seperti pengalokasian sumber daya dan pengevaluasian kinerja tidak hanya mengurangi indikasi *budget slack*, tetapi juga meningkatkan usaha bawahan dan kinerja tugas. Bertolak dari beberapa penjelasan di atas, maka hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

*H6: Manajemen strategi memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan*

**Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Secara Langsung Maupun tidak Langsung Melalui Manajemen Strategik.**

Organisasi menggunakan anggaran untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan kinerja yang dimaksud, maka untuk mengevaluasi dan menghargai kinerja aktual. Anggaran operasional adalah pernyataan kuantitatif tujuan disetujui dan rencana tindakan manajemen untuk unit organisasi atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Roman L. Weil and Michael W. Maher (2005;9). Penganggaran pada dasarnya hanya rencana operasi, dan bahkan upaya bisnis yang paling dasar harus termotivasi oleh beberapa jenis rencana Vataliya (2009). Partisipasi anggaran dapat memediasi hubungan antara penggunaan evaluatif anggaran dan hasil pekerjaan Larissa Kyj dan Parker (2008). Maiga (2005) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan sebagai anteseden dan komitmen tujuan anggaran sebagai konsekuensi dari kedua variabel partisipasi anggaran yang memberikan informasi dalam menjelaskan hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis ketujuh

*H7: Manajemen strategi memediasi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja keuangan*

## METODE

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah para pimpinan, manajer dan karyawan rumah sakit di Propinsi Jawa Barat dan sekitarnya yang terlibat secara langsung di dalam penyusunan anggaran. Sampel adalah para pimpinan, manajer dan karyawan rumah sakit yang ada di wilayah Bandung Raya sebanyak 41 buah rumah sakit.

Sampel ditentukan berdasarkan teknik *purposive* dengan kriteria (1) menduduki jabatan sebagai direktur dan memiliki esalon II, III, dan IV berupa kepala dan wakil kepala instalasi, kepala bagian, dan kepala sub bidang. Pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan kuesioner yang diantar langsung ke responden sesuai alamat yang dituju.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, dan Pengujian Hipotesis

Kinerja keuangan adalah adalah penampilan hasil karya personal baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi, juga kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personal (Pane, 2012). Kinerja keuangan diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Lonial, et al. (2008). Kepemimpinan transformasional adalah aktivitas yang dilakukan untuk memotivasi bawahan memaksimalkan kinerjanya melalui perubahan sikap dan kepercayaan bawahan dengan cara mengartikulasikan visi, memberi kepedulian, secara individual, meningkatkan kreatifitas, serta memberikan pengakuan secara personal pada bawahan, (Avolio dan Bass, 2002). Kepemimpinan transformasional diukur menggunakan instrumen *Multifactor Leadership Questioner* (MLQ) yang telah revisi oleh Bass dan Avolio (1996) dalam Popper, *et.al.* (2000).

Partisipasi anggaran adalah rencana untuk mengkoordinasikan berbagai operasi bisnis dinyatakan dalam keuangan (Vataliya, 2009). Penelitian ini menggunakan empat pertanyaan untuk menentukan posisi partisipasi anggaran yang telah di buat oleh Ken Milani (1975). Manajemen Strategik adalah proses pengidentifikasian, mengumpulkan, memilih dan

menganalisis data akuntansi untuk membantu tim manajemen untuk membuat keputusan strategi dan untuk menilai efektivitas organisasi oleh Zahirul Hoque (2003;2). Penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hitt *et all.* (1996) dalam B.R Barringer dan A.C Bluedorn (1999).

Semua variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (5). Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis 1, 2, 3, 4, menggunakan uji regresi dan hipotesis 5, 6 dan 7 menggunakan analisis jalur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sampel dan Pengujian Kualitas Data

Kuesioiner dikirim ke 41 rumah sakit baik milik pemerintah maupun milik swasta yang ada di Kota Bandung dan yang menerima kuesioner 35 rumah sakit, namun yang berpartisipasi hanya 30 rumah sakit dengan responden sebanyak 110 orang.

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa keempat variabel yang digunakan adalah valid dan reliabel. Hasil uji validitas dengan korelasi *Pearson* menunjukkan kisaran di atas 0,40 sedangkan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Selain itu, hasil uji normalitas data juga menunjukkan data terdistribusi secara normal untuk semua variabel penelitian.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji model untuk model 1 menunjukkan nilai R (0,22) dan *adjusted R<sup>2</sup>* (0,016) dengan nilai p (0,237) yang menjelaskan bahwa 1,6% variasi partisipasi anggaran dapat dijelaskan oleh variasi kepemimpinan transformasional. Hasil uji model 2 menunjukkan bahwa *adjusted R<sup>2</sup>* (0,644) hal ini berarti 64,4% variasi strategik manajemen dapat dijelaskan oleh variasi kepemimpinan transformasioal dan variabel partisipasi anggaran. Sedangkan hasil uji model 3 menunjukkan bahwa *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,258 hal ini berarti 25,8% variasi

kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi kepemimpinan transformasional, manajemen strategic, dan variabel partisipasi anggaran.

Hipotesis 1 menyatakan kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap manajemen strategic. Secara statistik nilai  $p = 0,312 > \alpha 0,05$  yang berarti kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap manajemen strategic, dengan demikian H1 tidak didukung. Tidak diterimanya H1 menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di dalam menjalankan perannya, pemimpin yang tidak faham dengan baik kebutuhan organisasi pada akhirnya tidak dapat menyusun manajemen strategic. Tidak berpengaruhnya kepemimpinan transformasional terhadap manajemen strategic disebabkan karena: (1) Para pimpinan rumah sakit yang menjadi responden pada RS milik pemerintah daerah menjalankan perannya sesuai dengan porsi kewenangan yang dimilikinya; (2) Pada RSUD jenjang kenaikan pangkat dan golongan merujuk kepada lamanya bekerja sehingga proses pembuatan manajemen strategic tidak membutuhkan keahlian khusus, karena semua sudah ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Pada RS Swasta, pimpinan RS tidak memiliki kewenangan untuk membuat strategi manajemen karena semua telah ditentukan oleh Yayasan dan Komite Penyantun.

Hipotesis 2 menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap manajemen strategic. Hasil uji statistik menunjukkan  $p = 0,000 < \alpha 0,05$  yang berarti partisipasi anggaran berpengaruh terhadap manajemen strategic, sehingga H2 didukung. Diterimanya hipotesis ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang dijalankan dengan baik dapat memberikan semangat inovasi, rasa memiliki, tanggung jawab melampaui kewenangannya yang pada akhirnya terjadi proses evaluasi yang efisien dan efektif di dalam proses manajemen strategic. Pada akhirnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam gaya perencanaan anggaran dalam institusi bisa berdampak pada manajemen strategic yang lebih baik.

Hipotesis 3 menyatakan manajemen strategik berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara statistik nilai signifikansi variabel manajemen strategik terhadap kinerja keuangan adalah  $p\ 0,309 > \alpha\ 0,05$ . Hal ini berarti bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap manajemen strategik, dengan H3 tidak didukung. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak berpengaruhnya manajemen strategik terhadap kinerja keuangan pada penelitian ini disebabkan oleh proses penyusunan strategik yang terjadi bukan merupakan hasil dari buah pemikiran manajemen sekarang karena memang sejalan temuan pada hipotesis 1, yang memberikan informasi bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap manajemen strategik. Selanjutnya, proses manajemen strategik yang dilakukan tidak efektif, mengingat organisasi rumah sakit menjalankan kegiatan bisnisnya mengemban tugas sosial dan tugas negara yang dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal dengan biaya yang relatif murah seperti pada rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit pertahanan keamanan (Hankam).

Hipotesis 4 menyatakan kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap partisipasi anggaran. Secara statistik nilai  $p\ 0,237 > \alpha\ 0,05$  yang berarti bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggaran, dengan demikian H4 tidak didukung. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang unik, artinya aplikasinya sangat ditentukan oleh latar belakang entitas bisnis yang dijalankan. Pada situasi tertentu misalkan semakin meningkatnya iklim persaingan usaha dan tekanan oleh masyarakat untuk transparansi, kondisi ini menjadi pendorong untuk terapkannya model kepemimpinan transformasional. Selain itu tidak didukungnya hipotesis ini juga disebabkan oleh karakteristik institusi rumah sakit di Indonesia yang masih tradisional di dalam memandang lingkungan bisnisnya, dan sifat kepemimpinan yang bersifat *top down* sehingga tidak jalannya partisipasi anggaran.

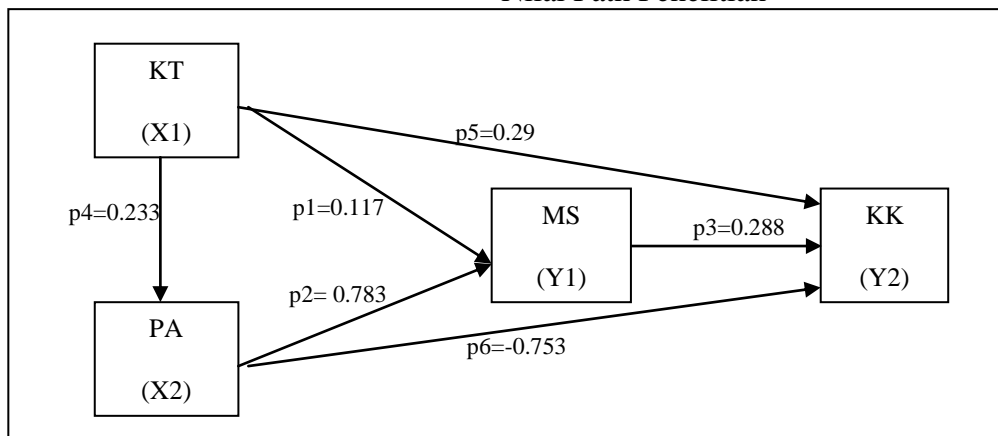
Hasil analisis jalur (*path analysis*) untuk hipotesis 5 yang dirumuskan partisipasi anggaran memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan.

Hasil uji menunjukkan interaksi nilai path (1) dan (6)  $-0,08$  dengan nilai  $p\ 0,003 < \alpha\ 0,05$  yang berarti partisipasi anggaran memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan. Dengan demikian H5 didukung. Sesuai dengan makna *beyond budgeting*, (Hope dan Fraser, 2003) maka penerapan kepemimpinan transformasional akan sangat mendukung adanya penerapan struktur organisasi yang fleksibel dan merancang proses manajemen yang adaptif, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil bagian di dalam proses bisnis karena adanya pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai, pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya efek mediasi partisipasi anggaran di dalam pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja keuangan sebagai dukungan terhadap teori agensi. Partisipasi anggaran akan dapat menurunkan tensi masalah agensi di sektor publik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah.

Hipotesis 6 menyatakan manajemen strategik memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan. Nilai path yang diperoleh untuk hipotesis ini adalah  $0,034$  dengan  $p\ 0,096$  yang  $> \alpha\ 0,05$  yang berarti bahwa manajemen strategik tidak memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan kinerja keuangan, untuk itu H6 tidak didukung. Kondisi ini terjadi karena manajemen strategik tidak dapat dipraktikkan secara nyata oleh pimpinan-pimpinan unit organisasi rumah sakit, karena disebabkan sifat dari unit analisis penelitian yaitu rumah sakit yang sebagian besar masih bersifat nir-laba. Keberadaan kepemimpinan transformasional belum dijalankan secara baik dan nyata, karena sebagai pimpinan, kepala bagian ataupun kepala bidang, hanya menjalankan keputusan dan kebijakan “pimpinan” yang menurut penulis sangat berjenjang dan sensitif. Untuk menyebutkan sejumlah angka ataupun kebijakan ketika wawancara, responden sangat berhati-hati karena menurut mereka ini “area sensitif”. Jika ini diungkap akan berdampak tidak baik kepada masa depan “karier” mereka.

Hipotesis 7 menyebutkan bahwa manajemen strategik memediasi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja keuangan. Hasil uji terhadap nilai *path* menunjukkan 0,226 dengan  $p\ 0,000 < \alpha\ 0,05$  yang berarti manajemen strategik memediasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H7 didukung. Manajemen strategik merupakan sebuah pola yang secara sistematis digunakan oleh organisasi dalam alokasi sumber daya yang dimiliki, proses pengidentifikasian, mengumpulkan, memilih dan menganalisis data akuntansi untuk membantu tim manajemen untuk membuat keputusan strategi dan untuk menilai efektivitas organisasi. Pada akhirnya terjadi sebuah pengkristalan nilai-nilai, norma-norma dan tujuan organisasi secara komprehensif sehingga anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama di dalam mewujudkan cita-cita organisasi. Hasil analisis jalur dapat digambarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 5.  
Nilai Path Penelitian



Sumber: data diolah, 2013

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap manajemen strategik. Peningkatan partisipasi anggaran akan memberikan peluang untuk mengevaluasi manajemen strategik. Manajemen strategik sebenarnya merupakan peta perjalanan bagi organisasi, namun upaya pembaharuan tidak berjalan karena institusi rumah sakit masih dalam persimpangan jalan, mau bisnis atau nir-laba. Kinerja keuangan merupakan muara akhir dari serangkaian proses manajemen dan



proses produksi barang atau jasa, sehingga kepemimpinan yang baik, penganggaran yang fleksibel, dan manajemen strategik yang bersinergi dapat menjadi kekuatan di dalam menggerakkan organisasi menuju pencapaian visi dan misi. Kekuatan dalam memediasi yang ditunjukkan oleh partisipasi anggaran pada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja keuangan, menginformasikan bahwa ada manfaat jika institusi rumah sakit menjalankan partisipasi di dalam penyusunan anggaran, karena akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan. Kekuatan dalam memediasi yang ditunjukkan oleh manajemen strategik pada pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan, memberikan pelajaran berharga bahwa manajemen strategik akan efektif jika institusi rumah sakit menerapkan model kepemimpinan transformasional secara baik, karena akan mendorong adanya partisipasi anggota organisasi secara aktif.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan level organisasi, sehingga terkumpul hanya 30 sampel rumah sakit dengan responden sebanyak 110 unit, ini yang menyebabkan rendahnya nilai *adjusted R square*. Penelitian mendatang disarankan dapat memperbesar jumlah sampel dan responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory. *Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu*, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Ahmad. N.N.N, Sulaiman. M, and Alwi. N.M. 2003. Are Budgets Useful? A Survey of Malaysian Companies, *Managerial Auditing Journal*, 18 (9):717-724.
- Avolio, B.J., and Bass, B.M. (2002), Developing Potential across a Full Range of Leadership Cases on Transactional and Transformational Leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
- Baalbaki, I., Ahmed, Z. U., Christopher, V. H. P. and Makarem, S. 2008. Patient satisfaction with healthcare delivery systems *International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing*, 2 (1):47-62.
- Barling, J., Weber, T., & Kelloway, E. K. 1996. Effects Of Transformational Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: A Field Experiment. *Journal of Applied Psychology*, 81:827-832.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Bass, B.M. (1990), Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications (3rd ed.), New York: Free Press.
- Brownell, P. 1982. "Participation in The Budgeting Process When It Works And When It Doesn't", *Journal of Accounting Literature*, (Spring):124-53.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Haper and Row.
- Chong, V. K. And Leung, S. T-W. 2003. Testing a Model of The Motivational Role of Budgetary Participation On Job Performance: A Goal Setting Theory Analysis. *Asia Review of Accounting*, 11(1):18-37.
- Dionne. S.D. and Yammarino. F.J. 2004. Transformational Leadership and Team Performance. *Journal of Organizational Change Management*, 17 (2):177-193
- Dunk. A.S. 2003. The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation Between Budgetary Participation and Slack, *The Accounting Review*, (April):16-34.
- Firmanzah. 2012. Daya Saing SDM dan Pasar Tunggal ASEAN. Kolom Pakar: *Media Indonesia*, Senin, 14 Nopember.
- Fisher. J.G., Maines.L.A., Pejfer.S.A., Sprinkle. G.B. 2002. Using Budgets for Performance Evaluation: Effects Of Resource Allocation and Horizontal Information Asymmetry On Budget Proposals, Budget Slack, and Performance. *The Accounting Review*, 77 (4): 847-865.
- Hadianto, J. 2012. RSUD Kesulitan Tenaga Medis.. Kepala UPTD RSUD Cililn Kab. Bandung Barat. *Media Seputar Indonesia*, Kamis 23 Februari.
- Hope,J and Fraser, R.2003, *Beyond Budgeting*, Published by Soundview Executive Book Summaries (ISSN 0747-2196), P.O. Box 1053, Concordville, PA 19331 USA, a division of Concentrated Knowledge Corporation. [www.bbrt.org](http://www.bbrt.org)
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 11: 5-50.
- Kaplan, R. and Norton, D. 1992. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance", *Harvard Business Review*, 70 (1):71-79.
- Krishnan. V.R. 2005. Transformational leadership and outcomes: role of relationship Duration. *Leadership & Organization Development Journal*, 26 (6):442-457.
- Kyj, L and Parker, R. J. 2008. Antecedents of Budget Participation: Leadership Style, Information Asymmetry, and Evaluative Use of Budget. *A Journal Of Accounting, Finance and Business*, 44 (4): 457-489.
- Lonial, S.C., Tarim, M., Tatoglu,E., Zaim, S and Zaim, H. (2008). Market Orientation On NSD and Financial Performance of Hospital Industry. *Management & Data Systems*, 108 (6): 794-811.
- Maiga. A.S. 2005. Antecedents and consequences of budget participation. *Advances in Management Accounting*, 14 (4): 211-231.
- Maiga, A. S. and Jacobs, F. A. 2009. Leadership, Nonfinancial, and Financial Outcomes: The Case of Community Hospitals. *Accounting and the Public Interest*, 9: 166-190.
- Maddalena, V. 2012. A primer on project management: The cornerstone of strategic leadership. *Leadership in Health Services*, 25 (2): 80-89.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit C.V. Andi Offset Yogyakarta.
- Masi. R.J. and Cooke. R.A. 2000. Effects Of transformational Leadership On Subordinate Motivation, Empowering Norms, and Organizational Productivity. *The International Journal of Organizational Analysis*, 8 (1):16-47.
- Milani, K. 1975. Budget-setting, performance and attitudes. *The Accounting Review* 50: 274-284.
- Nemanich, L. A., & Keller, R. T. 2007. Transformational Leadership in An Acquisition: A Field Study of Employees. *The Leadership Quarterly*, (18):49-68.
- Pane, I, H. M. 2012. *RSU Pirngadi Medan Menuju Blu*. <http://www.analisadaily.com> Senin, 02 Apr 2012 01:06 WIB.
- Purnomo, H. 2012a. *Hasil Pemeriksaan BPK periode 1 Juli-31 Desember 2011*. <http://www.merdeka.com>.
- Purnomo, H. 2012b. *Pelayanan Kesehatan Pemerintah Buruk*. <http://health.kompas.com>

- Purvanova. R.K., Bono. J.E., and Dziewieczynski.J. 2006. *Transformational Leadership, Job Characteristics, and Organizational Citizenship Performance*. HUMAN PERFORMANCE, 19(1), 1–22  
Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Schein. 2004. *Organizational Culture and Leadership*, 3rd edition, San Fransisco, CA. Jossey-Bas. A Willey Imprint.
- Shapiro, S. P. 2005. Agency Theory. *Annual Review of Sociology*; 31: 263.
- Subanegara, H. P. 2008. Jangan sampai blud hanya ganti baju belaka! *KOMPAS.COM* - Rabu, 6 Agustus.
- Shah, A. and Shen C. 2007. A Primer on Performance Budgeting. Dalam Shah Anwar (Ed) *Budgeting and Budgetary Institution*. The World Bank Washington DC.
- Shields, J. F. and Shields, M. D. 1998. “Antecedents of participative budgeting”, *Accounting, Organizations and Society*, 23: 49-76.
- Weil. R.L and Maher. M.W. 2005. *Handbook Of Cost Management Second Edition* John Wiley & Sons, Inc.
- Widjayarta, M. 2011. *Rumah Sakit Kerap Melakukan Tindakan Medis Mubazir Terhadap Pasien*. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) <http://www.swa.co.id>
- Vataliya.K.S. 2009. *Practical Financial Accounting (Advance Methods, Techniques & Practices)* Paradise Publishers Jaipur (India).
- Yukl, G. 2010. *Leadership in Organization*. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall.

## Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011

**EMKHAD ARIF\***

*Universitas Islam Riau*

**ABDUL HALIM**

*Universitas Gadjah Mada*

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011. Namun, yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah belum banyaknya bukti empiris atau belum diketahuinya faktor-faktor yang menyebabkan minimnya belanja daerah sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan APBD di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2011.

Informan di dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala badan, sekretaris dinas, kepala biro keuangan dan snowball informan yang ada hubungannya dengan penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2011. Berdasarkan data, total seluruh informan yang berhasil di wawancarai adalah 19 orang yang diperoleh dari tiga (3) kabupaten dan satu (1) kota, yaitu: Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan model Miles dan Hubberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya masing-masing daerah kabupaten/kota memiliki faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi internal dari pemerintahan daerah. Namun, ada beberapa faktor yang hampir sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, misalnya: faktor regulasi, faktor politik, faktor tender/lelang dan faktor komitmen organisasi.

**Keyword:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Undang-Undang, Peraturan Presiden, Penyerapan Anggaran, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah.

---

\* Corresponding author: emkhadarif@yahoo.com

## Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut sebagai UU Otonomi Daerah (Halim, 2008) serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara dan menjadi tonggak awal dari otonomi daerah.

Adanya paket UU tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melahirkan efektifitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih memperhatikan pada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global. Tujuan selanjutnya dari munculnya paket UU tersebut adalah pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga sekarang (2001-2012), terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Minimnya penyerapan anggaran tersebut muncul di tengah tuntutan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah semakin transparan dan akuntabel dalam rangka menuju *good government governance* dan tuntutan untuk efektif dan efisien.

Untuk wilayah Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Pembangunan Daerah Setdaprov Riau, Rusli M. “Hingga periode triwulan ketiga, realisasi APBD Riau 2010 secara fisik sudah mencapai 66,71% dan keuangan 48,23%. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 10% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2009 lalu, ketika itu pencapaiannya hanya 54%” (Riau Bisnis, 2012).

Serapan anggaran APBD Kota Dumai pada penghujung bulan Juli tahun 2009 masih rata-rata 50% dan lebih mengkhawatirkan lagi, pada pertengahan tahun 2011, belanja yang terserap baru mencapai 18%, padahal menurut Zul Ahad yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar, seharusnya penyerapan anggaran sampai pertengahan tahun 2011 sudah mencapai 40% (Riau Antara, 2012). Kabupaten lain, misalnya Kabupaten Pelalawan, menurut Nazarrudin yang merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan, hingga akhir tahun 2011 serapan anggaran kabupaten tersebut baru mencapai 50% (Matahari Pelalawan, 2011).

Kabupaten Bengkalis, dengan total APBD tahun 2011 sebesar Rp3,5 triliun, sampai akhir tahun 2011, serapan anggaran 82,58% dengan SILPA Rp663 miliar lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya mencapai 73,6%. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis Herliyan Saleh kepada sejumlah wartawan, usai menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja kepada 42 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, di Aula Rapat lantai II Kantor Bupati, Senin (13/2/12) (Riau Terkini, 2011).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan uraian latar belakang masalah di atas beserta fenomenanya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011.”**

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah belum banyaknya bukti empiris atau belum diketahuinya faktor-faktor yang menyebabkan minimnya belanja daerah sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan APBD di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2011.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Riau.

## **Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini hanya berfokus pada hal-hal yang menyebabkan masih minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

“Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2011?”

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2011.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah Daerah**

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD dan perangkat daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang dimaksudkan oleh UU tersebut adalah pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah (pasal 24 ayat 1), kepala daerah tingkat provinsi disebut Gubernur, tingkat kabupaten disebut Bupati dan tingkat kota disebut Walikota.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan perwujudan



dari pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan maksimal.

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

UU Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan pembiayaan daerah sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Di dalam penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

### **Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sejak tahun 1990, proses penganggaran pemerintah daerah sudah berubah secara substansial, aspek perubahan dan tuntutan yang paling mendasar terletak pada pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah dan ketersediaan dari teknologi informasi (Kelly et al. 2008). Di Indonesia, tuntutan perubahan tersebut mulai dirasa sejak tahun 1998, dikarenakan adanya tuntutan reformasi yang menuntut untuk diwujudkannya sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menekankan pengintegrasian sistem pertanggung- jawaban kinerja ke dalam sistem penganggaran. Pasal 14 ayat 2 dan pasal 19 ayat 2 UU tersebut memaparkan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai.

UU Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam UU tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam



sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

### **Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh Kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun.

Penelitian yang dilakukan oleh Wihascaryo (2010), berkaitan tentang evaluasi penggunaan *Cash Flow Forecasting System* (CFFS) untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cash flow forecasting system* dinilai belum berhasil dilaksanakan karena satuan kerja tidak melakukan proses perbaruan data apabila terjadi perubahan.

Kekurangan penelitian diatas juga terletak pada aspek analisis dengan melakukan pengelompokan data yang ada berdasarkan tanggal pencairan dan tanggal estimasi perkiraan penarikan dana. Pengelompokan berdasarkan tanggal pencarian yang digunakan untuk memilah data dari *database* realisasi pencairan anggaran.

## **METODA PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Strategi Metoda Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan paradigma konstruktivisme sosial melalui pendekatan sosiologis organisasi untuk menganalisis hasil penelitian. Hal ini disebabkan karena konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metoda deskriptif kualitatif dengan strategi *multiple cases*. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong, 2011,

metoda kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mengalami minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011, yaitu: (1) Kabupaten Pelalawan (2) Kabupaten Bengkalis (3) Kabupaten Rokan Hilir dan (4) Kota Dumai.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik, diperoleh langsung dari informan kunci dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk wawancara (*face to face*) dengan informan. Di dalam penelitian ini sumber data utama berupa wawancara yang diperoleh dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Menurut model ini secara umum proses analisis data mencakup reduksi data (*data Reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2008).

### SETTING PENELITIAN

*Setting* penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pada awalnya, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis sebelum kemudian dimekarkan pada tanggal 4 Oktober 1999, sedangkan Kabupaten

Pelalawan merupakan bagian dari Kabupaten Kampar, yang kemudian dimekarkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

Tabel 1  
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Lama Menjabat
1	Rustam Effendi M.Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Bupati Pelalawan</li> <li>Plt. Bupati Pelalawan</li> <li>Bupati Pelalawan Periode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2007-Per Juni 2009</li> <li>Juni 2009-Des. 2009</li> <li>Jan. 2009-April 2011</li> </ul>
2	Ir. M. Syahrul Syarif	Kepala Badan Perencana Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan	2010-Sekarang
3	M.D. Rizal	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan	2010- Sekarang
4	dr. Endid Romo Pratiknyo	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan	2010-Sekarang
5	Bpk. Latif Setiawan	Sekretaris Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan	2010-Sekarang
6	H.Mansur Maulana	Sekretaris Bina Marga Kabupaten Pelalawan	2010-Sekarang
7	H. T. Syahril	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar Kabupaten Pelalawan.	2010-Sekarang
8	Eka Yandiarti	Kepala Bagian Keuangan BAPPEDA Kab. Bengkalis	2010-sekarang
9	Yuniar. WR.A.K	Kepala Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	2010-Sekarang
10	Bapak Amri	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	2010-sekarang
11	Dra. Erna Susilastuti MSi.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	2010-Sekarang
12	Endang Mulyadi	Kepala Bagian Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis	2011-Sekarang
13	H. Said Zein	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir	2010-Sekarang
14	Dr. Junaidi M.M.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	2010-Sekarang
15	Bapak Surya Alam	Sekretaris Dinas Perikanan & Kelautan Kabupaten Rokan Hilir	2010-Sekarang
16	Rifki Erlangga Adhikra S.E.	Kepala Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Dumai	2011-Sekarang
17	Bapak Anhar	Kepala Bagian Pengembangan & Penelitian BAPPEDA Provinsi Riau	2009-Sekarang
18	Pak Azwar	Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Riau	2011-Sekarang
19	Suryadi Ahmad	Biro Keuangan Provinsi Riau	2008-Sekarang

## ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 2011

#### Faktor Politik

Faktor politik dalam hal ini adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung yang ternyata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011. seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan, Ir.M. Syahrul Syarif berikut ini:

“Nah, sekarang kalau ada yang menilai serapan rendah, itu mungkin saja, ada beberapa hal yang saya tahu, pertama, eee... pada saat itu, pada tahun 2011 itu karena ada apa namanya, perubahan agenda daerah, jadi tahun 2011 awal, kami lagi pemilihan kepala daerah kemudian bulan April, intinya salah satu penyebab, eeee... serapan dana kami relatif agak rendah itu, waktu pelaksanaan yang terbatas, karena Januari 2011, April inikan proses politik di daerah, kemudian April menjelang setelah Bupati dilantik masih ada proses-proses perjanjian kepala SKPD, nah... jadi mungkin dalam... dalam... enam... enam... bulan pertama itu masih dianukan, dipengaruhi oleh itu lah jadi tidak maksimal juga beberapa SKPD.”

Membaca kutipan di atas, maka memang tak dapat dihindari bahwa faktor politik yaitu proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 secara langsung dapat mengurangi waktu di dalam pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal pemerintahan. Akibat yang ditimbulkan dari faktor politik tersebut menjadikan SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak langsung bisa mengimplementasikan program kerjanya, hal ini dikarenakan ada perjanjian-perjanjian yang harus ditanda-tangani antara Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kepala satuan kerja perangkat daerah. Tentunya rentang waktu pemilihan kepala daerah dengan penandatanganan perjanjian antara kepala dinas dengan kepala satuan kerja perangkat daerah ini akan memakan waktu yang cukup lama yaitu antara Januari-April.

#### Faktor Komunikasi

Keberhasilan pengendalian organisasi bergantung pada tindakan pimpinan puncak dan kemampuan mereka di dalam membangun hubungan interpersonal antara berbagai tingkat hierarki (Ramgulam et al. 2012). Melalui proses penganggaran maka akan mendorong terjadinya saling koordinasi, kerjasama dan komunikasi antar unit dengan cara menghubungkan

masing-masing tujuan unit organisasi demi tercapainya tujuan bersama dalam organisasi (Raghuhandan et. al. 2012). Hal ini bisa terlihat dari kutipan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai berikut:

“Kadang kita yang merencanakan dan melaksanakan berbeda, akhirnya misalnya kita ini punya UPTD Puskesmas, kita kan punya Puskesmas 12 dengan gudang farmasi satu dan nah... perencanaannya di dinas, kadang teman-teman di dinas itu sendiri kurang berdiskusi dengan teman-teman yang melaksana kegiatan, mungkin komunikasi yang kurang lancar mungkin itulah.”

Ketidaksaling komunikasian antar anggota organisasi dapat mengakibatkan terhambatnya organisasi dalam pengimplementasian program kerja pemerintah. Oleh karena itu, perlu kiranya pimpinan organisasi untuk menata ulang alur komunikasi antar unit, agar semua informasi dan program kerja yang akan dilaksanakan bisa tersosialisasi dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap dikarenakan kurang harmonisnya komunikasi antar unit tersebut.

### **Faktor Perencanaan dan Penilaian Penganggaran**

Teori modern dari perilaku organisasi yang disebut dengan teori X dan Y (*X Y Behaviour Theory*) yang digagas oleh Douglas McGregor mengakui adanya keragaman dalam perilaku manusia. Teori X dan Y ini menyebutkan bahwa individu yang berpartisipasi di dalam proses penganggaran lebih memiliki respon yang tinggi terhadap proses perealisasi dan efisiensi dalam proses penganggaran.

Dalam riset kualitatif yang peneliti lakukan di Kabupaten Pelalawan, ada kecenderungan aspek *participative budgeting* belum berjalan dengan baik sehingga yang terjadi adalah alokasi belanja yang dianggarkan tidak menggambarkan kebutuhan dasar dari masyarakat yang mengakibatkan adanya sejumlah anggaran yang tidak bisa untuk dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat dari kutipan berikut ini:

“Kedua, kenapa tidak terlaksana kegiatan itu minimnya anggaran itu dimulai dari perencanaan, kalaulah perencanaannya itu betul-betul ntah kaji dari hasil tahun lalu dan kita mendapatkan masukan dari bawah betul-betul apa sebenarnya yang perlu aaa... disitu sesungguhnya penggunaan anggaran jadi bagus.”

Dari kutipan di atas terlihat bahwa aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan penilaian jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan

moneter (Arniati et.al 2010). Dalam aspek lain, salah satu yang menyebabkan minimnya penyerapan anggaran adalah kurang matangnya aspek penilaian anggaran belanja, hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut ini:

“Hanya kemungkinan mengapa, kenapa ada beberapa persen itu tidak terserap, kalau yang dari kita saya tahu ada beberapa kegiatan yang memang penilaian penganggaran itu, istilahnya apa, melebihi yang sebenarnya, sebenarnya bukan melebihi tetapi sasaran itu apa, standarnya itu terlalu tinggi, misalnya gini, seperti Jamkesda kita pakai per orang itu ditanggung lima ribu, jadi tahun itu kalo kita tanggung, kalo kita perhitungkan dengan jumlah penduduk miskin itu mungkin kita bisa lima sampai enam miliar, ternyata penggunaan tahun itu paling cuma habis dua miliar. Itu sebabnya tahun ini kita buat penganggarnya hanya tiga ribu. Jadi kita dapat juga anggaran terlalu sedikit, biar tidak terlalu besarkan bahaya.”

Dalam kutipan di atas terlihat jelas, ketidaktepatan di dalam penilaian belanja dapat mengakibatkan pengelembungan anggaran yang berdampak pada ketidakmampuan merealisasikan anggaran yang telah diajukan, sehingga menjadi anggaran sisa untuk tahun berikutnya. Tentunya hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek penilaian dalam hal penghitungan unit alokasi belanja tidak baik yang menandakan gagalnya SKPD di dalam penilaian dalam hal penghitungan belanja.

### Faktor Regulasi

Teori Tindakan Logis ( *The Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioral intentions*). Keinginan berperilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang perilaku yang dimaksud.

Menurut para pakar dan hasil penelitian di sejumlah SKPD menunjukkan bahwa Perpres ini termasuk salah satu yang menyebabkan terjadinya keminiman dalam hal penyerapan belanja. Seperti yang diungkap oleh pengamat ekonomi Avililiani, “*Lambatnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya aturan, misalnya proses tender saja membutuhkan waktu enam bulan.*” ujar Avilliani. Hal senada juga diungkapkan oleh sejumlah informan yang peneliti wawancarai, misalnya seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, dr. Endid Romo Pratiknyo berikut ini:

“Hanya... faktornya yang lain adalah perubahan-perubahan kebijakan ini ni yang sangat cepat, dari Keppres 80, Keppres 54 sekarang sudah masuk lagi Keppres 70 di Agustus, yang sistem LPJ. Jadi kita belum 100% memahami peraturan yang lama masuk lagi peraturan yang baru, nah pelelangan kegiatan-kegiatan fisik inikan kita memakai Peraturan Presiden sekarang 54, pengadaan, mmm... Pengadaan Barang dan Jasa itu kan 54 padahal itukan baru mulai tahun lalu kalau gak salah dilaksanakan 2011, 2010 masih pakai Keppres 80, 2011 pakai Keppres 54, itukan barang baru tu, belajar beda betul, sekarang baru pertengahan tahun 2012 kita sudah keluar Perpres 70 yang harus kita ikuti lagi, perubahan-perubahan itu itukan bukan kita saja yang harus siap, rekanan juga harus siap, itu yang membuat hal-hal yang membuat kegiatan-kegiatan ini menjadi lambat, kemungkinan itu sih.”

Disamping itu, terkadang adanya aturan-aturan yang berubah secara cepat dan waktu yang tidak terlalu banyak, membuat kepala SKPD sebagai pelaksana anggaran agak sedikit takut untuk mengimplementasikan kegiatan fisik, karena takut salah dalam menjalankannya, oleh karena itu, adanya sosialisasi jauh-jauh hari tentang peraturan yang dibuat merupakan langkah jitu untuk menghindari hal tersebut. Berikut hal yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Pelalawan, Ir. M. Syahrul Syarif, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan:

“Mungkin regulasi, tapi saya nyatakan tidak mutlak, biasanya begini, proses pengadaan dengan apa yang lama tetap berlaku, cuman ke depan setelah ini harus mengikuti ini, biasanya begini, dia harus pahami dulu agenda hari inikan, memahami peraturan baru untuk bertindak lagi itu kan butuh waktu.”

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa perubahan regulasi yang terjadi tidak selalu bisa di jalankan secara langsung, hal ini dikarenakan pihak penyelenggara juga butuh waktu untuk mempelajari dan memahaminya.

### **Faktor Tender/Lelang**

Mayoritas lambatnya penyerapan anggaran tersebut terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan dan harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan UU. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, M.D. Rizal.

“Yang berdasarkan pengalaman saya, dari teman-teman, itu yang banyak itukan CK, Bina Marga ya, jadi memang proses lelang itu, disitu awalnya, kita Dinas Pendidikan curi start. Begitu disahkan, identifikasi, konsultan perencanaan ke lapangan, setelah itu masuk, pemda oke, oke lelang, bab... bab... bab... langsung, kita wanti-wanti, kita kontraktor-kontraktor hitam dalam tanda kutip ya, atau hanya



mengandalkan kentut doang sebelum modalnya, atau sebelum tiga puluh persen itu kita tidak akan kasih itu, dan biasanya orang-orang seperti itu, hanya mengandalkan penawaran setinggi-tingginya. Contoh, umpamanya. serendah-rendahnya, maksud saya.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Bina Marga, berikut kutipannya:

“Ooo... itu pelaksanaannya, kalau pelaksanaannya itu kan kenapa terjadinya ke simpang-siuran, masalah hal penting, kemaren masyarakat itu maunya begitu tap ketok palu langsung kerja, ndak sedemikian rupa, ndak sim salabin, ada proses-proses, ada proses tender, proses klarifikasi segala macam, itu tendernya habis, paling sedikit empat puluh hari, aaaa... itu, ada apa segala macam, maksimalnya tiga bulan.”

“Iyaaa, sudah termasuk, baru kerjaaa.... Itu kalau yang terjadi itu kan gak tau juga masyarakat, gak apa-apalah Pak, lancar segala, pokoknya segala macam lah, yang gak dapat satuan tender ngamuk...”

Dari kutipan wawancara di atas sangat terlihat proses tender merupakan salah satu penyebab dari minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011. Lambatnya proses lelang ditambah lagi konflik-konflik yang terjadi selama proses tender berlangsung semakin memperparah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk implementasi anggaran.

### **Faktor Cuaca**

Faktor cuaca termasuk salah satu hal yang menyebabkan mengapa penyerapan anggaran pada tahun 2011 itu terlambat. Hal ini memang dikarenakan antara rentang waktu September - Desember Provinsi Riau, khususnya Pelalawan mengalami musim hujan dan menghambat dalam hal perealisasi proyek fisik yang sedang dikerjakan, hal ini di ungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan, Ir. M. Syahrul Syarif sebagai berikut:

“Cuma pelaksanaan di tahun 2011, kasusnya dan kondisinya seperti itu, termasuk ada... ada... ada apa namanya curah hujan yang tinggi, kalau dari situ jugakan orang menganggap curah hujan sebagai jaminan, tapi pada kenyataan memang begitukan, apalagi jalan-jalan, mobil tak bisa masuk, karena jalanya ginikan ada airnya ...”

“Kedua, di akhir tahun juga ada musim hujan yang panjang walaupun tidak menyebabkan banjir, tapi mempengaruhi kinerja, yang saya tau itu, ini kasus 2011 ya, ya... kira-kira kalau 2011 itulah.”



Senada dengan yang diucapkan oleh Kepala Bappeda tersebut, mantan Bupati Pelalawan H. Rustam Effendi periode 2006-2011, juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut beliau, faktor cuaca merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan sejumlah proyek fisik tidak berlangsung dengan mulus, ini disebabkan kondisi geografis Pelalawan yang masih belum aspal seluruhnya dan menghambat mobil-mobil proyek untuk bisa masuk ke dalam lapangan proyek, sehingga yang terjadi adalah adanya penundaan pelaksanaan proyek fisik, yang berakibat pada minimnya penyerapan anggaran belanja.

## **2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2011**

### **Faktor Penerapan ULP (Unit Lelang Pengadaan)**

Teori kontinjensi berdasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi penerapan sistem baru tersebut bergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Penerapan ULP yang tidak diikuti dengan lingkungan yang kondusif di tambah dengan kurang berkualitasnya SDM di dalam lembaga itu, menjadikan penerapan sistem ULP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya serapan belanja daerah. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dra. Erna Susilastuti MSi, ungkapan beliau sebagai berikut:

“Kalau tahun lalu, itu mungkin awalnya karena dari perubahan pengadaan barang dan jasa ke ULP, unit-unit pelayanan terpadu, jadi masih ada proyek sana-sini, saya rasa itu”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Keuangan (Kabag. Keuangan) Bappeda Kabupaten Bengkalis, Eka Yandiarti:

“ULP kan di Bengkalis baru pertama kali inikan baru pertama unit pelayanan pelelangan yang satu pintu, karena baru pertamakan, karena pertama itu... ya ... jadi agak-agak lambatlah proses pelelangan itu.”

“Kita kan ULP kan, sudah terasa kegiatan kita yang dilelang kan melalui ULP, jadi tinggal ULP lagikan, (kurang jelas.....) agak lambat keluarnya pelelanganya...”

Pelaksanaan ULP yang tanpa diiringi dengan kualitas sumber daya manusia ternyata juga berakibat pada lambatnya serapan anggaran belanja. Padahal secara prinsip ULP justru dibentuk dalam rangka untuk melancarkan kinerja pemerintah dalam hal belanja.

### Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam Teori Edward III yang dimaksudkan dengan sumber daya bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas dan lain-lain. Menurut Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing pdalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor kualitas sumber daya manusia dimasukkan ke dalam salah satu faktor yang menyebabkan minimnya serapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Bengkalis dikarenakan hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Keuangan Dinas Sosial, kutipannya sebagai berikut:

“Oooo... terutama sih peningkatan SDM ya... terus ini *right man on the right place* itu sangat penting menurut saya, jadi untuk apa ya profesi, walaupun dia di birokrasi, karena dengan begitu ia lebih memahami, walaupun ada pergantian pejabat ekselon dua atau tiga itu sering, hampir setiap tahun ada pergantian, tapi saya menyatakan *background* pendidikan dan lain sebagainya sehingga walaupun diganti ia masih punya *background* itu jadi cepat menanggapi jadi tidak perlu belajar dari nol lagi, itu juga menghambat, jadi memang *the right place* itu penting, sekarang kan gak, sekarang itu diabaikan sekali.”

Faktor sumber daya manusia juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dra. Erna Susilastuti MSi. Berikut kutipannya:

“Kalau dari segi pelaksanaan ya... kita ini, apa namanya *approach* tenaga, SDM nya kurang jadi faktor pendukungnya kegiatannya, orangnya kurang, jadi, yaaa... maksudnya kurang itu dalam arti kualitasnya, jadi kita maunya cepat tapi pada kenyataannya lambat, jadi perlu beberapa hal menggerakkan.”

Penempatan pegawai memerlukan perhatian yang penuh dari pimpinan daerah dan pimpinan SKPD Kabupaten Bengkalis. Apabila orang yang ditempatkan tidak tepat pada jabatan-jabatan yang tersedia akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan organisasi antara lain: para pegawai akan merasa frustasi dalam bekerja, para pegawai akan bekerja lamban dan hasil kerjanya kurang bermutu.

## Faktor Politik Penganggaran

*Public Choice Theory* mengidentifikasi berbagai kelompok yang mendominasi perilaku pemerintah lokal (*local government behaviour*), yaitu *tax players*, *public service recipients*, *politicians holding public office and public sector bureaucrats*. Masing-masing kelompok memiliki pengaruh di dalam pengambilan keputusan pajak lokal dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan kelompok (Chang & Turnbull, 2002). *Public Choice Theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi.

Faktor politik penganggaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya minimnya serapan belanja daerah. Hal itu tercermin dari kutipan berikut:

“Terus... mmm, kalo memang anggaran itu sudah proses diawal, kan ada jadwalnya, kan sudah jelas, pembahasan APBD kan sudah ada jadwalnya tu, bulan ini Musrembang ini, bulan ini sudah jelas, nah... untuk tingkat kabupaten itu juga sudah jelas, kenapa harus tunggu lama, apakah ada apa, kan gitu, ada apa kan gitu ? boleh kita mengakomodir eee... apa namanya ada kepentingan-kepentingan politik ya, nah yang itu juga salah satu yang menghambat itu, kalo bisa diminimalkan, jangan... ada tapi diminimalkan jangan terlalu apa ya, nampak kali, dan terlalu kentara menurut saya, diawal ada, ketika muncul langsung hilang kegiatan itu, kemudian tiba-tiba DPA muncul kegiatan yang lain pula”

Sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi di setiap pemerintah daerah (Amiruddin, 2009). Amiruddin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antara dokumen tersebut salah satunya yaitu politik penganggaran.

### Faktor Harus Menyelesaikan Anggaran Tahun Lalu (2010)

Menurut *Referent Cognitions Theory*, interaksi antara *fairness* terhadap target anggaran dan *fairness* pada proses penentuan target anggaran merupakan perpaduan yang dapat menimbulkan motivasi dalam mencapai anggaran. Ketika individu menerima hasil yang tidak fair, *judgment* mereka menjadi melekat pada *referent* atau pihak lain (Folger 1986). Karena itu, seseorang akan membandingkan *outcome* yang mereka terima dengan *referent outcome*, misalnya *outcome* yang seharusnya mereka terima atau yang diterima oleh orang lain dengan posisi yang setara, dengan input yang relatif sama dengan input pihak lain (Adam 1965). Jika *referent outcome* mengindikasikan suatu hasil yang tidak memuaskan yang diterima seseorang dan *outcome* yang dirasakan seharusnya diterima sama dengan pihak lain, maka hal ini akan menimbulkan kemarahan dan kecemburuan.

Seiring dengan hal tersebut, dengan tetap fokus dalam menyelesaikan anggaran tahun lalu ternyata menyebabkan salah satu faktor yang mengakibatkan minimnya serapan anggaran belanja daerah, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Yuniar. WR.A.K berikut ini:

“Rendah ya, artinya eee... kenapa masih rendah, eee... kenapa penyerapan dana terlalu rendah atau bisa dinyatakan pagu rendahnya khususnya Kabupaten Bengkalis, dan lebih tepatnya di... saya bicaranya di SKPD, mungkin nanti gini kamu cek, kalau menurut pandangan saya, di Kabupaten Bengkalis itu kenapa masih rendah, yang pertama, masih rendah, masih harus menyelesaikan tahun anggaran yang telah lalu.”

Oleh karena itu, anggaran tahun lalu yang tidak selesai ternyata membebani SKPD untuk menyelesaikannya yang mengakibatkan minimnya belanja daerah. Peristiwa ini memang dapat dimaklumi, dikarenakan ketidakmampuan untuk menyelesaikan anggaran tahun lalu tentu saja menandakan buruknya kinerja SKPD bersangkutan.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2011**

#### **Faktor Lambatnya Pengesahan APBD Tahun 2011**

Lambatnya pengesahan APBD di daerah yang tidak tepat waktu melahirkan problematika yang cukup serius. Hal ini dikarenakan, pengesahan yang tidak tepat waktu ini akan mengakibatkan pemerintah tidak bisa mendistribusikan rencana-rencana strategis yang telah disusun dengan baik. Kutipan wawancara berikut menunjukkan telah terjadi terlambatnya pengesahan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hilir, yang diungkapkan oleh Dr. Junaidi M.M., Kepala Dinas Kesehatan:

“Aaa... misalnya perencanaan yang benar-benar matang, karena pengelolaan anggaran besar, maka mungkin, apa namanya maka perlu kajian-kajian, dari Bappeda, pengguna anggaran, makanya molor sedikit, kalau saya lihat seperti itu, kabupaten yang anggaran nya besar agak lambat dimajukan, dari yang kecil, kan tentu logikanya seperti itu kan, yang satu anggarannya kecil, yang satu besar, tentu yang lebih kecil itu lebih mudah untuk apa namanya direncanakan, melaksanakan kegiatannya, dibandingkan anggaran yang lebih besar perlu kajian-kajian supaya tidak salah, kan gitu, hasil dari kajian-kajian itu akhirnya ada keterlambatan sedikitkan, ntah waktu.”

Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 179 disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan demikian, amanat undang-undang mengisyaratkan sebelum tanggal 31 Desember seharusnya APBD di tiap-tiap provinsi dan kabupaten sudah disahkan. Akan tetapi terkadang lamanya perencanaan dan penyusunan program yang diamahkan undang-undang untuk disusun di masing-masing SKPD mengakibatkan terjadinya lambatnya serapan anggaran.

### **Faktor Regulasi**

Salah satu faktor yang mengakibatkan minimnya serapan belanja daerah di Kabupaten Rokan Hilir adalah faktor regulasi. Hal ini terungkap hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Junaidi. M.M. berikut ini:

“Kalau menurut saya yang kedua ini apa, adanya perundangan-perundangan kita, memang itu jadi masalah juga, pengadaan barang dan jasa, semua orang takut jadi pejabat pengadaan itu, dengan adanya ini kan, akhirnya orang karena undang-undangnya sering berubah tak menguasai lagi, karena tak menguasai tentu harus menghadapi hukum, kalau ada masalah hukum orang sudah takut untuk jadi pejabat eksekusi, ini juga dampak perlu juga ini, undang-undang kita kok... setiap saat berubah-ubah.”

Dengan adanya pergantian dan perubahan perundang-undangan ini mengakibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis yang dipandu oleh peraturan dalam melaksanakan kegiatannya menjadi takut mengambil keputusan dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, dikarenakan merasa tidak menguasai peraturan.

Di dalam Teori Tindakan Logis ( *The Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioral intentions*). Argumentasi menggunakan model ini adalah bahwa model penelitian teoritis tersebut bisa menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan yang kompleks dan membutuhkan kemampuan dan skill teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktek kerja sehari-hari.

### **Faktor *Participative Budgeting***

Faktor tidak maksimalnya *partisipative budgeting* merupakan salah satu penyebab dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. menurut informan salah satu yang menyebabkannya minimnya serapan anggaran adalah kecilnya minat anggota SKPD untuk turun ke bawah dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini tergambar dari wawancara berikut ini:

“Ya ya ya, jadi berapa anggaran yang didapat tergantung pro aktif dia bagaimana menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang dia baru bisa, kalau itu semua, kalau kita hanya duduk di kantor itu otomatis tak akan bisa, kalau hanya duduk di kantor hanya gaji dan honorlah tapi apa permasalahan masyarakat di lapangan kita kan tak tahu”

Dalam kutipan di atas tergambar dengan jelas bahwa ada beberapa dinas yang enggan untuk turun ke lapangan dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika pola ini terus dipertahankan tentu saja kualitas program yang dihasilkan akan rendah dan tidak benar-benar menggambarkan kondisi riil kebutuhan masyarakat.

**Faktor-faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Dumai pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:**

#### **Faktor Lambatnya Pengesahan APBD 2011**

Faktor lambatnya pengesahan APBD 2011 masih merupakan salah satu faktor yang menyebabkan minimnya penyerapan APBD 2011 Kota Dumai. Hal ini tercermin dari kutipan wawancara berikut ini:

“Penyerapan anggaran ini minim itu kadang bisa kita lihat dari, pengesahan APBD yang tidak di awal tahun, jadi bisa disahkan itu enam bulan, Maret atau Februari baru disahkan, awal triwulan kedua baru digunakan sehingga penyerapan sampai pertengahan tahun, sampai akhir semester pertama, itu masih belum.”

Dari kutipan di atas terlihat jelas, bahwasanya lambatnya waktu pengesahan APBD menjadi pemicu utama dari lambatnya penyerapan anggaran, sehingga di dalam merealisasikannya memakan waktu yang cukup lama. Pengesahan APBD yang melebihi tanggal 31 Desember, akan mengakibatkan aliran dana dari sektor pemerintah terhambat dan itu berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

## Faktor Komitmen Organisasi

Allen & Meyer (dalam Norman, 2010) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi (Mowday et.al, 1979). Oleh karena itu, lambatnya Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam mengesahkan APBD tahun 2011, merupakan cerminan dari lemahnya komitmen eksekutif dan legislatif untuk memenuhi kewajibannya sebagai pejabat daerah yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat. Lambatnya pengesahan APBD tahun 2011 tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“Ya faktor-faktor kita dalam pengesahan anggaran eee... itu tadi masing-masing SKPD menyusun anggarannya, tetapi terkadang ada SKPD yang pada waktu yang ditentukan belum menyerahkan rancangannya, keterlambatan SKPD dan mungkin pembahasan dengan di SKPD nya yang mungkin agak lama.”

Berdasarkan penjabaran dari kutipan diatas, penulis melihat bahwasanya fenomena keterlambatan pengesahan APBD 2011 di Kota Dumai ini, mencerminkan rendahnya komitmen organisasi baik anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanah dan tugas organisasi.

## Faktor Perencanaan Anggaran

Keberhasilan penganggaran berkaitan dengan tujuan organisasi, alokasi tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab pelaksanaannya (Shah 2007; Robinson 2007; Drake & Fabozzi 2010). Oleh karena itu, kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Faktor dari kurang baiknya perencanaan penyusunan anggaran yang berimbas pada program kerja dapat terlihat dari kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan, Dinas Perhubungan Kota Dumai, Rifki E.A. berikut ini:

“Yang kedua mungkin saya pikir perencanaan untuk penyusunan anggaran yang kurang baik, jadi ada mungkin beberapa kegiatan atau program yang mungkin sampai-sampai akhir semester pertama ataupun malah menjelang eee... bulan sembilan atau bulan sepuluh belum dilaksanakan karena itu mungkin ketidakcermatan perencanaan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan, dan di APBD perubahan banyak ada beberapa kegiatan yang tadinya direncanakan diawal karena tidak jadi di hapus, eee... sehingga memang kelihatan untuk penyerapan minim karena itu tadi karena perencanaan yang kurang matang”



Kutipan di atas sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan mengapa beberapa program kerja yang tidak bisa terealisasi dengan baik, padahal sudah direncanakan dan di anggarkan, misalnya dikarenakan penyusunan dan penentuan anggaran program yang tidak fair sehingga mengakibatkan individu enggan untuk mencapai target anggaran dan melaksanakan program (Cropanzano dan Folger 1991). Namun, ketika perencanaan dan penyusunan program dilakukan secara fair, maka informasi mengenai proses penentuannya menjadi tidak penting dalam memotivasi pencapaian target (Folger 1986).

### **Faktor Lelang atau Tender**

Ketidaktegasan di dalam mencantumkan besarnya termin per triwulan yang harus segera diambil oleh pimpinan proyek mengakibatkan para pimpinan proyek atau perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengambil termin di akhir tahun, sehingga sampai dengan triwulan ketiga serapan anggaran untuk proyek fisik cenderung minim, hal ini dikarenakan para pimpinan proyek malas untuk mencairkan termin tersebut di awal dan pertengahan proyek.

Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan, Dinas Perhubungan Kota Dumai, Rifki E.A. sebagai berikut:

“Faktor lain kegiatan-kegiatan yang ada inikan yang nilainya besar kan melalui proses pengadaan barang dan jasa, eee... proses lelang, kadang proses lelang inikan memakan waktu tiga bulan, sehingga mungkin muncul sampai pada bulan tertentu masih terkesan penyerapan anggaran itu minim, padahal sebetulnya ketika kegiatan dari mulai proses lelang itu dijalankan sampai selesai atau ditunjuk pemenang kemudian kegiatan dilakukan sampai akhirnya kegiatan itu jadi, siap... barang itu siap, dan barulah dana dicairkan”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat ada kecenderungan pimpinan proyek untuk mencairkan dana proyek pada akhir tahun dan tidak patuh kepada PP yang menyarankan pencairan dana termin setiap tingkat penyelesaian proyek. Penulis berasumsi, idealnya di dalam kontrak kerja yang ditawarkan harus ada ketegasan antara kedua belah pihak, yaitu antara pemberi proyek dengan pengerjaan proyek, agar masing-masing pimpinan proyek bersedia untuk mencairkan uang proyek setiap tingkat penyelesaian proyek, tanpa harus menunggu akhir tahun, dampak dari kebijakan pimpinan proyek ini mengakibatkan, serapan anggaran belanja untuk proyek fisik menjadi minim di triwulan pertama sampai ketiga dan membengkak di triwulan ke empat.



Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Azhar, Kepala Bagian Statistik dan Pengembangan Bappeda Provinsi Riau:

“Dia gini, aaaa... kita kan biasanya, aaa... dia ada. ada penyerapan dana, ada perealisasi pelaksana, penyerapan dana itu gini, kenapa kecil tiga triwulan itu, banyak kontraktor itu yangambilnya satu tahun, proyek fisik-proyek fisik itu, dia gini, dia kan empat triwulan, nanti ada triwulan satu itu, Januari sampai Maret, triwulan kedua April-Juni, triwulan ketiga Juli-September dan triwulan keempat Oktober sampai Desember. Kalau, penyerapan sampai triwulan ketiga itu kecil, itu karena pekerjaan fisiknya sedang berjalan belum ada yang ambil termin, tau termin itu apa ? termin itu bayar kontraktor, kontraktor ajukan termin, kapan termin itu diambil ? apabila pekerjaan sudah diselesai, jadi mereka itu kerja dulu, uang muka 20%, jadi makanya bulan tiga, empat itu baru dia uangnya banyak terserap. Sisa-sisa yang kontrak itu ambil uang.”

Berdasarkan kutipan diatas, terlihat bahwa pimpinan proyek lebih cenderung untuk mengambil uang proyek di awal tahun sebesar 20% dan langsung mengerjakan proyek sampai dengan selesai, tanpa memperdulikan tingkat penyelesaian pekerjaan dan baru kemudian mengambil uang termin pada akhir tahun setelah pekerjaan selesai, sehingga yang terjadi adalah pembengkakan pengambilan belanja menumpuk diakhir tahun.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang mengakibatkan terjadinya minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Walaupun ada sebagian kecil faktor yang hampir sama namun memiliki karakteristik faktor yang berbeda.
2. Faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor regulasi, faktor tender/lelang dan faktor lambatnya pengesahan APBD tahun 2011 masih merupakan faktor-faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011.

### **Keterbatasan, Saran dan Implikasi**

#### **Keterbatasan**

Keterbatasan di dalam penelitian ini antara lain: Rata-rata dimasing-masing kabupaten/kota memiliki 15-20 SKPD, namun dikarenakan waktu, rumitnya birokrasi dan permasalahan internal maupun eksternal lainnya menyebabkan peneliti hanya mampu

mewawancarai 4-5 SKPD per kabupaten/kota. Hasil penelitian yang dilakukan di tiga kabupaten dan satu kota ini belum tentu bisa mewakili untuk seluruh wilayah di Indonesia. Informan khususnya Kepala Dinas memiliki ketakutan dalam mengungkapkan hal yang sebenarnya, sehingga masing-masing kepala dinas lebih cenderung untuk menjawab apa adanya dan terkadang lebih memilih untuk mendisposisikan wawancara kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bagian Keuangan.

### **Saran**

Memperpanjang waktu penelitian dan pengamatan akan memberikan keabsahan data yang lebih kredibilitas. Hal ini dikarenakan dengan memperpanjang waktu penelitian, maka hubungan antara peneliti dengan informan akan semakin dekat, semakin akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan lagi.

### **Implikasi**

Berbagai temuan dari penelitian dalam bidang serapan anggaran tentunya diharapkan mampu dievaluasi oleh pemerintah daerah agar peristiwa yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Berbagai teori-teori yang peneliti temukan dari teori-teori yang sudah ada tentunya merupakan langkah awal yang baik untuk mengujinya kembali di daerah-daerah yang lain dalam rangka untuk menyempurnakan penelitian ini.

## Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)

**SANDHYAKALANING JIWATAMI\***

*Universitas Indonesia*

**Abstract:** *Infrastructure development is one of important aspects to accelerate the process of national development in Indonesia as a developing country. Main indicator for infrastructure development is capital expenditure, with the sources of fund are central government transfer fund, regional autonomy, as well as other regional income. In recent years it is indicated that the sources of local government revenue are not used to fund capital expenditure, but for local government personnel and operational expenditure.*

*The purpose of this study is to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. This study uses analytical regression with panel data to see relationship between the variables and uses robustness test to make sure that the model used is the best model.*

*The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special Purpose Grant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund (DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure.*

**Keywords:** *Fiscal decentralization, capital expenditure, local independence, intergovernment transfer, personnel expenditure.*

---

\* Author can be contacted at: [tamiridwan@gmail.com](mailto:tamiridwan@gmail.com)

## LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia dinilai tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran pembangunan infrastruktur terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) yang rendah. Persentase pengeluaran infrastruktur terhadap GDP di Indonesia mengalami tren peningkatan dari angka 0,94% pada tahun 2005, hingga mencapai angka 2,3% dalam APBN 2013. Namun peningkatan ini masih dinilai rendah. Karena dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP (Adam, 2012).

Hal ini menjadi perhatian pemerintah yang dituangkan dalam tujuh arah kebijakan sebagai ciri khas dari APBN 2013. Salah satu dari arah kebijakan tersebut adalah peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk belanja modal dalam APBN 2013. Peningkatan anggaran belanja modal hingga Rp 29 triliun dari APBN-P 2012 ini akan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur.

Belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah juga mengalami peningkatan. Alokasi untuk dana perimbangan pada APBN 2013 menjadi Rp 444,7 triliun, meningkat sebesar Rp 36,3 triliun dari APBN-P 2012. Peningkatan alokasi dana perimbangan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

Analisis data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008-2012 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan, atas 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota dapat diperoleh beberapa gambaran atas trend komposisi pendapatan dan belanja daerah.

Diketahui bahwa secara nasional ketergantungan seluruh pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi, walaupun trend dana perimbangan menurun dari 76,02%

pada tahun 2008 hingga mencapai besaran 66,02% di tahun 2012. Porsi PAD secara rata-rata kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong kecil, pada tahun 2012 realisasi PAD hanya sebesar 19,54%.

Penulis tertarik untuk mengaitkan dua sumber pendapatan daerah tersebut dengan perkembangan infrastruktur daerah. Fenomena transfer ke daerah yang terus meningkat seharusnya dapat diikuti dengan perkembangan infrastruktur yang juga meningkat. Namun, ternyata belanja modal malah mengalami tren penurunan di lima tahun terakhir. Porsi belanja modal tahun 2008 sebesar 29,6% proporsi ini terus menurun hingga 23,3% di tahun 2012.

Jika dicermati komposisi belanja daerah secara nasional dari tahun 2008 hingga 2012, maka dapat diketahui bahwa porsi belanja pegawai tetap dominan dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya, walaupun dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Belanja pegawai mendapat porsi diatas 40% dari total pengeluaran pemerintah daerah.

Dengan melihat trend diatas, ada indikasi bahwa sebagian besar dana perimbangan dibelanjakan pemerintah daerah bukan untuk membiayai pembangunan dan infrastruktur. Hal itu terlihat pada porsi yang dialokasikan untuk belanja modal masih rendah. Bahkan tren belanja modal mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk diteliti karena salah satu tujuan desentralisasi adalah memperbaiki rendahnya penyerapan pada belanja modal.

Walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat pusat dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antarwilayah dalam negeri (Dale, 2011). Padahal menurut penelitian Wibowo (2008) belanja pemerintah daerah baik di tingkat

kabupaten/kota ataupun di tingkat provinsi memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan di daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal objek penelitian dan jenis variabel yang digunakan. Objek penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel untuk periode lima tahun, dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Variabel dana perimbangan dalam penelitian ini mencakup ketiga jenis dana perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta dengan satu variabel tambahan yaitu Belanja Pegawai. Alasan dimasukkannya variabel belanja pegawai dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui seberapa kuat belanja pegawai mempengaruhi belanja modal, dan bagaimana efek dari setiap perubahan besaran belanja pegawai tersebut terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan dua variabel kontrol yaitu Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.

## PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
- b. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
- c. Apakah terdapat pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
- d. Apakah Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?

## PENELITIAN SEBELUMNYA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Mengacu pada rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, kemandirian daerah yang dimaksud adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam memperoleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini indikatornya adalah PAD dibagi total pendapatan.

Diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu cara penyempurnaan sistem desentralisasi fiskal. Dengan diserahkannya wewenang pengelolaan jenis-jenis pungutan tertentu kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian daerah. Halim (2007) mengemukakan bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan, yang berarti akan terdapat perubahan juga di tiap-tiap pos belanja, termasuk belanja modal. Menurut Waluyo (2007), idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan PAD sehingga daerah benar-benar otonom, tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang membuktikan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Walaupun persentasi PAD cukup kecil terhadap total pendapatan, yaitu sekitar 7%, namun sangat berpengaruh terhadap terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif.

Di lain pihak, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan sendiri tidak berasosiasi positif terhadap belanja modal. Argumen dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara teoritis pendapatan sendiri (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Namun untuk kasus pemerintahan di Indonesia, persentase tersebut hanya sebesar 5-7% dari total penerimaan daerah. Hasil pengujiannya membuktikan bahwa pendapatan sendiri tidak berasosiasi terhadap belanja modal. Penelitian ini didukung oleh Ardhini dan Handayani (2011) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Maka dari pemaparan di atas hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>1</sub> :** *Terdapat pengaruh signifikan antara Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal*

Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua adalah mengenai dana perimbangan. Dana perimbangan yang dimaksud adalah rasio dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan pemerintah daerah yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam penelitian ini dana perimbangan diteliti berdasarkan tiap-tiap komponennya, yaitu DAU, DAK, dan DBH.

Hipotesis kedua mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal. DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Dengan *block grant* berarti DAU penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang secara idealnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat

Tujuan dasar transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah sebagai sarana *vertical balance* (keseimbangan antar pemerintah pusat dengan daerah). Khusus DAU selain sebagai sarana *vertical balance*, juga merupakan sarana *horizontal balance* (keseimbangan



antara tiap-tiap pemerintah daerah), yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke daerah. DAU sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar DAU yang diterima suatu daerah, berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Selain itu, Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi DAU, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Dengan demikian, daerah yang memperoleh pendapatan DAU besar maka alokasi anggaran belanja modalnya pun akan meningkat.

Di sisi lain, penelitian Yovita dan Utomo (2011) terhadap pemerintah provinsi di Indonesia periode 2008-2010, menyimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah yang negatif. Provinsi yang mendapatkan DAU dengan jumlah besar akan cenderung justru memiliki belanja modal yang rendah, sehingga ada indikasi bahwa penggunaan DAU yang bersifat *block grant* ini lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya.

Dari argumen- argumen serta pemaparan penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>2</sub> :** *Terdapat pengaruh signifikan anatara DAU terhadap Belanja Modal*

Hipotesis selanjutnya yaitu meneliti pengaruh DAK terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis dana perimbangan yang ditransfer ke daerah dengan tujuan khusus, oleh karena itu disebut *specific grant*. Pada awal masa desentralisasi, yaitu sekitar Tahun 2006, transfer DAK tersebut hanya meliputi 9 bidang pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional. Seiring berkembangnya kebutuhan di daerah maka bidang yang menjadi prioritas nasional pun bertambah, hingga di Tahun 2013 menjadi 19 bidang. Penambahan bidang tersebut mengaburkan tujuan awal untuk kebutuhan prioritas nasional karena semakin banyak dan bercabangnya bidang-bidang tersebut. Namun Penambahan bidang-bidang prioritas tersebut juga menunjukkan keberhasilan penggunaan DAK yang bersifat *specific grant*. Seluruh penggunaan DAK ditentukan penggunaannya secara spesifik melalui petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga terkait, dan menghasilkan output berupa infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik.

Keberhasilan output realisasi DAK yang tercermin melalui belanja modal membuat pemerintah pusat meningkatkan anggaran DAK untuk pemerintah daerah. Total alokasi DAK untuk tahun 2013 mengalami peningkatan hingga 20% dari tahun 2012, sebagaimana dalam Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK bahwa pada tahun 2012 alokasi DAK sebesar 26 triliun rupiah, dan pada tahun 2013 menjadi 31 triliun rupiah. Kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah dalam rangka peningkatan DAK antara lain percepatan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah menjadi dana alokasi khusus. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai hasil audit BPK, sebagian anggaran kementerian/lembaga masih digunakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Penelitian-penelitian mengenai pengaruh DAK terhadap belanja modal rata-rata menghasilkan kesimpulan bahwa adanya hubungan yang positif atau sejalan. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang meneliti 326 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005, Tuasikal menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara DAK dan belanja modal. Penelitiannya memperkuat penelitian Abdullah dan Halim (2003) dimana pengaruh DAU dan DAK yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pemerintah daerah sangat tergantung pada besar kecilnya dana perimbangan, yang berarti tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama untuk belanja modal masih tergantung pada transfer pemerintah pusat.

Sejalan dengan penelitian Tuasikal, penelitian Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pengaruh DAK terhadap belanja modal adalah positif dan signifikan. Penjelasan atas kesimpulan ini adalah bahwa tujuan dari transfer DAK adalah untuk program-program nasional pemerintah di daerah, dimana program nasional pemerintah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Jadi semakin besar DAK yang diperoleh, maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Berdasarkan pemaparan mengenai DAK tersebut, maka hipotesis ketiga adalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>3</sub> :** *Terdapat pengaruh signifikan antara DAK terhadap Belanja Modal*

Hipotesis selanjutnya yaitu meneliti pengaruh DBH terhadap belanja modal. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan transfer pemerintah pusat dari sumber daya manusia (SDM) yang berupa pajak, dan dari sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan lagi ke pemerintah daerah. DBH sangatlah memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari jenisnya dan pembagian proporsi bagi hasilnya. Secara umum, sifat dana bagi hasil sama seperti DAU yaitu *block grant*. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi belanja dari DBH. Walaupun terdapat pengecualian untuk DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi yang

sebagian dananya (0,2% dari tiap kab/kota dan 0,1% dari tiap provinsi) ditujukan untuk anggaran pendidikan dasar. Selain itu DBH Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi, sebesar 40% dianggarkan untuk rehabilitasi hutan/lahan.

Penelitian mengenai pengaruh DBH terhadap belanja modal telah dilakukan oleh Wandira (2013) terhadap 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012, dalam hasil penelitiannya Wandira menyebutkan provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa perilaku belanja modal pemerintah daerah dipengaruhi oleh transfer DBH, yang menunjukkan bahwa DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan di daerah selain PAD sebagai pendapatan sendiri, DAU serta DAK.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Adi (2009) tentang Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi DBH terhadap Pendapatan Daerah menyebutkan bahwa DBH, baik DBH Pajak maupun DBH SDA di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia bukan merupakan sumber penerimaan yang potensial untuk pembiayaan daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor lain yang lebih potensial.

Atas sifatnya yang *block grant*, namun dalam bagi hasilnya tetap memperhatikan potensi daerah penghasil, penulis merasa perlu untuk menguji pengaruh DBH terhadap belanja modal. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>4</sub> :** *Terdapat pengaruh signifikan antara DBH terhadap Belanja Modal*

Variabel independen terakhir yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah belanja pegawai. Beban belanja pegawai dalam APBN semakin besar, pada RAPBN 2013 anggaran belanja pegawai masih mengalami tren kenaikan sebesar 13,56% dari tahun sebelumnya.

Kondisi yang sama terjadi di pemerintah daerah, data analisis APBD selama tiga tahun terakhir yaitu 2009-2012 menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pegawai untuk pemerintah kabupaten/kota yang dirata-ratakan per provinsi adalah sebesar 50,9%, dengan belanja pegawai 20 provinsi di atas rata-rata, dan 12 provinsi dibawah rata-rata. Realisasi belanja pegawai tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta dengan persentase mencapai 67,3%. Jumlah yang sangat besar mengingat masih banyak jenis belanja yang harus di alokasikan dalam APBD. Sementara, besaran anggaran belanja modal untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata hanya 24,1% dari total belanjanya.

Masalah mengenai jumlah dan formasi PNS merupakan pemicu membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, meskipun jumlah dan formasi ideal bagi setiap kantor pemerintahan telah ditentukan melalui peraturan, namun kondisi riilnya masih jauh dari kondisi ideal. Sejalan dengan permasalahan tersebut, kebijakan penataan PNS juga menjadi perhatian Agus Martowardojo saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang moratorium pengangkatan PNS yang berlaku hingga Desember 2012, Martowardojo (2011) menjelaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan agar kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dapat melakukan “resizing” atau restrukturisasi organisasi sehingga dapat merespon upaya pengendalian biaya pegawai yang semakin meningkat tiap tahun.

Besarnya alokasi belanja pegawai ini tidak terlepas dari kebijakan- kebijakan kepegawaian. Banyak kebijakan yang justru berimplikasi pada peningkatan alokasi belanja pegawai pada APBN maupun APBD. Selain rekrutment pegawai baru, kebijakan seperti pemberian gaji ke-13, kenaikan gaji pokok antara 5-20% sejak tahun 2006, kenaikan dan pemberian beberapa tunjangan baru, serta pemberian tambahan uang makan secara otomatis akan menambah beban belanja gaji pokok.

Kebijakan lainnya seperti pemberian remunerasi yang diawali pada tahun 2007 terhadap 3 kementerian/lembaga, dan sekarang tercatat 14 kementerian/lembaga yang menerima remunerasi. Begitu pula dengan semakin banyaknya Lembaga Non Struktural (LNS), pada awal masa pembentukannya yaitu tahun 2007 tercatat ada 76 LNS, dan data akhir pada tahun 2010 tercatat ada 101 LNS (LKPP, 2010).

Selain fenomena jumlah pegawai yang besar, setelah era desentralisasi fiskal muncul fenomena pemekaran daerah yang menyebabkan banyak terbentuk daerah otonom baru (DOB). Tujuannya adalah untuk memperpanjang rentang kendali pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan ke masyarakat yang maksimal. Secara fiskal, daerah otonom baru tersebut akan mengurangi porsi DAU ke daerah secara nasional. Sebagai daerah yang baru dibentuk, DOB tersebut di awal tahun operasinya berprioritas untuk pembentukan aparatur pemerintahan dengan melakukan perekrutan pegawai sehingga alokasi belanja pegawai sangat besar. Setelah sistem dan aparatur pemerintahan berjalan dengan baik, baru lah fokus pembangunan infrastruktur untuk masyarakat dilakukan. Hal itu mengakibatkan belanja modal di tahun-tahun awal daerah otonom baru sangat minim.

Salah satu penelitian mengenai Hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal yang dilakukan oleh LPEM FEUI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Tahun 2010, mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara dana perimbangan dan belanja pegawai, sementara terdapat korelasi negatif antara belanja pegawai dengan belanja modal.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh antara belanja pegawai dengan belanja modal, dikarenakan penulis belum menemukan penelitian empiris sebelumnya yang memasukkan unsur belanja pegawai sebagai model yang merepresentasikan belanja modal. Maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>5</sub> :** *Terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal*

Maka berdasarkan kelima hipotesis sebelumnya, penulis bermaksud mengkombinasikan kelima variabel independen dalam penelitian ini untuk melihat pengaruhnya terhadap belanja modal daerah dengan melakukan pengujian regresi secara bersama-sama dengan menambahkan variabel kontrol yaitu jumlah penduduk per kabupaten/kota, dan luas wilayah per kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis keenam untuk penelitian ini adalah sebagai berikut,

**H<sub>6</sub>** : *Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal*

## METODOLOGI PENELITIAN

### Model Penelitian

Model penelitian terdiri dari lima variabel independen, yaitu Kemandirian Daerah (MANDIRI), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Pegawai (BPEGAWAI), satu variabel dependen yaitu Belanja Modal (BMODAL), serta dua variabel kontrol yaitu Jumlah Penduduk (lnPOP) dan Luas Wilayah (lnLUAS)

Atas variabel-variabel tersebut, berikut adalah model penelitian yang digunakan,

$$\begin{aligned} \text{BMODAL}_{it} = & \alpha_0 + \beta_1 \text{MANDIRI}_{it} + \beta_2 \text{DAU}_{it} + \beta_3 \text{DAK}_{it} + \beta_4 \text{DBH}_{it} \\ & + \beta_5 \text{BPEGAWAI}_{it} + \beta_6 \text{lnPOP}_{it} + \beta_7 \text{lnLUAS}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3.1)$$

Keterangan:

Notasi	Definisi Variabel	Satuan
BMODAL	Realisasi Belanja Modal per Total Belanja	%
MANDIRI	Realisasi PAD per Total Pendapatan	%
DAU	Realisasi DAU per Total Pendapatan	%
DAK	Realisasi DAK per Total Pendapatan	%
DBH	Realisasi DBH per Total Pendapatan	%
BPEGAWAI	Realisasi Belanja Pegawai per Total Belanja	%
LNPOP	Lognatural Jumlah Penduduk	-
LNUAS	Lognatural Luas Wilayah	-

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi internet dan basis data instansi yang berkaitan. Data terkait realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi internet dan basis data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sedangkan data mengenai jumlah penduduk dan luas wilayah didapatkan dari ikhtisar statistik yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik.

## Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, data yang digunakan adalah selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Dari populasi tersebut kemudian dilakukan penyaringan atas data penelitian yang tidak lengkap. Seperti Daerah Otonom Baru (DOB) yang belum dapat melaporkan laporan keuangannya, dan data LRA yang tidak lengkap. Sehingga total akhir sampel yang dianalisis adalah sebanyak 2.223 data kabupaten/kota di Indonesia. Rincian penyaringan sampel dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif Belanja Modal

Untuk mengetahui karakteristik data sampel secara umum, disajikan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2

Jumlah obyek penelitian terdiri dari 2.223 data, yang terdiri dari data *cross section* sebanyak 445 kabupaten/kota dan data *time series* sebanyak 5 tahun. Dalam statistik deskriptif di atas terdapat variabel BMODAL sebagai variabel dependen yang menunjukkan rata-rata



belanja modal kabupaten/kota terhadap total belanja daerah sebesar 22,96%. Porsi ini masih kurang jika merujuk pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah. Selain itu, realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia masih belum merata, sebagian besar realisasi belanja modal kabupaten/kota belum dapat mencapai 29%, walaupun beberapa daerah porsi belanja modalnya sudah melebihi 50% dari total belanja daerahnya. Berikut adalah tabel rincian 10 kabupaten/kota dengan belanja modal tertinggi dan terendah.

Daerah- daerah dengan BMODAL tertinggi yaitu daerah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Daerah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut memiliki variabel belanja modal besar karena daerah tersebut mendapatkan alokasi Transfer Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara daerah seperti Kab. Luwu Timur, Kab. Nunukan, dan Kab. Buton Utara adalah daerah dengan potensi pertambangan yang besar. Kab. Luwu Timur sebagai daerah yang memiliki variabel BMODAL tertinggi merupakan daerah penghasil tambang, selain itu pemerintah daerahnya memiliki *concern* penuh terhadap program pembangunan/infrastruktur dengan konsep pembangunan “Desa Mengepung Kota”. Secara umum daerah-daerah dengan belanja modal yang besar adalah daerah-daerah di wilayah timur Indonesia.

Daerah- daerah dengan BMODAL terendah yaitu daerah yang memiliki kondisi geografis yang kurang mendukung untuk pembangunan infrastruktur yaitu pegunungan dan pesisir pantai seperti Tana Karo, Tapanuli Tengah, Tanjung Balai, Buleleng dan Trenggalek. Selain itu, daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur yang sudah memiliki infrastruktur yang baik sehingga tidak meningkatkan belanja modalnya lagi. Secara

umum daerah dengan belanja modal rendah adalah daerah di wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, serta daerah dengan letak geografis yang sulit untuk dilakukan pembangunan.

### Analisis Regresi Data Panel

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan data panel (*pooled data*). Setelah melewati uji pemilihan model, maka model yang paling tepat untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*. Output hasil pengujian diringkas dalam tabel 4.

Tabel 4
---------

### Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Signifikan antara Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian statistic menemukan bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah hubungan berlawanan. Hasil penelitian ini berlainan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang meneliti kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012, dan juga penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti kabupaten/kota se-Jawa dan Bali tahun 2004-2005. Kedua penelitian tersebut menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Perbedaan hasil penelitian ini bisa disebabkan karena pengambilan objek atau populasi yang berbeda, serta periode penelitian yang berbeda, sehingga data realisasi APBD yang digunakan juga berbeda.

Alasan lain mengapa kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal karena porsi PAD sebagai sumber pendapatan daerah juga sangat kecil, yaitu hanya sekitar 5-10% dari total pendapat daerah sehingga PAD tidak mampu mempengaruhi porsi belanja pemerintah daerah, juga dimungkinkan karena adanya masalah keagenan (*agency problem*) antara pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah yang mengajukan anggaran untuk

disetujui, dan pihak legislatif yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan anggaran (Ardhini dan Handayani, 2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kemandirian daerah dengan belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa pihak eksekutif selaku pemegang semua fungsi pemerintahan di daerah mengalokasikan pendapatan asli daerah tersebut tidak pada pos belanja modal, namun kepada pos belanja lainnya seperti belanja operasional untuk belanja pegawai ataupun untuk belanja barang dan jasa.

### **Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh Signifikan antara DAU terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal kabupaten/kota. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yovita dan Utomo (2011) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Hal ini disebabkan karena DAU yang bersifat *block grant*, dimana alokasi penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wandira (2013)

### **Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh Signifikan antara DAK terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) dan juga penelitian Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa DAK sebagai sarana perwujudan program nasional di daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAK.

### **Hipotesis 4: Terdapat Pengaruh Signifikan antara DBH terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah yang berlawanan. Analisis mengenai arah hubungan negatif antara DBH dengan belanja modal berkaitan dengan sifat DBH yang sama dengan DAU, yaitu *block grant* yang memberikan indikasi bahwa pengalokasian DBH juga tidak digunakan untuk belanja modal, tetapi untuk belanja lainnya.

**Hipotesis 5 : Terdapat Pengaruh Signifikan antara Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal.**

Pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi dengan arah yang berlawanan oleh belanja pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

**Hipotesis 6 : Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis keenam menemukan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, kemandirian daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai secara simultan mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Indonesia.

Model penelitian ini juga didukung oleh dua variabel kontrol, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Secara individual variabel log natural jumlah penduduk ( $\ln POP$ ) yang merupakan variabel kontrol pertama dalam penelitian ini dengan probabilitas 0.6804 dinilai tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel kontrol kedua adalah log natural luas wilayah ( $\ln LUAS$ ) dengan nilai probabilitas 0.0034 berarti berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif 0.0034

## Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis model penelitian, dapat terlihat bahwa pengalokasian belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih berfokus kepada belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan. Seperti terbukti dari hipotesis-hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dari keempat sumber pendapatan daerah yang diteliti pada penelitian ini, hanya DAK yang berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Sedangkan variabel lainnya, yaitu kemandirian daerah yang merupakan rasio PAD terhadap total pendapatan, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Analisis mengenai pengaruh negatif dari PAD, DAU, dan DBH ini dapat dijelaskan melalui formulasi DAU, bahwa alokasi DAU untuk tiap pemerintah kabupaten/kota adalah penjumlahan dari Alokasi Dasar yang merupakan total gaji seluruh PNSD di daerah tersebut dan celah fiskal yang merupakan *gap* antara kebutuhan fiskal daerah tersebut dengan kapasitas/kemampuan fiskal kabupaten/kota tersebut.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

keterangan:

$$\text{AD} = \text{Jumlah Gaji} + \text{Tunjangan PNS Daerah}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

dimana,

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara PAD, DAU, dan DBH terdapat sifat komplementer, jika PAD dan/atau DBH pada suatu daerah tinggi, maka alokasi DAU nya akan rendah, asumsi *ceteris paribus*. Adapun ketiga jenis pendapatan pemerintah daerah ini memiliki sifat *block grant* yang artinya pemerintah daerah berwenang atas alokasi penggunaannya.

Jika melihat kondisi pemerintah daerah sekarang dengan jumlah PNSD yang terlalu banyak dan juga kebijakan kepegawaian yang justru berimplikasi terhadap peningkatan

alokasi belanja pegawai, maka pemerintah daerah cenderung menetapkan alokasi belanja daerah tersebut lebih banyak ke belanja pegawai. Pendapatan daerah baik berupa pendapatan sendiri yaitu PAD, ataupun pendapatan transfer yang sifatnya *block grant* akan lebih banyak dialokasikan ke belanja pegawai. Terbukti pada hipotesis 1 ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, serta hipotesis 2 ( $H_2$ ) dan hipotesis 4 ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa DAU dan DBH juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Pada hipotesis 5 ( $H_5$ ) terlihat pengaruh belanja pegawai terhadap belanja modal adalah negatif dengan koefisien yang cukup besar, yaitu 0.7256 yang artinya setiap kenaikan 1 *percentage point* (pp) dari belanja pegawai akan berkorelasi dengan penurunan belanja modal sebesar 0.7256 pp. Dapat dikatakan bahwa kenaikan realisasi belanja pegawai akan memicu penurunan pada realisasi dari belanja modal. Jika pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi belanja pegawai mereka, maka belanja modal akan terus menurun sepanjang pertambahan belanja pegawai tersebut. Maka cara agar belanja modal pemerintah daerah dapat meningkat adalah dengan mengurangi porsi untuk belanja pegawai.

Satu-satunya variabel yang berpengaruh positif terhadap belanja modal menurut model penelitian ini adalah DAK, terbukti pada Hipotesis 3 ( $H_3$ ). DAK merupakan dana yang ditransfer ke daerah dalam rangka perwujudan program nasional di daerah. Tujuan DAK adalah agar pemerintah daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai program nasional yang melekat pada dana tersebut. Realisasi dari DAK secara langsung merupakan belanja modal bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, besaran DAK berpengaruh positif pada belanja modal dalam APBD.

Membengkaknya belanja pegawai pada APBD bukan berarti tanggung jawab sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal tersebut. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat dengan rentang kendali yang lebih jauh melalui pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diikuti dengan pembiayaan dana (prinsip *money follow function*). DAU yang besar dan bersifat *block grant* nyata-nyatanya berdampak pada membengkaknya belanja pegawai dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi DAU perlu dikaji dan devaluasi kembali. Adanya alokasi dasar yang dihitung berdasarkan belanja Gaji/Tunjangan PNS dalam formulasi DAU secara tidak langsung menunjukkan bahwa belanja pegawai berapapun jumlahnya akan dibiayai melalui DAU.

Saat ini telah dibentuk Tim Asistensi Kementerian Keuangan, Bidang Desentralisasi Fiskal dibawah naungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan *Australia Indonesia Partnership for Decentralization* (AIPD) untuk mereformulasi DAU sebagai *equalization grant*. Tim tersebut melakukan penelitian mengenai berbagai alternatif atas formula DAU sehingga menghasilkan satu formula DAU yang secara teoritis akan memberikan pemerataan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik, serta diharapkan dapat menjadi rekomendasi mengenai reformulasi DAU dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang akan dibahas dengan pihak legislatif pada tahun 2013 ini.

### Hasil Uji Ketahanan Model (*Robustness Test*)

Untuk menguji ketahanan model penelitian, penulis melakukan perbandingan atas perbedaan perlakuan data yang digunakan, dengan mengacu pada pengukuran yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ringkasan output atas perbedaan perlakuan data tersebut ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5

Berdasarkan perbandingan atas perbedaan perlakuan data pada tabel 3, hasil pengujian dengan persentase tidak sepenuhnya *robust*, karena pada saat model diuji dengan *growth* dan

nilai rupiah hasil pengujiannya tidak sepenuhnya sama. Hasil pengujian dengan *growth* konsisten dengan hasil pengujian dengan persentase untuk variabel MANDIRI, DAU, DBH, BPEGAWAI, dan InPOP. Sedangkan, hasil pengujian dengan nilai konsisten dengan hasil pengujian dengan persentase untuk variabel DAU dan DAK.

Namun pengolahan data dengan nilai persentase masih merupakan model terbaik dilihat dari nilai  $R^2$  dan Adjusted  $R^2$  paling besar. Selain itu dua hasil pengujian lainnya, yaitu pengujian dengan nilai *growth* maupun dengan nilai rupiah tidak menunjukkan hasil yang konsisten dengan model lainnya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara belanja modal pemerintah daerah dengan kemandirian daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai. Sampel penelitian terdiri dari pemerintah kabupaten/kota di Indonesia periode 2008-2012. Berdasarkan hasil uji empiris yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

- a. Kemandirian Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan karena porsi PAD sebagai sumber pendapatan daerah juga sangat kecil, yaitu hanya sekitar 5-10% dari total pendapat daerah sehingga PAD tidak mampu mempengaruhi porsi belanja pemerintah daerah, juga dimungkinkan karena adanya masalah keagenan (*agency problem*) antara pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah dan pihak legislatif yaitu pemerintah pusat atas alokasi anggaran belanja.
- b. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia, komponen DAK berpengaruh signifikan positif sementara komponen DAU dan DBH berpengaruh signifikan negatif. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya merupakan



realisasi belanja modal. Sementara DAU dan DBH bersifat *block grant*, dimana pemerintah daerah menggunakannya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

- c. Belanja Pegawai mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia dengan arah yang negatif. Dengan asumsi *ceteris paribus*, jika alokasi belanja pegawai terus dinaikkan, maka belanja modal akan terus menurun.

### Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, antara lain:

- a. Sumber-sumber pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang diteliti hanya terbatas pada variabel-variabel pada LRA. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah lainnya seperti dana otonomi khusus, dan penyesuaian, maupun pendapatan dari NGO.
- b. Penelitian ini meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian per regional dan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan belanja modal suatu daerah tinggi atau rendah.
- c. Perolehan data yang tidak lengkap oleh karena beberapa daerah belum dapat menyerahkan LRA nya, dimana penulis menghadapi keterbatasan waktu penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data LRA yang lebih lengkap, sehingga lebih dapat mempotret keadaan pemerintah daerah Indonesia secara menyeluruh.
- d. Penelitian ini hanya berdasarkan data kuantitatif dalam laporan realisasi APBD, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagai pihak yang merasakan efektivitas kebijakan fiskal secara langsung. Berikut adalah saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait:

- a. Pemerintah pusat diharapkan segera melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai kriteria perhitungan DAU agar pemberian transfer tidak serta merta selalu menutupi berapapun kebutuhan gaji PNS Daerah.
- b. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan lebih memperhatikan daerah-daerah yang berdasarkan Kriteria Teknis masih memerlukan dukungan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) diharapkan dapat segera menetapkan peraturan tertulis mengenai kebijakan prioritas penataan SDM Aparatur Pemerintahan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Sukriy. (2008). Menggenjot Belanja Modal. Media Indonesia : 25 Agustus 2008.
- Abdullah, Sukriy & Abdul Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Yogyakarta : 1140-115.
- Abdullah, Sukriy & Abdul Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2 No.2, 17-32.
- Ajija, Sari, Setianto & Primanti. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
- Ardhini, & Sri Handayani. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dalle, Jusman. (2011). Infrastruktur dan Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah. 9 Juni 2013. <http://news.detik.com/read/2011/11/02/105050/1758145/471/>
- Darwanto, & Yulia Yustikasari. (2007). Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Decentralization Support Facility, Kementerian Keuangan & LPEM FEUI. (2010, September). *Bagaimana Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal?*. Dipersentasikan pada Pelatihan Analisis Data Keuangan 2010, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2010). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited). Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. 16 Juni 2013. <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Buku Pegangan 2011: Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). *Pelengkap Buku Pegangan 2013: Affirmative Policy dalam Percepatan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Fauzi, Gamawan (2013, April 10). Mendagri Minta Belanja Modal sampai 30%. Disampaikan pada konferensi pers dengan wartawan. 9 Juni 2012. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/30/2/150501/>
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics. 4th Edition*. New York: McGraw-Hill
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, David & Priyo Hari Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan PerKapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Ismail, Abd. Ghafar B., & Muhammad Zilal Hamzah. (2006). Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia. *Review of Islamic Economics*. 10 (2), 133-152. Januari 25, 2013. [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id).
- Ja'far, Marwan. (2012, Juli 10). Infrastruktur daerah Berdampak bagi pertumbuhan Ekonomi. AntaraNEWS, Jakarta. Juni, 16, 2013. <http://www.antaraneews.com/berita/320861/>
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Latif, Adam. (2012, Desember 3). Perlunya Solusi Pembiayaan Infrastruktur dalam Mendukung Akselerasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Disampaikan pada diskusi PIP di Jakarta.
- Martowradojo, Agus. (2011). Belanja Pegawai Harus Lebih Efisien. 9 Juni 2012. <http://www.antaraneews.com/berita/273057/>
- Nachrowi, Nachrowi D. & Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. No.1Vol (3).
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal AKuntansi dan Auditin Indonesia*. Vol. 8.
- Prayitno, Hadi. (2012). Empat Usulan Fitra Tekan Pemborosan Belanja Pegawai. Disampaikan pada pres rilis BeritaSatu. 9 Juni 2013. <http://www.beritasatu.com/politik/41443>

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar
- \_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- \_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Safina. (2012). *Validasi Metode Syarat Sebuah Laporan Penelitian*. 7 Juli 2013. <http://netsains.net/2012/04/validasi-metode-syarat-sebuah-laporan-penelitian.htm>
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPP Versi 20*. Jakarta : PT Gramedia.
- Sekaran, Uma, & Roger Bougie. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fifth Edition*. Wiley.
- Sidik, Machfud. (2002, April). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Dipresentasikan pada Seminar Nasional: Public Sector Scorecard, Jakarta.
- Sirait, Hasanuddin. (2011). Statistik untuk Pengguna. 16 Juni 2013. <http://hsirait.wordpress.com/statistik-pengguna/>
- Suliyanto. (2011) *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI
- Suwardi, Akbar (2011). *STATA: Tahapan dan Perintah (Syntax) Data Panel*. Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi, FEUI.
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol.1 No.2, 142-155.
- Wahyuni, & Priyo Hari Adi. (2009, Oktober). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil. Dipresentasikan pada The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1, Edisi 7. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. No.1 Vol (3).
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*. January 25, 2013, from [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Winarno, Wing Wahyu. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews, Edisi 3. UPP STIM YKPN.
- Yovita, Farah Marta & Dwi Cahyo Utomo. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro.

## LAMPIRAN

Tabel 1 Rincian Penyaringan Sampel

Data kabupaten/kota di Indonesia selama 5 tahun	2.457
Kabupaten/kota yang mengalami pemekaran wilayah	<u>36</u>
Kabupaten/kota belum beroperasi setelah mengalami pemekaran wilayah	<u>22</u>
	2.399
Data LRA masih dalam proses penyusunan	118
Data LRA (PAD, DAU, DAK, DBH, atau Belanja Modal) tidak lengkap	36
Data Jumlah Penduduk tidak lengkap	13
Data Luas Wilayah tidak lengkap	<u>9</u>
Sampel Akhir	2.223

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Dev.
BMODAL	2223	0,0118	0,6180	0,2296	0,2158	0,1159
MANDIRI	2223	0,0018	0,7598	0,0635	0,0472	0,0604
DAU	2223	0,0002	0,8767	0,6042	0,6392	0,1444

DAK	2223	0,0001	0,3310	0,0740	0,0730	0,0440
DBH	2223	0,0073	0,9189	0,1252	0,0717	0,1419
BPEGAWAI	2223	0,0172	0,9255	0,5194	0,5360	0,1441
POP	2223	6.393	4.763.209	483.293,7	261.776	566.131
LUAS	2223	16,06	44.071	3.870,67	1.893,95	5.870
Valid N (listwise)	2223					

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.7.1

Tabel 3 Rincian Variabel Belanja Modal

BMODAL				
NO	KAB/KOTA	MAX	KAB/KOTA	MIN
1	Luwu Timur	0,6180	Tana Karo	0,0118
2	Mamberamo Raya	0,6169	Tapanuli Tengah	0,0145
3	Nunukan	0,6148	Tanjung Balai	0,0183
4	Intan Jaya	0,6134	Langkat	0,0189
5	Tambrau	0,5958	Bengkayang	0,0205
6	Teluk Wondama	0,5921	Yogyakarta	0,0212
7	Buru Utara	0,5888	Kudus	0,0213
8	Wakatobi	0,5883	Lumajang	0,0220
9	Raja Ampat	0,5853	Buleleng	0,0239
10	Kepulauan Sula	0,5714	Trenggalek	0,0245

Sumber: DJPK, 2012

Tabel 4 Ringkasan Output Hasil Pengujian dengan *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: BMODAL?				
Sample: 2008 2012				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 445				
Total pool (unbalanced) observations: 2223				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.679030	0.020731	32.75394	0.0000
MANDIRI?	-0.207493	0.026923	-7.706788	0.0000
DAU?	-0.041222	0.010899	-3.782180	0.0002
DAK?	0.099654	0.023945	4.161842	0.0000
DBH?	-0.077498	0.012690	-6.107128	0.0000
BPEGAWAI?	-0.725649	0.008390	-86.48888	0.0000
LNPOP?	-0.000572	0.001388	-0.412045	0.6804
LNLUAS?	-0.003386	0.001155	-2.930913	0.0034
Weighted Statistics				
R-squared	0.945402	Mean dependent var		0.322217
Adjusted R-squared	0.931498	S.D. dependent var		0.232343
F-statistic	67.99589	Durbin-Watson stat		2.059827
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Pengolahan data dengan Eviews v.7

Tabel 5 Ringkasan Output Perbandingan atas Perbedaan Perlakuan Data

Variable (1)	Coefficient (2)	Coefficient (3)	Coefficient (4)
Pengukuran data	Persentase	Growth	Rupiah
C	0.679030*	0.022653	-2.56E+10*
MANDIRI?	-0.207493*	-0.279287*	0.041940*
DAU?	-0.041222*	-0.123046*	-0.282192*
DAK?	0.099654*	0.045390	0.097111*
DBH?	-0.077498*	-0.114818*	0.093449*
BPEGAWAI?	-0.725649*	-0.815043*	-0.004991
LNPOP?	-0.000572	-0.002607	85435.36*
LNLUAS?	-0.003386*	0.000727	-16535.39
Weighted Statistics			
R-squared	0.945402	0.718726	0.792664
Adjusted R-squared	0.931498	0.574970	0.739894
S.E. of regression	0.043934	0.046070	5.57E+10
F-statistic	67.99589	4.999641	15.02107
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000	0.000000

\* signifikan pada level 5%. Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews v.7.1

Penjelasan tabel3, kolom (1) adalah jenis variabel independen yang termasuk dalam penelitian, kolom (2) adalah ringkasan hasil penelitian dengan menggunakan data persentase. Perlakuan data ini sesuai dengan pengolahan data yang dilakukan oleh Ardhini dan Handayani (2011). Hasil pengujian ini yang selanjutnya dianalisis sebagai hasil penelitian. Kolom (3) adalah pengujian dengan menggunakan data *growth*. Sedangkan, kolom (4) adalah pengujian dengan menggunakan nilai rupiah. Pengolahan data dengan nilai rupiah dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012), Nuarisa (2013), dan Wandira (2013).